REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008

(Audited)

11 JUNI 2009

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008

(Audited)

11 JUNI 2009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LKPP disampaikan Presiden kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 27 Maret 2009, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2008 untuk diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini "tidak menyatakan pendapat *(disclaimer)*" atas LKPP Tahun 2008. Walaupun demikian, BPK juga mengakui bahwa dalam tahun 2008, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut: (1) tidak membatasi lingkup pemeriksaan Penerimaan dan Piutang Pajak; (2) menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); (3) menyempurnakan aplikasi administrasi penerimaan perpajakan; (4) mengungkapkan secara memadai belanja di luar mekanisme APBN yang berasal dari rekening antara penerimaan; (5) menertibkan rekening pemerintah; (6) menyajikan sebagian besar penyertaan modal negara berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; (7) menyelesaikan inventarisasi dan revaluasi atas sebagian aset tetap; dan (8) menyempurnakan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri.

Sehubungan dengan LKPP Tahun 2008 *(Audited)* ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. LKPP Tahun 2008 *(Audited)* ini disusun berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (K/L), termasuk laporan keuangan BLU, dan informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang telah diaudit, kecuali Laporan Keuangan BPK (BA 004) dan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias (BA 094) yang sampai laporan keuangan ini disusun belum selesai diaudit.
2. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi *audited* tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp981,61 triliun, atau mencapai 109,68 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp985,73 triliun, atau 99,62 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp4,12 triliun;
3. Neraca menyajikan informasi *audited* tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp2.071,70 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.693,69 triliun, sehingga Ekuitas Dana Neto (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp378,01 triliun;
4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi *audited* tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa kenaikan Kas Negara selama TA 2008 adalah sebesar Rp51,77 triliun, dari saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp24,06 triliun, sehingga saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp75,83 triliun;
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian

tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas serta Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2008 *(Audited)* ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada LKPP Tahun 2008 *(Audited)* ini juga diinformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP tahun sebelumnya. Selain itu, pada LKPP Tahun 2008 *(Audited)* diinformasikan mengenai kemajuan kegiatan *(progress)* penertiban rekening Pemerintah sampai dengan akhir Tahun 2008 termasuk kejadian setelah tanggal laporan *(subsequent events)* sampai dengan 25 Mei 2009 yang disajikan secara tersendiri serta Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dalam bentuk suplemen.

Pemerintah menyadari bahwa LKPP Tahun 2008 *(Audited)* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna *(stakeholders)* LKPP ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

INDEKS ISI

KATA PENGANTAR iii

INDEKS ISI v

INDEKS TABEL vi

INDEKS GRAFIK vii

INDEKS DAFTAR ix

INDEKS SINGKATAN viii

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xiv

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT xviii

RINGKASAN 1

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 5

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 6

I. LAPORAN REALISASI APBN 7

II. NERACA 9

III. LAPORAN ARUS KAS 11

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 13

A. PENJELASAN UMUM 13

A.1. DASAR HUKUM 13

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 13

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 45

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 50

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 61

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 61

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 62

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 81

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 86

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 86

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 87

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 130

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN 142

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 143

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 143

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 145

DAFTAR 163

INDEKS TABEL

1.	Realisasi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2006 – 2008	28
2.	Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Sektor Rill Tahun 2008	42
3.	Presentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2008 terhadap PDB	43
4.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2008 dan 2007	44
5.	Daftar 10 Besar BUMN Penghasil Deviden TA 2008	65
6.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2008 dan 2007	68
7.	Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2008 dan 2007	88
8.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak per 31 Desember 2008 dan 2007	92
9.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai per 31 Desember 2008 dan 2007	93
10.	Posisi Utang Luar Negeri dan SBN per 31 Desember 2008 dan 2007	124
11.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Mata Uang Asing per 31 Desember 2008 dan 2007	125
12.	Saldo Anggaran Lebih TA 2008 dan 2007	125
13.	Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2008	410

INDEKS GRAFIK

1.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005 - 2008	15
2.	Tren Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	15
3.	Struktur Produk Domestik Bruto menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008	16
4.	Struktur Produk Domestik Bruto menurut Komponen Penggunaan Tahun 2007	16
5.	Komparasi Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan	17
6.	Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2008	17
7.	Perbandingan PDB per Kapita Tahun 2005-2008	18
8.	Non Performing Loan (NPL) Tahun 2008	19
9.	Loan to Deposit Ratio (LDR) Tahun 2008	19
10.	Peringkat Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi Tahun 2008	20
11.	Realisasi PMA Berdasarkan Kawasan Negara	20
12.	Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2008	21
13.	Perbandingan Laju Inflasi Tahunan	22
14.	Tren Laju Inflasi Bulanan	22
15.	Tren Pergerakan Nilai Tukar Rupiah	23
16.	Rasio Utang Terhadap PDB	24
17.	Perkembangan Tax Ratio Tahun 2006 – 2008	30
18.	Plot Diagram Rasio Penyerapan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	32
19.	Tren Penyerapan Belanja Negara TA 2008	33
20.	Tren Penyerapan Belanja Pegawai TA 2008	34
21.	Tren Penyerapan Belanja Barang TA 2008	34
22.	Tren Serapan Belanja Modal TA 2008	34
23.	Tren Serapan Belanja Subsidi TA 2008	35
24.	Tren Penyerapan Transfer ke Daerah TA 2008	35
25.	Perbandingan Realisasi Belanja terbesar pada 10 Kementerian Negara/Lembaga TA 2007 dan 2008	38
26.	Perbandingan DBH, DAU, dan DAK	39
27.	Perbandingan Dana Perimbangan dan Otsus Penyesuaian	39
28.	Persentase Defisit APBN terhadap PDB Tahun 2004 - 2008	40
29.	Defisit dan Keseimbangan Primer	40
30.	Tren Pembiayaan Tahun Anggaran 2006-2008	41
31.	Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Riil	42
32.	Perkembangan Suspen Tahun 2006-2008	43
33.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2004-2008	61
34.	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2004-2008	62
35.	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008	63
36.	Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2008	67
37.	Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2008	68
38.	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2008	69

39.	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2008	69
40.	Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2008	74
41.	Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Satker Badan Layanan Umum TA 2007 dan 2008	83
42.	Komposisi Pendapatan Badan Layanan Umum TA 2008	83
43.	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2004 - 2008	86
44.	Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum per 31 Desember 2007 dan 2008	133
45.	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	144
46.	Struktur Outstanding Obligasi Negara Rupiah Seri FR	402
47.	Struktur Jatuh Tempo Obligasi Negara Rupiah Seri FR	402
48.	Struktur Outstanding ORI	403
49.	Struktur Jatuh Tempo ORI	404
50.	Struktur Outstanding Zero Coupon (ZC)	404
51.	Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC)	405
52.	Struktur Outstanding VR	405
53.	Struktur Jatuh Tempo VR	406
54.	Struktur Outstanding SPN	406
55.	Struktur Outstanding SUP	407
56.	Struktur Jatuh Tempo SUP	407
57.	Struktur Outstanding SBSN	408
58.	Struktur Outstanding SBN Valas	408
59.	Struktur Jatuh Tempo SBN Valas	409
60.	Struktur Outstanding SBN Rupiah	409
61.	Struktur Outstanding SBN	409

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008 163
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 175
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2008 198
4. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2008 265
5. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2008 271
6. Data Rincian Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerjasama 273
7. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 278
8. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 280
9. Rincian Piutang Pajak, Diusulkan Penghapusan, Dihapuskan, Daluwarsa, dan Keberatan/Banding 281
10. Piutang Minyak Bumi dan Gas Alam per 31 Desember 2008 282
11. Piutang Laba BUMN per 31 Desember 2008 284
12. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 286
13. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 287
14. Bagian Lancar Pinjaman SLA, RDI, dan RPD Menurut Sektor Peminjam 288
15. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi 289
16. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 290
17. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDI, dan RPD per 31 Desember 2008 292
18. Rekening Dana Bergulir yang dikelola Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman 293
19. Rincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 31 Desember 2008 295
20. Penerimaan Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK-Dana Eks SU-005 296
21. Penyertaan Modal Negara pada BUMN 297
22. Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN (Minoritas) 302
23. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional 303
24. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 304
25. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 316
26. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 317
27. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 31 Desember 2008 319
28. Rekening Dana Cadangan per 31 Desember 2008 329
29. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 330
30. Ringkasan Aset Negara Ex-BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari – 31 Desember 2008 332
31. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi 333
32. Rincian Aset KKKS per 31 Desember 2008 334
33. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2008 336
34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2008 337
35. Utang Bunga Surat Berharga Negara per 31 Desember 2008 338

36. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2008 341
37. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara 344
38. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya 350
39. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU 357
40. Rincian Aset Bekas Milik Asing/Cina 362
41. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2007 366
42. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2008 377

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CFO		*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
COO		*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	:	*Electronic Data Exchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L		Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang

KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MAK	:	Mata Anggaran Pengeluaran
MAP	:	Mata Anggaran Penerimaan
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	*United State Dolar*
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	62
Catatan	B.2.1.1	**Penerimaan Perpajakan**	63
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	63
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	64
Catatan	B.2.1.2	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	64
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	64
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	65
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	66
Catatan	B.2.1.3	**Penerimaan Hibah**	66

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	67
Catatan	B.2.2.1	**Belanja Pemerintah Pusat**	67
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	69
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	70
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	70
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	71
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	71
Catatan	B.2.2.1.6	Bantuan Sosial	73
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Lain-lain	73
Catatan	B.2.2.2	**Transfer ke Daerah**	74
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	74
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	74
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	74
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	75
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	75
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	75
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	75
Catatan	B.2.2.3	Suspen	75

Surplus (Defisit) Anggaran

Catatan	B.2.3	**Surplus (Defisit) Anggaran**	76

Pembiayaan

Catatan	B.2.4	**Pembiayaan**	76
Catatan	B.2.4.1	**Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**	76
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	77
Catatan	B.2.4.1.2	Penerusan Pinjaman	77
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	77
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	78
Catatan	B.2.4.1.5	Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	78
Catatan	B.2.4.1.6	Pembiayaan Lain-lain	78
Catatan	B.2.4.2	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	79
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	79

Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	79
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	80
Catatan	B.2.4.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	80

SiLPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	81

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	81

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	87
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	87
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya	87
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	90
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	90
Catatan	C.2.6	Kas Pada BLU	91
Catatan	C.2.7	Uang Muka dari Rekening BUN	91
Catatan	C.2.8	Piutang Pajak	92
Catatan	C.2.9	Piutang Bukan Pajak	94
Catatan	C.2.10	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	96
Catatan	C.2.11	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	96
Catatan	C.2.12	Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	97
Catatan	C.2.13	Uang Muka Belanja	97
Catatan	C.2.14	Piutang dari Kegiatan BLU	98
Catatan	C.2.15	Piutang Lain-lain	98
Catatan	C.2.16	Investasi Jangka Pendek BLU	100
Catatan	C.2.17	Persediaan	100
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.18	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	101
Catatan	C.2.19	Dana Bergulir	102
Catatan	C.2.20	Investasi Non Permanen Lainnya	104
Catatan	C.2.21	Investasi Permanen PMN	105
Catatan	C.2.22	Investasi Permanen BLU	107
Catatan	C.2.23	Investasi Permanen Lainnya	107
Catatan	C.2.24	**Aset Tetap**	108
Catatan	C.2.25	**Aset Lainnya**	109

KEWAJIBAN

		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.26	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	116
Catatan	C.2.27	Utang Kepada Pihak Ketiga	116
Catatan	C.2.28	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	117
Catatan	C.2.29	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	117
Catatan	C.2.30	Utang Biaya Pinjaman	118
Catatan	C.2.31	Utang Subsidi	119
Catatan	C.2.32	Utang Surat Perbendaharaan Negara	120
Catatan	C.2.33	Utang Jangka Pendek Lainnya	120

		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	C.2.34	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	121
Catatan	C.2.35	Utang Kepada Dana Pensiun dan Program THT	123
Catatan	C.2.36	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	123
Catatan	C.2.37	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	124
Catatan	C.2.38	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	124

EKUITAS

		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.39	SAL	125
Catatan	C.2.40	SiLPA (SiKPA)	126
Catatan	C.2.41	Dana Lancar Lainnya	126
Catatan	C.2.42	Cadangan Piutang	127
Catatan	C.2.43	Cadangan Persediaan	127
Catatan	C.2.44	Pendapatan yang Ditangguhkan	127
Catatan	C.2.45	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	128
Catatan	C.2.46	Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	128
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.47	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	128
Catatan	C.2.48	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	129
Catatan	C.2.49	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	129
Catatan	C.2.50	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	129
Catatan	C.2.51	Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	129

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	130
Catatan	C.4	Kejadian penting Setelah Tanggal Pelaporan	142

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	145
Catatan	D.2.2	PNBP	148
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	150
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	150
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	151
Catatan	D.2.6	Bunga Utang	151
Catatan	D.2.7	Subsidi	152
Catatan	D.2.8	Bantuan Sosial	153
Catatan	D.2.9	Belanja Lain-Lain	153
Catatan	D.2.10	Bagi Hasil Pajak	153
Catatan	D.2.11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	154
Catatan	D.2.12	Dana Alokasi Umum	154
Catatan	D.2.13	Dana Alokasi Khusus	154
Catatan	D.2.14	Dana Otonomi Khusus	155
Catatan	D.2.15	Dana Penyesuaian	155

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.16	Penjualan Aset Tetap	155
Catatan	D.2.17	Belanja Aset Tetap	156

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.18	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	156
Catatan	D.2.19	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	158
Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	159
Catatan	D.2.21	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	159
Catatan	D.2.22	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	159
Catatan	D.2.23	Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	159
Catatan	D.2.24	RDI/RPD	159
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	159

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.26	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	160
Catatan	D.2.27	PFK Prefinancing dan PFK Lainnya	160
Catatan	D.2.28	Kiriman Uang	161
Catatan	D.2.29	Transito	161
Catatan	D.2.30	Penempatan Dana Pemerintah	162

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Yth. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yth. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Yth. Presiden Republik Indonesia

Lingkup dan Tanggung Jawab

01 Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 dan 2007, Laporan Realisasi APBN (LRA), dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah.

Opini BPK Tahun 2007

02 Dalam Laporan BPK Nomor: 26a/LHP/XV/05/2008 tanggal 21 Mei 2008, BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2007 karena permasalahan yang berkaitan dengan: (1) pembatasan lingkup pemeriksaan oleh Pemerintah; (2) proses penyusunan LKPP; (3) penerimaan perpajakan; (4) belanja di luar mekanisme APBN; (5) rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga; (6) investasi permanen penyertaan modal negara; (7) aset tetap; (8) aset lain-lain KKKS; (9) utang jangka panjang luar negeri; dan (10) sisa anggaran lebih.

03 Dalam tahun 2008, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut: (1) tidak membatasi lingkup pemeriksaan Penerimaan dan Piutang Pajak; (2) menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); (3) menyempurnakan aplikasi administrasi penerimaan perpajakan; (4) mengungkapkan secara memadai belanja di luar mekanisme APBN yang berasal dari rekening antara penerimaan; (5) menertibkan rekening pemerintah; (6) menyajikan sebagian besar penyertaan modal negara berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; (7) menyelesaikan inventarisasi dan revaluasi atas sebagian aset tetap; dan (8) menyempurnakan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri.

Penerimaan Pajak

04 Sebagaimana diungkapkan dalam catatan B.2.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah melaporkan Penerimaan Perpajakan tahun 2008 sebesar Rp658,70 triliun. Dalam Penerimaan Perpajakan tersebut diantaranya terdapat Penerimaan Perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp571,11 triliun. DJP mencatat Penerimaan Perpajakan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berdasarkan aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Terdapat beberapa kelemahan dalam pencatatan transaksi pada aplikasi MPN. Hasil rekonsiliasi antara data penerimaan menurut MPN dan data penerimaan menurut Kas Umum Negara pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) menunjukkan adanya perbedaan data penerimaan yang dihasilkan oleh kedua sistem tersebut, yaitu terdapat 64.313 transaksi senilai Rp2,99 triliun yang tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan 101.423 transaksi senilai Rp3,43 triliun yang tercatat di SAU tetapi tidak tercatat di SAI. Pemeritah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas tidak terekonsiliasinya data SAI dan SAU. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas data penerimaan yang tidak dapat direkonsiliasi tersebut.

Pembebanan PBB ke rekening antara migas dan panas bumi

05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.1.1.1 dan Catatan C.2.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengakui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 sebesar Rp25,35 triliun. Dari jumlah tersebut diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari PBB Minyak dan Gas Bumi (migas) serta PBB Panas Bumi sebesar Rp5,33 triliun atas area/blok yang belum berproduksi. Pengakuan pendapatan tersebut dilakukan dengan cara membebani rekening antara penerimaan migas (rekening 600.000411) dan rekening antara penerimaan panas bumi (rekening 508.000084). Pengakuan pendapatan dengan membebani rekening antara penerimaan tersebut tidak dapat dilakukan karena untuk PBB atas area/blok yang belum berproduksi seharusnya menjadi beban Pemerintah melalui mekanisme APBN. Dengan perlakuan seperti tersebut di atas, maka terdapat beban Pemerintah atas PBB migas dan panas bumi yang tidak dilaporkan dalam LRA.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

06 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.4.2.1 atas Laporan Keuangan, penarikan pinjaman luar negeri tahun 2008 adalah sebesar Rp50,22 triliun. Jumlah tersebut merupakan angka yang berasal dari penatausahaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SP3 dan SP2D tersebut tidak didasarkan atas dokumen sumber yang valid dan mutakhir. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)

juga melakukan administrasi pencatatan pinjaman luar negeri, dimana data penarikan pinjaman luar negeri tahun 2008 menurut DJPU adalah sebesar Rp51,75 triliun. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan adanya penarikan pinjaman antara data DJPB dengan DJPU yang tidak terekonsiliasi sebesar Rp27,88 triliun. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas data penarikan pinjaman yang tidak dapat direkonsiliasi tersebut.

Aset Tetap

07 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.24 atas Laporan Keuangan, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp673,37 triliun yang merupakan aset tetap berdasarkan neraca kementrian negara/lembaga. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara pada 10.254 dari 22.307 satuan kerja yang ada. Hasil revaluasi pada 10.254 satuan kerja tersebut menghasilkan penambahan nilai aset tetap sebesar Rp125,59 triliun, dimana sebanyak 2.054 satuan kerja telah membukukan hasil revaluasi tersebut senilai Rp48,27 triliun sedangkan sebanyak 8.200 satuan kerja belum membukukan hasil revaluasi senilai Rp77,32 triliun. Dalam aset tersebut, diantaranya terdapat aset pada kementerian negara/lembaga senilai Rp15,97 triliun yang belum dapat dijelaskan keberadaannya oleh satuan kerja terkait. Nilai aset tetap akan berbeda secara signifikan jika seluruh satuan kerja telah melakukan inventarisasi dan revaluasi atas aset tetap dan hasilnya telah dibukukan sebagaimana mestinya.

Aset Lain-lain

08 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.25 atas Laporan Keuangan, Aset Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp422,23 triliun diantaranya merupakan aset KKKS sebesar Rp303,39 triliun, aset PT PPA sebesar Rp5,06 triliun, dan aset Tim Koordinasi Departemen Keuangan sebesar Rp7,36 triliun. Aset KKKS merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam (migas) yang dikelolah oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah). Berdasarkan data BPMIGAS aset tersebut bernilai Rp303,39 triliun. Sedangkan aset PT PPA dan aset Tim Koordinasi merupakan aset pemerintah eks BPPN dengan nilai yang dicatat sebesar Rp12,42 triliun. Terhadap aset KKKS dan aset eks BPPN, pemerintah juga tidak mengadministrasikan secara memadai atas aset eks BPPN dan belum memiliki kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran atas aset KKKS. BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset KKKS dan eks BPPN tersebut.

Sisa Anggaran Lebih

09 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.39 atas Laporan Keuangan, Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2008 sebesar Rp94,62 triliun. Jumlah tersebut berbeda sebesar Rp474,29 miliar dengan jumlah yang tercantum dalam saldo rekening-rekening SAL sebesar Rp95,09 triliun. Perbedaan tersebut terjadi setiap tahun sejak Tahun Anggaran 2004 dengan akumulasi selisih sebesar Rp5,42 triliun yang tidak dapat dijelaskan oleh pemerintah.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2008

10 Karena adanya kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4 sampai dengan 9 di atas, lingkup pemeriksaaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan, pendapat atas LKPP Tahun 2008 dan 2007.

LHP SPI dan Kepatuhan

11 Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor 25/02/LHP/XV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 dan Nomor 25/03/LHP/XV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Anggota,

I Gusti Agung Rai
Akuntan Register Negara No. D-1.360

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2008, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2008 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2008 (*Audited*) ini disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan seluruh kementerian negara/ lembaga, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah, yang telah diaudit, kecuali Laporan Keuangan BPK (BA 004) dan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias (BA 094) yang sampai laporan keuangan ini disusun belum selesai diaudit.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2008 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2008.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2008 adalah sebesar Rp981,61 triliun, atau mencapai 109,68 persen dari APBN-P TA 2008. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2008 adalah sebesar Rp985,75 triliun, atau 99,62 persen dari APBN-P TA 2008. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp693,36 triliun atau 99,47 persen dari APBN-P TA 2008, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp292,43 triliun atau 100,00 persen dari APBN-P TA 2008. Dalam Belanja Negara terdapat Suspen sebesar minus Rp58,72 miliar.

Realisasi Defisit Anggaran TA 2008 adalah sebesar Rp4,12 triliun, sedangkan dalam APBN-P TA 2008 dianggarkan defisit sebesar Rp94,50 triliun.

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2008 adalah sebesar Rp84,07 triliun atau 88,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp94,50 triliun, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp79,95 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2008 dan 2007 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

			TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Uraian	**Anggaran (UU No. 16/2008)**	**Realisasi**	**% Realisasi thd Anggaran**	**Realisasi**
Pendapatan Negara dan Hibah	894,99	981,61	109,68%	707,81
Belanja Negara	989,49	985,73	99,62%	757,65
Belanja Pemerintah Pusat	697,07	693,36	99,47%	504,62
Transfer ke Daerah	292,42	292,43	100,00%	253,26
Suspen Belanja Negara	-	(0,06)	-	(0,24)
Surplus (Defisit) Anggaran	(94,50)	(4,12)	4,36%	(49,84)
Pembiayaan Neto	94,50	84,07	88,96%	42,46
SiLPA (SiKPA)	-	79,95	-	(7,39)

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah Aset per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp2.071,70 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp264,07 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp712,04 triliun; Aset Tetap sebesar Rp673,36 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp422,23 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.693,69 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp181,34 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.512,35 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp378,01 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp82,73 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp295,28 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008, 31 Desember 2007, dan 31 Desember 2007 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)	% Kenaikan (Penurunan)
Aset	**2.071,70**	**1.600,21**	**29,46%**
Aset Lancar	264,07	156,60	68,63%
Investasi Jangka Panjang	712,04	691,34	2,99%
Aset Tetap	673,36	443,49	51,83%
Aset Lainnya	422,23	308,78	36,74%
Kewajiban	**1.693,69**	**1.430,96**	**18,36%**
Kewajiban Jangka Pendek	181,34	139,73	29,78%
Kewajiban Jangka Panjang	1.512,35	1.291,23	17,12%
Ekuitas Dana Neto	**378,01**	**169,25**	**123,34%**
Ekuitas Dana Lancar	82,73	16,87	390,40%
Ekuitas Dana Investasi	295,28	152,38	93,78%

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2008 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2008.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp75,83 triliun yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp51,77 triliun dari saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp24,06 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp68,56 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp72,68 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp84,07 triliun, dan penurunan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp28,17 triliun, serta koreksi pembukuan sebesar Rp8,52 miliar.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2008 dan TA 2007 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 *(Audited)*
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU	24,06	21,55
Penambahan Saldo Awal:		
Reklasifikasi Rekening Pemerintah Lainnya di BI (dalam Valas USD)	-	3,81
Kas pada BLU	-	0,10
Saldo Awal Kas BUN & KPPN setelah Penambahan	24,06	25,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	68,56	14,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(72,68)	(64,30)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	84,07	42,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(28,17)	5,99
Koreksi Pembukuan	(0,01)	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	51,77	(1,39)
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN dan BLU	**75,83**	**24,06**

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2008 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji dalam LKPP Tahun 2008 (*Audited*) ini meliputi semua laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kecuali Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Laporan Keuangan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam – Nias yang sampai dengan laporan keuangan ini disusun belum selesai diperiksa.

Jakarta, 11 Juni 2009

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sri Mulyani Indrawati

REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008 (*AUDITED*)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian Pemerintah berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya: (1) selisih Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Saldo Kas, (2) selisih pencatatan realisasi APBN menurut Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara, (3) kewajaran penyajian aset tetap, (4) sebagian penerimaan pajak belum direkonsiliasi, dan (5) sebagian pengakuan penarikan Utang Luar Negeri belum dapat direkonsiliasi.

Berdasarkan reviu kami, kecuali pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2009

Mengetahui
Kepala

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA
REPUBLIK INDONESIA

Didi Widayadi
NIP 19490728 200607 1 001

Deputi,

Binsar H. Simanjuntak
Register Negara D-4157

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN
(*AUDITED*)

I. LAPORAN REALISASI APBN (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran (UU 16/2008)	Realisasi	TA 2008 (*Audited*) % Realisasi terhadap Anggaran	TA 2007 (*Audited*) Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**609.227.490.000.000**	**658.700.790.664.236**	**108,12%**	**490.988.634.954.090**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	580.248.290.000.000	622.358.691.313.241	107,26%	470.051.815.733.040
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	28.979.200.000.000	36.342.099.350.995	125,41%	20.936.819.221.050
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**282.814.420.373.000**	**320.604.629.562.680**	**113,36%**	**215.119.705.411.332**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	192.789.424.468.000	224.463.006.839.205	116,43%	132.883.472.731.250
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	31.244.300.000.000	29.088.370.115.749	93,10%	23.222.505.531.880
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	58.780.695.905.000	67.053.252.607.726	114,07%	59.013.727.148.202
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**2.948.635.800.000**	**2.304.013.099.221**	**78,14%**	**1.697.747.939.503**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**894.990.546.173.000**	**981.609.433.326.137**	**109,68%**	**707.806.088.304.925**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**697.071.006.590.000**	**693.355.992.079.878**	**99,47%**	**504.623.263.587.032**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	123.542.016.524.000	112.829.875.523.789	91,33%	90.424.946.964.533
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	67.476.166.364.000	55.963.472.418.939	82,94%	54.511.365.469.438
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	85.072.518.239.000	72.772.477.031.152	85,54%	64.288.669.050.730
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	94.794.224.800.000	88.429.807.846.898	93,29%	79.806.377.534.753
5. Subsidi	B.2.2.1.5	234.404.983.694.000	275.291.454.173.929	117,44%	150.214.443.691.269
6. Bantuan Sosial	B.2.2.1.6	59.702.261.289.000	57.740.756.298.045	96,71%	49.756.281.449.623
7. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.7	32.078.835.680.000	30.328.148.787.126	94,54%	15.621.179.426.686
II. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**292.422.800.083.000**	**292.433.480.615.255**	**100,00%**	**253.263.178.086.104**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1**	**278.436.098.789.000**	**278.714.658.866.600**	**100,10%**	**243.967.173.165.971**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	77.726.812.918.000	78.420.167.295.600	100,89%	62.941.953.784.545
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	179.507.144.871.000	179.507.144.871.000	100,00%	164.787.399.928.352

Uraian	Catatan	Anggaran (UU 16/2008)	Realisasi	TA 2008 (*Audited*) % Realisasi terhadap Anggaran	TA 2007 (*Audited*) Realisasi
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	21.202.141.000.000	20.787.346.700.000	98,04%	16.237.819.453.074
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	**B.2.2.2.2**	**13.986.701.294.000**	**13.718.821.748.655**	**98,08%**	**9.296.004.920.133**
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	7.510.285.794.000	7.510.285.794.000	100,00%	4.045.748.000.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	6.476.415.500.000	6.208.535.954.655	95,86%	5.250.256.920.133
III. Suspen Belanja Negara	**B.2.2.3**	-	**(58.721.608.520)**	-	**(236.528.782.258)**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**989.493.806.673.000**	**985.730.751.086.613**	**99,62%**	**757.649.912.890.878**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(94.503.260.500.000)**	**(4.121.317.760.476)**	**4,36%**	**(49.843.824.585.953)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	**B.2.4.1**	**107.616.860.500.000**	**97.288.308.876.176**	**90,40%**	**66.308.947.652.257**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	(11.700.000.000.000)	299.999.999.959	-	10.651.993.224.061
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	-	(5.189.316.203.882)	-	(2.723.357.058.788)
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	4.350.000.000.000	2.902.038.528.402	66,71%	5.416.839.483.371
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	117.790.000.000.000	85.916.261.326.762	72,94%	57.172.187.156.902
5. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.5	(2.823.139.500.000)	(2.500.020.000.000)	88,55%	(4.700.000.000.000)
6. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.6	-	15.859.345.224.935	-	491.284.846.711
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(13.113.600.000.000)**	**(13.216.560.810.171)**	**100,79%**	**(23.852.411.834.488)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	**B.2.4.2.1**	**48.141.300.000.000**	**50.218.749.931.906**	**104,32%**	**34.070.047.317.686**
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	26.390.000.000.000	30.100.439.755.174	114,06%	19.607.480.189.151
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	21.751.300.000.000	20.118.310.176.732	92,49%	14.462.567.128.535
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	**B.2.4.2.2**	**(61.254.900.000.000)**	**(63.435.310.742.077)**	**103,56%**	**(57.922.459.152.174)**
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**94.503.260.500.000**	**84.071.748.066.005**	**88,98%**	**42.456.535.817.769**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D+C)	**B.2.5**		**79.950.430.305.529**		**(7.387.288.768.184)**

REPUBLIK INDONESIA

NERACA
(*AUDITED*)

II. NERACA (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2008 (*Audited*)	31 Des 2007 (*Audited*)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	67.707.599.065.065	18.170.046.148.742
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	6.755.052.343.271	5.492.896.654.079
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	35.642.938.767.447	3.248.408.392.480
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.154.712.127.961	1.245.221.273.097
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	1.308.388.040.590	878.054.836.115
Kas pada BLU	C.2.6	2.389.096.828.525	444.767.605.022
Jumlah Kas dan Bank		114.957.787.172.859	29.479.394.909.535
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.7	3.726.790.367.113	3.405.421.282.834
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.8	55.545.222.477.952	42.042.099.564.945
Piutang Bukan Pajak	C.2.9	35.553.438.348.026	38.045.969.394.145
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.10	29.352.684	82.112.146
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.11	5.799.034.235	4.229.682.020
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.12	22.657.399.160.000	23.180.947.180.000
Uang Muka Belanja	C.2.13	115.785.550.468	1.322.504.162.418
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.14	1.453.920.244.591	-
Piutang Lain-lain	C.2.15	12.023.319.207.884	12.321.167.839.147
Jumlah Piutang		127.354.913.375.840	116.916.999.934.821
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.16	328.585.000.000	-
Persediaan	C.2.17	17.701.765.092.694	6.797.911.546.822
Jumlah Aset Lancar		**264.069.841.008.506**	**156.599.727.674.012**
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.18	50.671.978.070.000	39.533.081.330.000
Dana Bergulir	C.2.19	7.357.677.113.340	6.915.945.297.699
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.20	1.128.448.515.668	6.916.259.685.177
Jumlah Investasi Non Permanen		59.158.103.699.008	53.365.286.312.876
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.21	486.062.370.590.619	496.606.812.461.827
Investasi Permanen BLU	C.2.22	6.637.194.500	-
Investasi Permanen Lainnya	C.2.23	166.808.229.147.871	141.370.363.451.861
Jumlah Investasi Permanen		652.877.236.932.990	637.977.175.913.688
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**712.035.340.631.998**	**691.342.462.226.564**
Aset Tetap	C.2.24		
Tanah		280.977.933.438.987	126.356.123.950.050
Peralatan dan Mesin		129.575.032.964.898	128.364.176.462.694
Gedung dan Bangunan		109.119.623.581.182	74.830.730.558.020
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		107.366.714.600.033	94.082.094.925.843
Aset Tetap Lainnya		6.706.750.989.988	6.056.479.440.047
Konstruksi Dalam Pengerjaan		39.619.093.738.820	13.796.365.616.075
Jumlah Aset Tetap		**673.365.149.313.907**	**443.485.970.952.729**
Aset Lainnya	C.2.25		
Tagihan Penjualan Angsuran		554.504.816	264.984.954
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		32.729.236.792	30.048.960.054

Uraian	Catatan	31 Des 2008 (*Audited*)	31 Des 2007 (*Audited*)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		501.250.000	501.250.000
Aset Tak Berwujud		4.347.118.670.932	1.899.119.911.980
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		30.544.739.790.835	21.140.180.453.638
Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan		4.572.815.302.821	
Dana Penjaminan		167.595.976.198	291.180.426.499
Aset Lain-lain		382.566.122.418.571	285.422.216.024.595
Jumlah Aset Lainnya		**422.232.177.150.965**	**308.783.512.011.720**
JUMLAH ASET		**2.071.702.508.105.376**	**1.600.211.672.865.025**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.26	233.349.390.887	525.494.606.202
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.27	15.593.144.334.899	5.934.335.692.955
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.28	249.306.008.127	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.29	106.497.354.480.067	92.179.566.607.544
Utang Biaya Pinjaman	C.2.30	20.627.684.251.052	15.151.054.705.112
Utang Subsidi	C.2.31	12.503.315.266.224	19.146.423.391.594
Surat Perbendaharaan Negara	C.2.32	9.581.589.685.000	4.035.409.958.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.33	16.057.521.906.234	2.760.047.411.652
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**181.343.265.322.490**	**139.732.332.373.059**
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	C.2.34	855.087.515.005.382	760.348.660.533.648
Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT	C.2.35	1.398.608.374.973	1.754.377.650.427
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		856.486.123.380.355	762.103.038.184.075
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.36	655.861.868.010.166	529.115.285.469.470
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	C.2.37	-	14.808.032.952
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.38	-	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		655.861.868.010.166	529.130.093.502.422
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**1.512.347.991.390.521**	**1.291.233.131.686.497**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.693.691.256.713.011**	**1.430.965.464.059.556**
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL	C.2.39	13.370.514.138.408	18.830.302.308.895
SiLPA (SiKPA)	C.2.40	79.950.430.305.529	(7.387.288.768.184)
Dana Lancar Lainnya	C.2.41	4.723.164.674.583	16.178.589.397.550
Cadangan Piutang	C.2.42	131.081.703.742.953	120.322.421.217.655
Cadangan Persediaan	C.2.43	17.701.765.092.694	6.797.911.546.822
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.44	5.632.683.677.853	1.332.297.365.072
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.45	(149.373.584.063.086)	(139.206.837.766.857)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.46	(20.360.101.882.918)	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		**82.726.575.686.016**	**16.867.395.300.953**
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.47	712.035.340.631.998	691.342.462.226.564
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.48	673.365.149.313.907	443.485.970.952.729
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.49	422.232.177.150.965	308.783.512.011.720
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.50	(1.314.489.164.736.406)	(1.243.576.068.701.243)
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	C.2.51	(197.858.826.654.115)	(47.657.062.985.254)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**295.284.675.706.349**	**152.378.813.504.516**
EKUITAS DANA NETO		**378.011.251.392.365**	**169.246.208.805.469**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2.071.702.508.105.376**	**1.600.211.672.865.025**

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
(*AUDITED*)

III. LAPORAN ARUS KAS (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		327.497.716.210.755	238.430.926.067.905
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		209.647.424.433.640	154.526.773.832.995
c. Pajak Bumi dan Bangunan		25.354.279.618.301	23.723.546.008.858
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		5.573.095.008.708	5.953.378.541.995
e. Cukai		51.251.752.624.651	44.679.463.855.018
f. Bea Masuk		22.763.778.701.766	16.699.443.059.175
g. Pajak Ekspor		13.578.320.649.229	4.237.376.161.875
h. Pajak Lainnya		3.034.423.417.186	2.737.727.426.269
Total Penerimaan Perpajakan		658.700.790.664.236	490.988.634.954.090
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		224.463.006.839.205	132.883.472.731.250
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		29.088.370.115.749	23.222.505.531.880
c. Penerimaan PNBP Lainnya		66.964.396.171.290	58.931.533.399.166
Total PNBP		320.515.773.126.244	215.037.511.662.296
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	2.304.013.099.221	1.697.747.939.503
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**981.520.576.889.701**	**707.723.894.555.889**
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	112.773.501.584.283	90.358.606.656.075
2. Belanja Barang	D.2.5	55.887.772.437.813	54.395.453.562.207
3. Bunga Utang	D.2.6	88.352.325.843.120	79.744.341.931.244
4. Subsidi	D.2.7	275.289.975.892.789	150.214.150.451.047
5. Bantuan Sosial	D.2.8	56.929.790.831.588	49.668.943.160.212
6. Belanja Lain-Lain	D.2.9	31.096.657.038.061	15.623.762.951.481
7. Bagi Hasil Pajak	D.2.10	37.878.955.602.847	34.990.350.498.937
8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.11	40.739.618.901.261	27.951.938.003.404
9. Dana Alokasi Umum	D.2.12	179.507.144.871.000	164.808.765.128.352
10. Dana Alokasi Khusus	D.2.13	20.787.346.700.000	16.237.819.453.074
11. Dana Otonomi Khusus	D.2.14	7.510.285.794.000	4.058.348.000.000
12. Dana Penyesuaian	D.2.15	6.208.535.954.655	5.216.291.720.133
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**912.961.911.451.417**	**693.268.771.516.166**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**68.558.665.438.284**	**14.455.123.039.723**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset Tetap	D.2.16	88.856.436.436	82.193.749.036
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**88.856.436.436**	**82.193.749.036**
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Aset Tetap	D.2.17	72.768.839.635.196	64.381.141.374.712
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**72.768.839.635.196**	**64.381.141.374.712**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		**(72.679.983.198.760)**	**(64.298.947.625.676)**

Uraian	Catatan	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.18	135.897.341.832.205	132.927.083.411.932
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.19	50.218.749.931.906	34.070.047.317.686
3. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	D.2.20	55.419.279.930.448	9.261.378.112.144
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**241.535.371.694.559**	**176.258.508.841.762**
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	46.779.041.977.082	59.686.063.547.598
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.22	63.435.310.742.077	57.922.459.152.174
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.23	2.500.020.000.000	4.700.000.000.000
4. RDI/RPD	D.2.24	5.189.316.203.882	2.723.357.058.788
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	D.2.25	39.559.934.705.513	8.770.093.265.433
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**157.463.623.628.554**	**133.801.973.023.993**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		**84.071.748.066.005**	**42.456.535.817.769**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.26	(244.155.293.370)	231.158.227.155
2. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya	D.2.27	(13.385.978.626.337)	(6.600.065.456.932)
3. Kiriman Uang	D.2.28	(9.716.396.322.032)	12.180.716.476.992
4. Transito	D.2.29	172.401.563.427	180.181.670.899
5. Penempatan Dana Pemerintah	D.2.30	(5.000.000.000.000)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		**(28.174.128.678.312)**	**5.991.990.918.114**
Koreksi Pembukuan		**(8.519.253.362)**	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D + Koreksi Pembukuan)		**51.767.782.373.852**	**(1.395.297.850.070)**
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN KAS BLU		**24.062.415.000.056**	**21.548.929.469.290**
PENAMBAHAN SALDO AWAL:			
Reklasifikasi Rekening Pemerintah Lainnya di BI (dalam Valas USD)		-	3.806.594.579.799
Kas pada BLU		-	102.188.801.037
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, DAN KAS BLU SETELAH PENAMBAHAN		**24.062.415.000.056**	**25.457.712.850.126**
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN KAS BLU		**75.830.197.373.908**	**24.062.415.000.056**
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	35.642.938.767.447	3.248.408.392.480
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.154.712.127.961	1.245.221.273.097
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	1.308.388.040.590	878.054.836.115
Kas pada BLU	C.2.6	1.021.550.862.953	-
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		**114.957.787.172.859**	**29.434.099.501.748**

REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(*AUDITED*)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian yang terkendali

Walaupun diwarnai dengan *extraordinary circumstances* yakni krisis ekonomi global sebagai imbas dari krisis pasar keuangan dunia di penghujung tahun, kondisi makroekonomi secara umum selama tahun 2008 masih relatif stabil. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kondisi perekonomian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam negeri *(internal factors)* maupun yang berasal dari luar negeri *(external factors).* Faktor eksternal khususnya, yang masih terus diwarnai dengan ketidakpastian *(uncertainty)* dan tidak dapat diprediksi *(unpredictable)* telah memberikan pengaruh tersendiri terhadap kinerja perekonomian domestik tahun 2008. Sorotan sepanjang tahun 2008 terletak pada fluktuasi harga-harga komoditi dunia seperti minyak bumi, minyak sawit, gandum dan kedelai.

Implikasi krisis global terhadap Indonesia

Menghadapi perlambatan ekonomi global yang merupakan rambatan krisis *subprime mortgage* yang belum usai, di samping meneruskan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah juga berupaya mengambil langkah-langkah antisipatif dan kuratif. Walaupun tidak berdampak secara langsung, krisis ekonomi global mensyaratkan pemerintah untuk berjaga-jaga dikarenakan implikasinya terhadap kinerja ekspor nasional, *refinancing* pemerintah maupun swasta serta meningkatnya iklim kompetisi untuk memperoleh *capital* di pasar modal akibat suku bunga yang terus naik, yang secara menyeluruh akan berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia. Isu krusial yang menjadi perhatian pemerintah adalah persiapan menghadapi krisis secara lebih baik, pembuatan kebijakan yang komprehensif dengan berbagai skenario dampak krisis global yang

transparan, peningkatan pemahaman bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk peningkatan komunikasi yang intensif dengan para pelaku dan pengamat ekonomi serta pemberian respon kebijakan yang tepat terutama untuk melindungi rakyat miskin.

Dampak Krisis Subprime Mortgage diantisipasi melalui kerja sama dan pemantauan dini

Rambatan krisis *Subprime mortgage* yang berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia antara lain terdapat pada pasar valas yang cenderung menimbulkan gejolak *volatilitas* yang dapat menekan eskpor, pada bidang perbankan dimana risiko *Non Performing Loan (NPL)* meningkat. Selain itu dampak krisis tersebut berpotensi terjadi pada sektor riil yang dapat memicu kenaikan harga komoditi internasional dan berpotensi menambah defisit APBN. Di sisi lain kemampuan pemerintah untuk meminjam dana dari masyarakat dalam bentuk obligasi juga dapat menurun akibat turunnya aktivitas pasar perdana dan sekunder. Terkait dengan hal tersebut pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan dini *(surveillance)* dan juga berkoordinasi dengan negara-negara lain dalam bidang keuangan.

Sasaran intervensi kebijakan fiskal tahun 2008

Berbagai *maneuver* yang dilakukan pemerintah melalui intervensi dalam kebijakan fiskal nasional telah menghasilkan kinerja perekonomian dalam negeri yang menggembirakan sepanjang tahun 2008. Langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah memiliki sasaran untuk memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap kesinambungan APBN, memperbaiki struktur APBN dalam rangka melindungi masyarakat terutama yang berpendapatan rendah dari tekanan harga komoditas pangan dan energi serta tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Langkah antisipatif dalam menghadapi krisis ekonomi global

Dalam rangka menghadapi krisis ekonomi global, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah yang baru-baru ini diambil pemerintah sebagai respon bagi tekanan perekonomian domestik adalah dengan mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) yang bertujuan untuk mengantisipasi meluasnya dampak krisis keuangan global yang terjadi saat ini yakni untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis. Perpu itu adalah Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Pada intinya Perpu No. 3 Tahun 2008 mengatur tentang nilai simpanan yang dijamin Pemerintah; sedangkan Perpu No. 4 Tahun 2008 mengatur tentang mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Walaupun hasil dari kebijakan tersebut belum dapat terukur, kebijakan tersebut telah menimbulkan reaksi positif dari para pelaku ekonomi serta meningkatkan kredibilitas Pemerintah yang mempengaruhi kinerja perekonomian secara agregat.

Realisasi besaran sensitivitas asumsi makro ekonomi yang cukup positif

Realisasi besaran sensitivitas asumsi makro ekonomi yang digunakan sebagai acuan perhitungan APBN tahun 2008 seperti pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), nilai tukar Rupiah, harga minyak mentah Indonesia *(Indonesia Crude Oil Price/ICP)* menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Sebagai konsekuensi dari realisasi sensitivitas asumsi makro ekonomi adalah dampak positif bagi realisasi APBN tahun 2008 yang memiliki varian yang relatif kecil antara realisasi dan target yang ditetapkan yang berisi prioritas dari pembangunan tahun 2008.

Indikator utama perekonomian tahun 2008 cukup terkendali

Secara umum, indikator makro ekonomi selama tahun 2008 mengindikasikan perekonomian nasional yang cukup terkendali *(manageable)* dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan berbagai *progress* di bidang investasi yang mendorong jalannya roda perekonomian, kinerja ekspor yang menggembirakan serta terkendalinya inflasi. Hal tersebut secara simultan didukung oleh fokus kebijakan fiskal di tahun 2008 yang berorientasi pada stimulus fiskal yang lebih memberikan kelonggaran pada defisit anggaran. Kebijakan yang telah dimulai tahun 2005, sebagai pengganti konsolidasi fiskal di tahun-tahun sebelumnya memiliki sasaran untuk menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang lebih berorientasi pada ekspansi fiskal.

Pertumbuhan ekonomi 6,1 persen

Fluktuasi harga minyak dan komoditi internasional serta ketidakstabilan pasar uang global di sepanjang tahun 2008 tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berbagai gejolak perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang positif yakni mencapai 6,1 persen (lihat Grafik 1). Salah satu *chief factor* penurunan angka pertumbuhan ekonomi ini dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2007 yang mencapai 6,3 persen adalah adanya kenaikan harga BBM yang

mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun, kondisi perekonomian secara menyeluruh tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang masih dalam tingkat toleransi ini telah menstimulasi sektor riil, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

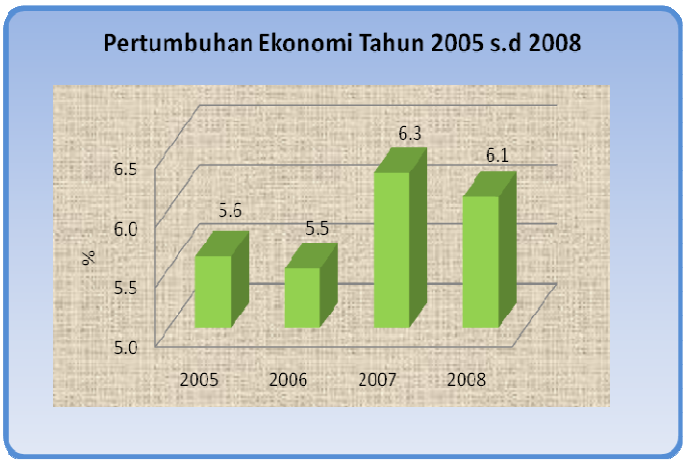

Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005 - 2008

PDB sebesar Rp4.954,0 triliun

Produk Domestik Bruto tahun 2008 mencapai Rp4.954,0 triliun, meningkat dibandingkan PDB tahun 2007 yang hanya mencapai Rp3.957,4 triliun dan tahun 2006 yang hanya berada di kisaran Rp3.338,2 triliun. Pertumbuhan yang cukup *impressive* ini antara lain didorong oleh adanya berbagai faktor seperti peningkatan daya beli masyarakat yang antara lain diakibatkan oleh *recent policy* di bidang perpajakan, stimulus peningkatan lapangan kerja, perbaikan kesejahteraan pelayan publik, termasuk program yang berpihak pada rakyat miskin seperti pemberian bantuan sosial, dan penyediaan subsidi beras kepada rakyat miskin. Tren pertumbuhan PDB dalam empat tahun terakhir disajikan dalam Grafik 2.

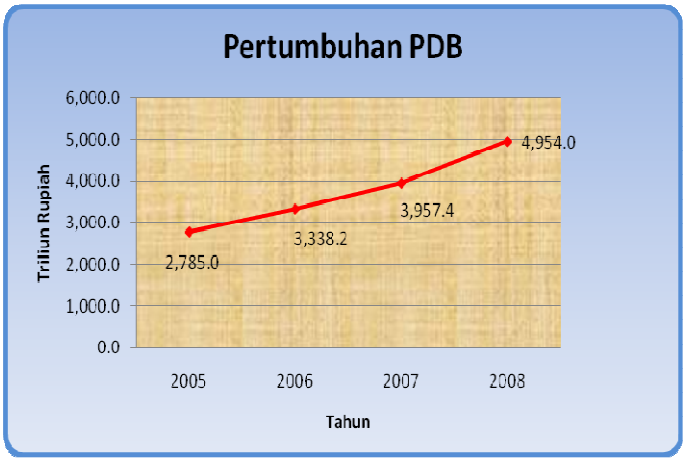

Grafik 2: Tren Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Di tahun 2008, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi meliputi konsumsi rumah tangga sebesar 61,0 persen, konsumsi Pemerintah sebesar 8,4 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 27,7 persen dan ekspor sebesar 1,2 persen. Adanya fluktuasi harga minyak dunia yang menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi di tahun 2008 dan adanya kenaikan harga BBM dan sentimen bisnis yang melemah telah berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pada

akhir tahun harga minyak dunia kembali menurun telah mengakibatkan tekanan inflasi dalam negeri yang mereda. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga *(consumption-driven economy).* Struktur PDB menurut komponen penggunaan tahun 2008 dan 2007 tergambar dalam Grafik 3 dan Grafik 4.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi 2008

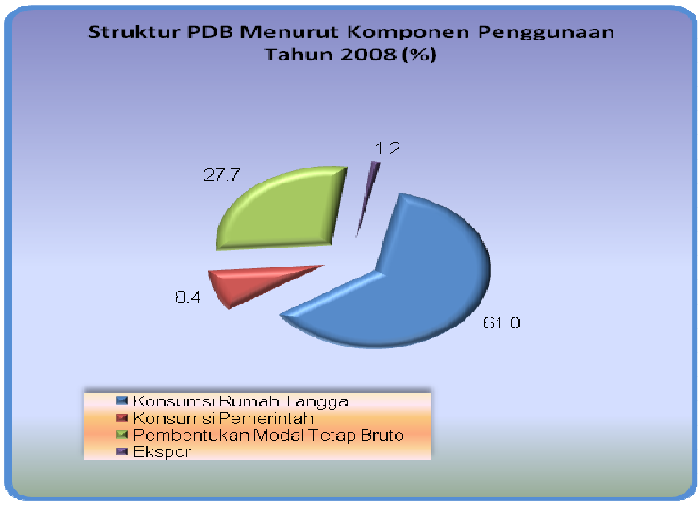

Grafik 3: Struktur Produk Domestik Bruto menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008

*Komparasi Struktur PDB menurut penggunaan yang masih didominasi oleh konsumsi (*consumption-driven economy*)*

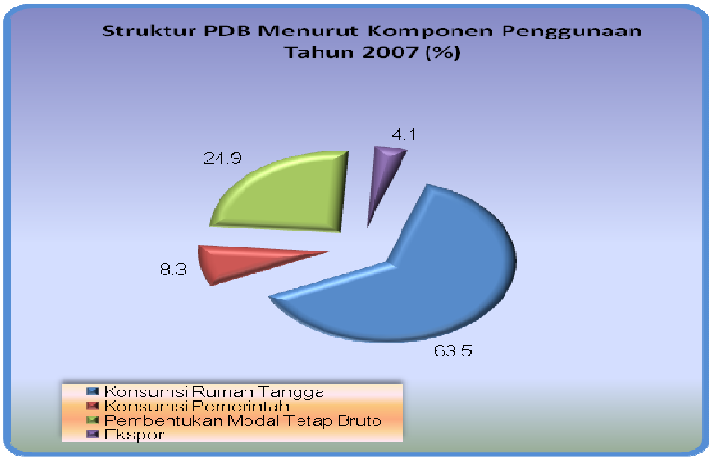

Grafik 4: Struktur Produk Domestik Bruto menurut Komponen Penggunaan Tahun 2007

Walaupun masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, sisa struktur PDB lainnya menunjukkan adanya kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto, yakni dari 24,9 persen PDB di tahun 2007 meningkat menjadi 27,7 persen terhadap total PDB sebagai hasil perbaikan kebijakan di bidang investasi yang dilakukan Pemerintah.

Struktur PDB menurut komponen penggunaan dapat terlihat di Grafik 5, dimana apabila dibandingkan dengan tahun 2007, maka konsumsi Pemerintah mengalami kenaikan yakni dari kontribusinya 8,3 persen terhadap PDB di tahun 2007 menjadi 8,4 persen terhadap PDB pada tahun 2008 yang antara lain membuktikan kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan Pemerintah sepanjang tahun 2008. Yang mengalami penurunan signifikan adalah ekspor yang sebelumnya berkontribusi 4,1 persen di tahun 2007, menjadi hanya sekitar 1,2 persen terhadap PDB yang antara lain dipengaruhi secara signifikan oleh perlambatan ekonomi dunia.

Struktur PDB menurut komponen penggunaan

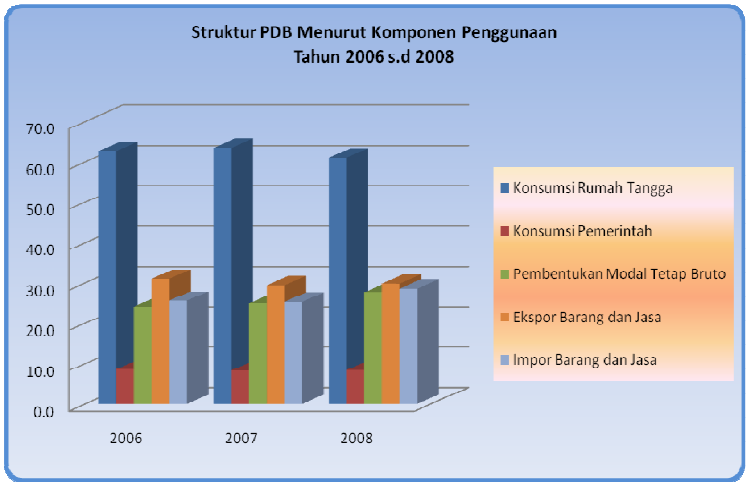

Grafik 5: Komparasi Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan

Indikasi jenis aktivitas dalam perekonomian yang menjadi penggerak utama ataupun aktivitas ekonomi yang bertumbuh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tergambar dalam struktur PDB menurut lapangan usaha (lihat Grafik 6). Pada akhir triwulan tahun 2008, Industri Pengolahan menduduki tempat pertama dengan besaran representasi 27,9 persen, diikuti dengan Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,4 persen dan Perdagangan, Hotel dan Restoran merepresentasikan 14,0 persen.

Komposisi PDB menurut lapangan usaha

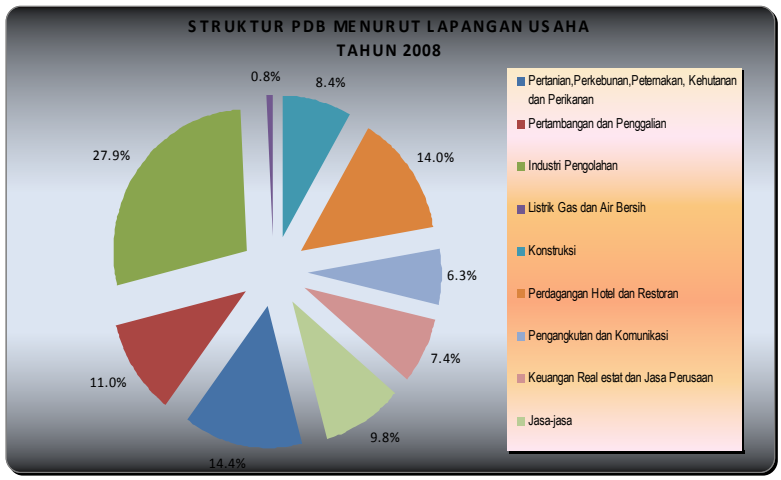

Grafik 6: Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2008

Nilai PDB per kapita yang semakin meningkat

Membaiknya perekonomian nasional juga tercermin dari nilai PDB per kapita yang semakin meningkat. Pada tahun 2008, PDB per kapita sebesar Rp21,7 juta dengan indeks peningkatan dibanding tahun sebelumnya senilai 23,6 persen. Nilai ini terus meningkat dari tahun 2007 sebesar Rp17,6 juta, tahun 2006 senilai Rp15,0 juta dan tahun 2005 sebesar Rp12,7 juta. Sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat *(people welfare),* PDB per kapita menggambarkan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dibagi dengan jumlah penduduk. Perbandingan PDB per kapita selama empat tahun terakhir disajikan dalam Grafik 7.

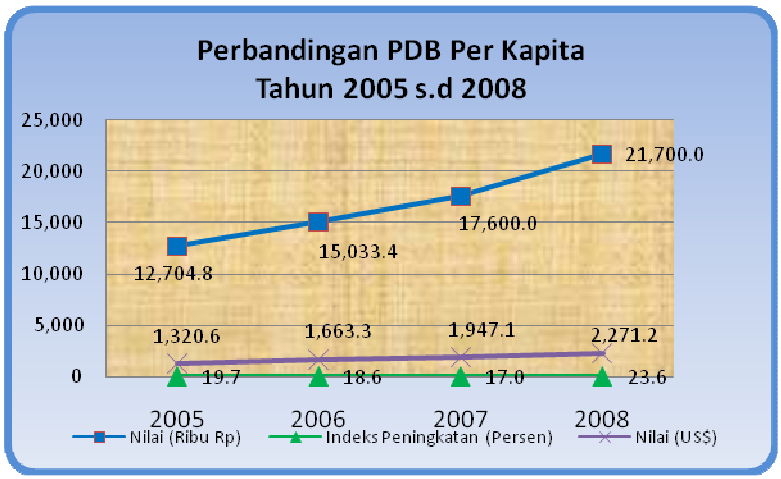

Grafik 7: Perbandingan PDB per Kapita Tahun 2005-2008

Optimalisasi pemanfaatan piranti fiskal dalam mendukung investasi

Optimalisasi pemanfaatan piranti fiskal dalam mendukung pertumbuhan investasi yang telah dilakukan Pemerintah, dibuktikan dengan terjadinya penguatan sumber-sumber investasi. Di tahun 2008, investasi tumbuh di angka 27,7 persen. Angka ini meningkat 2,8 persen dibandingkan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2007 yang berada di level 24,9 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa penguatan sumber-sumber investasi tahun 2008 tersebut adalah dampak dari dikeluarkannya serangkai kebijakan di bidang investasi seperti Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dampak utama dari serangkaian kebijakan tersebut tercermin dari kemajuan iklim investasi nasional berupa pengurangan hambatan perizinan, perbaikan adminsitrasi perpajakan dan kepabeanan, perbaikan kepastian hukum, implementasi proyek infrastruktur (antara lain seperti proyek jalan tol, telekomunikasi, listrik, air minum dan bandara), adanya peningkatan produktivitas dan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), adanya penurunan suku bunga dan stabilitas nilai tukar serta optimisme perbaikan ekonomi di tahun 2008.

Belanja Modal Pemerintah sebagai salah satu pendongkrak investasi tahun 2008

Sumber investasi lain yang cukup materiil nilainya dalam mendongkrak perekonomian tahun 2008 adalah pencairan belanja modal Pemerintah melalui APBN. Pencairan belanja modal terlihat dari realisasinya dari tahun ke tahun dimana persentase realisasi belanja modal terhadap pagu juga terus meningkat. Tidak dipungkiri bahwa walaupun relatif kecil, belanja modal Pemerintah memiliki *significant role* dalam menghasilkan sumber investasi dan mendorong pertumbuhan. Meningkatnya jumlah proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah secara tidak langsung telah mendorong peningkatan realisasi belanja modal APBN. Realisasi belanja modal dalam APBN meningkat pesat dimana pencairan mencapai Rp72,77 triliun atau sekitar 85,5 persen dari nilai pagu tahun 2008; meningkat dibandingkan tahun 2007 senilai Rp64,29 triliun atau terealisasi hanya sekitar 85,7 persen dari nilai pagu; dan tahun 2006 sebesar Rp54,95 triliun atau 82,4 persen dari nilai pagu dan tahun 2006. Salah satu kebijakan meningkatkan nilai belanja modal yang memiliki *multiplier effect* yang lebih besar dari belanja barang adalah dengan melakukan pergeseran belanja barang tidak mengikat ke dalam belanja modal dan/atau bantuan sosial. Perbaikan mekanisme penganggaran dan meningkatnya kualitas pelaporan dan penggunaan APBN yang dikarenakan oleh reformasi di bidang keuangan negara secara masif telah berbuahkan peningkatan realisasi belanja modal tersebut.

Membaiknya fungsi intermediasi perbankan

Di tengah berbagai gejolak dalam perekonomian, kondisi perbankan secara fundamental masih terjaga. Seiiring dengan perbaikan iklim investasi dan perbaikan lingkungan usaha, peran intermediasi perbankan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian secara nasional yang ditunjukkan dengan meningkatnya *Loan to Deposit Ratio (LDR)* sebesar 80,4 persen pada bulan September 2008; meningkat dibandingkan dengan LDR tahun 2007 yang hanya sekitar 56,0 persen dan LDR tahun 2006 yang hanya mencapai 53,3 persen. Dengan

semakin meningkatnya risiko perbankan juga memberikan perhatian terhadap aspek kehati-hatian *(prudential)* dalam menyalurkan kredit. Peningkatan fungsi intermediasi tersebut juga terlihat dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yakni *Non Performing Loan/NPL* yang secara konsiten juga terus mengalami penurunan. Dalam periode Januari sampai dengan September 2008 *NPL* berhasil ditekan dari 4,8 persen pada bulan Januari 2008 menjadi 3,8 persen pada bulan Desember 2008.

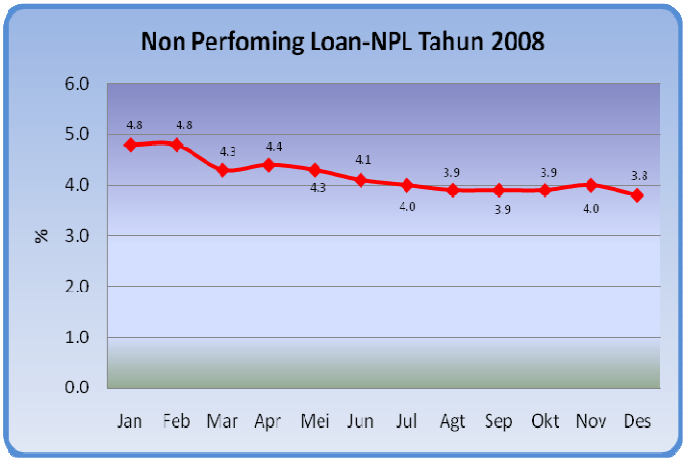

Grafik 8: Non Performing Loan (NPL) Tahun 2008

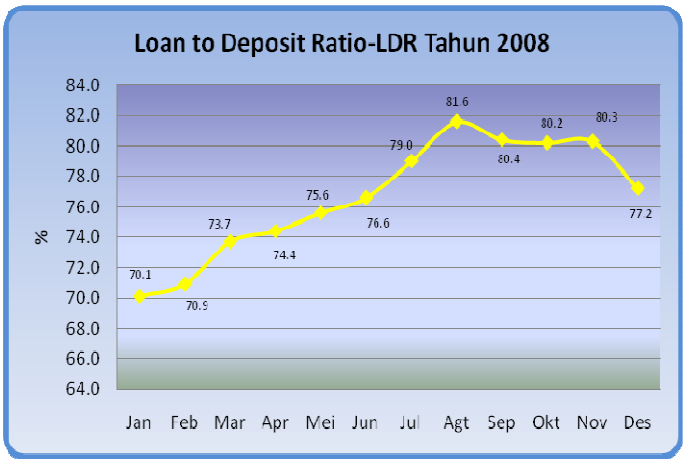

Grafik 9: Loan to Deposit Ratio (LDR) Tahun 2008

Capital Adequacy Ratio yang stabil

Indikator lain yang menunjukkan pengaruh positif perbankan terhadap perekonomian sebagai institusi intermediasi adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berada di angka 16,2 persen per Desember 2008. Stabilnya angka rasio kecukupan modal sepanjang tahun 2008 mengindikasikan bahwa kapasitas perbankan cukup baik dalam rangka mengantisipasi berbagai risiko yang ada. Hal ini berkontribusi secara langsung terhadap perekonomian melalui peran perbankan dalam memberdayakan perekonomian. Indikasi membaiknya peran intermediasi perbankan secara khusus mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah dan menjadi prioritas pembangunan tercermin jelas melalui penyaluran kredit perbankan terhadap masyarakat golongan kecil dan sangat miskin *(extreme poor).* Hal lain yang juga mencerminkan perbaikan fungsi intermediasi perbankan adalah risiko kredit yang terkendali, kualitas kredit, dan profitabilitas yang cukup baik.

Realisasi investasi

Pada periode Januari s.d Desember 2008, realisasi investasi dalam bentuk PMDN sebanyak 239

proyek dengan nilai investasi sebesar Rp20.363,4 miliar. Berdasarkan peringkat realisasi investasi menurut lokasi, pada tahun 2008, realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat dengan nilai investasi Rp4.289,5 miliar atau sekitar 21,1 persen dari total nilai realisasi PMDN. Peringkat selanjutnya diikuti oleh Jawa Timur (13,6 persen); Banten (9,8 persen) dan Riau (9,7 persen) dan Jakarta (9,0 persen). Pada tahun 2008, realisasi investasi Pemerintah berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA sebanyak 1.138 proyek dengan nilai investasi sebesar USD14.871,4 juta. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki iklim yang cukup kondusif bagi investor asing untuk melakukan investasi baru, mengembangkan dan memperluas usahanya di Indonesia. Realisasi tersebut apabila dilihat menurut kawasan negara memiliki presentase terbesar pada negara Afrika (44,0 persen) yang didominasi oleh Mauritius sebanyak 43,6 persen disusul dengan Asia sekitar 26,0 persen dari total investasi yang didominasi oleh Singapura (10,0 persen). Meningkatnya nilai investasi ini tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari berbagai paket kebijakan di bidang investasi yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi utamanya dalam kerangka kebijakan investasi Pemerintah dalam bentuk perijinan investasi dalam tata kelola yang baik.

Grafik 10: Peringkat Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi Tahun 2008

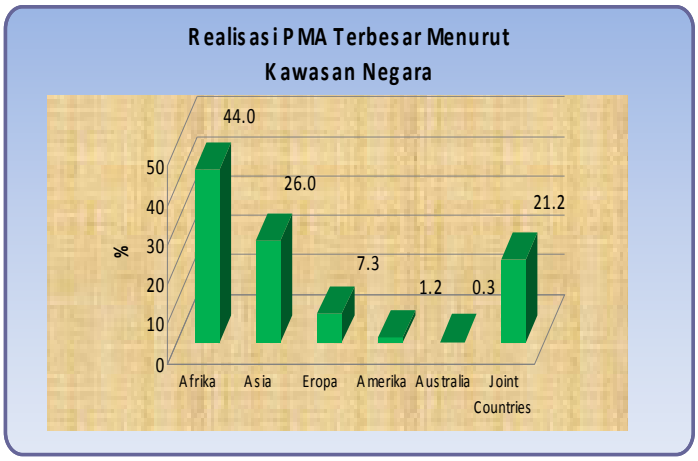

Grafik 11: Realisasi PMA Berdasarkan Kawasan Negara

IHSG dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia

Kinerja pasar modal domestik sepanjang tahun 2008 relatif banyak dipengaruhi oleh perekonomian Amerika Serikat yang mempengaruhi *market confidence* dan menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar modal domesitk. IHSG awal tahun tanggal 9 Januari 2008 mencapai 2.830,3 yang merupakan rekor baru kinerja pasar modal domestik. Di akhir semester I

2008 dengan didukung oleh kebijakan menaikkan harga BBM dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang positif telah menghasilkan nilai IHSG yang terkoreksi pada level 2.349,1 yang sebelumnya sempat turun. IHSG akhir tahun ditutup pada level 1.355. Tren laju IHSG bulanan tahun 2008 tergambar dari Grafik 12.

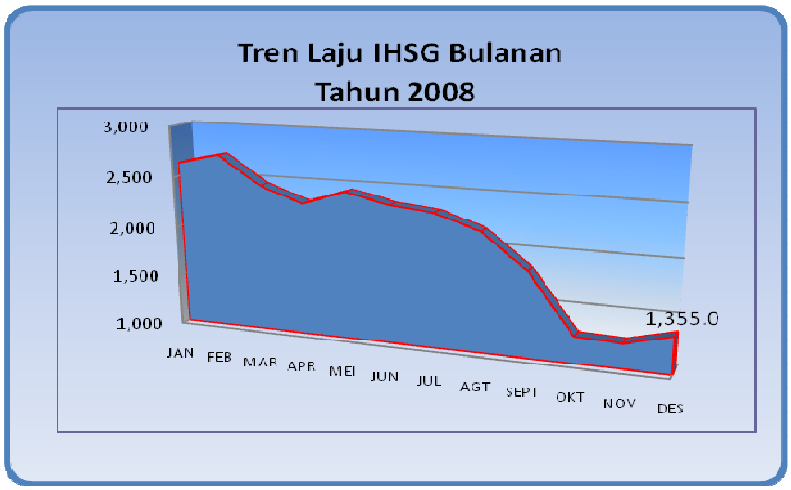

Grafik 12: Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2008

Laju Inflasi tahunan 11,06 persen

Jika sejak awal tahun tekanan inflasi belum mencapai dua digit yaitu berada pada level 7,36 persen, yoy, nilai inflasi terus meningkat sepanjang tahun dan mencapai titik tertinggi pada level 12,14 persen, yoy di bulan September 2008. Nilai inflasi tahunan kembali melemah pada akhir tahun pada level 11,06 persen, yoy. Fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008, menyebabkan inflasi meningkat tajam pada pertengahan tahun 2008. Kenaikan inflasi juga disebabkan adanya dampak lanjutan kenaikan harga BBM berupa peningkatan ekspektasi inflasi, peningkatan biaya distribusi serta kenaikan harga pangan internasional. Namun demikian, dalam menjaga kestabilan perekonomian yang memanas, pemerintah terus berupaya menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang dan jasa. Fluktuasi harga komoditi mensyaratkan pemerintah untuk terus melakukan kebijakan stabilitasi harga pangan secara terpadu yang diimplementasikan antara lain dengan cara melakukan operasi pasar, meningkatkan subsidi pangan dan menurunkan tarif bea masuk beberapa komoditi bahan pangan. Di samping itu melakukan koordinasi kebijakan, dalam rangka mengendalikan laju inflasi di tahun 2008, koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia terus dilaksanakan.

Di akhir tahun menurunnya harga-harga komoditas internasional dan melemahnya perekonomian global berimplikasi pada menurunnya permintaan domestik yang mengakibatkan menurunnya angka inflasi di akhir tahun antara lain deflasi pada *administered item* dan *volatile food.* Sumbangan deflasi tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan penurunan harga pertamax dan pertamax plus. Deflasi di tahun 2008 mulai berlangsung sejak bulan November dan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun.

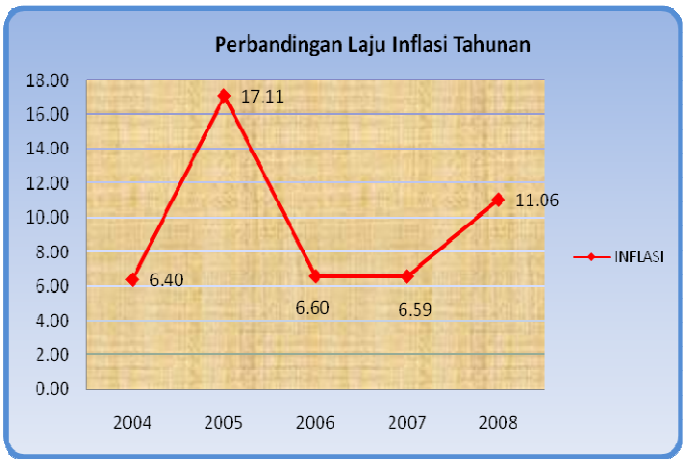

Grafik 13: Perbandingan Laju Inflasi Tahunan

Laju inflasi yang tertekan di akhir tahun

Laju inflasi tahunan 2008 relatif tinggi dan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2007 yang hanya mencapai 6,59 persen. Selain itu, realisasi laju inflasi di tahun 2008 sebesar 11,06 persen lebih besar dari asumsi APBN-P 6,5 persen. Perubahan asumsi inflasi dalam APBN-P tahun 2008 antara lain diakibatkan oleh kenaikan harga komoditi di pasar dunia khususnya minyak dunia. Jika ditinjau dari tren laju inflasi bulanan sepanjang tahun 2008, fluktuasi juga diwarnai oleh pengaruh gejolak eksternal yang mengakibatkan naiknya *imported inflation.* Laju inflasi khususnya di pertengahan tahun yakni di bulan Juni sempat melonjak tajam di angka 2,46 (persen, mtm). Namun demikian, di akhir tahun perekonomian kembali mereda dengan indikasi adanya deflasi yakni pada bulan Desember di angka minus 0,04 (persen, mtm). Tren laju inflasi bulanan disajikan dalam Grafik 14 di bawah.

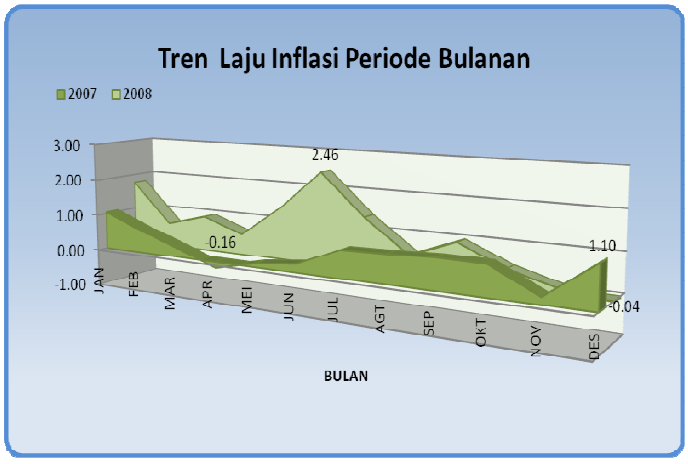

Grafik 14: Tren Laju Inflasi Bulanan

ilai tukar Rupiah Rp10.950/USD

Di samping itu, krisis ekonomi global juga mempengaruhi kinerja sektor keuangan Indonesia. Namun demikian kinerja sektor keuangan Indonesia relatif baik yang terindikasi oleh rata-rata nilai tukar yang relatif stabil, dipengaruhi oleh surplus NPI dan imbal hasil yang menarik. Di akhir tahun nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp10.950/USD (lihat Grafik 15). Walaupun nilai ini melemah tipis dibanding dengan awal tahun akibat persistensi harga minyak yang tinggi yang menekan angka rupiah, namun sustainabilitas fiskal tetap terjaga antara lain karena koordinasi kebijakan yang cukup baik antara otoritas moneter dan otoritas fiskal.

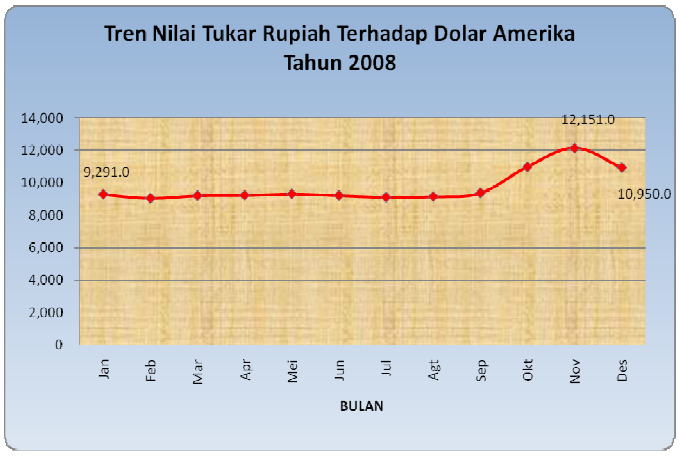

Grafik 15: Tren Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

SBI 1 bulan pada level 10,83 persen di akhir tahun

Dalam rangka menekan angka inflasi, kebijakan atas BI *rate* dilakukan secara *prudent* oleh BI yang diarahkan untuk mengupayakan pergerakan suku bunga pasar uang antar bank pada tingkat yang sesuai dengan SBI 1 bulan di bulan April sebesar 7,99 persen. BI kembali menyesuaikan SBI 1 bulan pada pertengahan tahun 2008 akibat meningkatnya laju inflasi yakni sebesar 8,73 persen yang bersumber dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sampai dengan bulan Oktober, SBI terus naik menjadi 10,98 persen untuk mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat yang lebih rendah. Di akhir tahun SBI 1 bulan ditetapkan pada level 10,83 persen.

SBI 3 bulan pada level 11,08 persen di akhir tahun

Sebagai *benchmark*, peningkatan BI *rate* di tahun 2008 juga diikuti dengan kenaikan suku bunga SBI 3 bulan dan suku bunga pinjaman perbankan. Suku bunga SBI 3 bulan pada bulan Desember sebesar 11,08 persen menjadi basis perhitungan bunga obligasi pemerintah. Nilai tersebut terealisasi lebih tinggi dari target APBN-P sebesar 7,5 persen. Sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi, maka *rate* tersebut cenderung menurun. Di samping itu, adanya peningkatan BI *rate,* suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga naik menjadi 10,0 persen untuk simpanan dalam bentuk rupiah dan 3,5 persen untuk simpanan dalam valas USD untuk periode penjaminan simpanan di bank umum periode 15 November 2008 sampai dengan 14 Januari 2009. Fluktuasi ini sejalan dengan upaya pengendalian tekanan inflasi yang utamanya berasal dari faktor eksternal yaitu kecenderungan harga minyak yang terus naik.

Harga minyak mentah rata-rata senilai 96,8 USD/barrel dan Lifting minyak mentah mencapai 931.000 barrel/hari

Harga minyak dunia di sepanjang tahun 2008 sangat fluktuatif. Di awal tahun harga minyak dunia telah mencapai lebih dari 130 USD per barel. Harga minyak mencapai puncaknya di awal bulan Juli tahun 2008 bergerak di kisaran 140 USD per barel. Pada pertengahan bulan Juli, harga minyak kembali turun tajam sampai dengan bulan Oktober 2008 di kisaran 67,81 USD per barel. Secara rata-rata harga minyak mentah Indonesia senilai 96,8 USD per barrel lebih tinggi dari target APBN-P sebesar 95 USD per barrel. Naiknya realisasi tersebut merupakan dampak penurunan harga minyak mentah di pasar internasional di semester 2 tahun 2008. Di tahun 2008, lifting minyak mentah Indonesia mencapai 931.000 barrel/hari yang berarti terealisasi di atas target APBN-P tahun 2008 sebesar 927.000 barrel/hari.

Kebijakan menaikkan BBM di tahun 2008

Di pertengahan tahun 2008 yaitu pada tanggal 24 Mei 2008, akibat dari tren kenaikan harga minyak bumi tersebut, pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi rata-rata sekitar 24 persen. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008 sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan inflasi di pertengahan tahun 2008 meningkat tajam. Kenaikan harga BBM memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya produksi dan pada gilirannya mempengaruhi *competitive edge* Indonesia. Hal inilah yang memberikan *multiplier effect* investasi di Indonesia. Terkait dengan ini, dalam rangka meminimalisasi gejolak perekonomian *(counter-*

cyclical), pemerintah telah berupaya meminimalkan dampak fluktuasi harga minyak dunia melalui kebijakan di bidang investasi sehingga investasi di tahun 2008 tetap terjaga.

Meningkatnya nilai ekspor sebesar 19,98 persen dari ekspor tahun sebelumnya

Dari sektor eksternal, nilai ekspor tahun 2008 mencatat nilai USD 136,76 miliar dan nilai impor sebesar USD 128,79 miliar. Angka ekspor tahun 2008 naik sebesar 19,98 persen dari nilai ekspor tahun 2007 yang hanya mencapai USD 113,99 miliar. Nilai impor juga meningkat dibandingkan target yang antara lain diakibatkan oleh impor nonmigas dan impor migas sebagai dampak dari masih relatif tingginya harga minyak di pasar internasional. Dari nilai total eskpor tersebut di atas, ekspor nonmigas terealisasi senilai USD 107,8 miliar. Namun demikian, secara total, cadangan devisa tahun 2008 mengalami penurunan berada di angka USD 51,6 miliar menurun dibandingkan tahun 2007 sebesar USD 56,9 miliar.

Pengendalian rasio utang terhadap PDB yang semakin membaik

Indikator yang turut mengkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian rasio utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional yang diukur melalui PDB. Pengendalian tersebut terus diupayakan pemerintah dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal yang mengindikasikan bahwa perekonomian masih mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Rasio utang terhadap PDB tahun 2008 terkendali di angka 33 persen, menurun dibandingkan tahun 2007 yang berada pada level 36 persen (lihat Grafik 16). Menurunnya ratio utang terhadap PDB menyatakan bahwa perekonomian mampu mengantisipasi berbagai risiko terutama risiko *default* yang terkait dengan utang. Pengendalian rasio utang dapat tercapai dengan melakukan strategi pengelolaan utang yang tepat, optimalisasi pembiayaan dalam negeri dan optimalisasi pendapatan negara.

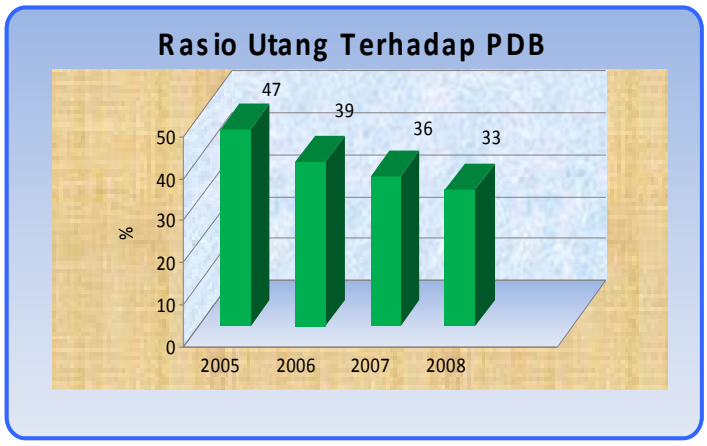

Grafik 16: Rasio Utang Terhadap PDB

Tema pembangunan nasional tahun 2008

Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah secara konsisten menyelaraskan berbagai program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja pemerintah pusat yang mendukung kegiatan perekonomian yang memiliki strategi yang mampu memacu pertumbuhan *(pro-growth)*, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan *(pro-job)*, dan mengurangi kemiskinan *(pro-poor).* Pemerintah juga menyadari dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui strategi di atas diperlukan kebijakan ekonomi yang berkualitas terutama arah kebijakan fiskal yang tepat dan fleksibel dalam merespon berbagai tantangan dalam perekonomian. Ketiga strategi di atas menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan dalam rangka intervensinya dalam perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi makro.

Prioritas Pembangunan tahun 2008

Sejalan dengan prioritas pembangunan tahun 2007 yang berlandaskan *triple track strategy* dalam rangka berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di atas, maka pembangunan tahun 2008 juga terus diarahkan untuk mewujudkan tema Pembangunan Nasional yakni "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran". RKP 2008 menetapkan delapan pioritas

pembangunan tahun 2008 adalah: *(1)* peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja; *(2)* revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan; *(3)* percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; *(4)* peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; *(5)* peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; *(6)* pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; *(7)* penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; dan *(8)* penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Berbagai kebijakan yang mendukung sektor riil

Dalam rangka menstimulasi sektor riil sebagai motor penggerak utama perekonomian, pemerintah juga secara konsisten mengimplementasikan berbagai paket kebijakan di bidang investasi. Salah satu prioritas pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur adalah salah satu sumber investasi dan menjadi salah satu pengungkit *(leverage)* pertumbuhan ekonomi. Tersedianya fasilitas, sarana dan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi. Di samping paket kebijakan iklim investasi yang diluncurkan pada tahun 2007 yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menggerakkan sektor rill, pada tahun 2008, program *Public Private Partnerships (PPPs)* yang merupakan program kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam berinvestasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan tol dan pembangkit listrik. Dukungan konkrit yang dilakukan pemerintah adalah adanya dukungan bukan hanya untuk alokasi tapi juga dukungan *risk sharing.* Paket kebijakan investasi yang merupakan *key factor* dalam pertumbuhan sektor riil telah secara signifikan berkontribusi terhadap ketenagakerjaan Indonesia di keseluruhan sektor. Membaiknya iklim investasi menciptakan lapangan pekerjaan yang telah menekan angka pengangguran. Program *Visit Indonesia Year 2008* yang berada dalam sektor pariwisata telah melibatkan dan meningkatan jumlah tenaga kerja baik di bidang perhotelan, transportasi, makanan dan sebagainya. Di bidang pertanian, program revitalisasi pertanian yang menjadi salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 terutama selama tiga tahun terakhir telah berhasil bukan hanya menyerap tenaga kerja tapi juga mampu mengamankan ketahanan pangan terutama pada masa-masa dimana tekanan harga pangan dunia sangat tinggi. Program revitalisasi pertanian yang dilakukan pemerintah antara lain adalah peningkatan jumlah realisasi subsidi pertanian yaitu subsidi pupuk dan subsidi benih. Pemerintah juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah keamanan energi terutama dalam kaitannya dengan adanya tren kenaikan harga minyak dunia.

Sunset Policy

Kebijakan pemerintah lain yang cukup populer dan direspon secara positif oleh masyarakat luas adalah kebijakan *Sunset Policy* yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya. *Sunset Policy* merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Terdapat 2 (dua) jenis pengampunan pajak dalam kebijakan tersebut. Jenis pengampunan pajak pertama berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Sedangkan jenis pengampunan yang kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP.

National Single Window

Di bidang kepabeanan, beberapa program diluncurkan pemerintah untuk mempermudah arus barang dan mendorong kinerja ekspor. *National Single Window (NSW)* sebagai salah satu program *flagship* dalam Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS). *National Single Window* telah mendukung perbaikan kinerja ekspor nasional. Pada tahun 2008, integrasi *National Single Window* dan *Asean Single Window* telah memberikan kontribusi tersendiri bukan hanya untuk ekspor tapi juga investasi secara menyeluruh. Di samping itu pemerintah melakukan percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor *(customs clearance)*, dan pengembangan fasilitas kepabeanan.

Penciptaan lapangan kerja

Dalam kaitannya dengan stimulasi sektor riil terutama untuk mendorong partisipasi sektor

sebagai salah satu stimulus perekonomian

swasta dalam kegiatan ekonomi yang pada gilirannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, di tahun 2008 berbagai indikator yang ada telah mengindikasikan sinyal positif. Berbagai aktivitas dan program pemerintah yang sesuai dengan *triple-track strategy* pembangunan 2008 diarahkan untuk memitigasi dampak krisis ekonomi global dalam pasar tenaga kerja domestik. Kondisi di lapangan membuktikan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran sebanyak 616 ribu orang pada bulan Agustus 2008 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu, sepanjang tahun 2008 terkait dengan intensitas proyek infrastruktur, telah terserap sekitar 800 ribu lapangan pekerjaan baru. Apabila dilihat dari jenis lapangan pekerjaan utama, peningkatan tertinggi jumlah penduduk yang bekerja berada pada sektor kemasyarakatan yakni meningkat 1,08 juta orang; diikuti dengan sektor perdagangan 667 ribu orang dan transportasi 220 ribu orang. Sedangkan dari perspektif sifat dari pekerjaan, kondisi per Agustus 2008 menunjukkan bahwa 31 persen tenaga kerja bekerja pada sektor formal sedangkan sisanya sebanyak 69 persen dari total pekerja bekerja pada kegiatan informal. Salah satu *strategic intent* dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 adalah penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan berada pada kisaran 14,8-16,0 persen. Seiiring dengan target tersebut yang terealisasi senilai 15,4 persen, penciptaan lapangan kerja baru menjadi salah satu *ultimate goal* yang dapat memberikan *multiplier effect* yang signifikan bagi perekonomian.

Meminimalisasi mismatch di pasar tenaga kerja

Dalam rangka memastikan bahwa pasar tenaga kerja berada dalam kondisi optimal, pemerintah antara lain melakukan berbagai program yang dapat meminimalisasi *mismatch* antara *demand* dan *supply* yang terjadi pada pasar tenaga kerja yakni antara lulusan pendidikan dan lapangan pekerjaan itu sendiri. Tren di beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan SD dan SLTP mengalami penurunan walaupun jumlahnya masih relatif tinggi. Data Agustus 2008 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 55,33 juta orang pekerja dengan tingkat pendidikan SD atau sekitar 53,9 persen dari total pekerja. Sedangkan kenaikan jumlah pekerja terdapat juga ditingkat pendidikan SLTP yakni mengalami kenaikan sebanyak 357 ribu orang per Agustus 2008 jika dibanding bulan Februari 2008 dan kenaikan jumlah SLTA dan SMK sebanyak 1,65 juta orang dan 967 ribu orang jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2008, terjadi pula peningkatan pekerja pada jenjang pendidikan tinggi, walaupun secara nominal masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Pekerja dengan pendidikan diploma mencapai 2,87 juta orang dan pekerja pendidikan sarjana mencapai 4,15 juta orang atau sekitra 4,0 persen dari total pekerja. Dengan memperhatikan kondisi tersebut termasuk berbagai faktor demografi, pemerintah melakukan sinkronisasi dan mensinergikan tiga elemen yakni kebijakan di bidang pendidikan, kualitas tenaga terdidik serta kebutuhan lapangan pekerjaan. Upaya mengurangi *mismatch* tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan seperti ketimpangan upah, kelangkaan tenaga kerja yang tidak terpenuhi, menurunkan angka pengangguran terdidik yang banyak dijumpai di perkotaan.

Berbagai Program pengentasan kemiskinan

Pemerintah terus melanjutkan berbagai program pengentasan kemiskinan *(poverty alleviation)* seperti Askeskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), raskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). PNPM dilaksanakan di berbagai K/L seperti penyediaan dan perbaikan infrastruktur, pengembangan agribisnis, pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Di sektor pendidikan, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diprioritaskan untuk penyediaan BOS untuk jenjang pendidikan dasar baik formal maupun non-formal termasuk BPS buku untuk siswa SD dan SMP.

Hubungan Climate Change dan Pembangunan

Pada tahun 2008, pemerintah memiliki prioritas atas dampak *climate change* terhadap pembangunan, karena patut diakui bahwa sebagai negara kepulauan Indonesia cukup *vulnerable* terhadap perubahan iklim dimaksud. Isu yang telah menjadi masalah global ini menyerukan perhatian terhadap kebijakan alokasi anggaran yang tepat terhadap perubahan iklim. Hal ini telah direspon oleh pemerintah yang secara konsisten melakukan *mainstream* (pengarusutamaan) perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah menyadari

bahwa c*limate change* tidak hanya terkait dengan isu-isu lingkungan tetapi juga terkait dengan isu-isu pembangunan. Pada tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang antara lain bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun demikian, pemerintah juga konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam menangani masalah ini. Prinsip tersebut antara lain adalah mengupayakan kerja sama dengan pihak internasional dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional untuk memitigasi permasalahan ini. Di samping itu, pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk berperan aktif melalui kebijakan investasi, *Public Private Partnerships,*maupun *Corporate Social Responsibilities.* Hal lain yang masih belum berkembang adalah dorongan untuk melakukan kajian yang melibatkan berbagai pihak.

Boks 1
Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Salah satu manifestasi upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Inpres tersebut merupakan salah satu dasar dikeluarkannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program percepatan penyaluran kredit/pembiayaan yang berasal dari sumber dana perbankan dengan dukungan penjaminan untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Dalam rangka mengimplementasikan Inpres No. 6 Tahun 2007, pemerintah melakukan *follow-up measures* dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) antara kementerian teknis, perbankan dan perusahaan asuransi pada tanggal 9 Oktober 2007 dan juga ditandai dengan peluncuran pinjaman kepada KUR.

KUR yang diluncurkan pada bulan November 2007 adalah skema kredit/pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi memiliki usaha yang *feasible* namun tidak *bankable* atau belum mempunyai jaminan atau agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM, namun hanya relatif sedikit dari perusahaan tersebut yang mengutilisasikan fungsi intermediasi perbankan, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mempermudah sektor perbankan dalam menyalurkan kredit terhadap UMKM dan koperasi tersebut. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah UMKM mencapai sekitar 48,8 juta unit namun hanya 39,06 persen atau sekitar 19,1 juta unit yang berusaha melalui perbankan.

Sasaran utama dari diluncurkannya program KUR adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan sasaran dari KUR adalah: (1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil, usaha kecil dan menengah; (2) meningkatkan akses untuk pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah dan koperasi, (3) mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan pekerjaan.

Tantangan yang dihadapi dalam program KUR adalah penyaluran dana KUR secara efektif. Diharapkan reformasi manajemen bidang keuangan negara dapat memitigasi berbagai praktik yang menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program KUR tersebut. Adapun fungsi pemerintah dalam hal ini enam kementerian teknis (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan dan instansi terkait lainnya) adalah membantu dan mendukung eksekusi dari distribusi kredit dan jaminannya kepada UMPKM dan koperasi, penyiapan UMKM dan koperasi untuk melakukan bisnis yang produktif yang akan dijadikan target pembiayaan, menentukan kebijakan dan prioritas sektor bisnis yang menerima kredit, membangun karakter dan memberikan bantuan sepanjang periode pembiayaan dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan koperasi dan pihak lain. Di samping itu tantangan lain yang terus diantisipasi oleh pemerintah adalah pemahaman yang sama mengenai skema KUR dan mengurangi *misinterpretation* antara perbankan dan publik mengenai skema dan hal-hal teknis terkait dengan KUR dan upaya memenuhi kebutuhan keahlian dalam pengelolaan KUR.

Semenjak diluncurkannya program KUR, jumlah pinjaman KUR dan penerima KUR meningkat secara signifikan. Distribusi KUR per Desember 2008 senilai Rp12.624,1 miliar dengan total debitur 1.671.630. Realisasi KUR tersebut meningkat sejumlah 42 persen dari realisasi KUR per Juli 2008 yang hanya baru mencapai Rp8,88 triliun untuk 1.022.966 debitur. Dengan demikian, rata-rata realisasi KUR per debitur tahun 2008 adalah Rp7,55 juta. Penyaluran kredit terbesar terdapat pada Bank BRI sebagai salah satu dari enam bank pelaksana KUR lainnya yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

Medium Term Expenditure Framework dan Performance Based Budgeting sebagai pilar reformasi penganggaran

Dua pilar dalam reformasi penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan *allocative efficiency, strategic allocation and fiscal discipline* adalah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM atau *Medium Term Expenditure Framework* dan penganggaran berbasis kinerja *(Performance-Based Budgeting).* KPJM adalah pendekatan penganggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko ketidakpastian dalam rangka menjamin kesinambungan fiskal dan meningkatkan transparansi kebijakan pengeluaran serta akuntabilitas keuangan negara. Terkait dengan penerapan KPJM, dalam proses penganggaran telah diterapkan berbagai upaya untuk mengaitkan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penentuan prioritas program yang memperhatikan *budget constraints,* sinkronisasi program dan kegiatan, memperhatikan kesesuaian biaya dengan hasil dan informasi atas hasil evaluasi dan monitoring. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja di lain pihak menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas. Pendekatan yang bergeser dari *input-based* ke *output-based* dilaksanakan secara *cascade* (hirarki) dalam rangka mendukung terlaksananya pengalokasian dan operasionalisasi anggaran.

Pengungkapan Risiko Fiskal dalam APBN

Seperti yang direkomendasikan oleh berbagai lembaga internasional, pengungkapan risiko fiskal berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas pemerintah dan memfasilitasi analisis keuangan pemerintah. Pengungkapan risiko fiskal yang terdapat dalam Nota Keuangan dan APBN TA 2008 bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan upaya meningkatkan transparansi. Pengungkapan tersebut berakibat terhadap kehati-hatian pemerintah dalam menjalankan atau mengimplementasikan anggaran. Di tahun 2008, kinerja pemerintah yang tercermin dari realisasi anggaran pemerintah dalam kerangka kebijakan fiskal merupakan dampak positif dari adanya transparansi tersebut. Pernyataan risiko fiskal antara lain memuat hal sensitivitas asumsi ekonomi makro, risiko utang pemerintah, proyek kerja sama pembangunan infrastruktur, badan usaha milik negara, sensitivitas perubahan harga minyak, sektor keuangan, program pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS), desentralisasi fiskal, tuntutan hukum kepada pemerintah, keanggotaan pada organisasi dan lembaga keuangan internasional, dan bencana alam. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan transparansi dan menerapkan berbagai kebijakan terkait yang mendukung kesinambungan fiskal.

Dinamika perekonomian dunia telah mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai penyesuaian terhadap asumsi makro ekonomi untuk APBN 2008. Dalam kaitan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap APBN 2008, yang antara lain meliputi optimalisasi pendapatan negara, penggunaan dana cadangan APBN, penghematan dan penajaman belanja negara, efisiensi BUMN, penerbitan SBN dan pengurangan beban pajak. Adapun tujuan dari langkah-langkah pengamanan tersebut adalah pengendalian defisit APBN dalam menjaga kesinambungan fiskal. Realisasi Indikator makro ekonomi tahun selama tiga tahun terakhir tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1

Realisasi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2006 – 2008

Indikator Makro Ekonomi	APBN-P TA 2008	2008	2007	2006
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,4	6,1	6,3	5,5
Inflasi (persen)	6,5	11,06	6,59	6,6
Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)	9.100	10.950	9.419	9.020
Suku Bunga SBI 3 bulan	7,5	9,3	8,04	9,50
Harga Minyak ICP (USD/barrel)	95	96,8	78	56,80
Lifting Minyak (Juta barrel/hari)	0,927	0,931	0,909	0,935

Sumbangan perpajakan dan PNBP terhadap pendapatan negara yang terus meningkat

KOMPOSISI REALISASI APBN TAHUN ANGGARAN 2008

1. Pendapatan Negara

Pada tahun 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan sebesar 38,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp981,61 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 yang hanya mencapai Rp707,80 triliun. Peningkatan realisasi tersebut berasal dari pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 34,2 persen; pertumbuhan PNBP sebesar 49,0 persen dan pertumbuhan hibah sebesar 35,7 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2007. Adapun realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008 sebesar Rp658,70 triliun; realisasi PNBP sebesar Rp320,60 triliun dan realisasi hibah senilai Rp2,30 triliun. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan realisasi tersebut antara lain tingginya harga minyak mentah di pasar internasional, melonjaknya harga pangan dunia serta beberapa komoditi strategis, perkembangan asumsi ekonomi makro dan keberhasilan kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP.

Struktur Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2008 yang masih didominasi oleh penerimaan perpajakan

Pendapatan negara dan hibah tahun 2008 masih didominasi dari penerimaan perpajakan senilai 67,1 persen dari total penerimaan; yang diikuti dengan penerimaan negara bukan pajak 32,7 persen dan hibah 0,2 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Komposisi ini hanya bergerak sedikit dibandingkan dengan komposisinya pada tahun 2007 yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 69,4 persen, penerimaan negara bukan pajak 30,4 persen dan hibah sebesar 0,2 persen. Masih dominannya pajak dalam struktur pendapatan negara dan hibah antara lain disebabkan oleh berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan utamanya terkait dengan perubahan paket perundang-undangan dan institusi perpajakan yang memiliki tata kelola yang baik diambil untuk menstimulasi perekonomian. Walaupun pemerintah juga mengupayakan agar sumbangan pendapatan juga dapat ditingkatkan dari PNBP, pemerintah juga terus menjaga kesinambungan penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara.

Realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp658,70 triliun

Selama tiga tahun berturut-turut secara nominal sumbangan pajak terhadap pendapatan negara terus meningkat yakni tahun 2008 sebesar Rp658,70 triliun meningkat 34,2 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp491,0 triliun. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak penghasilan, PPN & PPNBM, PBB, pajak ekspor, pajak lainnya, bea masuk dan cukai. Dari komponen perpajakan yang mengalami peningkatan, kontribusi peningkatan terbesar adalah pajak ekspor yang meningkat sebesar 220,3 persen dari nilai nominal pada tahun 2007 Rp4,24 triliun menjadi Rp13,58 triliun pada tahun 2008. Dari realisasi pajak tersebut, pajak dalam negeri berkontribusi sebesar 94,5 persen dengan nilai nominal sebesar Rp622,36 triliun, sedangkan sisanya 5,5 persen berasal dari pajak perdagangan internasional dengan nilai nominal sebesar Rp36,34 triliun.

Tax Ratio 13,3 persen terhadap PDB

Penerimaan perpajakan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 34,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. *Tax ratio* di tahun 2008 meningkat menjadi 13,3 persen terhadap PDB; meningkat dibandingkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun 2007 yang hanya mencapai sebesar 12,4 persen terhadap PDB; dan 12,3 persen terhadap PDB di tahun 2006. Kinerja perpajakan pemerintah tahun 2008 terdongkrak karena berbagai upaya konsisten pemerintah melalui kebijakan, sistem dan administrasi perpajakan. Salah satu *highlight* perbaikan *tax policy* dan *administrative reforms* adalah dengan dilakukannya berbagai perubahan di bidang perpajakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan yang memberi ruang bagi terciptanya aktivitas perekonomian. Berbagai perubahan kebijakan antara lain adalah perubahan paket perundangan perpajakan antara lain UU PPh (lihat Boks 2) dan UU Kepabeanan dan cukai. Amandemen undang-undang perpajakan yang telah dilakukan pada tahun 2007 bersama-sama dengan modernisasi kantor pajak, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan secara sinergis

telah memberikan kontribusi bagi kinerja perpajakan tahun 2008. Reformasi perpajakan juga telah meningkatkan disiplin pegawai melalui perbaikan implementasi kode etik aparatur perpajakan yang merupakan bagian dari kebijakan komprehensif pemerintah. Peningkatan *tax ratio* terus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka menciptakan ruang fiskal (*fiscal space)* yang mencerminkan kapasitas anggaran pemerintah untuk menambah pengeluarannya tanpa menyebabkan terjadinya *fiscal insolvency.* Perbandingan tax ratio tahun 2006, 2007 dan 2008 tergambar dalam Grafik 17.

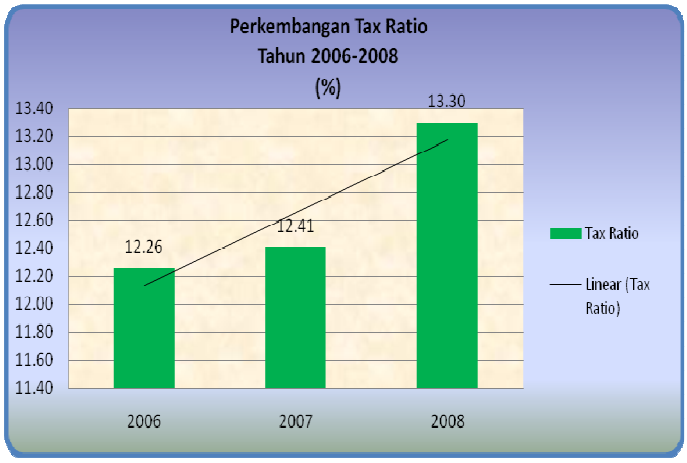

Grafik 17: Perkembangan Tax Ratio Tahun 2006 – 2008

Boks 2
Undang-Undang PPh

Salah satu gebrakan pemerintah yang cukup populer adalah perubahan terhadap UU Perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 2005. Amandemen PPh adalah bagian dari reformasi peraturan di bidang perpajakan dimaksud. Perubahan peraturan diharapkan dapat memperbaiki institusi khususnya untuk men-*tackle* berbagai permasalahan di bidang perpajakan melalui penerapan prinsip-prinsip *equality, simplicity*, dan *fairness.*

Salah satu indikator kinerja perpajakan yakni rasio jumlah pendapatan perpajakan dengan GDP atau *tax ratio.* Walaupun *tax ratio* cenderung naik dari tahun ke tahun, belum optimalnya kinerja perpajakan nasional tercermin dari masih relatif rendahnya capaian *tax ratio* Indonesia dibandingkan *tax ratio* negara ASEAN lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu *impetus* bagi pemerintah untuk mngintroduksi pokok-pokok perubahan dalam undang-undang PPh dimaksud.

Amandemen yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2009 secara umum bertujuan untuk menciptakan insentif bagi perekonomian nasional antara lain dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan memperluas basis pajak.

Pokok-pokok amandemen UU PPh tersebut antara lain mencakup:

1. Penurunan tarif pajak penghasilan:
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meningkat 20 persen.
3. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang berbeda;
4. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:
   a. Sumbangan yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa;
   b. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
   c. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan serta fasilitas pendidikan yang dilakukan di Indonesia;
   d. Bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.

5. Pengecualian dari obyek PPh, yaitu:
   a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
   b. Beasiswa;
   c. Bantuan atau santunan yang diterima dari badan penyelenggara jaminan sosial.
6. Surplus Bank Indonesia ditegaskan kembali menjadi obyek pajak

PNBP sebagai salah satu komponen Penerimaan Negara

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melanjutkan implementasi amendemen UU PPh dimaksud di masa yang akan datang.

Salah satu komponen sumber penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya. Penerimaan sumber daya alam meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri,penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. PNBP walaupun memiliki nilai yang relatif kecil dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Adapun pokok-pokok kebijakan yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan PNBP antara lain, (i) peningkatan lighting minyak mentah, (ii) perbaikan kebijakan *cost recovery* (iii) peningkatan produksi mineral dan bahan tambang lainnya, (iv) intensifikasi upaya pencegahan *illegal logging, illegal mining*, dan *illegal fishing*, (v) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN disertai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), (vi) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP Kementerian/Lembaga, dan (vii) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PNBP di berbagai Kementerian/Lembaga.

Realisasi PNBP Rp320,60 triliun

Realisasi PNBP tahun 2008 senilai Rp320,60 triliun yang terdiri dari realisasi penerimaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp224,46 triliun, realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp29,09 triliun dan realisasi PNBP lainnya senilai Rp67,05 triliun.

Komposisi PNBP tahun 2008 didominasi oleh penerimaan SDA sebesar 70,0 persen dari total penerimaan, diikuti dengan pendapatan PNBP lainnya sebesar 20,9 persen dan pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar 9,1 persen. Secara keseluruhan, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kontribusi PNBP terhadap total pendapatan negara dan hibah tahun 2008 senilai 32,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai 30 persen dari total pendapatan negara dan hibah namun turun dibandingkan tahun 2006 dimana kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara dan hibah sebesar 35 persen. Jika dibandingkan dengan nominal realisasi PNBP tahun sebelumnya senilai Rp215,11 triliun, realisasi PNBP tahun 2008 meningkat sebesar 49,0 persen.

Realisasi hibah Rp2,30 triliun

Realisasi hibah tahun 2008 mencapai sebesar Rp2,30 triliun atau meningkat 35,71 persen dari realisasi tahun 2007. Dalam realisasi tahun 2008, alokasi dana hibah diperuntukkan antara lain untuk membiayai program lanjutan Earthquake and Tsunami Support Project (ETESP); program ketahanan pangan, dan program ataupun proyek pembangunan yang dikelola oleh K/L. Sedangkan hibah dalam kerangka kerjasama bilateral diutilisasikan dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan pertanahan, kelembagaan, keagamaan, sosial kemasyarakatan serta tata ruang.

Realisasi belanja negara Rp985,73 triliun

2. Belanja Negara

Penyerapan anggaran belanja APBN tahun 2008 sebesar Rp985,73 triliun atau 99,6 persen dari pagu yang dianggarkan. Capaian realisasi belanja negara tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp693,36 triliun dan realisasi transfer ke daerah senilai Rp292,43 triliun.

Belanja pemerintah pusat berkontribusi sebesar 70,3 persen dari total belanja negara, sedangkan sisanya 29,7 persen merupakan transfer ke daerah. Yang dimaksud dengan transfer ke daerah adalah transfer belanja APBN yang mengalir ke daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Salah satu *critical isu* dalam realisasi belanja negara adalah rasio realisasi terhadap pagu yang mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program-program yang telah ditetapkan. Seperti yang diketahui, lambatnya penyerapan anggaran ditengarai mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena eksekusi anggaran memiliki *triple down effect* bagi perekonomian (lihat Boks 3).

Boks 3

Penyerapan Belanja dan Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap pagu mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program-program yang telah ditetapkan. Seperti yang diketahui, lambatnya penyerapan anggaran ditengarai mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena eksekusi anggaran memiliki *triple down effect* bagi perekonomian.

Perbaikan tren penyerapan anggaran yang semakin merata

Penyerapan anggaran yang cepat, efisien dan efektif telah menjadi salah satu agenda reformasi manajemen keuangan pemerintah. Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya optimal dalam rangka mengurangi berbagai hambatan dalam penyerapan anggaran dan memitigasi kecenderungan penarikan anggaran di akhir tahun *(execution skewed towards the end of fiscal year)* oleh Kementerian Negara/Lembaga. Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan mendelegasikan kekuasaan *(relax control)* dalam rangka eksekusi anggaran dengan memberikan berbagai fleksibilitas terhadap kementerian teknis; namun demikian juga mensyaratkan adanya akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Indikasi berjalannya fungsi distribusi yang bertujuan memeratakan pelayanan kepada masyarakat tercermin dari realisasi penyerapan anggaran yang optimal. Terserapnya anggaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan bermanfaat bagi pembangunan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian secara makro terutama kaitannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Prasyarat penyerapan anggaran dalam manajemen keuangan negara juga menjadi penting seiiring dengan semakin meningkatnya sumber daya publik yang dibelanjakan melalui ABPN, dan juga mengakibatkan permintaan akan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran menjadi lebih besar. Secara kumulatif, masing-masing Kementerian Negara/Lembaga mampu mengabsorpsi anggarannya di atas 90 persen dari pagu, sebagaimana tergambar dari grafik di bawah ini.

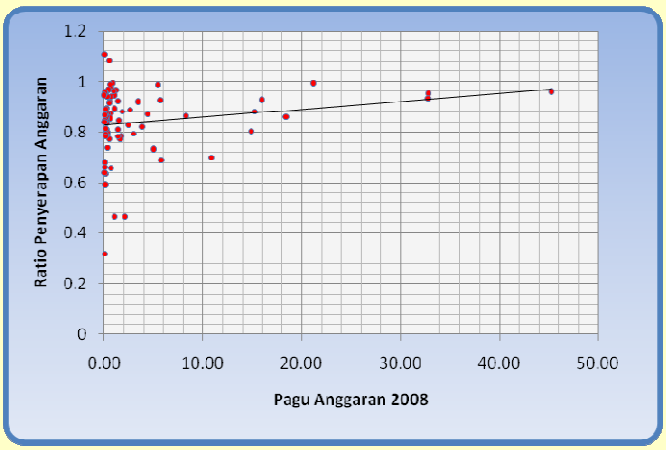

Grafik 18: Plot Diagram Rasio Penyerapan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Grafik di atas antara lain mengindikasikan membaiknya proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Indonesia. Hal pertama yang dapat diobservasi adalah walaupun tidak dominan, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi anggaran yang diberikan, terdapat kecenderungan semakin tinggi rasio penyerapan anggarannya. Di samping itu, dari grafik terlihat bahwa hanya sebagian kecil Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan penyerapan di bawah 60 persen dari total pagunya.

Dengan tingkat serapan yang cukup menjanjikan, menunjukkan keberhasilan program pemerintah. Berdasarkan laporan akuntabilitas tahun 2007, terdapat 16 Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 100 persen dari tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencatat 7 Kementerian Negara/Lembaga sedangkan jumlah Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah sebanyak 31 Kementerian Negara/Lembaga. Namun dengan tingginya absorpsi tersebut, para pelaksana anggaran juga dihadapkan pada prasyarat untuk mempertanggungjawabkan realisasi tersebut. Sejalan dengan semangat reformasi yang memberikan fleksibilitas bagi para manajer dalam mengimplementasikan kebijakan publik *(let the managers manage),* maka akuntabilitas keuangan juga menjadi bagian penting dalam reformasi keuangan negara secara luas *(make the managers manage).*

Sebagai bagian dari reformasi keuangan, program perbaikan penyerapan anggaran menjadi salah satu *on-going program* sehingga absorbsi anggaran dari bulan ke bulan menjadi semakin merata dan kecenderungan dari para pengelola keuangan *rush toward the end of year* untuk mencairkan anggarannya dapat dikurangi. Walaupun semakin baik dari tahun ke tahun penyerapan anggaran per bulan belum cukup merata (lihat boks.4). Semakin meratanya penyerapan anggaran mencerminkan perbaikan proses penganggaran yang mampu mengurangi *rent-seeking practice* yang memiliki ruang dalam proses pelaksanaan anggaran yang tidak optimal.

Boks 4
Tren Penyerapan Anggaran Tahun 2008

Di samping rasionya terhadap pagu, penyerapan anggaran tahun 2008 dapat dikaji pula melalui tren serapan per bulan sepanjang tahun 2008.

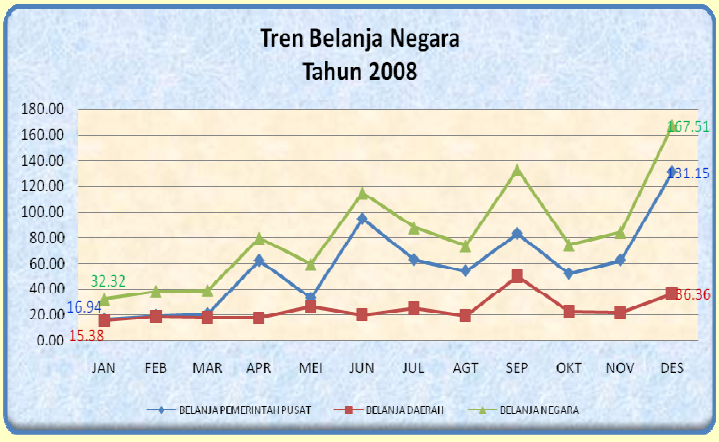

Grafik 19: Tren Penyerapan Belanja Negara TA 2008

Penyerapan anggaran pemerintah pusat berfluktuasi dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2008. Tren belanja negara merupakan jumlah dari tren belanja pemerintah pusat dan tren transfer ke daerah. Tren realisasi tersebut pada triwulan pertama semakin meningkat dan secara tajam meningkat di bulan April dan terus turun dan kembali naik bulan berikutnya. Tren peningkatan dan penurunan tersebut terus berjalan di sepanjang tahun dengan nilai realisasi tertinggi di bulan Desember sebesar Rp167,51 triliun. Secara umum nilai serapan per bulan untuk belanja negara rata-rata di atas Rp30 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat memiliki tren yang relatif sama dengan belanja negara dengan anggaran serapan tertinggi di bulan Desember 2008 senilai Rp131,15 triliun. Tren realisasi transfer ke daerah juga menunjukkan pergerakan yang tidak banyak berubah dengan peningkatan signifikan yang terjadi di bulan September 2008 senilai Rp50,07 triliun dan bulan Desember sebesar Rp36,36 triliun.

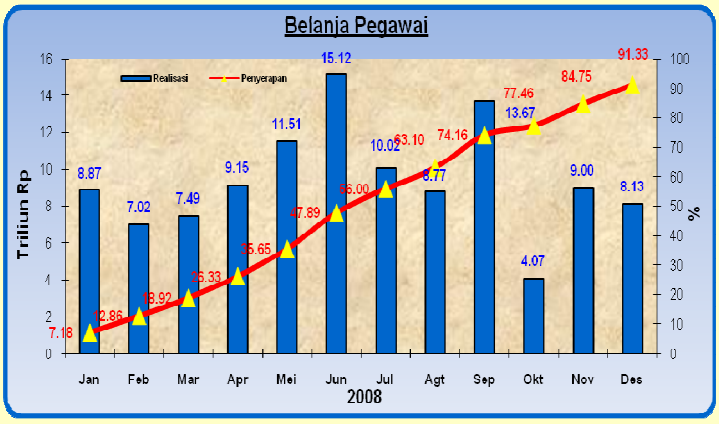

Grafik 20: Tren Penyerapan Belanja Pegawai Tahun 2008

Khusus untuk belanja pegawai pemerintah pusat tahun 2008, tren belanja pegawai dari bulan ke bulan menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif sama dengan nilai serapan tertinggi di bulan Juni sekitar 56 persen dari pagu dengan nilai Rp15,12 triliun yang antara lain diakibatkan oleh realisasi pembayaran gaji ke-13 pegawai pemerintah. Sedangkan tingkat serapan belanja pegawai pemerintah akhir tahun sekitar 91,33 persen.

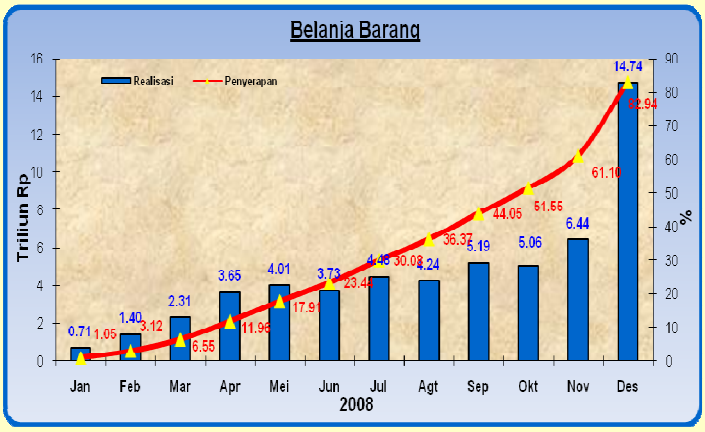

Grafik 21: Tren Penyerapan Belanja Barang TA 2008

Belanja barang berfluktuasi tipis sepanjang tahun 2008, di awal tahun berada di angka Rp0,71 triliun dan terus meningkat secara signifikan pada akhir tahun berjalan senilai Rp14,74 triliun. Tingkat serapan terus meningkat secara tipis dengan nilai serapan akhir tahun sebesar 82,94 persen.

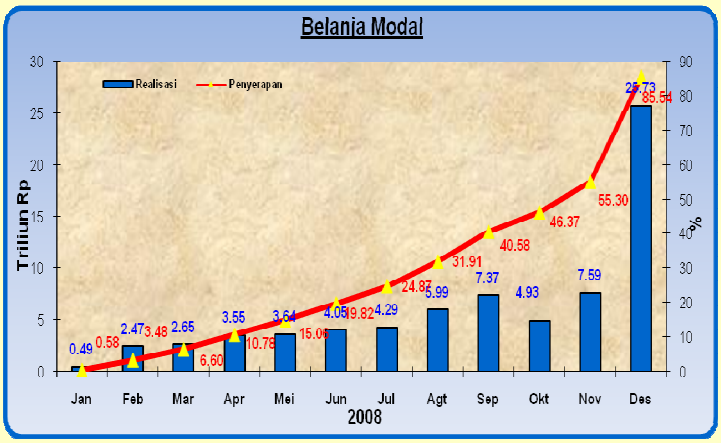

Grafik 22: Tren Penyerapan Belanja Modal TA 2008

Belanja modal juga menunjukkan tren yang positif terus meningkat dari bulan Januari sebesar Rp0,49 triliun dan terus meningkat menjadi Rp4,05 triliun di bulan juni dan di akhir tahun berada di angka Rp25,73 triliun. Tren penyerapan belanja modal ini mendongkrak perekonomian nasional melalui dampaknya terhadap penciptaan lapangan usaha baru. Tren yang menunjukkan pergerakan tajam adalah belanja subsidi. Peningkatan terutama terdapat pada bulan April, Juni, dan Desember yang diakibatkan oleh fluktuasi harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintah melakukan alokasi subsidi. Serapan belanja modal akhir tahun mencapai 85,54 persen. Dengan tingkat penyerapan mencapai 85,54 persen realisasi belanja modal pada bulan Desember 2008 sebesar Rp25,73 triliun lebih kecil dibandingkan penyerapan bulan Desember 2007 sebesar 35,1 persen.

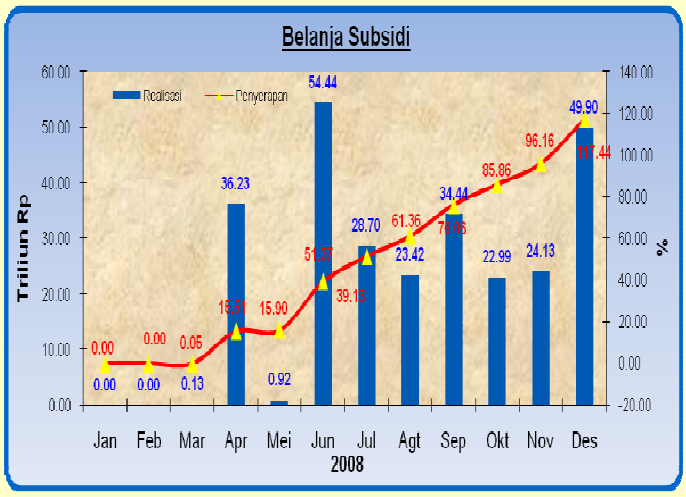

Grafik 23: Tren Penyerapan Belanja Subsidi TA 2008

Belanja subsidi tahun 2008 berfluktuasi secara tajam dimana penyerapan baru terjadi di bulan Maret sebesar Rp0,13 triliun yakni baru sekitar 0,05 persen dan meningkat di bulan berikutnya Rp36,23 triliun (15,51 persen), kembali naik tajam di bulan Juni sebesar Rp54,44 triliun dengan tingkat serapan 51,37 persen. Akhir tahun bulan Desember realisasi belanja subsidi berada di angka Rp49,90 triliun yakni 117,44 persen dari pagu.

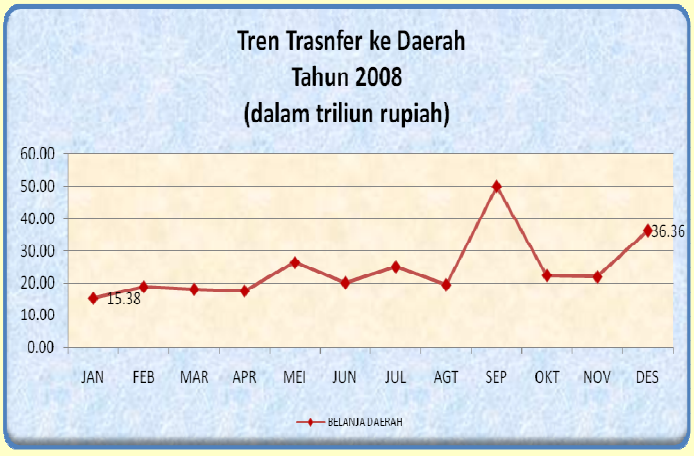

Grafik 24: Tren Penyerapan Transfer ke Daerah TA 2008

Efesiensi belanja Pemerintah Pusat sejalan dengan prioritas pembangunan

Sama seperti belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah juga menunjukkan fluktuasi di sepanjang tahun 2008. Belanja yang didominasi oleh dana perimbangan menunjukkan nilai serapan yang tidak berbeda secara signifikan dari bulan ke bulan. Di awal tahun serapan untuk dana perimbangan berada di angka Rp15,38 triliun berubah tidak materil namun mengalami kenaikan tajam di bulan September yakni dengan nilai serapan Rp50,07 triliun dan di akhir tahun senilai Rp36,36 triliun. Total dana APBN yang terserap untuk dana perimbangan sepanjang tahun senilai Rp278,71 triliun. Sedangkan tren realisasi dana otonomi

khusus dan penyesuaian tidak mengalami perubahan atau fluktuasi sepanjang tahun 2008 dengan nilai rata-rata serapan per bulan Desember Rp2,20 triliun.

Prioritas alokasi belanja Pemerintah Pusat

Pemerintah memiliki 6 (enam) prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008 yang selaras dengan *"*Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran*"*. Enam prioritas tersebut adalah (1) belanja investasi, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk pendukung kegiatan ekonomi nasional; *(2)* bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945, serta meningkatkan upaya pemerataan; *(3)* perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; *(4)* peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan; *(5)* penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta *(6)* pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang. Dalam jangka menengah kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, menjaga stabilitas harga komoditas strategis, memberikan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di pedesaan dan daerah terpencil, serta memberikan stimulus pada perekonomian secara tepat dan terukur.

Realisasi belanja pegawai tahun 2008 sebesar Rp112,83 triliun, meningkat sekitar 24,78 persen dari realisasi tahun 2007 yang mencapai nilai Rp90,42 triliun. Kenaikan realisasi belanja pegawai ini antara lain diakibatkan oleh masih adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan uang makan dan lauk pauk untuk PNS dan TNI Polri tahun 2008. Belanja barang terealisasi senilai Rp55,96 triliun, meningkat dari realisasi belanja barang tahun sebelumnya senilai Rp54,51 triliun. Peningkatan realisasi belanja barang yang merupakan salah satu jenis belanja yang bersifat autonomous memiliki peran yang cukup signifikan dalam menstimulus perekonomian di sepanjang tahun 2008. Di tahun 2008, walaupun secara nominal belanja barang meningkat, penajaman prioritas realisasi belanja barang dilakukan dengan melakukan penghematan di area yang tidak produktif. Salah satu area yang dijadikan sasaran penajaman efisiensi belanja barang adalah belanja perjalanan dinas dan berbagai program-program seminar yang dianggap kurang bermanfaat. Realisasi belanja modal tahun 2008 adalah Rp72,77 triliun naik signifikan dibanding tahun 2007 dimana realisasi belanja modal adalah sebesar Rp64,29 triliun. Efisiensi belanja negara juga dilakukan dalam eksekusi belanja modal tahun 2008 dengan mengurangi belanja modal yang tidak optimal seperti pembangunan dan renovasi gedung serta pembelian mobil-mobil dinas. Efisiensi tersebut diperuntukkan untuk mengoptimalkan program pembangunan pemerintah tahun 2008 seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, reformasi penganggaran melalui penerapan berbagai praktik kebijakan yang ditengarai dan terbukti meningkatkan kinerja dan menekankan profesionalisme telah memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat. Pembayaran bunga utang tahun 2008 senilai Rp88,43 triliun, juga meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp79,81 triliun. Realisasi subsidi tahun 2008 mencapai Rp275,29 triliun naik dibandingkan tahun 2007 senilai Rp150,21 triliun. Bantuan sosial di tahun 2008 terealisasi sebesar Rp57,74 triliun, naik dari realisasi tahun 2007 sebesar Rp49,76 triliun. Realisasi belanja lain-lain tahun 2008 mencapai Rp30,33 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya senilai Rp15,62 triliun. Meningkatnya realisasi belanja lain-lain tersebut sejalan dengan perubahan alokasi dalam APBN-P terhadap belanja lain-lain yang meningkat sebesar 28,6 persen dari alokasi awal pada APBN 2008. Peningkatan alokasi tersebut antara lain dimaksudkan untuk mengakomodasi kenaikan dana cadangan policy measures dalam rangka pengamanan APBN 2008, kenaikan alokasi dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), penambahan anggaran sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG, dan kenaikan alokasi dana untuk keperluan mendesak namun belum dialokasikan dananya. Secara agregat,

total realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp693,36 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu senilai Rp504,62 triliun. Rincian secara detil komponen terbesar Belanja Pemerintah Pusat dielaborasi di Boks 5.

Boks 5

Komponen Terbesar Belanja Pemerintah Pusat

Di tahun 2008, komposisi belanja pemerintah pusat terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi anggaran (jenis belanja) didominasi oleh belanja subsidi sebesar 39,7 persen. Di urutan kedua adalah belanja pegawai sebesar 16,3 persen, dan selanjutnya diikuti dengan pembayaran bunga utang 12,8 persen, belanja modal 10,5 persen, bantuan sosial senilai 8,3 persen, belanja barang sebesar 8,1 persen dan belanja lain-lain sebesar 4,4 persen.

Subsidi secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar *(basic needs)* dan mempertahankan kapasitas produsen untuk memproduksi barang kebutuhan dasar tersebut. Di tahun 2008, Pemerintah melakukan realokasi terhadap belanja subsidi yakni anggaran hasil pengurangan subsidi BBM ke subsidi pendidikan dan kesehatan. Realokasi subsidi tersebut bersifat *two-edged sword* yakni selain untuk meringankan beban keuangan negara sebagai akibat meningkatnya beban subsidi BBM, juga memiliki sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui realokasi tersebut dengan menargetkan subsidi kepada kelompok yang memerlukan maka efisiensi belanja negara dapat meningkat.

Belanja pegawai merupakan komponen kedua terbesar belanja pemerintah dilihat dari klasifikasi ekonomi. Proporsi yang cukup besar diakibatkan dari kebijakan kenaikan belanja pegawai dalam rangka perbaikan kesejahteraan pegawai pemerintah. Persentase yang cukup besar tersebut juga mengindikasikan komitmen pemerintah dalam rangka merestrukturisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan insentif dalam birokrasi.

Realisasi belanja pembayaran bunga dan utang juga menunjukkan angka yang cukup besar relatif terhadap total belanja keseluruhan. Tingginya proporsi ini antara lain diakibatkan oleh meningkatnya *outstanding* SBN internasional, potensi meningkatnya target pembiayaan utang dalam valuta asing, potensi meningkatnya nilai tukar mata uang seperti yen, dolar Amerika Serikat, poundsterling dan euro serta potensi meningkatnya tingkat bunga LIBOR. Dalam rangka mendukung kebijakan pengurangan beban pembayaran bunga utang, pemerintah telah melakukan berbagai *measures* seperti restrukturisasi pembayaran bunga surat utang dan moratorium.

Belanja modal juga merupakan salah satu komponen terbesar belanja pemerintah. Belanja modal secara langsung mempengaruhi tumbuhnya perekonomian melalui meningkatnya nilai investasi. Alokasi anggaran yang antara lain bertujuan untuk menambah atau memperoleh aset ini dialokasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah antara lain terkait dengan infrastruktur pembangunan irigasi, revitalisasi pembangunan listrik dan jaringan dan sebagainya.

Pada intinya, masing-masing komponen pembentuk belanja pemerintah pusat yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, pembayaran bunga utang, bantuan sosial dan belanja lain-lain memiliki *government expenditure multiplier* yang berkontribusi pada perekonomian secara agregat.

Dalam jangka menengah kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, menjaga stabilitas harga komoditas strategis, memberikan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di pedesaan dan daerah terpencil, serta memberikan stimulus pada perekonomian secara tepat dan terukur.

Berikut ini adalah perbandingan realisasi belanja di sepuluh Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2007 dan 2008:

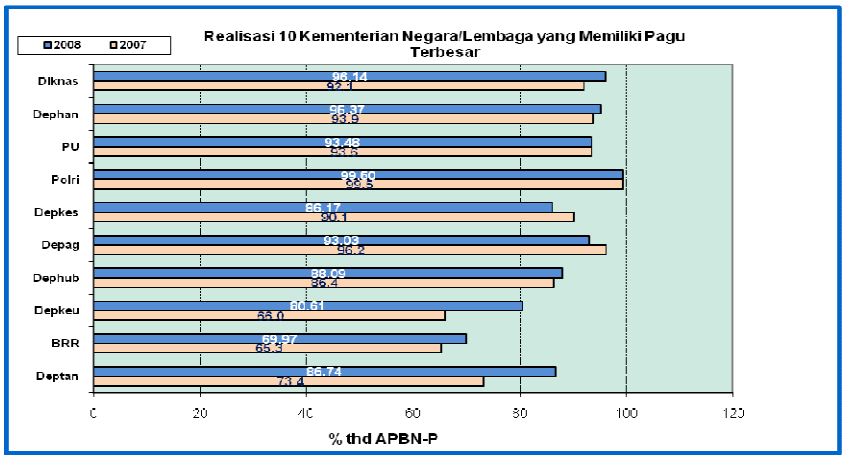

Grafik 25: Persentase Penyerapan Belanja Dibanding Pagu di 10 Kementerian Negara/Lembaga yang Memiliki Pagu Terbesar

Pada tahun 2008, penyerapan terbesar belanja dibandingkan dengan pagunya terdapat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan realisasi senilai 99,50 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi terbesar kedua selanjutnya diikuti oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan realisasi sebesar 96,14 persen dari pagu. Selanjutnya, realisasi terbesar diikuti oleh Departemen Pertahanan (95,37 persen), Departemen PU (93,48 persen), Departemen Agama (93,03 persen), Departemen Perhubungan (88,09 persen), Departemen Pertanian (86,74 persen), Departemen Kesehatan (86,17 persen), Departemen Keuangan (80,61 persen), dan BRR NAD-Nias (69,97 persen).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara masif, beberapa K/L, yang sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2008 diberikan alokasi anggaran cukup besar, karena tugas pokok dan fungsinya. Adapun 10 K/L yang mendapat pagu terbesar tersebut adalah Departemen Pendidikan Nasional dengan realisasi Rp43,55 triliun, Departemen Pertahanan dengan realisasi Rp31,35 triliun, Departemen Pekerjaan Umum dengan realisasi Rp30,67 triliun, POLRI dengan realisasi Rp21,10 triliun, Departemen Kesehatan dengan realisasi Rp15,87 triliun, Departemen Agama dengan realisasi Rp14,87 triliun, Depatemen Perhubungan dengan realisasi Rp13,48 triliun, Departemen Keuangan dengan realisasi Rp12,05 triliun, BRR NAD-Nias dengan realisasi Rp7,62 triliun, dan Departemen Pertanian dengan realisasi Rp7,20 triliun.

Transfer ke daerah sebagai pendukung kebijakan desentralisasi

Urgensi transfer ke daerah sejalan dengan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yakni desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik serta mendukung terjaminnya kesinambungan fiskal. Kebijakan belanja daerah ini juga sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah mulai dilaksanakan Pemerintah sejak tahun 2001.

Alokasi transfer ke daerah terus meningkat tercermin dalam total realisasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2008 sebesar Rp292,43 triliun; naik dibandingkan capaian tahun 2007 senilai Rp253,26 triliun. Realisasi dana perimbangan tahun 2008 tercatat sebesar Rp278,71 triliun; yang terdiri dari realisasi dana bagi hasil senilai Rp78,42 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp179,51 triliun, dana alokasi khusus senilai Rp20,79 triliun. Dengan demikian, sisa transfer ke daerah lainnya tercatat dalam realisasi dana otonomi khusus dan penyesuaian tahun 2008 sebesar Rp13,72 triliun yang terdiri dari dana otonomi khusus sebesar Rp7,51 triliun dan dana penyesuaian sebesar Rp6,21 triliun.

Dana perimbangan 95,31 persen dari total transfer ke daerah dan dana otonomi khusus dan penyesuaian

Realisasi dana perimbangan merupakan komponen terbesar dana transfer ke daerah yakni 95,31 persen dari total dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah dengan nilai nominal Rp278,71 triliun. Sedangkan dana otonomi khusus dan penyesuaian mencapai 4,69 persen dari dana transfer ke daerah senilai Rp13,72 triliun. Dominasi dana perimbangan yang terdiri dari

4,69 persen dari total transfer ke daerah

dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam total alokasi transfer ke daerah merupakan tren yang berjalan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah juga terus memperkuat pilar keuangan daerah melalui transfer dana perimbangan dan dana otsus serta penyesuaian sebagai instrumen utama kebijakan dimaksud.

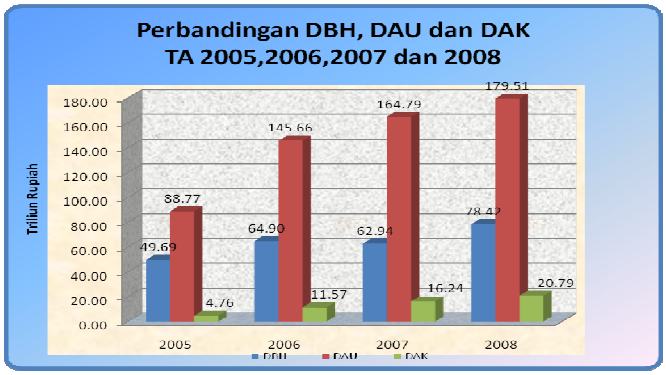

Grafik 26: Perbandingan DBH, DAU, dan DAK

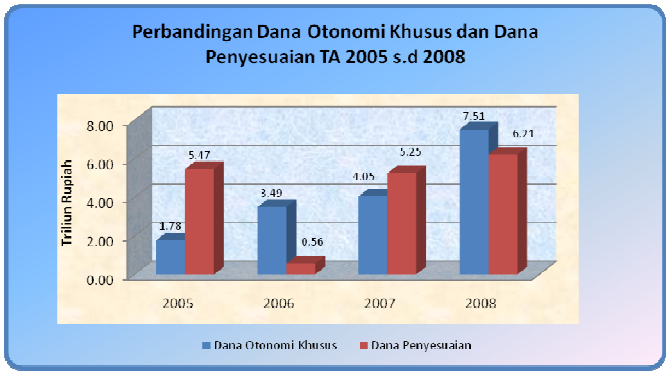

Grafik 27: Perbandingan Dana Perimbangan dan Otsus Penyesuaian

Apabila dilihat dari dua kategori yakni dana perimbangan dan dana otsus dan penyesuaian, terlihat bahwa dominasi komponen transfer ke daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK (Grafik 26). Kontribusi terbesar realisasi dana perimbangan berasal dari DAU yang mencapai nilai Rp179,51 triliun. DBH memberikan kontribusi kedua bagi dana perimbangan 2008 mencapai nilai Rp78,42 triliun diikuti dengan DAK senilai Rp20,79 triliun. Sedangkan dana otonomi khusus dan penyesuaian terus meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian tahun 2008 sebesar Rp13,72 triliun,

Omnibus Regulation sebagai pilar pengelolaan keuangan daerah yang baik

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sub sistem dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya harmonisasi peraturan antara lain dengan diaturnya pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara komprehensif dan terpadu *(omnibus regulation)* dengan mengakomodasi berbagai aturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. PP tersebut antara lain mengatur pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dari uraian di atas terbukti bahwa volume belanja pemerintah terus meningkat. Peningkatan volume belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintah yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang, menjaga stabilitas harga barang dan jasa strategis, serta memantapkan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

3. Pembiayaan

Defisit fiskal tahun 2008 sebesar 0,08 persen dari PDB

Defisit anggaran tahun 2008 mencapai Rp4,12 triliun atau sebesar 0,08 persen dari PDB. Defisit tahun 2008 menurun dibandingkan realisasi defisit anggaran tahun 2007 senilai 1,26 persen terhadap PDB dan 0,87 persen terhadap PDB pada tahun 2006 dan 0,52 persen terhadap PDB tahun 2005. Dengan adanya imbas krisis global dan di tengah berbagai kondisi yang kurang kondusif, pemerintah berhasil menekan angka defisit pada level tersebut melalui upaya efisiensi dan peningkatan kualitas belanja negara *(quality spending)*. Peningkatan defisit ini antara lain juga disebabkan oleh komitmen penuh pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi makro tahun 2008 yang diarahkan untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

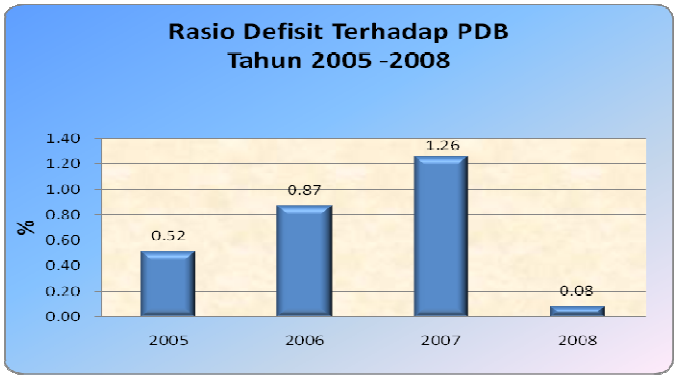

Grafik 28: Persentase Defisit APBN terhadap PDB Tahun 2004 - 2008

Keseimbangan primer yang meningkat

Disamping memberikan perhatian terhadap defisit anggaran, dalam rangka melakukan perencanaan fiskal yang lebih akurat, pemerintah juga berupaya memperbaiki nilai kesimbangan primer. Keseimbangan primer *(primary balance)* mencapai sebesar Rp84,31 triliun (1,7 persen terhadap PDB), sedangkan secara keseluruhan APBN mengalami defisit sebesar Rp4,12 triliun atau sekitar 0,08 persen terhadap PDB (Grafik 28). Dalam empat tahun terakhir defisit berhasil ditekan sedangkan keseimbangan primer berfluktuasi tipis dalam tahun 2004, 2005, dan 2006 dan meningkat tajam di tahun 2008. Keseimbangan primer dapat dijadikan acuan untuk melakukan perencanaan fiskal dengan memperhatikan apakah kesulitan fiskal berasal dari aktivitas pinjaman pemerintah yang terakumulasi dalam bentuk utang. Keseimbangan primer yang meningkat tajam di tahun 2008 antara lain diakibatkan oleh rendahnya nilai defisit yang secara signifikan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

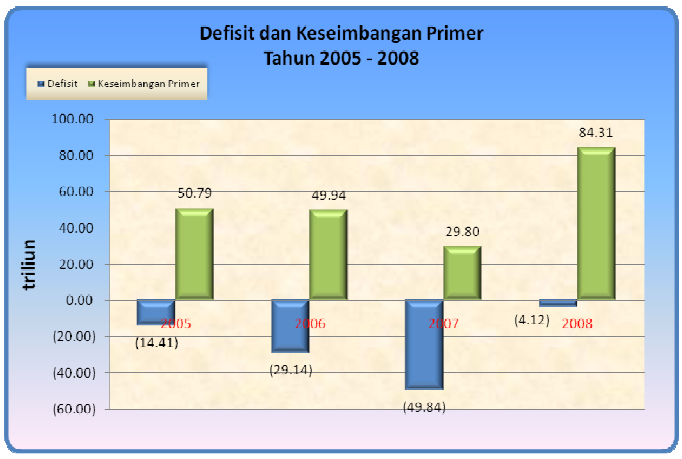

Grafik 29: Defisit dan Keseimbangan Primer

Realisasi pembiayaan yang meningkat

Dalam rangka membiayai defisit, pemerintah melakukan penggalangan sumber dana yang bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi pembiayaan dalam negeri sebesar Rp97,29 triliun (2,0 persen terhadap PDB), dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar minus Rp13,22 triliun (0,3 persen dari PDB). Adapun sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari realisasi penyertaan modal negara minus Rp2,50 triliun, realisasi RDI/RDP sebesar minus Rp5,19 triliun dan pembiayaan lain-lain sebesar Rp15,86 triliun. Dalam rangka membiayai defisit, pemerintah melakukan strategi pembiayaan yang aman yakni mendorong kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makro seperti inflasi. Pembiayaan terus meningkat dari tahun ke tahun, realisasi tahun 2008 sebesar Rp84,07 triliun meningkat 98,00 persen dari realisasi pembiayaan tahun 2007 senilai Rp42,46 triliun dan nilai tersebut juga mengalami tren kenaikan dari tahun 2006 sebesar Rp29,42 triliun. (Grafik 30).

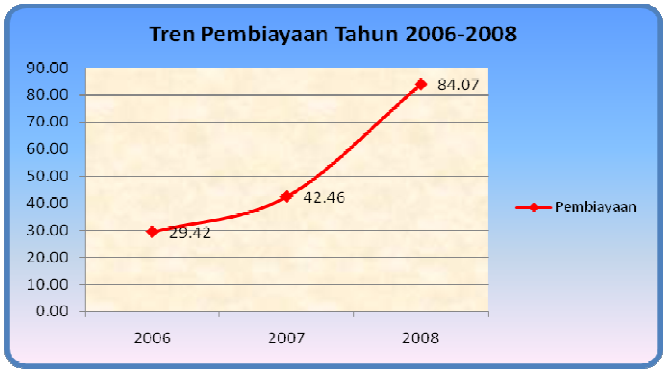

Grafik 30: Tren Pembiayaan Tahun Anggaran 2006-2008

Salah satu sumber pembiayaan yang menjadi prioritas pemerintah adalah pembiayaan yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Dinamika harga minyak dunia dan ekspektasi inflasi telah menekan kinerja pasar SBN akibat meningkatnya risiko fiskal. Pada tahun 2008, *yield* SBN mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya ekspektasi inflasi. Realisasi pembiayaan dalam negeri antara lain berasal dari realisasi penerbitan SBN neto senilai Rp85,9 triliun (Rp31,9 triliun atau 27,1 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN-P). Tidak terealisasinya target pembiayaan yang berasal dari SBN ini antara lain diakibatkan oleh tidak kondusifnya pasar obligasi sebagai dampak krisis keuangan global sehingga pemerintah menghentikan penerbitan SBN sejak bulan November 2008. Kepemilikan SBN oleh asing selama November 2008 mencapai Rp4,4 triliun.

SiLPA tahun 2008 sebesar Rp79,95 triliun

Selanjutnya, kelebihan pembiayaan SiLPA sebesar Rp79,95 triliun merupakan implikasi dari lebih rendahnya realisasi defisit APBN-P TA 2008. Dana SiLPA tahun 2008 di tahun yang akan datang akan digunakan untuk membiayai kegiatan tahun 2008 yang diluncurkan ke tahun 2009 (yaitu antara lain untuk PNPM) serta untuk membiayai defisit tahun 2009.

Boks 6
Dampak APBN 2008 terhadap Sektor Riil

Signifikansi realisasi APBN terhadap perekonomian khususnya sektor riil tercermin dari kontribusinya terhadap PDB. Kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi stabilitasi, distribusi dan alokasi diarahkan pada stimulus pertumbuhan melalui langkah-langkah proaktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Dampak APBN terhadap sektor riil tahun 2008 merupakan salah satu indikator yang mengindikasikan dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian tahun 2008. Dalam kondisi yang lesu, kebijakan diarahkan kepada stimulus fiskal antara lain melalui pengeluaran pemerintah yang bersifat *autonomous* yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, pada saat *overheating economy*, intervensi

kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah bersifat kontraktif untuk menyeimbangkan *agregat demand* dan penyediaan sumber-sumber daya perekonomian.

Dampak APBN terhadap sektor riil

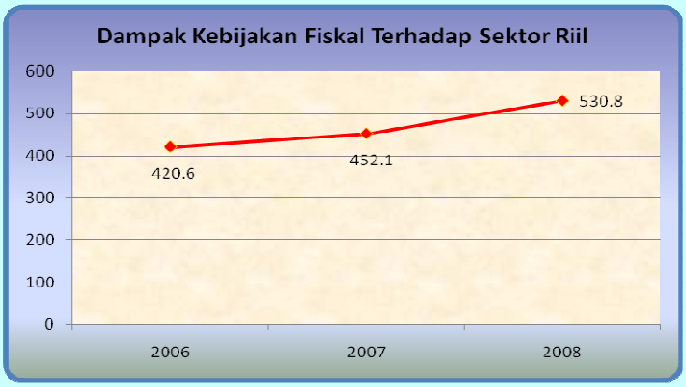

Grafik 31: Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Riil

Total dampak kebijakan fiskal terhadap sektor riil terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2008 dampak intervensi pemerintah melalui pembelanjaan publik dan perpajakan mencapai nilai Rp530,8 triliun, meningkat dari nilai Rp452,1 triliun di tahun 2007 dan Rp420,6 triliun di tahun 2006.

Komponen komposisi konsumsi pemerintah dalam APBN TA 2008 mencapai 362,99 triliun atau sekitar 7,3 persen terhadap PDB, menurun sebesar 4,8 persen dari realisasi konsumsi pemerintah tahun 2007. Realisasi Pembentukan Modal Domestik Bruto (PMDB) sebesar 3,4 persen terhadap PDB. Walaupun secara nominal besaran PMDB meningkat sebesar 15,1 persen dari realisasi tahun 2007, persentase PMDB terhadap PDB menurun sebesar 8,1 persen dibandingkan dengan PMDB tahun 2007 yang antara lain juga diakibatkan oleh meningkatnya nilai PDB tahun 2008 sebesar Rp4.954 triliun. Sumber utama PMDB pemerintah tahun 2008 berasal dari realisasi belanja modal pemerintah pusat yang mencapai Rp72,77 triliun (1,5 persen dari PDB) dan realisasi belanja modal pemerintah daerah senilai Rp95,04 triliun (1,9 persen dari PDB). Dengan demikian, dampak APBN TA 2008 pada sektor riil mencapai Rp530,80 triliun (10,7 persen dari PDB).

Tabel 2
Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Sektor Rill Tahun 2008

No.	Rincian	Tahun 2008		Tahun 2007	
		Real (Rp triliun)	persen thd PDB	Real (Rp triliun)	persen thd PDB
1	Konsumsi Pemerintah (a-b)	362,99	7,3	306,22	7,7
	a. Belanja Barang dan Jasa	396,51	8,0	372,62	8,3
	Belanja Pegawai	112,83	2,3	90,31	2,3
	Belanja Barang	55,96	1,1	52,93	1,3
	Belanja Rutin Daerah	197,39	4,0	169,01	4,3
	Belanja Lainnya	30,33	0,6	15,58	0,4
	b. Pendapatan Barang dan Jasa	33,53	0,7	21,40	0,5
2.	Pembentukan Modal Domestik Bruto	167,81	3,4	145,85	3,7
	Pemerintah Pusat	72,77	1,5	64,13	1,6
	Pemerintah Daerah	95,04	1,9	81,37	2,1
Jumlah 1 dan 2		530,80	10,7	452,07	11,4

Suspen

Salah satu upaya *internal control system* yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun sistem akuntansi yang mampu melaksanakan mekanisme *check and balance*. Salah satu indikator membaiknya sistem pengendalian internal adalah menurunnya jumlah suspen yang memberikan jaminan bahwa kepatuhan terhadap sistem telah terpenuhi dan mengindikasikan keandalan data laporan keuangan. Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut K/L dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

(BUN). Suspen di tahun 2008 senilai minus Rp58,72 miliar; sedangkan tahun 2007 sebesar minus Rp236,53 miliar dan tahun 2006 sebesar Rp916,77 miliar (Grafik 32).

Grafik 32: Perkembangan Suspen Tahun 2006-2008

Tabel 3
Persentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2008 terhadap PDB

Uraian	2008			
	APBN-P (Rp triliun)	persen thd PDB	Real (Rp triliun)	persen thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Penerimaan Perpajakan	609,2	12,3	658,7	13,3
a. Pajak Dalam Negeri	580,2	11,7	622,4	12,6
b. Pajak Perdagangan Internasional	29,0	0,6	36,3	0,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	282,8	5,7	320,6	6,5
a. SDA	192,8	3,9	224,5	4,6
b. Bagian Laba BUMN	31,2	0,6	29,1	0,6
c. PNBP Lainnya	58,8	1,2	67,0	1,4
3. Hibah	2,9	0,1	2,3	0,1
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	894,9	18,1	981,6	19,8
Belanja Negara				
1. Belanja Pemerintah Pusat	697,1	14,1	693,4	14,0
a. Belanja Pegawai	123,5	2,5	112,8	2,3
b. Belanja Barang	67,5	1,4	56,0	1,1
c. Belanja Modal	85,1	1,7	72,8	1,5
d. Pembayaran Bunga Utang	94,8	1,9	88,4	1,8
e. Subsidi	234,4	4,7	275,3	5,6
f. Bantuan Sosial	59,7	1,2	57,7	1,2
g. Belanja Lain-lain	32,1	0,7	30,3	0,6
2. Transfer ke Daerah	292,4	5,9	292,4	5,9
a. Dana Perimbangan	278,4	5,6	278,7	5,6
i. DBH	77,7	1,6	78,4	1,6
ii. DAU	179,5	3,6	179,5	3,6
iii. DAK	21,2	0,4	20,8	0,4
b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	14,0	0,3	13,7	0,3
i. Dana Otonomi Khusus	7,5	0,2	7,5	0,2
ii. Dana Penyesuaian	6,5	0,1	6,2	0,1
Jumlah Belanja Negara	989,5	20,0	985,7	19,9
Defisit Anggaran	(94,5)	(1,9)	(4,1)	(0,08)
Pembiayaan	(94,5)	(1,9)	84,07	1,7

Tabel 4
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2008 dan 2007

No.	Indikator	2007	2008	Ket
1.	Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp Triliun)	1.964,0	2.082,1	(1)
2.	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	3.957,4	4.954,0	(1)
3.	PDB per Kapita (Rp Juta)	17,6	21,7	(1)
4.	Pertumbuhan PDB (persen)	6,3	6,1	(1)
5.	Inflasi (persen)	6,6	11,1	(1)
6.	Total Ekspor (USD Miliar)	113,9	136,8	(1)
7.	Ekspor Non Migas (USD Miliar)	91,9	107,8	(1)
8.	Total Impor (USD Miliar)	74,4	128,8	(1)
9.	Impor Non Migas (USD Miliar)	52,5	98,3	(1)
10.	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	56,9	51,6	(2)
11.	Rupiah/USD (Kurs Tengah Bank Indonesia)	9.419,0	10.950	(2)
12.	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	707,8	981,6	(4)
13.	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	757,7	985,7	(4)
14.	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	49,8	4,1	(4)
15.	Uang Primer (Rp Triliun)	379,6	344,7	(2)
16.	Uang Beredar (Rp Triliun)			
	a. Arti Sempit (M1)	460,8	466,4	(2)
	b. Arti Luas (M2)	1.643,2	1.883,9	(2)
17.	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	993,3	1.315,7	(2)
18.	Suku Bunga (persen per tahun)			
	a. SBI 1 bulan	8,6	9,2	(2)
	b. Deposito 1 bulan	7,6	8,2	(2)
	c. Kredit Modal Kerja	13,0	15,2	(2)
	d. Kredit Investasi	13,0	14,4	(2)
19.	Realisasi Investasi			
	a. Domestik (Rp Triliun)	34,9	5.712	(5)
	b. Asing (USD Miliar)	10,3	4.856	(5)
20.	IHSG BEJ	2.745,8	1.355,0	(2)
21.	Peringkat Daya Saing Indonesia	50,0	55,0	(5)
22.	Rasio Utang terhadap PDB (DSR, persen)	36	33	(3)

Sumber:
(1) Badan Pusat Statistik
(2) Bank Indonesia
(3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan
(4) Laporan Realisasi APBN, Departemen Keuangan
(5) Badan Koordinasi Penanaman Modal

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan BUN, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk LKPP Tahun 2008, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (K/L) dan entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup meliputi:

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	32
4	BA 005	Mahkamah Agung	786
5	BA 006	Kejaksaan Agung	498
6	BA 007	Sekretariat Negara	13
7	BA 010	Departemen Dalam Negeri	930
8	BA 011	Departemen Luar Negeri	131
9	BA 012	Departemen Pertahanan	253
10	BA 013	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	754
11	BA 015	Departemen Keuangan	1.031
12	BA 018	Departemen Pertanian	3.101
13	BA 019	Departemen Perindustrian	184
14	BA 020	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	90
15	BA 022	Departemen Perhubungan	725
16	BA 023	Departemen Pendidikan Nasional	399
17	BA 024	Departemen Kesehatan	826
18	BA 025	Departemen Agama	4.027
19	BA 026	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	535
20	BA 027	Departemen Sosial	205
21	BA 029	Departemen Kehutanan	355
22	BA 032	Departemen Kelautan dan Perikanan	744
23	BA 033	Departemen Pekerjaan Umum	1.068
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1
27	BA 040	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	51
28	BA 041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1
29	BA 042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	12
30	BA 043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	47
31	BA 044	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	40
32	BA 047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	7

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
33	BA 048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	474
38	BA 055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	449
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	32
41	BA 059	Departemen Komunikasi dan Informatika	56
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	956
43	BA 063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	35
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	9
47	BA 067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	38
48	BA 068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
50	BA 075	Badan Meteorologi dan Geofisika	185
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	495
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	24
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	19
58	BA 083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	4
59	BA 084	Badan Standarisasi Nasional	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	12
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	32
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31
65	BA 090	Departemen Perdagangan	229
66	BA 091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	6
67	BA 092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1
69	BA 094	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias	131
70	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2
71	BA 100	Komisi Yudisial	1
72	BA 103	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	1
73	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	20
74	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1
75	BA 061	Cicilan Bunga Utang *)	1
76	BA 062	Subsidi dan Transfer *)	85
77	BA 069	Belanja Lain-lain *)	2.030
78	BA 070	Dana Perimbangan *)	-

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
79	BA 071	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus *)	-
80	BA 096	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri *)	1
81	BA 097	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri *)	1
82	BA 098	Penerusan Pinjaman *)	1
83	BA 099	Penyertaan Modal Negara *)	3
84	BA 101	Penerusan Pinjaman sebagai Hibah *)	-
85	BA 102	Penerusan Hibah *)	-
		Total Satuan Kerja	22.399

*) Merupakan bagian dari Bagian Anggaran BUN (BA 999). Laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BUN. BA 101 dan BA 102 dalam TA 2008 tidak terdapat realisasi anggaran.

LKPP Tahun 2008 (*Audited*) ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Radio Republik Indonesia (RRI);
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2008 (*Audited*) ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN) serta BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Sementara itu, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi

Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP), Sistem Akuntansi transaksi khusus, dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Utang, Investasi, Penyertaan Modal, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.

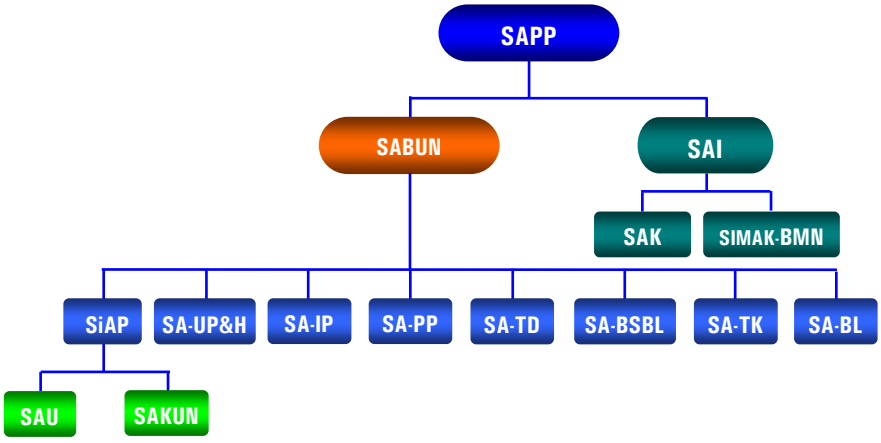

Kerangka Umum SAPP

Alur penyusunan LKPP dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

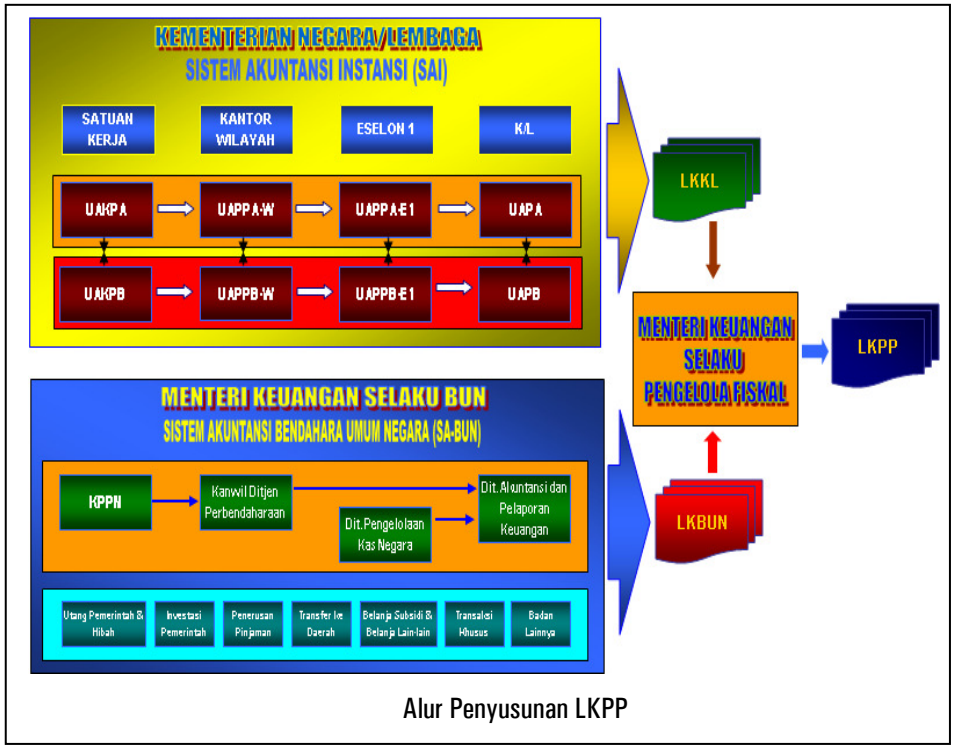

Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2008 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2008 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L.
   - Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2008 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara.

2. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi neraca K/L dan data yang dikelola Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset pemerintah. Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, investasi jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang didasarkan pada data Departemen Keuangan. Sedangkan data Penyertaan Modal Negara berasal dari Kementerian Negara BUMN. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2008 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000 dan rekening 600.502.411), termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sampai dengan Tahun 2008, seluruh K/L telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangannya, kecuali Departemen Pertahanan.

Mulai TA 2008, sesuai dengan PMK 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar, mata anggaran untuk pengembalian pendapatan/belanja tahun berjalan ditiadakan. Pengembalian pendapatan/belanja langsung mengurangi mata anggaran pendapatan/belanja yang bersangkutan.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2008 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pada LKPP tahun sebelumnya, penerbitan/pelunasan Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing disajikan di Laporan Arus Kas sebagai bagian dari Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri. Pada LKPP Tahun 2008 ini, penerbitan/pelunasan obligasi Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing disajikan di Laporan Arus Kas sebagai bagian dari Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, penerbitan/pelunasan Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing merupakan bagian dari pembiayaan dalam negeri.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan. Terkait dengan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran dan kas lain di luar UP yang disimpan oleh Bendahara Pengeluaran, pada LKPP Tahun 2008 tidak disajikan pada Neraca, namun diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang

telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada LKPP Tahun 2008 ini, Pemerintah belum menerapkan kebijakan pencadangan atas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD, dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut:
  a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK;
  b. Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

Selain itu, dana kelolaan beserta nilai tambahnya yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) di Departemen Keuangan yang berasal dari BA 099 (Penyertaan Modal Negara) disajikan sebagai investasi non permanen dalam LKPP, sesuai dengan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 16. Sedangkan dana kelolaan BLU yang masih berupa kas disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan pada pos Aset Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) BI.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Dengan demikian, aset-aset yang berstatus BPYBDS yang telah dilaporkan pada neraca K/L akan dieliminasi pada saat konsolidasi LKPP.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pngerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008 pada harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2008.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPP Tahun 2008, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang **belum disusutkan/didepresiasi**. Hal ini disebabkan antara lain belum diselesaikannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut pada seluruh kementerian negara/lembaga secara nasional.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, rekening penjaminan, rekening khusus, Dana Abadi Umat, dan kas besi perwakilan RI di luar negeri.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet K/L yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Departemen Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds, zero coupon bonds,* dan *international bonds* yang dikelola Departemen Keuangan.

Pada LKPP tahun sebelumnya, saldo obligasi Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing disajikan di Neraca sebagai bagian dari Utang Jangka Panjang Luar Negeri. Pada LKPP Tahun 2008 ini, saldo Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing disajikan di Neraca sebagai bagian dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, penerbitan dan pelunasan Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing merupakan bagian dari pembiayaan dalam negeri.

Fixed Rate Bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 9,00 persen sampai 15,57 persen, yang terdiri dari 39 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2008 sampai 2037. Selain itu, terdapat 3 (tiga) seri Obligasi Republik Indonesia (ORI), yaitu ORI001, ORI002, dan ORI003 dengan tingkat kupon berkisar 9,28 persen sampai 12,05 persen yang akan jatuh tempo antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Baik obligasi jenis FR maupun ORI, dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Variable Rate Bonds-VR adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai akhir Tahun 2008, terdapat 19 seri VR yang jatuh temponya berkisar antara tahun 2008 sampai dengan 2020. Obligasi VR adalah obligasi yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-005 adalah surat utang yang diterbitkan terkait dengan pemberian kredit

program, khususnya kredit kepada usaha kecil dan menengah. Tingkat bunga SU-005 ditetapkan sebesar tingkat bunga SBI 3 bulan dan dibayar setiap enam bulan (*semiannually*) yaitu setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember. Pokok SU-005 mulai diamortisasi/dicicil secara *semiannually* sejak 10 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2009.

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi perhitungan indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025.

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.

International Bond adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Pada saat ini terdapat 6 (enam) seri international bond yang berdenominasi USD, yaitu RI0014, RI0015, RI0016, RI0017, RI0035, dan RI0037. Obligasi tersebut memiliki tingkat kupon sebesar 6,625 persen sampai dengan 8,5 persen dengan masa jatuh tempo mulai tahun 2014 sampai dengan 2037.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada akhir tahun 2008, terdapat 2 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001 dan IFR0002 dengan masa jatuh tempo masing-masing tahun 2015 dan 2018 dengan tingkat imbalan 11,8% dan 11,95%.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan 2 seri SPN, yaitu SPN 20090430 dan SPN 20090731.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak

perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi pemerintah, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liablility* berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(8) Kurs Valuta Asing

Kurs Valuta Asing

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan LKPP Tahun 2008, transaksi dalam mata uang USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang USD tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Namun, transaksi dalam mata uang asing selain USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang

asing selain USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kurs tengah BI (Rupiah terhadap 1 USD) pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 masing-masing sebesar Rp9.419 dan Rp10.950.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2008 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan bagian lancar utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi. Penyajian selisih kurs pada ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi untuk jangka panjang luar negeri dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang setiap utang per mata uang asing.

(9) Perubahan Bagan Akun Standar

Reklasifikasi akun sesuai dengan Bagan Akun Standar

Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas Tahun 2008 adalah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007. Dengan demikian, pos-pos pada Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas Tahun 2007 yang disajikan sebagai pembanding dalam LKPP Tahun 2008 ini telah direklasifikasi dan disesuaikan dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007.

Beberapa reklasifikasi akun yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan tahun 2007 adalah:

Uraian	LKPP Tahun 2007	LKPP Tahun 2008
Laporan Realisasi APBN dan Laporan Arus Kas	Pendapatan luran dan Denda termasuk dalam Pendapatan Sumber Daya Alam	Pendapatan luran dan Dendatermasuk dalam PNBP Lainnya
Neraca	Utang PSO/Subsidi termasuk dalam Utang kepada Pihak Ketiga	Utang Subsidi mempunyai pos tersendiri
	Surat Perbendaharaan Negara termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Surat Perbendaharaan Negara mempunyai akun tersendiri

(10) Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Non Anggaran

Pada LKPP tahun sebelumnya, klasifikasi transaksi non anggaran pada Laporan Arus Kas dibagi menjadi 2 pos, yaitu Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Transaksi Antar Kantor yang disajikan secara neto. Pada LKPP Tahun 2008, klasifikasi transaksi non anggaran pada Laporan Arus Kas dibagi menjadi 5 pos, yaitu Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Kiriman Uang, *Prefinancing*, Transito, dan Penempatan Dana Pemerintah yang disajikan secara neto. Hal ini dilakukan dalam rangka pengungkapan yang memadai mengenai transaksi non anggaran.

(11) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi

Beberapa perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi penyajian Neraca per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah:

No	Pos Aset/Kewajiban	LKPP Tahun 2007	LKPP Tahun 2008
1	Uang Muka dari BUN	Akun lawannya adalah Dana Lancar Lainnya	Akun lawannya adalah Cadangan Piutang
2	Piutang Migas KKKS dan Panas Bumi	Akun lawannya adalah Pendapatan yang Ditangguhkan	Akun lawannya adalah Cadangan Piutang
3	Obligasi Internasional (valas)	Termasuk dalam Utang Jangka Panjang Luar Negeri	Termasuk dalam Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
4	Selisih Kurs	Termasuk dalam Ekuitas Dana Lancar	Dibagi menjadi 2: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Selisih kurs per 31 Desember 2007 seluruhnya disajikan dalam Ekuitas Dana Investasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp981.609.433.326.137, yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah.

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dalam tahun 2008 antara lain mencakup: (i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD), dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik; dan (iii) langkah-langkah administrasi yang terus-menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp658.700.790.664.236, PNBP sebesar Rp320.604.629.562.680, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp2.304.013.099.221.

Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat pada Grafik 33.

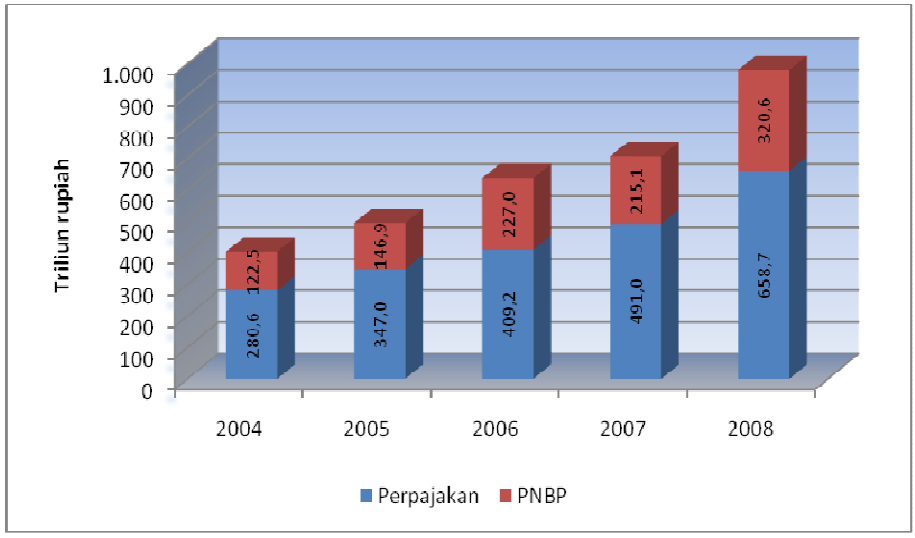

Grafik 33: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2004-2008

Sementara itu, Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Negara meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2008 sebesar Rp985.730.751.086.613 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp693.355.992.079.878, Transfer ke Daerah sebesar Rp292.433.480.615.255, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp58.721.608.520.

Perkembangan realisasi Belanja Negara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 34.

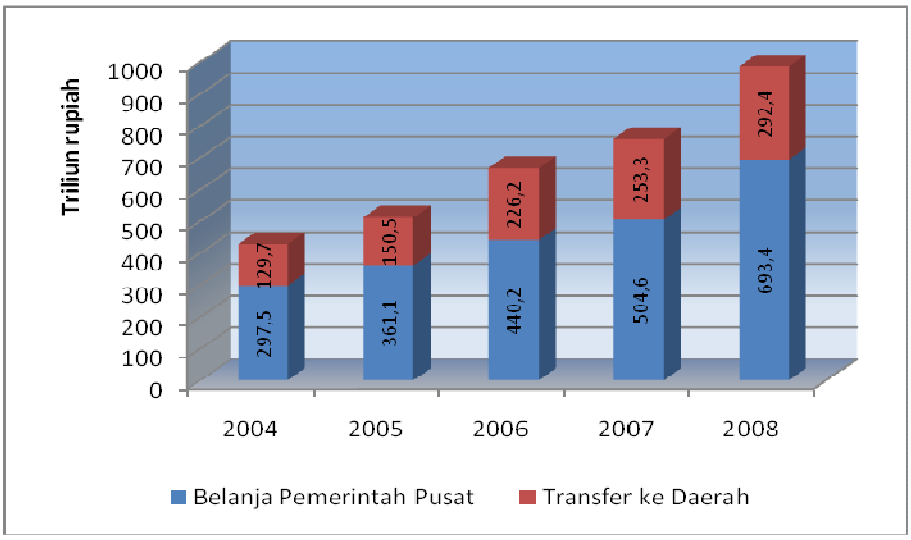

Grafik 34: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2004-2008

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp981.609.433.326.137 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp985.730.751.086.613, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2008 sebesar Rp4.121.317.760.476

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2008 adalah sebesar Rp84.071.748.066.005, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp97.288.308.876.176, Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp13.216.560.810.171.

Realisasi Pembiayaan Neto yang melebihi Defisit Anggaran mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2008 sebesar Rp79.950.430.305.529.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp981,61 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008 adalah sebesar Rp981.609.433.326.137, berarti mencapai 109,68 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp894.990.546.173.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 35.

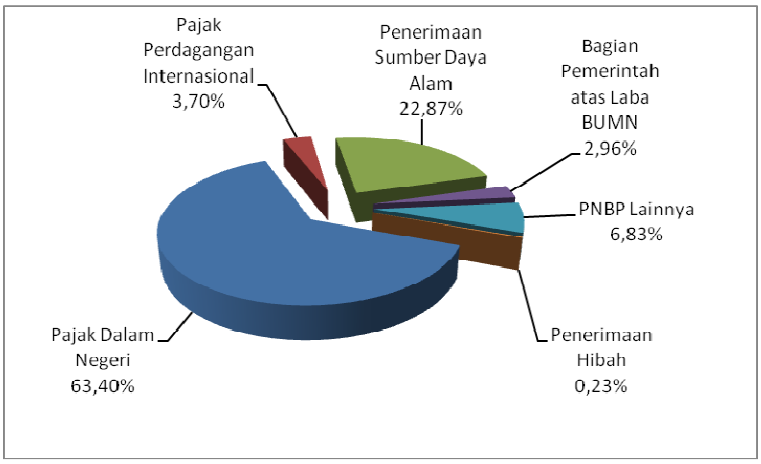

Grafik 35: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan Rp658,700 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2008 adalah sebesar Rp658.700.790.664.236 atau mencapai 108,12 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp609.227.490.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2008 lebih besar Rp167.712.155.710.146 atau naik 34,16 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Penerimaan pajak dalam negeri Rp622,36 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2008 adalah sebesar Rp622.358.691.313.241 atau mencapai 107,26 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp580.248.290.000.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2008 lebih besar Rp152.306.875.580.201 atau 32,40 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
PPh Migas	77.018.903.127.805	44.000.473.091.966
PPh Nonmigas	249.837.362.107.152	194.430.452.975.939
PPh Fiskal *)	641.450.975.798	-
PPN dan PPnBM	209.647.424.433.640	154.526.773.832.995
PBB	25.354.279.618.301	23.723.546.008.858
BPHTB	5.573.095.008.708	5.953.378.541.995
Cukai	51.251.752.624.651	44.679.463.855.018
Pajak Lainnya	3.034.423.417.186	2.737.727.426.269
Jumlah	**622.358.691.313.241**	**470.051.815.733.040**

*) *Pendapatan PPh Fiskal untuk Tahun Anggaran 2007 menjadi bagian dari Pendapatan PPh Nonmigas, dengan Mata Anggaran PPh Final dan Fiskal Luar Negeri.*

Dalam penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2008, termasuk penerimaan atas pajak yang ditanggung Pemerintah (DTP) dalam bentuk subsidi pajak (***Lihat Catatan B.2.2.1. Belanja Subsidi***), yaitu:

1. Subsidi PPh sebesar Rp1.300.000.000.000, yang terdiri dari:
   a. Subsidi PPh Obligasi Internasional (*Global Bonds*) sebesar Rp800.000.000.000.
   b. Subsidi PPh Panas Bumi sebesar Rp500.000.000.000 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.766/KMK.04/1992.
2. Subsidi PPN sebesar Rp19.714.630.640.803, yang terdiri dari:
   a. Subsidi PPN atas Barang-Barang Eksplorasi sebesar Rp49.630.640.803 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.178/PMK.011/2007.
   b. Subsidi PPN atas Penyerahan BBM Pertamina sebesar Rp14.765.000.000.000.
   c. Subsidi PPN atas Penyerahan Minyak Goreng sebesar Rp3.000.000.000.000 sesuai dengan PMK No.14/PMK.011/2008.
   d. Subsidi PPN atas Penyerahan Tepung Terigu dan Gandum sebesar Rp1.900.000.000.000 sesuai dengan PMK No.10/PMK.011/2008 dan PMK No.25/PMK.011/2008.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak perdagangan internasional Rp36,34 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 adalah sebesar Rp36.342.099.350.995, atau mencapai 125,41 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp28.979.200.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 lebih besar Rp15.405.280.129.945 atau 73,58 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Bea Masuk	22.763.778.701.766	16.699.443.059.175
Pajak/Pungutan Ekspor	13.578.320.649.229	4.237.376.161.875
Jumlah	**36.342.099.350.995**	**20.936.819.221.050**

Dalam penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 2008, termasuk penerimaan atas pajak yang ditanggung Pemerintah (DTP) dalam bentuk subsidi Bea Masuk sebesar Rp3.573.882.791.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp320,60 triliun

Realisasi PNBP TA 2008 adalah sebesar Rp320.604.629.562.680 atau mencapai 113,36 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp282.814.420.373.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2008 lebih besar Rp105.484.924.151.348 atau 49,04 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp224,46 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2008 adalah sebesar Rp224.463.006.839.205, atau mencapai 116,43 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp192.789.424.468.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2008 lebih besar Rp91.579.534.107.955 atau 68,92 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	169.022.232.949.516	93.604.459.694.458
Pendapatan Gas Bumi	42.594.738.596.246	31.179.214.032.362
Pendapatan Pertambangan Umum	9.511.320.109.439	5.877.885.712.092
Pendapatan Kehutanan *)	2.315.527.436.916	2.105.668.217.682
Pendapatan Perikanan *)	77.803.662.790	116.245.074.656
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	941.384.084.298	-
Jumlah	**224.463.006.839.205**	**132.883.472.731.250**

**) Terdapat reklasifikasi beberapa mata anggaran (akun) yang semula (TA 2007) masuk dalam klasifikasi Penerimaan SDA, pada TA 2008 masuk dalam PNBP Lainnya, yaitu sebesar Rp9.116.221.609.*

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp29,09 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008 adalah sebesar Rp29.088.370.115.749 atau mencapai 93,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp31.244.300.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008 lebih besar Rp5.865.864.583.869 atau naik 25,26 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pend. Laba BUMN Perbankan	4.505.885.921.805	3.304.642.991.498
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	24.582.484.193.944	19.917.859.540.382
Jumlah	**29.088.370.115.749**	**23.222.502.531.880**

Daftar 10 besar BUMN penghasil deviden TA 2008 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Daftar 10 Besar BUMN Penghasil Deviden TA 2008
(Dalam Rupiah)

No.	BUMN	Jumlah	% dari Total Pend. Laba BUMN
1	PT Pertamina	14.105.932.879.749	48,49%
2	PT Telkom	4.206.500.016.562	14,46%
3	PT Bank Mandiri	2.619.540.000.000	9,01%
4	PT Bank Rakyat Indonesia	1.374.380.000.000	4,72%
5	PT Aneka Tambang	1.334.439.715.180	4,59%
6	PT Timah	579.992.400.000	1,99%
7	PT Freeport Indonesia	477.697.869.000	1,64%
8	PT Semen Gresik	452.782.261.960	1,56%
9	Perusahaan Gas Negara	429.126.020.233	1,48%
10	PT Pelabuhan Indonesia II	383.440.000.000	1,32%
	Total 10 BUMN	**25.963.831.162.684**	**89,26%**

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp67,05 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2008 adalah sebesar Rp67.053.252.607.726 atau 114,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp58.780.695.905.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2008 lebih besar Rp8.039.525.459.524 atau naik 13,62 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	19.921.267.890.997	13.123.934.653.902
Pendapatan Jasa	16.109.119.953.280	11.285.134.857.855
Pendapatan Bunga	498.956.999.716	687.536.633.569
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	483.533.775.811	78.312.985.638
Pendapatan Pendidikan	4.144.460.220.207	3.326.172.118.270
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	581.543.822.550	47.324.054.456
Pendapatan Iuran dan Denda *)	648.294.535.990	481.944.964.131
Pendapatan Lain-lain	20.931.781.223.068	27.852.130.612.115
Pendapatan BLU	3.734.294.186.107	2.131.236.268.266
Jumlah	**67.053.252.607.726**	**59.013.727.148.202**

**) Klasifikasi mata anggaran untuk TA 2007 telah disesuaikan dengan klasifikasi TA 2008. Terdapat reklasifikasi beberapa mata anggaran (akun) yang semula (TA 2007) masuk dalam klasifikasi Penerimaan SDA, pada TA 2008 masuk dalam PNBP Lainnya sebesar Rp9.116.221.609.*

Dalam Pendapatan Penjualan dan Sewa TA 2008 sebesar Rp19.921.267.890.997 termasuk Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas yang berasal dari pengembalian *cost-recovery* PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5.840.253.258.336 dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp10.739.660.000.000.

Sementara itu, Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Pendapatan BLU Rp3,73 triliun

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	3.285.835.260.462	2.019.622.198.247
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	22.747.189.112	0
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	171.020.824.627	111.614.070.019
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	3.479.603.274.201	2.131.236.268.266
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	165.335.270.375	0
Pendapatan BLU Lainnya	89.355.641.531	0
Jumlah	**3.734.294.186.107**	**2.131.236.268.266**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp2,30 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp2.304.013.099.221 atau 78,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.948.635.800.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2008 lebih besar Rp606.265.159.718 atau naik 35,71 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara Rp985,73 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2008 adalah sebesar Rp985.730.751.086.613 atau 99,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp989.493.806.673.000. Belanja Negara TA 2008 lebih besar Rp228.080.838.195.735 atau 30,10 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2007. Realisasi Belanja Negara terdiri dari *(i)* Belanja Pemerintah Pusat dan *(ii)* Transfer untuk Daerah.

Berdasarkan alokasi peruntukkannya, komposisi Belanja Negara TA 2008 dapat disajikan pada Grafik 36.

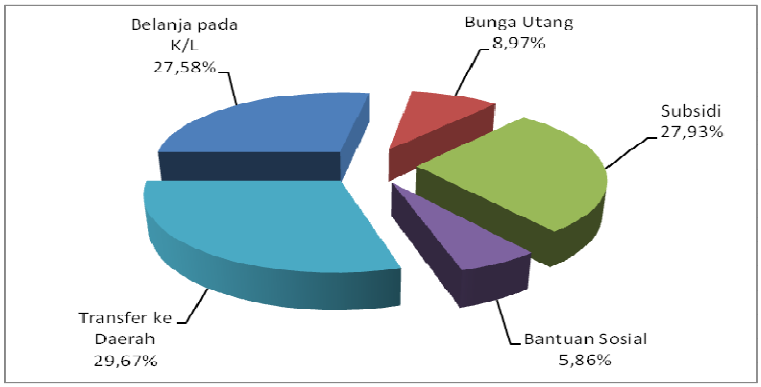

Grafik 36: Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2008

Alokasi untuk kementerian negara/lembaga (K/L), antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemerintahan.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Rp693,36 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 adalah sebesar Rp693.355.992.079.878 atau 99,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp697.071.006.590.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 lebih besar Rp188.732.728.492.846 atau 37,40 persen dari Realisasi TA 2007.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 062 (Subsidi dan Transfer) sebesar Rp275.291.454.173.929 atau 39,70 persen dari total belanja.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2008 pada K/L (tidak termasuk BA 061 (Cicilan Bunga Utang), BA 062 (Subsidi dan Transfer), dan BA 069 (Belanja Lain-lain)) adalah sebesar Rp259.701.858.617.290. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp43.546.943.727.032 atau 6,29 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat dan 16,77 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam

persentase) selain BA 061, BA 062, dan BA 069 dalam TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 37.

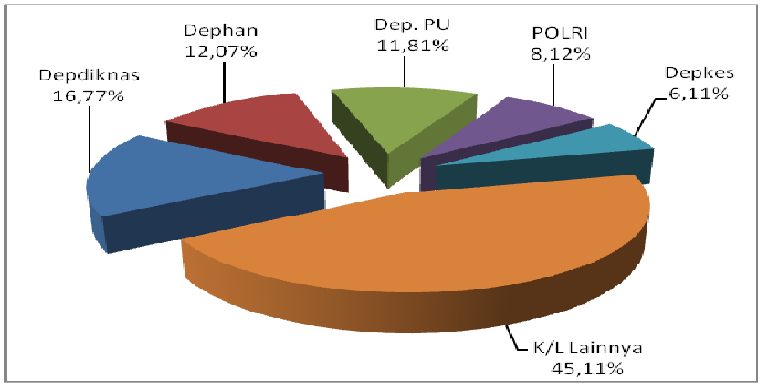

Grafik 37: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2008

Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Daftar 2.**

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2008 dan 2007 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 6
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2008	TA 2007
01	Pelayanan Umum	534.568.682.409.369	316.139.260.908.537
02	Pertahanan	9.158.461.735.835	30.685.860.754.906
03	Ketertiban dan Keamanan	7.019.192.561.913	28.315.877.968.474
04	Ekonomi	50.484.770.309.021	42.221.943.292.024
05	Lingkungan Hidup	5.315.103.004.522	4.952.579.575.714
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	12.448.653.570.344	9.134.607.348.313
07	Kesehatan	14.038.943.551.628	16.004.456.928.185
08	Pariwisata dan Budaya	1.293.674.296.484	1.851.230.677.806
09	Agama	745.676.710.392	1.884.193.559.998
10	Pendidikan	55.297.963.120.090	50.843.367.968.915
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	2.986.353.813.893	2.650.370.769.523
	Total *)	**693.355.992.079.878**	**504.623.263.587.032**

**) Termasuk realisasi sebesar minus Rp1.483.003.613 pada TA 2008 dan sebesar minus Rp60.486.165.363 pada TA 2007 yang tidak dapat diketahui kode fungsinya. Terdapat selisih sebesar Rp3.650.000 antara total realisasi Belanja Pemerntah Pusat menurut Fungsi dengan total realisasi Belanja menurut Jenis Belanja karena adanya Penerimaan Pengembalian Uang*

Persediaan yang masuk dalam Laporan Realisasi Belanja pada Departemen Pertanian.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2008 yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp534.568.682.409.369 atau 77,10 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 38.

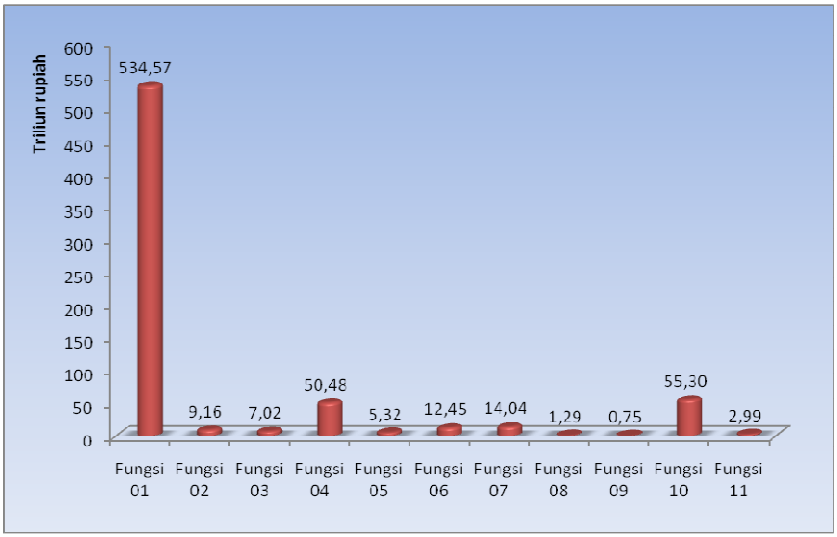

Grafik 38: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2008

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam **Daftar 2.**

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 39.

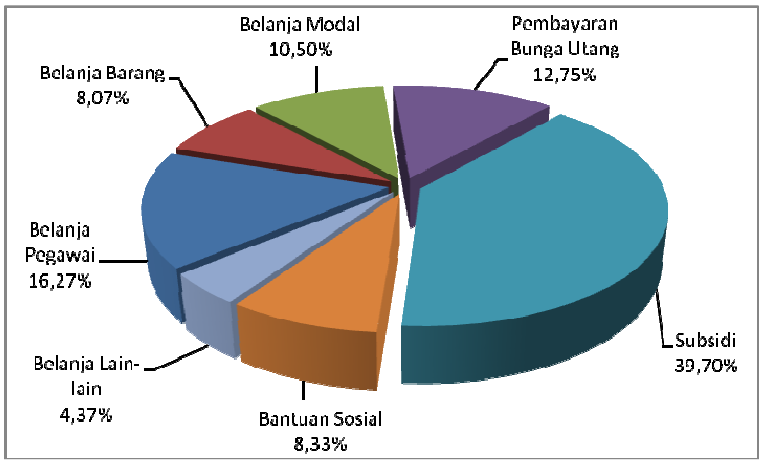

Grafik 39: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2008

Belanja Pegawai Rp112,83 triliun

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2008 adalah sebesar Rp112.829.875.523.789 yang berarti 91,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar

Rp123.542.016.524.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2008 lebih besar Rp22.404.928.559.256 atau 24,78 persen dari realisasi TA 2007. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	31.365.119.645.847	25.118.867.861.207
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	29.708.942.979.981	24.450.454.976.367
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.753.813.438	382.341.613.548
Belanja Gaji Dokter PTT	349.393.395.000	391.814.755.506
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	103.294.411.028	0
Belanja Pegawai Perjan	0	(12.792.782)
Belanja Honorarium	7.187.769.317.290	7.087.877.927.837
Belanja Lembur	298.942.454.972	246.715.845.386
Belanja Vakasi	279.177.392.699	552.138.719.702
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	5.546.193.118.866	3.644.996.661.383
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	36.083.577.322.048	27.705.672.106.579
Belanja Asuransi Kesehatan	1.022.149.284.620	675.301.964.800
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	131.075.484.000	53.494.390.000
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	0	115.282.935.000
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	66.486.904.000	0
Jumlah	**112.829.875.523.789**	**90.424.946.964.533**

Belanja Barang Rp55,96 triliun

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2008 adalah sebesar Rp55.963.472.418.939 yang berarti 82,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp67.476.166.364.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2008 lebih besar Rp1.452.106.949.501 atau 2,66 persen dari Realisasi TA 2007. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	17.164.304.009.026	25.445.581.426.699
Belanja Barang Non Operasional	11.188.633.047.361	4.419.034.214.187
Belanja Jasa	9.041.116.782.270	9.020.493.177.002
Belanja Pemeliharaan	4.906.538.593.629	4.787.808.430.454
Belanja Perjalanan	11.128.348.863.749	9.006.938.650.353
Belanja Barang BLU	2.534.531.122.904	1.831.509.570.743
Jumlah	**55.963.472.418.939**	**54.511.365.469.438**

Belanja Barang BLU sebesar Rp2.534.531.122.904 terdiri dari:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Penunjang	1.124.056.074.470	729.549.109.868
Belanja Barang	1.138.569.925.203	598.233.163.347
Belanja Jasa	44.362.417.657	34.602.688.676
Belanja Pemeliharaan	82.618.004.069	92.201.620.713
Belanja Perjalanan	16.647.010.276	5.211.162.882
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	128.277.691.229	371.711.825.257
Total	**2.534.531.122.904**	**1.831.509.570.743**

Belanja Modal Rp72,77 triliun

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2008 adalah sebesar Rp72.772.477.031.152 yang berarti

85,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp85.072.518.239.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2008 lebih besar Rp8.483.807.980.422 atau 13,20 persen dari Realisasi TA 2007. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	1.440.073.011.841	1.489.595.690.931
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.990.419.918.864	21.437.459.125.258
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.849.430.018.881	14.501.872.881.725
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.511.280.416.297	23.068.817.644.545
Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi	1.058.519.998.511	0
Belanja Modal Fisik Lainnya	2.865.220.648.689	3.773.079.136.674
Dana Bergulir	1.825.712.210.400	0
Belanja Modal BLU	231.820.807.669	17.844.571.597
Jumlah	**72.772.477.031.152**	**64.288.669.050.730**

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.021.305.654	11.119.500.685
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.265.704.744	606.458.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.695.000	299.227.500
Belanja Modal Fisik Lainnya	12.437.102.271	5.819.385.412
Total	**231.820.807.669**	**17.844.571.597**

Pembayaran Bunga Utang Rp88,43 triliun

B.2.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2008 adalah sebesar Rp88.429.807.846.898 yang berarti 93,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp94.794.224.800.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2008 lebih besar Rp8.623.430.312.145 atau 10,81 persen dari Realisasi TA 2007. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Bunga dan Biaya SUN dan SBSN DN	58.977.831.579.583	53.489.752.862.384
Bunga dan Biaya SUN dan SBSN Valas	6.208.035.267.396	4.464.729.093.750
Bunga Pinjaman Luar Negeri	21.641.592.976.975	21.027.411.716.423
Biaya/Kewajiban Lainnya Pinjaman LN	693.213.930.000	215.835.230.517
Pembayaran Denda (Imbalan Bunga)	909.134.092.944	608.648.631.679
Jumlah	**88.429.807.846.898**	**79.806.377.534.753**

Belanja Subsidi Rp275,29 triliun

B.2.2.1.5 Subsidi

Realisasi Subsidi TA 2008 adalah sebesar Rp275.291.454.173.929 yang berarti 117,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp234.404.983.694.000. Kelebihan realisasi subsidi dibandingkan APBN-P tersebut terutama pada Subsidi BBM, yaitu Subsidi Premium, Subsidi Minyak Solar, dan Subsidi Minyak Tanah. Kelebihan pembayaran subsidi BBM tersebut telah mendapat persetujuan DPR RI pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN TA

2008 beserta Nota Perubahannya pada tanggal 4 Maret – 9 April 2008, yang menyatakan bahwa pembayaran subsidi BBM TA 2008 dilakukan sesuai dengan realisasi. Selama tahun 2008 terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM, sehingga subsidi yang ditanggung Pemerintah juga mengalami kenaikan.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2008 ini lebih besar Rp125.077.010.482.660 atau 83,27 persen dari Realisasi TA 2007. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Subsidi Premium	43.551.933.137.000	25.287.122.316.398
Subsidi Minyak Solar	44.056.881.348.000	19.055.027.553.466
Subsidi Minyak Tanah	47.607.321.799.000	39.450.166.646.514
Subsidi Elpiji	3.890.570.345.016	0
Subsidi Pangan	11.795.911.990.000	6.284.324.994.000
Subsidi Listrik	83.906.513.000.000	33.073.543.656.064
Subsidi Benih	985.248.967.000	478.985.800.000
Subsidi Pupuk	15.163.887.671.937	6.260.537.497.379
Subsidi Perawatan Beras	300.000.000.000	300.000.000.000
Subsidi Pengawasan Pupuk	17.568.618.940	0
Subsidi PPh	1.300.000.000.000	837.781.003.465
Subsidi PPN	19.714.630.640.803	16.275.827.863.000
Subsidi Bea Masuk	3.573.882.791	0
Subsidi Lainnya	103.344.748.900	1.514.000.000.000
Subsidi Minyak Goreng	225.709.201.000	24.624.718.000
Subsidi PT KAI	688.415.000.000	281.250.000.000
Subsidi PELNI	850.000.000.000	650.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	150.000.000.000	93.750.000.000
Subsidi PSO Lainnya	40.700.000.000	0
Subsidi Bunga KPR	799.982.599.542	299.993.159.983
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	2.724.469.000	47.508.483.000
Subsidi Bunga Kredit Program lainnya	74.886.780.000	0
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	61.649.975.000	0
Jumlah	**275.291.454.173.929**	**150.214.443.691.269**

Dalam realisasi Subsidi tersebut, terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2008, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO TA 2008 sebesar Rp10.412.797.719.990 (Lihat ***Catatan C.2.25. Aset Lainnya***). Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi Subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	220.433.592.000
Subsidi Minyak Tanah	367.655.649.000
Subsidi Minyak Solar	278.453.350.000
Subsidi LPG	57.024.692.990
Subsidi Listrik	4.705.443.232.963
Subsidi Pangan	913.470.485.100
Subsidi Perawatan Beras	39.115.727.252
Subsidi Benih	508.321.232.420
Subsidi Pupuk	2.844.357.844.858
Subsidi Minyak Goreng	1.245.992.000

Subsidi PELNI	268.842.667.873
Subsidi PT KAI	136.166.250.000
Subsidi PT Pos dan Giro	29.687.500.000
Subsidi Lainnya (Benih Ikan Budidaya)	19.270.251.000
PSO LKBN Antara	9.277.137.475
PSO Perum BULOG	14.032.115.059
Jumlah	**10.412.797.719.990**

Belanja Bantuan Sosial Rp57,74 triliun

B.2.2.1.6 Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial TA 2008 adalah sebesar Rp57.740.756.298.045 yang berarti 96,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp59.702.261.289.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2008 ini lebih besar Rp7.984.474.848.422 atau 16,05 persen dari Realisasi TA 2007. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	3.854.327.887.827	14.900.742.365.448
Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah/ Lembaga/Guru	28.087.421.885.113	17.031.445.611.773
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.535.238.762.941	4.440.335.585.638
Belanja Bantuan Beasiswa	3.425.801.851.202	1.856.956.254.338
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	240.272.600.991	87.125.642.390
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	18.597.693.309.971	11.439.711.990.036
Jumlah	**57.740.756.298.045**	**49.756.281.449.623**

Belanja Lain-lain Rp30,33 triliun

B.2.2.1.7 Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2008 adalah sebesar Rp30.328.148.787.126 yang berarti 94,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp32.078.835.680.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2008 lebih besar Rp14.706.969.360.440 atau 94,15 persen dari Realisasi TA 2007. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja untuk Rekonstruksi Aceh	1.248.011.905	
Belanja Pengeluaran Tak Tersangka	0	623.476.000
Belanja Pemilu/Sidang Tahunan	1.961.239.902.080	0
Belanja Cadangan Tunjangan beras PNS/TNI/Polri	12.302.535.600	16.579.982.000
Belanja Cadangan Dana Reboisasi	1.864.007.763.765	1.946.251.971.367
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	0	120.244.000
Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Kontijensi)	1.502.700.000	697.922.519.628
Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	905.489.544.449	774.102.006.321
Belanja Non Modal Otorita Batam	52.720.709.692	0
Jasa Surveyor	367.735.876.931	151.662.828.578
Jasa Perbendaharaan	5.555.019.355	4.947.417.597
Jasa Pelayanan Bank Operasional	653.182.350	0
Belanja TVRI	341.116.855.605	0
Belanja RRI	525.071.406.483	0
Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah karena Pengeluaran Ineligible	10.356.393.697	0
Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	13.312.640.600.000	0
Belanja Lain-lain	10.966.508.285.214	12.028.968.981.195
Jumlah	**30.328.148.787.126**	**15.621.179.426.686**

Dalam realisasi Belanja Lain-lain tersebut, terdapat pembayaran berupa dana konversi minyak tanah ke LPG-BPH Migas yang dananya belum tersalurkan dan ditempatkan pada rekening dana

cadangan subsidi/PSO TA 2008 sebesar Rp2.054.036.151.700.

Transfer ke Daerah Rp292,43 triliun

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2008 adalah sebesar Rp292.433.480.615.255, yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp292.422.800.083.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2008 ini lebih besar Rp39.170.302.529.151 atau 15,47 persen dari Realisasi TA 2007. Transfer ke Daerah terdiri dari *(i)* Dana Perimbangan, dan *(ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Dana Perimbangan Rp278,71 triliun

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2008 adalah sebesar Rp278.714.658.866.600 yang berarti 100,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp278.436.098.789.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2008 ini lebih besar Rp34.747.485.700.629 atau 14,24 persen dari realisasi TA 2007. Dana Perimbangan terdiri dari *(i)* Dana Bagi Hasil (DBH), *(ii)* Dana Alokasi Umum (DAU), dan *(iii)* Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Grafik 40.

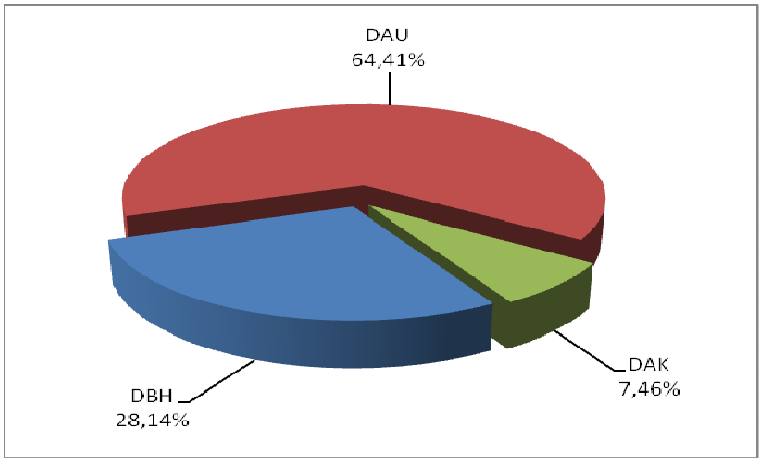

Grafik 40: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2008

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Daftar 3**.

DBH Rp78,42 triliun

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2008 adalah sebesar Rp78.420.167.295.600, yang berarti 100,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp77.726.812.918.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2008 ini lebih besar Rp15.478.213.511.055 atau 24,59 persen dari realisasi TA 2007. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan sebesar Rp37.680.548.394.339 dan Bagi Hasil SDA sebesar Rp40.739.618.901.261.

DAU Rp179,51 triliun

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2008 adalah sebesar Rp179.507.144.871.000, yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp179.507.144.871.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2008 ini lebih besar Rp14.719.744.942.648 atau naik 8,93 persen dari realisasi TA 2007.

DAK Rp20,79 triliun

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2008 adalah sebesar Rp20.787.346.700.000, yang berarti 98,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp21.202.141.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2008 ini lebih besar Rp4.549.527.246.926 atau 28,02 persen dari realisasi TA 2007.

Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian Rp13,72 triliun

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2008 adalah sebesar Rp13.718.821.748.655, yang berarti 98,08 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp13.986.701.294.000.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari *(i)* Dana Otonomi Khusus, dan *(ii)* Dana Penyesuaian.

Dana Otonomi Khusus Rp7,51 triliun

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2008 adalah sebesar Rp7.510.285.794.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp7.510.285.794.000. Dana otonomi khusus terdiri dari dana otonomi khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp3.590.142.897.000, dana otonomi khusus untuk Papua sebesar Rp3.590.142.897.000 dan dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp330.000.000.000.

Dana Penyesuaian Rp6,21 triliun

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2008 adalah sebesar Rp6.208.535.954.655, yang berarti 95,86 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp6.476.415.500.000.

Dana Penyesuian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Penyesuaian diberikan kepada:

- Daerah tertentu yang mengalami penurunan DAU sebesar 75% atau sampai dengan 100% dibandingkan dengan perolehan DAU TA 2007 di luar dana penyesuaian.
- Daerah tertentu dalam rangka mendanai kebutuhan tunjangan kependidikan bagi guru.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.
- Daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik, serta sarana lainnya yang juga menjadi urusan daerah.
- Daerah penghasil cukai tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam rangka mengurangi cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan dan pemetaan industri rokok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Suspen minus Rp58,72 miliar

B.2.2.3. Suspen

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga (K/L) dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara.

Sementara bila terdapat selisih/perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, maka data yang digunakan adalah data BUN yang dapat ditelusuri ke kas yang diterima. Jumlah perkiraan Suspen TA 2008 adalah sebesar minus Rp58.721.608.520 yang berarti realisasi belanja yang dilaporkan K/L lebih besar dari data pengeluaran belanja yang dicatat BUN, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga (KL)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	112.773.501.584.283	112.829.875.523.789	(56.373.939.506)
Belanja Barang	55.887.772.437.813	55.963.472.418.939	(75.699.981.126)
Belanja Modal	72.768.839.635.196	72.772.477.031.152	(3.637.395.956)
Bunga Utang	88.352.325.843.120	88.429.807.846.898	(77.482.003.778)
Subsidi	275.289.975.892.789	275.291.454.173.929	(1.478.281.140)
Bantuan Sosial	56.929.790.831.588	57.740.756.298.045	(810.965.466.457)
Belanja lain-lain	31.096.657.038.061	30.328.148.787.126	768.508.250.935
Transfer ke Daerah			
Dana Bagi Hasil	78.618.574.504.108	78.420.167.295.600	198.407.208.508
Suspen			**(58.721.608.520)**

Suspen tersebut dapat disebabkan kesalahan pencatatan baik oleh Kuasa BUN maupun oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada K/L. Khusus untuk selisih pada Belanja Bunga disebabkan adanya *Front End Fee* dan kapitalisasi terkait dengan penarikan pinjaman yang belum dibukukan oleh BUN pada tahun 2008 dan adanya perbedaan saat pengakuan belanja bunga antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 096.

Defisit Anggaran Rp4,12 triliun

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan realisasi Belanja Negara TA 2008 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2008 adalah sebesar Rp4.121.317.764.944, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	981.609.433.326.137	707.806.088.304.925
Belanja Negara	985.730.751.086.613	757.649.912.890.878
Defisit Anggaran	**(4.121.317.760.476)**	**(49.843.824.585.953)**

Pembiayaan (Neto) Rp84,07 triliun

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan TA 2008 adalah sebesar Rp84.071.748.066.005 yang berarti 88,96 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp94.503.260.500.000. Pembiayaan terdiri dari *(i)* Pembiayaan Dalam Negeri, dan *(ii)* Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara (BUN).

Pembiayaan DNRp97,29 triliun

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2008 adalah sebesar Rp97.288.308.876.176, yang berarti 90,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp107.616.860.500.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari *(i)* Rekening Pemerintah, *(ii)* Penerusan Pinjaman, *(iii)* Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, *(iv)* Surat Berharga Negara (Neto), *(v)* Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah, dan (*vi*)

Pembiayaan Lain-lain.

Rekening Pemerintah Rp16,16 triliun

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembaliannya dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2008 adalah sebesar Rp299.999.999.959, sementara jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp11.700.000.000.000. Dalam APBN-P tersebut termasuk anggaran pengeluaran untuk penambahan ke Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disimpan pada rekening pemerintah di BI sebesar Rp12.000.000.000.000. Realisasi pengeluaran ke rekening SAL tersebut tidak dilaporkan sebagai transaksi pembiayaan, namun sebagai transaksi non anggaran yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (***lihat Catatan D.2.27***). Rincian Pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan dari Rekening SAL	-	279.042.900.000
Penerimaan dari Penutupan Rekening	-	30.350.324.061
Penerimaan Pembiayaan dari RDI	299.999.999.959	4.000.000.000.000
Peneriman dari Dana Eks Moratorium	-	6.342.600.000.000
Jumlah	**299.999.999.959**	**10.651.993.224.061**

Penerusan Pinjaman Rp5,19 triliun

B.2.4.1.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri TA 2008 adalah sebesar Rp5.189.316.203.882. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah	52.554.927.667	24.669.226.467
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMD	22.967.349.787	-
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN	5.113.793.926.428	2.698.687.832.321
Jumlah	**5.189.316.203.882**	**2.723.357.058.788**

Realisasi Penerusan Pinjaman ini berbeda dengan realisasi Penerusan Pinjaman yang dilaporkan oleh BA 098 (Penerusan Pinjaman) dan terdapat selisih sebesar Rp16.669.536.003, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Data BUN	Data BA 098	Selisih
Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah	52.554.927.667	26.829.869.132	25.725.058.535
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMD	22.967.349.787	22.967.349.787	-
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN	5.113.793.926.428	5.122.849.448.960	(9.055.522.532)
Jumlah	**5.189.316.203.882**	**5.172.646.667.879**	**16.669.536.003**

Pembiayaan PPAPR Rp2,90 triliun

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi (PPAPR) TA 2008 sebesar Rp2.902.038.528.402, atau 66,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.350.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu

bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN.

SBN (Neto) Rp85,92 triliun

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2008 adalah sebesar Rp85.916.261.326.762 atau 72,94 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp117.790.000.000.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan APBN yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional.

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	10.012.000.000.000	4.168.800.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	76.791.640.000.000	97.992.895.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.248.846.053.000	1.120.907.117.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	4.699.700.000.000	-
Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN	16.665.166.900	-
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	39.309.830.431.500	13.575.648.587.500
Utang Bunga Obligasi Negara Valas	616.621.652.444	
Total Penerimaan	**132.695.303.303.844**	**116.858.250.704.500**
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(4.168.800.000.000)	-
Pelunasan Obligasi DN	(33.658.981.400.000)	(39.786.861.003.598)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(6.946.000.000.000)	(18.702.248.000.000)
Utang Bunga Obligasi Negara DN	(1.394.674.134.000)	(1.196.954.544.000)
Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	(610.586.443.082)	-
Total Pengeluaran	**(46.779.041.977.082)**	**(59.686.063.547.598)**
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	**85.916.261.326.762**	**57.172.187.156.902**

Realisasi Surat Berharga Negara (SBN) Neto ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 097 (Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri), yaitu sebesar Rp29.833.659.000. Perbedaan tersebut terjadi karena keterlambatan pelimpahan saldo Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri ke rekening BUN.

PMN/ Dana Investasi Pemerintah Rp2,50 triliun

B.2.4.1.5. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah TA 2008 adalah sebesar Rp2.500.020.000.000 yang berarti 88,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp2.823.139.500.000. Rincian pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2008 adalah:

Perusahaan Negara	Jumlah (Rp)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.500.000.000.000
Perusahaan Pembiayaan di Bidang Infrastruktur	1.000.000.000.000
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	20.000.000
Jumlah	**2.500.020.000.000**

Pembiayaan Lain-lain Rp15,86 triliun

B.2.4.1.6. Pembiayaan Lain-lain

Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2008 sebesar Rp15.859.345.224.935 berasal dari

penyesuaian penambahan dan penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Koreksi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena selisih Kurs	55.419.279.930.448	9.261.378.112.144
Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening KUN dalam Valuta USD Karena Selisih Kurs	(39.559.934.705.513)	(8.770.093.265.433)
Jumlah	**15.859.345.224.935**	**491.284.846.711**

Dengan demikian, Pembiayaan Lain-lain TA 2008 lebih besar Rp15.368.060.378.224 dari penerimaan TA 2007 sebesar Rp491.284.846.711.

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp13,22 triliun

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2008 adalah sebesar minus Rp13.216.560.810.171, yang berarti 100,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp13.113.600.000.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Penarikan Pinjaman LN (Bruto) Rp50,22 triliun

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) TA 2008 adalah sebesar Rp50.218.749.931.906 yang berarti 104,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp48.141.300.000.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari *(i)* penarikan pinjaman program, dan *(ii)* penarikan pinjaman proyek.

Penarikan Pinjaman Program Rp30,10 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Pinjaman Program TA 2008 adalah sebesar Rp30.100.439.755.174, yang berarti 114,06 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp26.390.000.000.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2008 dan 2007 (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (Audited)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	5.831.748.614.400	3.725.790.689.151
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	2.190.000.000.000	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	12.927.191.140.774	5.630.089.500.000
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	9.151.500.000.000	8.454.400.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	-	1.797.200.000.000
Jumlah	**30.100.439.755.174**	**19.607.480.189.151**

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 096 (Cicilan Pokok Utang Luar Negeri), dengan selisih sebesar Rp953.564.971.799. Selisih ini

antara lain disebabkan adanya *Front End Fee* terkait dengan penarikan pinjaman yang yang belum dibukukan oleh BUN dan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 096. Rincian perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Data BUN	Data BA 096	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	5.831.748.614.400	4.866.682.017.601	965.066.596.799
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	2.190.000.000.000	2.201.000.000.000	(11.000.000.000)
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	12.927.191.140.774	12.913.542.765.774	(484.992.015.774)
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	9.151.500.000.000	9.165.650.000.000	(14.150.000.000)
Jumlah	**30.100.439.755.174**	**29.146.874.783.375**	**953.564.971.799**

Penarikan Pinjaman Proyek Rp20,12 triliun

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2008 adalah sebesar Rp20.118.310.176.732, yang berarti 92,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp21.751.300.000.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari K/L, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2008 dan 2007 (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	7.677.549.041.030	5.467.822.744.486
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.873.858.103.991	5.204.974.233.105
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.274.539.437.119	3.350.335.783.286
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	2.292.363.594.592	439.434.367.658
Jumlah	**20.118.310.176.732**	**14.462.567.128.535**

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 096 (Cicilan Pokok Utang Luar Negeri), dengan selisih sebesar Rp2.482.014.095.095. Selisih ini disebabkan antara lain oleh perbedaan penggunaan akun dan perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 096.

Rincian perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Data BUN	Data BA 096	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	7.677.549.041.030	9.279.148.291.214	(1.601.599.250.184)
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.873.858.103.991	8.268.355.404.678	(2.394.497.300.687)
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.274.539.437.119	5.023.122.402.268	(748.582.965.149)
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	-	29.698.173.667	(29.698.173.667)
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	2.292.363.594.592	-	2.292.363.594.592
Jumlah	**20.118.310.176.732**	**22.600.324.271.827**	**(2.482.014.095.095)**

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp63,44 triliun

B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2008. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2008 adalah sebesar Rp63.435.310.742.077, yang berarti 103,56 persen

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp61.254.900.000.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2008 dan 2007 (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Cicilan Pokok Utang LN -Pinjaman Program	5.866.722.194.538	-
Cicilan Pokok Utang LN -Pinjaman Proyek	57.490.860.565.371	57.922.459.152.174
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible*	77.727.982.168	-
Jumlah	**63.435.310.742.077**	**57.922.459.152.174**

SiLPA Rp79,95 triliun

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp4.121.317.764.944 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp84.071.748.066.005 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp79.950.430.301.061, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	981.609.433.326.137	707.806.088.304.925
Belanja Negara	985.730.751.086.613	757.649.912.890.878
Surplus (Defisit)	**(4.121.317.760.476)**	**(49.843.824.585.953)**
Pembiayaan Neto	84.071.748.066.005	42.456.535.817.769
SiLPA (SiKPA)	**79.950.430.305.529**	**(7.387.288.768.184)**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, terdapat 56 (lima puluh enam) instansi pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, 19 diantaranya ditetapkan pada Tahun 2008. Lima puluh enam Satker BLU tersebut berasal dari 14 (empat belas) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1.	Sekretariat Negara	2
2.	Departemen Keuangan	2
3.	Departemen Perindustrian	1
4.	Departemen Kesehatan	28
5.	Departemen Pendidikan Nasional	7
6.	Departemen Agama	5
7.	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
8.	Departemen Kehutanan	1
9.	Departemen Pekerjaan Umum	1
10.	Kementerian Negara Riset dan Tekhnologi	1
11.	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	2
12.	Departemen Kominfo	1
13.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
14.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
	Jumlah BLU	**56**

Ditinjau dari bidang layanan, dari 56 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

a. 28 BLU bidang kesehatan;
b. 4 BLU bidang pembiayaan;
c. 1 BLU bidang telekomunikasi;
d. 17 BLU bidang pendidikan;
e. 3 BLU bidang teknologi;
f. 2 BLU bidang pengelolaan kawasan;
g. 1 BLU bidang lain-lain.

Berdasarkan laporan keuangan 56 BLU yang disusun berdasarkan SAK, total pendapatan tahun 2008 adalah sebesar Rp9.908.091.323.052. Perkembangan pendapatan, beban, usaha, dan defisit tahun 2007 dan 2008 dapat dilihat pada Grafik 41.

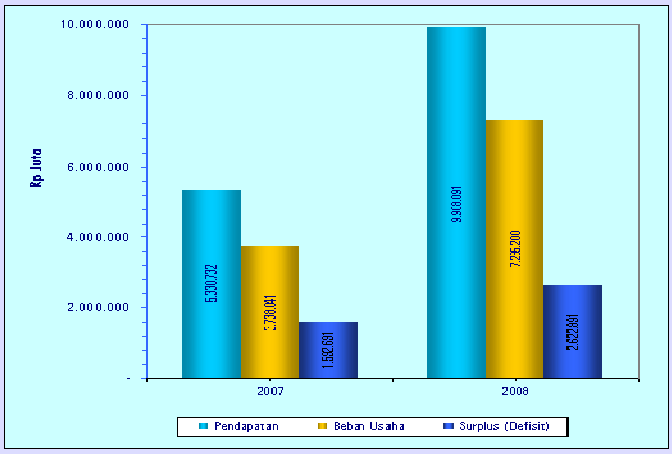

Grafik 41: Pendapatan, Beban Usaha, dan Defisit Badan Layanan Umum TA 2007 – 2008

Sementara itu, komposisi pendapatan BLU pada TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 42.

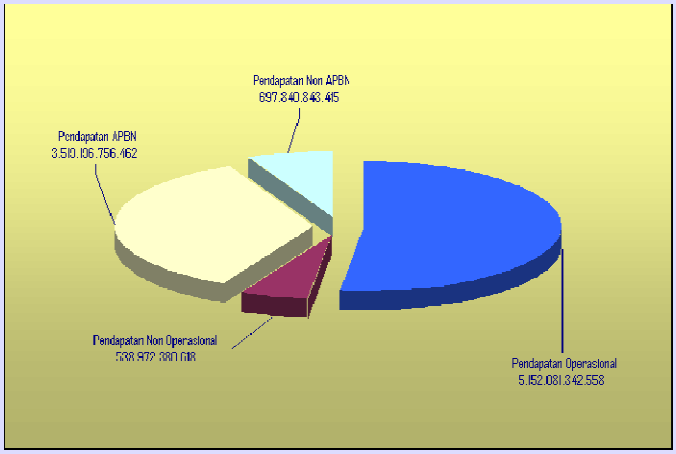

Grafik 42: Komposisi Pendapatan Badan Layanan Umum TA 2008

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada **Daftar 40**.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga TA 2008, terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan pada TA 2008 total sebesar Rp32.146.341.430.652 dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2008 (dalam Rp)	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Departemen Dalam Negeri	449.037.340.584	3.622.156.462.969
018	Departemen Pertanian	659.583.060.647	2.349.187.867.897
019	Departemen Perindustrian	50.779.432.358	45.610.940.612
020	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	32.062.946.729	0
023	Departemen Pendidikan Nasional	20.293.541.875.920	104.558.633.668
024	Departemen Kesehatan	496.335.490.636	1.106.995.925.887
026	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.063.718.832	1.102.507.370.139
027	Departemen Sosial	586.191.462.974	0
029	Departemen Kehutanan	73.151.857.079	0
032	Departemen Kelautan dan Perikanan	244.326.546.250	393.609.258.552

043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	13.344.844.876	0
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	106.469.995.612	18.866.045.000
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	4.483.519.825	0
090	Departemen Perdagangan	52.055.824.021	145.249.103.269
092	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	98.171.906.316	0
	Total	**23.257.599.822.659**	**8.888.741.607.993**

3. Penerimaan Hibah di Luar Mekanisme APBN

Pada beberapa kementerian negara/lembaga (K/L) terdapat penerimaan hibah yang belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) K/L yang bersangkutan. Berikut rincian anggaran dan realisasi penerimaan hibah masing-masing K/L yang belum dilakukan dalam mekanisme APBN.

No.	K/L	Pemberi Hibah	Nilai Kontrak	Realisasi/ *Disbursement*
1.	BPK	AIPRD-GPF	AUD2,8 juta	$AUS1.608.000
		SNAO	SEK1,6 juta	SEK1.291.500
2.	Mahkamah Agung	IALDF	AUD808.344	
		USAID	USD8.781.200	
		UNDP	USD303.108	
		The Asia Fondation	-	
		United nation Office in Drugs Crime	-	
		Japan International Cooperate Agency	JPY150.000	
3.	Sekretariat Negara	Indonesia Australia Special Training Programe (IASTP)	Rp55.800.000.000	
4.	Dep. Dagri	BPBD	Rp480.500.000	Rp384.400.000
		SCRRD	Rp276.500.000	Rp221.200.000
		Project Manajement Unit (PMU)	Rp276.500.000	Rp221.200.000
		Proyek Government Reform and DPRD empowerment	Rp375.883.168	Rp364.082.864
		Proyek Delta Mahakam	-	-
		UNDP	Rp6.704.788.265	
		Pemda Sumatera Barat	Rp1.999.965.000	
5.	Dep. Pertahanan	-	Rp4.340.321.500	
6.	Dep. Pertanian	FAO, ACIAR, JICA, IFAD, World Bank	USD115.268.354	
7.	Dep. Perindustrian	BPPI	Rp1.382.400.000	Rp980.769.746
8	Dep. Diknas	ACCU (Jepang)	USD19.984	
		AUSAID(Australia)	AUD155.000.000	
9.	Dep. Kesehatan	UNODC	Rp82.025.000	
		HCPI	Rp414.592.000	
		FHIASA	Rp26.050.000	
		KPAN	Rp36.877.500	
		UNFPA	Rp2.150.349.233	
		UNFPA-KKP	Rp111.100.000	
		DHS-2	Rp908.560.000	
		JFPR	Rp1.151.642.393	
		Children Health Foundation	Rp42.333.750	
		IAEA WAGRAMERS	Rp237.633.135	
		WHO	Rp29.837.595.223	
		REDI	Rp2.994.723.888	
		UNDP	Rp692.576.500	
		UNICEF	Rp6.640.651.100	
		ADB	Rp673.400.000	
		Family Health International	Rp241.513.578	
		Kalbe Farma	Rp12.500.000	
		CDC Atlanta	Rp20.085.407.450	
		PT. Kaltim Prima Coal	Rp67.648.500	
		PT. Gizindo Prima Nusantara	Rp49.500.000	
		UN World Food Programe	Rp326.543.000	
		AUSAID	Rp1.065.511.500	
		GAVI	Rp145.584.715.556	
		GF AIDS	Rp111.609.509.851	
		GF TB	Rp94.809.417.482	

		GF Malaria	Rp228.215.173.870	
		KNCV	Rp38.063.764.362	
		NLR	Rp895.000.000	
		PATH	Rp136.037.500	
		Singapore Gov.	Rp2.336.634.963	
		UNION	Rp1.678.682.569	
10.	Dep. Sosial	IMC	-	
11.	Dep. Kehutanan	GTZ/ Jerman	EUR03.100.000	
		DFID / Inggris	£5.000.000	
		JICA/Jepang	USD68.000	
		JICA/Jepang	USD2.778.000	
			Rp1.800.000.000	
		FAO Jepang	USD4.687.338	
		KOICA/Korea	USD2.000.000 USD2.400.000 USD240.000 USD1.000.000	
		USAID/Amerika	USD330.000	
		Global Environment Fund	USD7.800.000 USD41.000.000	
		JIFPRO/Jepang	JPY9.991.250	
12.	Dep. Kelautan dan Perikanan	ACIAR	AUD89.112	
		ACIAR	AUD86.034	
		ACIAR	AUD26.260	
		KITECH	USD9.500	
		PEGASUS	USD14.000	
		UNDP	USD303.108	
		United Bations Office on Drugs Crime	USD115.000	
		The Asia Foundation	-	
13.	Dep. Kebudayaan dan Pariwisata	Yayasan Werdhi Wisata	Rp369.352.750	
14.	KLH	DANIDA (Denmark)	Rp7.099.934.299	
		DANIDA	USD2.924.640	
15.	BPS	World Bank	-	
		UNDP	Rp234.690.000	
		UNICEF	USD126.500.000	
		UNFPA	USD25.000.000	
16.	BAPPENAS	World Bank, UNDP, UNICEF, UNFPA	Rp54.904.586.550	
17.	Dep. Komunikasi dan Informatika	Korea Selatan	USD1.192.000	
		JICA	RP3.000.000.000	
		JICA	Rp30.597.434.000	
18.	BNN	PT Telkomsel		Rp2.178.000.000
19.	BKKBN	UNFPA	Rp3.717.456.000	Rp3.280.157.000
20.	Komnas HAM	Norwegian Ministry of Foreign Affairs-Norwegia	USD1.060.433,33	USD710,403.87
		Women for Women's Human Right-Turkey	USD15.000	Rp46.254.425
		FOSI - USA	Rp1.350.000.000	Rp1.645.106.925
		New Zealand	Rp2.000.000.000	Rp1.300.000.000
		Indonesia Australia Legal Development Facility (IADLF)-Australia	Rp1.650.000.000	Rp1.262.633.126
		HIVOS- Belanda	EUR0176.327	Rp2.790.228.000
		The Body Shop - Indonesia		Rp300.000.000
		AUSAID-Australia	AUD1.399.900	-
21.	KPU	Pemda	Rp137.643.355.025	
22.	PPATK	USAID	Rp4.700.000.000	
23.	BATAN	Menristek, IAEA	Rp2.214.656.423	
24.	LAPAN	-	USD3.115.000	USD215.000
25.	BPKP	State Audit Reform (STAR) Project	Rp1.605.293.000	
26.	KPK	GTZ JERMAN	Rp35.557.500.000	-
		ADB	Rp1.852.200.000	Rp627.192.510
		USAID	Rp68.724.792.000	Rp6.166.694.775
		CIDA-Canada	Rp800.000.000	Rp531.951.780
		AUSAID-Australia	Rp454.445.000	Rp36.059.006
		Denmark-DANIDA	Rp6.868.679.000	Rp6.042.076.566
27.	BNPB	Pemerintah Yunani	EUR0200.000	
		UNDP	Rp1.625.362.900	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Posisi Neraca secara umum

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Aset Lancar	264.069.841.008.506	156.599.727.674.012
Investasi Jangka Panjang	712.035.340.631.998	691.342.462.226.564
Aset Tetap	673.365.149.313.907	443.485.970.952.729
Aset Lainnya	422.232.177.150.965	308.783.512.011.720
Jumlah Aset	**2.071.702.508.105.376**	**1.600.211.672.865.025**
Kewajiban Jangka Pendek	181.343.265.322.490	139.732.332.373.059
Kewajiban Jangka Panjang	1.512.347.991.390.521	1.291.233.131.686.497
Jumlah Kewajiban	**1.693.691.256.713.011**	**1.430.965.464.059.556**
Ekuitas Dana Lancar	82.726.575.686.016	16.867.395.300.953
Ekuitas Dana Investasi	295.284.675.706.349	152.378.813.504.516
Jumlah Ekuitas Dana Neto	**378.011.251.392.765**	**169.246.208.805.469**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 43.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

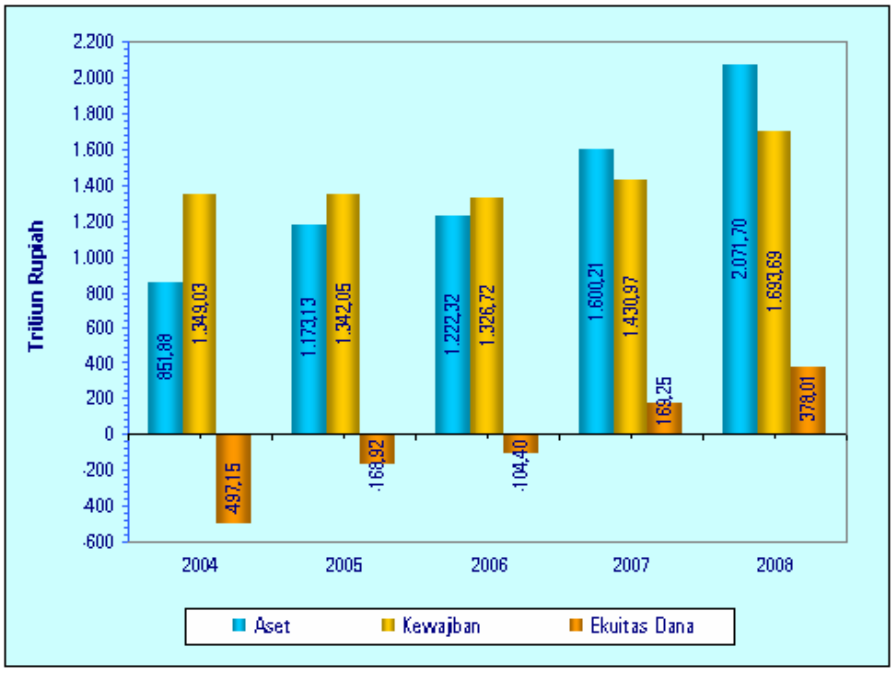

Grafik 43: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2004 - 2008

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Rekening Kas BUN di BI Rp67,71 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp67.707.599.065.065 dan Rp18.170.046.148.742 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Rekening	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Rek. BUN No. 502.000000	25.863.449.877.816	15.367.828.965.873
Rek. KUN dalam Valuta USD No. 600.502411 (USD3,821,383,487.42)	41.844.149.187.249	2.802.217.182.869
Jumlah	**67.707.599.065.065**	**18.170.046.148.742**

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp6,75 triliun

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp6.755.052.343.270 dan Rp5.492.896.654.079 merupakan saldo Rekening Kas KPPN di seluruh Indonesia.

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 4.**

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL di BI Rp35,64 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp35.642.938.767.447 dan Rp3.248.408.392.480 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan bank umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Bank	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Bank Indonesia	20.642.938.767.447	3.248.408.392.480
2. Bank Umum	15.000.000.000.000	0
Jumlah	**35.642.938.767.447**	**3.248.408.392.480**

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rp):

Rekening	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Rekening RDI/RPD	73.154.205.459	452.257.388.454
Rekening SAL	3.370.514.138.408	51.259.408.895
Rekening Panas Bumi	86.635.248.233	291.316.908.993
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS	15.613.890.374.629	162.925.619.964
Rek. Pemerintah Lainnya	1.498.744.800.718	2.290.649.066.174
Jumlah	**20.642.938.767.447**	**3.248.408.392.480**

Rincian lebih lengkap masing-masing rekening dapat dilihat pada **Daftar 5**.

Khusus Saldo Rekening Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp15.613.890.374.629,50 merupakan Kas BUN dalam bentuk valas pada Rekening No. 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi (mutasi) arus

masuk dan keluar kas dari Rekening No. 600.000.411 tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2008 dan 2007

Mutasi Rekening Migas No.600.000.411

URAIAN	31-12-2008 (*Audited*)		31-12-2007 (*Audited*)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	17.297.550	162.925,61	127.659.651	1.151.490,05
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah	19.304.274.632	184.973.457,34	11.680.514.651	106.931.826,00
2. Selisih Kurs	-	23.717.705,69		6.326.176,77
3. Pengembalian Dana Talangan	1.070.000.000	9.967.160,00	461.538.462	4.200.000,00
4. Koreksi Pembukuan	849.959.578	7.803.118,81	937.253.771	8.749.344,73
5. Penerimaan lain-lain	1.033.578	9.425,77		-
Total Penerimaan	21.225.267.614	**226.470.867,61**	**13.079.306.884**	**126.207.347,51**
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	1.711.986.004	16.345.200,00	1.970.278.035	17.997.308,23
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	7.230.344	71.715,63	7.672.963	70.637,95
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN No. 502.600411				
• PPh Minyak Bumi (MAP 411111)	3.075.097.058	29.634.966,04	1.775.864.734	16.289.863,96
• PPh Gas Alam (MAP 411112)	4.851.817.836	47.383.937,09	2.970.961.726	27.257.829,98
• Pendapatan Minyak Bumi (MAP 421111)	2.645.821.861	25.390.077,82	157.690.623	1.448.777,21
• Pendapatan Gas Alam (MAP 421211)	4.101.487.944	40.201.582,89	3.385.302.374	31.179.214,03
• Pendapatan Migas lainnya (MAP 423439)	2.675.606	25.696,40	11.130.816	100.848,15
• Pendapatan Bunga Penagihan PPh Non Migas (MAP 411621)	-	-	2.500.000	22.795,00
• PPh Pasal 25 (MAP 411126)	487.000	4.462,38		-
• PBB Pertambangan Migas (MAP 411315)	176.203.353	1.954.800,00		-
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	16.572.807.006	**161.012.438,26**	**18.584.851.544**	**94.367.274,53**
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	817.641.443,26	7.931.361,14	460.515.229	4.183.857,19
b. Pembayaran DMO Fee KKKS	1.293.127.169	13.684.816,85	349.889.061	3.221.308,22
c. Pembayaran Fee Penjualan PT Pertamina & BP MIGAS	259.475.875	2.723.916,18	62.600.315	567.525,76
d. Pembayaran Underlifting KKKS	1.665.181	15.326,98	28.009.339	252.702,80
e. Pembayaran Pengembalian Retensi Gas Tahun 2002 kepada PT Pertamina	24.126.041	264.180,15		-
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD		**24.619.601,30**	**901.013.944**	**8.225.393,98**
3. Koreksi Pembukuan	2.396.035.711	7.802.997,95	937.253.771	8.749.302,00
4. Selisih Kurs	847.796.385	17.584.865,35		5.775.611,42
5. Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-	1.070.000.000	10.078.330,00
Total Pengeluaran	-	**211.019.902,86**	**13.189.668.985**	**127.195.911,95**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	19.816.639.102	**15.450.964,75**	**(110.362.102)**	**(988.564,43)**
V. Saldo Akhir (I + IV)	1.408.628.512	**15.613.890,37**	**17.297.549**	**162.925,61**

Keterangan:

- Pengembalian Dana Talangan merupakan pengembalian atas dana yang diambil dari saldo rekening valas No. 600.000411 pada bulan Desember 2007, guna menutup kekurangan *cash flow* pada akhir tahun 2007.
- Penerimaan Lain-lain merupakan penerimaan yang belum jelas klasifikasinya, apakah merupakan penerimaan PPh atau SDA migas (masih memerlukan klarifikasi dari instansi terkait).
- Koreksi Pembukuan Kredit merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas), kesalahan transfer pihak ketiga, pembetulan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs,

dan lain-lain.

- Koreksi Kurs Pembukuan Kredit/Debit merupakan koreksi pemindahbukuan selisih kurs neraca harian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Koreksi Pembukuan Debit merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas), kesalahan transfer pihak ketiga, pembetulan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs, dan lain-lain.
- Saldo akhir sebesar USD1,425,926,061.61 (ekuivalen Rp15.613.890,37 juta) termasuk pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp4.237.660.389.032, dan sisanya akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2008 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2008.
- Pada tahun 2008 terjadi pemnindahbukuan PBB Migas Tahun 2008 yang telah dikeluarkan dari Rekening 600.00411 namun belum dicatat sebagai penerimaan PBB Pertambangan pada KPPN sebesar Rp157.766.603.048 karena diretur dan belum dicatat oleh bank.
- *Reimbursement* PPN ke setiap KKKS dapat dilihat pada **Daftar 6**.

Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2008

Berikut adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2008 (periode *lifting* Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS):

Uraian	Satuan	Jumlah
Lifting Oil	MBBLS	338.811
Lifting Gas	MSCF	2.258.190
Price	USD	
Oil	USD/ICP	96,0
Gas	USD/Harga Rata-rata Tertimbang	9,58
Gross Revenue	(USD 000)	54.152.069
First Tranche Petroleum	(USD 000)	9.676.296
Investment Credit	(USD 000)	(14.065)
Cost Recovery	(USD 000)	9.352.996
Total Recoverable	(USD 000)	9.338.931
Equity to be Split	(USD 000)	35.136.842
Government Share *)	(USD 000)	27.470.295
Lifting Pemerintah	(USD 000)	27.357.038
Net Under Lifting Pemerintah	(USD 000)	113.257

*) Berdasarkan % split Production Sharing Contract

Keterangan:
MBBLS = 000 Barrels
MSCF = 000 Square Cubic Feet
ICP = Indonesian Crude Price

Berdasarkan Laporan Satker Penerimaan Negara, realisasi *lifting* selama tahun 2008 (Desember 2007 s.d. November 2008) adalah sebesar 340.804 MBBLS (931,16 MBOPD).

Dari jumlah *lifting* pemerintah sebesar USD27.357.038 ribu ditagihkan pada tahun 2008 sebesar USD28,209,389 ribu (termasuk *adjustment* tahun-tahun sebelumnya sebesar USD852,351 ribu) dan dilaporkan BPMIGAS kepada Pemerintah dalam laporan arus migas tahun 2008.

Berikut adalah jumlah tagihan *lifting* Pemerintah pada tahun 2008 dan penyelesaiannya pada rekening 600.000.411 dan KUN Tahun 2008 (periode 1 Januari – 31 Desember 2008) atas tagihan lifting:

Uraian	Satuan	Jumlah
Total *Lifting* Pemerintah	(USD 000)	28.209.389
Setoran ke Rek. 600.000411	(USD 000)	9.776.441
Setoran ke Rek. 600.502411	(USD 000)	34.502
Setoran ke Rek. 502.000000	(Rp Juta)	144.822.437

Data rincian hasil kegiatan usaha hulu migas tahun 2008 dari kontrak kerjasama per KKKS dan Data Penerimaan di luar PPH serta pengeluaran per KKKS ke rekening 600.000411, Rek. 600.502411, dan Rek. 502.000000 atas tagihan dan kewajiban lifting tahun 2008 disajikan pada **Daftar 6.**

**) Data periode tagihan lifting pemerintah tahun 2008 yang disajikan di atas masih belum diaudit.*

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada bank umum merupakan Rekening Penempatan Uang Negara dalam rangka pengelolaan kas jangka pendek yang berada di:

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah
1. BNI Cab. Pecenongan	0155117558	5.000.000.000.000
2. BRI Cab. Jkt Veteran	0329-01-002277-30-4	5.000.000.000.000
3. Bank Mandiri Cab. Jkt Plaza Mandiri	070-00668888889	5.000.000.000.000
Jumlah		**15.000.000.000.000**

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1,15 triliun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.154.712.127.961 dan Rp1.245.221.273.097 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Daftar 7.**

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp1,31triliun

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.308.388.040.590 dan Rp878.054.836.115 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 8.**

C.2.6. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp2,39 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp2.389.096.828.525 dan Rp444.767.605.022 merupakan saldo kas pada BLU, yang terdiri dari (dalam Rp):

BLU pada Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	136.612.762.104	0
2. BLU di Departemen Keuangan	2.712.498.742	13.808.096.801
3. BLU di Departemen Perindustrian	2.430.698.522	0
4. BLU di Departemen Kesehatan	578.370.995.867	407.612.396.968
5. BLU di Departemen Agama	24.478.849.329	8.033.580.828
6. BLU di Depnakertrans	187.716.592	0
8. BLU di Departemen Pekerjaan Umum	50.311.891.122	0
9. BLU di Kementerian Negara Ristek	882.859.510	0
10.BLU di Kementerian Negara Koperasi dan UKM	20.464.390.728	10.277.513.438
11.BLU di Departemen Komunikasi dan Informatika	1.570.003.709.414	0
12.BLU di BPPT	2.640.456.595	5.036.016.987
Jumlah	**2.389.096.828.525**	**444.767.605.022**

Pada Laporan Keuangan Departemen Keuangan, Kas pada BLU disajikan sebesar Rp221.279.325.236, yang terdiri dari Kas pada BLU Pusat Investasi Permanen (PIP) sebesar Rp218.566.826.494 dan Kas pada BLU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebesar Rp2.712.498.742. Sementara itu, pada Laporan Keuangan Departemen Pekerjaan Umum, Kas pada BLU BPJT disajikan sebesar Rp211.670.547.042. Dalam rangka konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kas pada BLU di PIP sebesar Rp218.566.826.494 dan Kas pada BLU di BPJT sebesar Rp161.358.655.920 direklasifikasi sebagai bagian dari nilai Investasi Non Permanen Lainnya. Lihat juga ***Catatan C.2.20.***

Dalam Kas pada BLU sebesar Rp2.389.096.828.525, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU adalah sebesar Rp1.351.265.552.098. Lihat juga ***Catatan D.1***.

C.2.7. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp3,73 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp3.726.790.367.113 dan Rp3.405.421.282.834 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Lender	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. IBRD	1.428.464.542.128	1.762.217.825.636
2. ADB	720.466.564.351	551.777.481.113
3. OECF/JBIC	636.884.008.741	651.326.993.413
4. Lainnya	940.975.251.893	440.098.982.672
Jumlah	**3.726.790.367.113**	**3.405.421.282.834**

C.2.8. Piutang Pajak

Piutang Pajak Rp55,54 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp55.545.222.477.952 dan Rp42.042.099.564.945, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Unit Pengelola (Dep. Keuangan)	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Direktorat Jenderal Pajak	45.173.077.395.398	31.906.597.010.360
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	10.318.356.917.933	9.947.769.397.769
3. Direktorat Jenderal Anggaran	53.788.164.621	187.733.156.816
Jumlah	**55.545.222.477.952**	**42.042.099.564.945**

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp45.173.077.395.398 dan Rp31.906.597.010.360 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2008. Rincian piutang pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen pajak
(Dalam Rp)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2008	31 Desember 2007
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.229.968.846.712	1.020.414.690.864
2.	Piutang PPh Pasal 22	104.120.004.440	66.827.848.091
3.	Piutang PPh Pasal 23	3.054.716.319.783	2.389.628.147.076
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.006.960.630.021	930.137.420.350
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	16.268.284.571.207	8.885.377.594.100
6.	Piutang PPh Pasal 26	125.143.589.474	-
7.	Piutang PPh Final	922.916.307.676	-
8.	Piutang PPh Non Migas Lainnya	95.145.000	879.508.183.935
9.	Piutang PPN Dalam Negeri	12.560.346.602.995	11.042.004.050.239
10.	Piutang PPN Impor	-	-
11.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	280.039.959.243	99.268.206.548
12.	Piutang PBB Pedesaan	746.285.302.993	606.882.233.000
13.	Piutang PBB Perkotaan	4.527.189.629.491	2.929.676.818.000
14.	Piutang PBB Perkebunan	212.754.667.994	178.163.623.000
15.	Piutang PBB Kehutanan	477.992.946.905	478.052.255.000
16.	Piutang PBB Pertambangan	64.058.196.664	45.810.576.000
17.	Piutang BPHTP	803.339.377.782	219.093.221.678
18.	Piutang PTLL	815.162.918	-
19.	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.788.050.134.100	2.089.472.781.488
20.	Piutang Bunga Penagihan PPN	-	46.252.964.479
21.	Piutang Bunga Penagihan PTLL	-	-
22.	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	26.396.512
	Jumlah	**45.173.077.395.398**	**31.906.597.010.360**

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut:

Umur Piutang	Jumlah (Rp)
• Kurang dari 1 Tahun	12.239.111.738.000
• 1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	9.776.181.927.000
• 3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	10.213.857.380.000
• 5 Tahun atau Lebih	12.943.926.315.000
Jumlah[*)]	45.173.077.360.000

[*)] *Terdapat selisih antara rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang pajak dengan rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebesar Rp35.397..*

- Dalam Piutang Pajak sebesar Rp45.173.077.395.397 tersebut, terdapat piutang sebesar Rp1.593.406.813.958 telah daluwarsa penagihannya. Dari Piutang Pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp1.593.406.813.958 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp538.684.964.810 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar Rp76.319.053.833. Dalam tahun 2008 telah dihapusbukukan Piutang Pajak sebesar Rp75.987.721.765.
- Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan banding/gugatan yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah Rp16.091.195.868.298. (Rincian pada **Daftar 9**)

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2008 sebesar Rp10.318.356.917.933 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

No.	Jenis Piutang Pajak	Rupiah
1.	Piutang PPh Pasal 22	605.746.817
2.	Piutang PPh Pasal 22 Impor	60.097.792.650
3.	Piutang PPN Dalam Negeri	15.831.619.020
4.	Piutang PPN Impor	314.536.177.859
5.	Piutang PPN Lainnya	40.699.539.992
6.	Piutang PPnBM Impor	72.082.878.740
7.	Piutang PPnBM Lainnya	492.321.416
8.	Piutang Cukai Hasil Tembakau	8.340.260.529.183
9.	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	132.717.267.500
10.	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.907.261.928
11.	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	19.916.519.120
12.	Piutang Bea Materai	
13.	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	30.949.290
14.	Piutang Bunga Penagihan PPN	548.229.952
15.	Piutang Bea Masuk	594.584.854.793
16.	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	654.724.926.398
17.	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	68.320.303.275
Jumlah		**10.318.356.917.933**

3. Jumlah Piutang Pajak di DJA per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp53.788.164.621 dan Rp187.733.156.816 merupakan Piutang Pungutan Ekspor. Piutang ini terdiri dari piutang terhadap PT Nalendra Bhakti Persada sebesar Rp2.259.736.430 dan PT Tanito Harum sebesar Rp40.775.949.620 dan PT Indominco mandiri sebesar Rp10.752.478.570. Jumlah angka piutang tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP terhadap eksportir tersebut. Piutang Pungutan Ekspor ini merupakan piutang yang belum dilimpahkan oleh Ditjen Anggaran kepada Ditjen Kekayaan Negara.

C.2.9. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp35,55 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp35.553.438.348.026 dan Rp38.045.969.394.145. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Piutang pada K/L	35.268.484.471.047	38.005.950.905.087
2. Piutang pada BA 062	1.196.400	22.460.000
3. Piutang pada BA 070	276.042.168.098	0
4. Piutang kepada PT PPA	8.910.512.481	39.996.029.058
Jumlah	**35.553.438.348.026**	**38.045.969.394.145**

1. Piutang Bukan Pajak di K/L per 31 Desember 2008 sebesar Rp35.268.484.471.047 merupakan piutang PNBP yang berada di kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya adalah Piutang Bukan Pajak di Departemen Keuangan sebesar Rp27.955.458.816.240 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Piutang Migas	27.215.580.464.330	25.816.684.636.777
Piutang Panas Bumi	117.641.765.300	40.773.737.505
Piutang Laba BUMN	217.066.840.844	3.926.400.819
Jumlah	**27.955.458.816.240**	**25.861.384.775.101**

- Piutang Migas sebesar Rp27.215.580.464.330 terdiri dari Piutang kepada PT Pertamina Rp26.167.177.116.230 dan kepada non PT Pertamina sebesar Rp1.048.403.339.450.

  Dalam Piutang Migas kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp26.167.177.116.230 tersebut tidak termasuk piutang ekspor minyak mentah sebesar Rp9.136.361.945.966 yang dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan KMK No. 454/KMK.06/2006 tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dan PMK No.23/PMK.06/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003. Sampai dengan akhir tahun 2008, Peraturan Pemerintah tentang PMN yang berasal reklasifikasi Piutang Migas masih dalam proses penetapan.

Rincian Piutang Migas disajikan pada **Daftar 10.**

- Piutang Panas Bumi sebesar Rp117.641.765.300 merupakan piutang setoran bagian pemerintah dan denda dari kegiatan usaha panas bumi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pengusaha	USD	Rp (ekuivalen)
1. Chevron Geothermal Salak, Ltd	9.980.936,67	109.291.256.537
2. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	570.191,06	6.243.592.107
3. Dayabumi Salak Pratama, Ltd	185.630,59	2.032.654.961
4. PT Darajat Geothermal Indonesia	6.781,90	74.261.805
Jumlah	**10.743.540,21**	**117.641.765.300*)**

**) Selisih penjumlahan karena pembulatan*

Piutang Panas Bumi tersebut muncul karena pengusaha panas bumi dalam menghitung kewajibannya kepada Pemerintah membebankan Pertamina Allowance dalam perhitungan *Net Operating Income (NOI)*. Jumlah Piutang sebesar USD10,743,540.21 belum dapat diakui sebagai PNBP karena masih harus diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan (PBB dan PPN). Piutang panas bumi tersebut belum disetor oleh pengusaha panas bumi sampai ada keputusan BPK terhadap keberatan pengusaha panas bumi. Penerimaan dari kegiatan usaha panas bumi/setoran bagian Pemerintah ditampung dalam Rekening Nomor 508.000084 di BI untuk selanjutnya akan disetor ke Rekening BUN sebagai PNBP pertambangan panas bumi setelah diperhitungkan kewajiban perpajakannya.

- Piutang Laba BUMN terdiri dari piutang dividen dan denda sebesar Rp217.066.840.844 yang merupakan akumulasi piutang dari beberapa BUMN yang belum menyetorkan seluruh kewajiban dividen yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). BUMN yang mengajukan permohonan untuk mencicil kewajiban dividen dan denda adalah BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Atas permohonan tersebut, telah dilakukan audit guna menilai kemampuan likuiditas perusahaan. Hasil audit tersebut menyatakan bahwa sebanyak 6 BUMN tersebut telah mengajukan permohonan untuk dapat mengangsur/mencicil kewajiban tersebut selama beberapa tahun yaitu sebanyak 6 BUMN dengan nilai sebesar Rp20.504.221.489. Dari 8 BUMN yang permohonannya masih diproses di Departemen Keuangan, 5 BUMN diantaranya telah selesai diaudit, sedangkan sisanya akan diaudit pada tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp196.562.619.355. Rincian dan status piutang dividen dan denda selengkapnya disajikan dalam **Daftar 11.**

Rincian Piutang Bukan Pajak di K/L dapat dilihat pada **Daftar 12.**

2. Piutang pada BA 070 sebesar Rp276.042.168.098 merupakan piutang akibat lebih bayar PPh TA 2008 sebesar Rp3.423.126.852 dan lebih bayar DBH SDA TA 2008 sebesar Rp272.619.041.246.

3. Piutang kepada PT PPA sebesar Rp8.910.512.481 dan Rp39.996.029.058 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Saldo Awal (1)	39.996.029.058	79.006.894.729
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	1.046.652.097.404	1.400.039.444.445
Dividen atas saham yang dikelola	8.566.099.501	8.890.915.756
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	227.751.325.112	180.815.686.939
Bunga atas obligasi yang dikelola	32.050.000.000	32.310.735.992
Redemption obligasi		50.000.000.000
Hasil Penjualan Properti	120.631.818.393	
Hasil sewa aset properti	12.848.485	7.543.454.545
HPA aset lainnya	42.292.400.000	36.012.000.000
Jumlah HPA	**1.477.956.588.895**	**1.715.612.237.677**
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan		-
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	42.003.000.000	42.865.150.455
Lain-lain	164.173.387	
Jumlah Penerimaan (2)	**1.520.123.762.282**	**1.758.477.388.132**
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	126.195.000.000	127.684.956.505
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali periode sebelumnya yang dibayar tunai pada tahun berjalan	2.792.318.780	4.937.116.010
Insentif Kinerja Perusahaan	84.780.000.000	55.596.799.514
PPN atas Insentif Kinerja Perusahaan	8.478.000.000	5.559.679.951
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	65.441.000.000	
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	1.696.000.000	
Jumlah Pengurangan (3)	**289.382.318.780**	**193.778.551.980**
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((4)=(1)+(2) –(3))	1.270.737.472.560	1.643.705.730.882
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (5)	(1.261.826.960.079)	(1.603.709.701.824)
Jumlah HPA yang masih harus disetor (6) = (4) –(5)	**8.910.512.481**	**39.996.029.058**

C.2.10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp29,35 juta

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp29.352.684 dan Rp82.112.146 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Jumlah tersebut merupakan Saldo Bagian Lancar TPA yang berada di 2 K/L, yaitu (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Badan Pemeriksa Keuangan	-	29.260.000
Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	29.352.684	52.852.146
Jumlah	**29.352.684**	**82.112.146**

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp5,80 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp5.799.034.235 dan Rp4.229.682.020 merupakan saldo Tagihan TGR kementerian negara/lembaga dan BA 062 yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BA 062 dapat dilihat pada **Daftar 13.**

C.2.12. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang

Bagian Lancar RDI/RD Rp23,66 triliun

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp22.657.399.160.000 dan Rp23.180.947.180.000 merupakan bagian lancar RDI/RPD kepada Pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam juta Rp):

Bagian Lancar RDI/RPD	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Pokok Jatuh Tempo (01-01-2009 s.d 31-12-2009)	4.919.496,56	5.109.310,20
Tunggakan Kewajiban Pinjaman (s.d 31 - 12 -2008)	17.136.615,72	16.443.798,17
Kewajiban akrual Bunga, CC dan Denda (s.d 31 -12 -2008)	601.286,87	1.627.838,81
Jumlah	**22.657.399,16**	**23.180.947,18**

Tunggakan Kewajiban Pinjaman sebesar Rp17.136.615,72 juta sampai dengan 31 Desember 2008 terdiri dari (dalam juta Rp):

Tunggakan Kewajiban Pinjaman	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Tunggakan Pokok:		
- Pokok Penarikan Pinjaman	6.087.619,64	5.931.503,90
- Bunga Kapitalisasi yang dijadikan Pokok Pinjaman	643.369,91	574.503,34
Tunggakan Bunga, CC, dan Denda:		
- Bunga Berjalan Terhadap Pokok Penarikan Pinjaman	5.421.371,56	5.176.889,61
- Bunga dari Bunga Kapitalisasi yang dijadikan Pokok Pinjaman	22.972.17	2.676,22
- Commitment Charge	15.194,42	41.791,96
- Denda	4.946.088,00	4.716.433,14
Jumlah	**17.136.615,72**	**16.443.798,17**

Berdasarkan tingkat kolektibilitas, Tunggakan Kewajiban Pinjaman sebesar Rp17.136.615,72 juta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kategori	31 Desember 2008 (*Audited*		31 Desember 2007 (*Audited*)	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
- Dalam perhatian	259.182,67	1,51	95.648,12	0.58
- Kurang lancar	444.287,05	2,59	436.165,93	2.67
- Diragukan	213,51	0,00	3.972,94	0.02
- Macet	16.432.932,49	95,90	15.905.011,18	96.73
Jumlah	**17.136.615,72**	**100,00**	**16.443.798,17**	**100,00**

Rincian Bagian Lancar RDI per sektor dapat dilihat pada **Daftar 14.**

C.2.13. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Rp115,79 miliar

Jumlah Uang Muka Belanja per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp115.785.550.468 dan Rp1.322.504.162.418 merupakan jumlah uang muka dan atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang dan aset tetap, yang berada di beberapa K/L, yaitu (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. BPPT	620.879.400	743.264.278
2. BKN	118.958.328	347.995.140
3. Departemen Perdagangan	42.138.570.000	-
4. KPK	45.314.500	-
5. BRR NAD-Nias	70.495.008.240	1.207.792.696.187
6. Komisi Yudisial	2.366.820.000	2.476.440.000
7. Departemen Luar Negeri	-	56.500.000.000
8. Depdiknas	-	422.695.688
9. BMG	-	1.215.250.000
10. LIPI	-	53.005.821.125
Jumlah	**115.785.550.468**	**1.322.504.162.418**

2.14. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang Kegiatan BLU Rp1,45 triliun

Jumlah Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.453.920.244.591, merupakan piutang yang timbul dalam kegiatan operasional sebesar Rp1.453.196.458.884 dan non operasional BLU sebesar Rp723.785.707 pada tahun 2008.

Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah sebesar Rp1.453.196.458.884 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)
1. Sekretariat Negara	986.208.102.418
2. Departemen Kesehatan	464.393.940.802
3. Kementerian Negara Koperasi dan UKM	1.691.720.664
4. BPPT	902.695.000
Jumlah	**1.453.196.458.884**

Dalam Laporan Keuangan Departemen Pekerjaan Umum disajikan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp567.711.069.348. Dalam rangka konsolidasi dalam LKPP, piutang tersebut direklasifikasi sebagai bagian dari nilai Investasi Non Permanen Lainnya. Lihat ***Catatan C.2.20.***

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp723.785.707 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)
1. Departemen Kesehatan	46.196.666
2. Departemen Pekerjaan Umum	677.589.041
Jumlah	**723.785.707**

Piutang Kegiatan Operasional dan Non Operasional BLU PIP (Departemen Keuangan) masing-masing sebesar Rp21.505.689.090 dan Rp27.310.262.126 direklasifikasi menjadi Investasi Non Permanen Lainnya. (Lihat ***Catatan C.2.20***).

C.2.15. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain Rp12,02 triliun

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp12.023.319.207.884 dan Rp12.321.167.839.147 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas,

yang terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2008 (*Audited*)
1. Piutang di K/L dan BA 062	143.630.256.068	376.081.832.550
2. Piutang 20 BDL	11.879.688.951.816	11.929.088.635.126
3. Bunga dan Denda	-	14.920.043.249
4. Kredit Program	-	1.077.328.222
Jumlah	**12.023.319.207.884**	**12.321.167.839.147**

1. Piutang di K/L dan BA 062 sebesar Rp143.630.256.068 dan Rp376.081.832.550 merupakan piutang yang berada di:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2008 (*Audited*)
1. Departemen Pertahanan	14.068.926.394	12.073.052.256
2. BKPM	337.246.098	-
3. BPPT	3.300.000.000	-
4. Bakorsurtanal	74.172.143	-
5. BRR NAD-Nias	516.968.200	-
6. Subsidi dan Transfer (BA 062)	125.332.943.233	-
7. K/L lainnya	-	364.008.780.294
Jumlah	**143.630.256.068**	**376.081.832.550**

2. Piutang 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.879.688.951.816 merupakan total kewajiban 20 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2008, yang terdiri dari (dalam Rp):

- 15 BDL eks dana talangan pemerintah	8.606.906.001.002
- 5 BDL eks dana penjaminan pemerintah	3.272.782.950.814
Jumlah	**11.879.688.951.816**

- Piutang pada 15 BDL eks dana talangan Pemerintah sebesar Rp8.606.906.001.002, berasal dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Total dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	11.888.938.781.558
Dikurangi:	
Pengembalian s.d. Desember 2006	(228.053.353.977)
Pengembalian tahun 2007	(2.730.645.774.151)
Pengembalian tahun 2008	(323.333.652.428)
Saldo BLBI	**8.606.906.001.002**

Dari 15 BDL eks dana talangan telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cq. Departemen Keuangan dengan 12 BDL , 1 Bank yaitu Bank Umum Majapahit Jaya (DL) telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, sehingga masih terdapat 2 (dua) BDL yang belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT. Bank Jakarta (DL) dan PT. Bank Industri (DL).

- Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan sebesar Rp3.272.782.950.814 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan

perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Total dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	3.321.282.950.814
Dikurangi:	
Pengembalian dari Tim Likuidasi Tahun 2006	(5.000.000.000)
Pengembalian dari Tim Likuidasi Tahun 2007	(28.500.000.000)
Pengembalian dari Tim Likuidasi Tahun 2008	(15.000.000.000)
Saldo BLBI	**3.272.782.950.814**

Penanganan untuk 5 BDL Eks Dana Penjaminan saat ini masih berada di Tim Likuidasi dari masing-masing bank di mana masa tugas tim likuidasinya akan berakhir pada bulan April 2009, sedangkan untuk PT Bank Global Internasional (DL) baru akan berakhir bulan Januari 2010.

Rincian Piutang 20 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 15.**

3. Piutang Bunga dan Denda untuk tahun 2008 disajikan sebagai bagian dari Dana Bergulir yang berada di Departemen Keuangan. Lihat ***Catatan 2.2.19.***

4. Piutang Kredit Program yang merupakan tunggakan yang menjadi bagian Pemerintah atas klaim risiko dalam rangka Program Kredit Ketahanan Pangan sampai dengan 31 Desember 2008 bersaldo nihil karena seluruh kewajiban PT Askrindo telah dibayarkan kepada Pemerintah.

C.2.16. Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU Rp328,59 miliar

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2008 sebesar Rp328.585.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2009. Nilai investasi tersebut berada di BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) di bawah Sekretariat Negara berupa Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

C.2.17. Persediaan

Persediaan Rp17,70 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp17.701.765.092.694 dan Rp6.797.911.546.822 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Persediaan di K/L dan BA 069	15.770.416.471.630	5.820.948.165.642
Persediaan di BLU	156.463.008.935	0
Cadangan Beras Pemerintah	1.679.061.097.172	828.368.826.990
Cadangan Benih Nasional	95.824.514.957	148.594.554.190
Jumlah	**17.701.765.092.694**	**6.797.911.546.822**

Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 16.**

Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 31 Desember 2008 berjumlah 351.065 ton dengan nilai nominal sebesar Rp1.679.061.097.172.

Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) merupakan jumlah kumulatif selama lima tahun yaitu tahun 2004 s.d. 2008 yang belum disalurkan kepada kelompok tani dan saat ini berada di gudang.

C.2.18. Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah

RDI/RPD Rp50,67 triliun

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp50.671.978.070.000 dan Rp39.533.081.330.000 merupakan jumlah pinjaman jangka panjang kepada Pemda, BUMD, dan BUMN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Berikut di bawah ini adalah rincian RDI/RPD (dalam Rp):

Piutang RDI/RPD	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Pokok Pinjaman		
a. Penarikan	115.490.439,01	95.139.719,31
b. Pembayaran	53.166.041,03	43.991.320,60
c. Outstanding (a – b)	62.322.464,19	51.148.398,78
d. Bagian Lancar Pokok Pinjaman	4.919.496,56	5.109.310,20
e. Tunggakan Pokok	6.730.989,55	6.506.007,24
f. RDI/RPD Jangka Panjang (c – d – e)	**50.671.978,07**	**39.533.081,33**
Bunga, CC, dan Denda		
g. Kewajiban akrual Bunga, CC dan Denda (s.d 31 -12 -2008)	601.286,87	1.627.838,81
h. Tunggakan Bunga, CC, dan Denda	10.405.626,17	9.937.790,93
i. Total Bunga, CC, dan Denda (g + h)	11.006.913,04	11.565.629,74
Total (d + e + f + i)	**73.329.377,23**	**62.714.028,52**

Rincian saldo RDI/RPD (termasuk bagian lancar) dapat dilihat pada **Daftar 17.**

Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2007, maka posisi piutang SLA/RDI/RPD terjadi kenaikan Rp10.615.348710.000. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tambahan penarikan pinjaman dan adanya fluktuasi kurs rupiah terhadap valuta asing.

Dalam upaya melakukan optimalisasi piutang negara yang bersumber dari tagihan kewajiban terhadap penerusan pinjaman luar negeri telah dilakukan program restrukturisasi pinjaman.

Penyelesaian restrukturisasi PDAM didasarkan pada PMK 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. Dalam PMK ini penyelesaian piutang pada PDAM didasarkan pada kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara:

1. Penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan penghapusan melalui mekanisme *debt swap to investment*.
2. Penjadwalan kembali atas seluruh tunggakan non pokok.

Penyelesaian restrukturisasi Pemerintah Daerah didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah. Dalam PMK ini, restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali terhadap tunggakan pokok yang disertai dengan:

1. Penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok; atau
2. Kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan *debt swap*.

Untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN telah diterbitkan PMK No.17/PMK.05/2007 dengan tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan penghapusan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan Terbatas.

Beberapa penyelesaian Piutang Negara diselesaikan tersendiri, yaitu *pertama*, berkoordinasi dengan Tim Kerja eks BBO/BBKU dalam penyelesaian permasalahan BBKO dan BBKU; *kedua*, menunggu penyelesaian masalah hukum terkait likuidasi PT Bank Dagang Bali; *ketiga*, Utang Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diselesaikan dengan cara *Debt Swap* untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di NAD.

C.2.19. Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp7,36 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp7.357.677.113.340 dan Rp6.915.945.297.699 merupakan dana Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM, dan lain-lain yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga dan Direktorat Sistem Manajemen Informasi, Departemen Keuangan. Berikut adalah rincian Dana Bergulir (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Departemen Keuangan	5.546.651.426.816	3.793.230.646.948
2. Departemen Perindustrian	9.703.964.922	11.865.481.901
3. Dep. Kelautan dan Perikanan	12.206.756.931	-
4. Kementerian Negara LH	20.044.731.248	5.000.000.000
5. Kementerian Negara Koperasi dan UKM	1.725.100.233.423	3.085.849.168.850
6. BKKBN	43.970.000.000	20.000.000.000
Jumlah	**7.357.677.113.340**	**6.915.945.297.699**

Penjelasan masing-masing Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana Bergulir yang dikelola oleh Departemen Keuangan disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah, PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero). Jumlah tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir	990.101.059.292	1.805.843.088.266
Tunggakan KKOP Pangan MP 2000	91.398.439.221	91.845.982.210
Tunggakan Pengadaan KUT TP 1999/2000	921.647.750.675	922.684.593.580
Tunggakan Kredit Listrik Pedesaan	1.742.226.000	1.742.226.000
Hak Tagih Perkebunan dan Peternakan	996.097.482.140	808.592.711.343
Hak Tagih Pemerintah dari proyek Kredit GLK Gudang, lantai jemur dan kios pupuk Koperasi Unit Desa (GLK-KUD)	-	75.281.771.269
Dana Lingkungan Bergulir	53.284.394.311	53.506.155.708
Dana bergulir KPPA	9.000.000.000	9.000.000.000
Dana Cadangan KUT TP 1999/2000	24.716.396.342	24.734.118.572
Pinjaman KUMK dari SU-005	2.458.663.678.835	0
Jumlah	**5.546.651.426.816**	**3.793.230.646.948**

- Dari jumlah Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp990.101.059.292 yang terkait dengan RDI sebesar Rp80.070.555.791 dan tidak terkait RDI sebesar Rp910.030.503.501. Rincian masing-masing rekening dapat dilihat pada **Daftar 18.**
- Tunggakan KKOP Pangan sebesar Rp91.398.439.221 merupakan hak pemerintah atas Kredit kepada Koperasi dalam rangka Pengadaan Pangan (KKOP Pangan) Musim Panen 2000. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah telah menandatangani perjanjian dengan 5 (lima) bank pelaksana dengan total plafond sebesar Rp500 millar.

- Hak pemerintah sebesar Rp921.647.750.675 merupakan tunggakan yang terkait dengan program KUT Tahun 1999/2000. dalam rangka pelaksanaan KUT TP 1999/2000 tersebut, pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari pemerintah, dengan total plafond Rp1.903 miliar.
- Jumlah Hak Tagih Kredit Listrik Pedesaan (KLP) sebesar Rp1.742.226.000 merupakan angka yang berasal dari PT BRI (Persero). Kredit Listik Pedesaan dimaksudkan untuk pemerataan penerangan listrik bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu membayar penyambungan listrik PLN.
- Hak Tagih sebesar Rp996.097.482.140 merupakan hak tagih yang terdiri dari PIR Perkebunan sebesar Rp519.366.414.773, UPP Perkebunan sebesar Rp362.667.438.617, dan Peternakan sebesar Rp114.063.628.750.
- Dana Lingkungan Bergulir (DLB) sebesar Rp53.284.394.311 terdiri dari Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari dana hibah *Kreditanstalt fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency and Pollution Control Project* yang diteruspinjamkan kepada Bank Pelaksana (5 bank pelaksana: Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Nagari, BPD Bali, dan BNI), bunga dan biaya lainnya. Dana ini diberikan kepada Pemerintah untuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman guna kepentingan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Sebagai *executing agent* dalam kegiatan ini adalah Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).
- Hak tagih KKPA sebesar Rp9.000.000.000. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi yang tergabung dalam Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) dan Koperasi Syariah lainnya serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Pemerintah menyediakan bantuan pendanaan yang bersumber dari RDI sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk disalurkan dengan pola KKPA Bagi Hasil dan bergulir melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dana bantuan tersebut ditampung dalam Rekening Usaha Kecil cq. Proyek KKPA dan bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah ditampung dalam Rekening Dirjen Perbendaharaan di BMI sebesar Rp1.000.000.000 telah dikembalikan oleh BMI ke RDI pada tanggal 30 Maret 2004 dan telah ditransfer ke Rekening No.513.000.000 pada Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta.
- Dana Cadangan KUT sebesar Rp24.716.396.342 merupakan hak pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan KUT Tahun 1999/2000. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 bank pelaksana.
- Pinjaman Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) merupakan pinjaman yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pinjaman pendanaan KUMK merupakan kelanjutan pendanaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan kredit likuiditas. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan pagu sebesar Rp9,97 triliun. Jumlah pinjaman KUMK sebesar Rp2.458.663.678.835 terdiri dari *outstanding* Rp2.437.868.000.000 ditambah piutang dan denda sebesar Rp20.795.678.835. Pada LKPP 2007, pinjaman KUMK ini untuk jumlah *outstanding*-nya sebesar Rp2.830.956.000.000 disajikan sebagai Investasi Non Permanen lainnya, sedangkan piutang bunga dan denda sebesar Rp14.920.043.249 sebagai Piutang Lainnya. Rincian mengenai pencairan pinjaman pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dapat dilihat pada **Daftar 19;** Piutang Bunga dan Denda pada **Daftar 20.**

- Hak Tagih kepada KUD yang berasal dari proyek Kredit Gudang, lantai jemur dan kios pupuk Koperasi Unit Desa (GLK-KUD yang pada LKPP 2007 dilaporkan sebesar Rp75.281.771.269. Pada tahun 2008 diperoleh data bahwa pengelolaan hak tagih tersebut sudah diserahkan ke Departemen Koperasi (Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan GLK-KUD Nomor: BA.4102/M/1991 tanggal 5 Agustus 1991) sehingga untuk posisi 31 Desember 2008 tidak dilaporkan dalam LK BA 098 (Penerusan Pinjaman) di Departemen Keuangan, dan ternyata juga tidak dilaporkan dalam LKKL BA 044 (Kementerian Negara Koperasi dan UKM).

2. Dana Bergulir di Departemen Perindustrian sebesar Rp9.703.964.922 merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag, yang terdiri kas sebesar Rp2.614.186.220; piutang lancar sebesar Rp4.812.647.780; dan piutang tidak lancar sebesar Rp2.277.130.922. Mengingat Dana Bergulir tersebut mengalami kemacetan, maka Menteri Perindustrian memutuskan pembubaran LPT-Indag dan selanjutnya membentuk tim penyelesaian kekayaan negara eks LPT-Indag.

3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) sebesar Rp20.044.731.248 merupakan dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup.

4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun 2008 sebesar Rp1.725.100.233.423 merupakan dana pemerintah yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Nilai tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening perguliran dan piutang yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar Rp3.085.849.168.850 yang berasal antara lain dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perlakuannya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan.

C.2.20. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp1,13 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.128.448.515.668 dan Rp6.916.259.685.177 merupakan investasi yang berada di beberapa K/L, yaitu (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Dep. Keuangan – Dit. SMI	-	2.830.956.000.000
Dep. Keuangan - BLU PIP	1.095.762.653.289	4.071.245.253.373
Dep. Perindustrian	32.685.862.379	14.058.431.804
Jumlah	**1.128.448.515.668**	**6.916.259.685.177**

- Investasi Non Permanen pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) per 31 Desember 2008 telah direklasifikasi ke Dana Bergulir (Pinjaman KUMK). Lihat ***Catatan C.2.19***

- Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp1.095.762.653.289 terdiri dari (dalam Rp):

Pos Neraca pada BLU PIP (Departemen Keuangan)	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Kas pada BLU	218.566.826.494	-
Piutang Operasional BLU kpd BPJT	21.505.689.090	20.087.902.083
Piutang Non Operasional BLU	27.310.262.126	5.659.120.120
Pinjaman kepada BLU BPJT	707.595.178.400	593.630.343.750
Investasi Non Permanen Lainnya	120.784.697.179	-
Dana Bergulir	-	3.451.867.887.420
Saldo akhir	**1.095.762.653.289**	**4.071.245.253.373**

Dalam rangka konsolidasi, pos-pos yang dilaporkan oleh BLU PIP (Dep. Keuangan) tersebut direklasifikasi menjadi Investasi Non Permanen pada LKPP. Selain itu, pada BLU BPJT (Dep. Pekerjaan Umum), Kas pada BLU sebesar Rp161.358.655.920, Piutang Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp567.711.069.348, Utang Biaya Pinjaman sebesar Rp21.474.546.868 dan Utang Jangka Panjang sebesar Rp707.595.178.400, yang terkait dengan pinjaman dari BLU PIP juga dieliminasi, sehingga tidak terjadi pembukuan ganda (*double counting*). Pada LKPP 2007, jumlah investasi non permanen lainnya termasuk dana bergulir yang belum disalurkan. Untuk LKPP 2008, dana yang belum disalurkan tersebut disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan pada Aset Lainnya. Lihat ***Catatan C.2.25 (sub Dana Kelolaan BLU)***

- Investasi Non Permanen pada Departemen Perindustrian sebesar Rp32.685.862.379 merupakan dana program peningkatan industri tekstil dan produk tekstil yang disalurkan kepada sebelas Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai pembayaran pembelian mesin/peralatan yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani.

C.2.21. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara Rp486,06 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp486.062.370.590.619 dan Rp496.606.812.461.827 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, dan Lembaga Internasional dengan jumlah (dalam Rp):

PMN	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. BUMN	466.476.020.059.523	455.367.879.388.622
2. BHMN	3.432.537.716.160	1.341.649.524.757
3. Non BUMN	3.129.482.726.352	3.239.560.005.983
4. Lembaga Internasional	13.024.250.088.584	36.657.723.542.465
5. Badan Usaha Lainnya	20.000.000	-
Jumlah	**486.062.370.590.619**	**496.606.812.461.827**

1. Nilai PMN pada BUMN sebesar Rp466.476.020.059.523 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2008 tersebut merupakan nilai PMN pada 142 BUMN dengan status laporan keuangan sebagai berikut:

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah (Rp)
Audited	114	**288.919.460.647.418**
Unaudited	26	177.134.708.572.105
Prognosa	2	421.850.840.000
Jumlah	**142**	466.476.020.059.523

Rincian penyertaan modal Negara pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 21.A.**

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2008 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 24 BUMN dengan nilai sebesar Rp47.046.675 juta. (**Daftar 21.B**)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2008 belum termasuk PMN pada 1 (satu) BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur. PT Sarana Multi Infrastruktur merupakan perusahaan di bidang pembiayaan infrastruktur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008. Pada tahun 2008, Pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan PMN sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk perusahaan tersebut. Namun, sampai dengan 31 Desember 2008, anggaran dasar perusahaan tersebut masih dalam proses pengesahan, dan dana PMN tersebut ditampung pada *escrow account*.

Dari 142 BUMN, terdapat 15 (lima belas) BUMN yang belum *go public* namun kepemilikan saham Pemerintah kurang dari 100%. Rincian kepemilikan saham 15 BUMN tersebut dapat dilihat pada **Daftar 21.C.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 37.**

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut:

BHMN	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Institut Pertanian Bogor	2.205.448.613.020	735.077.478.369
2. Universitas Airlangga	1.176.933.306.825	472.091.990.105
3. BP MIGAS	50.155.796.315	134.480.056.283
Jumlah	**3.432.537.716.160**	**1.341.649.524.757**

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan pada **Daftar 38.**

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp3.129.482.726.352 merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*). Sampai dengan LKPP Tahun 2008 *Audited* ini disusun, dari 20 perusahaan non BUMN, 2 perusahaan belum mengirimkan laporan keuangannya (PT Atmindo dan PT PPLI), 2 perusahaan telah berhenti beroperasai (PT Semen Kupang dan PT Intirub), 2 perusahaan tidak jelas keberadaannya (PT Asean Copper Product dan PT Asean Bintulu Fertilizer), dan 1 perusahaan dalam proses likuidasi (PT Asean Aceh Fertilizer). Kondisi di atas menyebabkan angka yang disajikan sebagian masih menggunakan data LKPP 2007 (*Audited*). Rincian PMN pada perusahaan minoritas

dapat dilihat pada **Daftar 22.**

4. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2008. Penyertaan dalam bentuk *promissory notes* tidak diperhitungkan dalam nilai penyertaan modal ini. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2008. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 23.**

   Sampai dengan 31 Desember 2008, dari total penyertaan (kuota) pada Lembaga Internasional sebesar Rp41.284.763.735.175, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp28.293.363.646.591, diantaranya sebesar Rp27.990.323.151.942 kepada IMF dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	1 (one) Promissory Note	25 Januari 1999	4.883.348.937.148,45
2	1 (one) Promissory Note	16 Februari 1999	4.682.474.007.721,22
3	1 (one) Promissory Note	15 Oktober 1999	697.548.488.574,03
4	1 (one) Promissory Note	8 November 2001	8.461.987.601.221,20
5	1 (one) Promissory Note	20 Agustus 2003	378.014.617.037,22
6	1 (one) Promissory Note	29 Juli 2004	1.100.098.914.602,23
7	1 (one) Promissory Note	7 Juli 2005	3.754.066.429.191,43
8	1 (one) Promissory Note	18 Januari 2008	1.809.251.902.880,42
9	1 (one) Promissory Note		2.223.532.253.566,32
Jumlah			27.990.323.151.942,50

   Selain penyertaan dengan *promissory notes*, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Atas pembayaran tersebut, BI mencatatnya sebagai dana talangan dan merupakan piutang kepada Pemerintah. Namun, karena status pembayaran yang dilakukan oleh BI masih belum jelas mengingat pada saat melakukan pembayaran tersebut BI masih menjadi bagian Pemerintah, sehingga Pemerintah belum mencatat pembayaran yang dilakukan oleh BI tersebut sebagai utang. Sampai dengan akhir tahun 2008, dana talangan/piutang BI kepada Pemerintah sedang dalam proses pengajuan penghapusan (*write off)*.

5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp20.000.000 merupakan investasi permanen pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN untuk penerbitan SBSN tahun 2008.

C.2.22. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp6,64 miliar

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2008 sebesar Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%.

C.2.23. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp166,81 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp166.808.229.147.871 dan Rp141.370.363.451.861 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas, kecuali pada Otorita Asahan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Bank Indonesia[1)]	149.845.381.000.000	111.629.635.000.000
2. Otorita Batam	8.217.122.658.077	3.661.554.189.037
3. LPS	8.681.906.832.000	6.951.948.944.000
4. Taman Mini Indonesia Indah	28.295.642.401	29.045.300.994
5. Otorita Asahan	449.482.699	449.482.699
6. BP Gedung Manggala Wanabakti	28.589.286.044	26.864.559.749
7. Yayasan Gedung Veteran	6.484.246.650	3.491.432.753
8. BP Kemayoran [2)]	-	5.350.317.647.598
9. BP Gelora Bung Karno [2)]	-	13.661.282.017.192
10. INDRA[3)]	-	55.774.877.839
Jumlah	**166.808.229.147.871**	**141.370.363.451.861**

Keterangan:

1) Merupakan nilai ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BI per 31 Desember 2008 (Audited).

2) BP Kemayoran dan BP Gelora Bung Karno pada tahun 2008 statusnya telah menjadi BLU dan laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara (BA 007), sehingga nilai kekayaan bersihnya tidak disajikan pada Investasi Permanen Lainnya.

3) Program INDRA telah berakhir tanggal 15 Desember 2007.

C.2.24. Aset Tetap

Aset Tetap Rp673,37triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp673.365.149.313.907 dan Rp443.485.970.952.729 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Tanah	280.977.933.438.987	126.356.123.950.050
Peralatan dan Mesin	129.575.032.964.898	128.364.176.462.694
Gedung dan Bangunan	109.119.623.581.182	74.830.730.558.020
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	107.366.714.600.033	94.082.094.925.843
Aset Tetap Lainnya	6.706.750.989.988	6.056.479.440.047
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.619.093.738.820	13.796.365.616.075
Jumlah	**673.365.149.313.907**	**443.485.970.952.729**

Nilai Aset Tetap tersebut tidak termasuk nilai Aset Tetap yang dilaporkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp21.854.490.925.317 yang diusulkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero). Aset Tetap tersebut berupa pembangkit listrik, gardu induk, jaringan listrik, dan peralatan lain.

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2008 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp83.095.181.991.777, dengan rincian:

Jenis Aset Tetap	Jumlah (Rp)
Tanah	75.901.518.685.700
Peralatan dan Mesin	3.480.923.698.078
Gedung dan Bangunan	2.826.576.034.108
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	555.456.640.214
Aset Tetap Lainnya	48.590.833.068
Konstruksi Dalam Pengerjaan	282.116.100.609
Jumlah	**83.095.181.991.777**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp229.879.178.361.178 dari nilai per 31 Desember 2007. Kenaikan nilai Aset Tetap ini selain karena perolehan dari realisasi Belanja Modal TA 2008 sebesar Rp72.772.477.031.152 juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Koreksi atas penyajian nilai aset tetap yang dilakukan oleh 52 K/L (2.054 satker) sebesar Rp48.265.790.846.622 terdiri dari:

Jenis Aset Tetap	Jumlah (Rp)
Tanah	44.876.112.023.147
Peralatan dan Mesin	(2.089.212.772.784)
Gedung dan Bangunan	5.434.602.063.891
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44.405.768.456
Aset Tetap Lainnya	(116.236.088)
Jumlah	**48.265.790.846.622**

- Konsolidasi Aset Tetap-Tanah BLU Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran pada Neraca Sekretariat Negara sebesar Rp74.953.010.921.083.
- Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada beberapa K/L yang lebih baik sehingga aset tetap yang dicatat dan dilaporkan meningkat.

Sampai saat ini, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian atas nilai wajar Aset Tetap pada seluruh K/L (19.196 satker), namun baru 33 K/L (10.254 satker) yang sudah selesai pelaksanaannya. Hasil inventarisasi dan penilaian tersebut telah dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai aset tetap pada 52 K/L (2.054 satker) sebagaimana telah dijelaskan di atas. ***Lihat Catatan Penting Lainnya***.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L disajikan pada **Daftar 24**.

C.2.25. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp422,23 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp422.232.177.150.965 dan Rp308.783.512.011.720 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Tagihan Penjualan Angsuran	554.504.816	264.984.954
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	32.729.236.792	30.048.960.054
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	501.250.000	501.250.000
Aset Tak Berwujud	4.347.118.670.932	1.899.119.911.980

Aset yang Dibatasi Penggunaannya	30.544.739.790.835	21.431.360.880.137
Dana Kelolaan BLU	4.572.815.302.821	-
Dana Penjaminan	167.595.976.198	-
Aset Lain-lain	382.566.122.418.571	285.422.216.024.595
Jumlah	**422.232.177.150.965**	**308.783.512.011.720**

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Saldo TPA per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp554.504.816 dan Rp264.984.954 merupakan saldo TPA yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Departemen Perhubungan	432.000.000	-
2. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	122.504.816	213.684.954
3. Bakosurtanal	-	51.300.000
Jumlah	**554.504.816**	**264.984.954**

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp32.729.236.792 dan Rp30.048.960.054 merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di K/L. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 25.**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp501.250.000 dan Rp501.250.000 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Departemen Hukum dan HAM	220.000.000	220.000.000
2. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS	281.250.000	281.250.000
Jumlah	**501.250.000**	**501.250.000**

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp4.347.118.670.932 dan Rp1.899.119.911.980 merupakan aset yang berupa software, biaya survey/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BA 069. Rincian Aset Tak Berwujud pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 26.**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp30.544.739.790.835 dan Rp21.140.180.453.638 terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Aset di K/L dan BA 069	2.599.026.498.580	552.610.494.485
2. Rekening Jaminan	252.132.862.081	277.588.605.838
3. Rekening Khusus	3.211.106.656.120	1.559.857.860.322
4. Rekening Cadangan	22.842.120.112.460	16.820.283.046.713
5. Dana Abadi Umat	1.635.169.829.354	1.389.756.080.714
6. Bapertarum	5.183.832.240	5.183.832.240
7. Dana Penjaminan	-	826.080.959.825
Jumlah	**30.544.739.790.835**	**21.431.360.880.137**

Masing-masing Aset yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Aset di K/L per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.599.026.498.580 berada di:

   - Departemen Pertahanan sebesar Rp1.924.404.572.003. Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga, dengan rincian GBP3,125,058.31; SGD1,335,594.93; EUR16,508,159.77; JPY46,665,733.00; USD129,616,520.37 dan CHF1,714,592.08 atau ekuivalen dengan Rp1.757.009.260.860 berdasarkan konversi nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2008. Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp37.182.685.417.
   - Departemen Luar Negeri sebesar Rp441.350.836.437. Dana tersebut merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila *remise* (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri. Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp405.205.873.556.
   - Departemen Kehutanan sebesar Rp18.560.981.651 berupa Deposito Terbeku Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS). Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp18.653.781.651.
   - Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp104.717.638.499, berupa Dana Ekonomi Produktif Rp12.689.513.500 dan Dana Penguatan Modal Rp92.028.124.999. Saldo per 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp151.022.872.434 dan Rp100.230.349.758.
   - Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebesar Rp17.655.268.752 merupakan dana yang belum digulirkan.
   - BRR NAD-Nias sebesar Rp67.315.316.490 berupa Kas PMU ReKOMPAK sebesar Rp33.830.599.610 yang belum disalurkan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya dan Kas Komite Beasiswa sebesar Rp33.484.716.880 yang belum disalurkan kepada penerima beasiswa. Dana-dana tersebut tersimpan di rekening BRI. Saldo per 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp59.060.265.372dan Rp45.266.594.517.
   - BA 069 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp25.021.884.748.

2. Saldo Rekening Jaminan sebesar Rp252.132.862.081 berada di:

   - Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral sebesar Rp11.605.862.081 merupakan

rekening penjaminan berupa uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp29.358.565.588.

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp240.527.000.000 merupakan rekening penjaminan berupa uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp248.230.040.250.

3. Saldo Rekening Khusus sebesar Rp3.211.106.656.120 merupakan rekening khusus Pemerintah di BI. Rincian per rekening dapat dilihat pada **Daftar 27.**

4. Rekening Cadangan sebesar Rp22.842.120.112.460 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Rekening Cadangan Reboisasi	5.563.065.414.667	8.330.226.170.050
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	12.468.045.418.908	5.608.892.476.706
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	3.811.009.278.885	2.881.164.399.957
Rekening Cadangan PMN	1.000.000.000.000	-
Jumlah	**22.842.120.112.460**	**16.820.283.046.713**

- Rekening Cadangan Reboisasi, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Departemen Kehutanan. Dana yang terdapat dalam rekening cadangan reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

- Rekening Cadangan Subsidi, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

  Rincian Rekening Cadangan Subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	220.433.592.000
Subsidi Minyak Tanah	367.655.649.000
Subsidi Minyak Solar	278.453.350.000
Subsidi LPG	57.024.692.990
Subsidi Listrik	4.705.443.232.963
Subsidi Pangan	913.470.485.100
Subsidi Perawatan Beras	39.115.727.252
Subsidi Benih	508.321.232.420
Subsidi Pupuk	2.844.357.844.858

Subsidi Minyak Goreng	1.245.992.000
Subsidi PELNI	268.842.667.873
Subsidi PT KAI	136.166.250.000
Subsidi PT Pos dan Giro	29.687.500.000
Subsidi Lainnya (Benih Ikan Budidaya)	19.270.251.000
Bunga, Biaya, dan Pajak (Neto)	1.211.547.218
Sub Jumlah	**10.390.700.014.674**
Konversi minyak tanah ke LPG-BPH Migas	2.054.036.151.700
PSO LKBN Antara	9.277.137.475
PSO Perum BULOG	14.032.115.059
Jumlah	**12.468.045.418.908**

(Lihat juga ***Catatan B.2.2.1. Belanja Subsidi*** dan ***Belanja Lain-lain***)

- Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil sebesar Rp3.811.009.278.885, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rekening ini terdiri dari Cadangan DBH SDA sebesar Rp3.787.441.055.158 dan Cadangan DAK DR sebesar Rp23.568.223.727.
- Rekening Cadangan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp1.000.000.000.000 merupakan rekening penampungan sisa dana PMN Tahun Anggaran 2008 yang belum disalurkan kepada Perusahaan Pembiayaan di Bidang Infrastruktur karena dokumen belum lengkap.

Rincian masing-masing rekening cadangan disajikan pada **Daftar 28.**

5. Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Jumlah sebesar Rp1.635.169.829.354 merupakan jumlah kas yang berada di rekening DAU.
6. Aset Bapertarum sebesar Rp5.183.832.240 merupakan nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bapertarum.
7. Dana Penjaminan untuk tahun 2008 disajikan sebagai akun tersendiri. Lihat **Catatan C.2.**

Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU sebesar Rp4.572.815.302.821 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan pada pihak ketiga, yang berada di Departemen Keuangan sebesar Rp3.179.215.302.821 dan Departemen Kehutanan sebesar Rp1.393.600.000.000.

Dana Kelolaan BLU yang berada di Departemen Keuangan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Jumlah Rupiah
1.	Giro di Bank Mandiri	19.215.302.821
2.	Deposito Bank Mandiri (1 bulan)	750.000.000.000
3.	Deposito Bank BRI (1 bulan)	1.080.000.000.000
4.	Deposito Bank Bukopin (1 bulan)	200.000.000.000
5.	Deposito Bank Jabar (1 bulan)	200.000.000.000

6.	Deposito Bank BNI (1 bulan)	430.000.000.000
7.	Deposito Bank Mandiri Syariah (1 bulan)	100.000.000.000
8.	Deposito Bank BTN (1 bulan)	200.000.000.000
9.	Deposito Bank Permata (1 bulan)	100.000.000.000
10.	Deposito Bank BTN (6 bulan)	100.000.000.000
	JUMLAH	**3.179.215.302.821**

Dana Kelolaan BLU di Departemen Kehutanan sebesar Rp1.393.600.000.000 merupakan realisasi Belanja Modal (Belanja Dana Bergulir) TA 2008 yang akan digulirkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp167.595.976.198 dan Rp291.180.426.499 merupakan dana penjaminan yang berada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dikelola oleh perusahaan penjamin yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp157.313.604.646 dan PT Askrindo sebesar Rp10.282.371.552. Pada LKPP Tahun 2007, dana penjaminan ini disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunannya.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	**31 Desember 2008 (*Audited*)**	**31 Desember 2007 (*Audited*)**
1. K/L dan BA 069	38.580.224.100.687	12.239.995.340.397
2. PT PPA (Persero)	5.056.865.904.061	3.989.193.692.989
3. Tim Koordinasi	7.360.075.725.532	7.360.075.725.532
4. Aset KKKS	303.389.996.550.000	232.422.461.205.748
5. Aset eks Pertamina	28.040.601.746.178	29.358.075.033.000
6. Dit. SMI	138.358.392.113	52.415.026.929
Jumlah	**382.566.122.418.571**	**285.422.216.024.595**

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp38.580.224.100.687 antara lain berupa:
   - Uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum diselesaikan sebesar Rp5.633.217.807.092 dan USD189,604,820.24 atau (ekuivalen Rp7.709.390.588.720).
   - Piutang PNBP di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar ekuivalen Rp8.254.429.276.818 (Rp1.649.151.709.341 dan USD603,221,695.66) periode 2001-2007 yang berasal dari 6 (enam) kontraktor batubara Generasi I dan telah diaudit oleh Tim BPKP. Sampai saat ini, piutang tersebut belum dapat ditagih penuh karena perusahaan tambang batubara dimaksud masih menahan setoran ini sebagai potongan atas restitusi pajak (PPN) yang harus dibayar oleh Pemerintah pada periode tersebut;
   - Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat di Departemen Kehutanan sebesar Rp1.286.222.205.850. Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.368.679.924.899;

- Piutang macet di beberapa K/L yang penagihannya dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
- Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain di K/L disajikan pada **Daftar 29.**

2. Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp5.056.865.904.061 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Daftar 30.**
3. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp7.360.075.725.532 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Termasuk di dalamnya adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp2.235.982.000.000 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU. Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 31.**
4. Aset Lain-lain yang berasal dari BP Migas sebesar Rp303.389.996.550.000 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah).

   Aset tersebut dihitung berdasarkan nilai perolehan dan tidak memperhitungkan nilai depresiasi. Nilai depresiasi dalam aset kegiatan usaha hulu merupakan cerminan dari besarnya nilai perolehan aset kapital untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang telah diganti *cost recovery*-nya. Nilai buku tersebut mencerminkan nilai perolehan aset kapital yang belum diperhitungkan *cost recovery*-nya dalam perhitungan bagi hasil sesuai KKKS.

   Rincian Nilai Kapital Aset Kontrak Kerja Sama Migas per 31 Desember 2008 disajikan pada **Daftar 32.**
5. Aset eks Pertamina sebesar Rp28.040.601.746.178 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset tersebut terdiri atas:

   a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp21.386.569.198.000 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp6.259.705.405.000.

      Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembanguan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan default atas pembayaran tersebut sangat kecil.

      Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008.

b. Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 10 lokasi dengan total nilai sebesar Rp394.327.143.178.

Nilai Aset Lainnya tersebut di atas dihitung berdasarkan hasil penilaian PT Ujatek yang telah direview oleh Ditjen Pajak.

6. Aset di Direktorat Sistem Manajemen Investasi Departemen Keuangan sebesar Rp138.358.392.113, merupakan dana pemerintah yang ditempatkan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia (dahulu Perum Sarana Pengembangan Umum), yang terdiri dari Dana Cadangan Risiko sebesar Rp82.151.423.089; Dana Jaminan Ulang sebesar Rp39.837.197.911; Dana Kelolaan sebesar Rp. 3.594.851.147; dan Dana Risiko/Dana Penampungan Sementara KUT sebesar Rp12.774.919.967. Saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp52.415.026.929

C.2.26. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp233,35 miliar

Utang PFK per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp 233.349.390.887 dan Rp525.494.606.202 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK adalah sebagai berikut:

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
PFK 10% Gaji PNS	10.870.682.295.259	10.788.244.096.359	82.438.198.900
PFK 2% Gaji Terusan	7.949.954.058	2.837.186.000	5.112.768.058
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	1.367.052.278.430	1.253.189.574.000	113.862.704.430
PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	5.184.015.790	3.628.373.000	1.555.642.790
PFK 2% Askes TNI/Polri	87.566.162.709	86.048.897.000	1.517.265.709
PFK Lain-lain	336.522.967.000	307.660.156.000	28.862.811.000
Jumlah	**12.674.957.673.246**	**12.441.608.282.359**	**233.349.390.887**

C.2.27. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp15,59 triliun

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp15.593.144.344.899 dan Rp5.934.335.692.955 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Pada K/L [1)]	756.188.028.669	2.538.969.934.920
Rekening Penjaminan [2)]	252.132.862.081	277.588.605.838
Bapertarum	5.183.832.240	5.183.832.240
Dana Reboisasi - GERHAN	394.023.657.000	-
Pemerintah Daerah [3)]	14.157.487.495.681	3.112.593.319.957
Kesalahan Pemindahbukuan Rekening [4)]	28.128.469.228	-
Jumlah	**15.593.144.344.899**	**5.934.335.692.955**

Keterangan:

*1) Antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 33.***

2) Merupakan kontra akun dari rekening penjaminan di Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral sebesar Rp11.605.862.081 dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp240.527.000.000.

3) *Merupakan kewajiban kepada Pemda yang terkait dengan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan dan dananya masih disimpan pada Rekening Cadangan DBH sebesar Rp3.787.441.055.158, kurang bayar DAK sebesar Rp197.125.958.285, kurang bayar Dana Prasarana Infrastruktur sebesar Rp41.435.198.382, kurang bayar PPh TA 2008 Rp3.423.126.852 dan kurang bayar DBH SDA Migas sebesar Rp10.128.062.157.004 yang terdiri dari DBH Minyak Bumi sebesar Rp5.658.976.922.825 dan DBH Gas Bumi sebesar Rp4.469.085.234.179.*

4) *Merupakan utang karena kesalahan pemindahbukuan rekening dari rekening BUN ke rekening pihak ketiga. Jumlah ini berasal dari penerimaan pemindahbukuan sebesar Rp213.389.292.982 dikurangi pengeluaran pemindahbukuan sebesar Rp185.260.833.754. Lihat* ***Catatan D.2.28****.*

Utang Belanja Subsidi dan Utang Subsidi/PSO yang Belum Disalurkan (Rekening Cadangan) pada LKPP Tahun 2007 disajikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga, dan pada LKPP Tahun 2008 direklasifikasi menjadi Utang Subsidi. Lihat ***Catatan C.2.31***.

C.2.28. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp249,31 miliar

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2008 sebesar Rp249.306.008.127, merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang tersebut berada di Departemen Keuangan sebesar Rp248.976.889.176 dan di Departemen Kesehatan sebesar Rp329.118.951.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di Departemen Keuangan sebesar Rp248.976.889.176 merupakan SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	Jumlah (Rp)
Utang Kelebihan Bayar PPh	162.829.357.506
Utang Kelebihan Bayar PPN/PPnBM	85.982.655.857
Utang Kelebihan Bayar PBB	2.617.507
Utang Kelebihan Bayar BPHTB	6.105.143
Utang Kelebihan Pembayaran Bea Masuk	156.153.163
Jumlah	**248.976.889.176**

C.2.29. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp106,50 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp106.497.354.480.067 dan Rp92.179.566.607.544 merupakan utang pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri	74.113.043.910.604	57.370.840.349.347
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	32.384.310.569.463	34.808.726.258.197
Jumlah	**106.497.354.480.067**	**92.179.566.607.544**

Rincian Bagian Lancar Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Bilateral	36.082.569.384.210	25.514.829.526.410
Multilateral	22.023.164.977.197	18.414.239.177.261
Kredit Ekspor	15.881.011.441.457	13.182.832.139.631
Kredit Komersil	104.687.183.565	125.359.815.169
Leasing	21.610.924.175	133.579.690.878
Jumlah	**74.113.043.910.604**	**57.370.840.349.349**

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri merupakan reklasifikasi Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Bonds	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
I. Fixed Rate Bonds*):		
Nominal	17.703.143.000.000	1.100.000.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	-	(4.196.162.000)
Nilai bersih (nilai buku)	17.703.143.000.000	**1.095.803.838.000**
II. SBN Tanpa Bunga		
Nominal	2.709.000.000.000	6.000.000.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	(150.541.555.000)	(403.259.800.000)
Nilai bersih (nilai buku)	**2.558.458.445.000**	**5.596.740.200.000**
III. Variable Rate Bonds:		
Nominal	8.483.717.000.000	25.746.389.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	0	0
Nilai bersih (nilai buku)	**8.483.717.000.000**	**25.746.389.000.000**
VI. Surat Utang kepada BI **)		
Nominal yg harus diamortisasi	3.638.992.124.463	2.369.793.220.197
Accrued Indexation	0	0
Nilai bersih (nilai buku)	**3.638.992.124.463**	**2.369.793.220.197**
Jumlah (I + II + III+IV)	**32.384.310.569.463**	**34.808.726.258.197**

Keterangan:
**) terdiri dari Fixed Rate dan ORI*
***) terdiri dari SU-005 dan SU-007*

Pada LKPP Tahun 2007, saldo Bagian Lancar Utang Dalam Negeri termasuk saldo Surat Perbendaharan Negara (SPN) dalam kelompok SBN Tanpa Bunga sebesar Rp4.035.409.958.000. Pada LKPP Tahun 2008, SPN disajikan sebagai akun tersendiri. Lihat ***Catatan C.2.32***.

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi DN dapat dilihat pada **Daftar 34.**

C.2.30. Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman Rp20,63 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp20.627.684.251.052 dan Rp15.151.054.705.112, merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Utang Bunga Obligasi	16.433.183.812.189	10.911.985.746.440
Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri	4.194.500.438.863	4.239.068.958.672
Jumlah	**20.627.684.251.052**	**15.151.054.705.112**

Utang Biaya Pinjaman tersebut tidak termasuk Utang Biaya Pinjaman pada BLU BPJT (Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp21.474.546.868 karena telah dieliminasi dengan Piutang pada BLU PIP (Departemen Keuangan). Lihat ***Catatan C.2.20***.

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

1. Utang Bunga Obligasi sebesar Rp16.433.183.812.189 dan Rp10.911.985.746.440 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Fixed Rate Bonds	8.828.468.825.667	7.695.068.729.841
ORI	157.830.533.125	-
SBSN	210.593.838.700	-
Variable Rate Bonds	1.907.928.711.120	1.479.593.953.711
Surat Utang Pemerintah	2.143.873.771.277	275.280.862.916
International Bonds	3.184.488.132.300	1.462.042.199.972
Jumlah	**16.433.183.812.189**	**10.911.985.746.440**

   Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 35**.

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp4.194.500.438.863 dan Rp4.239.068.958.672 terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Utang Bilateral	1.694.250.735.361	1.395.686.143.800
Kredit Komersial	3.835.306.622	5.841.043.044
Kredit Ekspor	778.771.176.897	852.230.342.193
Leasing	51.784.698	1.017.675.669
Multilateral	1.717.591.435.285	1.984.293.753.966
Jumlah	**4.194.500.438.863**	**4.239.068.958.672**

Pada Neraca per 31 Desember 2007 terdapat Utang Bunga Lainnya sebesar Rp17.344.703.962 yang merupakan utang subsidi bunga dalam rangka program Kredit Ketahanan Pangan yang belum ditagih oleh bank pelaksana kepada Pemerintah yang dihitung secara akrual dan harus dibayar. Pada Neraca per 31 Desember 2008, Utang Bunga ini direklasifikasi sebagai bagian dari Utang Subsidi.

C.2.31. Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp12,50 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp12.503.315.266.224 dan Rp19.146.423.391.594, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Utang Belanja Subsidi/PSO	-	13.520.186.210.926
Utang Subsidi/PSO yang Belum Disalurkan	12.468.045.418.908	5.608.892.476.706
Utang Subsidi Bunga Ketahanan Pangan & Kredit Program	35.269.847.316	17.344.703.962
Jumlah	**12.503.315.266.224**	**19.146.423.391.594**

Utang Subsidi/PSO yang Belum Disalurkan merupakan Belanja Subsidi yang telah terealisasi, namun belum disalurkan dan disimpan dalam Rekening Cadangan. Lihat ***Catatan C.2.25***.

Pada LKPP Tahun 2007, Utang Belanja Subsidi/PSO dan Utang Subsidi/PSO yang Belum Disalurkan disajikan pada Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Utang Subsidi Bunga Ketahanan Pangan & Kredit Program disajikan pada Utang Bunga.

C.2.32. Surat Perbendaharaan Negara

Utang SPN/OBN Jangka Pendek Rp9,58 triliun

Jumlah Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Obligasi Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp9.581.589.685.000. SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang akan jatuh tempo pada tahun 2009. Sampai akhir tahun 2008, terdapat 2 seri SPN, yaitu:

- SPN20090430 dengan nilai Rp5.085.376.429.000; dan
- SPN20090731 dengan nilai Rp4.496.213.256.000.

SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada Neraca per 31 Desember 2007, SPN disajikan sebagai bagian dari akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, yaitu SPN2008052801 dengan nilai sebesar Rp4.035.409.958.000.

C.2.33. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp16,06 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp16.057.521.906.234 dan Rp2.760.047.411.652, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
1. Sekretariat Negara	24.392.173.619	-
2. Departemen Pertahanan *)	4.656.534.787.722	2.757.337.130.541
3. Departemen Kesehatan	364.959.294	-
4. Departemen Keuangan – BLU	-	74.060.000
5. Kementerian Koord. Bid. Polhukkam	-	285.908.050
6. Kredit Ketahanan Pangan	-	2.350.313.061
7. Kewajiban kepada KKKS	11.376.229.985.599	-
Jumlah	**16.057.521.906.234**	**2.760.047.411.652**

Utang pada Departemen Pertahanan merupakan tunggakan kepada suplier Bahan Bakar Minyak Pelumas, Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air.

Kewajiban kepada KKKS per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.376.229.985.599 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB terkait dengan penerimaan migas pada rekening 600.000.411.

Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411 per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp15.613.890.374.630. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp11.376.229.985.599, dan sisanya sebesar Rp4.237.660.389.031 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2009 disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	**Jumlah (Rp)**
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	3.637.038.742.398
DMO Fee	181.284.243.984
DMO Fee PT Pertamina EP	7.399.527.480.147
Underlifting KKKS	97.752.890.699
Penyelesaian Hukum Karaha Bodas Company (KBC)	60.626.628.371
Jumlah	**11.376.229.985.599**

C.2.34. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan

Utang Jangka Panjang DN SBN Rp855,09 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp855.087.515.005.382 dan Rp760.348.660.533.648 merupakan posisi utang obligasi yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2008 sebesar Rp855.087.515.005.382 ini terdiri dari SBN berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp732.486.745.275.382 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp122.600.769.730.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Obligasi	**31 Desember 2008 (*Audited*)**	**31 Desember 2007 (*Audited*)**
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	304.086.549.000.000	274.468.042.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	(7.463.796.881.000)	(3.001.386.028.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	296.622.752.119.000	271.466.655.972.000
II. ORI		
Principle Outstanding	31.768.535.000.000	18.884.545.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	31.768.535.000.000	18.884.545.000.000
III. SBN Tanpa Bunga		
Principle Outstanding	8.782.000.000.000	4.500.000.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	(1.357.704.157.000)	(949.726.369.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	7.424.295.843.000	3.550.273.631.000
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	137.450.082.000.000	142.878.799.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	137.450.082.000.000	142.878.799.000.000
V. Surat Utang kepada BI		
Principle Outstanding	254.521.380.313.382	257.009.171.617.648
Accrued Indexation	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	254.521.380.313.382	257.009.171.617.648
VI. SBSN		
Principle Outstanding	4.699.700.000.000	257.009.171.617.648
Accrued Indexation	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku))	4.699.700.000.000	257.009.171.617.648
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	**732.486.745.275.382**	**693.789.445.220.648**

VII. Utang Obligasi dalam Valas (International Bonds-RI0014):		
Principles Outstanding	104.964.419.519.000	65.647.648.587.500
Accrued Indexation	17.675.580.481.000	285.351.412.500
Net Unamortized Premium (Discount)	(39.230.270.000)	626.215.313.000
Subtotal SBN Internasional (Valas)	**122.600.769.730.000**	**66.559.215.313.000**
Total SBN Jangka Panjang	**855.087.515.005.382**	**760.348.660.533.648**

Keterangan:

- *Baik obligasi jenis FR maupun ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.*
- *SBN Tanpa Bunga (Zero Coupon) adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2008, terdapat 4 seri ZC dengan outstanding berkisar dari Rp1,5 triliun sampai dengan Rp5,8 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Zero coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.*
- *Surat Utang kepada Bank Indonesia (BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable). Surat Utang kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU005, SU007 dan SRBI01.*
- *SU002 dan SU004 adalah jenis utang Pemerintah kepada BI berkaitan dengan program penjaminan dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). SU002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1% setahun (dari sebelumnya 3%), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3% setahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).*
- *SU007 memiliki tingkat bunga 0,1% setahun dan jatuh tempo pokok pada tahun 2025. Sesuai terms and conditions Surat Utang Nomor SU-007/MK/2006, angsuran pokok SU007 diamortisasi secara semiannually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (cash) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (tradable).*
- *SRBI01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 dalam rangka penyelesaian BLBI. SRBI01 jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.*
- *SBSN adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan tingkat bunga tetap, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Terdapat 2 seri fixed rate SBSN yaitu IFR0001 dan IFR0002 dengan masa jatuh tempo masing-masing tahun 2015 dan 2018 dengan tingkat imbalan 11,8% dan 11,95%.*

  Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

SBN berdenominasi valas (*International Bonds*) pada LKPP Tahun 2007 masih disajikan sebagai Utang Jangka Panjang Luar Negeri. Saldo *International Bonds* dalam USD per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar USD11,196,417,327 dan USD7,066,484,267.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 36.** Penjelasan lebih lengkap tentang SBN dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2008 di **Daftar 42.**

C.2.35. Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT

Kewajiban Pemerintah Terhadap Program THT Rp1,40 triliun

Jumlah Kewajiban Pemerintah terhadap THT per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.398.608.374.973 dan Rp1.754.377.650.427 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program THT sehubungan dengan saldo *unfunded liability* tahun 2004 kepada PT TASPEN (Persero) akibat perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2007	1.754.377.650.427
Cicilan Tahun 2008	(355.769.275.454)
Saldo per 31 Desember 2008	**1.398.608.374.973**

Pembayaran cicilan *Unfunded* tahun 2008 adalah sebesar Rp500.179.000.000. Sesuai surat Direktorat Jenderal Anggaran No S-3192/AG/2008 tanggal 15 Oktober 2008 hal Percepatan Pelunasan *Unfunded Liability* Tahun 2004, cicilan *Unfunded* tahun 2008 tersebut terdiri atas angsuran pokok sebesar Rp355.769.275.45 dan angsuran bunga sebesar Rp144.409.724.546.

Di samping itu, masih terdapat *unfunded liability* sebesar Rp4.184.876.501.826 yang terdiri dari *unfunded* tahun 2007 sebesar Rp1.639.066.231.444 yang merupakan kekurangan pendanaan yang belum diselesaikan sebagai akibat kenaikan gaji pokok PNS sesuai PP No. 9 Tahun 2007 dan *unfunded liability* tahun 2008 sebesar Rp2.451.864.039.858 yang merupakan kekurangan pendanaan yang belum diselesaikan sebagai akibat kenaikan gaji pokok PNS berdasarkan PP No. 14 Tahun 2008, serta perubahan bunga aktuaria dari 10,10% menjadi 10,05% sebesar Rp93.946.230.524. Namun Pemerintah belum menyepakati atas jumlah tersebut, sehingga tidak dapat diakui sebagai utang kepada PT TASPEN (Persero).

C.2.36. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp655,86 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp655.861.868.010.166 dan Rp529.115.285.469.470 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Bilateral	354.857.222.064.976	276.814.681.076.911
Multilateral	200.835.569.707.657	161.229.599.639.808
Kredit Ekspor	99.779.130.817.811	90.600.471.661.970
Kredit Komersial *)	389.945.419.723	470.533.090.781
Jumlah	**655.861.868.010.166**	**529.115.285.469.470**

*) *Utang Kredit Komersial pada LKPP Tahun 2007 disajikan sebagai Utang Jangka Panjang LN Lainnya*

C.2.37. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan Rp0

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan per 31 Desember 2008 adalah Rp0. Sementara saldo per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp14.808.032.952 yang merupakan utang luar negeri non perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca berupa Utang Sewa Beli.

C.2.38. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Pada LKPP Tahun 2008, tidak terdapat saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya. Pada Neraca per 31 Desember 2007, saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah sebesar Rp470.533.090.781 yang merupakan posisi utang luar negeri komersial kredit yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Pada LKPP Tahun 2008, utang luar negeri ini disajikan sebagai Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan. Lihat ***Catatan C.2.36***.

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri dan Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang Rupiah, serta Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 10, dan Tabel 11.

Tabel 10
Posisi Utang Luar Negeri dan SBN
(Dalam Rp Juta)

Jenis Utang	31 Desember 2008	31 Desember 2007	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (ULN):			
Utang LN – Bagian Lancar	74.113.043,91	57.370.840,35	16.788.416,79
Utang LN – Jangka Panjang	655.861.868,01	529.130.093,50	125.542.863,66
Jumlah ULN	**729.974.911,92**	**586.500.933,85**	**142.331.280,45**
Surat Berharga Negara (SBN):			
SBN – Bagian Lancar	32.384.310,56	34.808.726,26	(2.424.415,70)
SPN	9.581.589,68	4.035.409,96	5.546.179,72
SBN – Jangka Panjang	732.486.745,28	693.789.445,22	38.697.300,06
Obligasi Internasional (Valas)	122.600.769,73	66.559.215,31	56.041.554,42
Jumlah SBN	**897.053.415,25**	**799.192.796,75**	**97.860.618,50**
Jumlah ULN + SBN	**1.627.028.327,17**	**1.385.693.730,60**	**240.191.898,95**

Berdasarkan tabel di atas, posisi utang luar negeri dalam rupiah secara total naik sebesar Rp142.331.280,45 juta, yang terjadi karena apresiasi nilai valuta asing terhadap rupiah. Posisi utang luar negeri berdasarkan valuta uang asing yang bersangkutan mengalami penurunan, terutama utang dalam valuta Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), dan World Bank Dollar (WBD) sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2008	31 Desember 2007	Kenaikan (Penurunan)
ACU	162.347.365	136.293.342	26.054.023
ADB	199.838.304	215.499.254	(15.660.950)
AUD	142.996.678	78.295.730	64.700.948
CAD	178.102.835	189.093.136	(10.990.301)
CHF	380.881.464	432.204.387	(51.322.923)
DKK	70.529.094	84.042.353	(13.513.259)
EUR	6.644.798.698	7.166.012.059	(521.213.361)
GBP	578.749.692	646.473.650	(67.723.958)
IDR	0	292.272.597.998	(292.272.597.998)
JPY	2.820.476.703.104	2.937.674.479.033	(117.197.775.929)
KRW	168.465.965.850	159.775.084.067	8.690.881.783
KWD	14.912.300	16.643.314	(1.731.014)
NOK	0	767.595	(767.595)
SAR	139.186.162	145.341.428	(6.155.266)
SDR	1.736.837.772	1.181.555.607	555.282.165
SEK	0	711.355	(711.355)
USD	19.541.865.143	18.990.173.790	551.691.353
WBD	1.714.649.771	2.371.840.950	(657.191.179)

C.2.39. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

SAL akhir tahun Rp94,62 triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp13.370.514.138.408 merupakan saldo awal SAL Tahun Anggaran 2008. Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp79.950.430.305.529 dan penambahan dari selisih tahun lalu sebesar Rp1.295.200.241.161, sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp94.616.144.685.098 sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Saldo Anggaran Lebih TA 2008 dan 2007
(dalam Rupiah)

Uraian	2008	2007
Saldo Awal	13.370.514.138.408	18.830.302.308.895
- SiLPA (SiKPA)	79.950.430.305.529	(7.387.288.768.184)
- Penambahan dari Selisih Tahun Lalu	1.295.200.241.161	1.927.500.597.697
Saldo Akhir	**94.616.144.685.098**	**13.370.514.138.408**
Rincian SAL terdiri dari:		
- Rek SAL pada BI	3.370.514.138.408	51.259.408.895
- Rek BUN pada BI	67.707.599.065.065	18.170.046.148.742
- Rek KPPN	6.755.052.343.270	5.492.896.654.079
- Rek. Penempatan pada Bank Umum	15.000.000.000.000	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	1.154.712.127.961	1.155.864.576.821
- Kas pada BLU*)	1.351.265.552.098	399.472.197.234
- Utang PFK	(233.349.390.887)	(525.494.606.202)
- Penggunaan Rekening Migas	-	(10.078.330.000.000)
- Utang Kepada Pihak Ketiga	(28.128.459.228)	-
- Selisih Kas Lebih	(461.520.691.590)	(1.295.200.241.161)
SAL Akhir	**94.616.144.685.098**	**13.370.514.138.408**

**) Kas pada BLU merupakan penjumlahan dari saldo Kas pada BLU menurut Laporan Arus Kas tahun 2007 sebesar Rp399.472.197.238 dan tahun 2008 sebesar Rp951.793.354.864, yang merupakan selisih Pendapatan dan Belanja Operasional BLU. Pada LKPP Tahun 2007 Kas pada BLU yang merupakan bagian dari SAL adalah sebesar Rp444.767.605.022, sehingga mengakibatkan adanya selisih sebesar Rp45.295.407.788 dan berdampak pada Selisih KasLlebih tahun 2007.*

C.2.40. SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp79,95 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2008 sebesar Rp79.950.430.305.529 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama TA 2008. Posisi per 31 Desember 2007 mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp7.387.288.768.184. Rincian SiLPA (SiKPA) adalah sebegai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	981.609.433.362.137	707.806.088.304.925
Belanja Negara	985.730.751.086.613	757.649.912.890.878
Surplus (Defisit)	**(4.121.317.760.476)**	**(49.843.824.585.953)**
Pembiayaan Neto	84.071.748.066.005	42.456.535.817.769
SiLPA (SiKPA)	**79.950.430.305.529**	**(7.387.288.768.184)**

Lihat juga ***Catatan B.2.5***.

C.2.41. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya Rp4,72 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp4.723.164.674.583 dan Rp16.178.589.397.550 merupakan Kas dan Bank Pemerintah di luar Rekening BUN Nomor 502.000000 dan Rekening Kas di KPPN, yang terdiri dari (Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Rekening Pemerintah Lainnya (*Selain Rek. SAL, Rek. Migas, Rek. Panas Bumi, dan Rek. Penempatan*)	1.571.899.006.177	2.742.906.454.628
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	89.356.696.276
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA	1.037.831.276.427	45.295.407.788
Investasi Jangka Pendek BLU	328.585.000.000	-
Koreksi Selisih SAL:		
Penggunaan Rekening Migas	-	10.078.330.000.000
Utang Kepada Pihak Ketiga	28.128.459.228	-
Selisih Kas Lebih Tahun Lalu	1.295.200.241.161	1.927.500.597.697
Selisih Kas Lebih Tahun ini	461.520.691.590	1.295.200.241.161
Jumlah	**4.723.164.674.583**	**16.178.589.397.550**

Pada LKPP Tahun 2007, saldo Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp19.584.010.680.384. Saldo tersebut termasuk Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp3.405.421.282.834. Pada LKPP Tahun 2008, saldo Uang Muka dari Rekening BUN merupakan bagian dari Cadangan Piutang, sehingga jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2007 menjadi Rp16.178.589.397.550.

C.2.42. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp131,08 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 dan per 31 Desember 2007 sebesar Rp131.081.703.742.953 dan Rp120.322.421.217.655 merupakan akun lawan dari Piutang dan Uang Muka dari Rekening BUN.

Pada LKPP Tahun 2007, saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp108.296.689.599.084. Jumlah tersebut berasal dari total Piutang sebesar Rp116.916.999.934.821 dikurangi Piutang Migas kepada Non Pertamina sebesar Rp8.579.536.598.232 dan Piutang Panas Bumi sebesar Rp40.773.737.505. Pada LKPP Tahun 2008, Piutang Migas kepada Non Pertamina dan Piutang Panas Bumi, serta Uang Muka dari Rekening BUN merupakan bagian dari saldo Cadangan Piutang.

C.2.43. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Rp17,70 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp17.701.765.092.694 dan Rp6.797.911.546.822 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.44. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp5,63 triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp5.632.683.677.853 dan Rp1.332.297.365.072 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp):

Akun Lawan	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.308.388.040.590	878.054.836.115
Rek. Migas No. 600.000411 *)	4.237.660.389.030	162.925.619.964
Rek. Penerimaan Panas Bumi	86.635.248.233	291.316.908.993
Jumlah	**5.632.683.677.853**	**1.332.297.365.072**

**) Merupakan sebagian dari jumlah dari rekening migas yang telah teridentifikasi sebagai potensi penerimaan Negara, yaitu sebesar Rp15.613.890.374.629 dikurangi estimasi kewajiban kepada KKKS sebesar Rp11.376.229.985.599 (lihat Catatan C.2.33. Utang Jangka Pendek Lainnya).*

Pada LKPP Tahun 2007, saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp9.952.607.700.809. Pada LKPP Tahun 2008, Piutang Migas KKKS dan Piutang Panas Bumi disajikan sebagai bagian dari Cadangan Piutang, sehingga saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2007 disesuaikan menjadi sebesar Rp1.332.297.365.072, yaitu berasal dari Rp Rp9.952.607.700.809 dikurangi saldo Piutang Migas KKKS dan Piutang Panas Bumi masing-masing sebesar Rp7.667.891.525.000 dan Rp117.641.765.300.

C.2.45. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp149,37 triliun

Jumlah perkiraan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar minus Rp149.373.584.063.086 dan minus Rp139.206.837.766.857. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK. Pada posisi per 31 Desember 2008, saldo ini berasal dari Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK, Kewajiban kepada KKKS, dan selisih kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Total Utang Jangka Panjang Pendek	181.343.265.322.490	139.732.332.373.059
Dikurangi:		
Utang PFK	(233.349.390.887)	(525.494.606.202)
Kewajiban kepada KKKS	(11.376.229.985.599)	-
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(20.360.101.882.918)	--
Jumlah	**(149.373.584.063.086)**	**139.206.837.766.857**

C.2.46. Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian lancar Utang minus Rp20,36 triliun

Selisih kurs terhadap Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2008 sebesar minus Rp20.360.101.882.918 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI) yang terkait dengan utang luar negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Selisih Kurs Utang Luar Negeri	Jumlah (Rp)
Bilateral	11.960.559.433.670
Multilateral	3.969.444.370.887
Kredit Ekspor	4.217.086.282.470
Kredit Komersial	6.714.206.315
Leasing	36.292.165.810
Jumlah	20.360.101.882.918

Pada LKPP Tahun 2007, selisih kurs per 31 Desember 2007 disajikan sebesar minus Rp47.657.062.985.254 pada Ekuitas Dana Lancar. Pada LKPP Tahun 2008, selisih kurs per 31 Desember 2007 tersebut disajikan pada Ekuitas Dana Investasi. Lihat ***Catatan C.2.51***.

Selisih kurs dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang untuk setiap jenis mata uang asing dimana utang tersebut dinyatakan baik yang berjangka panjang dan bagian lancarnya.

C.2.47. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp712,04 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp712.035.340.632.398 dan Rp691.342.462.226.564 dan merupakan dana pemerintah pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.48. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp673,37 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp673.365.149.313.907 dan Rp443.485.970.952.729 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset tetap.

C.2.49. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp422,32 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar Rp422.232.177.150.965 dan Rp308.783.512.011.720 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset lainnya. Jumlah ini merupakan akun lawan dari Aset Lainnya.

C.2.50. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp1.314,49 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sebesar minus Rp1.314.489.164.736.406 dan minus Rp1.243.576.068.701.243 tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 200 (*Audited*
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	856.486.123.380.355	695.543.822.871.07
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	655.861.868.010.166	595.689.308.815.42
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(197.858.826.654.115)	(47.657.062.985.25
Jumlah	**1.314.489.164.736.406**	**1.243.576.068.701.24**

C.2.51. Selisih Kurs Utang Jangka Panjang

Selisih Kurs Utang Jangka Panjang minus Rp197,86 triliun

Selisih kurs per 31 Desember 2008 sebesar minus Rp197.858.826.654.115 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI) yang terkait dengan utang luar negeri dan SBN Internasional (Valas). Selisih kurs per 31 Desember 2007 sebesar minus Rp47.657.062.985.254 pada LKPP Tahun 2007 disajikan sebagai Ekuitas Dana Lancar, namun pada LKPP Tahun 2008 ini telah disesuaikan dan disajikan seluruhnya pada Ekuitas Dana Investasi. Rincian selisih kurs per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah (dalam Rp):

Selisih Kurs	31 Desember 2008 (*Audited*)	31 Desember 2007 (*Audited*)
Utang Luar Negeri:		
Bilateral	117.627.180.309.185	28.941.844.496.818
Multilateral	36.198.503.824.283	8.944.126.565.419
Kredit Ekspor	26.495.617.448.528	9.427.567.566.502
Kredit Komersial	25.009.498.874	36.951.375.950
Leasing	16.011	21.221.568.065
Subtotal	180.176.305.673.115	47.371.711.572.754
Obligasi Internasional (Valas)	17.682.520.981.000	285.351.412.500
Jumlah	**197.858.826.654.115**	**47.657.062.985.254**

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Non Uang Persediaan

Terdapat saldo kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada beberapa kementerian negara/lembaga yang bukan merupakan uang persediaan (UP). Pada LKPP Tahun 2008, saldo kas tersebut belum disajikan pada Neraca per 31 Desember 2008. Kas tersebut berasal dari jasa giro dan dari uang honor kegiatan yang belum dibayarkan pada yang berhak. dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah (Rp)	Keterangan
1. Badan Pemeriksa Keuangan	4.575.053	Jasa giro
2. Departemen Pertanian	13.047.894	Jasa giro
3. Lembaga Sandi Negara	121.380	Jasa giro
4. Perpustakaan Nasional	5.907.750	Jasa giro
5. Kepolisian Negara RI	570.779.294	Honor, lembur, dan lain-lain
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan	178.994.319	Jasa Giro Rp3.971.869 Honor kegiatan Rp175.022.450
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal	13.025.625	Jasa giro
8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	184.757	Jasa giro
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.130.083	
10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	7.946.685	Jasa giro Rp2.299.679 Honor kegiatan Rp5.647.006
11. Departemen Perdagangan	3.524.453	Jasa giro
12. BPKP	21.862.293	Jasa giro
13. Komisi Yudisial	3.124.157	Jasa giro
14. BNP2TKI	55.679.387	Honor kegiatan
Jumlah	**879.903.130**	

Namun, untuk saldo kas jasa giro yang telah disajikan oleh K/L dalam Kas di Bendahara Penerimaan tetap disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.

2. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp86.635.248.233. Berikut adalah mutasi Rek. Panas Bumi:

URAIAN	Jumlah (Rp)
I. Saldo Awal	291.316.908.993
II. Penerimaan:	
1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	841.217.455.057
2. Koreksi Pembukuan Kredit *a)*	5.058.818.262
Total Penerimaan	**846.276.273.319**
III. Pengeluaran:	
1. Pembayaran PBB Panas Bumi	98.472.701.523
2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi	7.015.092.758
3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. BUN *b)*	941.384.084.298
4. Pinjaman untuk Dana Talangan *c)*	4.086.055.500
Total Pengeluaran	**1.050.957.934.079**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**(204.681.660.760)**
V. Saldo Akhir (I + IV) *d)*	**86.635.248.233**

Keterangan:

a). Koreksi kredit akibat retur pemindahbukuan pembayaran PBB panas bumi.

b). Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening BUN sebesar Rp941.384.084.298 terdiri dari:

1. PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2006 Rp171.702.948.593
2. PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2007 Rp108.642.971.580
3. PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2008 Rp661.038.164.125

c). Koreksi debit akibat retur pemindahbukuan pembayaran PBB Panas Bumi.

d). Saldo akhir sebesar Rp86.635.248.233 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:

a. Cadangan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) PPN Panas Bumi sebesar Rp22.732.765.471 tahun anggaran 2007 dan 2008 kepada:
   1. Chevron Geothermal Salak, Ltd Rp16.359.577.189
   2. Dayabumi Salak Pratama, Ltd Rp 4.244.393.833
   3. PT Pertamina (Persero) Rp 2.128.794.449

b. Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Tahun 2008 untuk 5 Wilayah Kerja Panas Bumi yang baru sebesar Rp62.929.720.000.

c. Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Triwulan IV Tahun 2008 yang diretur pada transaksi tanggal 26 Desember 2008 dengan alasan nomor rekening salah dan rekening tutup sebesar Rp972.762.762 untuk 2 (dua) kabupaten, yaitu:
   1. Kabupaten Tapanuli Utara Rp765.103.839
   2. Kabupaten Wonosobo Rp207.658.923

3. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004, LKPP Tahun 2005, LKPP Tahun 2006, dan LKPP Tahun 2007 terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (vi) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, teknis maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu: (i) Tahap I dilakukan pada bulan Oktober 2007 s.d. Desember 2007 untuk 20 K/L, dan (ii) Tahap II akan dilakukan pada bulan Februari s.d. Desember 2008 untuk 57 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Sampai dengan 31 Desember 2008, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian telah selesai 53% yaitu pada 10.254 satker dari 19.196 satker yang ada di 76 K/L, dengan nilai koreksi Rp125.594.400.670.427. Penyelesaian sebesar 53% dimaksud termasuk 33 K/L yang terdiri dari 791 satker yang telah selesai 100% dengan nilai koreksi Rp8.661.377.110.689, dan dari 791 satker tersebut koreksi terhadap data SIMAK-BMN baru dilakukan pada 47 satker dengan nilai sebesar Rp4.939.004.588.087. Rincian 33 K/L yang telah 100% selesai melaksanakan inventarisasi dan penilaian adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Sekretariat Negara
5. Departemen Dalam Negeri
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
9. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
11. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
12. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
13. Kementerian Negara PAN
14. Dewan Ketahanan Nasional
15. Kementerian Negara PPN/Bappenas
16. Lembaga Ketahanan Nasional
17. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
18. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
19. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
21. Lembaga Administrasi Negara
22. Badan Kepegawaian Negara
23. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
24. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
25. Komisi Pemberantasan Korupsi
26. Dewan Perwakilan Daerah
27. Komisi Yudisial
28. Bakornas Penanganan Bencana
29. Badan Intelejen Negara
30. BNP2TKI
31. Badan Pertanahan Nasional
32. Badan Tenaga Nuklir Nasional
33. LPP - Radio Republik Indonesia

Selain itu, berdasarkan Laporan BMN yang disampaikan oleh DJKN, terdapat aset tetap ekstrakomptabel per 31 Desember 2008 yang tidak disajikan pada Neraca karena tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan total nilai sebesar Rp1.455.858.985.954, dengan rincian:

Jenis Aset Tetap	Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin	539.737.879.211
Gedung dan Bangunan	315.743.827.648
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	189.222.843.647
Aset Tetap Lainnya	410.518.141.314
Aset Tetap yang Sudah Tidak Digunakan	636.294.134
Jumlah	**1.455.858.985.954**

4. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU tahun 2007 dan tahun 2008 disajikan dalam grafik di bawah ini:

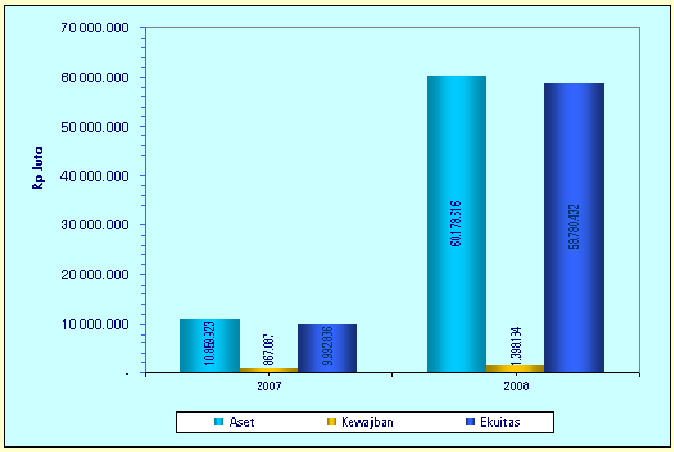

Grafik 44: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2007 dan 2008

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada **Daftar 39**.

5. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Departemen Perhubungan berupa Tugu Peringatan.

b. Departemen Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

c. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
   - Arsip Kertas sebanyak 27.247 km linier
   - Arsip Kartografik dan Kearsitekturan sebanyak 99.794 lembar
   - Arsip Film sebanyak 70.060 reel
   - Arsip Video sebanyak 30.125 buah
   - Arsip Optical Disc sebanyak 427 keping
   - Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel
   - Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.349 kaset
   - Arsip Foto sebanyak 1.663.000 lembar

d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berupa tumbuhan langka yang terdapat pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali.

e. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

6. Kewajiban Kontinjensi

- ***Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunanakan Batu Bara***

  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Pemberian jaminan tersebut didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007.

  Sesuai dengan PMK Nomor 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, jaminan Pemerintah diberikan dalam hal PT PLN (Persero) tidak mampu membayar kewajibannya sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut adalah:
  a. Kebijakan harga jual tenaga listrik;
  b. Kebijakan subsidi listrik dalam rangka kompensasi fungsi kemanfaatan umum;
  c. Kebijakan yang mempengaruhi pasokan clan harga batubara; dan
  d. Kebijakan yang menghentikan atau menunda pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya

  yang mengakibatkan PT PLN tidak mampu membayar kewajibannya.

  Pemenuhan kewajiban pembayaran utang PLN dengan Jaminan Pemerintah dilakukan sebagai langkah terakhir (*last resort*), setelah terlebih dahulu PLN menggunakan secara maksimal sumber arus kas perusahaan untuk menutup kewajibannya kepada kreditur. Pemenuhan kewajiban jaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit (*creditworthiness*) dan sekaligus menurunkan biaya modal proyek.

  Jumlah proyek pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun adalah sebanyak 80 unit yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Nilai investasi keseluruhan proyek 10.000 MW diperkirakan sekitar Rp99,4 triliun, dengan rincian Rp73,5 triliun untuk pembangkit dan Rp25,9 triliun untuk transmisi. Sekitar 85 persen kebutuhan dana proyek pembangkit dan transmisi dipenuhi melalui pembiayaan kredit perbankan baik dari dalam maupun luar negeri.

- ***Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta***

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Jaminan diberikan sebesar 50% dari shortfall atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 penumpang per hari atau 50% dari nilai maksimum

sebesar USD22,500,000 pertahun selama lima tahun.

Jaminan berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2007 untuk jangka waktu 36 bulan. Apabila ketentuan dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.02/2007 pemberian jaminan dinyatakan batal dan tidak berlaku. Sampai pertengahan tahun 2008, investor Proyek Pembangunan Monorail Jakarta belum berhasil mendapatkan fasilitas pembiayaan (*financial close*) sesuai dengan perjanjian perjasama yang telah ditandatangani bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, terdapat kemungkinan proyek ini akan ditinjau kembali oleh pihak-pihak terkait. Mengingat hal tersebut, untuk tahun 2009 diperkirakan belum ada risiko fiskal terkait dengan proyek ini karena proyek monorail belum beroperasi pada tahun 2009 mendatang.

- ***Jaminan Risiko Land Capping atas Proyek Pembangunan Jalan Tol***

  Dalam rangka proyek pembangunan jalan tol, Pemerintah menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Jumlah proyek pembangunan jalan tol mendapat dukungan Pemerintah sebanyak 28 proyek, diantaranya adalah proyek-proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Jakarta Outer Ring Road II (JORR II).

  Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan tanah pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat karena permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan finansial dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya.

  Pemberian dukungan pemerintah dimaksud akan dialokasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yakni tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan total nilai dukungan sebesar Rp4,89 triliun. Mengingat jangka waktu tersebut, kiranya dukungan pemerintah ini bersifat temporer. Arah kebijakan mendatang untuk percepatan pembangunan jalan tol, risiko *land capping* akan ditanggulangi dengan melakukan penyediaan lahan terlebih dahulu oleh kementerian negara/lembaga.

- ***Tuntutan Hukum kepada Pemerintah***

  Dalam sengketa yang terkait dengan kegiatan BPPN, jumlah perkara yang ditangani saat ini adalah 494 perkara, terdiri dari 432 perkara perdata (termasuk 20 perkara baru, 30 perkara niaga (termasuk 1 perkara baru), 7 perkara tata usaha negara (PTUN), 1 perkara pidana dan 24 penyelesaian kewajiban pemeganag saham (PKPS). Beberapa perkara yang mewajibkan pemerintah membayar (perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) adalah sebesar Rp12,2 miliar dan USD104,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

  a. Sebesar Rp7,6 miliar sudah dibayar kepada satu pemilik dana, dan Rp240 juta masih dalam proses pembayaran terhadap satu pemilik dana. Sementara itu, sebesar Rp4,4 miliar dan USD104,7 juta belum dibayar terhadap dua pemilik dana.
  b. Perkara yang berpotensi Pemerintah untuk membayar (perkara masih dalam proses pengadilan) adalah perkara dengan nilai sebesar Rp915,4 miliar dan USD38,2 juta.

7. Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT), iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *current cost financing* yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN TA 2008 sharing pembayaran pensiun antara Pemerintah dan PT Taspen sebesar 91:9. Pada tahun 2009, pemerintah memperbaiki sharing APBN dalam pembayaran pensiun sesuai dengan rencana pengembalian pola pendanaan pensiun secara bertahap 100% beban APBN.

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT (*past service liabilities*). Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2003 terdapat defisit kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp365,47 triliun sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah pada Dana Pensiun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp435,69 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2008.

Untuk program THT, beberapa kebijakan Pemerintah antara lain kenaikan gaji pokok PNS dan perubahan formula perhitungan manfaat, menimbulkan risiko pada APBN terkait dengan kekurangan pendanaan Pemerintah (*unfunded liability*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan formula perhitungan manfaat THT pada tahun 2004

   PT Taspen mencatat adanya kekurangan pendanaan Pemerintah sebesar Rp2 triliun. Terhadap kewajiban ini, mulai tahun 2005 – 2007, Pemerintah mencicil sebesar Rp250,2 miliar per tahun dan pada tahun 2008 Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp500,2 miliar. Besarnya cicilan pembayaran kekurangan pendanaan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

b. Akibat kenaikan gaji PNS 2001, 2003, dan 2007, PT Taspen mencatat adanya kekurangan pendanaan Pemerintah dalam program THT sebesar Rp1,9 triliun.

Kenaikan gaji PNS pada tahun 2008 sebesar 20% menyebabkan adanya kenaikan kekurangan pendanaan pada PT Taspen sebesar Rp2,5 triliun.

8. Lembaga Non Struktural dan Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Lembaga negara non struktural (LNS) merupakan bagian eksekutif (berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri) namun bukan merupakan struktur/bagian dari kementerian, departemen maupun lembaga pemerintah non departemen. Istilah non struktural dikaitkan dengan tidak adanya hubungan organisatoris antara lembaga ini dengan K/L selain hubungan kerja meskipun pendanaannya menginduk ke K/L.

Eksistensi dan fungsinya diatur dalam UU, PP, Keppres maupun Perpres. Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam, ada akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, otorita, staf khusus dan unit kerja. Kesekretariatan LNS biasanya berada di departemen atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari K/L. Pembentukan lembaga negara non struktural dimaksudkan untuk membantu pemerintah menangani masalah yang belum bisa dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal.

Pada tahun 2008 berhasil diinventarisasi sebanyak 90 lembaga. Dari 90 LNS yang berhasil di inventarisasi, baru 65 LNS yang telah menyampaikan laporan, baik semesteran maupun tahunan, dan 9 lembaga belum mengirimkan laporan. Sedangkan 5 lembaga saat ini sudah tidak aktif lagi dan 11 lembaga yang baru dibentuk tahun 2008 belum memiliki alokasi anggaran tersendiri.

Akuntansi atas transaksi keuangan lembaga non struktural mayoritas sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan K/L. Berdasarkan inventarisasi:

- 25 LNS menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kepala Sekretariat atau kepala satuan kerja LNS biasanya merupakan pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- 30 LNS kegiatan operasionalnya didanai dari APBN, baik langsung maupun tidak, dalam arti melalui departemen yang menaungi/terkait atau melalui BA 069 (Belanja Lain-lain).
- 13 LNS dibiayai oleh APBN dan APBD.
- 5 LNS didanai oleh non APBN. Sebagian kecil lembaga memperoleh tambahan pendanaan non APBN dari imbalan atas pelaksanaan tugas, hibah langsung dari luar negeri atau hasil pengelolaan aset negara.

Mayoritas LNS (68 lembaga) merupakan LNS yang pendanaannya bergabung dengan kegiatan K/L atau merupakan satker tersendiri di bawah K/L. Implikasinya, bisa kemungkinan terjadi tumpang tindih tugas/wewenang antara K/L dengan LNS. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN baik untuk laporan keuangan maupun laporan kinerja berada di K/L, bukan dilakukan oleh LNS sebagai lembaga. Karena itu, selain LNS menyusun laporan keuangan seharusnya juga menyusun laporan kinerja agar bisa dilakukan audit kinerja dan audit keuangan kelembagaan sehingga tugas pokok dan fungsi jelas, demikian pula akuntabilitasnya jelas.

Selama tahun 2008, alokasi APBN untuk LNS sebesar Rp2,6 triliun dengan realisasi Rp2,07 triliun. Lima besar pengguna APBN berturut-turut: LPP RRI, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, LPP TVRI, BPH Migas, dan Otorita Batam. Total aset LNS sebesar Rp19,05 triliun. Pemilk aset terbesar berturut-turut: Otorita Batam, Bapertarum-PNS, LPP RRI, LPP TVRI, dan BPH

Migas. Ikhtisar Laporan Keuangan LNS disajikan pada **Daftar 39.**

Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanuasiaan yang tidak mempunyai anggota. UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan menyampaikan laporan keuangan yakni:

1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola Taman Mini Indonesia Indonesia Indah.
2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Departemen Kehutanan.
3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha" di Jalan Sudirman, Semanggi – Jakarta Pusat.

Aset ketiga yayasan/badan pengelola tersebut berjumlah Rp87,83 miliar. Ikhtisar laporan keuangan yayasan tersebut disajikan pada **Daftar 38.**

9. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang Dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006, jumlah ABMA/C yang belum selesai kejelasan status hukumnya adalah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 sesuai Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989. Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007 dan 2008, terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya, dan selanjutnya dituangkan dalam Lampiran PMK No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008, dengan petunjuk penyelesaian sebagai berikut:

a. disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia (apabila telah selesai,

maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMN);

b. disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMD);
c. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
d. dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;
e. dihibahkan;
f. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
g. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pemerintah masih terus melakukan inventarisasi dan penilaian ABMA/C dalam rangka *updating* data. Pada tahun 2007 telah dilakukan penilaian atas sejumlah 67 aset dengan nilai total Rp613.619.131.523 yang diungkapkan pada LKPP Tahun 2007. Pada tahun 2008, telah dilakukan penilaian atas sejumlah 139 aset dengan nilai total Rp733.820.331.364, sehingga jumlah ABMA/C yang telah dinilai pada tahun 2007 dan 2008 adalah 206 (20%) aset dengan nilai total Rp1.347.439.462.887. Dengan demikian, dari jumlah keseluruhan 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya, 803 (80%) aset belum dapat dinilai karena data pendukungnya kurang lengkap.

Pembayaran kompensasi ABMA/C ke Kas Negara pada tahun 2008 adalah sebesar Rp2.326.140.000 sesuai SSBP tgl 7 Juli 2008, yang merupakan pelunasan kompensasi atas Pelepasan Hak Penguasaan Negara terhadap ABMA/C di Jl. Imam Bonjol No. 203 Semarang kepada Yayasan Ibu Kartini Semarang dengan nilai kompensasi keseluruhan sebesar Rp4.652.280.000. Pembayaran sebelumnya telah dilakukan sebesar Rp2.222.634.000 (SSBP tgl 6 Juli 2007) dan Rp103.506.000 (SSBP tgl 30 Agustus 2007).

Rincian ABMA/C disajikan pada **Daftar 40.**

10. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui 3 PMK, yaitu:

- Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.

Sampai dengan 31 Desember 2008, hasil pembahasan rekening yang dilakukan TPRP bersama K/L sebanyak 39.477 rekening dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rek.	Nilai
1.	Disetujui untuk digunakan secara permanen/sementara	32.708	Rp27.441.995.853.474 USD222.730.808 Euro2.861.356
2.	Sudah ditutup	3.930	Rp7.896.890.775.202 USD14.990.316
3.	Tidak terselesaikan pembahasannya	2.839	Rp577.850.110.405 USD219.446

Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2008 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen.

Rekening yang Dibekukan oleh Menteri Keuangan

Menteri Keuangan selaku BUN telah membekukan beberapa rekening pemerintah pada K/L melalui surat kepada Gubernur Bank Indonesia Nomor S-711/MK/2008 tanggal 16 Desember 2008 hal Pembekuan Sementara Rekening Pemerintah pada Bank Umum, dan surat kepada para Pimpinan Bank/Kantor Pos Nomor S-8897/MK.5/2008 tanggal 31 Desember 2008 hal Permintaan Pembekuan Sementara Nomor Rekening.

Kriteria rekening yang dibekukan adalah sebagai berikut:

1). Rekening yang seharusnya ditutup namun belum dilaksanakan;
2). Rekening yang belum dimintakan ijin dari Menteri Keuangan;
3). Rekening tidak dilaporkan.
4). Rekening yang termasuk dalam katagori rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen (diusulkan menjadi BLU);
5). Rekening penerimaan non DIPA.

Jumlah rekening yang dibekukan adalah sebanyak 3.074, dengan rincian:

No	Pengelompokan Rekening	Rek.	Rupiah	USD
1	Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen (diusulkan menjadi BLU)	54	14.735.263.513	-
2	Rekening Penerimaan non DIPA	513	34.787.863.609	1.034
3	Penutupan yang belum/tidak dilaksanakan	1.581	222.227.222.116	-
4	Tidak jelas identitas pemilik rekening	363	511.352.470.631	-
5	Pembahasan *deadlock* (dokumen/informasi tidak lengkap)	563	441.004.324.806	540.005
Total		**3.074**	**1.224.107.144.675**	**541.039**

Rekening yang Diinvestigasi

Pada tanggal 16 Desember 2008 Menteri Keuangan juga menyampaikan permintaan investigasi atas rekening-rekening tertentu kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L melalui surat Nomor S-713/MK/2008, kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor S-710/MK/2008, dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) surat Nomor S-714/MK/2008.

Kriteria dan jumlah rekening yang diinvestigasi adalah:

1). KPK untuk rekening yang memiliki indikasi penyimpangan atau kecurangan kuat sebanyak 260 rekening, senilai Rp314.223.300.000 dan USD11.024.678
2). BPKP untuk rekening yang memiliki indikasi penyimpangan atau kecurangan sedang sebanyak 175 rekening, senilai Rp854.410.908.000 dan USD474.439.

3). APIP K/L yang bersangkutan untuk rekening dengan tingkat permasalahan ringan sebanyak 4.085 rekening, senilai Rp1.325.511.495.000 dan USD10.280.450.

Pada tanggal 20 Maret 2009, KPK telah menyampaikan hasil investigasi rekening kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor SR-05/01-22/03/2009. Berdasarkan laporan tersebut, dari 374 rekening yang diinvestigasi oleh KPK, sebanyak 49 rekening telah ditutup dan telah disetor ke Kas Negara dan/atau rekening khusus yang ditentukan, 77 rekening telah ditutup dan perlu tindakan lebih lanjut, 107 rekening belum ditutup dan perlu tindakan lebih lanjut, dan 141 rekening belum ditutup perlu klarifikasi lebih lanjut oleh K/L.

Pada tanggal 11 Maret 2009, BPKP telah menyampaikan Laporan Perkembangan Audit Rekening Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-813/K/D1/2009. Berdasarkan laporan tersebut, dari 175 rekening yang diinvestigasi oleh BPKP, sebanyak 20 rekening telah sesuai dengan ketentuan, 38 rekening tidak sesuai dengan ketentuan, 113 rekening belum dapat disimpulkan statusnya, dan 4 rekening tidak dapat diaudit.

Sementara itu, dari 58 APIP K/L yang melakukan investigasi rekening, 39 APIP K/L telah menyampaikan laporannya kepada Menteri Keuangan, dengan hasil sementara: 2.171 rekening yang proses penutupannya telah sesuai ketentuan yang berlaku; 61 rekening perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut; 188 rekening belum teridentifikasi; dan 64 rekening baru.

11. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2007

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2007. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada **Daftar 41**.

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO, Dana Cadangan PMN, dan Dana Cadangan DBH

Sampai dengan LKPP Tahun 2008 (*Audited*) ini disusun (per 25 Mei 2009), terdapat sebesar Rp14.147.885.037.456 dana cadangan subsidi/PSO, dana cadangan PMN, dan dana cadangan DBH SDA (lihat ***Catatan C.2.25. Aset Lainnya-Dana yang Dibatasi Penggunaannya***) yang telah disalurkan kepada pihak ketiga, dan sisanya sebesar Rp3.092.025.493.864 telah disetorkan ke Kas Negara.

Rincian dana cadangan yang disalurkan kepada pihak ketiga dan disetorkan ke Kas Negara adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Dana Cadangan	Disalurkan kepada Pihak Ketiga	Disetorkan ke Kas Negara	Total
Subsidi Premium	-	220.433.592.000	220.433.592.000
Subsidi Minyak Tanah	-	367.655.649.000	367.655.649.000
Subsidi Minyak Solar	-	278.453.350.000	278.453.350.000
Subsidi LPG	-	57.024.692.990	57.024.692.990
Subsidi Listrik	4.705.443.232.963	-	4.705.443.232.963
Subsidi Pangan	542.873.794.500	370.596.690.600	913.470.485.100
Subsidi Perawatan Beras	39.115.727.252	-	39.115.727.252
Subsidi Benih	420.776.645.110	87.544.587.310	508.321.232.420
Subsidi Pupuk	1.697.875.943.760	1.146.481.901.098	2.844.357.844.858
Subsidi Minyak Goreng	1.232.142.500	13.849.500	1.245.992.000
Subsidi PELNI	209.360.286.695	59.482.381.178	268.842.667.873
Subsidi PT KAI	136.166.250.000	-	136.166.250.000
Subsidi PT Pos dan Giro	29.687.500.000	-	29.687.500.000
Subsidi Lainnya (Benih Ikan Budidaya)	19.269.643.450	607.550	19.270.251.000
Konversi minyak tanah ke LPG-BPH Migas	1.857.149.931.331	196.886.220.369	2.054.036.151.700
PSO LKBN Antara	7.427.670.674	1.849.466.801	9.277.137.475
PMN	1.000.000.000.000	-	1.000.000.000.000
DBH	3.481.506.269.221	305.602.505.468	3.787.108.774.689
Jumlah	**14.147.885.037.456**	**3.092.025.493.864**	**17.239.910.531.320**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2008 sebesar Rp24,06 triliun

Saldo Awal Kas KPPN dan BUN per 1 Januari 2008 sebesar Rp24.062.415.000.055 merupakan Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2007. Rincian Saldo Awal Kas KPPN dan BUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Saldo Awal Kas KPPN, BUN, & BLU sebelum koreksi:		
Kas di BI dalam Rupiah	18.170.046.148.742	954.310.836.789
Kas di KPPN	5.492.896.654.079	20.594.618.632.501
Kas pada BLU	399.472.197.235	-
Jumlah	24.062.415.000.056	21.548.929.469.290
Koreksi Penambahan:		
Kas di BI dalam Valas USD *)	-	3.806.594.579.799
Saldo Kas pada BLU **)	-	102.188.801.037
Total Koreksi	-	3.908.783.380.836
Saldo Awal Kas KPPN, BUN, & BLU setelah koreksi	**24.062.415.000.056**	**25.457.712.850.126**

Keterangan:

*) Rekening Valuta Asing dalam bentuk USD tersebut sebelumnya diklasifikasikan sebagai rekening pemerintah lainnya. Mulai tahun anggaran 2008, rekening ini digunakan untuk kegiatan operasional BUN.

**) Berupa penambahan saldo Kas pada BLU pada beberapa KPPN karena belum dilaporkan sebagai saldo akhir tahun 2006 dan pengurangan saldo Kas pada BLU pada beberapa KPPN karena kesalahan pencatatan.

PERUBAHAN KAS

Kenaikan Kas pada TA 2008 sebesar Rp51,77 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2008 dan TA 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Operasi	68.558.665.438.284	14.455.137.500.438
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(72.679.983.198.760)	(64.298.947.625.676)
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Pembiayaan	84.071.748.066.005	42.456.535.817.769
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Non Anggaran	(28.174.128.678.312)	5.991.990.918.114
Koreksi Pembukuan	(8.519.253.365)	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	**51.767.782.373.852**	**(1.395.283.389.355)**

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 45.

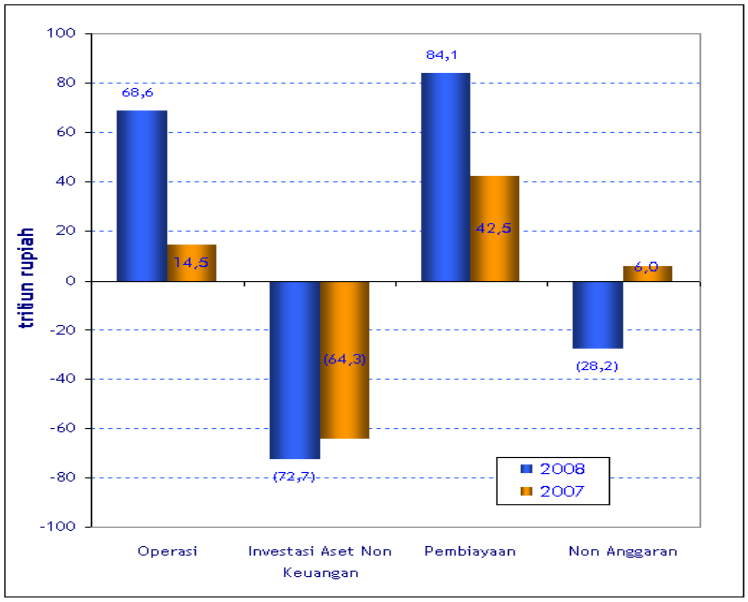

Grafik 45: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2008 sebesar Rp114,96 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2008 sebesar Rp114.957.787.172.859 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Kas BUN, KPPN & BLU *)	75.830.197.373.908	24.062.415.000.055
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.154.712.127.961	1.245.221.273.097
Kas di Bendahara Penerimaan	1.308.388.040.590	878.054.836.115
Kas pada BLU **)	1.021.550.862.953	-
Rekening Pemerintah Lainnya	35.642.938.767.447	3.248.408.392.480
Jumlah Saldo Akhir Kas	**114.957.787.172.859**	**29.434.099.501.747**

*) Kas pada BLU dimaksud adalah Kas pada BLU yang berasal dari selisih Pendapatan dan Belanja Operasional yang telah disahkan oleh KPPN. Kas BUN, KPPN & BUN terdiri dari:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	67.707.599.065.065	18.170.046.148.742
Rekening Kas di KPPN	6.755.052.343.271	5.492.896.654.079
Kas pada BLU	1.367.545.965.572	399.472.197.234
Jumlah Saldo Akhir Kas BUN, KPPN & BLU	**75.830.197.373.908**	**24.062.415.000.055**

**) Kas pada BLU tersebut merupakan saldo kas berdasarkan konsolidasian Neraca BLU pada Neraca kementerian negara/lembaga, di luar kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN, dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Total Kas pada BLU	2.389.096.828.525
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	1.367.545.965.572
Total	**1.021.550.862.953**

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2008 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp68,55 1triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2008. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp68.558.665.438.284, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	981.520.576.889.701	707.723.909.016.604
Dikurangi Arus Kas Keluar	912.961.911.451.417	693.268.771.516.166
Arus Kas Bersih	**68.558.665.438.284**	**14.455.137.500.438**

Terdapat kenaikan Arus Kas Bersih pada tahun 2008 dibanding tahun 2007. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2008 sebesar Rp54.103.527.937.846 atau 374,29 persen dibandingkan dengan TA 2007.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan (Neto) Rp658,7 triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2008 sebesar Rp658.700.790.664.236 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp622.358.691.313.241 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp36.342.099.350.995. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2008 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan	327.497.716.210.755	250.413.168.210.158
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	209.647.424.433.640	178.805.172.457.182
Pajak Bumi dan Bangunan	25.354.279.618.301	23.728.679.283.676
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.573.095.008.708	5.957.945.839.713
Cukai	51.251.752.624.651	44.696.230.626.968
Pajak Lainnya	3.034.423.417.186	2.739.775.823.131
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	622.358.691.313.241	506.340.972.240.828
Dikurangi:		
Pengembalian Pajak Dalam Negeri	-	(36.289.156.507.788)
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	**622.358.691.313.241**	**470.051.815.733.040**
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	22.763.778.701.766	16.975.871.449.123
Bea Keluar	13.578.320.649.229	4.237.376.161.875
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	36.342.099.350.995	21.213.247.610.998
Dikurangi:		
Pengembalian Bea Masuk dan Keluar	-	(276.428.389.948)
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**36.342.099.350.995**	**20.936.819.221.050**
Penerimaan Perpajakan	**658.700.790.664.236**	**490.988.634.954.090**

Dengan demikian, penerimaan Perpajakan dalam TA 2008 lebih besar Rp167.712.155.710.146 atau 34,16 persen dari TA 2007.

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2008 adalah sebesar Rp327.497.716.210.755 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2008 dan TA 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	29.634.966.041.552	18.233.128.691.331
PPh Gas Alam	47.383.937.086.253	29.711.585.424.387
PPh Lainnya Minyak Bumi	-	1.156.372.114
PPh Migas Lainnya	-	446.641.566.073
Jumlah PPh Migas	**77.018.903.127.805**	**48.392.512.053.905**
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	51.709.584.474.271	39.504.482.735.492
PPh Pasal 22	4.950.928.530.134	4.000.102.774.032
PPh Pasal 22 Impor	25.061.597.326.045	16.688.263.750.452
PPh Pasal 23	18.073.368.980.207	15.901.700.733.454
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.608.085.804.988	1.659.434.419.099
PPh Pasal 25/29 Badan	106.368.031.139.110	87.467.097.711.328
PPh Pasal 26	14.880.319.679.351	14.768.409.116.907
PPh Final dan Fiskal LN	25.804.063.323.806	22.015.567.223.401
PPh Non Migas Lainnya	22.833.825.038	15.597.692.088
Jumlah PPh Non Migas	**250.478.813.082.950**	**202.020.656.156.253**
Dikurangi:		
Pengembalian PPh	-	(11.982.242.142.253)
Jumlah Pajak Penghasilan	**327.497.716.210.755**	**238.430.926.067.905**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2008 lebih besar Rp89.066.790.142.850 atau 37,36 persen dari penerimaan TA 2007.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2008 adalah sebesar Rp209.647.424.433.640. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	124.260.306.814.536	122.062.064.302.325
PPN dan PPnBM Impor	85.074.488.797.871	56.430.135.196.508
PPN dan PPnBM lainnya	312.628.821.233	312.972.958.349
Jumlah PPN dan PPnBM	**209.647.424.433.640**	**178.805.172.457.182**
Dikurangi:		
Pengembalian PPN dan PPnBM	-	(24.278.398.624.187)
Jumlah PPN dan PPnBM (Neto)	**209.647.424.433.640**	**154.526.773.832.995**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2008 lebih besar Rp55.120.650.600.645 atau 35,67 persen dari TA 2007

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2008 adalah sebesar Rp25.354.279.618.301. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
PBB Pedesaan	1.426.127.033.997	1.727.169.049.449
PBB Perkotaan	4.970.599.840.866	4.868.593.432.893
PBB Perkebunan	617.640.514.160	403.292.135.569
PBB Kehutanan	155.806.089.441	127.468.299.103
PBB Pertambangan	18.161.293.908.705	16.572.300.701.292
PBB Lainnya	22.812.231.132	29.855.665.370
Jumlah	**25.354.279.618.301**	**23.728.679.283.676**
Dikurangi:		
Pengembalian PBB	-	(5.133.274.818)
Jumlah (Neto)	**25.354.279.618.301**	**23.723.546.008.858**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2008 yang berarti lebih besar Rp1.630.733.609.443 atau 6,87 persen dari TA 2007.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2008 adalah sebesar Rp5.573. 095.008.708 atau lebih kecil Rp380.283.533.287atau 6,39 persen dari penerimaan BPHTB TA 2007 sebesar Rp5.953.378.541.995.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2008 adalah sebesar Rp51.251.752.624.651. Rincian Penerimaan Cukai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Cukai Hasil Tembakau	49.926.361.206.384	43.541.627.850.271
Cukai Ethyl Alkohol	420.655.726.793	433.974.666.059
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	878.524.341.908	687.911.073.062
Denda Administrasi Cukai	11.664.567.796	4.835.506.974
Cukai Lainnya	14.546.781.770	27.881.530.602
Jumlah	**51.251.752.624.651**	**44.696.230.626.968**
Dikurangi:		
Pengembalian Cukai	-	(16.766.771.950)
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	**51.251.752.624.651**	**44.679.463.855.018**

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2008 lebih besar Rp6.572.288.769.633 atau 14,71 persen dari Penerimaan Cukai TA 2007.

f. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2008 adalah sebesar Rp3.034.423.417.186. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penjualan Benda dan Bea Materai	**2.830.223.587.094**	**2.602.142.334.726**
Pajak Tidak Langsung	**1.241.408.827**	**17.886.106.753**
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	139.912.417.040	85.619.294.729
- Bunga Penagihan PPN	62.912.525.736	33.436.603.360
- Bunga Penagihan PPnBM	58.962.447	386.049.001
- Bunga Penagihan PTLL	74.516.042	305.434.562
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	**202.958.421.265**	**119.747.381.652**
Dikurangi:		
Pengembalian Pajak Lainnya	-	(2.048.396.862)
Jumlah Pajak Lainnya (Neto)	**3.034.423.417.186**	**2.737.727.426.269**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2008 lebih besar Rp296.695.990.917 atau 10,84 persen dari TA 2007.

g. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2008 adalah sebesar Rp36.342.099.350.995, terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp22.763.778.701.766 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp13.578.320.649.229. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Bea Masuk		
Bea Masuk	22.341.742.521.621	16.560.490.916.251
Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	910.079.236	901.538.344
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	662.021.390.304	398.657.823.592
Bea Masuk dalam rangka KITE	(271.416.637.071)	1.422.585
Bea Masuk - DPT	3.573.882.791	-
Pabean Lainnya	26.947.464.885	15.819.748.351
Jumlah Bea Masuk	**22.763.778.701.766**	**16.975.871.449.123**
Dikurangi:		
Pengembalian Bea Masuk	-	(276.428.389.948)
Jumlah Bea Masuk (Neto)	**22.763.778.701.766**	**16.699.443.059.175**
Bea Keluar	**13.578.320.649.229**	**4.237.376.161.875**
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**36.342.099.350.995**	**20.936.819.221.050**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 lebih besar Rp15.405.280.129.945 atau 73,58 persen dari Penerimaan Bea Masuk TA 2007.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebesar Rp320,51 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2008 adalah sebesar Rp320.515.773.126.244, lebih besar Rp105.478.247.003.233 atau 49,05 persen dari TA 2007 sebesar Rp215.037.526.123.011.

PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP Lainnya dikurangi dengan pengembalian PNBP.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2008 adalah sebesar Rp224.463.006.839.205. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	169.022.232.949.516	93.604.459.694.458
Pendapatan Gas Alam	42.594.738.596.246	34.894.736.001.498
Pendapatan Pertambangan Umum	9.511.320.109.439	5.877.885.712.092
Pendapatan Kehutanan	2.315.527.436.916	2.105.722.769.296
Pendapatan Perikanan	77.803.662.790	116.259.535.371
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	941.384.084.298	-
Jumlah Penerimaan SDA	**224.463.006.839.205**	**136.599.063.712.715**
Dikurangi:		
Pengembalian Pendapatan SDA	-	(3.715.576.520.750)
Jumlah Penerimaan SDA (Neto)	**224.463.006.839.205**	**132.883.487.191.965**

Dengan demikian, penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2008 lebih besar Rp91.579.519.647.240 atau 68,92 persen dari TA 2007.

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2008 adalah sebesar Rp29.088.370.115.749, yang berarti lebih besar Rp5.865.864.583.869 atau 25,26 persen dari TA 2007 sebesar Rp23.222.505.531.880. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2008 adalah sebesar Rp66.964.396.171.290 Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	2.780.709.999.300	4.149.309.247.298
Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas	16.945.896.959.837	-
Pendapatan Sewa	105.804.495.424	61.897.671.664
Pendapatan Jasa I	13.603.569.484.065	8.945.029.075.143
Pendapatan Jasa II	1.542.435.111.832	2.087.027.730.609
Pendapatan Jasa Luar Negeri	337.097.503.805	-
Pendapatan Jasa Perbankan	2.779.997.726	-
Pendapatan Atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	353.540.863.222	-
Pendapatan Jasa Lainnya	269.696.992.630	-
Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri	-	254.407.935.947
Pendapatan Bunga	206.222.008.716	47.954.230.569
Pendapatan Gain On Bond Redemption	214.711.500.000	283.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	78.023.491.000	639.299.403.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	483.533.775.811	78.323.060.638
Pendapatan Pendidikan	4.144.460.220.207	3.326.174.885.770
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	581.543.822.550	47.324.054.456
Pendapatan Iuran dan Denda	648.294.535.990	420.637.840.782

Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	8.831.615.131.904
Pendapatan Pelunasan Piutang	8.252.846.640.991	8.540.498.248.258
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.968.682.102.559	297.709.370.509
Pendapatan Lain-lain	10.710.252.479.518	19.732.634.197.214
Pendapatan BLU	**3.734.294.186.107**	**2.131.236.268.266**
Jumlah PNBP Lainnya	**66.964.396.171.290**	**59.591.361.352.027**
Dikurangi:		
Pengembalian PNBP	-	(659.827.952.861)
Jumlah PNBP Lainnya (Neto)	**66.964.396.171.290**	**58.931.533.399.166**

Dengan demikian, PNBP Lainnya pada TA 2008 lebih besar Rp8.032.862.772.124 atau 13,63 persen dari TA 2007.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Hibah sebesar Rp2,3 triliun

Penerimaan Hibah pada TA 2008 adalah sebesar Rp2.304.013.099.221. Penerimaan ini berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya, serta berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	430.000	33.481.000
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	15.361.000	273.181.058
Hibah Dalam Negeri Lainnya	17.994.568.266	37.867.000
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**18.010.359.266**	**344.529.058**
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	3.741.828.840	-
Hibah Luar Negeri – Bilateral	256.463.093.220	251.067.417.683
Hibah Luar Negeri – Multilateral	2.020.207.941.290	1.445.596.798.554
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	5.589.876.605	739.194.208
Jumlah Hibah Luar Negeri	**2.286.002.739.955**	**1.697.403.410.445**
Jumlah Hibah	**2.304.013.099.221**	**1.697.747.939.503**

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2008 lebih kecil Rp606.265.159.718 atau 35,71 persen dari TA 2007.

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp112,77 triliun

Belanja Pegawai pada TA 2008 adalah sebesar Rp112.773.501.584.283. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	31.352.082.400.175	25.137.070.560.775
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	29.711.485.664.995	24.459.888.791.991
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	684.609.479.009	382.023.312.487
Belanja Pegawai Perjan	-	19.458.296
Belanja Gaji Dokter PTT	348.662.780.000	392.201.869.649
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	102.804.311.885	-
Belanja Honorarium	7.188.474.771.114	7.128.345.252.804
Belanja Lembur	300.337.913.297	247.789.504.238

Belanja Vakasi	279.198.783.848	552.183.449.998
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	5.544.525.991.215	3.682.883.263.237
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	36.042.884.061.635	27.713.736.153.904
Belanja Asuransi Kesehatan	1.022.147.961.887	675.301.964.800
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	131.050.844.600	53.494.390.000
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	(1.249.559.227)	115.282.935.000
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub Pada PT KAI	66.486.179.850	-
Jumlah Belanja Pegawai	**112.773.501.584.283**	**90.540.220.907.179**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(181.614.251.104)
Belanja Pegawai (Neto)	**112.773.501.584.283**	**90.358.606.656.075**

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2008 lebih besar Rp22.414.894.928.208 atau 24,81 persen dari TA 2007.

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp55,88 triliun

Belanja Barang pada TA 2008 adalah sebesar Rp55.887.772.437.813 yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Barang	28.330.706.664.660	30.031.434.368.985
Belanja Jasa	8.998.990.429.539	9.013.462.489.946
Belanja Pemeliharaan	4.914.036.805.821	4.795.695.522.125
Belanja Perjalanan	11.109.638.927.693	9.038.651.003.132
Belanja Barang BLU	2.534.399.610.100	1.813.682.644.316
Jumlah Belanja Barang	**55.887.772.437.813**	**54.692.926.028.504**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Barang	-	(297.472.466.297)
Jumlah Belanja Barang (Neto)	**55.887.772.437.813**	**54.395.453.562.207**

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2008 ini lebih besar Rp1.492.318.875.606 atau 2,74 persen dari TA 2007.

D.2.6. Bunga Utang

Belanja Bunga Utang sebesar Rp88,35 triliun

Belanja Bunga Utang pada TA 2008 sebesar Rp88.352.325.843.120 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Belanja Bunga Utang mengalami kenaikan Rp8.607.983.911.876 atau 10,79 persen dari Belanja Bunga Utang TA 2007 sebesar Rp79.744.341.931.244.

Rincian Belanja Bunga Utang tersebut adalah sebagai berikut:

Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp60.527.558.544.564 merupakan pembayaran bunga atas Surat Berharga Negara (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN	50.665.821.498.456	49.041.615.225.494
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	8.190.473.166.800	3.013.460.888.233
Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption	68.887.500.000	2.019.787.143.903
Belanja Pembayaran Denda	909.162.449.308	-
Pembayaran Discount Obligasi LN	693.213.930.000	217.926.031.986
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	**60.527.558.544.564**	**54.292.789.289.616**
Dikurangi:		
Pengembalian Pembayaran Bunga Utang DN	-	(58.489.557.347)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN (Neto)	**60.527.558.544.564**	**54.234.299.732.269**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri adalah sebesar Rp27.828.380.454.478 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pembayaran Bunga Utang LN	27.824.767.298.556	25.679.238.858.519
Pengembalian Pembayaran Bunga Utang LN	-	(169.196.659.544)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN (Neto)	**27.824.767.298.556**	**25.510.042.198.975**

D.2.7. Subsidi

Subsidi sebesar Rp275,29 triliun

Belanja Subsidi pada TA 2008 sebesar Rp275.289.975.892.789 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	139.106.706.629.016	83.817.316.516.878
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	112.169.131.623.737	46.397.391.947.443
Subsidi Non BBM - Bunga kredit/Penyertaan Resiko	-	349.002.642.983
Subsidi Non BBM - Pajak	21.018.204.523.594	17.113.608.867.635
Subsidi Non BBM - Lainnya	101.865.316.900	1.514.000.000.000
Subsidi Non BBM - Harga/biaya II	225.708.976.000	-
Subtotal	133.514.910.440.231	65.374.003.458.061
Subsidi dalam rangka PSO	1.729.115.000.000	1.025.000.000.000
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**274.350.732.069.247**	**150.216.319.974.939**
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	939.243.823.542	-
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	**939.243.823.542**	**-**
Jumlah Belanja Subsidi	**275.289.975.892.789**	**150.216.319.974.939**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja subsidi	-	(2.169.523.892)
Jumlah Belanja Subsidi (Neto)	**275.289.975.892.789**	**150.214.150.451.047**

Dengan demikian, Subsidi TA 2008 ini lebih besar Rp125.075.825.441.742 atau 83,27 persen dari TA 2007 sebesar Rp150.214.150.451.047.

D.2. 8. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar Rp56,93 triliun

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp56.929.790.831.588 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	3.851.998.034.848	14.902.741.160.691
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	28.036.643.311.159	17.033.081.292.012
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.543.219.733.040	4.407.707.942.828
Beasiswa	3.415.549.045.545	1.947.870.866.063
Lembaga Peribadatan	240.270.875.991	87.560.422.390
Lembaga Sosial Lainnya	17.842.109.831.005	11.453.545.812.169
Jumlah Bantuan Sosial	**56.929.790.831.588**	**49.832.507.496.153**
Dikurangi:		
Pengembalian Bantuan Sosial	-	(163.564.335.941)
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	**56.929.790.831.588**	**49.668.943.160.212**

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2008 ini lebih besar Rp7.260.847.671.376 atau 14,62 persen dari TA 2007.

D.2.9. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp31,1 triliun

Belanja Lain-lain pada TA 2008 adalah sebesar Rp31.096.657.038.061, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Rekonstruksi Aceh	1.761.238.677	-
Kerjasama Teknis Internasional	9.815.016.163	61.921.347.796
Pengeluaran Tak Tersangka	(168.474.382)	10.923.071.004
Cadangan Umum	(128.292.188)	1.003.702.168.655
Pemilu tahunan	1.967.422.531.623	-
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	12.302.535.600	16.579.982.000
Cadangan Dana Reboisasi	1.853.993.336.158	3.706.939.363.563
Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	22.960.310.040	120.244.000
Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	-	704.192.785.376
Belanja Lainnya	27.228.698.836.370	10.152.333.775.152
Jumlah Belanja Lain-lain	**31.096.657.038.061**	**15.656.712.737.546**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Lain-lain	-	(32.949.786.065)
Jumlah Belanja Lain-lain (Neto)	**31.096.657.038.061**	**15.623.762.951.481**

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2008 mengalami penurunan sebesar Rp15.472.894.086.580 atau 99,03 persen dari TA 2007.

D.2.10. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak sebesar Rp37,88 triliun

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2008 adalah sebesar Rp37.878.955.602.847, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	9.988.288.799.168	7.965.277.891.773
Bagi Hasil PBB	22.251.771.746.068	22.584.576.028.744
Bagi Hasil BPHTB	5.638.895.057.611	4.440.558.734.936
Jumlah Bagi Hasil Pajak	**37.878.955.602.847**	**34.990.412.655.453**
Dikurangi:		
Pengembalian Bagi Hasil Pajak	-	(62.156.516)
Jumlah Bagi Hasil Pajak (Neto)	**37.878.955.602.847**	**34.990.350.498.937**

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2008 lebih besar Rp2.888.605.103.910 atau 8,26 persen dari TA 2007.

D.2.11. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp40,74 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam TA 2008 adalah sebesar Rp40.739.618.901.261 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Bagi Hasil Minyak Bumi	18.916.323.740.451	12.237.540.639.508
Bagi Hasil Gas Alam	14.178.199.225.782	9.741.263.758.765
Bagi Hasil Pertambangan Umum	6.191.652.830.572	4.227.570.843.387
Bagi Hasil Kehutanan	1.389.443.104.456	1.724.240.180.775
Bagi Hasil Perikanan	64.000.000.000	166.054.154.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	**40.739.618.901.261**	**28.096.669.576.435**
Dikurangi:		
Pengembalian Bagi Hasil SDA	-	(144.731.573.031)
Jumlah Bagi Hasil SDA (Neto)	**40.739.618.901.261**	**27.951.938.003.404**

Dengan demikian, Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2008 lebih besar Rp12.787.680.897.857 atau 45,75 persen dari TA 2007.

D.2.12. Dana Alokasi Umum

DAU sebesar Rp179,51 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2008 sebesar Rp179.507.144.871.000, jumlah tersebut lebih besar Rp14.698.379.742.648 atau 8,92 persen dari TA 2007 sebesar Rp164.808.765.128.352.

D.2.13. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp20,79 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepda propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2008 sebesar Rp20.787.346.700.000, jumlah tersebut lebih besar Rp4.549.527.246.926 atau 28,02 persen dari TA 2007 sebesar Rp16.237.819.453.074.

D.2.14. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp7,51 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2008 sebesar Rp7.510.285.794.000, jumlah tersebut lebih besar Rp3.451.937.794.000 atau 85,06 persen dari TA 2007 sebesar Rp4.058.348.000.000.

D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp6,21 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2008 adalah sebesar Rp6.208.535.954.655, lebih besar Rp992.244.234.522 atau 19,02 persen dari TA 2007 sebesar Rp5.216.291.720.133.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar minus Rp72,68 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Pada TA 2008 menunjukkan arus kas keluar neto sebesar Rp72.679.983.198.760 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Arus Masuk	88.856.436.436	82.193.749.036
Dikurangi Arus Keluar	72.768.839.635.196	64.381.141.374.712
Arus Kas Bersih	(72.679.983.198.760)	(64.298.947.625.676)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan pada TA 2008 lebih besar Rp8.381.035.573.084 dari TA 2007.

D.2.16. Penjualan Aset

Penjualan Aset sebesar Rp88,86 miliar

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2008 adalah sebesar Rp88.856.436.436 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	2.508.711.855	1.974.658.389
Penjualan Kendaraan Bermotor	1.380.325.056	1.265.464.239
Penjualan Sewa Beli	50.342.104.439	50.773.778.260
Penjualan Aset Tetap Lainnya	2.523.973.328	2.769.299.900
Penjualan Aset Lainnya	32.101.321.758	25.541.474.003
Jumlah Penjualan Aset	**88.856.436.436**	**82.324.674.791**
Dikurangi:		
Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset	-	(130.925.755)
Jumlah Penjualan Aset (Neto)	**88.856.436.436**	**82.193.749.036**

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2008 lebih besar Rp6.662.687.400 atau 8,11 persen dari TA 2007.

D.2.17. Belanja Aset Tetap

Belanja Aset Tetap sebesar Rp72,77 triliun

Belanja Aset Tetap pada TA 2008 adalah sebesar Rp72.768.839.635.196 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	1.353.416.610.290	1.475.771.876.246
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.094.404.266.955	21.383.263.674.964
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.842.369.999.536	14.587.477.079.146
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31.503.297.109.251	23.104.325.720.664
Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi	1.057.910.007.841	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.685.620.833.654	3.827.647.782.039
Belanja Modal BLU	231.820.807.669	20.101.823.927
Jumlah Belanja Aset Tetap	**72.768.839.635.196**	**64.398.587.956.986**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Modal	-	(17.446.582.274)
Jumlah Belanja Aset Tetap (Neto)	**72.768.839.635.196**	**64.381.141.374.712**

Belanja ini pada TA 2008 lebih besar Rp8.387.698.260.484 atau 13,03 persen dari TA 2007.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp68.558.665.433.816 dan Arus Kas Bersih Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp72.679.983.198.760 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp4.121.317.764.944.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp84,07 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2008 adalah sebesar Rp84.071.748.066.005 Jumlah tersebut berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Arus Masuk	241.535.371.694.559	176.258.508.841.762
Dikurangi Arus Keluar	157.463.623.628.554	133.801.973.023.993
Arus Kas Bersih	**84.071.748.066.005**	**42.456.535.817.769**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2008 lebih besar Rp41.615.212.248.236 dari TA 2007.

D.2.18. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp135,28 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2008 adalah sebesar Rp135.897.341.832.205, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Rekening Pemerintah	299.999.999.959	4.309.393.224.061
Dana Eks. Moratorium	-	6.342.600.000.000
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	2.902.038.528.402	5.416.839.483.371
Surat Berharga Negara/Obligasi	132.695.303.303.844	116.858.250.704.500
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**135.897.341.832.205**	**132.927.083.411.932**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2008 lebih besar Rp2.970.258.420.273 atau 2,23 persen dibandingkan dengan TA 2007.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah merupakan penerimaan pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah pada TA 2008 sebesar Rp299.999.999.959, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	-	279.042.900.000
Penerimaan dari Penutupan Rekening *)	-	30.350.324.061
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi	299.999.999.959	4.500.000.000.000
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	**299.999.999.959**	**4.809.393.224.061**
Dikurangi:		
Pengembalian Pembiayaan dari RDI	-	(500.000.000.000)
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	**299.999.999.959**	**4.309.393.224.061**

*) Sesuai dengan Bagan Akun Standar, seluruh penerimaan dari Penutupan Rekening pada TA 2008, merupakan bagian dari PNBP.

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2008 lebih kecil Rp4.009.393.224.102 atau 93,04 persen dari TA 2007.

b. Dana Eks Moratorium

Pada TA 2008 tidak terdapat realisasi Penerimaan pembiayaan dari Dana Eks Moratorium. Sedangkan pada TA 2007 penerimaan pembiayaan dari Dana Eks Moratorium adalah sebesar Rp6.342.600.000.000 yang merupakan penerimaan pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh.

c. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2008 adalah sebesar Rp2.902.038.528.402, berarti lebih kecil Rp2.514.800.954.969 atau 46,43 persen dari penerimaan pada TA 2007 sebesar Rp5.416.839.483.371. Penerimaan ini termasuk Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp1.462.400.402.086.

d. Surat Berharga Negara

Penerimaan pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp132.078.681.651.400 merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi, maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian dari penerimaan pembiayaan penerbitan SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audite*
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	10.012.000.000.000	4.168.800.000.0
Penjualan Obligasi DN	76.791.640.000.000	97.992.895.000.0
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.248.846.053.000	1.120.907.117.0
Penjualan SBSN	4.716.365.166.900	
Penerbitan/Penjualan Obligasi Valas	39.309.830.431.500	13.575.648.587.5
Utang Bunga Obligasi Negara Valas	616.621.652.444	
Total	**132.695.303.303.844**	**116.858.250.704.5**

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2008 lebih besar Rp15.837.052.599.344 atau 13,55 persen dibanding TA 2007.

D.2.19. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp50,22 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2008 sebesar Rp50.218.749.931.906 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pinjaman Program	30.100.439.755.174	19.607.480.189.151
Pinjaman Proyek	20.118.310.176.732	14.462.567.128.535
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**50.218.749.931.906**	**34.070.047.317.686**

Dengan demikian, penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2008 lebih besar Rp16.148.702.614.220 atau 47,40 persen dari TA 2007.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2008 adalah sebesar Rp30.100.439.755.174, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audit*
Program Bilateral	8.021.748.614.400	194.789.052.849.1
Program Mutilateral	22.078.691.140.774	15.881.689.500.0
Jumlah Pinjaman Program	**30.100.439.755.174**	**210.670.742.349.1**
Dikurangi:		
Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari OECF	-	(191.063.262.160.0(
Jumlah Pinjaman Program (Neto)	**30.100.439.755.174**	**19.607.480.189.1**

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2008 lebih besar Rp10.492.959.566.023 atau Rp53,52 persen dari TA 2007.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2008 adalah sebesar Rp20.118.310.176.732, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	7.677.549.041.030	5.467.822.744.486
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.873.858.103.991	5.204.974.233.105
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.274.539.437.119	3.350.335.783.286
Pinjaman Proyek Lainnya	2.292.363.594.592	439.490.286.838
Jumlah Pinjaman Proyek	**20.118.310.176.732**	**14.462.623.047.715**
Dikurangi:		
Pengembalian	-	(55.919.180)
Jumlah Pinjaman Proyek (Neto)	**20.118.310.176.732**	**14.462.567.128.535**

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2008 lebih besar Rp5.655.743.048.197 atau 39,11 persen dibandingkan TA 2007.

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp55,42 triliun

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2008 sebesar Rp55.419.279.930.448 berasal dari penyesuaian penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Jumlah ini berarti lebih besar Rp46.157.901.818.304 dari penerimaan TA 2007 sebesar Rp9.261.378.112.144.

D.2.21. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp46,17 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2008 adalah sebesar Rp46.779.041.977.082 yang digunakan untuk pelunasan obligasi dan pembayaran bunga obligasi. Jumlah tersebut lebih kecil Rp12.907.021.570.516 atau 21,62 persen dibandingkan TA 2007 sebesar Rp59.686.063.547.598.

D.2.22. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp64,04 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2008 sebesar Rp63.435.310.742.077 merupakan pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Pinjaman Program	5.866.722.194.538	-
Pinjaman Proyek	57.490.860.565.371	57.922.459.152.174
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan Tahun 2007	77.727.982.168	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**63.435.310.742.077**	**57.922.459.152.174**

Jumlah tersebut lebih besar Rp5.512.851.589.903 atau 9,52 persen dibandingkan dengan TA 2007 sebesar Rp57.922.459.152.174.

D.2.23. Penyertaan Modal Negara

PMN sebesar Rp2,5 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah. Penyertaan Modal Negara dalam TA 2008 adalah sebesar Rp2.500.020.000.000, berarti lebih kecil sebesar Rp2.199.980.000.000 atau 46,81 persen dibandingkan dengan TA 2007 sebesar Rp4.700.000.000.000.

D.2.24. RDI/RPD

RDI/RPD sebesar Rp5,19 triliun

Merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk BUMN/BUMD, melalui RDI/RPD. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam TA 2008 sebesar Rp5.189.316.203.882 berasal dari penerusan pinjaman tahun berjalan dan tahun yang lalu. Jumlah tersebut lebih besar Rp2.465.959.145.094 atau 90,55 persen dibandingkan dengan TA 2007 sebesar Rp2.723.357.058.788.

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp39,56 triliun

Merupakan pengeluaran pemerintah akibat penyesuaian penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs dalam TA 2008 sebesar Rp39.559.934.705.513, lebih besar Rp30.789.841.440.080 atau 351,08 persen dibandingkan dengan TA 2007 sebesar Rp8.770.093.265.433.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran sebesar minus Rp28,17 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2008, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar minus Rp28.174.128.678.312, yang berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	(244.155.293.370)	231.158.227.155
Jumlah PFK Prefinancing (Neto)	(13.385.978.626.337)	(6.600.065.456.932)
Jumlah KU (Neto)	(9.716.396.322.032)	12.180.716.476.992
Jumlah Transito (Neto)	172.401.563.427	180.181.670.899
Penempatan	(5.000.000.000.000)	-
Arus Kas Bersih	**(28.174.128.678.312)**	**5.991.990.918.114**

D.2.26. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (neto) sebesar minus Rp244,15 milyar

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2008 sebesar minus Rp244.155.293.370 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya dan Non Anggaran Fihak Ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	10.876.021.944.240	8.482.562.797.450
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	5.959.579.031	16.360.855.195
Penerimaan PFK Beras BULOG	158.614.322.538	143.649.653.845
Penerimaan PFK 2 % Pemda	1.463.012.152.751	1.162.049.885.914
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	343.646.885	-
Penerimaan PFK Lain-lain	340.450.159.591	315.303.776.300
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	213.389.292.982	109.448.163.521
Jumlah Penerimaan PFK	**13.057.791.098.018**	**10.229.375.132.225**
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji	(11.181.895.504.354)	(8.330.308.353.490)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(4.175.286.849)	(2.694.436.070)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(154.143.899.301)	(142.855.184.242)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Pemda	(1.423.298.147.804)	(1.161.618.087.768)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(353.172.719.326)	(306.884.262.100)
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	(185.260.833.754)	(53.856.581.400)
Jumlah Pengeluaran PFK	(13.301.946.391.388)	(9.998.216.905.070)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	**(244.155.293.370)**	**231.158.227.155**

D.2.27. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya

PFK Prefinancing sebesar minus Rp13,38 triliun

PFK Prefinancing dan PFK Lainnya TA 2008 sebesar minus Rp13.385.978.626.337 merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa *prefinancing* (pembiayaan pendahuluan), penerimaan/pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan PFK Prefinancing:		
- Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya	-	47.234.437.407.112
- Penerimaan Dana Talangan dari Dana Moratorium	1.000.000.000.000	-
Jumlah Penerimaan PFK Prefinancing	**1.000.000.000.000**	**47.234.437.407.112**
Dikurangi:		
Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya:		
- Pengembalian Talangan Dana SAL	-	(43.524.692.376.612)
- Pembayaran kepada PPHLN karena Pengeluaran *In-eligible*	(727.175.050)	-
- Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong	(65.996.721.774)	(675.810.487.432)
- Pengisian Rekening Dana SAL	-	(4.200.000.000.000)
- Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong	-	(3.734.000.000.000)
- Pengembalian Dana Talangan ke Rekening SAL	(13.319.254.729.513)	-
- Pengembalian Dana Talangan ke Dana Moratorium	(1.000.000.000.000)	(1.700.000.000.000)
Jumlah Pembayaran PFK Prefinancing	**(14.385.978.626.337)**	**(53.834.502.864.044)**
Jumlah PFK Prefinancing (Neto)	**(13.385.978.626.337)**	**(6.600.065.456.932)**

D.2.28. Kiriman Uang

Kiriman Uang sebesar Rp9,72 triliun

Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan dan sebaliknya, Pemindahbukuan intern rekening BUN, pemindahbukuan intern KPPN, dan Wesel Pemerintah.

Dalam transaksi KU TA 2008 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan KU	579.985.787.982.268	792.025.749.470.191
Penerimaan KU Dalam Rangka TSA	443.632.666.104.179	264.375.670.591.303
Penerimaan KU Dalam Rangka Reksus	43.092.185.232	134.119.878.411
Penerimaan Pemindahbukuan	722.937.549.558.797	654.217.159.093.240
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	365.000	-
Penerimaan Wesel Pemerintah	324.000	214.819.615
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	30.566.111.100	11.814.644.752
Jumlah Penerimaan KU	**1.746.629.662.630.580**	**1.710.764.728.497.510**
Dikurangi:		
Pengeluaran KU	(578.748.039.350.181)	(752.021.972.817.002)
Pengeluaran KU Dalam Rangka TSA	(453.986.769.301.540)	(292.592.254.370.104)
Pengeluaran KU Dalam Rangka Reksus	(200.782.978.418)	(83.682.600.184)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(723.163.755.768.627)	(653.886.091.244.047)
Pelunasan Wesel Pemerintah	(324.000)	(2.611.200)
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(246.711.229.842)	(8.377.983)
Jumlah Pengeluaran KU	**(1.756.346.058.952.610)**	**(1.698.584.012.020.520)**
Jumlah KU (Neto)	**(9.716.396.322.032)**	**12.180.716.476.992**

D.2.29. Transito

Transito Rp172,40 milyar

Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2008 (*Audited*)	TA 2007 (*Audited*)
Penerimaan Transito	17.608.121.593.435	15.025.011.977.470
Pengeluaran Transito	(17.435.720.030.008)	(14.844.830.306.571)
Jumlah Transito (Neto)	**172.401.563.427**	**180.181.670.899**

D.2.30. Penempatan Dana Pemerintah

Penempatan Dana Pemerintah Rp5 triliun

Dalam rangka strategi manajemen kas untuk memanfaatkan kelebihan kas, maka Bendahara Umum Negara (BUN) dapat menempatkan kas pada bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku. Penempatan kas/uang negara pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUN dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan.

Penempatan Dana Pemerintah pada bank umum yang berasal dari kas BUN dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas TA 2008 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000. Selain itu, pada TA 2008, Penempatan Dana Pemerintah pada bank umum juga dilakukan melalui rekening pemerintah lainnya (Rekening SAL) sebesar Rp10.000.000.000.000. Penempatan Dana Pemerintah yang berasal dari rekening pemerintah lainnya tersebut tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas TA 2008.

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**894.990.546.173.000**	**981.609.433.326.137**	**109,68%**	**707.806.088.304.925**	**273.803.345.021.212**
41	**Penerimaan Perpajakan**	**609.227.490.000.000**	**658.700.790.664.236**	**108,12%**	**490.988.634.954.090**	**167.712.155.710.146**
411	**Pendapatan Pajak Dalam Negeri**	**580.248.290.000.000**	**622.358.691.313.241**	**107,26%**	**470.051.815.733.040**	**152.306.875.580.201**
4111	**Pendapatan Pajak Penghasilan**	**305.015.890.000.000**	**327.497.716.210.755**	**107,37%**	**238.430.926.067.905**	**89.066.790.142.850**
41111	**Pendapatan PPh Migas**	**53.649.890.000.000**	**77.018.903.127.805**	**143,56%**	**44.000.473.091.966**	**33.018.430.035.839**
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	25.665.050.000.000	29.634.966.041.552	115,47%	16.294.048.465.378	13.340.917.576.174
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	27.984.840.000.000	47.383.937.086.253	169,32%	27.259.183.973.681	20.124.753.112.572
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	-	-	447.240.652.907	(447.240.652.907)
41112	**Pendapatan PPh Non-Migas**	**251.366.000.000.000**	**249.837.362.107.152**	**99,39%**	**194.430.452.975.939**	**55.406.909.131.213**
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	39.500.500.000.000	51.709.584.474.271	130,91%	39.448.643.784.387	12.260.940.689.884
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	5.158.800.000.000	4.950.928.530.134	95,97%	3.977.621.367.742	973.307.162.392
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	21.567.300.000.000	25.061.597.326.045	116,20%	16.635.283.291.561	8.426.314.034.484
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	20.563.500.000.000	18.073.368.980.207	87,89%	15.724.471.057.254	2.348.897.922.953
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.954.800.000.000	3.608.085.804.988	122,11%	1.577.541.024.051	2.030.544.780.937
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	114.073.500.000.000	106.368.031.139.110	93,25%	80.829.125.945.461	25.538.905.193.649
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	19.087.800.000.000	14.880.319.679.351	77,96%	14.625.037.838.989	255.281.840.362
411128	Pendapatan PPh Final	28.459.800.000.000	25.162.612.348.008	88,41%	21.598.601.841.649	3.564.010.506.359
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	-	22.833.825.038	-	14.126.824.845	8.707.000.193
41113	**Pendapatan PPh Fiskal**	**-**	**641.450.975.798**	**-**	**-**	**641.450.975.798**
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	641.450.975.798	-	-	641.450.975.798
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai**	**195.464.000.000.000**	**209.647.424.433.640**	**107,26%**	**154.526.773.832.995**	**55.120.650.600.645**
41121	**Pendapatan PPN**	**-**	**198.171.290.191.562**	**-**	**147.440.052.123.972**	**50.731.238.067.590**
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	-	116.748.129.005.998	-	93.250.739.828.307	23.497.389.177.691
411212	Pendapatan PPN Impor	-	81.122.985.583.339	-	53.916.112.044.013	27.206.873.539.326
411219	Pendapatan PPN Lainnya	-	300.175.602.225	-	273.200.251.652	26.975.350.573
41122	**Pendapatan PPnBM**	**-**	**11.476.134.242.078**	**-**	**7.086.721.709.023**	**4.389.412.533.055**
411221	Pendapatan PPnBM dalam Negeri	-	7.512.177.808.538	-	4.650.928.817.095	2.861.248.991.443
411222	Pendapatan PPnBM Impor	-	3.951.503.214.532	-	2.414.414.459.186	1.537.088.755.346
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	-	12.453.219.008	-	21.378.432.742	(8.925.213.734)
4113	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**25.266.000.000.000**	**25.354.279.618.301**	**100,35%**	**23.723.546.008.858**	**1.630.733.609.443**
41131	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**25.266.000.000.000**	**25.354.279.618.301**	**100,35%**	**23.723.546.008.858**	**1.630.733.609.443**
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	1.426.127.033.997	-	1.727.077.097.787	(300.950.063.790)
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	4.970.599.840.866	-	4.864.149.278.212	106.450.562.654
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	-	617.640.514.160	-	402.743.010.373	214.897.503.787
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	-	155.806.089.441	-	127.468.299.103	28.337.790.338
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	-	18.161.293.908.705	-	16.572.300.701.292	1.588.993.207.413
411319	Pendapatan PBB Lainnya	-	22.812.231.132	-	29.807.622.091	(6.995.390.959)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
4114	**Pendapatan BPHTB**	**5.431.200.000.000**	**5.573.095.008.708**	**102,61%**	**5.953.378.541.995**	**(380.283.533.287)**
41141	**Pendapatan BPHTB**	-	**5.573.095.008.708**	-	**5.953.378.541.995**	**(380.283.533.287)**
411411	Pendapatan BPHTB	-	5.573.095.008.708	-	5.953.378.541.995	(380.283.533.287)
4115	**Pendapatan Cukai**	**45.717.500.000.000**	**51.251.752.624.651**	**112,11%**	**44.679.463.855.018**	**6.572.288.769.633**
41151	**Pendapatan Cukai**	**45.717.500.000.000**	**51.251.752.624.651**	**112,11%**	**44.679.463.855.018**	**6.572.288.769.633**
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	44.533.900.000.000	49.926.361.206.384	112,11%	43.524.867.297.735	6.401.493.908.649
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	451.900.000.000	420.655.726.793	93,09%	433.974.666.059	(13.318.939.266)
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkoho	731.700.000.000	878.524.341.908	120,07%	687.911.073.062	190.613.268.846
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	11.664.567.796	-	4.835.506.974	6.829.060.822
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	14.546.781.770	-	27.875.311.188	(13.328.529.418)
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**3.353.700.000.000**	**3.034.423.417.186**	**90,48%**	**2.737.727.426.269**	**296.695.990.917**
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	-	**2.831.464.995.921**	-	**2.620.026.551.479**	**211.438.444.442**
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	953.694.865.960	-	1.266.055.294.104	(312.360.428.144)
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	-	1.876.528.721.134	-	1.336.085.150.622	540.443.570.512
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	1.241.408.827	-	17.886.106.753	(16.644.697.926)
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**	-	**202.958.421.265**	-	**117.700.874.790**	**85.257.546.475**
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	139.912.417.040	-	84.368.751.933	55.543.665.107
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	62.912.525.736	-	32.673.927.294	30.238.598.442
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	58.962.447	-	386.049.001	(327.086.554)
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	74.516.042	-	272.146.562	(197.630.520)
412	**Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional**	**28.979.200.000.000**	**36.342.099.350.995**	**125,41%**	**20.936.819.221.050**	**15.405.280.129.945**
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**17.820.900.000.000**	**22.763.778.701.766**	**127,74%**	**16.699.443.059.175**	**6.064.335.642.591**
41211	**Pendapatan Bea Masuk**	**17.820.900.000.000**	**22.763.778.701.766**	**127,74%**	**16.699.443.059.175**	**6.064.335.642.591**
412111	Pendapatan Bea Masuk	17.820.900.000.000	22.341.742.521.621	125,37%	16.526.821.206.553	5.814.921.315.068
412112	Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil	-	910.079.236	-	850.721.549	59.357.687
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	662.021.390.304	-	391.447.018.601	270.574.371.703
412114	Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE	-	(271.416.637.071)	-	(235.420.587.568)	(35.996.049.503)
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Transaksi Non Kas	-	3.573.882.791	-	-	3.573.882.791
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	-	26.947.464.885	-	15.744.700.040	11.202.764.845
4122	**Pendapatan Pajak/pungutan ekspor**	**11.158.300.000.000**	**13.578.320.649.229**	**121,69%**	**4.237.376.161.875**	**9.340.944.487.354**
41221	**Pendapatan Pajak/pungutan ekspor**	-	**13.578.320.649.229**	-	**4.237.376.161.875**	**9.340.944.487.354**
412211	Pendapatan Pajak/pungutan ekspor	-	13.578.320.649.229	-	4.237.376.161.875	9.340.944.487.354
42	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**282.814.420.373.000**	**320.604.629.562.680**	**113,36%**	**215.119.705.411.332**	**105.484.924.151.348**
421	**Penerimaan Sumber Daya Alam**	**192.789.424.468.000**	**224.463.006.839.205**	**116,43%**	**132.883.472.731.250**	**91.579.534.107.955**
4211	**Pendapatan Minyak bumi**	**149.111.310.000.000**	**169.022.232.949.516**	**113,35%**	**93.604.459.694.458**	**75.417.773.255.058**
42111	**Pendapatan Minyak Bumi**	**149.111.310.000.000**	**169.022.232.949.516**	**113,35%**	**93.604.459.694.458**	**75.417.773.255.058**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
421111	Pendapatan Minyak Bumi	149.111.310.000.000	169.022.232.949.516	113,35%	93.604.459.694.458	75.417.773.255.058
4212	**Pendapatan Gas Bumi**	**33.835.550.000.000**	**42.594.738.596.246**	**125,89%**	**31.179.214.032.362**	**11.415.524.563.884**
42121	**Pendapatan Gas Bumi**	**33.835.550.000.000**	**42.594.738.596.246**	**125,89%**	**31.179.214.032.362**	**11.415.524.563.884**
421211	Pendapatan Gas Bumi	33.835.550.000.000	42.594.738.596.246	125,89%	31.179.214.032.362	11.415.524.563.884
4213	**Pendapatan Pertambangan Umum**	**6.867.814.468.000**	**9.511.320.109.439**	**138,49%**	**5.877.885.712.092**	**3.633.434.397.347**
42131	**Pendapatan Pertambangan Umum**	**6.867.814.468.000**	**9.511.320.109.439**	**138,49%**	**5.877.885.712.092**	**3.633.434.397.347**
421311	Pendapatan Iuran Tetap	83.040.373.000	102.989.603.994	124,02%	540.639.312.054	(437.649.708.060)
421312	Pendapatan Royalti	6.784.774.095.000	9.408.330.505.445	138,67%	5.337.246.400.038	4.071.084.105.407
4214	**Pendapatan Kehutanan**	**2.774.750.000.000**	**2.315.527.436.916**	**83,45%**	**2.105.668.217.682**	**209.859.219.234**
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**	**1.271.300.000.000**	**1.627.240.961.887**	**128,00%**	**1.367.864.042.187**	**259.376.919.700**
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.271.300.000.000	1.627.240.961.887	128,00%	1.367.864.042.187	259.376.919.700
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**	**1.498.700.000.000**	**620.093.635.129**	**41,38%**	**670.102.746.180**	**(50.009.111.051)**
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.498.700.000.000	620.093.635.129	41,38%	670.102.746.180	(50.009.111.051)
42143	**Pendapatan IIUPH (IHPH)**	**4.750.000.000**	**68.192.839.900**	**1435,64%**	**67.701.429.315**	**491.410.585**
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	-	-	-	-	-
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-	-	-	-	
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-	43.902.205.900	-	67.629.860.415	(23.727.654.515)
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	-	24.290.634.000	-	71.568.900	24.219.065.100
4215	**Pendapatan Perikanan**	**200.000.000.000**	**77.803.662.790**	**38,90%**	**116.245.074.656**	**(38.441.411.866)**
42151	**Pendapatan Perikanan**	**200.000.000.000**	**77.803.662.790**	**38,90%**	**116.245.074.656**	**(38.441.411.866)**
421511	Pendapatan Perikanan	200.000.000.000	77.803.662.790	38,90%	116.245.074.656	(38.441.411.866)
4216	**Pendapatan Pertambangan Panas Bumi**	**-**	**941.384.084.298**	**-**	**-**	**941.384.084.298**
42161	**Pendapatan Pertambangan Panas Bumi**	**-**	**941.384.084.298**	**-**	**-**	**941.384.084.298**
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	-	941.384.084.298	-	-	941.384.084.298
422	**Pendapatan Bagian Laba BUMN**	**31.244.300.000.000**	**29.088.370.115.749**	**93,10%**	**23.222.505.531.880**	**5.865.864.583.869**
4221	**Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN**	**31.244.300.000.000**	**29.088.370.115.749**	**93,10%**	**23.222.505.531.880**	**5.865.864.583.869**
42211	**Pendapatan Laba BUMN Perbankan**	**31.244.300.000.000**	**4.505.885.921.805**	**14,42%**	**3.304.642.991.498**	**1.201.242.930.307**
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	31.244.300.000.000	4.505.885.921.805	14,42%	3.304.642.991.498	1.201.242.930.307
42212	**Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan**	**-**	**24.582.484.193.944**	**-**	**19.917.862.540.382**	**4.664.621.653.562**
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	-	24.582.484.193.944	-	19.917.862.540.382	4.664.621.653.562
423	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**58.780.695.905.000**	**63.318.958.421.619**	**107,72%**	**56.882.490.879.936**	**6.436.467.541.683**
4231	**Pendapatan Penjualan dan Sewa**	**24.071.364.928.000**	**19.921.267.890.997**	**82,76%**	**13.123.934.653.902**	**6.797.333.237.095**
42311	**Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan**	**3.382.655.119.000**	**2.780.709.999.300**	**82,20%**	**4.148.228.101.298**	**(1.367.518.101.998)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	2.510.115.000	72.730.226.037	2897,49%	15.108.471.987	57.621.754.050
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	9.778.910.000	15.201.318.109	155,45%	14.512.480.737	688.837.372
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	3.353.221.253.000	2.459.077.361.193	73,33%	2.852.285.708.894	(393.208.347.701)
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	9.465.178.000	94.416.339.606	997,51%	118.960.590.185	(24.544.250.579)
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	231.911.000	970.254.116	418,37%	1.459.933.824	(489.679.708)
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	5.848.788.000	8.628.283.214	147,52%	5.654.304.739	2.973.978.475
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	234.603.000	4.229.780.960	1802,95%	5.925.594.007	(1.695.813.047)
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	-	109.454.726.466	-	1.126.389.171.093	(1.016.934.444.627)
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	1.364.361.000	16.001.709.599	1172,84%	7.931.845.832	8.069.863.767
42312	**Pendapatan Penjualan Aset**	**43.913.719.000**	**88.856.436.436**	**202,34%**	**82.193.749.036**	**6.662.687.400**
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah	721.529.000	2.508.711.855	347,69%	1.974.658.389	534.053.466
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	1.813.944.000	1.380.325.056	76,10%	1.265.464.239	114.860.817
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	30.026.309.000	50.342.104.439	167,66%	50.683.153.605	(341.049.166)
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing	10.000.000.000	2.523.973.328	25,24%	2.769.299.900	(245.326.572)
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	1.351.937.000	32.101.321.758	2374,47%	25.501.172.903	6.600.148.855
42313	**Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas**	**20.590.230.000.000**	**16.945.896.959.837**	**82,30%**	**8.831.615.131.904**	**8.114.281.827.933**
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	1.202.391.123.111	-	106.266.900.432	1.096.124.222.679
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	9.850.570.000.000	9.903.252.578.390	100,53%	8.624.500.074.720	1.278.752.503.670
423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas	10.739.660.000.000	5.840.253.258.336	54,38%	100.848.156.752	5.739.405.101.584
42314	**Pendapatan Sewa**	**54.566.090.000**	**105.804.495.424**	**193,90%**	**61.897.671.664**	**43.906.823.760**
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	15.394.614.000	31.882.409.624	207,10%	23.303.870.609	8.578.539.015
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	33.223.785.000	54.556.719.652	164,21%	30.783.526.905	23.773.192.747
423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	3.983.254.000	8.912.596.647	223,75%	2.661.672.986	6.250.923.661
423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	1.964.437.000	10.452.769.501	532,10%	5.148.601.164	5.304.168.337
4232	**Pendapatan Jasa**	**15.749.896.548.000**	**16.109.119.953.280**	**102,28%**	**11.285.134.857.855**	**4.823.985.095.425**
42321	**Pendapatan Jasa I**	**13.721.817.009.000**	**13.603.569.484.065**	**99,14%**	**8.890.313.542.013**	**4.713.255.942.052**
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	2.800.929.603.000	38.574.265.336	1,38%	145.719.523.512	(107.145.258.176)
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	30.172.066.000	13.107.170.346	43,44%	9.323.712.714	3.783.457.632
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB	2.571.036.960.000	2.428.579.050.760	94,46%	2.236.077.586.999	192.501.463.761
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	5.627.087.851.000	7.208.795.673.451	128,11%	4.313.477.218.034	2.895.318.455.417
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	51.302.889.000	102.514.037.264	199,82%	102.415.726.295	98.310.969
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	2.064.115.895.000	3.327.319.727.112	161,20%	1.624.941.870.246	1.702.377.856.866
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	68.849.760.000	65.168.097.661	94,65%	56.356.444.777	8.811.652.884
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian	505.864.300.000	419.511.462.135	82,93%	402.001.459.436	17.510.002.699
42322	**Pendapatan Jasa II**	**2.028.079.539.000**	**1.542.435.111.832**	**76,05%**	**1.756.568.021.754**	**(214.132.909.922)**
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	39.923.001.000	451.625.841.527	1131,24%	680.590.318.369	(228.964.476.842)
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.069.340.072.000	961.535.461.835	89,92%	970.390.895.744	(8.855.433.909)
423223	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin	-	44.623.512	-	57.544.198	(12.920.686)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil	-	1.130.000	-	1.204.690	(74.690)
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	3.328.140.000	1.092.288.075	32,82%	2.789.911.302	(1.697.623.227)
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	-	889.901.406	-	7.480.366.186	(6.590.464.780)
423227	Pendapatan Bea Lelang	31.384.307.000	60.441.683.548	192,59%	56.525.794.490	3.915.889.058
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	42.269.350.000	64.145.086.150	151,75%	38.731.986.775	25.413.099.375
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	2.500.000.000	2.659.095.779	106,36%	-	2.659.095.779
42323	**Pendapatan Jasa Luar Negeri**	-	**337.097.503.805**	-	**254.407.935.947**	**82.689.567.858**
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	-	123.342.603.416	-	78.334.012.493	45.008.590.923
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	-	71.115.453.835	-	175.665.634.297	(104.550.180.462)
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	-	142.639.446.554	-	408.289.157	142.231.157.397
42324	**Pendapatan Layanan Jasa Perbankan**	-	**2.779.997.726**	-	-	**2.779.997.726**
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	2.779.997.726	-	-	2.779.997.726
42325	**Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara**		**353.540.863.222**			353.540.863.222
423251	Pendapatan atas Penerbitan SP2D dalam Rangka TSA		57.336.780		-	57.336.780
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum		353.483.526.442		-	353.483.526.442
42329	**Pendapatan Jasa Lainnya**	-	**269.696.992.630**	-	**383.845.358.141**	**(114.148.365.511)**
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	-	269.696.992.630	-	383.845.358.141	(114.148.365.511)
4233	**Pendapatan Bunga**	**1.342.531.103.000**	**498.956.999.716**	**37,17%**	**687.536.633.569**	**(188.579.633.853)**
42331	**Pendapatan Bunga**	**1.342.531.103.000**	**206.222.008.716**	**15,36%**	**47.954.230.569**	**158.267.778.147**
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	-	16.566.929.789	-	15.214.651	16.551.715.138
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	-	140.900.000	-	555.000	140.345.000
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	-	2.276.442.820	-	94.020	2.276.348.800
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	1.342.531.103.000	187.237.736.107	13,95%	47.938.366.898	139.299.369.209
42332	**Pendapatan Gain on Bond Redemption**	-	**214.711.500.000**	-	**283.000.000**	**214.428.500.000**
423321	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang	-	214.711.500.000	-	283.000.000	214.428.500.000
42333	**Pendapatan Premium atas Obligasi Negara**	-	**78.023.491.000**	-	**639.299.403.000**	**(561.275.912.000)**
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	-	71.082.991.000	-	639.299.326.000	(568.216.335.000)
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	-	6.940.500.000	-	77.000	6.940.423.000
4234	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan**	**33.766.987.000**	**483.533.775.811**	**1431,97%**	**78.312.985.638**	**405.220.790.173**
42341	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan**	**33.766.987.000**	**483.533.775.811**	**1431,97%**	**78.312.985.638**	**405.220.790.173**
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	1.163.642.000	2.412.366.061	207,31%	264.371.791	2.147.994.270
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	275.505.000	565.994.426	205,44%	56.091.300	509.903.126
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	676.830.000	184.669.773.085	27284,51%	779.822.156	183.889.950.929
423414	Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya	20.834.900.000	284.366.272.846	1364,86%	68.983.111.866	215.383.160.980
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	9.303.210.000	5.395.982.185	58,00%	3.314.504.078	2.081.478.107

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	1.512.900.000	6.123.387.208	404,75%	4.915.084.447	1.208.302.761
4235	**Pendapatan Pendidikan**	**4.599.509.370.000**	**4.144.460.220.207**	**90,11%**	**3.326.172.118.270**	**818.288.101.937**
42351	**Pendapatan Pendidikan**	**4.599.509.370.000**	**4.144.460.220.207**	**90,11%**	**3.326.172.118.270**	**818.288.101.937**
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	4.027.998.545.000	3.198.115.398.229	79,40%	2.989.157.192.006	208.958.206.223
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	23.543.285.000	115.183.185.827	489,24%	45.163.557.441	70.019.628.386
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	25.227.186.000	15.979.324.092	63,34%	5.488.785.750	10.490.538.342
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	522.740.354.000	815.182.312.059	155,94%	286.362.583.073	528.819.728.986
4236	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**26.500.000.000**	**581.543.822.550**	**2194,50%**	**47.324.054.456**	**534.219.768.094**
42361	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**26.500.000.000**	**581.543.822.550**	**2194,50%**	**47.324.054.456**	**534.219.768.094**
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	25.000.000.000	8.574.884.306	34,30%	20.195.887.635	(11.621.003.329)
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	1.500.000.000	3.467.031.957	231,14%	26.880.054.157	(23.413.022.200)
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	-	419.077.597	-	300.000	418.777.597
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	-	568.898.263.690	-	247.812.664	568.650.451.026
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	184.565.000		-	184.565.000
4237	**Pendapatan Iuran dan Denda**	**446.178.470.000**	**648.294.535.990**	**145,30%**	**481.944.964.131**	**166.349.571.859**
42371	**Pendapatan Iuran Badan Usaha**	**429.900.830.000**	**520.885.793.482**	**121,16%**	**411.528.970.918**	**109.356.822.564**
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	329.842.200.000	310.538.437.742	94,15%	358.751.267.427	(48.212.829.685)
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	-	140.419.119.987	-	14.974.384.638	125.444.735.349
423713	Iuran Badan Usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	-	69.928.235.753	-	37.803.318.853	32.124.916.900
42372	**Pendapatan Dana Pengamanan Hutan**	**-**	**1.194.124.860**	**-**	**392.578.194**	**801.546.666**
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	1.194.124.860	-	392.578.194	801.546.666
42373	**Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**	**-**	**7.943.951.068**	**-**	**6.741.108.950**	**1.202.842.118**
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati	-	3.188.725.028	-	3.987.797.936	(799.072.908)
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	-	-	-	-	-
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB	-	-	-	-	-
423734	Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)	-	-	-	-	-
423735	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam	-	4.747.987.300	-	2.753.311.014	1.994.676.286
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA	-	7.238.740	-	-	7.238.740
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)	-	-	-	-	-
42374	**Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan**	**-**	**10.000.000**	**-**	**14.460.715**	**(4.460.715)**
423741	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	10.000.000	-	14.460.715	(4.460.715)
42375	**Pendapatan Denda**	**16.277.640.000**	**118.260.666.580**	**726,52%**	**63.267.845.354**	**54.992.821.226**
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	-	3.528.870.092	-	1.960.722.005	1.568.148.087
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.739.322.000	92.071.632.191	2462,25%	42.061.163.240	50.010.468.951
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	38.318.000	33.363.387	87,07%	820.967.832	(787.604.445)
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	12.500.000.000	16.165.724.829	129,33%	15.909.992.277	255.732.552

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	-	6.095.998.000	-	2.515.000.000	3.580.998.000
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TS/	-	76.729.376	-	-	76.729.376
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesi	-	279.908.676	-		279.908.676
423759	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Penyetoran Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Perseps	-	8.440.029	-		8.440.029
4239	**Pendapatan Lain-lain**	**12.510.948.499.000**	**20.931.781.223.068**	**167,31%**	**27.852.130.612.115**	**(6.920.349.389.047)**
42391	**Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu**	**52.591.456.000**	**5.797.305.787.573**	**11023,28%**	**1.006.652.732.884**	**4.790.653.054.689**
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	983.648.000	82.574.451.401	8394,72%	37.514.365.807	45.060.085.594
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	-	135.763.338.037	-	79.976.083.317	55.787.254.720
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	51.603.178.000	5.215.740.831.030	10107,40%	882.351.906.000	4.333.388.925.030
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL	4.630.000	12.579.430.008	271693,95%	3.481.361.332	9.098.068.676
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	-	4.984.240.853	-	1.612.577.353	3.371.663.500
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	-	2.149.226.843	-	1.716.439.075	432.787.768
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	343.514.269.401	-	-	343.514.269.401
						-
42392	**Pendapatan Pelunasan Piutang**	**8.331.411.555.000**	**8.252.846.640.991**	**99,06%**	**7.886.331.574.258**	**366.515.066.733**
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	8.328.980.000.000	8.230.209.596.779	98,81%	7.865.988.974.966	364.220.621.813
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	2.431.555.000	22.637.044.212	930,97%	20.342.599.292	2.294.444.920
						-
42393	**Pendapatan dari Penutupan Rekening**	**-**	**1.968.682.102.559**	**-**	**297.709.370.509**	**1.670.972.732.050**
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.968.682.102.559	-	297.709.370.509	1.670.972.732.050
						-
42399	**Pendapatan Lain-lain**	**4.125.513.495.000**	**4.912.946.691.945**	**119,09%**	**18.661.436.934.464**	**(13.748.490.242.519)**
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.066.213.000	7.474.985.857	361,77%	7.578.434.980	(103.449.123)
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	-	2.132.069.017	-	470.761.800	1.661.307.217
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)	2.083.653.223.000	1.874.696.879.092	89,97%	3.878.520.930.816	(2.003.824.051.724)
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah	-	-	-	1.214.034.057	(1.214.034.057)
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	-	-	13.669.328.115.429	(13.669.328.115.429)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.660.384.116.000	3.028.642.757.979	182,41%	1.104.324.657.382	1.924.318.100.597
						-
424	**Pendapatan Badan Layanan Umum**	**-**	**3.734.294.186.107**	**-**	**2.131.236.268.266**	**1.603.057.917.841**
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**-**	**3.479.603.274.201**	**-**	**2.131.236.268.266**	**1.348.367.005.935**
42411	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat**	**-**	**3.285.835.260.462**	**-**	**2.019.622.198.247**	**1.266.213.062.215**
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	-	2.648.187.574.801	-	1.976.405.530.760	671.782.044.041
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	53.652.433.405	-	15.247.309.380	38.405.124.025
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,Informasi,Pelatihan dan Tehnolog	-	42.762.871.371	-	12.105.531.885	30.657.339.486
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	-	-	-	-	-
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasiar	-	-	-	4.553.129.138	(4.553.129.138)
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	-	506.614.169.219	-	-	506.614.169.219
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	-	374.993.594	-	11.310.697.084	(10.935.703.490)
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	-	-	-	-	-
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	34.243.218.072	-	-	34.243.218.072
						-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	-	22.747.189.112	-	-	22.747.189.112
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	-	-	-	-	-
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	-	-	-	-	-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	-	22.747.189.112	-	-	22.747.189.112
						-
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	-	171.020.824.627	-	111.614.070.019	59.406.754.608
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	-	-	-	12.740.174.409	(12.740.174.409)
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	-	364.807.210	-	-	364.807.210
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	-	78.468.800	-	-	78.468.800
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	-	21.723.767	-	-	21.723.767
424136	Pendapatan Investasi	-	158.849.043.676	-	98.873.895.610	59.975.148.066
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	-	11.706.781.174	-	-	11.706.781.174
						-
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-
42421	Pendapatan Hibah Terikat	-	-	-	-	-
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan	-	-	-	-	-
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda	-	-	-	-	-
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan	-	-	-	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara	-	-	-	-	-
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	-	-	-	-	-
						-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	-	-	-	-	-
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan	-	-	-	-	-
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	-	-	-	-	-
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan	-	-	-	-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara	-	-	-	-	-
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya	-	-	-	-	-
						-
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	165.335.270.375	-	-	165.335.270.375
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	165.335.270.375	-	-	165.335.270.375
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	-	-	-	-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	165.335.270.375	-	-	165.335.270.375
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
						-
4249	Pendapatan BLU Lainnya		89.355.641.531		-	89.355.641.531
42491	Pendapatan BLU Lainnya		89.355.641.531		-	89.355.641.531
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		89.355.641.531		-	89.355.641.531

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI TA 2008	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI TA 2007	KENAIKAN (PENURUNAN)
						-
43	**Penerimaan Hibah**	**2.948.635.800.000**	**2.304.013.099.221**	**78,14%**	**1.697.747.939.503**	**606.265.159.718**
431	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri**	-	**2.304.013.099.221**	-	**1.697.747.939.503**	**606.265.159.718**
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	-	**18.010.359.266**	-	**344.529.058**	**17.665.830.208**
43111	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	-	**18.010.359.266**	-	**344.529.058**	**17.665.830.208**
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan	-	430.000	-	33.481.000	(33.051.000)
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	-	15.361.000	-	273.181.058	(257.820.058)
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya	-	17.994.568.266	-	37.867.000	17.956.701.266
						-
4312	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**	-	**2.286.002.739.955**	-	**1.697.403.410.445**	**588.599.329.510**
43121	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**	-	**2.286.002.739.955**	-	**1.697.403.410.445**	**588.599.329.510**
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan	-	3.741.828.840	-	-	3.741.828.840
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	-	256.463.093.220	-	251.067.417.683	5.395.675.537
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	-	2.020.207.941.290	-	1.445.596.798.554	574.611.142.736
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	-	5.589.876.605	-	739.194.208	4.850.682.397

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2008	2007
I. PERBANKAN	**4.505.885.921.805**	**3.304.642.991.497**
1. PT Bank Mandiri	2.619.540.000.000	980.280.000.000
2. PT Bank Negara Indonesia	342.894.820.863	954.372.418.750
3. PT Bank Rakyat Indonesia	1.374.380.000.000	1.211.280.000.000
4. PT Bank Tabungan Negara	23.597.611.237	36.467.430.976
5. PT Bank Ekspor Indonesia	111.359.218.604	98.488.916.764
6. PT Bank Bukopin	34.114.271.101	23.754.225.007
7. Bank Indonesia	0	0
II. ASURANSI	**153.168.230.000**	**451.519.041.526**
1. PT Asuransi Jiwasraya	0	7.902.356.550
2. PT Jasindo	13.400.000.000	13.838.370.600
3. PT Askes	0	59.911.259.480
4. PT Jamsostek	0	216.875.177.296
5. PT ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia)	4.336.000.000	4.136.808.000
6. PT Asuransi Jasa Raharja	128.858.000.000	137.068.207.000
7. PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia)	6.574.230.000	11.786.862.600
III. PEMBIAYAAN	**152.860.000.000**	**119.619.443.049**
1. PT PNM (Permodalan Nasional Madani)	0	7.848.369.596
2. Perum Pegadaian	147.000.000.000	105.055.000.000
3. Perum SPU (Sarana Pengembangan Usaha)	5.860.000.000	6.716.073.453
IV. JASA KONSTRUKSI	**51.993.179.999**	**31.752.223.296**
1. PT Adhi Karya	13.576.253.040	9.747.507.296
2. PT Waskita Karya	0	0
3. PT Hutama Karya	0	0
4. PT Nindya Karya	80.435.114	2.200.000.000
5. PT Pembangunan Perumahan	14.227.164.000	19.579.716.000
6. PT Wijaya Karya	23.884.327.845	0
7. PT Virama Karya	0	0
8. PT Yodya Karya	225.000.000	225.000.000
V. PENUNJANG KONSTRUKSI	**68.115.600.000**	**25.000.000.000**
1. PT Jasa Marga	68.115.600.000	25.000.000.000
VI. JASA PENILAI	**17.478.228.200**	**10.168.302.857**
1. PT Surveyor Indonesia	2.827.860.000	4.679.419.307
2. PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)	2.580.368.200	2.000.000.000
3. PT. SUCOFINDO	12.070.000.000	3.488.883.550
VII. JASA LAINNYA	**69.136.280.493**	**149.642.001.295**
1. Perum Jasa Tirta I	0	813.180.000
2. Perum Jasa Tirta II	0	2.605.750.000
3. PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset)	69.136.280.493	146.223.071.295
VIII. PELABUHAN	**646.981.232.000**	**426.691.363.937**
1. PT Pelabuhan Indonesia I	42.592.000.000	37.211.348.810
2. PT Pelabuhan Indonesia II	383.440.000.000	274.486.082.851
3. PT Pelabuhan Indonesia III	204.892.000.000	107.600.000.000
4. PT Pelabuhan Indonesia IV	16.057.232.000	7.393.932.276

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2008	2007
IX. KEBANDARUDARAAN	**206.388.000.000**	**180.190.793.250**
1. PT Angkasa Pura I	81.741.000.000	71.434.553.250
2. PT Angkasa Pura II	124.647.000.000	108.756.240.000
X. LOGISTIK	**1.733.150.000**	**823.525.324**
1. PT BGR (Bhanda Ghara Reksa)	1.733.150.000	823.525.324
XI. JASA PERDAGANGAN	**1.200.000.000**	**896.000.000**
1. PT Sarinah	1.200.000.000	896.000.000
XII. INDUSTRI FARMASI	**14.095.094.170**	**23.005.240.691**
1. PT Kimia Farma	14.095.094.170	14.407.494.000
2. PT Bio Farma	0	8.597.746.691
XIII. PARIWISATA	**9.944.315.462**	**7.226.598.986**
1. PT Pengembangan Pariwisata Bali	9.944.315.462	7.226.598.986
2. PT TWC Borobudur	0	0
XIV. KAWASAN INDUSTRI	**5.414.257.761**	**7.014.860.663**
1. PT Kawasan Berikat Nusantara	3.906.603.194	6.373.836.899
2. PT Kawasan Industri Makasar	414.600.000	0
3. PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	141.324.567	90.742.198
4. PT Kawasan Industri Medan	780.000.000	550.281.567
5. PT PDI Pengembangan Pulau Batam	171.730.000	0
XV. DOK DAN PERKAPALAN	**0**	**0**
1. PT PAL Indonesia	0	0
XVI. PERKEBUNAN	**541.981.722.353**	**271.433.042.993**
1. Perkebunan Nusantara III	175.486.952.000	72.622.526.000
2. Perkebunan Nusantara IV	138.093.838.717	43.120.790.936
3. Perkebunan Nusantara V	61.294.320.350	24.152.396.982
4. Perkebunan Nusantara VI	10.285.004.582	3.401.468.124
5. Perkebunan Nusantara VII	64.489.074.536	44.439.401.899
6. Perkebunan Nusantara VIII	17.864.675.468	15.499.354.920
7. Perkebunan Nusantara IX	3.042.400.700	0
8. Perkebunan Nusantara X	18.038.489.000	29.026.586.000
9. Perkebunan Nusantara XI	7.647.595.000	24.880.612.609
10. Perkebunan Nusantara XII	10.340.456.000	10.508.744.023
11. Perkebunan Nusantara XIII	35.398.916.000	3.781.161.500
XVII. PERTANIAN	**2.036.962.844**	**919.938.000**
1. PT Sang Hyang Seri	2.036.962.844	919.938.000
XVIII. PUPUK	**479.674.603.174**	**138.015.000.000**
1. PT Pupuk Sriwidjaya	376.500.000.000	138.015.000.000
2. PT ASEAN Bintulu Fertilizer	103.174.603.174	0
XIX. PERCETAKAN & PENERBITAN	**16.135.301.596**	**67.135.301.596**
1. Perum Peruri	16.135.301.596	67.135.301.596
2. Perum Percetakan Negara RI	0	0

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2008	2007
XX. PERTAMBANGAN	**2.161.575.467.464**	**471.369.992.846**
1. PT Aneka Tambang	1.334.439.715.180	403.722.099.820
2. PT Timah	579.992.400.000	67.647.893.026
2. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	247.143.352.284	0
XXI. ENERGI	**429.126.020.233**	**680.463.650.569**
1. Perusahaan Gas Negara	429.126.020.233	522.572.331.927
2. PT Bukit Asam	0	157.891.318.642
XXII. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	**0**	**3.550.073.000**
1. PT Industri Telekomunikasi Indonesia	0	3.450.073.000
2. PT Batan Teknologi	0	0
2. PT LEN Industri	0	100.000.000
XXIII. BAJA & KONSTRUKSI BAJA	**96.024.840.000**	**0**
1. PT Krakatau Steel	96.024.840.000	0
XXIV. TELEKOMUNIKASI	**4.206.500.016.562**	**3.129.218.322.232**
1. PT Telkom	4.206.500.016.562	3.129.218.322.232
XXV. INDUSTRI PERTAHANAN	**4.967.706.664**	**4.444.000.000**
1. PT Dahana	4.967.706.664	4.444.000.000
XXVI. SEMEN	**462.382.261.960**	**339.776.243.260**
1. PT Semen Gresik	452.782.261.960	330.392.487.636
2. PT Semen Baturaja	9.600.000.000	9.383.755.624
XXVII. USAHA ANEKA INDUSTRI	**7.333.551.271**	**10.207.455.625**
1. PT Garam	0	0
2. PT. Rajawali Nusantara Indonesia	7.333.551.271	10.207.455.625
XXVIII. BUMN DENGAN SAHAM MINORITAS	**662.223.289.990**	**2.105.459.836.657**
1. PT Bank Bukopin	0	0
2. PT Asuransi Kredit Indonesia	0	0
3. PT Rekayasa Industri	290.397.140	250.000.000
4. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	3.554.354.650	3.281.675.032
5. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2.293.324.900	4.251.209.175
6. PT Socfin Indonesia	32.459.506.800	44.867.524.700
7. PT Indosat	145.927.837.500	100.767.093.750
8. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	0	0
9. PT Freeport Indonesia	477.697.869.000	1.952.042.334.000
XXIX. BUMN YANG BELUM TERIDENTIFIKASI	**8.082.002.000**	**134.156.154.476**
XXX. PERTAMINA	**14.105.932.879.749**	**11.127.533.000.000**
Jumlah Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	**29.088.370.115.749**	**23.221.874.397.626**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**195.409.188.000**	**159.253.891.268**	**129.390.339**	**159.124.500.929**	**(36.284.687.071)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	51.295.531.000	40.403.869.751	1.546.700	40.402.323.051	(10.893.207.949)
02	MAJELIS	144.113.657.000	118.850.021.517	127.843.639	118.722.177.878	(25.391.479.122)
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**1.653.922.098.000**	**1.290.940.095.995**	**7.557.698.312**	**1.283.382.397.683**	**(370.539.700.317)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	521.012.977.000	390.727.056.978	21.033.288	390.706.023.690	(130.306.953.310)
02	DEWAN	1.132.909.121.000	900.213.039.017	7.536.665.024	892.676.373.993	(240.232.747.007)
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**1.484.269.820.000**	**1.262.376.743.572**	**3.579.274.880**	**1.258.797.468.692**	**(225.472.351.308)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.248.224.352.000	1.069.029.447.171	2.940.597.215	1.066.088.849.956	(182.135.502.044)
02	B.P.K. PUSAT	236.045.468.000	193.347.296.401	638.677.665	192.708.618.736	(43.336.849.264)
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**5.808.673.090.000**	**4.002.299.912.880**	**1.145.681.329**	**4.001.154.231.551**	**(1.807.518.858.449)**
01	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG	2.635.413.041.000	2.332.056.045.999	931.150.181	2.331.124.895.818	(304.288.145.182)
02	KEPANITERAAN	165.794.307.000	63.382.814.261	122.797.186	63.260.017.075	(102.534.289.925)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	62.537.669.000	45.745.477.974	41.979.512	45.703.498.462	(16.834.170.538)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	38.929.226.000	37.268.652.065	8.250.733	37.260.401.332	(1.668.824.668)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN	35.097.197.000	30.446.088.328	4.027	30.446.084.301	(4.651.112.699)
06	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.750.509.228.000	1.418.697.731.458	33.088.876	1.418.664.642.582	(1.331.844.585.418)
07	BADAN DIKLAT LITBANG	98.219.686.000	54.595.792.306	7.568.151	54.588.224.155	(43.631.461.845)
08	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	22.172.736.000	20.107.310.489	842.663	20.106.467.826	(2.066.268.174)
006	**KEJAKSAAN AGUNG**	**1.840.712.038.000**	**1.622.475.697.371**	**488.943.687**	**1.621.986.753.684**	**(218.725.284.316)**
01	KEJAKSAAN AGUNG	1.840.712.038.000	1.622.475.697.371	488.943.687	1.621.986.753.684	(218.725.284.316)
007	**SEKRETARIAT NEGARA**	**1.412.312.481.000**	**1.106.440.424.560**	**829.611.466**	**1.105.610.813.094**	**(306.701.667.906)**
01	SEKRETARIAT NEGARA	682.818.770.000	533.275.606.986	385.181.705	532.890.425.281	(149.928.344.719)
02	SEKRETARIAT KABINET	41.535.000.000	25.624.304.368	-	25.624.304.368	(15.910.695.632)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	394.347.058.000	322.672.372.484	113.043.341	322.559.329.143	(71.787.728.857)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	184.162.500.000	127.423.406.327	146.142.500	127.277.263.827	(56.885.236.173)
05	SEKRETARIAT MILITER	20.133.000.000	18.213.319.901	-	18.213.319.901	(1.919.680.099)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	57.885.500.000	57.378.290.145	-	57.378.290.145	(507.209.855)
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	31.430.653.000	21.853.124.349	185.243.920	21.667.880.429	(9.762.772.571)
010	**DEPARTEMEN DALAM NEGERI**	**5.712.788.234.000**	**5.303.336.582.992**	**363.573.523**	**5.302.973.009.469**	**(409.815.224.531)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	321.970.263.000	288.808.419.900	165.491.583	288.642.928.317	(33.327.334.683)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	86.578.300.000	60.273.502.254	23.499.414	60.250.002.840	(26.328.297.160)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	120.057.458.000	106.704.258.242	40	106.704.258.202	(13.353.199.798)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	181.648.400.000	158.358.078.376	25.287	158.358.053.089	(23.290.346.911)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.070.389.840.000	4.021.984.317.990	75.043	4.021.984.242.947	(48.405.597.053)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	170.112.000.000	204.478.975.364	12.445.000	204.466.530.364	34.354.530.364
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	193.931.830.000	119.403.677.378	7.905	119.403.669.473	(74.528.160.527)
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	291.065.194.000	172.999.704.433	2.573.525	172.997.130.908	(118.068.063.092)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	127.707.547.000	40.597.400.455	2.665.784	40.594.734.671	(87.112.812.329)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	34.947.500.000	27.509.612.050	12.168.126	27.497.443.924	(7.450.056.076)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	114.379.902.000	102.218.636.550	144.621.816	102.074.014.734	(12.305.887.266)
011	**DEPARTEMEN LUAR NEGERI**	**5.055.016.911.000**	**3.710.522.852.089**	**3.553.747.172**	**3.706.969.104.917**	**(1.348.047.806.083)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.536.108.231.000	3.279.964.983.709	1.583.712.018	3.278.381.271.691	(1.257.726.959.309)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	27.085.021.000	23.715.657.889	346.494.813	23.369.163.076	(3.715.857.924)
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	24.914.974.000	20.765.873.137	241.286.974	20.524.586.163	(4.390.387.837)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	24.072.765.000	21.786.305.550	83.550.262	21.702.755.288	(2.370.009.712)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	271.745.752.000	232.762.252.903	375.700.844	232.386.552.059	(39.359.199.941)
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	54.810.912.000	40.111.716.683	239.242.249	39.872.474.434	(14.938.437.566)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	57.331.350.000	44.537.574.426	280.317.171	44.257.257.255	(13.074.092.745)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	27.556.107.000	20.285.639.620	143.287.890	20.142.351.730	(7.413.755.270)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	17.763.119.000	15.126.030.728	162.344.951	14.963.685.777	(2.799.433.223)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	13.628.680.000	11.466.817.444	97.810.000	11.369.007.444	(2.259.672.556)
012	**DEPARTEMEN PERTAHANAN**	**32.871.077.281.000**	**31.366.025.515.477**	**17.360.184.564**	**31.348.665.330.913**	**(1.522.411.950.087)**
01	DEPARTEMEN PERTAHANAN	5.562.866.945.000			-	(5.562.866.945.000)
21	MARKAS BESAR TNI	4.082.426.544.000			-	(4.082.426.544.000)
22	MARKAS BESAR TNI AD	15.349.385.189.000			-	(15.349.385.189.000)
23	MARKAS BESAR TNI AL	4.671.231.679.000			-	(4.671.231.679.000)
24	MARKAS BESAR TNI AU	3.205.166.924.000			-	(3.205.166.924.000)
013	**DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI**	**4.413.109.130.000**	**3.854.321.234.403**	**8.419.811.503**	**3.845.901.422.900**	**(567.207.707.100)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.478.327.164.000	3.144.719.496.205	6.699.349.664	3.138.020.146.541	(340.307.017.459)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	26.025.139.000	24.978.183.528	11.396	24.978.172.132	(1.046.966.868)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	44.004.623.000	33.219.395.894	2.083.400	33.217.312.494	(10.787.310.506)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	154.669.517.000	148.444.796.068	92.749.399	148.352.046.669	(6.317.470.331)
06	DITJEN IMIGRASI	473.442.656.000	298.141.311.997	587.550.239	297.553.761.758	(175.888.894.242)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	53.923.171.000	48.056.655.364	90.649.409	47.966.005.955	(5.957.165.045)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.831.340.000	24.684.541.812	447.264.169	24.237.277.643	(7.594.062.357)
09	DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	24.879.789.000	19.044.642.728	278.425	19.044.364.303	(5.835.424.697)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	45.045.237.000	39.201.263.464	23.559.002	39.177.704.462	(5.867.532.538)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	18.752.315.000	16.639.589.272	411.362	16.639.177.910	(2.113.137.090)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	62.208.179.000	57.191.358.071	475.905.038	56.715.453.033	(5.492.725.967)
015	**DEPARTEMEN KEUANGAN**	**14.950.325.258.000**	**12.073.380.801.334**	**22.282.525.860**	**12.051.098.275.474**	**(2.899.226.982.526)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	5.322.293.996.000	4.556.314.216.339	18.159.078.914	4.538.155.137.425	(784.138.858.575)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	70.158.366.000	56.002.161.407	385.503.885	55.616.657.522	(14.541.708.478)
03	DITJEN ANGGARAN	72.664.713.000	53.295.834.645	28.989.715	53.266.844.930	(19.397.868.070)
04	DITJEN PAJAK	4.504.740.255.000	4.114.036.224.874	796.297.189	4.113.239.927.685	(391.500.327.315)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.245.700.604.000	1.499.577.575.512	559.885.461	1.499.017.690.051	(746.682.913.949)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	237.447.887.000	66.325.402.925	96.094.245	66.229.308.680	(171.218.578.320)
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	74.841.751.000	55.870.607.988	182.810.600	55.687.797.388	(19.153.953.612)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.337.859.078.000	878.651.608.355	482.508.689	878.169.099.666	(459.689.978.334)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	563.997.570.000	425.099.839.957	1.272.875.383	423.826.964.574	(140.170.605.426)
10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	111.975.647.000	94.592.224.470	190.317.786	94.401.906.684	(17.573.740.316)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	220.750.042.000	199.450.006.087	84.140.687	199.365.865.400	(21.384.176.600)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	187.895.349.000	74.165.098.775	44.023.306	74.121.075.469	(113.774.273.531)
018	**DEPARTEMEN PERTANIAN**	**8.305.517.016.000**	**7.274.917.124.358**	**71.007.704.418**	**7.203.909.419.940**	**(1.101.607.596.060)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.490.145.082.000	1.374.251.108.545	7.584.993.181	1.366.666.115.364	(123.478.966.636)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	51.350.051.000	38.884.300.501	318.293.073	38.566.007.428	(12.784.043.572)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	1.099.995.242.000	975.942.793.646	258.843.192	975.683.950.454	(124.311.291.546)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	261.329.304.000	244.227.460.912	44.120.485	244.183.340.427	(17.145.963.573)
05	DITJEN PERKEBUNAN	445.854.825.000	399.167.888.542	280.804.853	398.887.083.689	(46.967.741.311)
06	DITJEN PETERNAKAN	755.598.220.000	614.984.186.069	235.703.475	614.748.482.594	(140.849.737.406)
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	662.582.040.000	596.537.966.869	17.075.545	596.520.891.324	(66.061.148.676)
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	1.015.308.845.000	869.159.610.159	1.015.147.002	868.144.463.157	(147.164.381.843)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	793.635.777.000	719.280.214.775	1.655.174.368	717.625.040.407	(76.010.736.593)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	940.433.111.000	801.158.989.369	496.552.970	800.662.436.399	(139.770.674.601)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	419.113.638.000	315.526.109.445	58.811.907.910	256.714.201.535	(162.399.436.465)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	370.170.881.000	325.796.495.526	289.088.364	325.507.407.162	(44.663.473.838)
019	**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN**	**1.800.390.822.000**	**1.415.757.976.930**	**946.245.461**	**1.414.811.731.469**	**(385.579.090.531)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	353.385.224.000	301.543.947.881	202.245.614	301.341.702.267	(52.043.521.733)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA	170.483.116.000	127.028.422.508	27.507.439	127.000.915.069	(43.482.200.931)
03	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN,TEKSTIL DAN ANEKA	439.943.347.000	275.208.993.217	228.813.901	274.980.179.316	(164.963.167.684)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	75.026.310.000	62.251.226.809	14.096.444	62.237.130.365	(12.789.179.635)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	384.760.079.000	317.315.925.477	325.917.100	316.990.008.377	(67.770.070.623)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	19.771.329.000	18.825.667.450	11.107.577	18.814.559.873	(956.769.127)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	357.021.417.000	313.583.793.588	136.557.386	313.447.236.202	(43.574.180.798)
020	**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**5.508.065.417.000**	**5.443.560.426.844**	**1.012.973.126**	**5.442.547.453.718**	**(65.517.963.282)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	856.831.467.000	594.226.209.882	20.075.923	594.206.133.959	(262.625.333.041)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	48.500.430.000	46.111.914.406	11.024.432	46.100.889.974	(2.399.540.026)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	282.165.689.000	219.865.530.051	14.190.763	219.851.339.288	(62.314.349.712)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	2.892.678.280.000	3.241.082.096.079	89.485.654	3.240.992.610.425	348.314.330.425
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	344.361.800.000	239.397.719.234	2.823.687	239.394.895.547	(104.966.904.453)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	408.613.980.000	358.706.217.747	257.283.779	358.448.933.968	(50.165.046.032)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	266.385.875.000	371.031.259.519	193.955.957	370.837.303.562	104.451.428.562
13	BADAN GEOLOGI	408.527.896.000	373.139.479.926	424.132.931	372.715.346.995	(35.812.549.005)
022	**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**	**15.298.892.083.000**	**13.479.572.495.938**	**2.425.123.393**	**13.477.147.372.545**	**(1.821.744.710.455)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	362.136.459.000	260.088.245.199	214.063.909	259.874.181.290	(102.262.277.710)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	57.812.020.000	50.851.818.266	902.563	50.850.915.703	(6.961.104.297)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.821.187.629.000	1.704.283.328.663	183.327.869	1.704.100.000.794	(117.087.628.206)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	4.463.126.731.000	4.132.986.881.717	782.495.347	4.132.204.386.370	(330.922.344.630)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	3.350.383.009.000	2.959.804.542.507	421.335.963	2.959.383.206.544	(390.999.802.456)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	3.428.989.212.000	2.847.214.976.732	323.011.652	2.846.891.965.080	(582.097.246.920)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	63.002.160.000	58.440.151.347	37.348.448	58.402.802.899	(4.599.357.101)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	1.162.006.939.000	930.745.293.192	249.173.145	930.496.120.047	(231.510.818.953)
13	BADAN SAR NASIONAL	590.247.924.000	535.157.258.315	213.464.497	534.943.793.818	(55.304.130.182)
023	**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**	**45.296.695.146.000**	**43.673.774.637.512**	**126.830.910.480**	**43.546.943.727.032**	**(1.749.751.418.968)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.279.105.234.000	1.244.332.912.622	420.905.427	1.243.912.007.195	(35.193.226.805)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	122.400.601.000	116.080.166.043	740.733.052	115.339.432.991	(7.061.168.009)
03	DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	20.445.915.058.000	20.467.558.244.856	15.198.389.718	20.452.359.855.138	6.444.797.138
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	13.665.783.023.000	12.674.670.869.192	74.223.509.838	12.600.447.359.354	(1.065.335.663.646)
05	DITJEN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	1.890.753.289.000	1.739.805.984.449	1.014.047.837	1.738.791.936.612	(151.961.352.388)
08	DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.870.693.241.000	6.483.598.916.603	9.230.592.406	6.474.368.324.197	(396.324.916.803)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.022.044.700.000	947.727.543.747	26.002.732.202	921.724.811.545	(100.319.888.455)
024	**DEPARTEMEN KESEHATAN**	**18.420.316.731.000**	**15.886.226.016.893**	**14.335.963.216**	**15.871.890.053.677**	**(2.548.426.677.323)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.833.230.253.000	2.099.701.876.918	5.834.347.993	2.093.867.528.925	(739.362.724.075)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	103.743.900.000	66.227.690.958	969.009.524	65.258.681.434	(38.485.218.566)
03	DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT	2.053.148.663.000	1.350.039.314.045	988.373.616	1.349.050.940.429	(704.097.722.571)
04	DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK	10.034.766.260.000	9.381.865.463.665	3.384.949.451	9.378.480.514.214	(656.285.745.786)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	823.276.357.000	692.816.002.278	709.432.903	692.106.569.375	(131.169.787.625)
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.033.473.607.000	1.003.625.395.630	66.876.930	1.003.558.518.700	(29.915.088.300)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	352.533.576.000	251.496.836.667	213.139.400	251.283.697.267	(101.249.878.733)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	1.186.144.115.000	1.040.453.436.732	2.169.833.399	1.038.283.603.333	(147.860.511.667)
025	**DEPARTEMEN AGAMA**	**15.989.619.003.000**	**14.884.726.438.413**	**10.035.421.572**	**14.874.691.016.841**	**(1.114.927.986.159)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	14.352.435.288.000	13.546.102.262.188	9.963.009.456	13.536.139.252.732	(816.296.035.268)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	61.409.660.000	56.824.754.259	1.871.450	56.822.882.809	(4.586.777.191)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	131.378.395.000	127.375.601.718	28.696.151	127.346.905.567	(4.031.489.433)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	969.321.377.000	737.719.083.568	31.609.135	737.687.474.433	(231.633.902.567)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	53.552.012.000	53.166.441.111	1.110.754	53.165.330.357	(386.681.643)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	42.918.329.000	41.833.471.553	1.198	41.833.470.355	(1.084.858.645)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	32.463.182.000	32.156.609.584	218.517	32.156.391.067	(306.790.933)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	25.266.112.000	23.669.157.738	8.336.584	23.660.821.154	(1.605.290.846)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	158.703.577.000	137.746.415.419	15.753	137.746.399.666	(20.957.177.334)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	162.171.071.000	128.132.641.275	552.574	128.132.088.701	(34.038.982.299)
026	**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**2.643.399.347.000**	**2.354.387.420.363**	**1.844.165.361**	**2.352.543.255.002**	**(290.856.091.998)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	238.821.628.000	245.920.518.992	171.996.897	245.748.522.095	6.926.894.095
02	INSPEKTORAT JENDERAL	33.301.980.000	31.725.465.918	3.067	31.725.462.851	(1.576.517.149)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	314.407.486.000	251.396.539.502	558.211.023	250.838.328.479	(63.569.157.521)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	99.280.000.000	91.431.244.809	270.494.810	91.160.749.999	(8.119.250.001)
06	DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	591.634.759.000	514.124.788.159	237.545.895	513.887.242.264	(77.747.516.736)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	580.199.006.000	539.391.752.179	39.357.317	539.352.394.862	(40.846.611.138)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	142.092.101.000	129.421.378.353	28.210.250	129.393.168.103	(12.698.932.897)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	50.665.703.000	47.752.537.936	873.806	47.751.664.130	(2.914.038.870)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	592.996.684.000	503.223.194.515	537.472.296	502.685.722.219	(90.310.961.781)
027	**DEPARTEMEN SOSIAL**	**3.462.504.069.000**	**3.216.501.493.962**	**2.975.025.586**	**3.213.526.468.376**	**(248.977.600.624)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	199.644.287.000	176.371.127.333	286.741.049	176.084.386.284	(23.559.900.716)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	15.708.799.000	14.399.145.903	-	14.399.145.903	(1.309.653.097)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	716.845.632.000	669.721.720.247	1.084.281.733	668.637.438.514	(48.208.193.486)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	676.452.937.000	640.316.032.653	810.567.853	639.505.464.800	(36.947.472.200)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.698.502.942.000	1.564.739.719.071	368.952.088	1.564.370.766.983	(134.132.175.017)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	155.349.472.000	150.953.748.755	424.482.863	150.529.265.892	(4.820.206.108)
029	**DEPARTEMEN KEHUTANAN**	**3.857.878.520.000**	**3.177.606.303.305**	**2.870.109.249**	**3.174.736.194.056**	**(683.142.325.944)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.098.068.141.000	1.756.939.711.987	365.568.347	1.756.574.143.640	(341.493.997.360)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.704.444.000	25.068.125.767	33.725.200	25.034.400.567	(3.670.043.433)
03	DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN	264.007.005.000	193.757.824.514	406.711.187	193.351.113.327	(70.655.891.673)
04	DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	281.123.803.000	238.072.721.282	345.849.289	237.726.871.993	(43.396.931.007)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	716.861.893.000	588.026.388.220	1.037.530.696	586.988.857.524	(129.873.035.476)
06	BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN	259.437.275.000	183.576.128.137	226.914.122	183.349.214.015	(76.088.060.985)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	209.675.959.000	192.165.403.398	453.810.408	191.711.592.990	(17.964.366.010)
032	**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.019.139.085.000**	**2.400.948.045.161**	**2.075.228.614**	**2.398.872.816.547**	**(620.266.268.453)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	327.648.693.000	299.413.807.165	446.814.178	298.966.992.987	(28.681.700.013)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	30.858.447.000	30.702.622.759	10.478.828	30.692.143.931	(166.303.069)
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	744.246.074.000	457.059.265.304	97.655.457	456.961.609.847	(287.284.464.153)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	523.300.222.000	423.119.743.637	603.455.321	422.516.288.316	(100.783.933.684)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	268.792.125.000	239.473.477.202	92.047.842	239.381.429.360	(29.410.695.640)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	215.074.210.000	180.869.330.708	344.308.981	180.525.021.727	(34.549.188.273)
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	536.213.686.000	465.750.105.892	187.968.750	465.562.137.142	(70.651.548.858)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	137.925.113.000	124.472.729.100	230.393.342	124.242.335.758	(13.682.777.242)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	235.080.515.000	180.086.963.394	62.105.915	180.024.857.479	(55.055.657.521)
033	**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**	**32.809.884.936.000**	**30.677.646.725.936**	**7.631.197.739**	**30.670.015.528.197**	**(2.139.869.407.803)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	485.907.562.000	399.998.323.373	79.724.882	399.918.598.491	(85.988.963.509)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	69.379.278.000	52.702.649.611	4.473.660.852	48.228.988.759	(21.150.289.241)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	287.537.450.000	277.632.144.210	43.843.974	277.588.300.236	(9.949.149.764)
04	DITJEN BINA MARGA	16.663.710.858.000	15.731.162.618.017	1.339.959.400	15.729.822.658.617	(933.888.199.383)
05	DITJEN CIPTA KARYA	6.059.992.052.000	5.869.378.789.317	289.243.366	5.869.089.545.951	(190.902.506.049)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	8.618.393.008.000	7.873.112.630.787	980.149.996	7.872.132.480.791	(746.260.527.209)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	345.018.765.000	257.237.777.972	338.960.375	256.898.817.597	(88.119.947.403)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	222.403.963.000	170.358.440.551	84.972.804	170.273.467.747	(52.130.495.253)
14	BADAN PENGELOLA JALAN TOL	30.310.000.000	22.566.321.283	682.090	22.565.639.193	(7.744.360.807)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
15	BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	27.232.000.000	23.497.030.815	-	23.497.030.815	(3.734.969.185)
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**202.075.072.000**	**176.334.903.673**	**38.485.366**	**176.296.418.307**	**(25.778.653.693)**
01	MENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	202.075.072.000	176.334.903.673	38.485.366	176.296.418.307	(25.778.653.693)
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**119.091.037.000**	**78.900.134.821**	**71.414.261**	**78.828.720.560**	**(40.262.316.440)**
01	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	119.091.037.000	78.900.134.821	71.414.261	78.828.720.560	(40.262.316.440)
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**146.646.163.000**	**87.063.131.343**	**8.594.140**	**87.054.537.203**	**(59.591.625.797)**
01	MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	146.646.163.000	87.063.131.343	8.594.140	87.054.537.203	(59.591.625.797)
040	**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**1.078.094.010.000**	**1.022.394.736.801**	**1.175.940.939**	**1.021.218.795.862**	**(56.875.214.138)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	205.784.260.000	184.960.011.131	8.819.729	184.951.191.402	(20.833.068.598)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	16.112.039.000	14.560.706.766	10.040	14.560.696.726	(1.551.342.274)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	126.248.350.000	122.846.192.143	70.178.522	122.776.013.621	(3.472.336.379)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	209.009.557.000	205.734.782.016	962.184.505	204.772.597.511	(4.236.959.489)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	117.070.693.000	105.102.257.458	26.700	105.102.230.758	(11.968.462.242)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	281.373.999.000	264.736.309.941	2.777.012	264.733.532.929	(16.640.466.071)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	122.495.112.000	124.454.477.346	131.944.431	124.322.532.915	1.827.420.915
041	**KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**186.933.221.000**	**148.300.549.275**	**6.266.002**	**148.294.283.273**	**(38.638.937.727)**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	186.933.221.000	148.300.549.275	6.266.002	148.294.283.273	(38.638.937.727)
042	**KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**	**465.956.796.000**	**451.292.302.658**	**110.924.548**	**451.181.378.110**	**(14.775.417.890)**
01	MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	465.956.796.000	451.292.302.658	110.924.548	451.181.378.110	(14.775.417.890)
043	**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**	**533.997.171.000**	**415.512.853.490**	**163.801.099**	**415.349.052.391**	**(118.648.118.609)**
01	MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	533.997.171.000	415.512.853.490	163.801.099	415.349.052.391	(118.648.118.609)
044	**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM**	**1.098.652.600.000**	**982.160.658.165**	**88.196.546**	**982.072.461.619**	**(116.580.138.381)**
01	MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.098.652.600.000	982.160.658.165	88.196.546	982.072.461.619	(116.580.138.381)
047	**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**192.581.708.000**	**123.923.025.548**	**1.018.779.006**	**122.904.246.542**	**(69.677.461.458)**
01	MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	192.581.708.000	123.923.025.548	1.018.779.006	122.904.246.542	(69.677.461.458)
048	**KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**	**136.727.645.000**	**93.514.146.894**	**206.070.992**	**93.308.075.902**	**(43.419.569.098)**
01	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	136.727.645.000	93.514.146.894	206.070.992	93.308.075.902	(43.419.569.098)
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**969.982.580.000**	**932.488.688.172**	**464.920.250**	**932.023.767.922**	**(37.958.812.078)**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	969.982.580.000	932.488.688.172	464.920.250	932.023.767.922	(37.958.812.078)
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**605.149.122.000**	**598.724.877.328**	**72.841.735**	**598.652.035.593**	**(6.497.086.407)**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	605.149.122.000	598.724.877.328	72.841.735	598.652.035.593	(6.497.086.407)
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**26.572.554.000**	**25.154.204.379**	**19.068.000**	**25.135.136.379**	**(1.437.417.621)**
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	26.572.554.000	25.154.204.379	19.068.000	25.135.136.379	(1.437.417.621)
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**1.426.102.603.000**	**1.318.625.708.230**	**437.228.122**	**1.318.188.480.108**	**(107.914.122.892)**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	1.426.102.603.000	1.318.625.708.230	437.228.122	1.318.188.480.108	(107.914.122.892)
055	**KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**	**392.464.506.000**	**312.382.174.065**	**72.100.000**	**312.310.074.065**	**(80.154.431.935)**
01	MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/BAPPENAS	392.464.506.000	312.382.174.065	72.100.000	312.310.074.065	(80.154.431.935)
056	**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**	**2.520.020.203.000**	**2.095.214.095.065**	**1.561.963.745**	**2.093.652.131.320**	**(426.368.071.680)**
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.520.020.203.000	2.095.214.095.065	1.561.963.745	2.093.652.131.320	(426.368.071.680)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**320.404.992.000**	**280.276.952.097**	**112.439.793**	**280.164.512.304**	**(40.240.479.696)**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	320.404.992.000	280.276.952.097	112.439.793	280.164.512.304	(40.240.479.696)
059	**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**2.128.925.297.000**	**998.307.622.500**	**2.263.022.081**	**996.044.600.419**	**(1.132.880.696.581)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	186.043.940.000	139.571.924.127	9.661.771	139.562.262.356	(46.481.677.644)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	26.247.100.000	20.426.631.127	22.642	20.426.608.485	(5.820.491.515)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	1.169.882.810.000	346.334.875.099	1.015.082.200	345.319.792.899	(824.563.017.101)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	191.040.000.000	93.529.215.659	1.190.907.944	92.338.307.715	(98.701.692.285)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	275.240.770.000	112.368.301.068	9.523.057	112.358.778.011	(162.881.991.989)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	183.992.677.000	217.267.585.858	36.827.054	217.230.758.804	33.238.081.804
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	96.478.000.000	68.809.089.562	997.413	68.808.092.149	(27.669.907.851)
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**21.205.465.007.000**	**21.109.366.560.069**	**9.406.767.876**	**21.099.959.792.193**	**(105.505.214.807)**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	21.205.465.007.000	21.109.366.560.069	9.406.767.876	21.099.959.792.193	(105.505.214.807)
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**638.413.965.000**	**546.801.372.570**	**641.895.408**	**546.159.477.162**	**(92.254.487.838)**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	638.413.965.000	546.801.372.570	641.895.408	546.159.477.162	(92.254.487.838)
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**184.294.930.000**	**144.521.619.440**	**55.317.806**	**144.466.301.634**	**(39.828.628.366)**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	184.294.930.000	144.521.619.440	55.317.806	144.466.301.634	(39.828.628.366)
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**383.302.662.000**	**309.386.722.729**	**1.246.298.673**	**308.140.424.056**	**(75.162.237.944)**
01	SEKRETARIAT UTAMA	182.790.178.000	147.022.033.905	1.064.723.273	145.957.310.632	(36.832.867.368)
02	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	42.153.449.000	27.766.363.089	55.764.700	27.710.598.389	(14.442.850.611)
03	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	115.894.622.000	97.901.887.711	125.810.700	97.776.077.011	(18.118.544.989)
04	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	15.202.199.000	12.298.604.047	-	12.298.604.047	(2.903.594.953)
88	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	10.548.963.000	8.865.870.511	-	8.865.870.511	(1.683.092.489)
06	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	11.313.251.000	10.335.259.996	-	10.335.259.996	(977.991.004)
07	DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	5.400.000.000	5.196.703.470	-	5.196.703.470	(203.296.530)
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**295.864.731.000**	**264.881.455.976**	**-**	**264.881.455.976**	**(30.983.275.024)**
01	PELAKSANA HARIAN BNN	295.864.731.000	264.881.455.976	-	264.881.455.976	(30.983.275.024)
067	**KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**922.540.539.000**	**918.757.915.998**	**392.608.884**	**918.365.307.114**	**(4.175.231.886)**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	354.611.439.000	383.137.654.178	47.730.884	383.089.923.294	28.478.484.294
02	DEPUTI I BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	43.850.000.000	42.398.073.440		42.398.073.440	(1.451.926.560)
03	DEPUTI II BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	289.515.300.000	284.346.482.967	342.810.000	284.003.672.967	(5.511.627.033)
04	DEPUTI III BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA	59.396.607.000	58.617.232.626		58.617.232.626	(779.374.374)
05	DEPUTI IV BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA	58.500.000.000	51.117.649.982		51.117.649.982	(7.382.350.018)
06	DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS	116.667.193.000	99.140.822.805	2.068.000	99.138.754.805	(17.528.438.195)
068	**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**1.196.603.382.000**	**1.156.348.888.494**	**394.193.447**	**1.155.954.695.047**	**(40.648.686.953)**
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.196.603.382.000	1.156.348.888.494	394.193.447	1.155.954.695.047	(40.648.686.953)
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**51.044.679.000**	**33.220.032.612**	**477.606.657**	**32.742.425.955**	**(18.302.253.045)**
01	KOMNASHAM	51.044.679.000	33.220.032.612	477.606.657	32.742.425.955	(18.302.253.045)
075	**BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**721.258.156.000**	**679.163.137.566**	**197.480.124**	**678.965.657.442**	**(42.292.498.558)**
01	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	721.258.156.000	679.163.137.566	197.480.124	678.965.657.442	(42.292.498.558)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**714.815.112.000**	**455.519.295.496**	**1.780.898.045**	**453.738.397.451**	**(261.076.714.549)**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	714.815.112.000	455.519.295.496	1.780.898.045	453.738.397.451	(261.076.714.549)
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**177.080.445.000**	**158.081.193.858**	**16.708.365**	**158.064.485.493**	**(19.015.959.507)**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	177.080.445.000	158.081.193.858	16.708.365	158.064.485.493	(19.015.959.507)
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**96.286.681.000**	**30.941.392.255**	**87.750.290**	**30.853.641.965**	**(65.433.039.035)**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	96.286.681.000	30.941.392.255	87.750.290	30.853.641.965	(65.433.039.035)
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**522.578.650.000**	**567.788.110.464**	**687.499.866**	**567.100.610.598**	**44.521.960.598**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	522.578.650.000	567.788.110.464	687.499.866	567.100.610.598	44.521.960.598
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**327.047.996.000**	**308.813.203.502**	**415.578.424**	**308.397.625.078**	**(18.650.370.922)**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	327.047.996.000	308.813.203.502	415.578.424	308.397.625.078	(18.650.370.922)
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**572.877.574.000**	**526.613.495.225**	**218.606.283**	**526.394.888.942**	**(46.482.685.058)**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	572.877.574.000	526.613.495.225	218.606.283	526.394.888.942	(46.482.685.058)
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**191.936.893.000**	**183.475.585.821**	**107.897.772**	**183.367.688.049**	**(8.569.204.951)**
01	L A P A N	191.936.893.000	183.475.585.821	107.897.772	183.367.688.049	(8.569.204.951)
083	**BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL**	**243.261.948.000**	**197.749.000.743**	**137.125.207**	**197.611.875.536**	**(45.650.072.464)**
01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	243.261.948.000	197.749.000.743	137.125.207	197.611.875.536	(45.650.072.464)
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**69.070.770.000**	**75.157.738.544**	**447.353.476**	**74.710.385.068**	**5.639.615.068**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	69.070.770.000	75.157.738.544	447.353.476	74.710.385.068	5.639.615.068
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**56.017.584.000**	**47.027.631.751**	**33.330.260**	**46.994.301.491**	**(9.023.282.509)**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	56.017.584.000	47.027.631.751	33.330.260	46.994.301.491	(9.023.282.509)
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**188.802.612.000**	**161.664.741.468**	**166.653.020**	**161.498.088.448**	**(27.304.523.552)**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	188.802.612.000	161.664.741.468	166.653.020	161.498.088.448	(27.304.523.552)
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**119.058.927.000**	**115.702.374.429**	**158.342.990**	**115.544.031.439**	**(3.514.895.561)**
01	ARSIP NASIONAL	119.058.927.000	115.702.374.429	158.342.990	115.544.031.439	(3.514.895.561)
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**401.174.548.000**	**296.527.514.381**	**385.441.106**	**296.142.073.275**	**(105.032.474.725)**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	401.174.548.000	296.527.514.381	385.441.106	296.142.073.275	(105.032.474.725)
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**594.346.042.000**	**548.130.778.407**	**1.171.075.273**	**546.959.703.134**	**(47.386.338.866)**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	594.346.042.000	548.130.778.407	1.171.075.273	546.959.703.134	(47.386.338.866)
090	**DEPARTEMEN PERDAGANGAN**	**1.410.248.432.000**	**1.146.366.656.883**	**1.887.711.756**	**1.144.478.945.127**	**(265.769.486.873)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	426.317.458.000	319.953.852.702	681.493.022	319.272.359.680	(107.045.098.320)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	397.334.835.000	327.535.195.490	44.000.816	327.491.194.674	(69.843.640.326)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	181.207.262.000	165.721.552.090	313.364.829	165.408.187.261	(15.799.074.739)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	80.500.000.000	71.582.339.323	675.248.761	70.907.090.562	(9.592.909.438)
05	INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	20.072.492.000	19.384.819.249	5.506.709	19.379.312.540	(693.179.460)
06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	199.793.968.000	158.115.166.273	27.749.655	158.087.416.618	(41.706.551.382)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	63.378.192.000	48.318.658.963	10.295.609	48.308.363.354	(15.069.828.646)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	41.644.225.000	35.755.072.793	130.052.355	35.625.020.438	(6.019.204.562)
091	**KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT**	**674.456.479.000**	**590.822.375.579**	**47.679.337**	**590.774.696.242**	**(83.681.782.758)**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	569.406.479.000	489.149.610.546	47.679.337	489.101.931.209	(80.304.547.791)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	DEPUTI PEMBIAYAAN	29.500.000.000	28.887.869.393		28.887.869.393	(612.130.607)
03	DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN	25.000.000.000	24.095.317.033		24.095.317.033	(904.682.967)
04	DEPUTI PERUMAHAN FORMAL	26.500.000.000	25.739.137.510		25.739.137.510	(760.862.490)
05	DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA	24.050.000.000	22.950.441.097		22.950.441.097	(1.099.558.903)
092	**KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**747.999.702.000**	**734.278.002.416**	**28.754.000**	**734.249.248.416**	**(13.750.453.584)**
01	MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	747.999.702.000	734.278.002.416	28.754.000	734.249.248.416	(13.750.453.584)
093	**KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI**	**237.774.402.000**	**204.711.940.294**	**413.363.782**	**204.298.576.512**	**(33.475.825.488)**
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	237.774.402.000	204.711.940.294	413.363.782	204.298.576.512	(33.475.825.488)
094	**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS**	**10.888.322.764.000**	**7.625.820.619.607**	**6.746.803.455**	**7.619.073.816.152**	**(3.269.248.947.848)**
01	BIDANG PENGAWASAN	26.510.362.000	28.578.875.192	284.135.072	28.294.740.120	1.784.378.120
02	BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	617.114.871.000	34.634.879.324	558.503.085	34.076.376.239	(583.038.494.761)
03	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA	255.836.255.000	248.610.019.748	821.315.726	247.788.704.022	(8.047.550.978)
04	BIDANG EKONOMI DAN USAHA	631.006.873.000	485.541.585.642	214.206.936	485.327.378.706	(145.679.494.294)
05	BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN	948.135.944.000	764.438.402.357	1.238.449.925	763.199.952.432	(184.935.991.568)
06	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.788.459.253.000	1.869.308.244.396	1.542.151.594	1.867.766.092.802	(920.693.160.198)
07	BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN	4.267.185.518.000	2.925.060.703.053	479.968.607	2.924.580.734.446	(1.342.604.783.554)
08	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	449.408.938.000	322.422.967.200	228.230.000	322.194.737.200	(127.214.200.800)
09	SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	423.003.829.000	378.239.766.346	804.853.984	377.434.912.362	(45.568.916.638)
10	BIDANG OPERASI	481.660.921.000	568.985.176.349	574.988.526	568.410.187.823	86.749.266.823
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**281.216.781.000**	**235.453.851.752**	**244.455.747**	**235.209.396.005**	**(46.007.384.995)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	55.254.091.000	36.053.207.128	19.030.547	36.034.176.581	(19.219.914.419)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	225.962.690.000	199.400.644.624	225.425.200	199.175.219.424	(26.787.470.576)
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**91.718.145.000**	**79.638.512.243**	**46.328.577**	**79.592.183.666**	**(12.125.961.334)**
01	KOMISI YUDISIAL RI	91.718.145.000	79.638.512.243	46.328.577	79.592.183.666	(12.125.961.334)
103	**BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA**	**111.266.062.000**	**94.672.911.784**	**200.218.784**	**94.472.693.000**	**(16.793.369.000)**
01	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	111.266.062.000	94.672.911.784	200.218.784	94.472.693.000	(16.793.369.000)
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**	**246.232.021.000**	**210.038.364.585**	**355.668.722**	**209.682.695.863**	**(36.549.325.137)**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	153.164.985.000	136.106.120.863	24.225.957	136.081.894.906	(17.083.090.094)
02	DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI	9.250.690.000	9.865.501.962	-	9.865.501.962	614.811.962
03	DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI	56.703.072.000	42.605.653.868	331.442.765	42.274.211.103	(14.428.860.897)
04	DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI	27.113.274.000	21.461.087.892	-	21.461.087.892	(5.652.186.108)
105	**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**	**1.100.000.000.000**	**513.710.234.176**	**674.255.000**	**513.035.979.176**	**(586.964.020.824)**
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.100.000.000.000	513.710.234.176	674.255.000	513.035.979.176	(586.964.020.824)
61	**CICILAN BUNGA UTANG**	**94.794.224.800.000**	**87.533.816.562.122**	**13.142.808.168**	**87.520.673.753.954**	**(7.273.551.046.046)**
62	**SUBSIDI DAN TRANSFER**	**234.404.983.694.000**	**275.296.948.521.829**	**5.494.347.900**	**275.291.454.173.929**	**40.886.470.479.929**
69	**BELANJA LAIN LAIN**	**77.849.124.491.000**	**70.980.318.564.276**	**138.313.029.571**	**70.842.005.534.705**	**(7.007.118.956.295)**
	Total	**697.071.006.590.000**	**693.859.806.501.404**	**503.814.421.526**	**693.355.992.079.878**	**(3.715.014.510.122)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	65.469.359.085	77.531.444.947	16.123.696.897	-	-	-	-	-	159.124.500.929
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	530.171.411.387	648.855.427.112	104.355.559.184	-	-	-	-	-	1.283.382.397.683
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	417.445.100.135	432.341.613.580	409.010.754.977	-	-	-	-	-	1.258.797.468.692
005	MAHKAMAH AGUNG	2.588.143.408.909	549.243.443.751	863.767.378.891	-	-	-	-	-	4.001.154.231.551
006	KEJAKSAAN AGUNG	831.214.603.608	455.777.565.118	334.994.584.958	-	-	-	-	-	1.621.986.753.684
007	SEKRETARIAT NEGARA	139.668.365.104	797.253.583.705	167.057.042.485	-	-	-	1.631.821.800	-	1.105.610.813.094
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	315.262.857.873	1.199.217.819.242	375.610.370.412	-	-	-	3.412.881.961.942	-	5.302.973.009.469
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.854.936.314.986	1.726.035.349.522	125.997.440.409	-	-	-	-	-	3.706.969.104.917
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	17.546.453.379.881	8.000.108.104.522	5.802.103.846.510	-	-	-	-	-	31.348.665.330.913
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.512.918.711.395	1.462.805.773.560	870.176.937.945	-	-	-	-	-	3.845.901.422.900
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	6.142.408.788.889	2.566.504.146.275	2.433.051.247.366	909.134.092.944	-	-	-	-	12.051.098.275.474
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	1.303.495.607.156	1.660.985.043.871	653.791.973.879	-	-	-	3.585.636.795.034	-	7.203.909.419.940
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	314.966.453.707	516.719.417.611	413.712.860.151	-	-	-	169.413.000.000	-	1.414.811.731.469
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	593.632.882.969	1.424.319.626.660	3.424.594.944.089	-	-	-	-	-	5.442.547.453.718
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.051.175.021.878	1.604.609.096.283	10.806.411.394.384	-	-	-	14.951.860.000	-	13.477.147.372.545
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	6.638.905.168.422	5.613.022.248.747	2.743.803.459.241	-	-	-	28.551.212.850.622	-	43.546.943.727.032
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	2.493.386.732.694	4.694.414.626.032	3.049.175.110.118	-	-	-	5.634.913.584.833	-	15.871.890.053.677
025	DEPARTEMEN AGAMA	7.567.206.388.586	1.653.423.145.872	1.237.850.598.697	-	-	-	4.416.210.883.686	-	14.874.691.016.841
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	401.664.818.170	872.391.452.284	577.903.702.650	-	-	-	500.583.281.898	-	2.352.543.255.002
027	DEPARTEMEN SOSIAL	288.287.068.677	556.007.987.899	207.598.001.869	-	-	-	2.161.633.439.931	(30.000)	3.213.526.468.376
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	680.313.856.128	882.369.506.315	1.609.850.638.531	-	-	-	2.202.193.082	-	3.174.736.194.056
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	425.547.432.862	934.944.356.572	690.222.817.152	-	-	-	348.158.209.961	-	2.398.872.816.547
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	979.028.508.956	2.400.656.299.955	25.405.903.293.956	-	-	-	1.884.427.425.330	-	30.670.015.528.197
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	14.310.031.920	84.437.482.229	77.548.904.158	-	-	-	-	-	176.296.418.307
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	17.236.971.725	59.090.282.846	2.501.465.989	-	-	-	-	-	78.828.720.560
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.315.475.359	49.708.779.084	8.728.189.510	-	-	-	16.302.093.250	-	87.054.537.203
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	243.842.163.238	635.078.378.581	142.298.254.043	-	-	-	-	-	1.021.218.795.862
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	17.039.999.281	23.949.960.978	107.304.323.014	-	-	-	-	-	148.294.283.273
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	39.644.195.868	161.581.042.053	128.227.469.644	-	-	-	121.728.670.545	-	451.181.378.110
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	48.640.322.452	308.922.437.372	57.786.292.567	-	-	-	-	-	415.349.052.391
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	56.492.054.166	366.181.040.180	512.399.367.273	-	-	-	47.000.000.000	-	982.072.461.619
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	14.539.777.839	106.805.522.903	1.558.945.800	-	-	-	-	-	122.904.246.542
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	22.774.301.491	66.444.832.531	4.088.941.880	-	-	-	-	-	93.308.075.902
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	54.819.843.301	662.153.534.121	215.050.390.500	-	-	-	-	-	932.023.767.922
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	26.440.151.191	25.694.845.652	546.517.038.750	-	-	-	-	-	598.652.035.593
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.568.786.171	20.134.979.208	431.371.000	-	-	-	-	-	25.135.136.379
054	BADAN PUSAT STATISTIK	648.387.867.727	382.573.477.150	287.227.135.231	-	-	-	-	-	1.318.188.480.108
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	81.258.547.041	213.701.946.145	17.349.580.879	-	-	-	-	-	312.310.074.065
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	801.422.545.253	998.075.697.307	294.153.888.760	-	-	-	-	-	2.093.652.131.320
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	49.148.495.930	71.504.064.910	159.511.951.464	-	-	-	-	-	280.164.512.304
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	183.486.710.265	593.436.889.410	189.562.199.250	-	-	-	29.558.801.494	-	996.044.600.419
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	15.283.370.025.717	4.968.523.092.083	848.066.674.393	-	-	-	-	-	21.099.959.792.193
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137.179.215.005	159.596.866.768	249.383.395.389	-	-	-	-	-	546.159.477.162
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	43.829.367.684	41.982.973.215	54.253.960.735	-	-	-	4.400.000.000	-	144.466.301.634
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	33.182.344.408	201.662.186.413	73.295.893.235	-	-	-	-	-	308.140.424.056
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	11.515.236.080	134.104.912.596	119.261.307.300	-	-	-	-	-	264.881.455.976

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	14.553.296.999	177.562.869.277	1.868.438.820	-	-	-	724.380.702.018	-	918.365.307.114
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	178.483.150.881	902.239.728.003	50.601.816.163	-	-	-	24.630.000.000	-	1.155.954.695.047
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.468.391.334	17.213.033.361	2.061.001.260	-	-	-	-	-	32.742.425.955
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	144.867.289.453	168.347.665.190	365.750.702.799	-	-	-	-	-	678.965.657.442
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	201.704.248.806	223.900.656.322	28.133.492.323	-	-	-	-	-	453.738.397.451
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	7.748.435.327	71.088.082.114	79.227.968.052	-	-	-	-	-	158.064.485.493
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	12.951.526.854	13.308.421.249	4.593.693.862	-	-	-	-	-	30.853.641.965
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	203.752.322.442	219.950.147.821	143.398.140.335	-	-	-	-	-	567.100.610.598
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	176.578.781.012	95.613.023.105	36.205.820.961	-	-	-	-	-	308.397.625.078
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	190.219.325.387	193.983.117.703	142.192.445.852	-	-	-	-	-	526.394.888.942
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	83.257.644.258	76.267.761.571	23.842.282.220	-	-	-	-	-	183.367.688.049
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	56.016.172.363	61.904.936.303	79.690.766.870	-	-	-	-	-	197.611.875.536
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.969.291.065	60.939.881.443	3.801.212.560	-	-	-	-	-	74.710.385.068
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	21.522.352.338	22.731.985.574	2.739.963.579	-	-	-	-	-	46.994.301.491
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	53.595.469.642	72.385.364.245	35.517.254.561	-	-	-	-	-	161.498.088.448
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	27.090.855.963	42.111.999.921	46.341.175.555	-	-	-	-	-	115.544.031.439
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	135.912.377.110	98.767.869.924	61.461.826.241	-	-	-	-	-	296.142.073.275
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	247.121.481.834	238.611.071.875	61.227.149.425	-	-	-	-	-	546.959.703.134
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	224.612.263.502	621.850.717.826	291.321.782.799	-	-	-	6.694.181.000	-	1.144.478.945.127
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	28.083.670.987	155.447.218.396	336.701.954.859	-	-	-	70.541.852.000	-	590.774.696.242
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	27.407.421.880	227.864.893.578	101.516.497.958	-	-	-	377.460.435.000	-	734.249.248.416
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	98.476.162.339	73.457.273.465	32.365.140.708	-	-	-	-	-	204.298.576.512
094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	388.633.170.188	768.218.417.664	3.841.068.163.663	-	-	-	2.621.154.064.637	-	7.619.073.816.152
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	128.925.622.088	95.765.633.917	10.518.140.000	-	-	-	-	-	235.209.396.005
100	KOMISI YUDISIAL RI	4.311.945.917	29.113.290.056	46.166.947.693	-	-	-	-	-	79.592.183.666
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	2.536.617.669	34.390.666.515	19.912.584.600	-	-	-	37.632.824.216	-	94.472.693.000
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN	33.806.288.458	120.489.662.922	30.501.946.217	-	-	-	24.884.798.266	-	209.682.695.863
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	13.084.811.045	15.064.726.429	474.174.125.702	-	-	-	10.712.316.000	-	513.035.979.176
061	CICILAN BUNGA UTANG	-	-	-	87.520.673.753.954	-	-	-	-	87.520.673.753.954
062	SUBSIDI DAN TRANSFER	-	-	-	-	275.291.454.173.929	-	-	-	275.291.454.173.929
069	BELANJA LAIN LAIN	37.574.038.466.079	-	-	-	-	-	2.939.818.251.500	30.328.148.817.126	70.842.005.534.705
	JUMLAH	**112.829.875.523.789**	**55.963.472.418.939**	**72.772.477.031.152**	**88.429.807.846.898**	**275.291.454.173.929**	-	**57.740.756.298.045**	**30.328.148.787.126**	**693.355.992.079.878**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	**PELAYANAN UMUM**	**518.241.538.041.000**	**534.821.216.649.873**	**252.534.240.504**	**534.568.682.409.369**	**16.327.144.368.369**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**98.092.429.825.000**	**90.600.746.357.673**	**89.143.750.057**	**90.511.602.607.616**	**(7.580.827.217.384)**
01	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	899.936.456.000	703.813.303.168	7.933.970.454	695.879.332.714	(204.057.123.286)
02	PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA	624.132.678.000	451.179.915.534	368.166.973	450.811.748.561	(173.320.929.439)
03	PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK	59.661.642.000	35.130.597.145	257.630.700	34.872.966.445	(24.788.675.555)
04	PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA	26.567.532.000	16.703.636.307	97.125.600	16.606.510.707	(9.961.021.293)
05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL	176.764.972.000	108.747.619.694	242.650.028	108.504.969.666	(68.260.002.334)
06	PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL	106.890.813.000	101.070.049.570	10.190.297	101.059.859.273	(5.830.953.727)
07	PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	2.000.000.000	941.072.500	149.037.313	792.035.187	(1.207.964.813)
08	PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-
09	PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK	81.548.592.754.000	77.853.130.207.584	68.698.080.154	77.784.432.127.430	(3.764.160.626.570)
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	1.275.004.769.000	1.086.638.040.076	5.149.256.703	1.081.488.783.373	(193.515.985.627)
11	PROGRAM PENGAWASAN APARATUR NEGARA	-	-	-	-	-
12	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	877.784.221.000	590.370.153.253	226.597.546	590.143.555.707	(287.640.665.293)
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	2.206.085.559.000	1.839.360.773.402	1.079.970.713	1.838.280.802.689	(367.804.756.311)
14	PROGRAM PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN	-	-	-	-	-
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	710.903.238.000	606.880.875.078	400.599.732	606.480.275.346	(104.422.962.654)
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	136.266.776.000	105.671.000.274	2.000.000	105.669.000.274	(30.597.775.726)
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	4.254.567.371.000	3.565.462.708.696	290.898.712	3.565.171.809.984	(689.395.561.016)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	1.127.163.289.000	907.362.010.666	2.020.012.516	905.341.998.150	(221.821.290.850)
20	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA	2.427.938.054.000	1.616.587.678.675	15.382.339	1.616.572.296.336	(811.365.757.664)
21	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA	546.718.643.000	181.244.251.095	290.482.212	180.953.768.883	(365.764.874.117)
22	PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA	31.988.990.000	22.985.551.207	26.360.000	22.959.191.207	(9.029.798.793)
23	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN	51.974.302.000	41.382.568.975	47.663.000	41.334.905.975	(10.639.396.025)
24	PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN	216.294.395.000	78.276.159.902	167.647.085	78.108.512.817	(138.185.882.183)
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG	38.196.186.000	27.655.797.324	153.526.200	27.502.271.124	(10.693.914.876)
26	PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN	4.048.933.000	3.305.032.000	10.060.000	3.294.972.000	(753.961.000)
27	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	492.240.455.000	472.906.942.590	74.091.630	472.832.850.960	(19.407.604.040)
28	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	250.707.797.000	183.934.612.958	1.084.100.174	182.850.512.784	(67.857.284.216)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	5.800.000	348.249.976	(342.449.976)	(342.449.976)
01.02	**BANTUAN LUAR NEGERI**	-	-	**11.088.900**	**(11.088.900)**	**(11.088.900)**
00	PROGRAM TIDAK ADA		-	11.088.900	(11.088.900)	(11.088.900)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**268.066.000.000**	**628.111.722.057**	**81.295.951**	**628.030.426.106**	**359.964.426.106**
01	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	9.111.000.000	6.700.266.780	8.700.000	6.691.566.780	(2.419.433.220)
02	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	245.955.000.000	133.523.670.372	512.500	133.523.157.872	(112.431.842.128)
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.000.000.000	487.887.784.905	68.185.451	487.819.599.454	474.819.599.454
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.898.000	(3.898.000)	(3.898.000)
01.04	**PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK**	**1.504.741.221.000**	**1.432.212.854.179**	**558.163.054**	**1.431.654.691.125**	**(73.086.529.875)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK	940.632.282.000	854.408.830.277	506.799.479	853.902.030.798	(86.730.251.202)
02	PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK	234.420.170.000	219.290.627.608	34.613.950	219.256.013.658	(15.164.156.342)
03	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK	329.688.769.000	358.513.396.294	14.024.625	358.499.371.669	28.810.602.669
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.725.000	(2.725.000)	(2.725.000)
01.05	**PINJAMAN PEMERINTAH**	**94.794.224.800.000**	**87.533.816.562.122**	**13.143.113.168**	**87.520.673.448.954**	**(7.273.551.351.046)**
01	PROGRAM PEMBAYARAN BUNGA UTANG	94.794.224.800.000	87.533.816.562.122	13.142.808.168	87.520.673.753.954	(7.273.551.046.046)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	305.000	(305.000)	(305.000)
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**	**789.645.246.000**	**1.236.419.603.218**	**185.680.934**	**1.236.233.922.284**	**446.588.676.284**
01	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	34.650.000.000	57.386.264.355	120.000	57.386.144.355	22.736.144.355
02	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	26.714.925.000	15.199.548.546	-	15.199.548.546	(11.515.376.454)
04	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	29.124.984.000	20.654.687.768	840.000	20.653.847.768	(8.471.136.232)
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	199.695.478.000	168.868.535.085	909.000	168.867.626.085	(30.827.851.915)
06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	108.895.423.000	28.246.287.679	2.400.000	28.243.887.679	(80.651.535.321)
07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	237.921.088.000	241.307.193.878	-	241.307.193.878	3.386.105.878
08	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH	33.868.102.000	29.261.713.404	804.750	29.260.908.654	(4.607.193.346)
09	PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIK	-	-	-	-	-
10	PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK	34.839.248.000	29.446.761.660	8.400	29.446.753.260	(5.392.494.740)
11	PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL	81.434.020.000	72.746.120.632	174.598.784	72.571.521.848	(8.862.498.152)
13	PROGRAM PEMBINAAN DAERAH	2.501.978.000	1.110.087.400	-	1.110.087.400	(1.391.890.600)
14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS	-	572.192.402.811	6.000.000	572.186.402.811	572.186.402.811
01.90	**PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA**	**322.792.430.949.000**	**353.389.894.180.624**	**149.400.956.140**	**353.240.493.224.484**	**30.448.062.275.484**
01	PROGRAM SUBSUDI DAN TRANSFER LAINNYA	269.483.819.174.000	314.128.457.155.240	72.458.702.508	314.055.998.452.732	44.572.179.278.732
02	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	42.770.289.011.000	31.983.318.845.439	71.511.493.439	31.911.807.352.000	(10.858.481.659.000)
03	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	10.538.322.764.000	7.277.008.021.695	5.334.982.362	7.271.673.039.333	(3.266.649.724.667)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	-	1.110.158.250	6.157.000	1.104.001.250	1.104.001.250

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	89.620.831	(89.620.831)	(89.620.831)
01.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	-	**15.370.000**	**10.192.300**	**5.177.700**	**5.177.700**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	15.370.000	10.192.300	5.177.700	5.177.700
02	**PERTAHANAN**	**10.489.686.754.000**	**9.169.686.655.900**	**11.224.920.065**	**9.158.461.735.835**	**(1.331.225.018.165)**
02.01	**PERTAHANAN NEGARA**	**5.644.133.849.000**	**5.627.468.454.383**	**9.128.492.775**	**5.618.339.961.608**	**(25.793.887.392)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF	1.096.410.427.000	1.096.146.527.373	-	1.096.146.527.373	(263.899.627)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT	1.162.747.428.000	1.161.717.890.410	1.029.537.487	1.160.688.352.923	(2.059.075.077)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT	900.354.720.000	900.351.271.832	3.448.168	900.347.823.664	(6.896.336)
04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA	875.274.398.000	875.237.437.971	36.772.177	875.200.665.794	(73.732.206)
05	PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI	1.229.337.700.000	1.300.146.210.060	938.675.680	1.299.207.534.380	69.869.834.380
06	PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA	380.009.176.000	293.869.116.737	7.120.059.263	286.749.057.474	(93.260.118.526)
02.02	**DUKUNGAN PERTAHANAN**	**4.667.434.354.000**	**3.393.254.708.033**	**1.926.094.945**	**3.391.328.613.088**	**(1.276.105.740.912)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN	177.100.440.000	175.454.262.434	1.614.369.602	173.839.892.832	(3.260.547.168)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN	4.490.333.914.000	3.217.800.445.599	311.725.343	3.217.488.720.256	(1.272.845.193.744)
02.03	**BANTUAN MILITER LUAR NEGERI**	**34.418.900.000**	**34.418.757.900**	**121.580**	**34.418.636.320**	**(263.680)**
01	PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL	34.418.900.000	34.418.757.900	121.580	34.418.636.320	(263.680)
02.04	**LITBANG PERTAHANAN**	**123.902.121.000**	**94.747.590.584**	**169.825.765**	**94.577.764.819**	**(29.324.356.181)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN	32.261.330.000	32.097.866.235	163.463.765	31.934.402.470	(326.927.530)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL	91.640.791.000	62.649.724.349	6.362.000	62.643.362.349	(28.997.428.651)
02.90	**PERTAHANAN LAINNYA**	**19.797.530.000**	**19.797.145.000**	**385.000**	**19.796.760.000**	**(770.000)**
01	PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI	19.797.530.000	19.797.145.000	385.000	19.796.760.000	(770.000)
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**12.306.818.269.000**	**7.025.679.243.998**	**6.486.682.085**	**7.019.192.561.913**	**(5.287.625.707.087)**
03.01	**KEPOLISIAN**	**7.826.656.664.000**	**2.894.976.378.409**	**3.160.702.606**	**2.891.815.675.803**	**(4.934.840.988.197)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	324.211.804.000	39.413.685.938	25.658.961	39.388.026.977	(284.823.777.023)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN	1.789.093.149.000	128.898.566.666	1.267.000	128.897.299.666	(1.660.195.849.334)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	64.694.827.000	15.298.360.750	-	15.298.360.750	(49.396.466.250)
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	182.717.277.000	86.705.457.200	44.290.000	86.661.167.200	(96.056.109.800)
05	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS	3.162.825.115.000	809.164.607.511	2.982.567.645	806.182.039.866	(2.356.643.075.134)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA	775.333.235.000	750.911.398.600	-	750.911.398.600	(24.421.836.400)
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA	547.493.031.000	546.969.605.900	-	546.969.605.900	(523.425.100)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
08	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	246.690.061.000	225.255.590.998	-	225.255.590.998	(21.434.470.002)
09	PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI	181.330.650.000	130.597.564.904	39.901.000	130.557.663.904	(50.772.986.096)
10	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	524.657.963.000	159.874.392.742	67.018.000	159.807.374.742	(364.850.588.258)
12	PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	27.609.552.000	1.887.147.200	-	1.887.147.200	(25.722.404.800)
03.02	**PENANGGULANGAN BENCANA**	**388.513.514.000**	**369.441.181.552**	**200.000.000**	**369.241.181.552**	**(19.272.332.448)**
01	PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN	388.513.514.000	369.441.181.552	200.000.000	369.241.181.552	(19.272.332.448)
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**4.091.648.091.000**	**3.761.072.814.582**	**2.971.773.721**	**3.758.101.040.861**	**(333.547.050.139)**
01	PROGRAM PERENCANAAN HUKUM	37.249.836.000	32.472.758.103	76.192.104	32.396.565.999	(4.853.270.001)
02	PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM	78.011.118.000	376.796.958.469	436.910.900	376.360.047.569	298.348.929.569
03	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	110.627.686.000	89.183.770.903	182.841.950	89.000.928.953	(21.626.757.047)
04	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM	412.885.383.000	290.435.260.378	611.288.130	289.823.972.248	(123.061.410.752)
05	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA	2.345.335.992.000	2.064.753.710.038	667.816.691	2.064.085.893.347	(281.250.098.653)
06	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM	965.684.230.000	813.480.608.914	460.553.253	813.020.055.661	(152.664.174.339)
07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM	141.853.846.000	93.809.407.821	524.674.036	93.284.733.785	(48.569.112.215)
08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	-	2.425.600	-	2.425.600	2.425.600
09	PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM	-	137.914.356	-	137.914.356	137.914.356
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	11.496.657	(11.496.657)	(11.496.657)
03.90	**KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA**		**188.869.455**	**154.205.758**	**34.663.697**	**34.663.697**
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK	-	188.869.455	-	188.869.455	188.869.455
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	154.205.758	(154.205.758)	(154.205.758)
04	**EKONOMI**	**57.239.003.379.000**	**50.565.078.512.542**	**80.308.203.521**	**50.484.770.309.021**	**(6.754.233.069.979)**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM**	**1.819.113.142.000**	**1.599.160.537.246**	**1.711.587.255**	**1.597.448.949.991**	**(221.664.192.009)**
01	PROGRAM PERSAINGAN USAHA	35.732.891.000	23.212.521.606	523.786.131	22.688.735.475	(13.044.155.525)
02	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	82.348.666.000	65.160.688.886	2.475.500	65.158.213.386	(17.190.452.614)
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	62.984.375.000	54.570.338.767	667.589.240	53.902.749.527	(9.081.625.473)
05	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM	40.066.965.000	35.814.077.271	6.738.000	35.807.339.271	(4.259.625.729)
06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	319.840.560.000	292.535.545.985	400.964.729	292.134.581.256	(27.705.978.744)
08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM	215.792.536.000	205.369.558.653	12.041.000	205.357.517.653	(10.435.018.347)
09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	309.906.070.000	248.069.627.514	-	248.069.627.514	(61.836.442.486)
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	13.000.000.000	12.455.375.527	-	12.455.375.527	(544.624.473)
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO	438.312.691.000	415.754.502.292	87.036.155	415.667.466.137	(22.645.224.863)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
12	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	301.128.388.000	246.218.300.745	10.956.500	246.207.344.245	(54.921.043.755)
04.02	**TENAGA KERJA**	**1.249.690.657.000**	**1.071.928.756.612**	**1.831.628.534**	**1.070.097.128.078**	**(179.593.528.922)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	528.180.736.000	454.022.574.926	658.252.408	453.364.322.518	(74.816.413.482)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA		148.220.600	-	148.220.600	148.220.600
03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	256.617.395.000	237.543.791.311	300.900.060	237.242.891.251	(19.374.503.749)
04	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	464.892.526.000	380.214.169.775	872.476.066	379.341.693.709	(85.550.832.291)
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**11.264.248.719.000**	**11.312.845.149.513**	**71.036.769.455**	**11.241.808.380.058**	**(22.440.338.942)**
01	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	-	40.511.282.789	972.250	40.510.310.539	40.510.310.539
02	PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	1.941.046.253.000	3.374.130.170.485	154.541.525	3.373.975.628.960	1.432.929.375.960
03	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	1.640.289.133.000	1.411.355.507.580	1.647.893.943	1.409.707.613.637	(230.581.519.363)
04	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	3.064.646.265.000	2.601.969.674.859	59.864.253.137	2.542.105.421.722	(522.540.843.278)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	506.222.196.000	453.771.120.143	307.148.686	453.463.971.457	(52.758.224.543)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	1.654.068.572.000	1.134.230.046.665	1.180.124.414	1.133.049.922.251	(521.018.649.749)
08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	2.457.976.300.000	2.296.874.846.992	7.881.065.300	2.288.993.781.692	(168.982.518.308)
09	PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN	-	2.500.000	25.200	2.474.800	2.474.800
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	745.000	(745.000)	(745.000)
04.04	**PENGAIRAN**	**5.462.565.730.000**	**4.980.462.872.300**	**446.282.291**	**4.980.016.590.009**	**(482.549.139.991)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA	1.670.918.165.000	1.465.970.316.000	80.574.660	1.465.889.741.340	(205.028.423.660)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	3.791.647.565.000	3.514.492.556.300	365.706.718	3.514.126.849.582	(277.520.715.418)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	913	(913)	(913)
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**3.059.825.840.000**	**3.324.727.544.735**	**87.269.426**	**3.324.640.275.309**	**264.814.435.309**
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	2.835.076.586.000	3.193.197.625.998	26.219.404	3.193.171.406.594	358.094.820.594
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	133.332.003.000	54.697.202.668	-	54.697.202.668	(78.634.800.332)
03	PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI	29.390.709.000	25.421.003.038	7.400.022	25.413.603.016	(3.977.105.984)
04	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI	15.171.163.000	9.945.479.885	17.500.000	9.927.979.885	(5.243.183.115)
05	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	11.143.804.000	15.100.293.676	-	15.100.293.676	3.956.489.676
06	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	8.881.855.000	4.903.991.470	-	4.903.991.470	(3.977.863.530)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
07	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	4.706.150.000	678.920.200	-	678.920.200	(4.027.229.800)
08	PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN	22.123.570.000	20.783.027.800	36.150.000	20.746.877.800	(1.376.692.200)
04.06	**PERTAMBANGAN**	**1.580.967.513.000**	**1.353.642.944.071**	**581.445.769**	**1.353.061.498.302**	**(227.906.014.698)**
01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	760.032.216.000	609.449.858.779	555.400.366	608.894.458.413	(151.137.757.587)
02	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS	820.935.297.000	744.193.085.292	26.045.403	744.167.039.889	(76.768.257.111)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**1.816.122.887.000**	**1.433.520.533.672**	**763.208.792**	**1.432.757.324.880**	**(383.365.562.120)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	246.649.796.000	223.396.189.936	26.634.546	223.369.555.390	(23.280.240.610)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	384.760.079.000	317.255.580.477	325.917.100	316.929.663.377	(67.830.415.623)
03	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	467.904.655.000	399.349.796.485	135.905.486	399.213.890.999	(68.690.764.001)
04	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	716.808.357.000	493.518.966.774	274.751.660	493.244.215.114	(223.564.141.886)
04.08	**TRANSPORTASI**	**29.206.385.510.000**	**24.732.591.715.534**	**2.619.164.081**	**24.729.972.551.453**	**(4.476.412.958.547)**
01	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	2.975.982.058.000	2.876.892.586.857	469.079.742	2.876.423.507.115	(99.558.550.885)
02	PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	13.994.831.491.000	10.950.567.949.414	767.916.415	10.949.800.032.999	(3.045.031.458.001)
03	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	430.893.625.000	370.077.804.580	96.394.125	369.981.410.455	(60.912.214.545)
04	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ	122.123.100.000	117.492.596.097	-	117.492.596.097	(4.630.503.903)
05	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	7.500.000.000	3.786.626.000	-	3.786.626.000	(3.713.374.000)
06	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	250.187.275.000	181.927.835.112	45.063.819	181.882.771.293	(68.304.503.707)
07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API	3.070.975.470.000	2.571.585.230.243	271.754.902	2.571.313.475.341	(499.661.994.659)
08	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API	24.011.635.000	30.193.145.500	-	30.193.145.500	6.181.510.500
09	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN	40.075.059.000	34.552.060.408	-	34.552.060.408	(5.522.998.592)
10	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ	56.312.015.000	50.562.526.932	-	50.562.526.932	(5.749.488.068)
11	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT	3.210.685.635.000	2.993.214.057.848	256.830.628	2.992.957.227.220	(217.728.407.780)
12	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT	123.157.020.000	92.222.495.934	34.977.600	92.187.518.334	(30.969.501.666)
13	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT	325.099.200.000	290.395.514.812	78.029.027	290.317.485.785	(34.781.714.215)
14	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP	994.249.811.000	980.122.387.831	62.815.080	980.059.572.751	(14.190.238.249)
15	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	88.888.323.000	87.146.253.500	-	87.146.253.500	(1.742.069.500)
16	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN ASDP	29.082.143.000	27.897.529.400	-	27.897.529.400	(1.184.613.600)
17	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA	2.531.531.369.000	2.307.511.472.368	197.971.993	2.307.313.500.375	(224.217.868.625)
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA	211.130.070.000	188.709.785.239	76.814.000	188.632.971.239	(22.497.098.761)
19	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA	170.815.750.000	82.350.600.416	27.766.250	82.322.834.166	(88.492.915.834)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
20	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA	97.059.628.000	61.833.132.168	168.461.000	61.664.671.168	(35.394.956.832)
21	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	36.535.561.000	35.623.687.347	10.948.000	35.612.739.347	(922.821.653)
22	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	415.259.272.000	397.926.437.528	54.341.500	397.872.096.028	(17.387.175.972)
04.09	**TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.493.652.509.000**	**547.465.865.934**	**976.738.063**	**546.489.127.871**	**(947.163.381.129)**
01	PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA	109.997.536.000	74.892.473.537	288.898.078	74.603.575.459	(35.393.960.541)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA	1.165.993.577.000	300.721.021.748	400.668.181	300.320.353.567	(865.673.223.433)
03	PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	217.661.396.000	171.852.370.649	287.171.804	171.565.198.845	(46.096.197.155)
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**286.430.872.000**	**208.732.592.925**	**254.109.855**	**208.478.483.070**	**(77.952.388.930)**
01	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	58.981.529.000	40.244.949.644	58.001.200	40.186.948.444	(18.794.580.556)
02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	143.321.821.000	120.376.109.415	125.810.700	120.250.298.715	(23.071.522.285)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	45.201.442.000	35.893.238.115	25.877.165	35.867.360.950	(9.334.081.050)
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN	38.926.080.000	12.188.076.398	2.566.790	12.185.509.608	(26.740.570.392)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	-	30.219.353	-	30.219.353	30.219.353
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	41.854.000	(41.854.000)	(41.854.000)
05	**LINGKUNGAN HIDUP**	**6.353.127.427.000**	**5.317.211.272.874**	**2.108.268.352**	**5.315.103.004.522**	**(1.038.024.422.478)**
05.01	**MANAJEMEN LIMBAH**	**523.088.448.000**	**478.411.873.236**	**1.476.800**	**478.410.396.436**	**(44.678.051.564)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE	500.816.448.000	457.623.906.055	1.176.800	457.622.729.255	(43.193.718.745)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	22.272.000.000	20.787.967.181	300.000	20.787.667.181	(1.484.332.819)
05.03	**PENANGGULANGAN POLUSI**	**319.893.487.000**	**206.122.406.431**	**10.791.250**	**206.111.615.181**	**(113.781.871.819)**
01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	2.980.786.000	2.681.357.450	4.016.250	2.677.341.200	(303.444.800)
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	316.912.701.000	203.441.048.981	6.775.000	203.434.273.981	(113.478.427.019)
05.04	**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	**3.617.910.527.000**	**3.151.866.553.434**	**1.592.880.197**	**3.150.273.673.237**	**(467.636.853.763)**
01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	368.805.444.000	260.197.373.560	151.968.403	260.045.405.157	(108.760.038.843)
02	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	317.013.674.000	248.105.732.869	248.619.000	247.857.113.869	(69.156.560.131)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	417.468.157.000	371.128.281.434	174.712.846	370.953.568.588	(46.514.588.412)
04	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI	2.514.623.252.000	2.272.435.165.571	1.017.579.948	2.271.417.585.623	(243.205.666.377)
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**	**1.733.023.343.000**	**1.352.297.213.189**	**427.650.072**	**1.351.869.563.117**	**(381.153.779.883)**
01	PROGRAM PENATAAN RUANG	304.574.602.000	262.891.569.287	65.980.872	262.825.588.415	(41.749.013.585)
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	1.428.448.741.000	1.089.405.643.902	359.828.600	1.089.045.815.302	(339.402.925.698)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.840.600	(1.840.600)	(1.840.600)
05.90	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA**	**159.211.622.000**	**128.513.226.584**	**75.470.033**	**128.437.756.551**	**(30.773.865.449)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	159.211.622.000	128.513.226.584	75.470.033	128.437.756.551	(30.773.865.449)
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**12.993.448.932.000**	**12.449.888.914.786**	**1.235.344.442**	**12.448.653.570.344**	**(544.795.361.656)**
06.01	**PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.833.383.663.000**	**1.616.582.376.732**	**171.080.764**	**1.616.411.295.968**	**(216.972.367.032)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.833.383.663.000	1.616.582.376.732	171.080.764	1.616.411.295.968	(216.972.367.032)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
06.02	**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN**	**2.097.941.760.000**	**2.083.711.914.172**	**162.945.926**	**2.083.548.968.246**	**(14.392.791.754)**
01	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT	227.566.695.000	178.522.658.636	75.052.126	178.447.606.510	(49.119.088.490)
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	1.870.375.065.000	1.905.189.255.536	87.893.800	1.905.101.361.736	34.726.296.736
06.03	**PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.257.489.694.000**	**2.138.938.705.382**	**198.323.324**	**2.138.740.382.058**	**(118.749.311.942)**
01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	642.108.858.000	606.539.736.104	78.649.800	606.461.086.304	(35.647.771.696)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.615.380.836.000	1.532.398.969.278	119.673.524	1.532.279.295.754	(83.101.540.246)
06.90	**PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA**	**6.804.633.815.000**	**6.610.655.918.500**	**702.994.428**	**6.609.952.924.072**	**(194.680.890.928)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	334.745.053.000	305.627.500.052	62.521.195	305.564.978.857	(29.180.074.143)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	445.303.819.000	397.050.515.767	51.976.220	396.998.539.547	(48.305.279.453)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL	672.135.633.000	602.909.854.669	196.266.222	602.713.588.447	(69.422.044.553)
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL	324.791.164.000	359.994.968.580	9.298.000	359.985.670.580	35.194.506.580
06	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN	36.695.637.000	34.575.691.713	6.516.200	34.569.175.513	(2.126.461.487)
07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN	872.999.300.000	859.245.626.977	376.416.591	858.869.210.386	(14.130.089.614)
08	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA	33.500.000.000	24.384.357.252	-	24.384.357.252	(9.115.642.748)
09	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	4.071.952.209.000	4.015.120.074.045	-	4.015.120.074.045	(56.832.134.955)
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH	12.511.000.000	11.747.329.445	-	11.747.329.445	(763.670.555)
07	**KESEHATAN**	**15.985.573.520.000**	**14.051.291.532.399**	**12.347.980.771**	**14.038.943.551.628**	**(1.946.629.968.372)**
07.01	**OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**	**1.471.711.608.000**	**1.389.059.819.742**	**502.984.814**	**1.388.556.834.928**	**(83.154.773.072)**
01	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.022.069.697.000	993.662.897.535	66.872.900	993.596.024.635	(28.473.672.365)
02	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	440.267.780.000	386.902.485.646	376.485.214	386.526.000.432	(53.741.779.568)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	9.374.131.000	8.494.436.561	59.626.700	8.434.809.861	(939.321.139)
07.02	**PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN**	**9.369.593.915.000**	**8.784.339.428.512**	**3.752.655.652**	**8.780.586.772.860**	**(589.007.142.140)**
01	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	9.369.593.915.000	8.784.339.428.512	3.747.630.652	8.780.591.797.860	(589.002.117.140)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	5.025.000	(5.025.000)	(5.025.000)
07.03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.466.188.132.000**	**1.717.067.009.236**	**1.340.217.016**	**1.715.726.792.220**	**(750.461.339.780)**
02	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80.000.000.000	61.218.926.043	15.362.000	61.203.564.043	(18.796.435.957)
03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.751.323.457.000	1.176.051.900.739	731.058.792	1.175.320.841.947	(576.002.615.053)
04	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	407.321.423.000	356.775.782.582	491.681.254	356.284.101.328	(51.037.321.672)
05	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	227.543.252.000	123.020.399.872	101.166.220	122.919.233.652	(104.624.018.348)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	948.750	(948.750)	(948.750)
07.04	**KELUARGA BERENCANA**	**497.957.078.000**	**479.807.747.775**	**118.451.541**	**479.689.296.234**	**(18.267.781.766)**
01	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	361.827.520.000	349.966.068.501	68.023.541	349.898.044.960	(11.929.475.040)
02	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	25.427.600.000	24.521.896.703	14.230.000	24.507.666.703	(919.933.297)
03	PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS	110.701.958.000	105.319.782.571	36.198.000	105.283.584.571	(5.418.373.429)
07.05	**LITBANG KESEHATAN**	**290.280.077.000**	**198.606.076.545**	**90.167.915**	**198.515.908.630**	**(91.764.168.370)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	290.280.077.000	198.606.076.545	90.167.915	198.515.908.630	(91.764.168.370)
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**1.889.842.710.000**	**1.482.411.450.589**	**6.543.503.833**	**1.475.867.946.756**	**(413.974.763.244)**
01	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	730.242.710.000	574.646.573.772	890.667.651	573.755.906.121	(156.486.803.879)
02	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	1.159.600.000.000	907.764.876.817	5.650.856.482	902.114.020.335	(257.485.979.665)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	-	-	1.979.700	(1.979.700)	(1.979.700)
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**1.393.196.403.000**	**1.294.198.650.356**	**524.353.872**	**1.293.674.296.484**	**(99.522.106.516)**
08.01	**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA**	**658.252.419.000**	**612.084.646.771**	**489.743.562**	**611.594.903.209**	**(46.657.515.791)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	67.711.083.000	72.371.451.083	2.836.600	72.368.614.483	4.657.531.483
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	133.183.429.000	109.221.858.776	436.451.748	108.785.407.028	(24.398.021.972)
03	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	45.388.397.000	44.233.489.192	-	44.233.489.192	(1.154.907.808)
04	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	268.234.249.000	253.966.319.092	-	253.966.319.092	(14.267.929.908)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	107.535.866.000	97.285.616.540	-	97.285.616.540	(10.250.249.460)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	36.199.395.000	35.005.912.088	50.455.214	34.955.456.874	(1.243.938.126)
08.02	**PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**579.943.993.000**	**571.924.213.633**	**27.494.000**	**571.896.719.633**	**(8.047.273.367)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	12.630.300.000	12.019.114.082	-	12.019.114.082	(611.185.918)
02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA	124.749.031.000	122.275.617.314	27.494.000	122.248.123.314	(2.500.907.686)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA	15.263.600.000	13.931.772.281	-	13.931.772.281	(1.331.827.719)
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	271.502.330.000	268.578.062.466	-	268.578.062.466	(2.924.267.534)
05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	155.798.732.000	155.119.647.490	-	155.119.647.490	(679.084.510)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
08.03	**PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN**	**154.999.991.000**	**110.189.789.952**	**7.116.310**	**110.182.673.642**	**(44.817.317.358)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	154.999.991.000	110.189.789.952	7.116.310	110.182.673.642	(44.817.317.358)
09	**AGAMA**	**791.107.099.000**	**745.905.676.484**	**228.966.092**	**745.676.710.392**	**(45.430.388.608)**
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**	**648.047.702.000**	**607.956.907.078**	**143.286.999**	**607.813.620.079**	**(40.234.081.921)**
01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	495.664.632.000	458.960.552.468	116.787.280	458.843.765.188	(36.820.866.812)
02	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	152.383.070.000	148.996.354.610	25.644.919	148.970.709.691	(3.412.360.309)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	854.800	(854.800)	(854.800)
09.02	**KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA**	**23.687.988.000**	**20.606.743.120**	**11.475.040**	**20.595.268.080**	**(3.092.719.920)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	23.687.988.000	20.606.743.120	11.475.040	20.595.268.080	(3.092.719.920)
09.03	**LITBANG AGAMA**	**46.235.959.000**	**44.907.106.569**	-	**44.907.106.569**	**(1.328.852.431)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	46.235.959.000	44.907.106.569	-	44.907.106.569	(1.328.852.431)
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**73.135.450.000**	**72.434.919.717**	**74.204.053**	**72.360.715.664**	**(774.734.336)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	73.135.450.000	72.373.879.580	74.058.153	72.299.821.427	(835.628.573)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	-	61.040.137	145.900	60.894.237	60.894.237
10	**PENDIDIKAN**	**57.960.207.300.000**	**55.374.105.325.108**	**76.142.205.018**	**55.297.963.120.090**	**(2.662.244.179.910)**
10.01	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**560.981.718.000**	**496.668.991.647**	**488.615.212**	**496.180.376.435**	**(64.801.341.565)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	560.981.718.000	496.589.951.647	475.129.812	496.114.821.835	(64.866.896.165)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	79.040.000	13.485.400	65.554.600	65.554.600
10.02	**PENDIDIKAN DASAR**	**24.964.789.382.000**	**24.646.364.446.426**	**18.830.068.763**	**24.627.534.377.663**	**(337.255.004.337)**
01	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	24.964.789.382.000	24.646.362.991.426	18.822.348.763	24.627.540.642.663	(337.248.739.337)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	1.455.000	7.720.000	(6.265.000)	(6.265.000)
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**	**4.034.738.317.000**	**3.847.858.455.898**	**5.203.540.047**	**3.842.654.915.851**	**(192.083.401.149)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	4.034.738.317.000	3.847.858.455.898	81.563.330	3.847.776.892.568	(186.961.424.432)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	5.121.976.717	(5.121.976.717)	(5.121.976.717)
10.04	**PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**	**830.885.513.000**	**779.839.223.818**	**474.521.047**	**779.364.702.771**	**(51.520.810.229)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	830.885.513.000	779.839.223.818	474.521.047	779.364.702.771	(51.520.810.229)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**	**309.954.792.000**	**275.349.676.747**	**1.087.998.548**	**274.261.678.199**	**(35.693.113.801)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	309.954.792.000	275.349.676.747	1.087.998.548	274.261.678.199	(35.693.113.801)
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**14.151.034.700.000**	**13.111.854.196.718**	**15.488.560.238**	**13.096.365.636.480**	**(1.054.669.063.520)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	14.151.034.700.000	13.111.854.196.718	15.434.638.038	13.096.419.558.680	(1.054.615.141.320)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	53.922.200	(53.922.200)	(53.922.200)
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**	**11.929.166.825.000**	**11.104.203.700.388**	**14.515.585.800**	**11.089.688.114.588**	**(839.478.710.412)**
01	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.262.660.716.000	3.979.640.014.227	9.362.520.616	3.970.277.493.611	(292.383.222.389)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	301.309.224.000	267.598.789.308	149.893.601	267.448.895.707	(33.860.328.293)
03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	7.365.196.885.000	6.856.964.896.853	4.450.517.773	6.852.514.379.080	(512.682.505.920)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	552.653.810	(552.653.810)	(552.653.810)
10.08	**PEMBINAAN KEAGAMAAN**	**295.097.454.000**	**287.699.849.622**	**13.237.500**	**287.686.612.122**	**(7.410.841.878)**
01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	295.097.454.000	-	11.157.500	(11.157.500)	(295.108.611.500)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	287.699.849.622	2.080.000	287.697.769.622	287.697.769.622
10.09	**LITBANG PENDIDIKAN**	**883.558.599.000**	**823.481.665.929**	**20.019.828.590**	**803.461.837.339**	**(80.096.761.661)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	883.558.599.000	823.481.665.929	20.019.828.590	803.461.837.339	(80.096.761.661)
10.90	**PENDIDIKAN LAINNYA**		**785.117.915**	**16.532.599**	**768.585.316**	**768.585.316**
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	-	785.117.915	4.890.661	780.227.254	780.227.254
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	11.641.938	(11.641.938)	(11.641.938)
10.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**3.716.674**	**(3.716.674)**	**(3.716.674)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.716.674	(3.716.674)	(3.716.674)
11	**KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**	**3.317.299.466.000**	**2.988.825.833.890**	**2.472.019.997**	**2.986.353.813.893**	**(330.945.652.107)**
11.04	**KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**719.340.887.000**	**680.758.412.428**	**1.115.112.992**	**679.643.299.436**	**(39.697.587.564)**
01	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN	573.373.410.000	542.340.215.273	1.071.124.642	541.269.090.631	(32.104.319.369)
02	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.592.050.000	9.702.744.004	955.000	9.701.789.004	(2.890.260.996)
04	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	18.064.022.000	15.612.596.406	11.632.100	15.600.964.306	(2.463.057.694)
05	PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	115.311.405.000	113.102.856.745	31.401.250	113.071.455.495	(2.239.949.505)
11.05	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**160.521.849.000**	**96.219.325.409**	**398.658.870**	**95.820.666.539**	**(64.701.182.461)**
01	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	91.688.673.000	82.665.521.690	378.756.520	82.286.765.170	(9.401.907.830)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	68.833.176.000	13.553.803.719	19.902.350	13.533.901.369	(55.299.274.631)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
11.06	**PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL**	**506.630.099.000**	**481.623.847.760**	**525.243.545**	**481.098.604.215**	**(25.531.494.785)**
01	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	479.630.099.000	458.427.140.694	524.843.539	457.902.297.155	(21.727.801.845)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	27.000.000.000	23.196.707.066	6	23.196.707.060	(3.803.292.940)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	400.000	(400.000)	(400.000)
11.08	**BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.677.502.942.000**	**1.547.042.622.774**	**302.830.676**	**1.546.739.792.098**	**(130.763.149.902)**
01	PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.677.502.942.000	1.547.042.622.774	302.830.676	1.546.739.792.098	(130.763.149.902)
11.09	**LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL**	**121.506.580.000**	**65.348.274.307**	**65.069.270**	**65.283.205.037**	**(56.223.374.963)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	12.474.447.000	12.130.642.930	63.276.270	12.067.366.660	(407.080.340)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	109.032.133.000	53.217.631.377	1.793.000	53.215.838.377	(55.816.294.623)
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**131.797.109.000**	**117.833.351.212**	**65.104.644**	**117.768.246.568**	**(14.028.862.432)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL	9.837.279.000	7.765.736.130	51.947.944	7.713.788.186	(2.123.490.814)
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	121.959.830.000	110.067.615.082	13.156.700	110.054.458.382	(11.905.371.618)
00	**FUNGSI TIDAK ADA**	-	**141.462.371**	**1.624.465.984**	**(1.483.003.613)**	**(1.483.003.613)**
00.00	**SUB FUNGSI TIDAK ADA**	-	**141.462.371**	**1.624.465.984**	**(1.483.003.613)**	**(1.483.003.613)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	141.462.371	1.624.465.984	(1.483.003.613)	(1.483.003.613)
JUMLAH		**697.071.006.590.000**	**693.803.229.730.581**	**447.237.650.703**	**693.355.992.079.878**	**(3.715.014.510.122)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008

(Dalam Rupiah)

No	Nama Wilayah	Dana Bagi Hasil			Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total Dana Perimbangan
		Perpajakan	SDA	Jumlah			
1	2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
01	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	979.619.826.303	2.591.390.476.439	3.571.010.302.742	6.348.755.266.000	947.807.800.000	10.867.573.368.742
02	Provinsi Sumatera Utara	1.466.303.692.648	48.405.977.702	1.514.709.670.350	10.404.366.307.000	1.233.750.200.000	13.152.826.177.350
03	Provinsi Sumatera Barat	505.448.965.362	18.406.779.047	523.855.744.409	6.511.816.258.000	856.549.800.000	7.892.221.802.409
04	Provinsi Riau	1.761.415.823.129	10.833.198.379.882	12.594.614.203.011	2.210.426.495.000	146.993.200.000	14.952.033.898.011
05	Provinsi Kepulauan Riau	736.928.713.485	2.637.642.644.550	3.374.571.358.035	1.124.237.474.000	140.662.500.000	4.639.471.332.035
06	Provinsi Jambi	688.564.783.179	723.971.560.009	1.412.536.343.188	3.380.902.591.000	420.457.000.000	5.213.895.934.188
07	Provinsi Sumatera Selatan	1.457.048.574.194	3.156.938.892.006	4.613.987.466.200	5.452.010.459.000	541.448.200.000	10.607.446.125.200
08	Provinsi Bangka Belitung	211.358.542.856	503.406.613.492	714.765.156.348	2.041.955.070.000	327.403.700.000	3.084.123.926.348
09	Provinsi Bengkulu	228.663.527.212	15.113.831.077	243.777.358.289	2.867.997.996.000	471.725.500.000	3.583.500.854.289
10	Provinsi Lampung	470.458.465.257	468.856.160.602	939.314.625.859	5.200.883.345.000	518.580.600.000	6.658.778.570.859
11	Provinsi DKI Jakarta	8.514.229.076.135	177.585.023.413	8.691.814.099.548	-	-	8.691.814.099.548
12	Provinsi Jawa Barat	4.033.044.377.620	378.575.730.387	4.411.620.108.007	17.145.180.906.000	995.494.600.000	22.552.295.614.007
13	Provinsi Banten	1.278.534.807.175	6.000.699.784	1.284.535.506.959	3.624.492.724.000	277.252.800.000	5.186.281.030.959
14	Provinsi Jawa Tengah	1.994.842.520.665	39.067.558.189	2.033.910.078.854	18.842.579.088.000	1.638.169.000.000	22.514.658.166.854
15	Provinsi DI Yogyakarta	295.327.581.738	726.420.228	296.054.001.966	3.006.411.770.000	232.322.000.000	3.534.787.771.966
16	Provinsi Jawa Timur	3.195.886.375.582	368.372.069.168	3.564.258.444.750	20.531.290.167.000	1.677.115.300.000	25.772.663.911.750
17	Provinsi Kalimantan Barat	494.862.942.213	74.874.600.015	569.737.542.228	5.647.334.338.000	710.505.500.000	6.927.577.380.228
18	Provinsi Kalimantan Tengah	584.166.969.626	346.336.489.927	930.503.459.553	5.351.554.139.000	634.633.000.000	6.916.690.598.553
19	Provinsi Kalimantan Selatan	559.578.750.619	1.182.004.073.916	1.741.582.824.535	4.113.709.680.000	563.021.000.000	6.418.313.504.535
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.390.799.932.866	14.962.587.192.604	17.353.387.125.470	2.629.071.688.000	204.143.200.000	20.186.602.013.470
21	Provinsi Sulawesi Utara	298.485.307.996	8.305.988.926	306.791.296.922	3.427.849.619.000	672.325.700.000	4.406.966.615.922
22	Provinsi Gorontalo	131.737.542.064	4.967.737.424	136.705.279.488	1.642.789.762.000	283.369.600.000	2.062.864.641.488
23	Provinsi Sulawesi Tengah	305.486.810.855	24.865.489.785	330.352.300.640	4.049.960.993.000	578.982.000.000	4.959.295.293.640
24	Provinsi Sulawesi Selatan	935.899.371.207	132.057.948.348	1.067.957.319.555	8.096.082.485.000	1.215.252.900.000	10.379.292.704.555
25	Provinsi Sulawesi Barat	144.107.457.242	8.061.013.116	152.168.470.358	1.688.207.020.000	285.145.000.000	2.125.520.490.358
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	299.084.722.101	45.543.120.588	344.627.842.689	3.705.709.126.000	639.733.200.000	4.690.070.168.689
27	Provinsi Bali	513.187.232.123	1.260.393.858	514.447.625.981	3.555.231.724.000	425.260.400.000	4.494.939.749.981

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008

(Dalam Rupiah)

No	Nama Wilayah	Dana Bagi Hasil			Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total Dana Perimbangan
		Perpajakan	SDA	Jumlah			
1	2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	292.831.335.994	95.016.404.168	387.847.740.162	3.919.126.916.000	514.263.000.000	4.821.237.656.162
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	379.941.789.550	2.981.129.522	382.922.919.072	5.576.587.463.000	988.177.000.000	6.947.687.382.072
30	Provinsi Maluku	323.527.739.194	20.839.045.475	344.366.784.669	3.066.445.099.000	496.403.800.000	3.907.215.683.669
31	Provinsi Maluku Utara	291.414.357.739	225.983.022.033	517.397.379.772	2.378.911.551.000	450.758.000.000	3.347.066.930.772
32	Provinsi Papua	1.009.250.252.894	1.037.654.764.489	2.046.905.017.383	8.506.658.734.000	1.192.330.600.000	11.745.894.351.383
33	Provinsi Papua Barat	908.510.227.516	293.019.165.624	1.201.529.393.140	3.458.608.618.000	507.310.600.000	5.167.448.611.140
34	Dana Cadangan TA 2008	-	305.602.505.468	305.602.505.468	-	-	305.602.505.468
Jumlah		**37.680.548.394.339**	**40.739.618.901.261**	**78.420.167.295.600**	**179.507.144.871.000**	**20.787.346.700.000**	**278.714.658.866.600**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
	990015	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	184.114.388.739	33.181.586.509	141.565.951.688	2.352.543.210	177.100.081.407	7.014.307.332
1	990078	Kab. Aceh Barat	23.054.455.154	2.163.372.953	17.862.306.589	3.248.936.744	23.274.616.286	(220.161.132)
2	990022	Kab. Aceh Besar	25.714.397.366	2.824.507.858	18.877.281.185	3.825.765.433	25.527.554.476	186.842.890
3	990061	Kab. Aceh Selatan	24.532.574.726	1.403.948.676	19.705.413.875	2.584.498.819	23.693.861.370	838.713.356
4	980007	Kab. Aceh Singkil	18.242.971.932	977.958.270	17.754.844.448	2.611.774.419	21.344.577.137	(3.101.605.205)
5	990082	Kab. Aceh Tengah	21.839.082.991	1.527.328.586	16.726.870.270	2.611.437.653	20.865.636.509	973.446.482
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	21.314.907.378	1.149.576.646	17.148.536.203	2.632.884.391	20.930.997.240	383.910.138
7	990057	Kab. Aceh Timur	88.711.517.424	701.374.939	82.478.116.280	2.681.642.131	85.861.133.350	2.850.384.074
8	990040	Kab. Aceh Utara	162.950.577.856	4.052.776.251	149.905.804.381	3.081.625.056	157.040.205.688	5.910.372.168
9	980053	Kab. Bireun	39.808.703.013	1.598.430.613	33.109.261.813	3.173.978.022	37.881.670.448	1.927.032.565
10	990036	Kab. Aceh Pidie	17.447.896.917	1.553.740.617	12.912.872.145	2.912.580.653	17.379.193.415	68.703.502
11	993372	Kab. Simeulue	19.622.129.830	980.227.071	15.258.670.242	2.580.379.331	18.819.276.644	802.853.186
12	990104	Kota Banda Aceh	32.388.562.186	10.025.010.516	18.535.964.717	4.220.070.721	32.781.045.954	(392.483.768)
13	990111	Kota Sabang	23.250.210.884	1.044.108.864	18.320.542.073	2.572.224.456	21.936.875.393	1.313.335.491
14	994672	Kota Langsa	25.571.226.443	2.574.444.265	19.029.616.122	3.034.890.530	24.638.950.917	932.275.526
15	994686	Kota Lhokseumawe	63.186.094.476	7.794.900.419	46.989.501.545	3.177.365.673	57.961.767.637	5.224.326.839
16	997451	Kab. Nagan Raya	24.697.091.462	1.567.451.486	21.334.976.589	2.619.964.595	25.522.392.670	(825.301.208)
17	997447	Kab. Aceh Jaya	23.383.495.845	1.004.708.269	19.092.820.252	2.480.511.669	22.578.040.190	805.455.655
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	21.144.323.905	1.108.577.440	14.477.380.106	2.936.521.859	18.522.479.405	2.621.844.500
19	997430	Kab. Gayo Lues	25.012.858.845	933.364.415	21.515.455.086	2.470.004.944	24.918.824.445	94.034.400
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	80.002.131.766	1.970.145.178	68.416.373.132	2.672.815.149	73.059.333.459	6.942.798.307
21	987532	Kab. Bener Meriah	20.674.157.803	998.480.871	16.845.436.486	2.551.969.976	20.395.887.333	278.270.470
22	963327	Kota Subulussalam	11.903.029.084	1.118.700.235	9.236.957.155	2.446.454.099	12.802.111.489	(899.082.405)
23	963311	Kab. Pidie Jaya	14.082.572.615	1.227.726.560	10.995.849.921	2.559.736.960	14.783.313.441	(700.740.826)
	990125	**Provinsi Sumatera Utara**	307.705.289.462	89.652.145.242	160.754.078.556	41.230.959.123	291.637.182.921	16.068.106.541
1	990221	Kab. Asahan	58.794.267.072	4.969.369.365	6.832.454.919	2.642.712.500	14.444.536.784	44.349.730.288
2	990192	Kab. Dairi	24.843.147.450	2.556.084.248	19.129.983.992	2.532.256.112	24.218.324.352	624.823.098
3	990132	Kab. Deli Serdang	102.186.037.410	5.640.747.413	58.683.612.542	35.223.636.075	99.547.996.030	2.638.041.380
4	990146	Kab. Tanah Karo	22.853.896.511	2.187.073.454	16.955.550.628	4.154.060.898	23.296.684.980	(442.788.469)
5	990188	Kab. Labuhan Batu	97.934.819.353	6.957.060.249	85.530.675.530	17.938.346.950	110.426.082.729	(12.491.263.376)
6	990150	Kab. Langkat	134.433.639.542	3.650.630.575	99.827.416.832	3.521.656.473	106.999.703.880	27.433.935.662

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
7	941915	Kab. Mandailing Natal	29.988.614.314	2.509.809.503	24.355.484.804	4.711.732.200	31.577.026.507	(1.588.412.193)
8	990235	Kab. Nias	22.534.224.761	2.039.376.755	17.712.547.790	2.906.668.792	22.658.593.337	(124.368.576)
9	990171	Kab. Simalungun	58.779.284.044	4.582.796.275	46.784.487.052	5.875.932.229	57.243.215.556	1.536.068.488
10	990214	Kab. Tapanuli Selatan	50.475.041.850	1.747.015.122	49.822.383.037	2.932.159.210	54.501.557.369	(4.026.515.519)
11	990167	Kab. Tapanuli Tengah	22.762.878.417	1.917.912.942	17.285.402.905	2.948.866.047	22.152.181.894	610.696.523
12	990200	Kab. Tapanuli Utara	24.206.219.146	2.677.496.451	17.289.282.773	2.543.961.850	22.510.741.074	1.695.478.072
13	941922	Kab. Toba Samosir	22.159.373.079	2.050.883.218	13.227.953.016	2.528.675.427	17.807.511.661	4.351.861.418
14	990260	Kota Binjai	42.417.550.149	2.778.647.666	31.906.547.401	4.487.774.900	39.172.969.967	3.244.580.182
15	990242	Kota Medan	269.068.990.561	52.230.763.557	133.773.396.391	99.600.885.969	285.605.045.917	(16.536.055.356)
16	990277	Kota Pematang Siantar	26.846.357.223	7.290.804.803	14.113.825.628	5.380.320.934	26.784.951.365	61.405.858
17	990298	Kota Sibolga	20.153.823.956	3.148.310.349	13.236.914.581	2.593.689.998	18.978.914.928	1.174.909.028
18	990281	Kota Tanjung Balai	19.474.951.366	2.286.883.753	6.679.717.535	2.562.291.499	11.528.892.787	7.946.058.579
19	990256	Kota Tebing Tinggi	23.332.598.685	2.733.723.017	14.278.735.134	3.788.472.962	20.800.931.113	2.531.667.572
20	994690	Kota Padang Sidempuan	25.490.990.424	3.921.064.300	17.206.542.139	3.060.265.922	24.187.872.361	1.303.118.063
21	998147	Kab. Pakpak Bharat	21.503.223.950	2.046.963.339	16.816.435.946	2.446.518.099	21.309.917.384	193.306.566
22	998130	Kab. Nias Selatan	19.684.665.827	2.186.957.813	15.521.065.963	2.450.293.715	20.158.317.491	(473.651.664)
23	998151	Kab. Humbang Hasundutan	24.409.336.693	2.669.878.479	16.394.191.368	2.456.565.107	21.520.634.954	2.888.701.739
24	987418	Kab. Serdang Bedagai	44.621.879.717	3.812.609.318	38.445.958.079	3.310.817.900	45.569.385.297	(947.505.580)
25	987528	Kab. Samosir	18.879.389.679	2.231.992.094	14.271.579.447	2.449.014.099	18.952.585.640	(73.195.961)
26	963333	Kab. Batu bara	15.554.156.591	3.653.363.781	6.538.991.267	2.519.579.322	12.711.934.370	2.842.222.221
	990303	**Provinsi Sumatera Barat**	88.875.710.744	30.821.865.868	51.104.142.888	4.021.741.777	85.947.750.533	2.927.960.211
1	990331	Kab. Limapuluh Kota	23.215.410.777	1.268.199.784	18.168.904.240	2.623.739.907	22.060.843.931	1.154.566.846
2	990310	Kab. Agam	23.350.462.679	1.509.797.585	17.372.718.121	2.919.006.227	21.801.521.933	1.548.940.746
3	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	22.702.984.165	1.062.421.725	17.548.901.811	2.470.121.139	21.081.444.675	1.621.539.490
4	990352	Kab. Padang Pariaman	19.772.853.130	1.555.980.976	15.191.659.216	2.994.616.244	19.742.256.436	30.596.694
5	990324	Kab. Pasaman	21.105.220.188	1.208.807.614	16.809.866.941	2.570.167.462	20.588.842.017	516.378.171
6	990366	Kab. Pesisir Selatan	25.381.579.115	1.378.029.333	20.633.215.208	2.678.550.610	24.689.795.151	691.783.964
7	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	18.292.407.266	1.469.063.197	11.857.652.204	2.544.998.174	15.871.713.575	2.420.693.691
8	990345	Kab. Solok	22.285.269.714	1.339.878.214	18.053.962.839	2.550.330.711	21.944.171.764	341.097.950
9	990370	Kab. Tanah Datar	19.599.301.079	1.407.138.637	14.969.005.472	2.679.750.859	19.055.894.968	543.406.111
10	990391	Kota Bukit Tinggi	17.127.142.407	2.527.428.225	10.861.760.351	3.609.999.455	16.999.188.031	127.954.376

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
11	990409	Kota Padang Panjang	17.308.161.761	1.060.856.156	13.200.779.241	2.606.134.923	16.867.770.320	440.391.441
12	990434	Kota Padang	57.015.047.666	21.808.147.547	25.890.898.089	10.682.325.600	58.381.371.236	(1.366.323.570)
13	990441	Kota Payakumbuh	15.941.515.866	1.464.111.635	10.949.267.294	3.134.850.413	15.548.229.342	393.286.524
14	990420	Kota Sawahlunto	16.534.831.195	1.162.803.890	10.235.200.715	2.475.537.875	13.873.542.480	2.661.288.715
15	990413	Kota Solok	17.062.877.262	1.237.675.629	14.860.823.364	2.830.298.703	18.928.797.696	(1.865.920.434)
16	997611	Kota Pariaman	18.598.820.194	1.016.579.463	14.810.056.594	2.551.988.851	18.378.624.908	220.195.286
17	987595	Kab. Pasaman Barat	28.498.925.065	1.217.699.838	20.311.364.938	4.612.841.801	26.141.906.577	2.357.018.488
18	987574	Kab. Dharmasraya	24.993.826.703	1.258.715.756	19.016.922.327	5.357.220.577	25.632.858.660	(639.031.957)
19	987581	Kab. Solok Selatan	21.706.009.750	1.681.071.802	17.772.670.617	2.458.698.710	21.912.441.129	(206.431.379)
	990455	**Provinsi Riau**	420.955.663.063	118.662.526.174	266.734.458.094	8.344.522.525	393.741.506.793	27.214.156.270
1	990476	Kab. Bengkalis	301.565.350.846	39.290.312.201	240.434.150.773	2.997.107.509	282.721.570.483	18.843.780.363
2	990502	Kab. Indragiri Hilir	66.971.859.980	7.848.622.303	46.274.218.237	2.868.256.153	56.991.096.693	9.980.763.287
3	990497	Kab. Indragiri Hulu	88.948.949.521	7.179.676.146	70.176.275.589	2.983.205.289	80.339.157.024	8.609.792.497
4	990462	Kab. Kampar	145.866.538.089	8.733.231.024	115.231.927.178	5.764.366.332	129.729.524.534	16.137.013.555
5	980138	Kab. Kuantan Singingi	44.056.072.737	6.072.377.056	33.452.816.310	2.890.362.264	42.415.555.630	1.640.517.107
6	980074	Kab. Pelalawan	124.785.927.511	9.786.232.273	100.528.830.604	3.085.778.822	113.400.841.699	11.385.085.812
7	980095	Kab. Rokan Hilir	186.702.598.655	8.265.328.399	154.639.154.767	3.158.497.729	166.062.980.895	20.639.617.760
8	980081	Kab. Rokan Hulu	122.514.037.083	7.211.212.271	101.811.259.092	3.737.283.068	112.759.754.431	9.754.282.652
9	980100	Kab. Siak	193.198.544.592	19.528.818.625	160.769.679.934	6.101.465.872	186.399.964.431	6.798.580.161
10	980142	Kota Dumai	71.117.688.826	17.034.322.937	44.493.739.094	5.212.476.809	66.740.538.840	4.377.149.986
11	990519	Kota Pekanbaru	128.857.372.755	47.788.357.632	60.801.625.209	21.523.348.835	130.113.331.676	(1.255.958.921)
	998840	**Provinsi Kepulauan Riau**	168.906.698.310	68.908.686.591	159.727.876.391	21.980.882.827	250.617.445.809	(81.710.747.499)
1	990480	Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	56.664.981.511	9.076.353.296	43.093.597.134	4.592.934.874	56.762.885.304	(97.903.793)
2	980121	Kab. Natuna	182.826.119.144	10.243.370.066	148.278.193.231	2.493.220.137	161.014.783.434	21.811.335.710
3	980117	Kab. Karimun	43.374.053.687	6.300.566.003	11.519.030.402	3.284.942.396	21.104.538.801	22.269.514.886
4	990523	Kota Batam	179.325.689.011	63.429.985.269	22.894.271.561	81.233.250.547	167.557.507.377	11.768.181.634
5	994708	Kota Tanjung Pinang	44.704.039.620	8.843.130.580	27.938.653.761	8.504.167.523	45.285.951.864	(581.912.244)
6	987464	Kab. Lingga	32.659.653.897	5.469.624.666	26.622.235.694	2.493.740.536	34.585.600.896	(1.925.946.999)
	990530	**Provinsi Jambi**	150.935.098.572	17.813.702.546	111.461.628.304	9.409.883.475	138.685.214.325	12.249.884.247
1	990544	Kab. Batanghari	101.906.535.260	3.865.314.409	86.359.526.370	2.775.548.178	93.000.388.957	8.906.146.303
2	990565	Kab. Bungo	28.988.229.528	2.472.901.001	21.655.119.344	3.237.440.163	27.365.460.508	1.622.769.020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
3	990586	Kab. Kerinci	22.559.254.724	1.139.081.501	9.931.898.366	2.448.031.379	13.519.011.246	9.040.243.478
4	990572	Kab. Merangin	39.160.231.507	1.562.569.793	23.876.177.032	17.243.031.908	42.681.778.733	(3.521.547.226)
5	980184	Kab. Muaro Jambi	80.823.386.811	1.326.008.446	68.932.930.087	5.062.054.188	75.320.992.721	5.502.394.090
6	980163	Kab. Sarolangun	59.410.559.885	1.652.024.507	37.155.397.100	10.696.856.257	49.504.277.864	9.906.282.021
7	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	83.010.023.955	2.448.347.910	61.660.634.472	2.970.879.102	67.079.861.484	15.930.162.471
8	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	97.934.825.653	1.702.914.209	74.784.333.086	2.562.177.311	79.049.424.606	18.885.401.047
9	980170	Kab. Tebo	39.877.513.377	1.177.204.199	33.387.255.362	3.906.252.551	38.470.712.112	1.406.801.265
10	990590	Kota Jambi	64.639.928.604	9.568.907.988	43.149.399.569	11.169.353.066	63.887.660.623	752.267.981
	990608	**Provinsi Sumatera Selatan**	294.733.392.941	58.644.527.001	224.262.761.807	9.672.359.460	292.579.648.268	2.153.744.673
1	990661	Kab. Lahat	82.442.589.793	2.107.960.964	73.714.500.681	2.875.054.618	78.697.516.263	3.745.073.530
2	990633	Kab. Musi Banyuasin	210.312.742.994	7.808.974.461	198.666.691.004	7.057.610.709	213.533.276.174	(3.220.533.180)
3	990675	Kab. Musi Rawas	110.015.720.278	1.811.141.667	104.764.134.047	3.214.463.054	109.789.738.768	225.981.510
4	990654	Kab. Muara Enim	118.259.211.095	6.580.565.548	125.421.756.991	2.940.831.932	134.943.154.471	(16.683.943.376)
5	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	55.140.890.426	3.972.887.479	46.038.618.155	3.242.378.496	53.253.884.130	1.887.006.296
6	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	70.601.147.082	3.825.948.786	59.240.726.636	2.657.408.393	65.724.083.815	4.877.063.267
7	990696	Kota Palembang	131.102.385.766	38.338.059.752	70.454.024.652	27.802.373.861	136.594.458.265	(5.492.072.499)
8	994729	Kota Pagar Alam	30.925.506.002	1.953.977.646	24.378.375.066	2.533.391.656	28.865.744.368	2.059.761.634
9	994733	Kota Lubuk Linggau	32.211.794.572	2.622.835.889	23.731.872.560	3.766.049.054	30.120.757.503	2.091.037.069
10	994712	Kota Prabumulih	60.669.569.680	6.533.321.570	47.035.491.558	3.037.027.080	56.605.840.208	4.063.729.472
11	997557	Kab. Banyuasin	114.632.453.680	3.931.059.712	101.602.493.216	6.018.305.009	111.551.857.937	3.080.595.743
12	987560	Kab. Ogan Ilir	75.183.799.471	2.673.909.085	64.005.499.083	2.826.024.904	69.505.433.072	5.678.366.399
13	987549	Kab. OKU Timur	24.982.038.379	2.396.859.296	20.521.300.638	2.501.833.667	25.419.993.601	(437.955.222)
14	987553	Kab. OKU Selatan	25.447.312.185	2.275.179.973	21.902.424.606	2.464.545.507	26.642.150.086	(1.194.837.901)
15	963342	Kab. Empat Lawang	25.008.438.593	1.926.472.687	18.837.583.764	2.456.980.814	23.221.037.265	1.787.401.328
	993813	**Provinsi Bangka Belitung**	42.084.134.219	16.259.013.526	23.437.567.537	1.646.293.850	41.342.874.913	741.259.306
1	990629	Kab. Bangka	27.210.865.061	2.962.257.556	21.463.774.462	3.172.694.603	27.598.726.621	(387.861.560)
2	990612	Kab. Belitung	22.907.427.099	2.518.192.186	16.556.041.965	3.798.770.942	22.873.005.093	34.422.006
3	990701	Kota Pangkal Pinang	35.903.907.608	10.925.327.090	18.255.574.545	5.978.048.646	35.158.950.281	744.957.327
4	998189	Kab. Bangka Selatan	23.440.262.005	1.635.079.300	16.116.219.489	2.487.698.865	20.238.997.654	3.201.264.351
5	998172	Kab. Bangka Tengah	20.257.627.229	2.372.400.553	14.889.284.166	3.013.082.155	20.274.766.874	(17.139.645)
6	998168	Kab. Bangka Barat	22.245.426.989	2.077.472.052	18.565.232.532	2.603.155.168	23.245.859.752	(1.000.432.763)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
7	998193	Kab. Belitung Timur	21.073.544.075	1.897.791.548	16.070.666.593	2.656.903.527	20.625.361.668	448.182.407
	990718	**Provinsi Bengkulu**	39.211.202.753	8.028.545.032	28.373.724.905	1.119.808.968	37.522.078.905	1.689.123.848
1	990739	Kab. Bengkulu Selatan	16.650.418.170	945.547.724	12.715.958.858	2.647.688.507	16.309.195.089	341.223.081
2	990722	Kab. Bengkulu Utara	24.587.070.358	997.206.810	20.681.591.081	2.716.287.385	24.395.085.276	191.985.082
3	990743	Kab. Rejang Lebong	19.393.304.536	945.324.274	14.519.764.679	2.783.522.496	18.248.611.449	1.144.693.087
4	990750	Kota Bengkulu	24.947.146.243	6.549.449.109	12.680.936.829	5.925.857.268	25.156.243.206	(209.096.963)
5	998215	Kab. Kaur	22.781.299.869	587.677.838	19.551.235.163	2.460.045.217	22.598.958.218	182.341.651
6	998201	Kab. Seluma	21.406.174.035	830.259.297	17.528.823.382	2.494.692.804	20.853.775.483	552.398.552
7	998503	Kab. Mukomuko	23.740.111.083	769.180.129	17.703.225.904	2.459.281.211	20.931.687.244	2.808.423.839
8	987600	Kab. Lebong	23.313.113.315	618.244.183	19.564.003.132	2.483.444.209	22.665.691.524	647.421.791
9	987617	Kab. Kepahiang	20.128.095.066	665.751.900	16.789.945.264	2.526.503.654	19.982.200.818	145.894.248
	990764	**Provinsi Lampung**	93.443.936.059	24.070.443.192	61.196.308.954	6.747.238.742	92.013.990.888	1.429.945.171
1	990807	Kab. Lampung Barat	28.092.343.765	1.498.019.690	23.396.307.903	2.474.525.299	27.368.852.892	723.490.873
2	990771	Kab. Lampung Selatan	44.686.220.582	5.006.122.272	31.526.730.859	7.065.285.594	43.598.138.725	1.088.081.857
3	990785	Kab. Lampung Tengah	47.441.202.407	3.135.556.468	35.367.511.725	6.344.248.683	44.847.316.876	2.593.885.531
4	990792	Kab. Lampung Utara	32.760.750.370	1.902.393.432	25.124.767.507	3.187.760.071	30.214.921.010	2.545.829.360
5	980191	Kab. Lampung Timur	51.532.342.347	2.267.837.840	47.388.386.019	2.829.771.852	52.485.995.711	(953.653.364)
6	993351	Kab. Tanggamus	28.450.877.297	2.059.021.121	27.858.356.396	2.802.723.559	32.720.101.076	(4.269.223.779)
7	993347	Kab. Tulang Bawang	44.082.180.606	5.868.029.578	31.250.491.202	3.191.775.095	40.310.295.875	3.771.884.731
8	980206	Kab. Way Kanan	32.551.410.431	1.335.333.117	26.942.755.610	3.381.765.704	31.659.854.431	891.556.000
9	990811	Kota Bandar Lampung	55.412.762.377	12.103.633.879	27.806.594.106	14.777.575.513	54.687.803.498	724.958.879
10	980210	Kota Metro	19.570.117.744	2.583.488.062	12.509.146.260	5.458.559.953	20.551.194.275	(981.076.531)
	990828	**Provinsi DKI Jakarta**	8.400.535.217.295	5.034.015.948.856	1.915.905.941.322	1.564.307.185.957	8.514.229.076.135	(113.693.858.840)
	990881	**Provinsi Jawa Barat**	882.018.614.029	381.673.952.521	344.206.275.587	163.242.815.983	889.123.044.091	(7.104.430.062)
1	991003	Kab. Bandung	107.952.747.786	13.912.312.450	65.158.315.888	32.624.914.462	111.695.542.800	(3.742.795.014)
2	990963	Kab. Bekasi	374.867.793.126	112.817.354.653	166.881.218.377	119.710.574.538	399.409.147.568	(24.541.354.442)
3	990938	Kab. Bogor	232.109.808.130	40.791.334.015	99.588.973.226	77.624.716.406	218.005.023.647	14.104.784.483
4	991045	Kab. Ciamis	47.445.422.092	9.344.503.709	34.372.779.349	3.526.399.483	47.243.682.541	201.739.551
5	990959	Kab. Cianjur	86.110.931.958	10.013.566.316	51.082.813.350	13.133.906.517	74.230.286.183	11.880.645.775
6	991052	Kab. Cirebon	62.997.697.076	15.163.145.490	35.904.296.511	9.432.720.157	60.500.162.158	2.497.534.918
7	991024	Kab. Garut	56.238.605.365	10.767.801.048	51.562.946.849	4.801.993.647	67.132.741.544	(10.894.136.179)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
8	991070	Kab. Indramayu	151.933.963.176	16.148.408.592	382.498.881.216	20.493.690.436	419.140.980.244	(267.207.017.068)
9	990970	Kab. Karawang	214.463.015.789	42.053.757.087	137.228.206.979	26.110.296.358	205.392.260.424	9.070.755.365
10	991066	Kab. Kuningan	44.672.116.115	8.507.536.284	30.797.179.593	4.167.476.868	43.472.192.745	1.199.923.370
11	991087	Kab. Majalengka	75.899.985.235	8.605.997.125	59.204.563.972	3.645.516.885	71.456.077.982	4.443.907.253
12	990984	Kab. Purwakarta	85.675.874.114	18.696.795.642	43.145.954.871	7.557.693.587	69.400.444.100	16.275.430.014
13	990991	Kab. Subang	119.659.923.851	10.852.609.649	105.916.715.172	5.445.083.534	122.214.408.355	(2.554.484.504)
14	990942	Kab. Sukabumi	83.819.352.482	11.182.469.165	64.514.018.710	13.301.177.688	88.997.665.563	(5.178.313.081)
15	991010	Kab. Sumedang	50.403.351.071	8.585.916.025	24.327.956.923	5.162.532.622	38.076.405.570	12.326.945.501
16	991031	Kab. Tasikmalaya	46.301.925.456	8.703.720.583	35.979.955.065	3.218.194.423	47.901.870.071	(1.599.944.615)
17	991091	Kota Bandung	368.088.238.054	94.839.532.774	145.332.437.546	136.795.717.491	376.967.687.811	(8.879.449.757)
18	993330	Kota Bekasi	176.276.537.131	22.900.253.703	91.441.091.033	93.923.339.190	208.264.683.926	(31.988.146.795)
19	991109	Kota Bogor	100.304.534.126	21.212.505.755	36.886.317.787	30.808.358.064	88.907.181.606	11.397.352.520
20	991120	Kota Cirebon	49.385.260.840	13.463.627.509	25.198.160.120	14.156.182.750	52.817.970.379	(3.432.709.539)
21	980032	Kota Depok	135.502.475.433	21.510.060.391	53.893.223.623	55.816.540.978	131.219.824.992	4.282.650.441
22	991113	Kota Sukabumi	28.376.351.269	9.513.226.005	12.125.581.289	5.494.132.769	27.132.940.063	1.243.411.206
23	994754	Kota Cimahi	40.942.457.946	10.028.349.062	21.183.049.482	13.829.697.242	45.041.095.786	(4.098.637.840)
24	994740	Kota Tasikmalaya	37.847.951.633	11.324.740.403	21.578.362.948	5.564.236.264	38.467.339.615	(619.387.982)
25	998126	Kota Banjar	26.724.652.952	7.530.624.661	16.166.025.210	2.943.729.415	26.640.379.286	84.273.666
26	963302	Kab. Bandung Barat	69.252.109.732	12.376.325.350	31.166.953.460	20.650.059.760	64.193.338.570	5.058.771.162
	993809	**Provinsi Banten**	312.768.727.047	155.618.633.348	82.596.193.632	77.271.183.160	315.486.010.140	(2.717.283.093)
1	990917	Kab. Lebak	42.808.931.635	13.408.463.292	24.251.800.716	4.531.660.356	42.191.924.364	617.007.271
2	990900	Kab. Pandeglang	41.982.386.257	13.290.171.113	24.634.836.520	3.021.686.467	40.946.694.100	1.035.692.157
3	990895	Kab. Serang	96.963.115.683	30.084.502.393	45.445.342.512	14.600.270.719	90.130.115.624	6.833.000.059
4	990921	Kab. Tangerang	389.288.974.656	69.333.138.901	154.379.897.642	202.253.323.414	425.966.359.957	(36.677.385.301)
5	980049	Kota Cilegon	91.757.387.771	36.750.612.614	46.588.963.449	7.858.818.134	91.198.394.197	558.993.574
6	991134	Kota Tangerang	261.081.945.619	70.561.061.704	120.947.759.344	81.106.487.745	272.615.308.793	(11.533.363.174)
	991141	**Provinsi Jawa Tengah**	418.041.044.066	163.132.876.912	208.015.434.511	43.021.586.470	414.169.897.893	3.871.146.173
1	991329	Kab. Banjarnegara	38.367.858.979	4.082.932.701	31.014.122.096	4.209.131.882	39.306.186.679	(938.327.700)
2	991290	Kab. Banyumas	52.623.602.634	8.173.290.722	39.344.685.228	9.749.302.696	57.267.278.646	(4.643.676.012)
3	991202	Kab. Batang	30.998.927.918	3.566.518.275	25.510.583.039	9.137.651.443	38.214.752.757	(7.215.824.839)
4	991286	Kab. Blora	66.336.877.150	3.928.547.749	61.674.018.592	4.051.088.575	69.653.654.916	(3.316.777.766)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
5	991396	Kab. Boyolali	35.002.306.172	4.129.800.427	26.513.407.097	3.260.353.650	33.903.561.174	1.098.744.998
6	991223	Kab. Brebes	48.910.296.239	4.020.103.995	42.018.871.774	3.859.595.889	49.898.571.658	(988.275.419)
7	991308	Kab. Cilacap	72.859.000.245	14.682.284.691	50.143.565.428	6.377.817.880	71.203.667.999	1.655.332.246
8	991176	Kab. Demak	33.841.967.281	4.014.793.354	25.782.019.883	4.870.920.114	34.667.733.351	(825.766.070)
9	991180	Kab. Grobogan	50.405.249.002	4.046.188.723	44.593.785.987	3.565.397.995	52.205.372.705	(1.800.123.703)
10	991265	Kab. Jepara	45.092.961.884	4.983.665.441	32.310.549.781	10.974.363.705	48.268.578.927	(3.175.617.043)
11	991422	Kab. Karanganyar	37.850.225.803	4.821.862.324	23.299.769.218	8.575.296.715	36.696.928.257	1.153.297.546
12	991375	Kab. Kebumen	34.870.273.921	4.132.514.411	26.954.451.674	3.689.626.714	34.776.592.799	93.681.122
13	991162	Kab. Kendal	34.629.059.609	4.170.179.830	27.139.820.338	5.039.446.893	36.349.447.061	(1.720.387.452)
14	991382	Kab. Klaten	42.116.041.204	5.586.996.344	28.534.956.423	6.792.397.386	40.914.350.153	1.201.691.051
15	991244	Kab. Kudus	84.155.823.860	36.569.902.782	39.527.941.305	6.091.979.516	82.189.823.603	1.966.000.257
16	991333	Kab. Magelang	39.730.576.432	4.358.167.159	30.863.208.621	4.700.811.740	39.922.187.520	(191.611.088)
17	991230	Kab. Pati	40.149.520.308	4.887.503.854	31.148.071.606	6.148.548.749	42.184.124.209	(2.034.603.901)
18	991197	Kab. Pekalongan	30.018.299.044	2.640.216.295	24.177.870.217	3.882.791.281	30.700.877.793	(682.578.749)
19	991251	Kab. Pemalang	41.499.296.388	3.298.968.110	34.024.882.385	4.290.444.153	41.614.294.648	(114.998.260)
20	991312	Kab. Purbalingga	34.739.141.025	4.159.549.024	27.534.073.683	4.137.757.667	35.831.380.374	(1.092.239.349)
21	991361	Kab. Purworejo	33.107.219.368	4.471.490.771	26.089.284.806	3.566.938.759	34.127.714.336	(1.020.494.968)
22	991272	Kab. Rembang	33.732.843.424	3.151.594.830	28.126.887.544	3.317.530.806	34.596.013.180	(863.169.756)
23	991155	Kab. Semarang	42.175.087.129	5.403.514.937	26.585.258.825	12.098.104.772	44.086.878.534	(1.911.791.405)
24	991401	Kab. Sragen	32.558.412.372	3.493.213.077	25.060.998.037	3.472.689.395	32.026.900.509	531.511.863
25	991418	Kab. Sukoharjo	40.624.547.474	5.442.120.645	19.961.831.665	7.337.760.443	32.741.712.753	7.882.834.721
26	991219	Kab. Tegal	39.531.769.145	3.936.052.144	29.769.745.461	5.469.460.980	39.175.258.585	356.510.560
27	991340	Kab. Temanggung	25.388.148.122	3.385.172.237	19.447.136.163	3.472.339.779	26.304.648.179	(916.500.057)
28	991439	Kab. Wonogiri	32.349.005.251	4.639.712.589	23.104.417.335	3.048.250.210	30.792.380.134	1.556.625.117
29	991354	Kab. Wonosobo	32.926.362.425	3.306.452.470	22.909.855.866	3.174.321.137	29.390.629.473	3.535.732.952
30	991485	Kota Magelang	17.129.744.786	4.397.581.642	8.483.586.916	4.110.014.776	16.991.183.334	138.561.452
31	991464	Kota Pekalongan	25.995.730.023	4.782.317.951	15.141.137.624	5.342.657.208	25.266.112.783	729.617.240
32	991450	Kota Salatiga	20.261.905.548	3.790.390.011	9.978.267.319	5.827.000.152	19.595.657.482	666.248.066
33	991443	Kota Semarang	224.222.343.544	45.449.289.132	99.494.871.355	81.236.923.892	226.181.084.379	(1.958.740.835)
34	991492	Kota Surakarta	62.321.503.969	13.144.574.411	23.010.399.047	14.577.846.886	50.732.820.344	11.588.683.625
35	991471	Kota Tegal	24.101.846.647	5.166.109.479	12.036.354.418	5.691.799.641	22.894.263.538	1.207.583.109

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
	991507	**Provinsi DI Yogyakarta**	58.992.923.562	24.317.372.433	25.351.080.948	12.096.548.648	61.765.002.029	(2.772.078.467)
1	991511	Kab. Bantul	37.119.205.830	4.654.970.935	25.078.967.237	8.586.481.598	38.320.419.770	(1.201.213.940)
2	991532	Kab. Gunung Kidul	25.108.992.736	3.373.243.624	19.658.535.364	2.905.654.923	25.937.433.911	(828.441.175)
3	991549	Kab. Kulon Progo	22.215.979.644	3.282.510.813	16.100.649.534	3.152.581.314	22.535.741.661	(319.762.017)
4	991528	Kab. Sleman	79.068.985.145	11.990.977.490	45.244.004.798	28.499.701.288	85.734.683.576	(6.665.698.431)
5	991553	Kota Yogyakarta	59.839.420.251	13.174.355.784	30.402.349.610	17.457.595.397	61.034.300.791	(1.194.880.540)
	991560	**Provinsi Jawa Timur**	700.728.487.030	246.830.090.653	363.920.641.023	75.898.788.195	686.649.519.871	14.078.967.159
1	991642	Kab. Bangkalan	64.909.225.769	4.057.628.972	58.466.300.234	2.854.549.395	65.378.478.601	(469.252.832)
2	991670	Kab. Banyuwangi	52.590.947.249	5.194.380.373	41.474.549.236	5.365.653.932	52.034.583.541	556.363.708
3	991773	Kab. Blitar	37.997.856.468	4.081.893.876	30.874.785.547	3.994.307.164	38.950.986.587	(953.130.119)
4	991837	Kab. Bojonegoro	86.384.750.508	4.772.057.873	82.156.876.885	4.828.477.864	91.757.412.622	(5.372.662.114)
5	991659	Kab. Bondowoso	25.118.359.556	4.021.874.976	17.346.794.923	3.063.223.152	24.431.893.051	686.466.505
6	991574	Kab. Gresik	112.987.839.688	25.443.573.906	70.172.064.524	26.374.635.080	121.990.273.510	(9.002.433.822)
7	991684	Kab. Jember	62.549.015.487	8.766.783.418	40.837.661.203	7.113.784.066	56.718.228.687	5.830.786.800
8	991600	Kab. Jombang	49.908.865.554	5.435.610.525	40.032.559.495	4.453.493.700	49.921.663.720	(12.798.166)
9	991731	Kab. Kediri	54.109.004.180	5.190.254.986	45.673.712.753	6.346.833.411	57.210.801.150	(3.101.796.970)
10	991858	Kab. Lamongan	58.886.323.194	4.216.679.319	54.333.289.478	4.371.526.934	62.921.495.731	(4.035.172.537)
11	991727	Kab. Lumajang	34.022.410.951	5.409.367.150	24.135.901.072	3.727.280.987	33.272.549.209	749.861.742
12	991780	Kab. Madiun	32.870.084.925	4.055.376.379	26.899.775.779	3.453.992.172	34.409.144.330	(1.539.059.405)
13	991802	Kab. Magetan	28.651.708.271	3.213.816.118	23.292.494.728	3.219.943.459	29.726.254.305	(1.074.546.034)
14	991691	Kab. Malang	64.864.940.576	8.376.892.948	49.775.757.218	10.714.797.333	68.867.447.499	(4.002.506.923)
15	991581	Kab. Mojokerto	65.390.164.317	6.734.654.011	50.290.445.869	6.621.449.219	63.646.549.099	1.743.615.218
16	991752	Kab. Nganjuk	39.910.273.919	4.531.443.667	31.528.674.736	3.987.996.731	40.048.115.134	(137.841.215)
17	991794	Kab. Ngawi	35.388.843.712	3.266.001.603	29.406.524.824	3.295.692.009	35.968.218.436	(579.374.724)
18	991820	Kab. Pacitan	28.219.509.741	4.365.011.228	21.346.952.175	2.766.747.107	28.478.710.510	(259.200.769)
19	991621	Kab. Pamekasan	38.330.585.757	4.406.977.890	30.873.342.436	2.879.273.536	38.159.593.862	170.991.895
20	991706	Kab. Pasuruan	72.568.609.325	16.023.933.021	40.426.285.042	10.720.387.832	67.170.605.895	5.398.003.430
21	991816	Kab. Ponorogo	42.029.884.572	4.204.669.778	35.977.515.618	4.326.703.723	44.508.889.119	(2.479.004.547)
22	991710	Kab. Probolinggo	46.662.175.096	6.005.881.809	29.914.553.842	3.511.306.172	39.431.741.823	7.230.433.273
23	991617	Kab. Sampang	45.645.030.481	3.767.464.808	39.022.991.213	2.587.186.028	45.377.642.049	267.388.432
24	991595	Kab. Sidoarjo	202.779.455.452	25.401.705.595	129.736.522.290	43.447.859.205	198.586.087.090	4.193.368.362

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
25	991663	Kab. Situbondo	33.068.079.775	4.267.788.634	23.408.955.810	3.737.401.141	31.414.145.585	1.653.934.190
26	991638	Kab. Sumenep	112.729.718.607	5.157.247.668	103.849.800.577	2.943.326.678	111.950.374.923	779.343.684
27	991769	Kab. Trenggalek	32.414.516.543	4.285.185.553	25.855.649.101	3.425.175.330	33.566.009.984	(1.151.493.441)
28	991841	Kab. Tuban	82.817.408.425	5.024.747.346	72.304.922.463	4.607.598.627	81.937.268.436	880.139.989
29	991748	Kab. Tulungagung	41.080.167.140	4.997.959.090	32.505.176.337	7.436.603.491	44.939.738.918	(3.859.571.778)
30	991912	Kota Blitar	21.146.684.652	4.183.924.558	13.421.122.922	4.263.880.940	21.868.928.420	(722.243.768)
31	991926	Kota Kediri	40.154.916.568	18.284.285.453	15.541.737.001	7.580.214.038	41.406.236.492	(1.251.319.924)
32	991930	Kota Madiun	26.737.360.532	6.203.437.943	16.162.183.950	5.694.653.058	28.060.274.951	(1.322.914.419)
33	991883	Kota Malang	67.704.964.818	14.940.142.760	29.003.549.702	20.691.149.925	64.634.842.387	3.070.122.431
34	991879	Kota Mojokerto	23.882.407.647	5.141.897.772	14.011.463.880	3.940.975.641	23.094.337.293	788.070.354
35	991890	Kota Pasuruan	20.734.944.003	5.798.805.133	10.514.941.900	3.578.965.701	19.892.712.734	842.231.269
36	991905	Kota Probolinggo	29.528.132.575	5.154.941.858	24.025.862.198	4.308.235.298	33.489.039.354	(3.960.906.779)
37	991862	Kota Surabaya	595.055.441.679	112.983.519.171	269.580.121.196	178.818.216.924	561.381.857.291	33.673.584.388
38	994761	Kota Batu	23.090.112.069	3.527.582.719	14.979.743.687	4.126.396.977	22.633.723.383	456.388.686
	991947	**Provinsi Kalimantan Barat**	92.495.214.247	18.923.288.895	65.589.828.877	5.963.004.632	90.476.122.404	2.019.091.843
1	980227	Kab. Bengkayang	23.603.857.098	1.311.498.960	18.581.326.190	2.649.605.225	22.542.430.375	1.061.426.723
2	980231	Kab. Landak	31.865.410.432	1.627.548.750	26.936.333.381	2.624.827.968	31.188.710.099	676.700.333
3	991993	Kab. Kapuas Hulu	43.571.324.969	1.408.865.938	35.611.074.780	2.496.332.297	39.516.273.015	4.055.051.954
4	992008	Kab. Ketapang	34.057.970.029	2.326.780.694	29.807.145.549	4.678.783.025	36.812.709.268	(2.754.739.239)
5	991989	Kab. Pontianak	33.650.138.869	2.033.122.159	25.067.424.483	6.231.551.459	33.332.098.101	318.040.768
6	991951	Kab. Sambas	30.407.311.420	1.800.838.212	24.016.154.137	3.719.832.725	29.536.825.074	870.486.346
7	991968	Kab. Sanggau	37.117.604.228	2.315.642.134	28.764.927.951	3.111.228.215	34.191.798.300	2.925.805.928
8	991972	Kab. Sintang	37.124.598.293	1.711.839.504	32.131.940.970	3.224.071.829	37.067.852.303	56.745.990
9	992012	Kota Pontianak	49.690.883.667	9.037.671.990	24.247.206.909	14.453.302.224	47.738.181.123	1.952.702.544
10	994775	Kota Singkawang	20.683.400.792	1.523.406.744	13.777.063.101	4.609.411.467	19.909.881.312	773.519.480
11	987507	Kab. Sekadau	25.129.990.762	1.111.883.036	21.904.934.969	2.854.364.866	25.871.182.871	(741.192.109)
12	987492	Kab. Melawi	27.476.568.399	1.225.784.681	24.824.628.581	2.556.154.899	28.606.568.161	(1.129.999.762)
13	963358	Kab. Kayong Utara	18.039.805.849	950.050.529	14.675.805.179	2.446.454.099	18.072.309.807	(32.503.958)
	992029	**Provinsi Kalimantan Tengah**	112.372.719.130	17.225.620.120	85.291.926.762	2.725.872.067	105.243.418.949	7.129.300.181
1	992054	Kab. Barito Selatan	55.365.982.939	1.480.139.986	47.225.279.381	2.572.654.015	51.278.073.382	4.087.909.557
2	992040	Kab. Barito Utara	48.447.206.216	1.593.424.204	45.034.765.617	2.617.926.666	49.246.116.487	(798.910.271)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
3	992033	Kab. Kapuas	31.027.102.110	1.268.056.322	27.275.684.655	2.711.651.364	31.255.392.341	(228.290.231)
4	992075	Kab. Kotawaringin Barat	29.020.862.104	3.255.583.253	22.210.402.471	3.808.994.478	29.274.980.202	(254.118.098)
5	992061	Kab. Kotawaringin Timur	42.551.932.410	4.856.863.924	28.143.832.616	5.326.655.251	38.327.351.791	4.224.580.619
6	992082	Kota Palangkaraya	22.558.036.876	4.750.966.025	13.205.793.980	5.003.106.421	22.959.866.426	(401.829.550)
7	997540	Kab. Barito Timur	41.365.425.124	1.565.577.940	34.263.113.864	2.519.881.246	38.348.573.050	3.016.852.074
8	997536	Kab. Murung Raya	40.414.580.701	1.364.956.050	34.779.836.175	2.507.370.355	38.652.162.580	1.762.418.121
9	997522	Kab. Pulang Pisau	24.555.981.142	915.994.006	20.871.899.147	2.462.422.483	24.250.315.636	305.665.506
10	997515	Kab. Gunung Mas	31.367.558.097	1.156.824.006	25.326.355.040	4.334.166.781	30.817.345.827	550.212.270
11	997501	Kab. Lamandau	31.795.519.159	847.789.373	28.080.054.840	2.453.650.931	31.381.495.144	414.024.015
12	997493	Kab. Sukamara	32.539.239.745	669.318.246	26.456.844.870	2.471.982.995	29.598.146.111	2.941.093.634
13	997472	Kab. Katingan	27.954.227.004	1.080.404.592	23.077.185.675	2.474.123.614	26.631.713.881	1.322.513.123
14	997489	Kab. Seruyan	42.496.933.201	1.392.086.907	29.932.819.116	5.577.111.796	36.902.017.819	5.594.915.382
	992164	**Provinsi Kalimantan Selatan**	118.202.709.289	30.229.790.785	75.759.060.882	5.176.876.119	111.165.727.786	7.036.981.503
1	992171	Kab. Banjar	38.268.160.501	2.855.714.472	29.284.373.847	3.770.365.725	35.910.454.044	2.357.706.457
2	992228	Kab. Barito Kuala	25.323.543.791	1.926.904.988	19.698.438.973	2.697.304.682	24.322.648.643	1.000.895.148
3	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	26.261.742.460	1.712.322.402	20.854.167.354	2.682.412.460	25.248.902.216	1.012.840.244
4	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	26.256.958.902	1.990.662.209	20.525.404.446	2.756.312.545	25.272.379.200	984.579.702
5	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	40.817.689.989	1.872.790.501	32.012.765.289	2.623.290.907	36.508.846.697	4.308.843.292
6	992249	Kab. Kota Baru	42.025.079.264	7.058.113.635	31.136.779.998	2.805.626.109	41.000.519.742	1.024.559.522
7	992232	Kab. Tabalong	85.878.243.154	4.191.911.246	49.508.096.145	2.803.477.914	56.503.485.305	29.374.757.849
8	992185	Kab. Tanah Laut	33.092.627.429	2.978.176.433	25.663.269.335	8.980.496.552	37.621.942.320	(4.529.314.891)
9	992192	Kab. Tapin	30.054.449.165	1.497.025.754	25.574.135.089	2.570.582.179	29.641.743.022	412.706.143
10	980248	Kota Banjarbaru	25.829.499.312	3.714.163.013	15.777.569.504	4.851.397.368	24.343.129.885	1.486.369.427
11	992260	Kota Banjarmasin	45.571.345.512	10.950.839.663	19.704.614.778	10.390.605.392	41.046.059.833	4.525.285.679
12	998236	Kab. Balangan	46.028.823.713	1.805.226.160	38.692.331.597	2.488.175.081	42.985.732.838	3.043.090.875
13	998222	Kab. Tanah Bumbu	29.993.256.390	2.790.835.687	22.162.700.376	3.053.643.025	28.007.179.088	1.986.077.302
	992096	**Provinsi Kalimantan Timur**	561.092.870.656	190.674.975.593	334.113.516.340	20.320.803.459	545.109.295.392	15.983.575.264
1	992139	Kab. Berau	52.176.471.879	9.803.847.488	35.394.949.367	11.860.908.069	57.059.704.924	(4.883.233.045)
2	992122	Kab. Bulungan	117.800.691.955	8.368.253.344	101.529.980.583	2.821.122.304	112.719.356.231	5.081.335.724
3	992101	Kab. Kutai Kartanegara	505.728.577.790	17.174.922.205	481.970.372.841	3.736.463.578	502.881.758.624	2.846.819.166
4	980273	Kab. Kutai Barat	68.590.555.587	9.927.387.292	36.228.623.558	2.560.403.843	48.716.414.693	19.874.140.894

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
5	980280	Kab. Kutai Timur	171.198.735.003	22.887.161.070	133.959.862.186	4.693.793.402	161.540.816.658	9.657.918.345
6	980269	Kab. Malinau	60.638.712.236	7.529.091.970	49.397.396.712	2.453.472.593	59.379.961.275	1.258.750.961
7	980252	Kab. Nunukan	113.180.690.737	6.714.016.879	86.291.383.141	2.698.135.024	95.703.535.044	17.477.155.693
8	992118	Kab. Paser	59.008.197.221	11.179.902.156	37.552.263.187	2.983.089.492	51.715.254.835	7.292.942.386
9	992150	Kota Balikpapan	219.003.589.425	106.817.235.762	84.293.249.260	31.408.072.014	222.518.557.036	(3.514.967.611)
10	980294	Kota Bontang	145.108.637.522	40.856.051.453	94.893.477.539	5.121.288.956	140.870.817.948	4.237.819.574
11	992143	Kota Samarinda	139.329.092.340	26.777.169.924	98.407.003.211	36.179.654.102	161.363.827.237	(22.034.734.897)
12	941901	Kota Tarakan	138.571.280.761	11.008.824.587	118.120.361.534	3.951.218.041	133.080.404.162	5.490.876.599
13	997561	Kab. Penajam Paser Utara	106.262.967.865	6.968.599.251	88.553.343.828	2.618.285.728	98.140.228.807	8.122.739.058
	993021	**Provinsi Sulawesi Utara**	52.237.227.627	18.291.111.163	30.397.619.118	2.976.889.113	51.665.619.394	571.608.233
1	993059	Kab. Bolaang Mongondow	19.485.101.678	1.024.949.448	15.376.198.430	2.779.012.102	19.180.159.980	304.941.698
2	993042	Kab. Minahasa	23.374.420.658	1.710.591.750	17.218.102.027	3.676.835.490	22.605.529.267	768.891.391
3	993063	Kab. Sangihe	14.687.083.362	840.575.047	11.262.898.566	2.640.467.510	14.743.941.123	(56.857.761)
4	993091	Kota Bitung	24.812.069.969	1.925.695.218	17.751.556.408	4.227.218.838	23.904.470.464	907.599.505
5	993070	Kota Manado	44.586.764.068	14.257.653.820	18.191.160.922	9.364.514.558	41.813.329.300	2.773.434.768
6	997412	Kab. Kepulauan Talaud	21.292.356.979	809.845.981	17.344.445.889	2.501.209.987	20.655.501.857	636.855.122
7	998240	Kab. Minahasa Selatan	15.510.869.854	1.222.767.816	11.854.702.510	2.577.780.300	15.655.250.626	(144.380.772)
8	998257	Kota Tomohon	20.991.909.432	1.099.851.548	17.720.113.703	2.714.836.504	21.534.801.755	(542.892.323)
9	987485	Kab. Minahasa Utara	18.442.987.304	892.430.348	14.368.585.108	3.142.721.476	18.403.736.932	39.250.372
10	963395	Kota Kotamubagu	11.242.854.278	1.023.028.882	8.030.632.676	2.667.222.534	11.720.884.092	(478.029.814)
11	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	11.747.299.172	832.892.781	9.276.672.691	2.449.927.283	12.559.492.755	(812.193.583)
12	963389	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10.212.733.385	769.514.081	7.741.579.537	2.456.016.467	10.967.110.085	(754.376.700)
13	963415	Kab. Minahasa Tenggara	12.509.422.532	1.026.870.015	9.571.408.063	2.477.202.288	13.075.480.366	(566.057.834)
	993820	**Provinsi Gorontalo**	18.872.252.077	4.589.948.051	13.663.046.412	743.914.076	18.996.908.539	(124.656.462)
1	980302	Kab. Boalemo	20.537.092.504	657.942.258	17.185.844.367	2.577.480.244	20.421.266.869	115.825.635
2	993038	Kab. Gorontalo	16.565.356.969	1.212.971.966	12.561.073.021	2.918.389.866	16.692.434.853	(127.077.884)
3	993084	Kota Gorontalo	20.169.246.233	3.112.243.140	12.694.515.236	4.618.395.773	20.425.154.149	(255.907.916)
4	998261	Kab. Pohuwato	20.907.250.389	730.475.195	17.122.203.363	2.628.249.980	20.480.928.538	426.321.851
5	998278	Kab. Bone Bolango	22.578.955.873	804.832.382	19.011.361.564	2.453.983.983	22.270.177.929	308.777.944
6	963421	Kab. Gorontalo Utara	11.578.349.510	366.457.131	9.626.409.130	2.457.804.926	12.450.671.187	(872.321.677)
	992960	**Provinsi Sulawesi Tengah**	53.739.805.225	9.214.073.703	41.325.303.012	1.081.189.952	51.620.566.667	2.119.238.558

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
1	993000	Kab. Banggai	26.874.841.397	1.670.703.221	21.280.662.734	3.019.384.398	25.970.750.353	904.091.044
2	980337	Kab. Banggai Kepulauan	24.318.967.526	927.790.610	20.223.379.053	2.490.118.972	23.641.288.635	677.678.891
3	980316	Kab. Buol	22.224.978.832	618.256.335	18.729.466.084	3.033.795.316	22.381.517.735	(156.538.903)
4	992998	Kab. Toli-Toli	20.930.763.058	1.184.926.377	15.878.990.218	2.856.008.341	19.919.924.936	1.010.838.122
5	992981	Kab. Donggala	26.114.983.541	753.783.088	22.428.580.156	2.630.603.074	25.812.966.318	302.017.223
6	980320	Kab. Morowali	41.402.414.022	870.933.816	38.187.836.538	2.503.421.663	41.562.192.017	(159.777.995)
7	992977	Kab. Poso	26.608.246.589	1.112.851.707	22.809.764.515	2.880.225.674	26.802.841.896	(194.595.307)
8	993017	Kota Palu	23.528.617.978	5.144.761.167	11.121.803.101	4.114.970.649	20.381.534.917	3.147.083.061
9	997582	Kab. Parigi Moutong	25.475.217.354	914.896.952	20.311.734.299	2.700.713.831	23.927.345.082	1.547.872.272
10	987471	Kab. Tojo Una Una	23.736.876.748	622.207.272	20.283.616.143	2.560.058.884	23.465.882.299	270.994.449
	992722	**Provinsi Sulawesi Selatan**	178.202.156.897	53.976.905.804	108.753.461.031	13.021.384.592	175.751.751.427	2.450.405.470
1	992846	Kab. Bantaeng	26.182.167.883	1.294.721.944	21.608.070.585	2.625.090.169	25.527.882.698	654.285.185
2	992888	Kab. Barru	22.640.306.368	1.503.592.978	17.468.705.824	2.839.240.206	21.811.539.008	828.767.360
3	992778	Kab. Bone	39.370.783.482	1.808.470.444	31.787.600.694	3.339.555.201	36.935.626.339	2.435.157.143
4	992832	Kab. Bulukumba	26.980.758.410	1.936.334.484	24.402.908.978	3.330.753.877	29.669.997.339	(2.689.238.929)
5	992935	Kab. Enrekang	30.625.377.298	1.063.079.520	24.920.024.468	2.534.006.307	28.517.110.295	2.108.267.003
6	992740	Kab. G o w a	32.898.826.096	1.941.700.764	25.189.168.570	4.774.272.345	31.905.141.679	993.684.417
7	992850	Kab. Jeneponto	28.479.117.605	1.630.996.578	22.279.999.277	2.602.428.816	26.513.424.671	1.965.692.934
8	992811	Kab. Luwu	25.556.051.761	1.960.919.988	19.696.103.321	2.659.128.549	24.316.151.858	1.239.899.903
9	980341	Kab. Luwu Utara	30.974.126.913	1.581.787.196	26.885.553.908	2.637.527.437	31.104.868.541	(130.741.628)
10	992799	Kab. M a r o s *	25.501.804.229	2.968.061.556	18.062.851.478	4.164.332.963	25.195.245.997	306.558.232
11	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	25.711.754.236	2.517.615.931	19.388.637.929	2.817.205.231	24.723.459.091	988.295.145
12	992736	Kab. Pinrang	28.387.339.637	1.851.636.455	21.956.114.940	3.059.284.451	26.867.035.846	1.520.303.791
13	992867	Kab. Selayar	26.528.858.895	1.281.461.964	21.357.693.405	2.559.952.095	25.199.107.464	1.329.751.431
14	992892	Kab. Sidenreng Rappang	36.489.207.868	1.564.022.152	29.615.279.666	3.312.114.803	34.491.416.621	1.997.791.247
15	992825	Kab. Sinjai	26.123.649.946	1.489.534.670	20.536.679.886	2.837.229.888	24.863.444.444	1.260.205.502
16	992914	Kab. Soppeng	26.640.261.153	1.268.325.573	21.208.382.299	2.824.103.362	25.300.811.234	1.339.449.919
17	992871	Kab. Takalar	22.171.101.190	1.421.121.290	15.388.154.544	2.662.850.862	19.472.126.696	2.698.974.494
18	992782	Kab. Tana Toraja	27.463.375.748	1.983.991.692	21.278.269.797	2.663.024.986	25.925.286.475	1.538.089.273
19	992757	Kab. Wajo	66.931.150.918	1.431.302.783	57.239.657.996	3.128.118.866	61.799.079.645	5.132.071.273
20	992956	Kota Pare-pare	21.341.889.283	3.326.472.658	13.261.896.249	3.487.051.909	20.075.420.816	1.266.468.467

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
21	992942	Kota Makassar	121.993.728.837	28.367.591.309	54.762.544.475	37.798.891.059	120.929.026.843	1.064.701.994
22	997604	Kota Palopo	20.904.662.535	2.175.815.611	14.800.667.115	3.069.765.023	20.046.247.749	858.414.786
23	928282	Kab. Luwu Timur	36.978.256.152	14.596.801.143	31.588.010.131	2.773.357.157	48.958.168.431	(11.979.912.279)
	955383	**Provinsi Sulawesi Barat**	21.733.025.615	1.614.386.868	18.891.880.214	419.183.546	20.925.450.628	807.574.988
1	992804	Kab. Majene	24.303.311.949	418.069.851	20.582.430.862	2.532.810.160	23.533.310.873	770.001.076
2	992761	Kab. Mamuju	28.846.252.560	722.151.716	23.958.516.688	3.339.001.825	28.019.670.229	826.582.331
3	992921	Kab. Polewali Mandar	24.127.222.471	479.523.219	19.927.316.722	2.840.491.460	23.247.331.401	879.891.070
4	997599	Kab. Mamasa	21.057.420.663	373.030.874	17.689.021.189	2.476.172.182	20.538.224.245	519.196.418
5	998299	Kab. Mamuju Utara	26.226.694.875	488.801.451	24.628.661.018	2.726.007.397	27.843.469.866	(1.616.774.991)
	993106	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	45.076.300.077	8.553.431.957	37.045.537.920	1.270.769.821	46.869.739.698	(1.793.439.621)
1	993127	Kab. Buton	19.406.199.596	478.199.659	16.224.778.278	2.465.021.088	19.167.999.025	238.200.571
2	993110	Kab. Konawe	17.316.277.149	854.898.096	13.337.394.138	2.855.986.014	17.048.278.248	267.998.901
3	993148	Kab. Kolaka	28.534.890.847	1.991.929.988	33.882.774.702	2.688.991.421	38.563.696.111	(10.028.805.264)
4	993131	Kab. Muna	16.405.880.196	786.190.483	13.128.753.535	2.602.255.554	16.517.199.572	(111.319.376)
5	993326	Kota Kendari	28.134.610.867	5.389.822.217	17.320.864.843	5.820.493.503	28.531.180.563	(396.569.696)
6	994782	Kota Bau-bau	22.916.253.868	1.287.386.595	18.398.210.866	3.321.013.815	23.006.611.276	(90.357.408)
7	998304	Kab. Konawe Selatan	25.797.540.945	468.455.701	22.422.353.559	2.470.211.244	25.361.020.504	436.520.441
8	987642	Kab. Bombana	20.821.362.498	408.452.617	11.858.525.144	2.447.277.139	14.714.254.900	6.107.107.598
9	987638	Kab. Wakatobi	19.197.370.458	493.102.659	16.087.604.270	2.452.998.131	19.033.705.060	163.665.398
10	987443	Kab. Kolaka Utara	22.795.424.255	345.278.822	18.665.243.553	4.292.197.743	23.302.720.118	(507.295.863)
11	963364	Kab. Konawe Utara	15.620.825.549	468.455.701	13.085.798.698	2.446.454.099	16.000.708.498	(379.882.949)
12	963370	Kab. Buton Utara	11.070.605.232	478.199.659	8.042.954.770	2.446.454.099	10.967.608.528	102.996.704
	992274	**Provinsi Bali**	107.457.947.958	51.572.147.734	39.323.839.243	24.649.584.952	115.545.571.929	(8.087.623.971)
1	992342	Kab. Badung	109.706.825.279	19.812.863.832	50.509.948.311	53.677.618.181	124.000.430.324	(14.293.605.045)
2	992338	Kab. Bangli	20.559.387.791	3.351.713.029	14.413.761.441	2.876.378.164	20.641.852.634	(82.464.843)
3	992281	Kab. Buleleng	25.873.133.180	5.188.952.729	18.407.337.190	7.866.408.545	31.462.698.464	(5.589.565.284)
4	992317	Kab. Gianyar	24.779.894.918	5.654.262.401	13.456.194.667	7.242.694.459	26.353.151.527	(1.573.256.609)
5	992295	Kab. Jembrana	23.223.448.654	3.450.127.235	16.380.077.896	5.147.563.108	24.977.768.239	(1.754.319.585)
6	992321	Kab. Karangasem	24.860.670.991	4.743.847.260	16.249.172.464	3.474.244.065	24.467.263.789	393.407.202
7	992300	Kab. Klungkung	18.209.396.636	4.256.650.562	9.943.288.260	2.901.865.416	17.101.804.238	1.107.592.398
8	992359	Kab. Tabanan	25.592.134.157	4.261.138.256	16.657.264.469	6.314.482.273	27.232.884.998	(1.640.750.841)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
9	992363	Kota Denpasar	94.474.656.015	26.638.666.290	43.649.927.220	31.115.212.471	101.403.805.981	(6.929.149.966)
	992370	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	60.618.128.046	26.705.507.545	30.454.851.073	2.434.573.959	59.594.932.577	1.023.195.469
1	992410	Kab. Bima	20.203.830.283	1.636.827.082	14.927.275.830	2.533.812.508	19.097.915.420	1.105.914.863
2	992431	Kab. Dompu	19.124.716.450	2.052.869.023	13.516.873.760	2.584.896.800	18.154.639.583	970.076.867
3	992384	Kab. Lombok Barat	28.247.101.222	3.358.816.909	19.121.924.318	4.552.710.620	27.033.451.847	1.213.649.375
4	992391	Kab. Lombok Tengah	26.591.019.637	2.365.204.007	19.894.571.183	2.881.669.181	25.141.444.371	1.449.575.266
5	992406	Kab. Lombok Timur	28.541.224.419	3.100.600.687	20.746.291.307	2.755.010.478	26.601.902.472	1.939.321.947
6	992427	Kab. Sumbawa	28.192.168.262	2.503.387.481	23.624.929.379	3.050.015.261	29.178.332.121	(986.163.859)
7	992448	Kota Mataram	29.290.636.511	7.245.014.010	15.624.280.792	7.486.541.731	30.355.836.533	(1.065.200.022)
8	997625	Kota Bima	20.921.576.355	2.812.667.669	12.629.380.868	2.843.749.153	18.285.797.690	2.635.778.665
9	987450	Kab. Sumbawa Barat	36.851.021.621	15.230.543.602	21.639.250.360	2.517.289.418	39.387.083.380	(2.536.061.759)
	992452	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	59.730.819.727	13.685.754.638	39.036.958.972	1.343.128.202	54.065.841.812	5.664.977.915
1	992502	Kab. Alor	19.341.673.492	835.453.227	15.444.456.564	2.554.786.755	18.834.696.546	506.976.946
2	992473	Kab. Belu	20.877.605.495	1.123.860.262	16.973.878.063	3.002.680.059	21.100.418.384	(222.812.889)
3	992537	Kab. Ende	20.459.481.309	1.200.027.166	16.178.825.559	2.743.670.673	20.122.523.398	336.957.911
4	992520	Kab. Flores Timur	22.319.607.697	1.019.553.567	6.618.532.526	2.491.543.715	10.129.629.808	12.189.977.889
5	992469	Kab. Kupang	18.458.704.572	617.079.887	14.549.614.763	2.476.293.569	17.642.988.219	815.716.353
6	980379	Kab. Lembata	18.411.807.653	818.679.335	6.591.181.354	2.468.076.085	9.877.936.774	8.533.870.879
7	992558	Kab. Manggarai	22.626.979.371	968.765.966	19.055.928.658	2.680.215.953	22.704.910.577	(77.931.206)
8	992541	Kab. Ngada	13.843.488.705	771.897.682	10.770.867.010	2.483.785.715	14.026.550.407	(183.061.702)
9	992516	Kab. Sikka	18.605.154.113	1.786.705.978	13.415.572.172	2.868.714.599	18.070.992.749	534.161.364
10	992579	Kab. Sumba Barat	10.032.171.191	756.522.947	7.379.981.133	2.474.564.267	10.611.068.347	(578.897.156)
11	992562	Kab. Sumba Timur	23.986.302.471	810.574.098	19.904.912.374	2.622.695.910	23.338.182.382	648.120.089
12	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	22.324.501.377	888.832.103	18.210.837.817	2.550.294.345	21.649.964.265	674.537.112
13	992480	Kab. Timor Tengah Utara	22.113.152.213	847.725.215	18.235.484.428	2.485.544.221	21.568.753.864	544.398.349
14	993368	Kota Kupang	21.987.447.054	5.877.039.946	11.262.131.587	4.547.639.095	21.686.810.628	300.636.426
15	997578	Kab. Rote Ndao	19.622.904.154	463.882.381	16.130.365.223	2.464.416.597	19.058.664.201	564.239.953
16	998510	Kab. Manggarai Barat	18.443.514.093	613.375.648	15.258.290.274	2.573.051.350	18.444.717.272	(1.203.179)
17	963430	Kab. Nagekeo	12.082.052.273	528.784.428	9.457.011.347	2.449.494.099	12.435.289.874	(353.237.601)
18	963446	Kab. Sumba Barat Daya	12.402.046.055	335.660.446	10.217.460.419	2.489.491.483	13.042.612.348	(640.566.293)
19	963452	Kab. Sumba Tengah	10.893.841.798	363.632.524	8.718.399.648	2.447.205.523	11.529.237.695	(635.395.897)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
	993152	**Provinsi Maluku**	61.453.979.559	4.733.897.455	50.273.817.864	940.729.444	55.948.444.763	5.505.534.796
1	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	33.239.693.647	430.205.512	30.592.934.139	2.685.473.715	33.708.613.366	(468.919.719)
2	993169	Kab. Maluku Tengah	40.339.863.333	682.691.506	35.958.377.759	2.635.802.978	39.276.872.243	1.062.991.090
3	993173	Kab. Maluku Tenggara	32.547.832.982	659.617.048	27.439.582.077	2.562.331.651	30.661.530.776	1.886.302.206
4	980362	Kab. Pulau Buru	27.658.887.037	414.225.771	23.502.588.436	2.446.454.099	26.363.268.306	1.295.618.731
5	993202	Kota Ambon	30.506.484.790	3.880.328.764	18.180.931.070	5.889.928.704	27.951.188.538	2.555.296.252
6	987439	Kab. Seram Bagian Barat	27.619.558.335	587.098.764	21.965.501.524	4.288.105.577	26.840.705.865	778.852.470
7	987422	Kab. Seram Bagian Timur	64.715.600.324	275.879.545	60.143.988.400	2.446.454.099	62.866.322.044	1.849.278.280
8	987621	Kab. Kepulauan Aru	18.402.946.764	366.245.350	17.098.093.844	2.446.454.099	19.910.793.293	(1.507.846.529)
	980011	**Provinsi Maluku Utara**	51.636.850.282	8.256.185.211	40.990.681.284	81.072.370	49.327.938.865	2.308.911.417
1	993194	Kab. Halmahera Tengah	31.147.661.406	691.809.303	26.384.427.640	2.446.454.099	29.522.691.042	1.624.970.364
2	993180	Kab. Halmahera Barat	31.512.014.439	547.517.123	27.255.623.205	2.455.401.417	30.258.541.745	1.253.472.694
3	980028	Kota Ternate	40.381.209.726	4.370.785.832	27.343.960.525	2.662.090.941	34.376.837.298	6.004.372.428
4	998346	Kab. Halmahera Timur	34.564.910.647	880.508.456	24.262.918.514	2.446.454.099	27.589.881.069	6.975.029.578
5	998350	Kota Tidore Kepulauan	25.872.184.303	918.318.340	22.243.553.808	2.446.454.099	25.608.326.247	263.858.056
6	998332	Kab. Kepulauan Sula	27.294.266.749	641.857.678	23.140.382.023	2.447.809.427	26.230.049.128	1.064.217.621
7	998325	Kab. Halmahera Selatan	32.404.984.699	836.060.792	27.978.908.767	2.452.467.507	31.267.437.066	1.137.547.633
8	998311	Kab. Halmahera Utara	35.742.830.391	4.606.370.229	28.233.667.753	4.392.617.297	37.232.655.279	(1.489.824.888)
	993216	**Provinsi Papua**	205.816.609.249	64.573.301.479	129.359.868.286	2.328.494.327	196.261.664.092	9.554.945.157
1	993237	Kab. Biak Numfor	27.934.610.987	2.996.347.383	18.398.969.388	4.507.886.650	25.903.203.421	2.031.407.566
2	993220	Kab. Jayapura	35.965.083.080	2.123.324.347	28.661.929.716	5.219.535.043	36.004.789.106	(39.706.026)
3	993290	Kab. Jayawijaya	45.962.624.439	2.008.648.894	40.065.946.696	2.544.823.091	44.619.418.681	1.343.205.758
4	993283	Kab. Merauke	51.147.370.751	3.945.490.312	36.766.391.775	3.524.887.057	44.236.769.144	6.910.601.607
5	993401	Kab. Mimika	121.456.038.151	48.367.449.751	69.139.374.687	3.071.982.773	120.578.807.211	877.230.940
6	993305	Kab. Nabire	37.773.111.813	2.017.725.397	31.453.706.982	2.513.066.899	35.984.499.278	1.788.612.535
7	993393	Kab. Paniai	50.137.509.432	1.400.403.610	43.639.315.964	2.446.454.099	47.486.173.673	2.651.335.759
8	993389	Kab. Puncak Jaya	40.632.994.483	1.572.000.868	34.457.807.527	2.446.454.099	38.476.262.494	2.156.731.989
9	993258	Kab. Yapen Waropen	35.206.142.829	1.601.303.185	23.815.185.715	2.446.454.099	27.862.942.999	7.343.199.830
10	993312	Kota Jayapura	42.682.246.982	17.788.123.741	18.969.159.273	6.886.822.271	43.644.105.285	(961.858.303)
11	998392	Kab. Sarmi	35.061.161.522	1.459.197.813	26.052.459.353	2.456.551.891	29.968.209.057	5.092.952.465
12	998400	Kab. Keerom	32.599.528.496	1.585.632.336	27.999.627.958	2.448.160.019	32.033.420.313	566.108.183

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi				Sisa
				PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 4 - 8
13	998477	Kab. Yahukimo	33.836.979.815	1.423.240.519	30.105.257.349	2.446.454.099	33.974.951.967	(137.972.152)
14	998421	Kab. Pegunungan Bintang	38.778.981.040	1.699.957.847	33.906.615.485	2.446.454.099	38.053.027.431	725.953.609
15	998414	Kab. Tolikara	31.775.638.043	1.415.279.556	27.820.199.970	2.446.454.099	31.681.933.625	93.704.418
16	998388	Kab. Boven Digoel	40.706.490.174	1.608.274.337	33.382.253.919	2.446.454.099	37.436.982.355	3.269.507.819
17	998367	Kab. Mappi	38.062.059.983	1.460.573.627	31.149.107.321	2.446.454.099	35.056.135.047	3.005.924.936
18	998371	Kab. Asmat	34.243.229.132	1.762.704.795	25.770.412.888	2.446.454.099	29.979.571.782	4.263.657.350
19	998460	Kab. Waropen	39.846.004.578	1.385.601.764	34.838.716.231	2.446.454.099	38.670.772.094	1.175.232.484
20	987511	Kab. Supiori	22.101.219.946	1.386.411.943	17.926.029.198	2.446.454.099	21.758.895.240	342.324.706
21	963461	Kab. Mamberamo Raya	14.156.666.372	1.407.485.521	15.723.778.979	2.446.454.099	19.577.718.599	(5.421.052.227)
	998854	**Provinsi Papua Barat**	179.567.811.977	17.301.636.672	152.910.503.562	814.466.771	171.026.607.005	8.541.204.972
1	993262	Kab. Sorong	159.900.465.191	2.894.787.808	144.205.143.469	2.683.606.211	149.783.537.488	10.116.927.703
2	993241	Kab. Manokwari	102.086.101.299	2.816.576.344	88.858.506.004	3.118.963.763	94.794.046.111	7.292.055.188
3	993279	Kab. Fak Fak	46.209.775.218	1.140.417.780	44.681.133.897	2.591.374.003	48.412.925.680	(2.203.150.462)
4	980383	Kota Sorong	61.243.208.168	4.592.256.238	48.488.739.310	4.566.875.286	57.647.870.834	3.595.337.334
5	998442	Kab. Sorong Selatan	74.820.701.292	1.335.581.224	65.067.940.671	2.469.152.819	68.872.674.714	5.948.026.578
6	998456	Kab. Raja Ampat	72.317.583.178	1.124.950.191	70.267.776.709	2.446.454.099	73.839.180.999	(1.521.597.821)
7	998481	Kab. Teluk Bintuni	168.562.316.327	9.696.090.705	153.897.027.352	2.446.454.099	166.039.572.156	2.522.744.171
8	998498	Kab. Teluk Wondama	35.024.522.203	942.177.295	30.966.708.623	2.446.454.099	34.355.340.017	669.182.186
9	998435	Kab. Kaimana	48.809.594.880	1.409.617.416	39.871.883.045	2.456.972.051	43.738.472.512	5.071.122.368
Jumlah			**37.919.604.367.875**	**9.988.288.799.168**	**22.145.140.112.715**	**5.547.119.482.456**	**37.680.548.394.339**	**239.055.973.536**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
	990015	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	2.103.857.727.883	704.106.040.748	1.116.410.290.353	177.304.521	4.674.355.716	-	1.825.367.991.338	278.489.736.545
1	990078	Kab. Aceh Barat	20.128.781.423	3.532.670.322	13.146.146.255	15.034.815	424.941.428	140.043.762	17.258.836.582	2.869.944.841
2	990022	Kab. Aceh Besar	21.031.926.600	3.532.670.322	13.146.146.255	4.158.336	1.338.963.084	140.043.762	18.161.981.759	2.869.944.841
3	990061	Kab. Aceh Selatan	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
4	980007	Kab. Aceh Singkil	23.501.629.711	3.532.670.322	13.146.146.255	550.059	3.812.274.472	140.043.762	20.631.684.870	2.869.944.841
5	990082	Kab. Aceh Tengah	21.219.044.428	3.532.670.322	13.146.146.255	617.436.460	1.008.030.288	140.043.762	18.444.327.087	2.774.717.341
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	22.583.830.824	3.532.670.322	13.146.146.255	-	2.895.025.644	140.043.762	19.713.885.983	2.869.944.841
7	990057	Kab. Aceh Timur	29.441.282.163	3.348.200.578	12.965.939.606	-	2.697.586.350	140.043.762	19.151.770.296	10.289.511.867
8	990040	Kab. Aceh Utara	412.793.787.856	71.514.245.160	288.345.923.791	50.832.000	2.150.136.656	140.043.762	362.201.181.369	50.592.606.487
9	980053	Kab. Bireun	20.891.159.204	3.532.670.322	13.146.146.255	-	1.202.354.024	140.043.762	18.021.214.363	2.869.944.841
10	990036	Kab. Aceh Pidie	20.503.626.966	3.532.670.322	13.146.146.255	15.472.068	799.349.718	140.043.762	17.633.682.125	2.869.944.841
11	993372	Kab. Simeulue	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
12	990104	Kota Banda Aceh	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
13	990111	Kota Sabang	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
14	994672	Kota Langsa	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
15	994686	Kota Lhokseumawe	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
16	997451	Kab. Nagan Raya	20.120.121.008	3.532.670.322	13.146.146.255	6.374.400	424.941.428	140.043.762	17.250.176.167	2.869.944.841
17	997447	Kab. Aceh Jaya	20.355.812.912	3.532.670.322	11.999.723.873	-	667.007.732	140.043.762	16.339.445.689	4.016.367.223
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	21.027.738.840	3.532.670.322	13.719.357.446	-	1.338.933.660	140.043.762	18.731.005.190	2.296.733.650
19	997430	Kab. Gayo Lues	20.113.746.608	3.532.670.322	13.146.146.255	-	424.941.428	140.043.762	17.243.801.767	2.869.944.841
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	29.502.546.952	9.960.148.375	13.896.686.294	-	2.519.838.772	140.043.762	26.516.717.203	2.985.829.749
21	987532	Kab. Bener Meriah	20.696.894.302	3.532.670.322	13.146.146.255	-	1.008.089.122	140.043.762	17.826.949.461	2.869.944.841
22	963327	Kota Subulussalam	23.064.993.881	3.560.590.953	12.710.060.484	-	3.812.274.472	140.043.762	20.222.969.671	2.842.024.210
23	963311	Kab. Pidie Jaya	20.052.069.127	3.560.590.953	12.710.060.484	-	799.349.718	140.043.762	17.210.044.917	2.842.024.210
	990125	**Provinsi Sumatera Utara**	5.923.192.943	1.256.630.653	11.180.300	214.062.409	3.183.576.434	-	4.665.449.796	1.257.743.147
1	990221	Kab. Asahan	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
2	990192	Kab. Dairi	2.273.944.459	99.530.758	943.355	76.827.035	1.644.915.260	140.043.762	1.962.260.170	311.684.289
3	990132	Kab. Deli Serdang	1.141.789.288	114.405.756	47.605.365	-	254.686.114	140.043.762	556.740.997	585.048.291
4	990146	Kab. Tanah Karo	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
5	990188	Kab. Labuhan Batu	1.062.501.094	99.530.758	943.355	-	564.933.161	140.043.762	805.451.036	257.050.058
6	990150	Kab. Langkat	4.734.220.313	2.289.348.573	13.790.800	-	269.767.904	140.043.762	2.712.951.039	2.021.269.274
7	941915	Kab. Mandailing Natal	3.081.755.453	99.530.758	943.355	245.100.423	2.284.452.866	140.043.762	2.770.071.164	311.684.289
8	990235	Kab. Nias	919.306.328	99.530.758	943.355	2.103.040	365.001.124	140.043.762	607.622.039	311.684.289
9	990171	Kab. Simalungun	3.258.837.963	99.530.758	943.355	-	4.354.499.681	140.043.762	4.595.017.556	(1.336.179.593)
10	990214	Kab. Tapanuli Selatan	5.828.275.404	99.530.758	943.355	298.242.736	7.112.508.212	140.043.762	7.651.268.823	(1.822.993.419)
11	990167	Kab. Tapanuli Tengah	923.331.594	99.530.758	943.355	116.443.316	254.686.114	140.043.762	611.647.305	311.684.289
12	990200	Kab. Tapanuli Utara	2.317.691.132	99.530.758	943.355	51.343.112	1.714.145.856	140.043.762	2.006.006.843	311.684.289
13	941922	Kab. Toba Samosir	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
14	990260	Kota Binjai	1.446.453.523	308.568.242	551.600	-	254.686.114	140.043.762	703.849.718	742.603.805
15	990242	Kota Medan	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
16	990277	Kota Pematang Siantar	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
17	990298	Kota Sibolga	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
18	990281	Kota Tanjung Balai	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
19	990256	Kota Tebing Tinggi	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
20	994690	Kota Padang Sidempuan	859.915.510	99.530.758	943.355	53.027.232	254.686.114	140.043.762	548.231.221	311.684.289
21	998147	Kab. Pakpak Bharat	822.154.056	99.530.758	943.355	15.265.778	254.686.114	140.043.762	510.469.767	311.684.289
22	998130	Kab. Nias Selatan	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
23	998151	Kab. Humbang Hasundutan	5.032.758.612	99.530.758	943.355	5.764.480	6.112.728.648	140.043.762	6.359.011.003	(1.326.252.391)
24	987418	Kab. Serdang Bedagai	806.888.278	99.530.758	943.355	-	254.686.114	140.043.762	495.203.989	311.684.289
25	987528	Kab. Samosir	4.310.310.181	99.530.758	943.355	-	5.627.562.365	140.043.762	5.868.080.240	(1.557.770.059)
26	963333	Kab. Batu bara	806.496.523	124.527.619	551.600	-	254.686.114	140.043.762	519.809.095	286.687.428
	990303	**Provinsi Sumatera Barat**	1.762.487.595	-	-	1.011.685.062	1.013.384.619	-	2.025.069.681	(262.582.086)
1	990331	Kab. Limapuluh Kota	721.019.966	-	-	280.920.421	112.598.290	140.043.762	533.562.473	187.457.493
2	990310	Kab. Agam	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
3	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	5.590.787.583	-	-	76.150.687	5.972.901.144	140.043.762	6.189.095.593	(598.308.010)
4	990352	Kab. Padang Pariaman	587.739.849	-	-	76.150.687	182.030.307	140.043.762	398.224.756	189.515.093
5	990324	Kab. Pasaman	571.662.122	-	-	123.206.607	119.906.672	140.043.762	383.157.041	188.505.081
6	990366	Kab. Pesisir Selatan	608.475.683	-	-	89.107.887	195.627.703	140.043.762	424.779.352	183.696.331
7	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	586.685.309	-	-	143.055.419	114.071.035	140.043.762	397.170.216	189.515.093
8	990345	Kab. Solok	624.559.477	-	-	85.697.305	209.359.651	140.043.762	435.100.718	189.458.759
9	990370	Kab. Tanah Datar	519.680.223	-	-	76.150.687	114.342.414	140.043.762	330.536.863	189.143.360
10	990391	Kota Bukit Tinggi	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
11	990409	Kota Padang Panjang	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
12	990434	Kota Padang	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
13	990441	Kota Payakumbuh	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
14	990420	Kota Sawahlunto	1.566.316.652	-	-	1.218.977.099	113.067.202	140.043.762	1.472.088.063	94.228.589
15	990413	Kota Solok	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
16	997611	Kota Pariaman	518.307.832	-	-	76.150.687	112.598.290	140.043.762	328.792.739	189.515.093
17	987595	Kab. Pasaman Barat	527.107.818	-	-	76.150.687	124.112.231	140.043.762	340.306.680	186.801.138
18	987574	Kab. Dharmasraya	1.422.922.025	-	-	1.264.340.387	227.786.831	140.043.762	1.632.170.980	(209.248.955)
19	987581	Kab. Solok Selatan	1.733.482.551	-	-	76.150.687	1.327.773.009	140.043.762	1.543.967.458	189.515.093
	990455	**Provinsi Riau**	2.375.386.946.717	2.059.444.570.217	86.645.552.142	3.210.004.927	14.866.058.048	-	2.164.166.185.334	211.220.761.383
1	990476	Kab. Bengkalis	2.349.575.197.445	2.127.293.821.941	82.648.577.270	618.431.216	8.016.194.240	140.043.762	2.218.717.068.429	130.858.129.016
2	990502	Kab. Indragiri Hilir	476.926.325.465	411.888.914.106	17.329.060.428	827.725.115	5.057.756.566	140.043.762	435.243.499.977	41.682.825.488
3	990497	Kab. Indragiri Hulu	488.225.543.561	417.019.406.667	17.509.574.013	5.361.846.405	4.114.770.740	140.043.762	444.145.641.587	44.079.901.974
4	990462	Kab. Kampar	987.414.567.652	826.986.341.176	36.344.700.850	688.851.760	8.029.118.504	140.043.762	872.189.056.052	115.225.511.600
5	980138	Kab. Kuantan Singingi	478.644.061.946	411.888.914.106	17.329.060.428	1.367.066.002	5.594.373.040	140.043.762	436.319.457.338	42.324.604.608
6	980074	Kab. Pelalawan	495.475.951.282	421.096.030.979	17.975.021.159	601.656.989	11.695.538.868	140.043.762	451.508.291.757	43.967.659.525
7	980095	Kab. Rokan Hilir	1.327.079.450.491	1.121.137.565.177	49.278.129.241	596.506.864	4.816.441.016	140.043.762	1.175.968.686.060	151.110.764.431
8	980081	Kab. Rokan Hulu	490.302.807.576	428.753.169.392	17.975.039.935	598.554.864	3.541.889.668	140.043.762	451.008.697.621	39.294.109.955

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
9	980100	Kab. Siak	1.470.790.559.141	1.247.917.662.579	55.128.213.910	840.345.484	13.544.454.921	140.043.762	1.317.570.720.656	153.219.838.485
10	980142	Kota Dumai	475.484.064.291	411.888.914.106	17.329.060.427	596.506.864	3.054.118.723	140.043.762	433.008.643.882	42.475.420.409
11	990519	Kota Pekanbaru	475.804.476.072	411.907.541.159	17.735.270.900	596.506.864	2.973.068.504	140.043.762	433.352.431.189	42.452.044.883
	998840	**Provinsi Kepulauan Riau**	459.071.591.289	266.982.275.935	281.376.405.026	17.745.107.205	1.053.691	-	566.104.841.857	(107.033.250.568)
1	990480	Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	187.716.900.320	106.645.387.929	106.536.255.580	16.503.954.780	421.476	140.043.762	229.826.063.527	(42.109.163.207)
2	980121	Kab. Natuna	793.433.451.959	535.216.815.393	407.454.839.588	6.475.989.789	421.476	140.043.762	949.288.110.008	(155.854.658.049)
3	980117	Kab. Karimun	188.445.810.873	106.645.387.929	106.536.255.580	15.462.825.560	25.171.349	140.043.762	228.809.684.180	(40.363.873.307)
4	990523	Kota Batam	179.438.535.925	106.645.387.929	106.536.255.580	6.475.669.789	4.257.772	140.043.762	219.801.614.832	(40.363.078.907)
5	994708	Kota Tanjung Pinang	182.739.957.338	106.645.387.929	106.536.255.580	10.057.631.798	421.476	140.043.762	223.379.740.545	(40.639.783.207)
6	987464	Kab. Lingga	180.067.974.694	106.645.387.929	106.536.255.580	7.110.480.854	421.476	140.043.762	220.432.589.601	(40.364.614.907)
	990530	**Provinsi Jambi**	119.206.007.291	69.936.242.514	60.671.779.984	2.254.249.616	8.324.705.390	-	141.186.977.504	(21.980.970.213)
1	990544	Kab. Batanghari	34.899.100.439	17.302.774.839	12.922.149.453	1.083.065.994	7.824.420.356	140.043.762	39.272.454.404	(4.373.353.965)
2	990565	Kab. Bungo	29.754.846.258	15.541.387.070	13.482.617.698	3.925.111.368	2.226.731.804	140.043.762	35.315.891.702	(5.561.045.444)
3	990586	Kab. Kerinci	26.811.110.486	15.541.387.070	13.482.617.698	458.775.594	1.850.911.306	140.043.762	31.473.735.430	(4.662.624.944)
4	990572	Kab. Merangin	27.312.387.266	15.541.387.070	13.482.617.698	520.461.354	2.341.179.857	140.043.762	32.025.689.741	(4.713.302.475)
5	980184	Kab. Muaro Jambi	34.832.173.980	21.877.567.283	15.180.310.087	486.543.914	1.899.813.841	140.043.762	39.584.278.887	(4.752.104.907)
6	980163	Kab. Sarolangun	36.067.295.727	21.524.922.474	15.578.094.606	649.340.137	2.200.500.541	140.043.762	40.092.901.520	(4.025.605.793)
7	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	155.891.353.685	89.963.530.644	89.814.190.648	501.668.550	7.119.844.253	140.043.762	187.539.277.857	(31.647.924.172)
8	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	80.937.484.211	53.169.914.922	42.941.880.195	458.775.594	8.934.220.246	140.043.762	105.644.834.719	(24.707.350.508)
9	980170	Kab. Tebo	29.104.418.869	15.370.292.440	13.573.622.295	519.126.314	5.748.169.914	140.043.762	35.351.254.725	(6.246.835.856)
10	990590	Kota Jambi	31.719.337.902	19.505.115.879	14.511.010.399	458.775.594	1.869.317.886	140.043.762	36.484.263.520	(4.764.925.618)
	990608	**Provinsi Sumatera Selatan**	564.324.696.569	226.028.082.514	364.526.717.232	32.607.355.595	6.724.688.040	-	629.886.843.381	(65.562.146.812)
1	990661	Kab. Lahat	105.439.077.840	39.370.496.760	54.438.766.124	19.597.979.173	2.504.625.236	140.043.762	116.051.911.055	(10.612.833.215)
2	990633	Kab. Musi Banyuasin	757.290.593.518	304.976.847.718	542.788.608.201	6.423.243.406	20.226.964.298	140.043.762	874.555.707.385	(117.265.113.867)
3	990675	Kab. Musi Rawas	253.663.822.076	82.185.749.450	191.151.598.560	4.788.161.032	4.129.472.924	140.043.762	282.395.025.728	(28.731.203.652)
4	990654	Kab. Muara Enim	200.417.862.875	81.911.015.124	65.058.418.455	49.197.583.166	989.257.051	140.043.762	197.296.317.558	3.121.545.317
5	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	80.792.185.977	32.373.720.394	52.118.286.835	4.523.265.084	781.801.148	140.043.762	89.937.117.223	(9.144.931.246)
6	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	107.190.147.953	51.614.133.589	58.047.641.282	4.990.450.063	1.899.368.820	140.043.762	116.691.637.516	(9.501.489.563)
7	990696	Kota Palembang	80.792.185.977	32.373.720.394	52.118.286.835	4.523.265.084	781.801.148	140.043.762	89.937.117.223	(9.144.931.246)
8	994729	Kota Pagar Alam	80.792.185.977	32.373.720.394	52.118.286.835	4.523.265.084	781.801.148	140.043.762	89.937.117.223	(9.144.931.246)
9	994733	Kota Lubuk Linggau	80.792.185.977	32.373.720.394	52.118.286.835	4.523.265.084	781.801.148	140.043.762	89.937.117.223	(9.144.931.246)
10	994712	Kota Prabumulih	92.939.045.906	39.087.038.843	56.479.515.061	4.523.265.084	781.801.148	140.043.762	101.011.663.898	(8.072.617.992)
11	997557	Kab. Banyuasin	104.804.884.253	51.155.901.035	57.257.183.766	4.695.553.878	799.196.764	140.043.762	114.047.879.205	(9.242.994.952)
12	987560	Kab. Ogan Ilir	84.129.879.382	34.645.238.987	53.064.151.563	4.526.410.684	781.801.148	140.043.762	93.157.646.144	(9.027.766.762)
13	987549	Kab. OKU Timur	81.989.143.786	32.373.720.394	52.118.286.835	4.602.655.221	1.899.368.820	140.043.762	91.134.075.032	(9.144.931.246)
14	987553	Kab. OKU Selatan	81.935.349.991	32.373.720.394	52.118.286.835	4.548.865.084	1.899.365.162	140.043.762	91.080.281.237	(9.144.931.246)
15	963342	Kab. Empat Lawang	80.736.503.729	31.197.798.710	51.515.702.183	4.523.265.084	2.504.625.236	140.043.762	89.881.434.975	(9.144.931.246)
	993813	**Provinsi Bangka Belitung**	91.513.181.989	13.917.294.716	-	92.052.082.715	51.024.506	-	106.020.401.937	(14.507.219.948)
1	990629	Kab. Bangka	67.595.527.135	3.976.369.291	-	75.671.928.732	49.586.059	140.043.762	79.837.927.844	(12.242.400.709)
2	990612	Kab. Belitung	41.893.525.922	3.976.369.291	-	42.402.036.967	54.619.011	140.043.762	46.573.069.031	(4.679.543.109)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
3	990701	Kota Pangkal Pinang	29.070.865.596	3.976.369.291	-	29.512.026.184	17.008.168	140.043.762	33.645.447.405	(4.574.581.809)
4	998189	Kab. Bangka Selatan	52.449.900.405	3.976.369.291	-	55.638.051.327	24.364.134	140.043.762	59.778.828.514	(7.328.928.109)
5	998172	Kab. Bangka Tengah	46.731.048.966	3.976.369.291	-	49.984.290.488	20.096.434	140.043.762	54.120.799.975	(7.389.751.009)
6	998168	Kab. Bangka Barat	63.274.617.605	3.976.369.291	-	68.041.155.178	116.399.483	140.043.762	72.273.967.714	(8.999.350.109)
7	998193	Kab. Belitung Timur	41.952.025.863	3.976.369.291	-	46.958.841.771	80.916.248	140.043.762	51.156.171.072	(9.204.145.209)
	990718	**Provinsi Bengkulu**	2.088.543.339	-	-	2.476.854.399	129.501.540	-	2.606.355.939	(517.812.600)
1	990739	Kab. Bengkulu Selatan	853.817.362	-	-	595.172.269	32.375.384	140.043.762	767.591.415	86.225.947
2	990722	Kab. Bengkulu Utara	4.000.963.552	-	-	4.651.873.759	32.375.384	140.043.762	4.824.292.905	(823.329.353)
3	990743	Kab. Rejang Lebong	851.816.892	-	-	596.050.599	32.375.384	140.043.762	768.469.745	83.347.147
4	990750	Kota Bengkulu	849.018.300	-	-	590.373.207	32.375.384	140.043.762	762.792.353	86.225.947
5	998215	Kab. Kaur	851.855.296	-	-	593.210.203	32.375.384	140.043.762	765.629.349	86.225.947
6	998201	Kab. Seluma	1.869.273.683	-	-	1.120.988.414	536.858.460	140.043.762	1.797.890.636	71.383.047
7	998503	Kab. Mukomuko	1.353.501.376	-	-	599.368.507	536.858.460	140.043.762	1.276.270.729	77.230.647
8	987600	Kab. Lebong	849.018.300	-	-	607.995.307	32.375.384	140.043.762	780.414.453	68.603.847
9	987617	Kab. Kepahiang	850.349.500	-	-	591.704.407	32.375.384	140.043.762	764.123.553	86.225.947
	990764	**Provinsi Lampung**	127.495.379.152	134.917.007.643	-	113.326.782	677.813.792	-	135.708.148.217	(8.212.769.065)
1	990807	Kab. Lampung Barat	26.480.886.703	27.636.091.466	-	22.937.828	150.625.286	140.043.762	27.949.698.342	(1.468.811.639)
2	990771	Kab. Lampung Selatan	27.518.564.791	27.636.091.466	-	14.920.960	1.194.906.942	140.043.762	28.985.963.130	(1.467.398.339)
3	990785	Kab. Lampung Tengah	26.459.708.841	27.636.091.466	-	57.439.966	150.625.286	140.043.762	27.984.200.480	(1.524.491.639)
4	990792	Kab. Lampung Utara	26.459.708.841	27.636.091.466	-	1.759.966	150.625.286	140.043.762	27.928.520.480	(1.468.811.639)
5	980191	Kab. Lampung Timur	75.613.938.176	79.851.292.673	-	1.759.966	150.625.286	140.043.762	80.143.721.687	(4.529.783.511)
6	993351	Kab. Tanggamus	26.810.179.888	27.636.091.466	-	351.591.013	150.625.286	140.043.762	28.278.351.527	(1.468.171.639)
7	993347	Kab. Tulang Bawang	26.497.318.129	27.636.091.466	-	1.759.966	188.234.574	140.043.762	27.966.129.768	(1.468.811.639)
8	980206	Kab. Way Kanan	26.585.574.372	27.636.091.466	-	4.514.143	273.736.640	140.043.762	28.054.386.011	(1.468.811.639)
9	990811	Kota Bandar Lampung	26.459.708.841	27.636.091.466	-	1.759.966	150.625.286	140.043.762	27.928.520.480	(1.468.811.639)
10	980210	Kota Metro	26.459.708.841	27.636.091.466	-	1.759.966	150.625.286	140.043.762	27.928.520.480	(1.468.811.639)
	990828	**Provinsi DKI Jakarta**	182.150.843.965	165.026.866.575	11.717.893.500	-	-	840.263.338	177.585.023.413	4.565.820.552
	990881	**Provinsi Jawa Barat**	111.222.498.762	80.222.595.473	8.910.603.287	4.850.920.701	3.338.692.640	-	97.322.812.101	13.899.686.661
1	991003	Kab. Bandung	9.418.185.526	6.256.862.750	693.972.323	392.937.100	569.652.986	140.043.762	8.053.468.921	1.364.716.605
2	990963	Kab. Bekasi	58.632.629.538	40.931.574.511	876.817.729	410.404.762	267.095.410	140.043.762	42.625.936.174	16.006.693.364
3	990938	Kab. Bogor	16.727.454.793	6.256.862.750	693.972.323	9.687.705.273	315.640.186	140.043.762	17.094.224.294	(366.769.501)
4	991045	Kab. Ciamis	11.461.210.356	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	2.931.242.281	140.043.762	10.407.553.240	1.053.657.116
5	990959	Kab. Cianjur	10.781.440.018	6.256.862.750	693.972.323	404.632.124	2.047.304.128	140.043.762	9.542.815.087	1.238.624.931
6	991052	Kab. Cirebon	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	274.444.877	140.043.762	7.750.755.836	1.330.597.928
7	991024	Kab. Garut	9.809.214.938	6.256.862.750	693.972.323	394.133.870	959.485.628	140.043.762	8.444.498.333	1.364.716.605
8	991070	Kab. Indramayu	26.877.399.670	20.162.042.760	796.755.014	385.432.124	642.207.112	140.043.762	22.126.480.772	4.750.918.898
9	990970	Kab. Karawang	28.902.298.082	14.006.940.822	3.326.888.570	385.432.124	271.526.846	140.043.762	18.130.832.124	10.771.465.958
10	991066	Kab. Kuningan	9.350.332.346	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	509.304.782	140.043.762	7.985.615.741	1.364.716.605
11	991087	Kab. Majalengka	9.873.193.069	6.795.483.879	712.114.536	385.432.124	396.449.292	140.043.762	8.429.523.593	1.443.669.476
12	990984	Kab. Purwakarta	9.404.658.050	6.256.862.750	693.972.323	386.059.324	618.762.094	140.043.762	8.095.700.253	1.308.957.797

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
13	990991	Kab. Subang	19.961.538.721	7.656.400.541	1.537.933.280	385.432.124	267.768.637	140.043.762	9.987.578.344	9.973.960.377
14	990942	Kab. Sukabumi	9.371.934.883	6.256.862.750	693.972.323	432.224.400	550.102.043	140.043.762	8.073.205.278	1.298.729.605
15	991010	Kab. Sumedang	9.399.516.311	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	620.584.817	140.043.762	8.096.895.776	1.302.620.535
16	991031	Kab. Tasikmalaya	9.444.253.696	6.256.862.750	693.972.323	387.244.156	601.414.100	140.043.762	8.079.537.091	1.364.716.605
17	991091	Kota Bandung	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	267.095.410	140.043.762	7.743.406.369	1.337.947.395
18	993330	Kota Bekasi	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	360.459.486	267.095.410	140.043.762	7.718.433.731	1.362.920.033
19	991109	Kota Bogor	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	267.095.410	140.043.762	7.743.406.369	1.337.947.395
20	991120	Kota Cirebon	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	267.095.410	140.043.762	7.743.406.369	1.337.947.395
21	980032	Kota Depok	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	267.095.410	140.043.762	7.743.406.369	1.337.947.395
22	991113	Kota Sukabumi	9.084.007.355	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	269.749.001	140.043.762	7.746.059.960	1.337.947.395
23	994754	Kota Cimahi	9.081.353.764	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	267.095.410	140.043.762	7.743.406.369	1.337.947.395
24	994740	Kota Tasikmalaya	9.103.355.833	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	290.637.156	140.043.762	7.766.948.115	1.336.407.718
25	998126	Kota Banjar	9.238.433.698	6.256.862.750	693.972.323	385.432.124	527.604.991	140.043.762	8.003.915.950	1.234.517.748
26	963302	Kab. Bandung Barat	9.369.494.828	6.627.992.355	653.771.992	384.446.733	569.652.986	140.043.762	8.375.907.828	993.587.000
	993809	**Provinsi Banten**	884.636.641	-	-	340.435.623	686.918.195	-	1.027.353.818	(142.717.177)
1	990917	Kab. Lebak	1.358.123.993	-	-	778.558.685	383.987.701	140.043.762	1.302.590.148	55.533.845
2	990900	Kab. Pandeglang	1.501.882.152	-	-	117.322.839	1.264.615.967	140.043.762	1.521.982.568	(20.100.416)
3	990895	Kab. Serang	764.495.500	-	-	116.636.759	297.749.332	140.043.762	554.429.853	210.065.647
4	990921	Kab. Tangerang	694.970.735	-	-	116.636.759	274.767.278	140.043.762	531.447.799	163.522.936
5	980049	Kota Cilegon	694.970.735	-	-	116.636.759	274.767.278	140.043.762	531.447.799	163.522.936
6	991134	Kota Tangerang	694.970.735	-	-	116.636.759	274.767.278	140.043.762	531.447.799	163.522.936
	991141	**Provinsi Jawa Tengah**	6.649.722.004	971.021.739	-	188.406.308	5.556.384.206	-	6.715.812.253	(66.090.249)
1	991329	Kab. Banjarnegara	765.212.257	57.118.968	-	10.806.984	356.130.622	140.043.762	564.100.336	201.111.921
2	991290	Kab. Banyumas	821.601.105	57.118.968	-	10.806.984	425.581.790	140.043.762	633.551.504	188.049.601
3	991202	Kab. Batang	1.329.432.329	57.118.968	-	10.806.984	968.693.100	140.043.762	1.176.662.814	152.769.515
4	991286	Kab. Blora	9.633.672.151	1.942.027.746	-	10.806.984	6.566.555.889	140.043.762	8.659.434.381	974.237.770
5	991396	Kab. Boyolali	850.922.797	57.118.968	-	10.806.984	444.776.163	140.043.762	652.745.877	198.176.920
6	991223	Kab. Brebes	1.252.215.241	57.118.968	-	10.806.984	888.190.978	140.043.762	1.096.160.692	156.054.549
7	991308	Kab. Cilacap	968.107.239	57.118.968	-	16.190.762	565.281.210	140.043.762	778.634.702	189.472.537
8	991176	Kab. Demak	742.629.817	57.118.968	-	10.806.984	328.483.304	140.043.762	536.453.018	206.176.799
9	991180	Kab. Grobogan	1.293.832.204	57.134.700	-	10.806.984	954.360.967	140.043.762	1.162.346.413	131.485.791
10	991265	Kab. Jepara	748.952.416	57.118.968	-	10.806.984	336.727.596	140.043.762	544.697.310	204.255.106
11	991422	Kab. Karanganyar	744.334.442	57.118.968	-	10.806.984	330.187.183	140.043.762	538.156.897	206.177.545
12	991375	Kab. Kebumen	759.235.927	57.118.968	-	10.806.984	350.094.151	140.043.762	558.063.865	201.172.062
13	991162	Kab. Kendal	1.066.239.766	57.118.968	-	10.806.984	710.693.835	140.043.762	918.663.549	147.576.217
14	991382	Kab. Klaten	741.245.923	57.118.968	-	10.806.984	327.098.664	140.043.762	535.068.378	206.177.545
15	991244	Kab. Kudus	741.401.112	57.118.968	-	10.806.984	327.327.605	140.043.762	535.297.319	206.103.793
16	991333	Kab. Magelang	743.868.744	57.118.968	-	10.806.984	330.323.723	140.043.762	538.293.437	205.575.307
17	991230	Kab. Pati	778.507.456	57.118.968	-	10.806.984	369.903.750	140.043.762	577.873.464	200.633.992
18	991197	Kab. Pekalongan	777.682.768	57.118.968	-	21.593.544	364.967.903	140.043.762	583.724.177	193.958.591

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
19	991251	Kab. Pemalang	1.274.792.247	57.118.968	-	10.806.984	879.316.943	140.043.762	1.087.286.657	187.505.590
20	991312	Kab. Purbalingga	748.389.783	57.118.968	-	10.806.984	336.344.489	140.043.762	544.314.203	204.075.580
21	991361	Kab. Purworejo	1.057.071.545	57.118.968	-	381.981.326	342.780.073	140.043.762	921.924.129	135.147.416
22	991272	Kab. Rembang	1.446.297.843	57.118.968	-	10.806.984	1.332.353.637	140.043.762	1.540.323.351	(94.025.508)
23	991155	Kab. Semarang	747.591.582	57.118.968	-	10.806.984	333.444.323	140.043.762	541.414.037	206.177.545
24	991401	Kab. Sragen	752.033.986	57.118.968	-	10.806.984	337.886.727	140.043.762	545.856.441	206.177.545
25	991418	Kab. Sukoharjo	758.068.255	57.118.968	-	10.806.984	343.920.996	140.043.762	551.890.710	206.177.545
26	991219	Kab. Tegal	1.123.979.402	57.118.968	-	10.806.984	715.280.699	140.043.762	923.250.413	200.728.989
27	991340	Kab. Temanggung	793.365.750	57.118.968	-	10.806.984	395.028.805	140.043.762	602.998.519	190.367.231
28	991439	Kab. Wonogiri	777.075.637	57.118.968	-	17.363.784	356.371.578	140.043.762	570.898.092	206.177.545
29	991354	Kab. Wonosobo	750.764.141	57.118.968	-	10.806.984	342.877.588	140.043.762	550.847.302	199.916.839
30	991485	Kota Magelang	740.993.386	57.118.968	-	10.806.984	326.846.127	140.043.762	534.815.841	206.177.545
31	991464	Kota Pekalongan	740.993.386	57.118.968	-	10.806.984	326.846.127	140.043.762	534.815.841	206.177.545
32	991450	Kota Salatiga	740.993.386	57.118.968	-	10.806.984	326.846.127	140.043.762	534.815.841	206.177.545
33	991443	Kota Semarang	905.865.119	57.118.968	-	10.806.984	498.765.030	140.043.762	706.734.744	199.130.375
34	991492	Kota Surakarta	740.993.386	57.118.968	-	10.806.984	326.846.127	140.043.762	534.815.841	206.177.545
35	991471	Kota Tegal	740.993.386	57.118.968	-	10.806.984	326.846.127	140.043.762	534.815.841	206.177.545
	991507	**Provinsi DI Yogyakarta**	5.240.283	-	-	3.759.803	1.480.480	-	5.240.283	-
1	991511	Kab. Bantul	351.044.049	-	-	-	934.640	140.043.762	140.978.402	210.065.647
2	991532	Kab. Gunung Kidul	352.828.209	-	-	-	2.718.800	140.043.762	142.762.562	210.065.647
3	991549	Kab. Kulon Progo	365.936.624	-	-	15.039.215	788.000	140.043.762	155.870.977	210.065.647
4	991528	Kab. Sleman	350.849.649	-	-	-	740.240	140.043.762	140.784.002	210.065.647
5	991553	Kota Yogyakarta	350.849.649	-	-	-	740.240	140.043.762	140.784.002	210.065.647
	991560	**Provinsi Jawa Timur**	111.251.173.258	69.222.494.933	2.152.201.586	211.152.649	8.612.031.797	-	80.197.880.965	31.053.292.293
1	991642	Kab. Bangkalan	19.892.674.013	3.910.464.987	114.236.983	8.369.873	465.794.586	140.043.762	4.638.910.191	15.253.763.822
2	991670	Kab. Banyuwangi	10.363.210.595	3.717.225.433	114.236.983	140.502.126	4.654.988.750	140.043.762	8.766.997.054	1.596.213.541
3	991773	Kab. Blitar	6.916.859.266	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	1.103.591.512	140.043.762	5.083.467.563	1.833.391.703
4	991837	Kab. Bojonegoro	97.712.275.345	87.512.688.791	114.236.983	8.369.873	2.538.489.075	140.043.762	90.313.828.484	7.398.446.861
5	991659	Kab. Bondowoso	6.544.808.633	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	721.890.788	140.043.762	4.701.766.839	1.843.041.794
6	991574	Kab. Gresik	14.845.043.045	6.084.278.279	550.860.539	8.369.873	477.485.584	140.043.762	7.261.038.037	7.584.005.008
7	991684	Kab. Jember	7.222.260.127	3.717.225.433	114.236.983	31.518.391	1.390.494.160	140.043.762	5.393.518.729	1.828.741.398
8	991600	Kab. Jombang	6.676.918.042	3.717.225.433	114.236.983	179.316.426	652.556.441	140.043.762	4.803.379.045	1.873.538.997
9	991731	Kab. Kediri	6.747.145.344	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	972.217.573	140.043.762	4.952.093.624	1.795.051.720
10	991858	Kab. Lamongan	6.834.234.060	3.480.012.433	114.236.983	8.369.873	1.039.716.594	140.043.762	4.782.379.645	2.051.854.415
11	991727	Kab. Lumajang	6.899.289.763	3.717.225.433	114.236.983	58.475.549	1.023.592.005	140.043.762	5.053.573.732	1.845.716.031
12	991780	Kab. Madiun	8.297.130.063	3.717.225.433	114.236.983	13.937.105	2.764.889.183	140.043.762	6.750.332.466	1.546.797.597
13	991802	Kab. Magetan	6.313.722.667	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	479.264.681	140.043.762	4.459.140.732	1.854.581.935
14	991691	Kab. Malang	6.819.203.897	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	932.234.915	140.043.762	4.912.110.966	1.907.092.931
15	991581	Kab. Mojokerto	6.359.625.298	3.717.225.433	114.236.983	88.394.706	493.819.217	140.043.762	4.553.720.101	1.805.905.197
16	991752	Kab. Nganjuk	7.056.924.503	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	1.301.315.899	140.043.762	5.281.191.950	1.775.732.553

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
17	991794	Kab. Ngawi	7.630.869.674	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	1.743.900.692	140.043.762	5.723.776.743	1.907.092.931
18	991820	Kab. Pacitan	6.328.344.016	3.717.225.433	114.236.983	16.664.148	481.340.006	140.043.762	4.469.510.332	1.858.833.684
19	991621	Kab. Pamekasan	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.571.725	140.043.762	4.445.447.776	1.860.908.151
20	991706	Kab. Pasuruan	6.445.110.860	3.717.225.433	114.236.983	51.982.087	514.529.664	140.043.762	4.538.017.929	1.907.092.931
21	991816	Kab. Ponorogo	6.925.976.390	3.717.225.433	114.236.983	13.396.689	1.033.980.592	140.043.762	5.018.883.459	1.907.092.931
22	991710	Kab. Probolinggo	6.510.775.045	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	694.772.141	140.043.762	4.674.648.192	1.836.126.853
23	991617	Kab. Sampang	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
24	991595	Kab. Sidoarjo	6.306.355.927	4.507.153.585	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	5.235.319.433	1.071.036.494
25	991663	Kab. Situbondo	6.506.360.096	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	670.661.737	140.043.762	4.650.537.788	1.855.822.308
26	991638	Kab. Sumenep	6.671.828.888	2.100.901.447	114.236.983	8.369.873	856.913.801	140.043.762	3.220.465.866	3.451.363.022
27	991769	Kab. Trenggalek	6.500.853.406	3.717.225.433	114.236.983	66.054.353	556.199.944	140.043.762	4.593.760.475	1.907.092.931
28	991841	Kab. Tuban	26.944.148.895	18.557.925.347	93.986.608	8.369.873	2.149.598.348	140.043.762	20.949.923.938	5.994.224.957
29	991748	Kab. Tulungagung	6.344.948.879	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	508.166.890	140.043.762	4.488.042.941	1.856.905.938
30	991912	Kota Blitar	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
31	991926	Kota Kediri	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
32	991930	Kota Madiun	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
33	991883	Kota Malang	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
34	991879	Kota Mojokerto	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
35	991890	Kota Pasuruan	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
36	991905	Kota Probolinggo	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
37	991862	Kota Surabaya	6.306.355.927	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	465.515.230	140.043.762	4.445.391.281	1.860.964.646
38	994761	Kota Batu	6.310.847.290	3.717.225.433	114.236.983	8.369.873	470.006.593	140.043.762	4.449.882.644	1.860.964.646
	991947	**Provinsi Kalimantan Barat**	9.902.269.078	-	-	8.299.314.328	2.337.878.854	-	10.637.193.182	(734.924.104)
1	980227	Kab. Bengkayang	1.946.881.044	-	-	1.271.325.881	391.042.638	140.043.762	1.802.412.281	144.468.763
2	980231	Kab. Landak	1.945.691.076	-	-	1.447.165.395	397.776.356	140.043.762	1.984.985.513	(39.294.437)
3	991993	Kab. Kapuas Hulu	4.481.992.709	-	-	1.911.151.823	3.755.161.754	140.043.762	5.806.357.339	(1.324.364.630)
4	992008	Kab. Ketapang	25.408.270.597	-	-	17.090.147.691	9.714.587.617	140.043.762	26.944.779.070	(1.536.508.473)
5	991989	Kab. Pontianak	2.559.102.271	-	-	1.243.238.163	1.031.351.583	140.043.762	2.414.633.508	144.468.763
6	991951	Kab. Sambas	1.941.998.393	-	-	1.261.859.667	395.626.201	140.043.762	1.797.529.630	144.468.763
7	991968	Kab. Sanggau	2.489.559.130	-	-	1.494.008.403	676.980.818	140.043.762	2.311.032.983	178.526.147
8	991972	Kab. Sintang	7.283.363.982	-	-	1.310.673.427	5.654.120.646	140.043.762	7.104.837.835	178.526.147
9	992012	Kota Pontianak	1.922.316.393	-	-	1.242.342.163	395.461.705	140.043.762	1.777.847.630	144.468.763
10	994775	Kota Singkawang	1.917.715.460	-	-	1.242.342.163	390.860.772	140.043.762	1.773.246.697	144.468.763
11	987507	Kab. Sekadau	2.016.510.358	-	-	1.326.049.975	406.946.258	140.043.762	1.873.039.995	143.470.363
12	987492	Kab. Melawi	6.986.201.848	-	-	1.303.942.163	5.363.689.776	140.043.762	6.807.675.701	178.526.147
13	963358	Kab. Kayong Utara	1.983.497.414	-	-	1.235.833.757	463.151.132	140.043.762	1.839.028.651	144.468.763
	992029	**Provinsi Kalimantan Tengah**	36.380.467.564	-	-	22.315.791.980	22.782.973.194	-	45.098.765.174	(8.718.297.610)
1	992054	Kab. Barito Selatan	7.634.624.427	-	-	3.485.970.930	4.988.952.958	140.043.762	8.614.967.650	(980.343.223)
2	992040	Kab. Barito Utara	24.609.554.577	-	-	5.920.448.853	21.667.549.694	140.043.762	27.728.042.309	(3.118.487.732)
3	992033	Kab. Kapuas	16.237.192.634	-	-	4.171.669.407	13.367.915.616	140.043.762	17.679.628.785	(1.442.436.151)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
4	992075	Kab. Kotawaringin Barat	16.317.305.535	-	-	4.291.420.960	13.903.612.112	140.043.762	18.335.076.834	(2.017.771.299)
5	992061	Kab. Kotawaringin Timur	29.651.739.890	-	-	7.390.279.534	27.859.185.099	140.043.762	35.389.508.395	(5.737.768.505)
6	992082	Kota Palangkaraya	5.610.453.685	-	-	3.350.062.809	3.133.299.045	140.043.762	6.623.405.616	(1.012.951.931)
7	997540	Kab. Barito Timur	5.961.391.218	-	-	4.712.505.474	3.127.309.413	140.043.762	7.979.858.649	(2.018.467.431)
8	997536	Kab. Murung Raya	57.280.993.184	-	-	34.616.510.075	34.146.876.144	140.043.762	68.903.429.981	(11.622.436.797)
9	997522	Kab. Pulang Pisau	5.524.069.024	-	-	3.167.390.382	3.145.517.511	140.043.762	6.452.951.655	(928.882.631)
10	997515	Kab. Gunung Mas	7.888.768.151	-	-	3.740.543.473	6.078.553.756	140.043.762	9.959.140.991	(2.070.372.840)
11	997501	Kab. Lamandau	9.557.971.808	-	-	3.426.163.135	7.284.432.023	140.043.762	10.850.638.920	(1.292.667.112)
12	997493	Kab. Sukamara	5.624.813.498	-	-	3.167.390.382	3.246.261.985	140.043.762	6.553.696.129	(928.882.631)
13	997472	Kab. Katingan	39.380.790.884	-	-	4.414.766.886	41.046.191.759	140.043.762	45.601.002.407	(6.220.211.523)
14	997489	Kab. Seruyan	27.803.769.608	-	-	3.408.045.005	27.018.287.665	140.043.762	30.566.376.432	(2.762.606.824)
	992164	**Provinsi Kalimantan Selatan**	176.270.917.484	6.453.481.318	-	222.483.253.569	6.491.903.266	-	235.428.638.153	(59.157.720.669)
1	992171	Kab. Banjar	89.397.616.776	1.075.597.550	-	114.170.186.718	1.207.526.560	140.043.762	116.593.354.590	(27.195.737.814)
2	992228	Kab. Barito Kuala	30.153.045.617	1.075.597.550	-	36.907.768.392	1.702.703.602	140.043.762	39.826.113.306	(9.673.067.689)
3	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	31.846.252.365	1.075.597.550	-	39.243.499.285	1.116.505.882	140.043.762	41.575.646.479	(9.729.394.114)
4	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	29.543.806.929	1.075.597.550	-	36.930.644.763	1.053.426.568	140.043.762	39.199.712.643	(9.655.905.714)
5	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	32.344.439.649	1.075.597.550	-	36.859.980.303	3.893.347.048	140.043.762	41.968.968.663	(9.624.529.014)
6	992249	Kab. Kota Baru	132.883.174.893	1.075.597.550	-	136.723.502.406	4.684.809.484	140.043.762	142.623.953.202	(9.740.778.309)
7	992232	Kab. Tabalong	58.925.167.237	11.468.414.744	-	93.362.870.019	2.877.582.687	140.043.762	107.848.911.212	(48.923.743.975)
8	992185	Kab. Tanah Laut	68.364.335.988	1.075.597.550	-	74.457.443.614	4.392.157.976	140.043.762	80.065.242.902	(11.700.906.914)
9	992192	Kab. Tapin	42.067.535.725	1.075.597.550	-	53.750.635.383	1.065.080.944	140.043.762	56.031.357.639	(13.963.821.914)
10	980248	Kota Banjarbaru	31.056.912.252	1.075.597.550	-	38.412.373.386	1.053.426.568	140.043.762	40.681.441.266	(9.624.529.014)
11	992260	Kota Banjarmasin	29.504.519.169	1.075.597.550	-	36.859.980.303	1.053.426.568	140.043.762	39.129.048.183	(9.624.529.014)
12	998236	Kab. Balangan	45.623.615.455	2.447.539.152	-	93.029.610.906	1.094.065.262	140.043.762	96.711.259.082	(51.087.643.627)
13	998222	Kab. Tanah Bumbu	90.551.118.531	1.075.597.550	-	99.242.602.249	3.862.183.035	140.043.762	104.320.426.596	(13.769.308.065)
	992096	**Provinsi Kalimantan Timur**	3.336.956.712.777	847.472.232.998	2.194.341.346.650	525.172.505.805	24.063.841.889	-	3.591.049.927.342	(254.093.214.565)
1	992139	Kab. Berau	621.426.271.566	136.012.196.821	351.320.519.890	131.499.909.413	53.629.529.451	140.043.762	672.602.199.337	(51.175.927.771)
2	992122	Kab. Bulungan	572.656.511.069	139.498.680.429	354.021.421.001	97.858.068.634	27.772.907.219	140.043.762	619.291.121.045	(46.634.609.976)
3	992101	Kab. Kutai Kartanegara	3.231.972.173.985	858.870.021.709	2.232.415.140.146	289.123.012.123	12.441.517.824	140.043.762	3.392.989.735.564	(161.017.561.579)
4	980273	Kab. Kutai Barat	667.421.232.592	136.012.196.821	351.320.519.890	197.454.184.229	30.084.579.704	140.043.762	715.011.524.406	(47.590.291.814)
5	980280	Kab. Kutai Timur	1.023.317.608.632	141.735.768.076	352.098.532.084	547.010.017.242	30.952.481.044	140.043.762	1.071.936.842.208	(48.619.233.576)
6	980269	Kab. Malinau	550.354.681.130	136.012.196.821	351.320.519.890	87.405.131.327	20.211.091.130	140.043.762	595.088.982.930	(44.734.301.800)
7	980252	Kab. Nunukan	576.768.225.594	141.633.285.649	353.208.901.375	98.521.329.027	25.667.364.027	140.043.762	619.170.923.840	(42.402.698.246)
8	992118	Kab. Paser	650.638.117.793	136.012.196.821	351.320.519.890	192.439.614.247	17.344.378.610	140.043.762	697.256.753.330	(46.618.635.537)
9	992150	Kota Balikpapan	537.500.486.148	136.012.196.821	351.320.519.890	87.069.049.406	3.438.959.392	140.043.762	577.980.769.271	(40.480.283.123)
10	980294	Kota Bontang	557.418.526.597	154.988.382.338	353.608.407.619	87.074.484.362	3.438.959.392	140.043.762	599.250.277.473	(41.831.750.876)
11	992143	Kota Samarinda	563.164.459.495	137.428.232.561	357.089.296.878	109.776.078.702	3.438.959.392	140.043.762	607.872.611.295	(44.708.151.800)
12	941901	Kota Tarakan	557.410.569.525	150.870.911.631	355.617.759.141	87.069.049.406	3.453.434.070	140.043.762	597.151.198.010	(39.740.628.485)
13	997561	Kab. Penajam Paser Utara	560.486.929.325	163.780.829.869	348.389.190.135	88.418.054.831	5.206.207.956	140.043.762	605.934.326.553	(45.447.397.228)
	993021	**Provinsi Sulawesi Utara**	1.016.104.245	-	-	871.248.799	166.031.312	-	1.037.280.111	(21.175.866)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
1	993059	Kab. Bolaang Mongondow	2.713.681.569	-	-	2.225.063.683	144.275.205	140.043.762	2.509.382.650	204.298.919
2	993042	Kab. Minahasa	490.906.298	-	-	116.654.315	27.671.885	140.043.762	284.369.962	206.536.336
3	993063	Kab. Sangihe	490.906.298	-	-	116.654.315	27.671.885	140.043.762	284.369.962	206.536.336
4	993091	Kota Bitung	495.208.214	-	-	120.956.231	27.671.885	140.043.762	288.671.878	206.536.336
5	993070	Kota Manado	491.002.579	-	-	116.750.596	27.671.885	140.043.762	284.466.243	206.536.336
6	997412	Kab. Kepulauan Talaud	624.776.910	-	-	116.654.315	158.013.186	140.043.762	414.711.263	210.065.647
7	998240	Kab. Minahasa Selatan	587.787.845	-	-	152.505.104	85.173.332	140.043.762	377.722.198	210.065.647
8	998257	Kota Tomohon	490.906.298	-	-	116.654.315	27.671.885	140.043.762	284.369.962	206.536.336
9	987485	Kab. Minahasa Utara	535.901.507	-	-	161.649.524	27.671.885	140.043.762	329.365.171	206.536.336
10	963395	Kota Kotamubagu	519.925.882	-	-	60.363.191	109.453.282	140.043.762	309.860.235	210.065.647
11	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.422.123.255	-	-	62.883.467	1.168.762.393	140.043.762	1.371.689.622	50.433.633
12	963389	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	434.828.134	-	-	60.363.191	27.884.845	140.043.762	228.291.798	206.536.336
13	963415	Kab. Minahasa Tenggara	511.503.518	-	-	76.220.777	85.173.332	140.043.762	301.437.871	210.065.647
	993820	**Provinsi Gorontalo**	362.380.244	-	-	47.876.508	314.503.736	-	362.380.244	-
1	980302	Kab. Boalemo	653.233.787	-	-	1.579.200	301.545.178	140.043.762	443.168.140	210.065.647
2	993038	Kab. Gorontalo	1.639.534.161	-	-	27.870.598	1.261.554.154	140.043.762	1.429.468.514	210.065.647
3	993084	Kota Gorontalo	476.235.703	-	-	324.800	125.801.494	140.043.762	266.170.056	210.065.647
4	998261	Kab. Pohuwato	833.313.781	-	-	16.598.043	487.591.298	140.043.762	644.233.103	189.080.678
5	998278	Kab. Bone Bolango	621.973.898	-	-	146.062.995	125.801.494	140.043.762	411.908.251	210.065.647
6	963421	Kab. Gorontalo Utara	1.620.474.763	-	-	8.811.200	1.261.554.154	140.043.762	1.410.409.116	210.065.647
	992960	**Provinsi Sulawesi Tengah**	3.548.782.228	2.572.013.600	-	451.723.645	704.015.884	-	3.727.753.129	(178.970.901)
1	993000	Kab. Banggai	3.039.239.299	571.558.400	-	537.512.771	1.997.995.617	140.043.762	3.247.110.550	(207.871.251)
2	980337	Kab. Banggai Kepulauan	1.323.689.727	571.558.400	-	34.188.818	377.514.100	140.043.762	1.123.305.080	200.384.647
3	980316	Kab. Buol	1.959.083.913	571.558.400	-	41.301.868	1.005.795.236	140.043.762	1.758.699.266	200.384.647
4	992998	Kab. Toli-Toli	1.968.316.644	571.558.400	-	101.617.894	988.384.931	140.043.762	1.801.604.987	166.711.657
5	992981	Kab. Donggala	1.351.603.681	571.558.400	-	106.151.587	359.172.953	140.043.762	1.176.926.702	174.676.979
6	980320	Kab. Morowali	7.333.344.540	5.144.027.600	-	540.465.472	1.413.402.079	140.043.762	7.237.938.913	95.405.627
7	992977	Kab. Poso	1.417.438.497	571.558.400	-	41.088.578	473.982.900	140.043.762	1.226.673.640	190.764.857
8	993017	Kota Palu	1.168.299.860	571.558.400	-	122.515.143	156.765.397	140.043.762	990.882.702	177.417.158
9	997582	Kab. Parigi Moutong	1.457.254.576	571.558.400	-	239.867.368	406.421.554	140.043.762	1.357.891.084	99.363.492
10	987471	Kab. Tojo Una Una	1.413.912.379	571.558.400	-	42.184.978	462.916.592	140.043.762	1.216.703.732	197.208.647
	992722	**Provinsi Sulawesi Selatan**	25.757.760.234	-	-	25.680.943.953	85.100.681	-	25.766.044.634	(8.284.400)
1	992846	Kab. Bantaeng	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
2	992888	Kab. Barru	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
3	992778	Kab. Bone	2.709.054.060	-	-	2.300.260.571	58.684.080	140.043.762	2.498.988.413	210.065.647
4	992832	Kab. Bulukumba	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
5	992935	Kab. Enrekang	2.676.016.312	-	-	2.320.333.848	9.910.955	140.043.762	2.470.288.565	205.727.747
6	992740	Kab. G o w a	2.725.190.131	-	-	2.297.905.371	77.175.351	140.043.762	2.515.124.484	210.065.647
7	992850	Kab. Jeneponto	2.658.047.524	-	-	2.300.201.691	7.736.424	140.043.762	2.447.981.877	210.065.647
8	992811	Kab. Luwu	2.806.865.207	-	-	2.445.793.407	10.962.391	140.043.762	2.596.799.560	210.065.647

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
9	980341	Kab. Luwu Utara	2.808.508.316	-	-	2.437.681.428	20.717.479	140.043.762	2.598.442.669	210.065.647
10	992799	Kab. M a r o s *	2.661.895.204	-	-	2.304.049.371	7.736.424	140.043.762	2.451.829.557	210.065.647
11	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
12	992736	Kab. Pinrang	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
13	992867	Kab. Selayar	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
14	992892	Kab. Sidenreng Rappang	2.737.168.050	-	-	2.370.099.475	16.959.166	140.043.762	2.527.102.403	210.065.647
15	992825	Kab. Sinjai	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
16	992914	Kab. Soppeng	2.655.751.204	-	-	2.326.705.371	7.736.424	140.043.762	2.474.485.557	181.265.647
17	992871	Kab. Takalar	2.661.437.916	-	-	2.303.592.083	7.736.424	140.043.762	2.451.372.269	210.065.647
18	992782	Kab. Tana Toraja	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
19	992757	Kab. Wajo	2.660.802.891	-	-	2.302.957.058	7.736.424	140.043.762	2.450.737.244	210.065.647
20	992956	Kota Pare-pare	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
21	992942	Kota Makassar	2.655.751.204	-	-	2.297.905.371	7.736.424	140.043.762	2.445.685.557	210.065.647
22	997604	Kota Palopo	2.656.248.790	-	-	2.297.905.371	8.234.010	140.043.762	2.446.183.143	210.065.647
23	928282	Kab. Luwu Timur	52.115.778.050	-	-	51.743.955.741	21.712.900	140.043.762	51.905.712.403	210.065.647
	955383	**Provinsi Sulawesi Barat**	667.467.874	-	-	909.440	666.558.434	-	667.467.874	-
1	992804	Kab. Majene	683.843.345	-	-	454.720	333.279.216	140.043.762	473.777.698	210.065.647
2	992761	Kab. Mamuju	4.355.514.641	-	-	1.818.880	4.003.586.352	140.043.762	4.145.448.994	210.065.647
3	992921	Kab. Polewali Mandar	684.669.127	-	-	454.720	334.104.998	140.043.762	474.603.480	210.065.647
4	997599	Kab. Mamasa	683.843.345	-	-	454.720	333.279.216	140.043.762	473.777.698	210.065.647
5	998299	Kab. Mamuju Utara	2.036.003.019	-	-	454.720	1.685.438.890	140.043.762	1.825.937.372	210.065.647
	993106	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	7.446.855.627	-	-	8.308.067.348	339.309.863	-	8.647.377.211	(1.200.521.584)
1	993127	Kab. Buton	2.251.530.534	-	-	2.028.548.445	91.179.356	140.043.762	2.259.771.563	(8.241.029)
2	993110	Kab. Konawe	2.456.790.245	-	-	1.957.075.592	371.267.136	140.043.762	2.468.386.490	(11.596.245)
3	993148	Kab. Kolaka	12.334.582.387	-	-	13.674.967.124	223.564.922	140.043.762	14.038.575.808	(1.703.993.421)
4	993131	Kab. Muna	1.719.147.816	-	-	1.515.631.870	71.176.088	140.043.762	1.726.851.720	(7.703.904)
5	993326	Kota Kendari	1.702.261.731	-	-	1.501.491.710	68.430.163	140.043.762	1.709.965.635	(7.703.904)
6	994782	Kota Bau-bau	1.704.560.611	-	-	1.503.790.590	68.430.163	140.043.762	1.712.264.515	(7.703.904)
7	998304	Kab. Konawe Selatan	1.845.604.782	-	-	1.632.968.510	80.296.414	140.043.762	1.853.308.686	(7.703.904)
8	987642	Kab. Bombana	3.414.391.710	-	-	3.682.641.990	75.650.962	140.043.762	3.898.336.714	(483.945.004)
9	987638	Kab. Wakatobi	1.702.261.731	-	-	1.501.491.710	68.430.163	140.043.762	1.709.965.635	(7.703.904)
10	987443	Kab. Kolaka Utara	2.278.044.702	-	-	1.693.151.226	645.247.144	140.043.762	2.478.442.132	(200.397.430)
11	963364	Kab. Konawe Utara	1.673.380.466	-	-	1.359.178.426	183.168.219	140.043.762	1.682.390.407	(9.009.941)
12	963370	Kab. Buton Utara	1.349.780.168	-	-	1.181.331.770	36.108.540	140.043.762	1.357.484.072	(7.703.904)
	992274	**Provinsi Bali**	-	-	-	-	-	-	-	-
1	992342	Kab. Badung	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
2	992338	Kab. Bangli	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
3	992281	Kab. Buleleng	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
4	992317	Kab. Gianyar	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
5	992295	Kab. Jembrana	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
6	992321	Kab. Karangasem	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
7	992300	Kab. Klungkung	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
8	992359	Kab. Tabanan	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
9	992363	Kota Denpasar	350.109.409	-	-	-	-	140.043.762	140.043.762	210.065.647
	992370	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	18.683.112.827	-	-	18.644.562.713	38.550.114	-	18.683.112.827	-
1	992410	Kab. Bima	5.286.112.207	-	-	4.575.915.574	360.087.224	140.043.762	5.076.046.560	210.065.647
2	992431	Kab. Dompu	4.968.157.423	-	-	4.608.410.486	9.637.528	140.043.762	4.758.091.776	210.065.647
3	992384	Kab. Lombok Barat	4.925.596.527	-	-	4.565.849.590	9.637.528	140.043.762	4.715.530.880	210.065.647
4	992391	Kab. Lombok Tengah	4.923.655.407	-	-	4.563.908.470	9.637.528	140.043.762	4.713.589.760	210.065.647
5	992406	Kab. Lombok Timur	4.923.655.407	-	-	4.563.908.470	9.637.528	140.043.762	4.713.589.760	210.065.647
6	992427	Kab. Sumbawa	5.564.704.277	-	-	5.199.668.605	14.926.263	140.043.762	5.354.638.630	210.065.647
7	992448	Kota Mataram	4.923.655.407	-	-	4.563.908.470	9.637.528	140.043.762	4.713.589.760	210.065.647
8	997625	Kota Bima	4.923.655.407	-	-	4.563.908.470	9.637.528	140.043.762	4.713.589.760	210.065.647
9	987450	Kab. Sumbawa Barat	37.784.690.102	-	-	37.416.328.291	18.252.402	140.043.762	37.574.624.455	210.065.647
	992452	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	57.682.640	-	-	51.331.313	11.896.327	-	63.227.640	(5.545.000)
1	992502	Kab. Alor	356.452.079	-	-	5.551.151	1.407.619	140.043.762	147.002.532	209.449.547
2	992473	Kab. Belu	358.535.378	-	-	7.232.751	1.809.318	140.043.762	149.085.831	209.449.547
3	992537	Kab. Ende	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
4	992520	Kab. Flores Timur	357.345.690	-	-	5.551.151	2.301.230	140.043.762	147.896.143	209.449.547
5	992469	Kab. Kupang	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
6	980379	Kab. Lembata	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
7	992558	Kab. Manggarai	449.232.631	-	-	108.856.775	1.356.547	140.043.762	250.257.084	198.975.547
8	992541	Kab. Ngada	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
9	992516	Kab. Sikka	366.756.153	-	-	5.551.151	11.711.693	140.043.762	157.306.606	209.449.547
10	992579	Kab. Sumba Barat	366.788.219	-	-	5.551.151	11.743.759	140.043.762	157.338.672	209.449.547
11	992562	Kab. Sumba Timur	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
12	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	356.401.007	-	-	9.711.151	1.356.547	140.043.762	151.111.460	205.289.547
13	992480	Kab. Timor Tengah Utara	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
14	993368	Kota Kupang	356.646.230	-	-	5.551.151	1.601.770	140.043.762	147.196.683	209.449.547
15	997578	Kab. Rote Ndao	356.401.007	-	-	5.551.151	1.356.547	140.043.762	146.951.460	209.449.547
16	998510	Kab. Manggarai Barat	358.926.447	-	-	8.076.591	1.356.547	140.043.762	149.476.900	209.449.547
17	963430	Kab. Nagekeo	353.639.464	-	-	2.998.013	1.148.142	140.043.762	144.189.917	209.449.547
18	963446	Kab. Sumba Barat Daya	353.639.464	-	-	2.998.013	1.148.142	140.043.762	144.189.917	209.449.547
19	963452	Kab. Sumba Tengah	353.639.464	-	-	2.998.013	1.148.142	140.043.762	144.189.917	209.449.547
	993152	**Provinsi Maluku**	2.535.386.801	182.770.000	-	3.740.788	2.168.317.310	-	2.354.828.098	180.558.703
1	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.076.162.170	52.220.000	-	12.164.272	619.519.231	140.043.762	823.947.265	252.214.905
2	993169	Kab. Maluku Tengah	1.952.027.726	52.220.000	-	2.798.880	1.494.585.779	140.043.762	1.689.648.421	262.379.305
3	993173	Kab. Maluku Tenggara	1.559.240.694	52.220.000	-	1.216.000	1.103.747.963	140.043.762	1.297.227.725	262.012.969
4	980362	Kab. Pulau Buru	7.600.167.002	52.220.000	-	-	7.933.152.303	140.043.762	8.125.416.065	(525.249.063)
5	993202	Kota Ambon	1.074.162.298	52.220.000	-	-	619.519.231	140.043.762	811.782.993	262.379.305

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
6	987439	Kab. Seram Bagian Barat	2.328.940.156	52.220.000	-	-	1.963.331.981	140.043.762	2.155.595.743	173.344.413
7	987422	Kab. Seram Bagian Timur	3.304.202.502	365.540.400	-	-	1.688.483.435	140.043.762	2.194.067.597	1.110.134.905
8	987621	Kab. Kepulauan Aru	1.648.910.873	52.220.000	-	-	1.194.267.806	140.043.762	1.386.531.568	262.379.305
	980011	**Provinsi Maluku Utara**	32.760.387.707	-	-	33.365.604.496	4.724.621.260	-	38.090.225.756	(5.329.838.049)
1	993194	Kab. Halmahera Tengah	17.565.387.568	-	-	9.981.729.172	9.616.468.292	140.043.762	19.738.241.226	(2.172.853.658)
2	993180	Kab. Halmahera Barat	10.224.356.282	-	-	9.463.240.465	2.238.169.752	140.043.762	11.841.453.979	(1.617.097.697)
3	980028	Kota Ternate	9.865.411.142	-	-	9.460.713.233	1.574.547.528	140.043.762	11.175.304.523	(1.309.893.381)
4	998346	Kab. Halmahera Timur	55.821.620.375	-	-	58.131.293.329	7.448.628.611	140.043.762	65.719.965.702	(9.898.345.327)
5	998350	Kota Tidore Kepulauan	10.949.481.765	-	-	9.460.713.233	2.870.106.763	140.043.762	12.470.863.758	(1.521.381.993)
6	998332	Kab. Kepulauan Sula	11.345.434.960	-	-	9.502.617.233	3.279.523.333	140.043.762	12.922.184.328	(1.576.749.368)
7	998325	Kab. Halmahera Selatan	27.161.073.454	-	-	9.538.446.159	20.209.946.090	140.043.762	29.888.436.011	(2.727.362.557)
8	998311	Kab. Halmahera Utara	22.496.142.921	-	-	18.054.568.866	5.941.734.122	140.043.762	24.136.346.750	(1.640.203.829)
	993216	**Provinsi Papua**	197.979.740.817	-	-	191.589.810.886	8.085.156.080	-	199.674.966.966	(1.695.226.149)
1	993237	Kab. Biak Numfor	21.097.313.924	-	-	19.310.251.063	1.589.415.806	140.043.762	21.039.710.631	57.603.293
2	993220	Kab. Jayapura	21.534.696.177	-	-	19.319.843.191	2.119.310.413	140.043.762	21.579.197.366	(44.501.189)
3	993290	Kab. Jayawijaya	20.340.007.943	-	-	19.463.266.982	794.336.406	140.043.762	20.397.647.150	(57.639.207)
4	993283	Kab. Merauke	21.080.097.696	-	-	19.310.251.063	1.576.204.125	140.043.762	21.026.498.950	53.598.746
5	993401	Kab. Mimika	390.948.191.145	-	-	382.388.087.216	8.209.994.520	140.043.762	390.738.125.498	210.065.647
6	993305	Kab. Nabire	25.705.771.726	-	-	19.574.904.537	5.780.757.780	140.043.762	25.495.706.079	210.065.647
7	993393	Kab. Paniai	21.038.343.827	-	-	20.046.360.366	794.336.406	140.043.762	20.980.740.534	57.603.293
8	993389	Kab. Puncak Jaya	20.414.551.981	-	-	19.422.568.520	794.336.406	140.043.762	20.356.948.688	57.603.293
9	993258	Kab. Yapen Waropen	20.302.234.524	-	-	19.310.251.063	794.336.406	140.043.762	20.244.631.231	57.603.293
10	993312	Kota Jayapura	20.302.234.524	-	-	19.310.251.063	794.336.406	140.043.762	20.244.631.231	57.603.293
11	998392	Kab. Sarmi	30.864.980.556	-	-	19.807.388.528	14.661.344.068	140.043.762	34.608.776.358	(3.743.795.802)
12	998400	Kab. Keerom	22.720.373.153	-	-	19.425.662.688	3.248.925.531	140.043.762	22.814.631.981	(94.258.828)
13	998477	Kab. Yahukimo	20.302.234.524	-	-	19.310.251.063	794.336.406	140.043.762	20.244.631.231	57.603.293
14	998421	Kab. Pegunungan Bintang	20.346.793.575	-	-	19.354.810.114	794.336.406	140.043.762	20.289.190.282	57.603.293
15	998414	Kab. Tolikara	20.470.336.057	-	-	19.478.352.596	794.336.406	140.043.762	20.412.732.764	57.603.293
16	998388	Kab. Boven Digoel	31.541.682.872	-	-	19.310.251.063	14.453.962.338	140.043.762	33.904.257.163	(2.362.574.291)
17	998367	Kab. Mappi	20.303.306.124	-	-	19.310.251.063	795.408.006	140.043.762	20.245.702.831	57.603.293
18	998371	Kab. Asmat	20.302.234.524	-	-	19.310.251.063	794.336.406	140.043.762	20.244.631.231	57.603.293
19	998460	Kab. Waropen	21.018.261.900	-	-	19.397.231.939	1.423.382.906	140.043.762	20.960.658.607	57.603.293
20	987511	Kab. Supiori	20.302.234.524	-	-	19.310.251.063	794.336.406	140.043.762	20.244.631.231	57.603.293
21	963461	Kab. Mamberamo Raya	21.963.719.779	-	-	14.891.936.959	6.874.135.765	140.043.762	21.906.116.486	57.603.293
	998854	**Provinsi Papua Barat**	55.680.488.348	35.313.810.332	2.175.062.660	1.508.548.874	9.747.472.860	-	48.744.894.726	6.935.593.622
1	993262	Kab. Sorong	84.935.786.037	61.642.076.231	3.600.129.435	546.413.400	6.936.502.591	140.043.762	72.865.165.419	12.070.620.618
2	993241	Kab. Manokwari	17.442.923.671	8.828.452.661	543.765.692	341.279.468	5.644.259.561	140.043.762	15.497.801.144	1.945.122.527
3	993279	Kab. Fak Fak	23.656.480.363	8.828.452.661	543.765.692	412.563.615	11.956.959.657	140.043.762	21.881.785.387	1.774.694.976
4	980383	Kota Sorong	14.258.734.141	8.828.452.661	543.765.692	341.279.468	2.460.070.031	140.043.762	12.313.611.614	1.945.122.527
5	998442	Kab. Sorong Selatan	15.105.199.132	8.828.452.661	543.765.692	341.279.468	3.352.728.302	140.043.762	13.206.269.885	1.898.929.247

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi						Sisa
				Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11=5+6+7+8+9+10	6=4-11
6	998456	Kab. Raja Ampat	35.489.896.599	17.432.459.268	1.312.916.936	2.732.147.072	8.319.680.500	140.043.762	29.937.247.538	5.552.649.061
7	998481	Kab. Teluk Bintuni	34.238.254.770	9.114.180.333	524.610.330	341.279.468	22.235.227.786	140.043.762	32.355.341.679	1.882.913.091
8	998498	Kab. Teluk Wondama	14.908.874.541	8.828.452.661	543.765.692	341.279.468	3.110.210.431	140.043.762	12.963.752.014	1.945.122.527
9	998435	Kab. Kaimana	34.313.481.524	8.828.452.661	543.765.692	636.674.072	23.104.360.031	140.043.762	33.253.296.218	1.060.185.306
		Dana Cadangan TA 2008	3.787.108.774.689			118.660.562.245	186.941.943.223	-	305.602.505.468	3.481.506.269.221
Jumlah			**43.631.588.480.406**	**18.916.323.740.451**	**14.178.199.225.782**	**6.191.652.830.572**	**1.389.443.104.456**	**64.000.000.000**	**40.739.618.901.261**	**2.891.969.579.145**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
	990015	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	557.327.156.000	557.327.156.000	-
1	990078	Kab. Aceh Barat	303.463.871.000	303.463.871.000	-
2	990022	Kab. Aceh Besar	407.951.536.000	407.951.536.000	-
3	990061	Kab. Aceh Selatan	315.844.050.000	315.844.050.000	-
4	980007	Kab. Aceh Singkil	161.827.728.000	161.827.728.000	-
5	990082	Kab. Aceh Tengah	300.339.533.000	300.339.533.000	-
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	278.292.165.000	278.292.165.000	-
7	990057	Kab. Aceh Timur	321.110.274.000	321.110.274.000	-
8	990040	Kab. Aceh Utara	224.974.803.000	224.974.803.000	-
9	980053	Kab. Bireun	381.776.850.000	381.776.850.000	-
10	990036	Kab. Aceh Pidie	355.254.807.000	355.254.807.000	-
11	993372	Kab. Simeulue	205.553.860.000	205.553.860.000	-
12	990104	Kota Banda Aceh	307.002.315.000	307.002.315.000	-
13	990111	Kota Sabang	184.666.362.000	184.666.362.000	-
14	994672	Kota Langsa	215.308.983.000	215.308.983.000	-
15	994686	Kota Lhokseumawe	233.315.427.000	233.315.427.000	-
16	997451	Kab. Nagan Raya	272.684.736.000	272.684.736.000	-
17	997447	Kab. Aceh Jaya	194.370.094.000	194.370.094.000	-
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	226.924.281.000	226.924.281.000	-
19	997430	Kab. Gayo Lues	226.715.878.000	226.715.878.000	-
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	237.708.404.000	237.708.404.000	-
21	987532	Kab. Bener Meriah	223.797.261.000	223.797.261.000	-
22	963327	Kota Subulussalam	87.981.636.000	87.981.636.000	-
23	963311	Kab. Pidie Jaya	124.563.256.000	124.563.256.000	-
	990125	**Provinsi Sumatera Utara**	727.910.822.000	727.910.822.000	-
1	990221	Kab. Asahan	422.761.735.000	422.761.735.000	-
2	990192	Kab. Dairi	327.408.429.000	327.408.429.000	-
3	990132	Kab. Deli Serdang	779.762.110.000	779.762.110.000	-
4	990146	Kab. Tanah Karo	395.779.328.000	395.779.328.000	-
5	990188	Kab. Labuhan Batu	578.103.405.000	578.103.405.000	-
6	990150	Kab. Langkat	583.480.637.000	583.480.637.000	-
7	941915	Kab. Mandailing Natal	394.434.140.000	394.434.140.000	-
8	990235	Kab. Nias	393.414.349.000	393.414.349.000	-
9	990171	Kab. Simalungun	639.593.433.000	639.593.433.000	-
10	990214	Kab. Tapanuli Selatan	528.954.580.000	528.954.580.000	-
11	990167	Kab. Tapanuli Tengah	290.589.335.000	290.589.335.000	-
12	990200	Kab. Tapanuli Utara	338.051.601.000	338.051.601.000	-
13	941922	Kab. Toba Samosir	252.143.902.000	252.143.902.000	-
14	990260	Kota Binjai	276.422.519.000	276.422.519.000	-
15	990242	Kota Medan	808.664.567.000	808.664.567.000	-
16	990277	Kota Pematang Siantar	312.042.983.000	312.042.983.000	-
17	990298	Kota Sibolga	209.457.471.000	209.457.471.000	-
18	990281	Kota Tanjung Balai	224.503.915.000	224.503.915.000	-
19	990256	Kota Tebing Tinggi	221.913.915.000	221.913.915.000	-
20	994690	Kota Padang Sidempuan	257.152.798.000	257.152.798.000	-
21	998147	Kab. Pakpak Bharat	155.875.045.000	155.875.045.000	-
22	998130	Kab. Nias Selatan	258.078.775.000	258.078.775.000	-
23	998151	Kab. Humbang Hasundutan	251.601.127.000	251.601.127.000	-
24	987418	Kab. Serdang Bedagai	381.432.253.000	381.432.253.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
25	987528	Kab. Samosir	219.458.180.000	219.458.180.000	-
26	963333	Kab. Batu bara	175.374.953.000	175.374.953.000	-
	990303	**Provinsi Sumatera Barat**	631.675.939.000	631.675.939.000	-
1	990331	Kab. Limapuluh Kota	385.019.188.000	385.019.188.000	-
2	990310	Kab. Agam	414.880.748.000	414.880.748.000	-
3	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	272.834.439.000	272.834.439.000	-
4	990352	Kab. Padang Pariaman	403.616.001.000	403.616.001.000	-
5	990324	Kab. Pasaman	297.522.370.000	297.522.370.000	-
6	990366	Kab. Pesisir Selatan	424.760.863.000	424.760.863.000	-
7	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	273.785.923.000	273.785.923.000	-
8	990345	Kab. Solok	365.383.071.000	365.383.071.000	-
9	990370	Kab. Tanah Datar	373.848.936.000	373.848.936.000	-
10	990391	Kota Bukit Tinggi	236.403.814.000	236.403.814.000	-
11	990409	Kota Padang Panjang	192.699.289.000	192.699.289.000	-
12	990434	Kota Padang	624.642.086.000	624.642.086.000	-
13	990441	Kota Payakumbuh	234.690.661.000	234.690.661.000	-
14	990420	Kota Sawahlunto	186.839.398.000	186.839.398.000	-
15	990413	Kota Solok	205.820.702.000	205.820.702.000	-
16	997611	Kota Pariaman	222.102.582.000	222.102.582.000	-
17	987595	Kab. Pasaman Barat	305.576.071.000	305.576.071.000	-
18	987574	Kab. Dharmasraya	246.604.954.000	246.604.954.000	-
19	987581	Kab. Solok Selatan	213.109.223.000	213.109.223.000	-
	990455	**Provinsi Riau**	198.375.199.000	198.375.199.000	-
1	990476	Kab. Bengkalis	-	-	-
2	990502	Kab. Indragiri Hilir	389.699.955.000	389.699.955.000	-
3	990497	Kab. Indragiri Hulu	250.954.258.000	250.954.258.000	-
4	990462	Kab. Kampar	244.763.763.000	244.763.763.000	-
5	980138	Kab. Kuantan Singingi	291.388.945.000	291.388.945.000	-
6	980074	Kab. Pelalawan	195.626.393.000	195.626.393.000	-
7	980095	Kab. Rokan Hilir	-	-	-
8	980081	Kab. Rokan Hulu	201.064.732.000	201.064.732.000	-
9	980100	Kab. Siak	-	-	-
10	980142	Kota Dumai	94.441.796.000	94.441.796.000	-
11	990519	Kota Pekanbaru	344.111.454.000	344.111.454.000	-
	998840	**Provinsi Kepulauan Riau**	288.884.858.000	288.884.858.000	-
1	990480	Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	108.583.054.000	108.583.054.000	-
2	980121	Kab. Natuna	-	-	-
3	980117	Kab. Karimun	200.573.387.000	200.573.387.000	-
4	990523	Kota Batam	192.930.742.000	192.930.742.000	-
5	994708	Kota Tanjung Pinang	188.537.170.000	188.537.170.000	-
6	987464	Kab. Lingga	144.728.263.000	144.728.263.000	-
	990530	**Provinsi Jambi**	468.803.682.000	468.803.682.000	-
1	990544	Kab. Batanghari	260.698.423.000	260.698.423.000	-
2	990565	Kab. Bungo	317.541.798.000	317.541.798.000	-
3	990586	Kab. Kerinci	352.522.722.000	352.522.722.000	-
4	990572	Kab. Merangin	339.161.139.000	339.161.139.000	-
5	980184	Kab. Muaro Jambi	276.442.827.000	276.442.827.000	-
6	980163	Kab. Sarolangun	273.178.987.000	273.178.987.000	-
7	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	230.401.141.000	230.401.141.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
8	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	211.783.015.000	211.783.015.000	-
9	980170	Kab. Tebo	280.043.871.000	280.043.871.000	-
10	990590	Kota Jambi	370.324.986.000	370.324.986.000	-
	990608	**Provinsi Sumatera Selatan**	545.776.133.000	545.776.133.000	-
1	990661	Kab. Lahat	302.847.323.000	302.847.323.000	-
2	990633	Kab. Musi Banyuasin	177.096.271.000	177.096.271.000	-
3	990675	Kab. Musi Rawas	450.423.694.000	450.423.694.000	-
4	990654	Kab. Muara Enim	399.913.302.000	399.913.302.000	-
5	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	510.395.426.000	510.395.426.000	-
6	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	329.680.459.000	329.680.459.000	-
7	990696	Kota Palembang	716.129.540.000	716.129.540.000	-
8	994729	Kota Pagar Alam	186.301.466.000	186.301.466.000	-
9	994733	Kota Lubuk Linggau	210.989.638.000	210.989.638.000	-
10	994712	Kota Prabumulih	180.935.827.000	180.935.827.000	-
11	997557	Kab. Banyuasin	429.915.555.000	429.915.555.000	-
12	987560	Kab. Ogan Ilir	288.510.604.000	288.510.604.000	-
13	987549	Kab. OKU Timur	358.855.952.000	358.855.952.000	-
14	987553	Kab. OKU Selatan	255.050.238.000	255.050.238.000	-
15	963342	Kab. Empat Lawang	109.189.031.000	109.189.031.000	-
	993813	**Provinsi Bangka Belitung**	391.045.440.000	391.045.440.000	-
1	990629	Kab. Bangka	280.703.630.000	280.703.630.000	-
2	990612	Kab. Belitung	245.522.870.000	245.522.870.000	-
3	990701	Kota Pangkal Pinang	239.742.242.000	239.742.242.000	-
4	998189	Kab. Bangka Selatan	230.204.601.000	230.204.601.000	-
5	998172	Kab. Bangka Tengah	205.620.247.000	205.620.247.000	-
6	998168	Kab. Bangka Barat	228.461.981.000	228.461.981.000	-
7	998193	Kab. Belitung Timur	220.654.059.000	220.654.059.000	-
	990718	**Provinsi Bengkulu**	482.472.811.000	482.472.811.000	-
1	990739	Kab. Bengkulu Selatan	267.650.140.000	267.650.140.000	-
2	990722	Kab. Bengkulu Utara	378.637.998.000	378.637.998.000	-
3	990743	Kab. Rejang Lebong	313.542.153.000	313.542.153.000	-
4	990750	Kota Bengkulu	335.328.093.000	335.328.093.000	-
5	998215	Kab. Kaur	200.861.633.000	200.861.633.000	-
6	998201	Kab. Seluma	243.560.308.000	243.560.308.000	-
7	998503	Kab. Mukomuko	223.756.452.000	223.756.452.000	-
8	987600	Kab. Lebong	207.672.820.000	207.672.820.000	-
9	987617	Kab. Kepahiang	214.515.588.000	214.515.588.000	-
	990764	**Provinsi Lampung**	570.533.930.000	570.533.930.000	-
1	990807	Kab. Lampung Barat	325.662.015.000	325.662.015.000	-
2	990771	Kab. Lampung Selatan	658.043.647.000	658.043.647.000	-
3	990785	Kab. Lampung Tengah	669.102.531.000	669.102.531.000	-
4	990792	Kab. Lampung Utara	440.124.311.000	440.124.311.000	-
5	980191	Kab. Lampung Timur	529.485.333.000	529.485.333.000	-
6	993351	Kab. Tanggamus	542.094.963.000	542.094.963.000	-
7	993347	Kab. Tulang Bawang	450.771.445.000	450.771.445.000	-
8	980206	Kab. Way Kanan	297.523.114.000	297.523.114.000	-
9	990811	Kota Bandar Lampung	509.474.017.000	509.474.017.000	-
10	980210	Kota Metro	208.068.039.000	208.068.039.000	-
	990828	**Provinsi DKI Jakarta**	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
	990881	**Provinsi Jawa Barat**	904.231.861.000	904.231.861.000	-
1	991003	Kab. Bandung	1.001.542.069.000	1.001.542.069.000	-
2	990963	Kab. Bekasi	525.365.565.000	525.365.565.000	-
3	990938	Kab. Bogor	1.062.589.558.000	1.062.589.558.000	-
4	991045	Kab. Ciamis	857.303.374.000	857.303.374.000	-
5	990959	Kab. Cianjur	824.504.170.000	824.504.170.000	-
6	991052	Kab. Cirebon	793.934.226.000	793.934.226.000	-
7	991024	Kab. Garut	1.002.247.586.000	1.002.247.586.000	-
8	991070	Kab. Indramayu	682.130.289.000	682.130.289.000	-
9	990970	Kab. Karawang	689.521.993.000	689.521.993.000	-
10	991066	Kab. Kuningan	586.883.974.000	586.883.974.000	-
11	991087	Kab. Majalengka	600.795.435.000	600.795.435.000	-
12	990984	Kab. Purwakarta	388.026.357.000	388.026.357.000	-
13	990991	Kab. Subang	618.600.128.000	618.600.128.000	-
14	990942	Kab. Sukabumi	827.153.453.000	827.153.453.000	-
15	991010	Kab. Sumedang	608.993.532.000	608.993.532.000	-
16	991031	Kab. Tasikmalaya	789.565.364.000	789.565.364.000	-
17	991091	Kota Bandung	959.016.427.000	959.016.427.000	-
18	993330	Kota Bekasi	590.144.385.000	590.144.385.000	-
19	991109	Kota Bogor	397.366.563.000	397.366.563.000	-
20	991120	Kota Cirebon	340.669.127.000	340.669.127.000	-
21	980032	Kota Depok	427.136.387.000	427.136.387.000	-
22	991113	Kota Sukabumi	278.943.833.000	278.943.833.000	-
23	994754	Kota Cimahi	305.008.920.000	305.008.920.000	-
24	994740	Kota Tasikmalaya	406.141.454.000	406.141.454.000	-
25	998126	Kota Banjar	191.153.331.000	191.153.331.000	-
26	963302	Kab. Bandung Barat	486.211.545.000	486.211.545.000	-
	993809	**Provinsi Banten**	342.743.861.000	342.743.861.000	-
1	990917	Kab. Lebak	554.305.361.000	554.305.361.000	-
2	990900	Kab. Pandeglang	580.209.734.000	580.209.734.000	-
3	990895	Kab. Serang	675.626.751.000	675.626.751.000	-
4	990921	Kab. Tangerang	774.453.991.000	774.453.991.000	-
5	980049	Kota Cilegon	251.935.625.000	251.935.625.000	-
6	991134	Kota Tangerang	445.217.401.000	445.217.401.000	-
	991141	**Provinsi Jawa Tengah**	1.053.491.871.000	1.053.491.871.000	-
1	991329	Kab. Banjarnegara	488.707.563.000	488.707.563.000	-
2	991290	Kab. Banyumas	702.152.351.000	702.152.351.000	-
3	991202	Kab. Batang	401.574.876.000	401.574.876.000	-
4	991286	Kab. Blora	478.260.120.000	478.260.120.000	-
5	991396	Kab. Boyolali	571.498.221.000	571.498.221.000	-
6	991223	Kab. Brebes	716.426.703.000	716.426.703.000	-
7	991308	Kab. Cilacap	773.078.652.000	773.078.652.000	-
8	991176	Kab. Demak	483.239.311.000	483.239.311.000	-
9	991180	Kab. Grobogan	615.030.004.000	615.030.004.000	-
10	991265	Kab. Jepara	505.641.495.000	505.641.495.000	-
11	991422	Kab. Karanganyar	506.156.445.000	506.156.445.000	-
12	991375	Kab. Kebumen	616.395.049.000	616.395.049.000	-
13	991162	Kab. Kendal	490.895.234.000	490.895.234.000	-
14	991382	Kab. Klaten	744.676.781.000	744.676.781.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
15	991244	Kab. Kudus	460.540.680.000	460.540.680.000	-
16	991333	Kab. Magelang	588.001.786.000	588.001.786.000	-
17	991230	Kab. Pati	603.264.393.000	603.264.393.000	-
18	991197	Kab. Pekalongan	465.324.091.000	465.324.091.000	-
19	991251	Kab. Pemalang	577.864.687.000	577.864.687.000	-
20	991312	Kab. Purbalingga	450.743.068.000	450.743.068.000	-
21	991361	Kab. Purworejo	515.796.414.000	515.796.414.000	-
22	991272	Kab. Rembang	398.410.703.000	398.410.703.000	-
23	991155	Kab. Semarang	493.166.076.000	493.166.076.000	-
24	991401	Kab. Sragen	551.265.965.000	551.265.965.000	-
25	991418	Kab. Sukoharjo	498.935.688.000	498.935.688.000	-
26	991219	Kab. Tegal	606.452.130.000	606.452.130.000	-
27	991340	Kab. Temanggung	421.056.329.000	421.056.329.000	-
28	991439	Kab. Wonogiri	598.932.854.000	598.932.854.000	-
29	991354	Kab. Wonosobo	427.667.185.000	427.667.185.000	-
30	991485	Kota Magelang	256.525.338.000	256.525.338.000	-
31	991464	Kota Pekalongan	264.051.790.000	264.051.790.000	-
32	991450	Kota Salatiga	225.384.715.000	225.384.715.000	-
33	991443	Kota Semarang	634.864.459.000	634.864.459.000	-
34	991492	Kota Surakarta	420.911.721.000	420.911.721.000	-
35	991471	Kota Tegal	236.194.340.000	236.194.340.000	-
	991507	**Provinsi DI Yogyakarta**	511.338.131.000	511.338.131.000	-
1	991511	Kab. Bantul	583.169.351.000	583.169.351.000	-
2	991532	Kab. Gunung Kidul	504.395.747.000	504.395.747.000	-
3	991549	Kab. Kulon Progo	403.656.783.000	403.656.783.000	-
4	991528	Kab. Sleman	592.594.528.000	592.594.528.000	-
5	991553	Kota Yogyakarta	411.257.230.000	411.257.230.000	-
	991560	**Provinsi Jawa Timur**	1.022.860.627.000	1.022.860.627.000	-
1	991642	Kab. Bangkalan	472.871.889.000	472.871.889.000	-
2	991670	Kab. Banyuwangi	771.131.582.000	771.131.582.000	-
3	991773	Kab. Blitar	634.378.020.000	634.378.020.000	-
4	991837	Kab. Bojonegoro	586.814.115.000	586.814.115.000	-
5	991659	Kab. Bondowoso	447.561.068.000	447.561.068.000	-
6	991574	Kab. Gresik	532.824.783.000	532.824.783.000	-
7	991684	Kab. Jember	942.532.809.000	942.532.809.000	-
8	991600	Kab. Jombang	587.179.341.000	587.179.341.000	-
9	991731	Kab. Kediri	682.047.289.000	682.047.289.000	-
10	991858	Kab. Lamongan	599.292.383.000	599.292.383.000	-
11	991727	Kab. Lumajang	537.879.076.000	537.879.076.000	-
12	991780	Kab. Madiun	468.644.296.000	468.644.296.000	-
13	991802	Kab. Magetan	490.163.947.000	490.163.947.000	-
14	991691	Kab. Malang	967.647.192.000	967.647.192.000	-
15	991581	Kab. Mojokerto	501.520.436.000	501.520.436.000	-
16	991752	Kab. Nganjuk	580.060.073.000	580.060.073.000	-
17	991794	Kab. Ngawi	544.877.704.000	544.877.704.000	-
18	991820	Kab. Pacitan	406.718.314.000	406.718.314.000	-
19	991621	Kab. Pamekasan	447.934.892.000	447.934.892.000	-
20	991706	Kab. Pasuruan	599.547.875.000	599.547.875.000	-
21	991816	Kab. Ponorogo	538.559.997.000	538.559.997.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
22	991710	Kab. Probolinggo	531.084.756.000	531.084.756.000	-
23	991617	Kab. Sampang	422.388.032.000	422.388.032.000	-
24	991595	Kab. Sidoarjo	643.016.063.000	643.016.063.000	-
25	991663	Kab. Situbondo	427.846.472.000	427.846.472.000	-
26	991638	Kab. Sumenep	552.279.665.000	552.279.665.000	-
27	991769	Kab. Trenggalek	465.748.300.000	465.748.300.000	-
28	991841	Kab. Tuban	512.348.506.000	512.348.506.000	-
29	991748	Kab. Tulungagung	628.424.932.000	628.424.932.000	-
30	991912	Kota Blitar	217.165.721.000	217.165.721.000	-
31	991926	Kota Kediri	400.161.615.000	400.161.615.000	-
32	991930	Kota Madiun	266.187.291.000	266.187.291.000	-
33	991883	Kota Malang	473.050.489.000	473.050.489.000	-
34	991879	Kota Mojokerto	222.501.780.000	222.501.780.000	-
35	991890	Kota Pasuruan	225.590.456.000	225.590.456.000	-
36	991905	Kota Probolinggo	250.880.269.000	250.880.269.000	-
37	991862	Kota Surabaya	713.590.304.000	713.590.304.000	-
38	994761	Kota Batu	215.977.808.000	215.977.808.000	-
	991947	**Provinsi Kalimantan Barat**	728.080.795.000	728.080.795.000	-
1	980227	Kab. Bengkayang	294.565.246.000	294.565.246.000	-
2	980231	Kab. Landak	349.350.696.000	349.350.696.000	-
3	991993	Kab. Kapuas Hulu	516.445.842.000	516.445.842.000	-
4	992008	Kab. Ketapang	556.986.638.000	556.986.638.000	-
5	991989	Kab. Pontianak	531.738.803.000	531.738.803.000	-
6	991951	Kab. Sambas	422.842.824.000	422.842.824.000	-
7	991968	Kab. Sanggau	430.631.798.000	430.631.798.000	-
8	991972	Kab. Sintang	538.389.211.000	538.389.211.000	-
9	992012	Kota Pontianak	399.351.867.000	399.351.867.000	-
10	994775	Kota Singkawang	254.513.508.000	254.513.508.000	-
11	987507	Kab. Sekadau	245.122.479.000	245.122.479.000	-
12	987492	Kab. Melawi	281.755.038.000	281.755.038.000	-
13	963358	Kab. Kayong Utara	97.559.593.000	97.559.593.000	-
	992029	**Provinsi Kalimantan Tengah**	670.213.090.000	670.213.090.000	-
1	992054	Kab. Barito Selatan	317.421.563.000	317.421.563.000	-
2	992040	Kab. Barito Utara	301.648.592.000	301.648.592.000	-
3	992033	Kab. Kapuas	481.573.934.000	481.573.934.000	-
4	992075	Kab. Kotawaringin Barat	362.789.904.000	362.789.904.000	-
5	992061	Kab. Kotawaringin Timur	443.628.586.000	443.628.586.000	-
6	992082	Kota Palangkaraya	330.018.672.000	330.018.672.000	-
7	997540	Kab. Barito Timur	255.775.008.000	255.775.008.000	-
8	997536	Kab. Murung Raya	379.056.673.000	379.056.673.000	-
9	997522	Kab. Pulang Pisau	291.192.263.000	291.192.263.000	-
10	997515	Kab. Gunung Mas	289.760.561.000	289.760.561.000	-
11	997501	Kab. Lamandau	251.739.656.000	251.739.656.000	-
12	997493	Kab. Sukamara	258.090.403.000	258.090.403.000	-
13	997472	Kab. Katingan	378.084.107.000	378.084.107.000	-
14	997489	Kab. Seruyan	340.561.127.000	340.561.127.000	-
	992164	**Provinsi Kalimantan Selatan**	466.549.205.000	466.549.205.000	-
1	992171	Kab. Banjar	371.218.256.000	371.218.256.000	-
2	992228	Kab. Barito Kuala	296.292.246.000	296.292.246.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
3	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	293.908.862.000	293.908.862.000	-
4	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	292.212.997.000	292.212.997.000	-
5	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	244.565.504.000	244.565.504.000	-
6	992249	Kab. Kota Baru	347.623.085.000	347.623.085.000	-
7	992232	Kab. Tabalong	247.998.722.000	247.998.722.000	-
8	992185	Kab. Tanah Laut	277.759.677.000	277.759.677.000	-
9	992192	Kab. Tapin	251.432.807.000	251.432.807.000	-
10	980248	Kota Banjarbaru	203.334.205.000	203.334.205.000	-
11	992260	Kota Banjarmasin	395.267.531.000	395.267.531.000	-
12	998236	Kab. Balangan	185.712.462.000	185.712.462.000	-
13	998222	Kab. Tanah Bumbu	239.834.121.000	239.834.121.000	-
	992096	**Provinsi Kalimantan Timur**	126.228.861.000	126.228.861.000	-
1	992139	Kab. Berau	300.855.826.000	300.855.826.000	-
2	992122	Kab. Bulungan	206.124.288.000	206.124.288.000	-
3	992101	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-
4	980273	Kab. Kutai Barat	369.682.515.000	369.682.515.000	-
5	980280	Kab. Kutai Timur	292.217.281.000	292.217.281.000	-
6	980269	Kab. Malinau	403.558.269.000	403.558.269.000	-
7	980252	Kab. Nunukan	145.618.382.000	145.618.382.000	-
8	992118	Kab. Paser	183.670.800.000	183.670.800.000	-
9	992150	Kota Balikpapan	174.390.192.000	174.390.192.000	-
10	980294	Kota Bontang	48.929.482.000	48.929.482.000	-
11	992143	Kota Samarinda	283.660.270.000	283.660.270.000	-
12	941901	Kota Tarakan	61.043.476.000	61.043.476.000	-
13	997561	Kab. Penajam Paser Utara	33.092.046.000	33.092.046.000	-
	993021	**Provinsi Sulawesi Utara**	532.916.167.000	532.916.167.000	-
1	993059	Kab. Bolaang Mongondow	306.761.411.000	306.761.411.000	-
2	993042	Kab. Minahasa	370.172.699.000	370.172.699.000	-
3	993063	Kab. Sangihe	213.478.252.000	213.478.252.000	-
4	993091	Kota Bitung	271.735.114.000	271.735.114.000	-
5	993070	Kota Manado	430.073.269.000	430.073.269.000	-
6	997412	Kab. Kepulauan Talaud	248.890.970.000	248.890.970.000	-
7	998240	Kab. Minahasa Selatan	234.187.634.000	234.187.634.000	-
8	998257	Kota Tomohon	204.066.920.000	204.066.920.000	-
9	987485	Kab. Minahasa Utara	254.843.628.000	254.843.628.000	-
10	963395	Kota Kotamubagu	79.200.163.000	79.200.163.000	-
11	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	76.993.427.000	76.993.427.000	-
12	963389	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	97.010.264.000	97.010.264.000	-
13	963415	Kab. Minahasa Tenggara	107.519.701.000	107.519.701.000	-
	993820	**Provinsi Gorontalo**	368.637.996.000	368.637.996.000	-
1	980302	Kab. Boalemo	199.824.000.000	199.824.000.000	-
2	993038	Kab. Gorontalo	272.770.367.000	272.770.367.000	-
3	993084	Kota Gorontalo	256.963.926.000	256.963.926.000	-
4	998261	Kab. Pohuwato	219.117.783.000	219.117.783.000	-
5	998278	Kab. Bone Bolango	224.108.583.000	224.108.583.000	-
6	963421	Kab. Gorontalo Utara	101.367.107.000	101.367.107.000	-
	992960	**Provinsi Sulawesi Tengah**	606.486.779.000	606.486.779.000	-
1	993000	Kab. Banggai	431.119.584.000	431.119.584.000	-
2	980337	Kab. Banggai Kepulauan	260.478.688.000	260.478.688.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
3	980316	Kab. Buol	254.338.324.000	254.338.324.000	-
4	992998	Kab. Toli-Toli	304.613.239.000	304.613.239.000	-
5	992981	Kab. Donggala	502.872.835.000	502.872.835.000	-
6	980320	Kab. Morowali	377.308.218.000	377.308.218.000	-
7	992977	Kab. Poso	352.336.943.000	352.336.943.000	-
8	993017	Kota Palu	349.457.013.000	349.457.013.000	-
9	997582	Kab. Parigi Moutong	363.764.113.000	363.764.113.000	-
10	987471	Kab. Tojo Una Una	247.185.257.000	247.185.257.000	-
	992722	**Provinsi Sulawesi Selatan**	656.709.523.000	656.709.523.000	-
1	992846	Kab. Bantaeng	224.668.231.000	224.668.231.000	-
2	992888	Kab. Barru	248.994.949.000	248.994.949.000	-
3	992778	Kab. Bone	529.055.377.000	529.055.377.000	-
4	992832	Kab. Bulukumba	363.390.164.000	363.390.164.000	-
5	992935	Kab. Enrekang	252.233.180.000	252.233.180.000	-
6	992740	Kab. G o w a	417.798.756.000	417.798.756.000	-
7	992850	Kab. Jeneponto	296.146.274.000	296.146.274.000	-
8	992811	Kab. Luwu	318.300.451.000	318.300.451.000	-
9	980341	Kab. Luwu Utara	303.617.715.000	303.617.715.000	-
10	992799	Kab. M a r o s *	312.182.263.000	312.182.263.000	-
11	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	326.055.514.000	326.055.514.000	-
12	992736	Kab. Pinrang	340.755.849.000	340.755.849.000	-
13	992867	Kab. Selayar	242.376.729.000	242.376.729.000	-
14	992892	Kab. Sidenreng Rappang	296.495.624.000	296.495.624.000	-
15	992825	Kab. Sinjai	284.001.897.000	284.001.897.000	-
16	992914	Kab. Soppeng	317.480.921.000	317.480.921.000	-
17	992871	Kab. Takalar	294.665.014.000	294.665.014.000	-
18	992782	Kab. Tana Toraja	396.158.732.000	396.158.732.000	-
19	992757	Kab. Wajo	336.187.999.000	336.187.999.000	-
20	992956	Kota Pare-pare	228.255.420.000	228.255.420.000	-
21	992942	Kota Makassar	643.328.392.000	643.328.392.000	-
22	997604	Kota Palopo	226.220.617.000	226.220.617.000	-
23	928282	Kab. Luwu Timur	241.002.894.000	241.002.894.000	-
	955383	**Provinsi Sulawesi Barat**	366.674.672.000	366.674.672.000	-
1	992804	Kab. Majene	243.588.257.000	243.588.257.000	-
2	992761	Kab. Mamuju	343.584.890.000	343.584.890.000	-
3	992921	Kab. Polewali Mandar	335.303.018.000	335.303.018.000	-
4	997599	Kab. Mamasa	214.348.008.000	214.348.008.000	-
5	998299	Kab. Mamuju Utara	184.708.175.000	184.708.175.000	-
	993106	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	566.435.382.000	566.435.382.000	-
1	993127	Kab. Buton	343.248.375.000	343.248.375.000	-
2	993110	Kab. Konawe	336.799.188.000	336.799.188.000	-
3	993148	Kab. Kolaka	376.492.765.000	376.492.765.000	-
4	993131	Kab. Muna	340.333.723.000	340.333.723.000	-
5	993326	Kota Kendari	325.337.878.000	325.337.878.000	-
6	994782	Kota Bau-bau	254.108.450.000	254.108.450.000	-
7	998304	Kab. Konawe Selatan	306.437.585.000	306.437.585.000	-
8	987642	Kab. Bombana	217.289.824.000	217.289.824.000	-
9	987638	Kab. Wakatobi	207.371.566.000	207.371.566.000	-
10	987443	Kab. Kolaka Utara	237.031.195.000	237.031.195.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
11	963364	Kab. Konawe Utara	116.805.580.000	116.805.580.000	-
12	963370	Kab. Buton Utara	78.017.615.000	78.017.615.000	-
	992274	**Provinsi Bali**	448.187.419.000	448.187.419.000	-
1	992342	Kab. Badung	265.916.791.000	265.916.791.000	-
2	992338	Kab. Bangli	262.885.446.000	262.885.446.000	-
3	992281	Kab. Buleleng	504.733.624.000	504.733.624.000	-
4	992317	Kab. Gianyar	385.187.683.000	385.187.683.000	-
5	992295	Kab. Jembrana	304.078.636.000	304.078.636.000	-
6	992321	Kab. Karangasem	349.814.538.000	349.814.538.000	-
7	992300	Kab. Klungkung	276.182.564.000	276.182.564.000	-
8	992359	Kab. Tabanan	416.172.072.000	416.172.072.000	-
9	992363	Kota Denpasar	342.072.951.000	342.072.951.000	-
	992370	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	511.286.478.000	511.286.478.000	-
1	992410	Kab. Bima	421.053.948.000	421.053.948.000	-
2	992431	Kab. Dompu	284.521.612.000	284.521.612.000	-
3	992384	Kab. Lombok Barat	479.217.729.000	479.217.729.000	-
4	992391	Kab. Lombok Tengah	508.836.392.000	508.836.392.000	-
5	992406	Kab. Lombok Timur	584.249.613.000	584.249.613.000	-
6	992427	Kab. Sumbawa	416.380.064.000	416.380.064.000	-
7	992448	Kota Mataram	301.817.302.000	301.817.302.000	-
8	997625	Kota Bima	231.013.860.000	231.013.860.000	-
9	987450	Kab. Sumbawa Barat	180.749.918.000	180.749.918.000	-
	992452	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	616.601.854.000	616.601.854.000	-
1	992502	Kab. Alor	284.632.877.000	284.632.877.000	-
2	992473	Kab. Belu	379.987.048.000	379.987.048.000	-
3	992537	Kab. Ende	307.599.052.000	307.599.052.000	-
4	992520	Kab. Flores Timur	290.057.404.000	290.057.404.000	-
5	992469	Kab. Kupang	401.642.447.000	401.642.447.000	-
6	980379	Kab. Lembata	213.794.938.000	213.794.938.000	-
7	992558	Kab. Manggarai	382.534.840.000	382.534.840.000	-
8	992541	Kab. Ngada	164.113.937.000	164.113.937.000	-
9	992516	Kab. Sikka	302.338.153.000	302.338.153.000	-
10	992579	Kab. Sumba Barat	82.809.111.000	82.809.111.000	-
11	992562	Kab. Sumba Timur	324.934.508.000	324.934.508.000	-
12	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	389.484.916.000	389.484.916.000	-
13	992480	Kab. Timor Tengah Utara	285.796.603.000	285.796.603.000	-
14	993368	Kota Kupang	313.887.875.000	313.887.875.000	-
15	997578	Kab. Rote Ndao	199.093.092.000	199.093.092.000	-
16	998510	Kab. Manggarai Barat	239.246.096.000	239.246.096.000	-
17	963430	Kab. Nagekeo	147.783.312.000	147.783.312.000	-
18	963446	Kab. Sumba Barat Daya	154.876.552.000	154.876.552.000	-
19	963452	Kab. Sumba Tengah	95.372.848.000	95.372.848.000	-
	993152	**Provinsi Maluku**	556.236.402.000	556.236.402.000	-
1	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	419.791.404.000	419.791.404.000	-
2	993169	Kab. Maluku Tengah	500.793.445.000	500.793.445.000	-
3	993173	Kab. Maluku Tenggara	289.170.568.000	289.170.568.000	-
4	980362	Kab. Pulau Buru	292.377.596.000	292.377.596.000	-
5	993202	Kota Ambon	361.265.488.000	361.265.488.000	-
6	987439	Kab. Seram Bagian Barat	241.073.749.000	241.073.749.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
7	987422	Kab. Seram Bagian Timur	186.038.087.000	186.038.087.000	-
8	987621	Kab. Kepulauan Aru	219.698.360.000	219.698.360.000	-
	980011	**Provinsi Maluku Utara**	451.481.459.000	451.481.459.000	-
1	993194	Kab. Halmahera Tengah	203.031.320.000	203.031.320.000	-
2	993180	Kab. Halmahera Barat	219.556.721.000	219.556.721.000	-
3	980028	Kota Ternate	245.930.849.000	245.930.849.000	-
4	998346	Kab. Halmahera Timur	205.692.272.000	205.692.272.000	-
5	998350	Kota Tidore Kepulauan	215.237.280.000	215.237.280.000	-
6	998332	Kab. Kepulauan Sula	261.290.724.000	261.290.724.000	-
7	998325	Kab. Halmahera Selatan	300.565.063.000	300.565.063.000	-
8	998311	Kab. Halmahera Utara	276.125.863.000	276.125.863.000	-
	993216	**Provinsi Papua**	1.002.431.825.000	1.002.431.825.000	-
1	993237	Kab. Biak Numfor	317.334.041.000	317.334.041.000	-
2	993220	Kab. Jayapura	421.254.250.000	421.254.250.000	-
3	993290	Kab. Jayawijaya	369.230.697.000	369.230.697.000	-
4	993283	Kab. Merauke	647.518.006.000	647.518.006.000	-
5	993401	Kab. Mimika	237.570.131.000	237.570.131.000	-
6	993305	Kab. Nabire	423.565.995.000	423.565.995.000	-
7	993393	Kab. Paniai	442.609.847.000	442.609.847.000	-
8	993389	Kab. Puncak Jaya	388.175.029.000	388.175.029.000	-
9	993258	Kab. Yapen Waropen	256.826.101.000	256.826.101.000	-
10	993312	Kota Jayapura	331.616.963.000	331.616.963.000	-
11	998392	Kab. Sarmi	304.314.857.000	304.314.857.000	-
12	998400	Kab. Keerom	296.638.388.000	296.638.388.000	-
13	998477	Kab. Yahukimo	392.591.383.000	392.591.383.000	-
14	998421	Kab. Pegunungan Bintang	350.990.794.000	350.990.794.000	-
15	998414	Kab. Tolikara	312.393.431.000	312.393.431.000	-
16	998388	Kab. Boven Digoel	449.094.135.000	449.094.135.000	-
17	998367	Kab. Mappi	412.597.444.000	412.597.444.000	-
18	998371	Kab. Asmat	407.080.185.000	407.080.185.000	-
19	998460	Kab. Waropen	173.817.345.000	173.817.345.000	-
20	987511	Kab. Supiori	202.666.741.000	202.666.741.000	-
21	963461	Kab. Mamberamo Raya	366.341.146.000	366.341.146.000	-
	998854	**Provinsi Papua Barat**	578.084.261.000	578.084.261.000	-
1	993262	Kab. Sorong	272.373.321.000	272.373.321.000	-
2	993241	Kab. Manokwari	334.244.601.000	334.244.601.000	-
3	993279	Kab. Fak Fak	378.324.359.000	378.324.359.000	-
4	980383	Kota Sorong	238.950.947.000	238.950.947.000	-
5	998442	Kab. Sorong Selatan	418.028.618.000	418.028.618.000	-
6	998456	Kab. Raja Ampat	296.123.511.000	296.123.511.000	-
7	998481	Kab. Teluk Bintuni	344.624.945.000	344.624.945.000	-
8	998498	Kab. Teluk Wondama	236.404.458.000	236.404.458.000	-
9	998435	Kab. Kaimana	361.449.597.000	361.449.597.000	-
Jumlah			**179.507.144.871.000**	**179.507.144.871.000**	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
	990015	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	35.403.000.000	10.620.900.000	24.782.100.000
1	990078	Kab. Aceh Barat	46.785.000.000	46.785.000.000	-
2	990022	Kab. Aceh Besar	52.984.000.000	52.984.000.000	-
3	990061	Kab. Aceh Selatan	46.931.000.000	42.237.900.000	4.693.100.000
4	980007	Kab. Aceh Singkil	47.216.000.000	47.216.000.000	-
5	990082	Kab. Aceh Tengah	49.367.000.000	49.367.000.000	-
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	44.449.000.000	44.449.000.000	-
7	990057	Kab. Aceh Timur	57.761.000.000	57.761.000.000	-
8	990040	Kab. Aceh Utara	54.905.000.000	49.414.500.000	5.490.500.000
9	980053	Kab. Bireun	54.015.000.000	54.015.000.000	-
10	990036	Kab. Aceh Pidie	59.091.000.000	59.091.000.000	-
11	993372	Kab. Simeulue	52.610.000.000	52.610.000.000	-
12	990104	Kota Banda Aceh	38.642.000.000	38.642.000.000	-
13	990111	Kota Sabang	39.542.000.000	23.725.200.000	15.816.800.000
14	994672	Kota Langsa	33.990.000.000	33.990.000.000	-
15	994686	Kota Lhokseumawe	31.203.000.000	31.203.000.000	-
16	997451	Kab. Nagan Raya	43.198.000.000	43.198.000.000	-
17	997447	Kab. Aceh Jaya	35.286.000.000	35.286.000.000	-
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	40.199.000.000	40.199.000.000	-
19	997430	Kab. Gayo Lues	31.888.000.000	31.888.000.000	-
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	42.823.000.000	42.823.000.000	-
21	987532	Kab. Bener Meriah	41.141.000.000	41.141.000.000	-
22	963327	Kota Subulussalam	12.631.000.000	11.367.900.000	1.263.100.000
23	963311	Kab. Pidie Jaya	12.989.000.000	7.793.400.000	5.195.600.000
	990125	**Provinsi Sumatera Utara**	-	-	-
1	990221	Kab. Asahan	76.650.000.000	76.650.000.000	-
2	990192	Kab. Dairi	55.301.000.000	55.301.000.000	-
3	990132	Kab. Deli Serdang	84.730.000.000	84.730.000.000	-
4	990146	Kab. Tanah Karo	58.203.000.000	52.382.700.000	5.820.300.000
5	990188	Kab. Labuhan Batu	22.889.000.000	22.889.000.000	-
6	990150	Kab. Langkat	64.975.000.000	64.975.000.000	-
7	941915	Kab. Mandailing Natal	53.740.000.000	53.740.000.000	-
8	990235	Kab. Nias	77.364.000.000	69.627.600.000	7.736.400.000
9	990171	Kab. Simalungun	80.131.000.000	80.131.000.000	-
10	990214	Kab. Tapanuli Selatan	66.721.000.000	66.721.000.000	-
11	990167	Kab. Tapanuli Tengah	47.840.000.000	47.840.000.000	-
12	990200	Kab. Tapanuli Utara	57.793.000.000	52.013.700.000	5.779.300.000
13	941922	Kab. Toba Samosir	58.321.000.000	52.488.900.000	5.832.100.000
14	990260	Kota Binjai	28.369.000.000	28.369.000.000	-
15	990242	Kota Medan	22.325.000.000	22.325.000.000	-
16	990277	Kota Pematang Siantar	29.785.000.000	29.785.000.000	-
17	990298	Kota Sibolga	34.976.000.000	34.976.000.000	-
18	990281	Kota Tanjung Balai	31.158.000.000	28.042.200.000	3.115.800.000
19	990256	Kota Tebing Tinggi	31.156.000.000	31.156.000.000	-
20	994690	Kota Padang Sidempuan	29.689.000.000	29.689.000.000	-
21	998147	Kab. Pakpak Bharat	41.962.000.000	41.962.000.000	-
22	998130	Kab. Nias Selatan	56.521.000.000	50.868.900.000	5.652.100.000
23	998151	Kab. Humbang Hasundutan	39.663.000.000	39.663.000.000	-
24	987418	Kab. Serdang Bedagai	48.566.000.000	48.566.000.000	-
25	987528	Kab. Samosir	55.720.000.000	55.720.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
26	963333	Kab. Batu bara	14.598.000.000	13.138.200.000	1.459.800.000
	990303	**Provinsi Sumatera Barat**	24.567.000.000	24.567.000.000	-
1	990331	Kab. Limapuluh Kota	60.004.000.000	60.004.000.000	-
2	990310	Kab. Agam	62.157.000.000	62.157.000.000	-
3	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	46.549.000.000	13.964.700.000	32.584.300.000
4	990352	Kab. Padang Pariaman	62.512.000.000	62.512.000.000	-
5	990324	Kab. Pasaman	48.971.000.000	48.971.000.000	-
6	990366	Kab. Pesisir Selatan	69.773.000.000	69.773.000.000	-
7	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	41.295.000.000	41.295.000.000	-
8	990345	Kab. Solok	55.308.000.000	55.308.000.000	-
9	990370	Kab. Tanah Datar	51.944.000.000	51.944.000.000	-
10	990391	Kota Bukit Tinggi	32.964.000.000	29.667.600.000	3.296.400.000
11	990409	Kota Padang Panjang	29.395.000.000	29.395.000.000	-
12	990434	Kota Padang	43.829.000.000	43.829.000.000	-
13	990441	Kota Payakumbuh	29.755.000.000	26.779.500.000	2.975.500.000
14	990420	Kota Sawahlunto	33.228.000.000	33.228.000.000	-
15	990413	Kota Solok	32.838.000.000	32.838.000.000	-
16	997611	Kota Pariaman	40.004.000.000	40.004.000.000	-
17	987595	Kab. Pasaman Barat	46.718.000.000	46.718.000.000	-
18	987574	Kab. Dharmasraya	40.766.000.000	40.766.000.000	-
19	987581	Kab. Solok Selatan	42.829.000.000	42.829.000.000	-
	990455	**Provinsi Riau**	-	-	-
1	990476	Kab. Bengkalis	9.899.000.000	2.969.700.000	6.929.300.000
2	990502	Kab. Indragiri Hilir	10.604.000.000	9.543.600.000	1.060.400.000
3	990497	Kab. Indragiri Hulu	9.690.000.000	5.814.000.000	3.876.000.000
4	990462	Kab. Kampar	10.153.000.000	9.137.700.000	1.015.300.000
5	980138	Kab. Kuantan Singingi	40.696.000.000	40.696.000.000	-
6	980074	Kab. Pelalawan	8.490.000.000	7.641.000.000	849.000.000
7	980095	Kab. Rokan Hilir	39.969.000.000	11.990.700.000	27.978.300.000
8	980081	Kab. Rokan Hulu	39.927.000.000	39.927.000.000	-
9	980100	Kab. Siak	7.749.000.000	4.649.400.000	3.099.600.000
10	980142	Kota Dumai	8.220.000.000	7.398.000.000	822.000.000
11	990519	Kota Pekanbaru	8.029.000.000	7.226.100.000	802.900.000
	998840	**Provinsi Kepulauan Riau**	5.801.000.000	5.801.000.000	-
1	990480	Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	10.085.000.000	10.085.000.000	-
2	980121	Kab. Natuna	34.693.000.000	34.693.000.000	-
3	980117	Kab. Karimun	18.744.000.000	18.744.000.000	-
4	990523	Kota Batam	8.251.000.000	7.425.900.000	825.100.000
5	994708	Kota Tanjung Pinang	28.194.000.000	25.374.600.000	2.819.400.000
6	987464	Kab. Lingga	38.539.000.000	38.539.000.000	-
	990530	**Provinsi Jambi**	24.454.000.000	24.454.000.000	-
1	990544	Kab. Batanghari	43.609.000.000	43.609.000.000	-
2	990565	Kab. Bungo	39.573.000.000	39.573.000.000	-
3	990586	Kab. Kerinci	52.266.000.000	52.266.000.000	-
4	990572	Kab. Merangin	43.000.000.000	43.000.000.000	-
5	980184	Kab. Muaro Jambi	46.043.000.000	46.043.000.000	-
6	980163	Kab. Sarolangun	41.645.000.000	41.645.000.000	-
7	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	9.877.000.000	9.877.000.000	-
8	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	41.345.000.000	41.345.000.000	-
9	980170	Kab. Tebo	42.509.000.000	42.509.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
10	990590	Kota Jambi	36.136.000.000	36.136.000.000	-
	990608	**Provinsi Sumatera Selatan**	-	-	-
1	990661	Kab. Lahat	49.102.000.000	49.102.000.000	-
2	990633	Kab. Musi Banyuasin	49.136.000.000	49.136.000.000	-
3	990675	Kab. Musi Rawas	62.590.000.000	62.590.000.000	-
4	990654	Kab. Muara Enim	10.623.000.000	10.623.000.000	-
5	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	60.742.000.000	60.742.000.000	-
6	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	39.018.000.000	39.018.000.000	-
7	990696	Kota Palembang	8.387.000.000	8.387.000.000	-
8	994729	Kota Pagar Alam	32.473.000.000	32.473.000.000	-
9	994733	Kota Lubuk Linggau	25.045.000.000	25.045.000.000	-
10	994712	Kota Prabumulih	29.599.000.000	29.599.000.000	-
11	997557	Kab. Banyuasin	48.030.000.000	48.030.000.000	-
12	987560	Kab. Ogan Ilir	40.329.000.000	40.329.000.000	-
13	987549	Kab. OKU Timur	47.229.000.000	47.229.000.000	-
14	987553	Kab. OKU Selatan	36.369.000.000	36.369.000.000	-
15	963342	Kab. Empat Lawang	9.254.000.000	2.776.200.000	6.477.800.000
	993813	**Provinsi Bangka Belitung**	22.029.000.000	19.826.100.000	2.202.900.000
1	990629	Kab. Bangka	53.138.000.000	53.138.000.000	-
2	990612	Kab. Belitung	50.326.000.000	50.326.000.000	-
3	990701	Kota Pangkal Pinang	36.837.000.000	33.153.300.000	3.683.700.000
4	998189	Kab. Bangka Selatan	43.633.000.000	43.633.000.000	-
5	998172	Kab. Bangka Tengah	43.975.000.000	43.975.000.000	-
6	998168	Kab. Bangka Barat	47.477.000.000	42.729.300.000	4.747.700.000
7	998193	Kab. Belitung Timur	40.623.000.000	40.623.000.000	-
	990718	**Provinsi Bengkulu**	25.396.000.000	7.618.800.000	17.777.200.000
1	990739	Kab. Bengkulu Selatan	65.318.000.000	65.318.000.000	-
2	990722	Kab. Bengkulu Utara	68.577.000.000	68.577.000.000	-
3	990743	Kab. Rejang Lebong	56.598.000.000	56.598.000.000	-
4	990750	Kota Bengkulu	41.099.000.000	41.099.000.000	-
5	998215	Kab. Kaur	46.560.000.000	41.904.000.000	4.656.000.000
6	998201	Kab. Seluma	51.822.000.000	51.822.000.000	-
7	998503	Kab. Mukomuko	44.680.000.000	44.680.000.000	-
8	987600	Kab. Lebong	38.993.000.000	35.093.700.000	3.899.300.000
9	987617	Kab. Kepahiang	59.015.000.000	59.015.000.000	-
	990764	**Provinsi Lampung**	22.728.000.000	22.728.000.000	-
1	990807	Kab. Lampung Barat	48.966.000.000	48.966.000.000	-
2	990771	Kab. Lampung Selatan	77.819.000.000	77.819.000.000	-
3	990785	Kab. Lampung Tengah	55.496.000.000	55.496.000.000	-
4	990792	Kab. Lampung Utara	54.558.000.000	54.558.000.000	-
5	980191	Kab. Lampung Timur	68.081.000.000	40.848.600.000	27.232.400.000
6	993351	Kab. Tanggamus	60.857.000.000	60.857.000.000	-
7	993347	Kab. Tulang Bawang	45.142.000.000	45.142.000.000	-
8	980206	Kab. Way Kanan	41.638.000.000	41.638.000.000	-
9	990811	Kota Bandar Lampung	42.685.000.000	42.685.000.000	-
10	980210	Kota Metro	27.843.000.000	27.843.000.000	-
	990828	**Provinsi DKI Jakarta**	-	-	-
	990881	**Provinsi Jawa Barat**	-	-	-
1	991003	Kab. Bandung	11.012.000.000	11.012.000.000	-
2	990963	Kab. Bekasi	8.992.000.000	8.092.800.000	899.200.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
3	990938	Kab. Bogor	10.289.000.000	10.289.000.000	-
4	991045	Kab. Ciamis	98.226.000.000	98.226.000.000	-
5	990959	Kab. Cianjur	91.965.000.000	91.965.000.000	-
6	991052	Kab. Cirebon	9.931.000.000	9.931.000.000	-
7	991024	Kab. Garut	96.486.000.000	96.486.000.000	-
8	991070	Kab. Indramayu	12.397.000.000	12.397.000.000	-
9	990970	Kab. Karawang	9.491.000.000	9.491.000.000	-
10	991066	Kab. Kuningan	64.718.000.000	64.718.000.000	-
11	991087	Kab. Majalengka	49.558.000.000	49.558.000.000	-
12	990984	Kab. Purwakarta	41.701.000.000	41.701.000.000	-
13	990991	Kab. Subang	82.513.000.000	82.513.000.000	-
14	990942	Kab. Sukabumi	96.746.000.000	96.746.000.000	-
15	991010	Kab. Sumedang	43.785.000.000	43.785.000.000	-
16	991031	Kab. Tasikmalaya	67.305.000.000	67.305.000.000	-
17	991091	Kota Bandung	8.166.000.000	8.166.000.000	-
18	993330	Kota Bekasi	7.974.000.000	7.176.600.000	797.400.000
19	991109	Kota Bogor	14.056.000.000	14.056.000.000	-
20	991120	Kota Cirebon	35.592.000.000	35.592.000.000	-
21	980032	Kota Depok	7.650.000.000	7.650.000.000	-
22	991113	Kota Sukabumi	27.248.000.000	27.248.000.000	-
23	994754	Kota Cimahi	27.677.000.000	27.677.000.000	-
24	994740	Kota Tasikmalaya	31.788.000.000	31.788.000.000	-
25	998126	Kota Banjar	40.643.000.000	40.643.000.000	-
26	963302	Kab. Bandung Barat	4.274.000.000	1.282.200.000	2.991.800.000
	993809	**Provinsi Banten**	18.097.000.000	18.097.000.000	-
1	990917	Kab. Lebak	65.978.000.000	65.978.000.000	-
2	990900	Kab. Pandeglang	61.563.000.000	61.563.000.000	-
3	990895	Kab. Serang	57.978.000.000	57.978.000.000	-
4	990921	Kab. Tangerang	55.057.000.000	52.005.000.000	3.052.000.000
5	980049	Kota Cilegon	17.172.000.000	17.172.000.000	-
6	991134	Kota Tangerang	7.433.000.000	4.459.800.000	2.973.200.000
	991141	**Provinsi Jawa Tengah**	-	-	-
1	991329	Kab. Banjarnegara	58.868.000.000	58.868.000.000	-
2	991290	Kab. Banyumas	10.146.000.000	10.146.000.000	-
3	991202	Kab. Batang	55.568.000.000	55.568.000.000	-
4	991286	Kab. Blora	58.314.000.000	56.700.000.000	1.614.000.000
5	991396	Kab. Boyolali	54.087.000.000	54.087.000.000	-
6	991223	Kab. Brebes	10.334.000.000	10.334.000.000	-
7	991308	Kab. Cilacap	78.898.000.000	78.898.000.000	-
8	991176	Kab. Demak	63.555.000.000	63.555.000.000	-
9	991180	Kab. Grobogan	10.325.000.000	10.325.000.000	-
10	991265	Kab. Jepara	61.272.000.000	61.272.000.000	-
11	991422	Kab. Karanganyar	54.898.000.000	54.898.000.000	-
12	991375	Kab. Kebumen	66.405.000.000	66.405.000.000	-
13	991162	Kab. Kendal	59.995.000.000	59.995.000.000	-
14	991382	Kab. Klaten	62.798.000.000	62.798.000.000	-
15	991244	Kab. Kudus	47.293.000.000	47.293.000.000	-
16	991333	Kab. Magelang	48.654.000.000	48.654.000.000	-
17	991230	Kab. Pati	66.068.000.000	66.068.000.000	-
18	991197	Kab. Pekalongan	58.600.000.000	58.600.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
19	991251	Kab. Pemalang	9.871.000.000	9.871.000.000	-
20	991312	Kab. Purbalingga	51.047.000.000	51.047.000.000	-
21	991361	Kab. Purworejo	56.743.000.000	56.743.000.000	-
22	991272	Kab. Rembang	51.071.000.000	51.071.000.000	-
23	991155	Kab. Semarang	57.838.000.000	57.838.000.000	-
24	991401	Kab. Sragen	54.287.000.000	54.287.000.000	-
25	991418	Kab. Sukoharjo	50.547.000.000	50.547.000.000	-
26	991219	Kab. Tegal	28.476.000.000	28.476.000.000	-
27	991340	Kab. Temanggung	48.148.000.000	48.148.000.000	-
28	991439	Kab. Wonogiri	70.627.000.000	70.627.000.000	-
29	991354	Kab. Wonosobo	57.280.000.000	57.280.000.000	-
30	991485	Kota Magelang	27.950.000.000	27.950.000.000	-
31	991464	Kota Pekalongan	35.145.000.000	35.145.000.000	-
32	991450	Kota Salatiga	31.028.000.000	31.028.000.000	-
33	991443	Kota Semarang	21.141.000.000	21.141.000.000	-
34	991492	Kota Surakarta	31.007.000.000	31.007.000.000	-
35	991471	Kota Tegal	31.499.000.000	31.499.000.000	-
	991507	**Provinsi DI Yogyakarta**	19.468.000.000	19.468.000.000	-
1	991511	Kab. Bantul	57.448.000.000	57.448.000.000	-
2	991532	Kab. Gunung Kidul	60.879.000.000	60.879.000.000	-
3	991549	Kab. Kulon Progo	52.138.000.000	52.138.000.000	-
4	991528	Kab. Sleman	10.151.000.000	10.151.000.000	-
5	991553	Kota Yogyakarta	32.238.000.000	32.238.000.000	-
	991560	**Provinsi Jawa Timur**	-	-	-
1	991642	Kab. Bangkalan	54.812.000.000	54.812.000.000	-
2	991670	Kab. Banyuwangi	62.582.000.000	56.323.800.000	6.258.200.000
3	991773	Kab. Blitar	67.376.000.000	67.376.000.000	-
4	991837	Kab. Bojonegoro	10.042.000.000	10.042.000.000	-
5	991659	Kab. Bondowoso	45.187.000.000	45.187.000.000	-
6	991574	Kab. Gresik	22.404.000.000	22.404.000.000	-
7	991684	Kab. Jember	66.485.000.000	66.485.000.000	-
8	991600	Kab. Jombang	26.024.000.000	26.024.000.000	-
9	991731	Kab. Kediri	10.032.000.000	10.032.000.000	-
10	991858	Kab. Lamongan	75.972.000.000	75.972.000.000	-
11	991727	Kab. Lumajang	55.841.000.000	55.841.000.000	-
12	991780	Kab. Madiun	48.087.000.000	48.087.000.000	-
13	991802	Kab. Magetan	54.272.000.000	54.272.000.000	-
14	991691	Kab. Malang	89.739.000.000	89.739.000.000	-
15	991581	Kab. Mojokerto	58.977.000.000	58.977.000.000	-
16	991752	Kab. Nganjuk	60.359.000.000	60.359.000.000	-
17	991794	Kab. Ngawi	53.410.000.000	53.410.000.000	-
18	991820	Kab. Pacitan	61.396.000.000	61.396.000.000	-
19	991621	Kab. Pamekasan	55.573.000.000	55.573.000.000	-
20	991706	Kab. Pasuruan	76.241.000.000	76.241.000.000	-
21	991816	Kab. Ponorogo	62.927.000.000	62.927.000.000	-
22	991710	Kab. Probolinggo	52.388.000.000	52.388.000.000	-
23	991617	Kab. Sampang	58.633.000.000	52.769.700.000	5.863.300.000
24	991595	Kab. Sidoarjo	8.946.000.000	8.946.000.000	-
25	991663	Kab. Situbondo	47.784.000.000	47.784.000.000	-
26	991638	Kab. Sumenep	10.222.000.000	9.199.800.000	1.022.200.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
27	991769	Kab. Trenggalek	63.037.000.000	63.037.000.000	-
28	991841	Kab. Tuban	21.321.000.000	21.321.000.000	-
29	991748	Kab. Tulungagung	66.075.000.000	66.075.000.000	-
30	991912	Kota Blitar	32.878.000.000	32.878.000.000	-
31	991926	Kota Kediri	23.891.000.000	23.891.000.000	-
32	991930	Kota Madiun	23.079.000.000	23.079.000.000	-
33	991883	Kota Malang	31.782.000.000	31.782.000.000	-
34	991879	Kota Mojokerto	26.781.000.000	26.781.000.000	-
35	991890	Kota Pasuruan	35.931.000.000	35.931.000.000	-
36	991905	Kota Probolinggo	31.178.000.000	31.178.000.000	-
37	991862	Kota Surabaya	8.075.000.000	8.075.000.000	-
38	994761	Kota Batu	30.520.000.000	30.520.000.000	-
	991947	**Provinsi Kalimantan Barat**	31.094.000.000	31.094.000.000	-
1	980227	Kab. Bengkayang	57.950.000.000	57.950.000.000	-
2	980231	Kab. Landak	49.573.000.000	49.573.000.000	-
3	991993	Kab. Kapuas Hulu	59.552.000.000	59.552.000.000	-
4	992008	Kab. Ketapang	66.239.000.000	66.239.000.000	-
5	991989	Kab. Pontianak	65.820.000.000	65.820.000.000	-
6	991951	Kab. Sambas	72.276.000.000	72.276.000.000	-
7	991968	Kab. Sanggau	69.766.000.000	69.766.000.000	-
8	991972	Kab. Sintang	55.483.000.000	55.483.000.000	-
9	992012	Kota Pontianak	40.142.000.000	40.142.000.000	-
10	994775	Kota Singkawang	47.838.000.000	47.838.000.000	-
11	987507	Kab. Sekadau	44.584.000.000	44.584.000.000	-
12	987492	Kab. Melawi	45.511.000.000	40.959.900.000	4.551.100.000
13	963358	Kab. Kayong Utara	10.254.000.000	9.228.600.000	1.025.400.000
	992029	**Provinsi Kalimantan Tengah**	40.179.000.000	40.179.000.000	-
1	992054	Kab. Barito Selatan	42.450.000.000	42.450.000.000	-
2	992040	Kab. Barito Utara	41.998.000.000	41.998.000.000	-
3	992033	Kab. Kapuas	67.877.000.000	67.877.000.000	-
4	992075	Kab. Kotawaringin Barat	56.997.000.000	56.997.000.000	-
5	992061	Kab. Kotawaringin Timur	21.844.000.000	21.844.000.000	-
6	992082	Kota Palangkaraya	41.820.000.000	41.820.000.000	-
7	997540	Kab. Barito Timur	38.398.000.000	38.398.000.000	-
8	997536	Kab. Murung Raya	29.073.000.000	29.073.000.000	-
9	997522	Kab. Pulang Pisau	53.681.000.000	53.681.000.000	-
10	997515	Kab. Gunung Mas	38.393.000.000	38.393.000.000	-
11	997501	Kab. Lamandau	33.496.000.000	33.496.000.000	-
12	997493	Kab. Sukamara	38.627.000.000	38.627.000.000	-
13	997472	Kab. Katingan	44.735.000.000	44.735.000.000	-
14	997489	Kab. Seruyan	45.065.000.000	45.065.000.000	-
	992164	**Provinsi Kalimantan Selatan**	36.039.000.000	36.039.000.000	-
1	992171	Kab. Banjar	64.033.000.000	64.033.000.000	-
2	992228	Kab. Barito Kuala	59.265.000.000	59.265.000.000	-
3	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	49.148.000.000	49.148.000.000	-
4	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	47.487.000.000	47.487.000.000	-
5	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	40.026.000.000	40.026.000.000	-
6	992249	Kab. Kota Baru	23.274.000.000	23.274.000.000	-
7	992232	Kab. Tabalong	17.779.000.000	17.779.000.000	-
8	992185	Kab. Tanah Laut	17.437.000.000	17.437.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
9	992192	Kab. Tapin	45.493.000.000	45.493.000.000	-
10	980248	Kota Banjarbaru	36.285.000.000	36.285.000.000	-
11	992260	Kota Banjarmasin	43.599.000.000	43.599.000.000	-
12	998236	Kab. Balangan	37.394.000.000	37.394.000.000	-
13	998222	Kab. Tanah Bumbu	45.762.000.000	45.762.000.000	-
	992096	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	-	-
1	992139	Kab. Berau	9.853.000.000	2.955.900.000	6.897.100.000
2	992122	Kab. Bulungan	9.321.000.000	8.388.900.000	932.100.000
3	992101	Kab. Kutai Kartanegara	9.474.000.000	2.842.200.000	6.631.800.000
4	980273	Kab. Kutai Barat	54.754.000.000	54.754.000.000	-
5	980280	Kab. Kutai Timur	42.528.000.000	25.516.800.000	17.011.200.000
6	980269	Kab. Malinau	44.932.000.000	44.932.000.000	-
7	980252	Kab. Nunukan	44.120.000.000	26.472.000.000	17.648.000.000
8	992118	Kab. Paser	9.149.000.000	8.234.100.000	914.900.000
9	992150	Kota Balikpapan	7.601.000.000	7.601.000.000	-
10	980294	Kota Bontang	7.390.000.000	7.390.000.000	-
11	992143	Kota Samarinda	8.162.000.000	8.162.000.000	-
12	941901	Kota Tarakan	7.053.000.000	2.115.900.000	4.937.100.000
13	997561	Kab. Penajam Paser Utara	7.964.000.000	4.778.400.000	3.185.600.000
	993021	**Provinsi Sulawesi Utara**	28.079.000.000	28.079.000.000	-
1	993059	Kab. Bolaang Mongondow	75.487.000.000	75.487.000.000	-
2	993042	Kab. Minahasa	69.193.000.000	69.193.000.000	-
3	993063	Kab. Sangihe	70.924.000.000	70.924.000.000	-
4	993091	Kota Bitung	38.586.000.000	38.586.000.000	-
5	993070	Kota Manado	42.741.000.000	42.741.000.000	-
6	997412	Kab. Kepulauan Talaud	62.085.000.000	62.085.000.000	-
7	998240	Kab. Minahasa Selatan	64.914.000.000	64.914.000.000	-
8	998257	Kota Tomohon	73.906.000.000	73.906.000.000	-
9	987485	Kab. Minahasa Utara	91.055.000.000	91.055.000.000	-
10	963395	Kota Kotamubagu	12.018.000.000	12.018.000.000	-
11	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	12.303.000.000	11.072.700.000	1.230.300.000
12	963389	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	20.438.000.000	20.438.000.000	-
13	963415	Kab. Minahasa Tenggara	11.827.000.000	11.827.000.000	-
	993820	**Provinsi Gorontalo**	25.374.000.000	25.374.000.000	-
1	980302	Kab. Boalemo	47.344.000.000	42.609.600.000	4.734.400.000
2	993038	Kab. Gorontalo	62.977.000.000	62.977.000.000	-
3	993084	Kota Gorontalo	40.159.000.000	40.159.000.000	-
4	998261	Kab. Pohuwato	51.186.000.000	51.186.000.000	-
5	998278	Kab. Bone Bolango	49.168.000.000	49.168.000.000	-
6	963421	Kab. Gorontalo Utara	11.896.000.000	11.896.000.000	-
	992960	**Provinsi Sulawesi Tengah**	35.201.000.000	35.201.000.000	-
1	993000	Kab. Banggai	63.419.000.000	63.419.000.000	-
2	980337	Kab. Banggai Kepulauan	54.338.000.000	54.338.000.000	-
3	980316	Kab. Buol	43.193.000.000	43.193.000.000	-
4	992998	Kab. Toli-Toli	51.226.000.000	51.226.000.000	-
5	992981	Kab. Donggala	76.604.000.000	76.604.000.000	-
6	980320	Kab. Morowali	50.938.000.000	50.938.000.000	-
7	992977	Kab. Poso	58.591.000.000	58.591.000.000	-
8	993017	Kota Palu	44.025.000.000	44.025.000.000	-
9	997582	Kab. Parigi Moutong	51.942.000.000	51.942.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
10	987471	Kab. Tojo Una Una	49.505.000.000	49.505.000.000	-
	992722	**Provinsi Sulawesi Selatan**	35.137.000.000	35.137.000.000	-
1	992846	Kab. Bantaeng	46.248.000.000	46.248.000.000	-
2	992888	Kab. Barru	45.317.000.000	45.317.000.000	-
3	992778	Kab. Bone	70.831.000.000	70.831.000.000	-
4	992832	Kab. Bulukumba	54.692.000.000	54.692.000.000	-
5	992935	Kab. Enrekang	44.443.000.000	44.443.000.000	-
6	992740	Kab. G o w a	59.973.000.000	59.973.000.000	-
7	992850	Kab. Jeneponto	48.509.000.000	48.509.000.000	-
8	992811	Kab. Luwu	62.561.000.000	62.561.000.000	-
9	980341	Kab. Luwu Utara	56.360.000.000	56.360.000.000	-
10	992799	Kab. M a r o s *	61.655.000.000	61.655.000.000	-
11	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	53.756.000.000	53.756.000.000	-
12	992736	Kab. Pinrang	51.781.000.000	51.781.000.000	-
13	992867	Kab. Selayar	47.395.000.000	47.395.000.000	-
14	992892	Kab. Sidenreng Rappang	53.585.000.000	53.585.000.000	-
15	992825	Kab. Sinjai	61.839.000.000	61.839.000.000	-
16	992914	Kab. Soppeng	46.033.000.000	46.033.000.000	-
17	992871	Kab. Takalar	56.819.000.000	56.819.000.000	-
18	992782	Kab. Tana Toraja	56.873.000.000	56.873.000.000	-
19	992757	Kab. Wajo	55.531.000.000	55.531.000.000	-
20	992956	Kota Pare-pare	39.708.000.000	39.708.000.000	-
21	992942	Kota Makassar	19.993.000.000	19.993.000.000	-
22	997604	Kota Palopo	40.268.000.000	40.268.000.000	-
23	928282	Kab. Luwu Timur	51.051.000.000	45.945.900.000	5.105.100.000
	955383	**Provinsi Sulawesi Barat**	45.738.000.000	45.738.000.000	-
1	992804	Kab. Majene	40.342.000.000	40.342.000.000	-
2	992761	Kab. Mamuju	62.176.000.000	62.176.000.000	-
3	992921	Kab. Polewali Mandar	56.740.000.000	56.740.000.000	-
4	997599	Kab. Mamasa	34.558.000.000	34.558.000.000	-
5	998299	Kab. Mamuju Utara	45.591.000.000	45.591.000.000	-
	993106	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	29.866.000.000	29.866.000.000	-
1	993127	Kab. Buton	69.178.000.000	69.178.000.000	-
2	993110	Kab. Konawe	65.413.000.000	65.413.000.000	-
3	993148	Kab. Kolaka	59.302.000.000	59.302.000.000	-
4	993131	Kab. Muna	65.041.000.000	65.041.000.000	-
5	993326	Kota Kendari	45.787.000.000	45.787.000.000	-
6	994782	Kota Bau-bau	41.021.000.000	36.918.900.000	4.102.100.000
7	998304	Kab. Konawe Selatan	65.208.000.000	65.208.000.000	-
8	987642	Kab. Bombana	57.393.000.000	57.393.000.000	-
9	987638	Kab. Wakatobi	78.856.000.000	78.856.000.000	-
10	987443	Kab. Kolaka Utara	42.925.000.000	42.925.000.000	-
11	963364	Kab. Konawe Utara	12.587.000.000	11.328.300.000	1.258.700.000
12	963370	Kab. Buton Utara	12.517.000.000	12.517.000.000	-
	992274	**Provinsi Bali**	21.634.000.000	12.980.400.000	8.653.600.000
1	992342	Kab. Badung	35.795.000.000	35.795.000.000	-
2	992338	Kab. Bangli	42.595.000.000	42.595.000.000	-
3	992281	Kab. Buleleng	59.691.000.000	59.691.000.000	-
4	992317	Kab. Gianyar	50.927.000.000	50.927.000.000	-
5	992295	Kab. Jembrana	50.121.000.000	50.121.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
6	992321	Kab. Karangasem	55.832.000.000	55.832.000.000	-
7	992300	Kab. Klungkung	47.704.000.000	47.704.000.000	-
8	992359	Kab. Tabanan	55.364.000.000	55.364.000.000	-
9	992363	Kota Denpasar	14.251.000.000	14.251.000.000	-
	992370	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	37.215.000.000	37.215.000.000	-
1	992410	Kab. Bima	62.807.000.000	62.807.000.000	-
2	992431	Kab. Dompu	42.477.000.000	42.477.000.000	-
3	992384	Kab. Lombok Barat	59.471.000.000	59.471.000.000	-
4	992391	Kab. Lombok Tengah	64.613.000.000	64.613.000.000	-
5	992406	Kab. Lombok Timur	68.541.000.000	68.541.000.000	-
6	992427	Kab. Sumbawa	65.247.000.000	65.247.000.000	-
7	992448	Kota Mataram	39.433.000.000	39.433.000.000	-
8	997625	Kota Bima	37.701.000.000	37.701.000.000	-
9	987450	Kab. Sumbawa Barat	36.758.000.000	36.758.000.000	-
	992452	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	42.576.000.000	38.318.400.000	4.257.600.000
1	992502	Kab. Alor	58.048.000.000	52.243.200.000	5.804.800.000
2	992473	Kab. Belu	57.297.000.000	57.297.000.000	-
3	992537	Kab. Ende	57.368.000.000	57.368.000.000	-
4	992520	Kab. Flores Timur	62.036.000.000	62.036.000.000	-
5	992469	Kab. Kupang	72.708.000.000	72.708.000.000	-
6	980379	Kab. Lembata	53.554.000.000	53.554.000.000	-
7	992558	Kab. Manggarai	65.116.000.000	65.116.000.000	-
8	992541	Kab. Ngada	64.827.000.000	64.827.000.000	-
9	992516	Kab. Sikka	55.204.000.000	55.204.000.000	-
10	992579	Kab. Sumba Barat	55.977.000.000	55.977.000.000	-
11	992562	Kab. Sumba Timur	58.467.000.000	58.467.000.000	-
12	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	60.063.000.000	60.063.000.000	-
13	992480	Kab. Timor Tengah Utara	56.162.000.000	50.545.800.000	5.616.200.000
14	993368	Kota Kupang	38.658.000.000	38.658.000.000	-
15	997578	Kab. Rote Ndao	51.184.000.000	46.065.600.000	5.118.400.000
16	998510	Kab. Manggarai Barat	58.402.000.000	58.402.000.000	-
17	963430	Kab. Nagekeo	15.508.000.000	15.508.000.000	-
18	963446	Kab. Sumba Barat Daya	13.151.000.000	13.151.000.000	-
19	963452	Kab. Sumba Tengah	12.668.000.000	12.668.000.000	-
	993152	**Provinsi Maluku**	36.612.000.000	32.950.800.000	3.661.200.000
1	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	61.846.000.000	61.846.000.000	-
2	993169	Kab. Maluku Tengah	71.796.000.000	71.796.000.000	-
3	993173	Kab. Maluku Tenggara	62.159.000.000	62.159.000.000	-
4	980362	Kab. Pulau Buru	42.593.000.000	42.593.000.000	-
5	993202	Kota Ambon	45.973.000.000	45.973.000.000	-
6	987439	Kab. Seram Bagian Barat	85.703.000.000	85.703.000.000	-
7	987422	Kab. Seram Bagian Timur	45.034.000.000	45.034.000.000	-
8	987621	Kab. Kepulauan Aru	48.349.000.000	48.349.000.000	-
	980011	**Provinsi Maluku Utara**	36.482.000.000	36.482.000.000	-
1	993194	Kab. Halmahera Tengah	54.323.000.000	54.323.000.000	-
2	993180	Kab. Halmahera Barat	58.571.000.000	58.571.000.000	-
3	980028	Kota Ternate	52.426.000.000	52.426.000.000	-
4	998346	Kab. Halmahera Timur	44.951.000.000	44.951.000.000	-
5	998350	Kota Tidore Kepulauan	49.660.000.000	49.660.000.000	-
6	998332	Kab. Kepulauan Sula	48.228.000.000	48.228.000.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
7	998325	Kab. Halmahera Selatan	50.536.000.000	50.536.000.000	-
8	998311	Kab. Halmahera Utara	55.581.000.000	55.581.000.000	-
	993216	**Provinsi Papua**	34.203.000.000	34.203.000.000	-
1	993237	Kab. Biak Numfor	61.424.000.000	61.424.000.000	-
2	993220	Kab. Jayapura	60.252.000.000	60.252.000.000	-
3	993290	Kab. Jayawijaya	77.837.000.000	77.837.000.000	-
4	993283	Kab. Merauke	83.685.000.000	83.685.000.000	-
5	993401	Kab. Mimika	48.716.000.000	29.229.600.000	19.486.400.000
6	993305	Kab. Nabire	55.175.000.000	55.175.000.000	-
7	993393	Kab. Paniai	64.925.000.000	64.925.000.000	-
8	993389	Kab. Puncak Jaya	57.386.000.000	57.386.000.000	-
9	993258	Kab. Yapen Waropen	50.541.000.000	50.541.000.000	-
10	993312	Kota Jayapura	56.134.000.000	56.134.000.000	-
11	998392	Kab. Sarmi	43.591.000.000	43.591.000.000	-
12	998400	Kab. Keerom	59.419.000.000	59.419.000.000	-
13	998477	Kab. Yahukimo	56.132.000.000	56.132.000.000	-
14	998421	Kab. Pegunungan Bintang	62.838.000.000	62.838.000.000	-
15	998414	Kab. Tolikara	55.485.000.000	55.485.000.000	-
16	998388	Kab. Boven Digoel	54.745.000.000	54.745.000.000	-
17	998367	Kab. Mappi	49.779.000.000	49.779.000.000	-
18	998371	Kab. Asmat	60.009.000.000	60.009.000.000	-
19	998460	Kab. Waropen	50.223.000.000	50.223.000.000	-
20	987511	Kab. Supiori	57.824.000.000	57.824.000.000	-
21	963461	Kab. Mamberamo Raya	11.494.000.000	11.494.000.000	-
	998854	**Provinsi Papua Barat**	49.134.000.000	49.134.000.000	-
1	993262	Kab. Sorong	44.926.000.000	44.926.000.000	-
2	993241	Kab. Manokwari	61.962.000.000	61.962.000.000	-
3	993279	Kab. Fak Fak	53.244.000.000	53.244.000.000	-
4	980383	Kota Sorong	45.040.000.000	45.040.000.000	-
5	998442	Kab. Sorong Selatan	57.096.000.000	57.096.000.000	-
6	998456	Kab. Raja Ampat	62.112.000.000	62.112.000.000	-
7	998481	Kab. Teluk Bintuni	43.124.000.000	38.811.600.000	4.312.400.000
8	998498	Kab. Teluk Wondama	52.809.000.000	52.809.000.000	-
9	998435	Kab. Kaimana	42.176.000.000	42.176.000.000	-
Jumlah			**21.202.141.000.000**	**20.787.346.700.000**	**414.794.300.000**

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
	990015	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	-	-	-	-	-	-	-
1	990078	Kab. Aceh Barat	10.675.611.200	-	-	8.944.110.000	1.731.501.200	10.675.611.200	-
2	990022	Kab. Aceh Besar	3.191.916.000	-	-	-	3.191.916.000	3.191.916.000	-
3	990061	Kab. Aceh Selatan	5.908.739.400	-	-	1.590.080.000	1.933.539.400	3.523.619.400	2.385.120.000
4	980007	Kab. Aceh Singkil	687.848.200	-	-	-	687.848.200	687.848.200	-
5	990082	Kab. Aceh Tengah	5.783.102.200	-	-	3.975.200.000	1.807.902.200	5.783.102.200	-
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	1.623.869.000	-	-	-	1.623.869.000	1.623.869.000	-
7	990057	Kab. Aceh Timur	2.209.485.200	-	-	-	2.209.485.200	2.209.485.200	-
8	990040	Kab. Aceh Utara	3.402.404.200	-	-	-	3.402.404.200	3.402.404.200	-
9	980053	Kab. Bireun	39.213.037.000	-	-	35.775.720.000	3.437.317.000	39.213.037.000	-
10	990036	Kab. Aceh Pidie	3.708.057.600	-	-	-	3.708.057.600	3.708.057.600	-
11	993372	Kab. Simeulue	616.132.400	-	-	-	616.132.400	616.132.400	-
12	990104	Kota Banda Aceh	2.528.791.200	-	-	-	2.528.791.200	2.528.791.200	-
13	990111	Kota Sabang	6.159.778.800	-	-	5.714.300.000	445.478.800	6.159.778.800	-
14	994672	Kota Langsa	1.298.252.800	-	-	-	1.298.252.800	1.298.252.800	-
15	994686	Kota Lhokseumawe	9.931.263.800	-	-	8.937.900.000	993.363.800	9.931.263.800	-
16	997451	Kab. Nagan Raya	1.103.312.600	-	-	-	1.103.312.600	1.103.312.600	-
17	997447	Kab. Aceh Jaya	646.367.800	-	-	-	646.367.800	646.367.800	-
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	786.999.200	-	-	-	786.999.200	786.999.200	-
19	997430	Kab. Gayo Lues	578.424.600	-	-	-	578.424.600	578.424.600	-
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	1.315.711.800	-	-	-	1.315.711.800	1.315.711.800	-
21	987532	Kab. Bener Meriah	1.603.461.600	-	-	-	1.603.461.600	1.603.461.600	-
22	963327	Kota Subulussalam	441.825.800	-	-	-	441.825.800	441.825.800	-
23	963311	Kab. Pidie Jaya	972.948.600	-	-	-	972.948.600	972.948.600	-
	990125	**Provinsi Sumatera Utara**	461.143.200	-	285.398.132	-	33.046.000	318.444.132	142.699.068
1	990221	Kab. Asahan	3.527.285.050	-	11.415.900	-	3.510.161.200	3.521.577.100	5.707.950
2	990192	Kab. Dairi	27.205.955.050	-	11.415.900	24.575.800.000	2.613.031.200	27.200.247.100	5.707.950
3	990132	Kab. Deli Serdang	47.627.647.050	-	11.415.900	40.248.540.000	7.361.983.200	47.621.939.100	5.707.950
4	990146	Kab. Tanah Karo	1.205.154.850	-	17.123.850	-	1.188.031.000	1.205.154.850	-
5	990188	Kab. Labuhan Batu	30.714.312.050	-	11.415.900	18.156.600.000	4.759.188.200	22.927.204.100	7.787.107.950
6	990150	Kab. Langkat	5.903.042.850	-	11.415.900	-	5.885.919.000	5.897.334.900	5.707.950

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
7	941915	Kab. Mandailing Natal	29.389.093.850	-	11.415.900	26.832.420.000	2.539.550.000	29.383.385.900	5.707.950
8	990235	Kab. Nias	7.931.157.450	-	11.415.900	3.975.200.000	3.938.833.600	7.925.449.500	5.707.950
9	990171	Kab. Simalungun	33.901.130.850	-	11.415.900	27.687.310.000	6.196.697.000	33.895.422.900	5.707.950
10	990214	Kab. Tapanuli Selatan	24.643.491.050	-	11.415.900	20.571.480.000	4.054.887.200	24.637.783.100	5.707.950
11	990167	Kab. Tapanuli Tengah	19.216.489.250	-	11.415.900	15.188.220.000	2.323.565.400	17.523.201.300	1.693.287.950
12	990200	Kab. Tapanuli Utara	18.649.149.450	-	11.415.900	14.410.000.000	4.222.025.600	18.643.441.500	5.707.950
13	941922	Kab. Toba Samosir	21.888.343.650	-	11.415.900	19.317.700.000	2.553.519.800	21.882.635.700	5.707.950
14	990260	Kota Binjai	1.657.229.850	-	11.415.900	-	1.640.106.000	1.651.521.900	5.707.950
15	990242	Kota Medan	39.438.541.800	-	107.768.132	31.304.520.000	7.972.369.600	39.384.657.732	53.884.068
16	990277	Kota Pematang Siantar	36.381.422.000	-	426.268.200	34.119.000.000	1.836.153.800	36.381.422.000	-
17	990298	Kota Sibolga	917.594.850	-	11.415.900	-	900.471.000	911.886.900	5.707.950
18	990281	Kota Tanjung Balai	27.752.571.650	-	11.415.900	24.149.097.000	903.117.800	25.063.630.700	2.688.940.950
19	990256	Kota Tebing Tinggi	1.035.164.250	-	17.123.850	-	1.018.040.400	1.035.164.250	-
20	994690	Kota Padang Sidempuan	35.059.714.050	-	11.415.900	33.291.940.000	1.750.650.200	35.054.006.100	5.707.950
21	998147	Kab. Pakpak Bharat	462.181.450	-	17.123.850	-	445.057.600	462.181.450	-
22	998130	Kab. Nias Selatan	888.771.250	-	11.415.900	-	871.647.400	883.063.300	5.707.950
23	998151	Kab. Humbang Hasundutan	18.203.244.650	-	11.415.900	16.804.200.000	1.381.920.800	18.197.536.700	5.707.950
24	987418	Kab. Serdang Bedagai	4.128.150.650	-	11.415.900	1.565.190.000	2.545.836.800	4.122.442.700	5.707.950
25	987528	Kab. Samosir	6.166.180.650	-	11.415.900	3.478.300.000	1.180.056.800	4.669.772.700	1.496.407.950
26	963333	Kab. Batu bara	1.540.034.850	-	11.415.900	-	1.522.911.000	1.534.326.900	5.707.950
	990303	**Provinsi Sumatera Barat**	34.780.200	-	-	-	34.780.200	34.780.200	-
1	990331	Kab. Limapuluh Kota	3.413.857.200	-	-	-	3.413.857.200	3.413.857.200	-
2	990310	Kab. Agam	3.939.481.000	-	-	-	3.939.481.000	3.939.481.000	-
3	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	558.870.000	-	-	-	558.870.000	558.870.000	-
4	990352	Kab. Padang Pariaman	8.162.727.200	-	-	4.472.100.000	3.690.627.200	8.162.727.200	-
5	990324	Kab. Pasaman	3.342.040.000	-	-	-	3.342.040.000	3.342.040.000	-
6	990366	Kab. Pesisir Selatan	3.944.431.400	-	-	-	3.944.431.400	3.944.431.400	-
7	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	2.492.765.600	-	-	-	2.492.765.600	2.492.765.600	-
8	990345	Kab. Solok	1.303.842.800	-	-	-	1.303.842.800	1.303.842.800	-
9	990370	Kab. Tanah Datar	3.646.182.800	-	-	-	3.646.182.800	3.646.182.800	-
10	990391	Kota Bukit Tinggi	1.006.759.000	-	-	-	1.006.759.000	1.006.759.000	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
11	990409	Kota Padang Panjang	666.515.200	-	-	-	666.515.200	666.515.200	-
12	990434	Kota Padang	5.399.446.000	-	-	-	5.399.446.000	5.399.446.000	-
13	990441	Kota Payakumbuh	1.159.867.800	-	-	-	1.159.867.800	1.159.867.800	-
14	990420	Kota Sawahlunto	5.143.958.200	-	-	4.472.100.000	671.858.200	5.143.958.200	-
15	990413	Kota Solok	3.753.640.800	-	-	-	3.753.640.800	3.753.640.800	-
16	997611	Kota Pariaman	1.089.540.400	-	-	-	1.089.540.400	1.089.540.400	-
17	987595	Kab. Pasaman Barat	1.738.113.000	-	-	-	1.738.113.000	1.738.113.000	-
18	987574	Kab. Dharmasraya	20.771.865.000	-	-	19.575.800.000	1.196.065.000	20.771.865.000	-
19	987581	Kab. Solok Selatan	969.147.400	-	-	-	969.147.400	969.147.400	-
	990455	**Provinsi Riau**	10.647.000	-	-	-	10.647.000	10.647.000	-
1	990476	Kab. Bengkalis	55.000.144.000	51.680.750.000	-	-	3.319.394.000	55.000.144.000	-
2	990502	Kab. Indragiri Hilir	5.076.394.800	-	-	1.391.320.000	3.088.794.800	4.480.114.800	596.280.000
3	990497	Kab. Indragiri Hulu	2.255.539.000	-	-	-	2.255.539.000	2.255.539.000	-
4	990462	Kab. Kampar	22.020.839.400	-	-	17.888.220.000	4.132.619.400	22.020.839.400	-
5	980138	Kab. Kuantan Singingi	2.426.808.800	-	-	-	2.426.808.800	2.426.808.800	-
6	980074	Kab. Pelalawan	1.256.335.600	-	-	-	1.256.335.600	1.256.335.600	-
7	980095	Kab. Rokan Hilir	24.125.705.400	22.962.000.000	-	-	1.163.705.400	24.125.705.400	-
8	980081	Kab. Rokan Hulu	24.315.959.400	-	-	20.124.288.000	1.955.639.400	22.079.927.400	2.236.032.000
9	980100	Kab. Siak	25.116.143.200	23.902.250.000	-	-	1.213.893.200	25.116.143.200	-
10	980142	Kota Dumai	11.258.674.200	-	-	3.960.000.000	1.358.674.200	5.318.674.200	5.940.000.000
11	990519	Kota Pekanbaru	26.021.706.600	-	-	22.360.410.000	3.661.296.600	26.021.706.600	-
	998840	**Provinsi Kepulauan Riau**	-	-	-	-	-	-	-
1	990480	Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	1.181.832.600	-	-	-	1.181.832.600	1.181.832.600	-
2	980121	Kab. Natuna	40.511.941.200	39.851.250.000	-	-	660.691.200	40.511.941.200	-
3	980117	Kab. Karimun	1.150.918.600	-	-	-	1.150.918.600	1.150.918.600	-
4	990523	Kota Batam	32.146.809.200	-	-	31.304.430.000	842.379.200	32.146.809.200	-
5	994708	Kota Tanjung Pinang	1.145.079.000	-	-	-	1.145.079.000	1.145.079.000	-
6	987464	Kab. Lingga	44.814.102.200	-	-	44.720.640.000	93.462.200	44.814.102.200	-
	990530	**Provinsi Jambi**	53.681.005.200	-	-	53.664.750.000	16.255.200	53.681.005.200	-
1	990544	Kab. Batanghari	1.600.071.200	-	-	-	1.600.071.200	1.600.071.200	-
2	990565	Kab. Bungo	37.782.349.400	-	-	35.776.530.000	2.005.819.400	37.782.349.400	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
3	990586	Kab. Kerinci	15.491.718.200	-	-	11.269.899.000	2.969.608.200	14.239.507.200	1.252.211.000
4	990572	Kab. Merangin	11.348.571.800	-	-	8.944.110.000	2.404.461.800	11.348.571.800	-
5	980184	Kab. Muaro Jambi	21.635.659.400	-	-	19.676.380.000	1.959.279.400	21.635.659.400	-
6	980163	Kab. Sarolangun	15.092.045.200	-	-	13.416.210.000	1.675.835.200	15.092.045.200	-
7	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	10.248.051.600	-	-	8.049.699.000	1.303.941.600	9.353.640.600	894.411.000
8	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	44.315.969.800	-	-	42.931.800.000	1.384.169.800	44.315.969.800	-
9	980170	Kab. Tebo	25.763.031.600	-	-	24.149.430.000	1.613.601.600	25.763.031.600	-
10	990590	Kota Jambi	3.171.251.200	-	-	-	3.171.251.200	3.171.251.200	-
	990608	**Provinsi Sumatera Selatan**	9.227.400	-	-	-	9.227.400	9.227.400	-
1	990661	Kab. Lahat	3.218.672.600	-	-	-	3.218.672.600	3.218.672.600	-
2	990633	Kab. Musi Banyuasin	33.490.290.800	-	-	30.641.580.000	2.848.710.800	33.490.290.800	-
3	990675	Kab. Musi Rawas	23.022.139.400	-	-	20.281.950.000	2.740.189.400	23.022.139.400	-
4	990654	Kab. Muara Enim	3.564.147.600	-	-	-	3.564.147.600	3.564.147.600	-
5	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	7.231.145.400	-	-	3.577.680.000	3.653.465.400	7.231.145.400	-
6	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	4.720.352.200	-	-	2.683.260.000	2.037.092.200	4.720.352.200	-
7	990696	Kota Palembang	10.660.202.200	-	-	1.431.072.000	7.082.522.200	8.513.594.200	2.146.608.000
8	994729	Kota Pagar Alam	906.783.800	-	-	-	906.783.800	906.783.800	-
9	994733	Kota Lubuk Linggau	1.510.173.600	-	-	-	1.510.173.600	1.510.173.600	-
10	994712	Kota Prabumulih	1.090.442.600	-	-	-	1.090.442.600	1.090.442.600	-
11	997557	Kab. Banyuasin	3.383.348.800	-	-	-	3.383.348.800	3.383.348.800	-
12	987560	Kab. Ogan Ilir	27.692.077.800	-	-	25.043.580.000	2.648.497.800	27.692.077.800	-
13	987549	Kab. OKU Timur	18.921.317.800	-	-	15.801.310.000	3.120.007.800	18.921.317.800	-
14	987553	Kab. OKU Selatan	15.280.450.200	-	-	14.640.390.000	640.060.200	15.280.450.200	-
15	963342	Kab. Empat Lawang	5.251.281.800	-	-	1.813.428.000	717.711.800	2.531.139.800	2.720.142.000
	993813	**Provinsi Bangka Belitung**	-	-	-	-	-	-	-
1	990629	Kab. Bangka	2.169.645.400	-	-	-	2.169.645.400	2.169.645.400	-
2	990612	Kab. Belitung	1.099.373.600	-	-	-	1.099.373.600	1.099.373.600	-
3	990701	Kota Pangkal Pinang	5.857.895.800	-	-	1.987.600.000	888.895.800	2.876.495.800	2.981.400.000
4	998189	Kab. Bangka Selatan	20.279.384.800	-	-	20.124.300.000	155.084.800	20.279.384.800	-
5	998172	Kab. Bangka Tengah	628.607.200	-	-	-	628.607.200	628.607.200	-
6	998168	Kab. Bangka Barat	335.134.800	-	-	-	335.134.800	335.134.800	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
7	998193	Kab. Belitung Timur	744.055.000	-	-	-	744.055.000	744.055.000	-
	990718	**Provinsi Bengkulu**	-	-	-	-	-	-	-
1	990739	Kab. Bengkulu Selatan	1.838.891.600	-	-	-	1.838.891.600	1.838.891.600	-
2	990722	Kab. Bengkulu Utara	20.934.759.600	-	-	17.888.220.000	3.046.539.600	20.934.759.600	-
3	990743	Kab. Rejang Lebong	55.773.725.600	-	-	52.774.740.000	2.998.985.600	55.773.725.600	-
4	990750	Kota Bengkulu	1.969.549.400	-	-	-	1.969.549.400	1.969.549.400	-
5	998215	Kab. Kaur	595.743.200	-	-	-	595.743.200	595.743.200	-
6	998201	Kab. Seluma	6.575.870.000	-	-	4.895.235.000	1.136.720.000	6.031.955.000	543.915.000
7	998503	Kab. Mukomuko	656.726.200	-	-	-	656.726.200	656.726.200	-
8	987600	Kab. Lebong	4.615.569.800	-	-	3.975.000.000	640.569.800	4.615.569.800	-
9	987617	Kab. Kepahiang	18.519.968.000	-	-	17.888.220.000	631.748.000	18.519.968.000	-
	990764	**Provinsi Lampung**	8.517.600	-	-	-	8.517.600	8.517.600	-
1	990807	Kab. Lampung Barat	2.298.834.200	-	-	-	2.298.834.200	2.298.834.200	-
2	990771	Kab. Lampung Selatan	5.743.371.400	-	-	-	5.743.371.400	5.743.371.400	-
3	990785	Kab. Lampung Tengah	35.917.217.800	-	-	24.149.178.000	9.084.797.800	33.233.975.800	2.683.242.000
4	990792	Kab. Lampung Utara	12.856.329.400	-	-	3.975.200.000	8.881.129.400	12.856.329.400	-
5	980191	Kab. Lampung Timur	3.215.934.800	-	-	-	3.215.934.800	3.215.934.800	-
6	993351	Kab. Tanggamus	5.640.627.200	-	-	-	5.640.627.200	5.640.627.200	-
7	993347	Kab. Tulang Bawang	2.899.746.200	-	-	-	2.899.746.200	2.899.746.200	-
8	980206	Kab. Way Kanan	1.808.734.200	-	-	-	1.808.734.200	1.808.734.200	-
9	990811	Kota Bandar Lampung	8.550.506.800	-	-	4.472.100.000	4.078.406.800	8.550.506.800	-
10	980210	Kota Metro	1.671.368.400	-	-	-	1.671.368.400	1.671.368.400	-
	990828	**Provinsi DKI Jakarta**	63.378.946.200	29.985.750.000	-	-	33.393.196.200	63.378.946.200	-
	990881	**Provinsi Jawa Barat**	22.045.391.160	-	2.843.336.958	17.167.500.000	127.054.200	20.137.891.158	1.907.500.002
1	991003	Kab. Bandung	10.684.257.080	-	113.733.480	-	10.570.523.600	10.684.257.080	-
2	990963	Kab. Bekasi	9.578.217.800	-	1.515.910.800	-	7.304.351.600	8.820.262.400	757.955.400
3	990938	Kab. Bogor	7.880.073.880	-	113.733.480	-	7.766.340.400	7.880.073.880	-
4	991045	Kab. Ciamis	9.271.144.080	-	113.733.480	-	9.157.410.600	9.271.144.080	-
5	990959	Kab. Cianjur	7.902.920.080	-	113.733.480	-	7.789.186.600	7.902.920.080	-
6	991052	Kab. Cirebon	23.057.921.680	-	113.733.480	13.813.100.000	9.131.088.200	23.057.921.680	-
7	991024	Kab. Garut	8.837.261.280	-	113.733.480	-	8.723.527.800	8.837.261.280	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
8	991070	Kab. Indramayu	24.412.989.280	-	113.733.480	17.888.220.000	6.411.035.800	24.412.989.280	-
9	990970	Kab. Karawang	6.674.191.280	-	113.733.480	-	6.560.457.800	6.674.191.280	-
10	991066	Kab. Kuningan	6.580.333.880	-	113.733.480	-	6.466.600.400	6.580.333.880	-
11	991087	Kab. Majalengka	16.984.267.880	-	113.733.480	9.937.000.000	6.933.534.400	16.984.267.880	-
12	990984	Kab. Purwakarta	3.679.875.280	-	113.733.480	-	3.566.141.800	3.679.875.280	-
13	990991	Kab. Subang	5.850.045.880	-	113.733.480	-	5.736.312.400	5.850.045.880	-
14	990942	Kab. Sukabumi	7.115.980.680	-	113.733.480	-	7.002.247.200	7.115.980.680	-
15	991010	Kab. Sumedang	6.005.962.680	-	113.733.480	-	5.892.229.200	6.005.962.680	-
16	991031	Kab. Tasikmalaya	6.325.900.480	-	113.733.480	-	6.212.167.000	6.325.900.480	-
17	991091	Kota Bandung	6.615.873.280	-	113.733.480	-	6.502.139.800	6.615.873.280	-
18	993330	Kota Bekasi	4.189.191.880	-	113.733.480	-	4.075.458.400	4.189.191.880	-
19	991109	Kota Bogor	4.027.354.880	-	113.733.480	-	3.913.621.400	4.027.354.880	-
20	991120	Kota Cirebon	3.660.184.500	-	1.627.860.699	-	2.032.323.800	3.660.184.499	1
21	980032	Kota Depok	3.087.137.680	-	113.733.480	-	2.973.404.200	3.087.137.680	-
22	991113	Kota Sukabumi	1.465.109.480	-	113.733.480	-	1.351.376.000	1.465.109.480	-
23	994754	Kota Cimahi	2.539.309.880	-	113.733.480	-	2.425.576.400	2.539.309.880	-
24	994740	Kota Tasikmalaya	13.050.143.500	-	116.856.099	8.944.110.000	3.989.177.400	13.050.143.499	1
25	998126	Kota Banjar	1.204.501.080	-	113.733.480	-	1.090.767.600	1.204.501.080	-
26	963302	Kab. Bandung Barat	4.164.777.880	-	113.733.480	-	4.051.044.400	4.164.777.880	-
	993809	**Provinsi Banten**	40.458.600	-	-	-	40.458.600	40.458.600	-
1	990917	Kab. Lebak	42.298.141.200	-	-	35.776.530.000	6.521.611.200	42.298.141.200	-
2	990900	Kab. Pandeglang	7.283.549.000	-	-	-	7.283.549.000	7.283.549.000	-
3	990895	Kab. Serang	8.048.193.400	-	-	-	8.048.193.400	8.048.193.400	-
4	990921	Kab. Tangerang	7.291.824.800	-	-	-	7.291.824.800	7.291.824.800	-
5	980049	Kota Cilegon	2.073.791.200	-	-	-	2.073.791.200	2.073.791.200	-
6	991134	Kota Tangerang	4.114.515.600	-	-	-	4.114.515.600	4.114.515.600	-
	991141	**Provinsi Jawa Tengah**	15.735.824.567	-	15.659.166.165	-	76.658.400	15.735.824.565	2
1	991329	Kab. Banjarnegara	4.486.167.652	-	302.444.300	-	4.032.501.200	4.334.945.500	151.222.152
2	991290	Kab. Banyumas	7.289.351.793	-	457.014.591	-	6.832.337.200	7.289.351.791	2
3	991202	Kab. Batang	3.497.651.194	-	450.055.992	-	3.047.595.200	3.497.651.192	2
4	991286	Kab. Blora	4.496.508.243	-	299.750.962	-	4.046.881.800	4.346.632.762	149.875.481

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
5	991396	Kab. Boyolali	6.257.435.405	-	590.501.403	-	5.666.934.000	6.257.435.403	2
6	991223	Kab. Brebes	6.131.887.706	-	309.131.936	-	5.668.189.800	5.977.321.736	154.565.970
7	991308	Kab. Cilacap	6.880.306.912	-	526.317.711	-	6.353.989.200	6.880.306.911	1
8	991176	Kab. Demak	3.935.823.902	-	362.879.268	-	3.391.505.000	3.754.384.268	181.439.634
9	991180	Kab. Grobogan	5.493.676.928	-	377.451.818	-	4.927.499.200	5.304.951.018	188.725.910
10	991265	Kab. Jepara	4.730.735.615	-	741.558.213	-	3.989.177.400	4.730.735.613	2
11	991422	Kab. Karanganyar	23.040.265.776	-	311.578.916	17.888.220.000	4.684.677.400	22.884.476.316	155.789.460
12	991375	Kab. Kebumen	5.947.358.266	-	301.304.444	-	5.495.401.600	5.796.706.044	150.652.222
13	991162	Kab. Kendal	4.761.818.149	-	455.111.832	-	4.079.150.400	4.534.262.232	227.555.917
14	991382	Kab. Klaten	10.144.675.850	-	371.908.966	1.987.600.000	7.599.212.400	9.958.721.366	185.954.484
15	991244	Kab. Kudus	37.293.318.978	-	17.207.191.977	16.323.030.000	3.763.097.000	37.293.318.977	1
16	991333	Kab. Magelang	8.091.151.091	-	377.116.460	-	7.525.476.400	7.902.592.860	188.558.231
17	991230	Kab. Pati	21.518.809.545	-	567.644.496	15.652.260.000	5.015.082.800	21.234.987.296	283.822.249
18	991197	Kab. Pekalongan	5.865.525.574	-	301.223.582	1.987.600.000	3.426.090.200	5.714.913.782	150.611.792
19	991251	Kab. Pemalang	5.102.970.988	-	460.174.386	-	4.642.796.600	5.102.970.986	2
20	991312	Kab. Purbalingga	40.001.927.790	-	448.440.189	35.776.530.000	3.776.957.600	40.001.927.789	1
21	991361	Kab. Purworejo	5.131.315.671	-	452.722.269	-	4.678.593.400	5.131.315.669	2
22	991272	Kab. Rembang	3.455.899.353	-	448.736.751	-	3.007.162.600	3.455.899.351	2
23	991155	Kab. Semarang	4.867.993.469	-	458.596.269	-	4.409.397.200	4.867.993.469	-
24	991401	Kab. Sragen	27.049.860.235	-	356.746.822	21.031.600.000	5.483.140.000	26.871.486.822	178.373.413
25	991418	Kab. Sukoharjo	5.279.269.708	-	450.679.707	-	4.828.590.000	5.279.269.707	1
26	991219	Kab. Tegal	6.073.376.390	-	298.960.126	-	5.624.936.200	5.923.896.326	149.480.064
27	991340	Kab. Temanggung	3.861.017.424	-	785.456.622	-	3.075.560.800	3.861.017.422	2
28	991439	Kab. Wonogiri	6.585.506.843	-	299.750.962	-	6.135.880.400	6.435.631.362	149.875.481
29	991354	Kab. Wonosobo	4.257.071.220	-	687.983.619	-	3.569.087.600	4.257.071.219	1
30	991485	Kota Magelang	1.843.332.798	-	449.181.597	-	1.394.151.200	1.843.332.797	1
31	991464	Kota Pekalongan	4.234.677.836	-	878.700.435	1.987.600.000	1.368.377.400	4.234.677.835	1
32	991450	Kota Salatiga	50.781.695.671	-	299.058.980	49.011.600.000	1.321.507.200	50.632.166.180	149.529.491
33	991443	Kota Semarang	6.222.619.128	-	870.685.527	-	5.351.933.600	6.222.619.127	1
34	991492	Kota Surakarta	33.609.225.699	-	822.431.666	28.173.960.000	4.201.618.200	33.198.009.866	411.215.833
35	991471	Kota Tegal	1.914.516.631	-	550.858.230	-	1.363.658.400	1.914.516.630	1

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
	991507	**Provinsi DI Yogyakarta**	750.143.400	-	314.880.000	-	435.263.400	750.143.400	-
1	991511	Kab. Bantul	18.531.269.200	-	209.919.999	13.416.210.000	4.905.139.200	18.531.269.199	1
2	991532	Kab. Gunung Kidul	5.618.517.400	-	104.959.998	-	5.513.557.400	5.618.517.398	2
3	991549	Kab. Kulon Progo	9.472.971.400	-	104.960.000	5.714.300.000	3.601.231.400	9.420.491.400	52.480.000
4	991528	Kab. Sleman	6.243.764.600	-	146.943.999	-	6.096.820.600	6.243.764.599	1
5	991553	Kota Yogyakarta	5.140.230.000	-	115.455.999	1.788.840.000	3.235.934.000	5.140.229.999	1
	991560	**Provinsi Jawa Timur**	40.801.291.100	-	40.754.956.500	-	46.334.600	40.801.291.100	-
1	991642	Kab. Bangkalan	13.735.229.200	-	1.106.601.999	8.944.110.000	3.684.517.200	13.735.229.199	1
2	991670	Kab. Banyuwangi	8.371.570.000	-	1.194.348.000	-	7.177.222.000	8.371.570.000	-
3	991773	Kab. Blitar	44.783.841.200	-	1.834.140.999	36.201.330.000	6.748.370.200	44.783.841.199	1
4	991837	Kab. Bojonegoro	9.405.963.200	-	3.877.083.999	-	5.528.879.200	9.405.963.199	1
5	991659	Kab. Bondowoso	5.398.206.200	-	1.150.086.000	-	3.673.077.200	4.823.163.200	575.043.000
6	991574	Kab. Gresik	5.089.727.800	-	1.072.498.998	-	4.017.228.800	5.089.727.798	2
7	991684	Kab. Jember	9.835.158.400	-	1.798.417.998	-	8.036.740.400	9.835.158.398	2
8	991600	Kab. Jombang	6.531.570.400	-	1.291.365.332	-	4.594.522.400	5.885.887.732	645.682.668
9	991731	Kab. Kediri	15.653.726.800	-	9.332.286.999	-	6.321.439.800	15.653.726.799	1
10	991858	Kab. Lamongan	6.949.220.600	-	1.698.699.999	-	5.250.520.600	6.949.220.599	1
11	991727	Kab. Lumajang	5.256.803.400	-	1.265.194.998	-	3.991.608.400	5.256.803.398	2
12	991780	Kab. Madiun	34.929.866.600	-	889.424.000	29.812.000.000	3.783.730.600	34.485.154.600	444.712.000
13	991802	Kab. Magetan	5.731.819.200	-	1.264.870.998	-	4.466.948.200	5.731.819.198	2
14	991691	Kab. Malang	14.174.598.200	-	5.289.586.998	-	8.885.011.200	14.174.598.198	2
15	991581	Kab. Mojokerto	18.655.612.200	-	1.351.603.998	13.416.210.000	3.887.798.200	18.655.612.198	2
16	991752	Kab. Nganjuk	7.757.771.800	-	1.845.273.000	-	5.912.498.800	7.757.771.800	-
17	991794	Kab. Ngawi	6.746.860.600	-	1.175.876.666	-	4.983.045.600	6.158.922.266	587.938.334
18	991820	Kab. Pacitan	4.195.851.200	-	1.253.269.998	-	2.942.581.200	4.195.851.198	2
19	991621	Kab. Pamekasan	9.875.303.600	-	4.353.663.999	1.987.600.000	3.534.039.600	9.875.303.599	1
20	991706	Kab. Pasuruan	14.030.747.400	-	8.879.604.000	-	5.151.143.400	14.030.747.400	-
21	991816	Kab. Ponorogo	6.645.343.600	-	1.326.624.999	-	5.318.718.600	6.645.343.599	1
22	991710	Kab. Probolinggo	3.998.576.400	-	2.231.553.999	-	1.767.022.400	3.998.576.399	1
23	991617	Kab. Sampang	4.490.663.200	-	921.216.666	-	3.108.838.200	4.030.054.866	460.608.334
24	991595	Kab. Sidoarjo	7.882.706.600	-	2.150.457.999	-	5.732.248.600	7.882.706.599	1

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
25	991663	Kab. Situbondo	4.211.981.600	-	839.656.000	-	2.952.497.600	3.792.153.600	419.828.000
26	991638	Kab. Sumenep	7.293.338.800	-	2.030.344.000	-	4.247.822.800	6.278.166.800	1.015.172.000
27	991769	Kab. Trenggalek	46.547.297.200	-	1.274.826.999	41.098.230.000	4.174.240.200	46.547.297.199	1
28	991841	Kab. Tuban	5.416.006.600	-	1.454.916.999	-	3.961.089.600	5.416.006.599	1
29	991748	Kab. Tulungagung	8.889.920.200	-	2.882.406.999	-	6.007.513.200	8.889.920.199	1
30	991912	Kota Blitar	12.603.247.200	-	1.304.088.000	9.975.000.000	1.324.159.200	12.603.247.200	-
31	991926	Kota Kediri	11.835.903.600	-	9.481.171.998	-	2.354.731.600	11.835.903.598	2
32	991930	Kota Madiun	3.201.789.600	-	1.109.917.998	-	2.091.871.600	3.201.789.598	2
33	991883	Kota Malang	7.072.479.100	-	4.050.158.499	-	3.022.320.600	7.072.479.099	1
34	991879	Kota Mojokerto	2.232.691.400	-	822.706.666	-	998.631.400	1.821.338.066	411.353.334
35	991890	Kota Pasuruan	2.468.117.400	-	1.267.699.998	-	1.200.417.400	2.468.117.398	2
36	991905	Kota Probolinggo	36.079.170.200	-	732.311.332	31.326.840.000	3.653.863.200	35.713.014.532	366.155.668
37	991862	Kota Surabaya	10.652.767.200	-	2.159.172.000	-	7.414.009.200	9.573.181.200	1.079.586.000
38	994761	Kota Batu	1.892.819.000	-	750.459.332	-	767.130.000	1.517.589.332	375.229.668
	991947	**Provinsi Kalimantan Barat**	1.419.600	-	-	-	1.419.600	1.419.600	-
1	980227	Kab. Bengkayang	53.671.234.600	-	-	21.024.600.000	1.109.734.600	22.134.334.600	31.536.900.000
2	980231	Kab. Landak	15.269.227.400	-	-	13.416.210.000	1.853.017.400	15.269.227.400	-
3	991993	Kab. Kapuas Hulu	2.006.617.600	-	-	-	2.006.617.600	2.006.617.600	-
4	992008	Kab. Ketapang	2.416.299.600	-	-	-	2.416.299.600	2.416.299.600	-
5	991989	Kab. Pontianak	31.748.874.000	-	-	27.530.010.000	4.218.864.000	31.748.874.000	-
6	991951	Kab. Sambas	5.199.725.800	-	-	1.987.600.000	3.212.125.800	5.199.725.800	-
7	991968	Kab. Sanggau	16.214.231.200	-	-	12.074.589.000	2.798.021.200	14.872.610.200	1.341.621.000
8	991972	Kab. Sintang	20.516.515.200	-	-	16.089.759.000	2.639.005.200	18.728.764.200	1.787.751.000
9	992012	Kota Pontianak	19.423.231.000	-	-	16.323.030.000	3.100.201.000	19.423.231.000	-
10	994775	Kota Singkawang	1.181.531.000	-	-	-	1.181.531.000	1.181.531.000	-
11	987507	Kab. Sekadau	437.996.000	-	-	-	437.996.000	437.996.000	-
12	987492	Kab. Melawi	45.793.731.400	-	-	31.298.148.000	1.082.091.400	32.380.239.400	13.413.492.000
13	963358	Kab. Kayong Utara	462.371.000	-	-	-	462.371.000	462.371.000	-
	992029	**Provinsi Kalimantan Tengah**	-	-	-	-	-	-	-
1	992054	Kab. Barito Selatan	1.424.844.200	-	-	-	1.424.844.200	1.424.844.200	-
2	992040	Kab. Barito Utara	1.179.347.000	-	-	-	1.179.347.000	1.179.347.000	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
3	992033	Kab. Kapuas	2.465.075.600	-	-	-	2.465.075.600	2.465.075.600	-
4	992075	Kab. Kotawaringin Barat	32.693.974.800	-	-	31.291.020.000	1.402.954.800	32.693.974.800	-
5	992061	Kab. Kotawaringin Timur	4.024.213.800	-	-	1.987.600.000	2.036.613.800	4.024.213.800	-
6	992082	Kota Palangkaraya	46.891.742.000	-	-	44.716.140.000	2.175.602.000	46.891.742.000	-
7	997540	Kab. Barito Timur	25.661.363.800	-	-	24.596.370.000	1.064.993.800	25.661.363.800	-
8	997536	Kab. Murung Raya	911.770.600	-	-	-	911.770.600	911.770.600	-
9	997522	Kab. Pulang Pisau	1.131.101.400	-	-	-	1.131.101.400	1.131.101.400	-
10	997515	Kab. Gunung Mas	27.967.702.200	-	-	26.832.420.000	1.135.282.200	27.967.702.200	-
11	997501	Kab. Lamandau	27.576.272.200	-	-	26.832.420.000	743.852.200	27.576.272.200	-
12	997493	Kab. Sukamara	434.733.000	-	-	-	434.733.000	434.733.000	-
13	997472	Kab. Katingan	1.335.144.200	-	-	-	1.335.144.200	1.335.144.200	-
14	997489	Kab. Seruyan	609.668.800	-	-	-	609.668.800	609.668.800	-
	992164	**Provinsi Kalimantan Selatan**	10.002.200	-	-	-	10.002.200	10.002.200	-
1	992171	Kab. Banjar	2.365.534.600	-	-	-	2.365.534.600	2.365.534.600	-
2	992228	Kab. Barito Kuala	6.121.254.000	-	-	4.472.100.000	1.649.154.000	6.121.254.000	-
3	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	9.146.970.600	-	-	6.260.400.000	2.190.970.600	8.451.370.600	695.600.000
4	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.275.431.600	-	-	-	2.275.431.600	2.275.431.600	-
5	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	9.195.720.600	-	-	6.260.400.000	2.239.720.600	8.500.120.600	695.600.000
6	992249	Kab. Kota Baru	3.718.991.200	-	-	894.420.000	1.482.941.200	2.377.361.200	1.341.630.000
7	992232	Kab. Tabalong	10.631.621.400	-	-	8.943.600.000	1.688.021.400	10.631.621.400	-
8	992185	Kab. Tanah Laut	1.775.891.000	-	-	-	1.775.891.000	1.775.891.000	-
9	992192	Kab. Tapin	1.420.000.400	-	-	-	1.420.000.400	1.420.000.400	-
10	980248	Kota Banjarbaru	1.068.449.200	-	-	-	1.068.449.200	1.068.449.200	-
11	992260	Kota Banjarmasin	43.020.742.800	-	-	40.695.750.000	2.324.992.800	43.020.742.800	-
12	998236	Kab. Balangan	724.201.400	-	-	-	724.201.400	724.201.400	-
13	998222	Kab. Tanah Bumbu	1.138.209.800	-	-	-	1.138.209.800	1.138.209.800	-
	992096	**Provinsi Kalimantan Timur**	2.129.400	-	-	-	2.129.400	2.129.400	-
1	992139	Kab. Berau	1.290.957.200	-	-	-	1.290.957.200	1.290.957.200	-
2	992122	Kab. Bulungan	28.210.734.600	-	-	26.832.420.000	1.378.314.600	28.210.734.600	-
3	992101	Kab. Kutai Kartanegara	78.454.744.000	74.453.500.000	-	-	4.001.244.000	78.454.744.000	-
4	980273	Kab. Kutai Barat	1.236.827.800	-	-	-	1.236.827.800	1.236.827.800	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
5	980280	Kab. Kutai Timur	1.324.203.400	-	-	-	1.324.203.400	1.324.203.400	-
6	980269	Kab. Malinau	631.464.600	-	-	-	631.464.600	631.464.600	-
7	980252	Kab. Nunukan	26.454.812.400	-	-	25.938.000.000	516.812.400	26.454.812.400	-
8	992118	Kab. Paser	1.399.535.800	-	-	-	1.399.535.800	1.399.535.800	-
9	992150	Kota Balikpapan	2.061.482.800	-	-	-	2.061.482.800	2.061.482.800	-
10	980294	Kota Bontang	627.450.200	-	-	-	627.450.200	627.450.200	-
11	992143	Kota Samarinda	3.607.549.400	-	-	-	3.607.549.400	3.607.549.400	-
12	941901	Kota Tarakan	20.750.983.400	-	-	7.950.320.000	875.183.400	8.825.503.400	11.925.480.000
13	997561	Kab. Penajam Paser Utara	3.429.816.200	-	-	1.073.304.000	746.556.200	1.819.860.200	1.609.956.000
	993021	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	-	-	-	-	-	-
1	993059	Kab. Bolaang Mongondow	10.764.827.400	-	-	3.975.160.000	826.927.400	4.802.087.400	5.962.740.000
2	993042	Kab. Minahasa	2.857.384.400	-	-	-	2.857.384.400	2.857.384.400	-
3	993063	Kab. Sangihe	29.044.786.000	-	-	26.832.420.000	2.212.366.000	29.044.786.000	-
4	993091	Kota Bitung	5.767.520.000	-	-	4.720.500.000	1.047.020.000	5.767.520.000	-
5	993070	Kota Manado	22.961.289.000	-	-	19.677.060.000	3.284.229.000	22.961.289.000	-
6	997412	Kab. Kepulauan Talaud	2.803.623.000	-	-	1.391.320.000	816.023.000	2.207.343.000	596.280.000
7	998240	Kab. Minahasa Selatan	1.793.025.000	-	-	-	1.793.025.000	1.793.025.000	-
8	998257	Kota Tomohon	30.643.208.600	-	-	29.813.000.000	830.208.600	30.643.208.600	-
9	987485	Kab. Minahasa Utara	28.061.265.800	-	-	26.832.420.000	1.228.845.800	28.061.265.800	-
10	963395	Kota Kotamubagu	6.382.690.800	-	-	3.975.200.000	2.407.490.800	6.382.690.800	-
11	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	46.175.152.800	-	-	40.695.750.000	957.652.800	41.653.402.800	4.521.750.000
12	963389	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	-	-	-	-	-
13	963415	Kab. Minahasa Tenggara	27.477.750.400	-	-	26.832.420.000	645.330.400	27.477.750.400	-
	993820	**Provinsi Gorontalo**	8.944.110.000	-	-	8.944.110.000	-	8.944.110.000	-
1	980302	Kab. Boalemo	33.086.304.400	-	-	29.110.320.000	741.504.400	29.851.824.400	3.234.480.000
2	993038	Kab. Gorontalo	55.509.093.800	-	-	53.270.330.000	2.238.763.800	55.509.093.800	-
3	993084	Kota Gorontalo	1.822.093.000	-	-	-	1.822.093.000	1.822.093.000	-
4	998261	Kab. Pohuwato	39.655.698.000	-	-	39.087.130.000	568.568.000	39.655.698.000	-
5	998278	Kab. Bone Bolango	35.791.830.200	-	-	34.862.000.000	929.830.200	35.791.830.200	-
6	963421	Kab. Gorontalo Utara	659.542.000	-	-	-	659.542.000	659.542.000	-
	992960	**Provinsi Sulawesi Tengah**	9.001.648.000	-	-	3.577.644.000	57.538.000	3.635.182.000	5.366.466.000

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
1	993000	Kab. Banggai	29.574.175.400	-	-	26.894.800.000	2.679.375.400	29.574.175.400	-
2	980337	Kab. Banggai Kepulauan	20.039.183.200	-	-	18.882.100.000	1.157.083.200	20.039.183.200	-
3	980316	Kab. Buol	21.137.403.200	-	-	19.875.800.000	1.261.603.200	21.137.403.200	-
4	992998	Kab. Toli-Toli	1.356.994.600	-	-	-	1.356.994.600	1.356.994.600	-
5	992981	Kab. Donggala	6.929.977.800	-	-	2.414.934.000	4.246.717.800	6.661.651.800	268.326.000
6	980320	Kab. Morowali	21.384.329.200	-	-	19.677.060.000	1.707.269.200	21.384.329.200	-
7	992977	Kab. Poso	22.067.659.800	-	-	19.875.800.000	2.191.859.800	22.067.659.800	-
8	993017	Kota Palu	7.401.098.200	-	-	4.248.450.000	3.152.648.200	7.401.098.200	-
9	997582	Kab. Parigi Moutong	1.991.493.400	-	-	-	1.991.493.400	1.991.493.400	-
10	987471	Kab. Tojo Una Una	10.630.493.000	-	-	9.391.320.000	1.239.173.000	10.630.493.000	-
	992722	**Provinsi Sulawesi Selatan**	1.419.600	-	-	-	1.419.600	1.419.600	-
1	992846	Kab. Bantaeng	1.005.355.000	-	-	-	1.005.355.000	1.005.355.000	-
2	992888	Kab. Barru	48.540.611.800	-	-	46.931.750.000	1.608.861.800	48.540.611.800	-
3	992778	Kab. Bone	7.217.084.000	-	-	795.040.000	5.229.484.000	6.024.524.000	1.192.560.000
4	992832	Kab. Bulukumba	25.431.440.000	-	-	20.124.288.000	3.071.120.000	23.195.408.000	2.236.032.000
5	992935	Kab. Enrekang	55.332.505.400	-	-	53.664.660.000	1.667.845.400	55.332.505.400	-
6	992740	Kab. G o w a	5.175.233.800	-	-	1.391.320.000	3.187.633.800	4.578.953.800	596.280.000
7	992850	Kab. Jeneponto	12.907.567.000	-	-	10.931.710.000	1.975.857.000	12.907.567.000	-
8	992811	Kab. Luwu	1.678.755.000	-	-	-	1.678.755.000	1.678.755.000	-
9	980341	Kab. Luwu Utara	2.202.707.000	-	-	-	2.202.707.000	2.202.707.000	-
10	992799	Kab. M a r o s *	6.845.839.600	-	-	4.962.800.000	1.883.039.600	6.845.839.600	-
11	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	56.323.645.600	-	-	53.863.510.000	2.460.135.600	56.323.645.600	-
12	992736	Kab. Pinrang	2.248.976.600	-	-	-	2.248.976.600	2.248.976.600	-
13	992867	Kab. Selayar	48.206.529.000	-	-	42.573.627.000	902.499.000	43.476.126.000	4.730.403.000
14	992892	Kab. Sidenreng Rappang	28.555.435.800	-	-	26.832.330.000	1.723.105.800	28.555.435.800	-
15	992825	Kab. Sinjai	28.922.347.200	-	-	27.031.180.000	1.891.167.200	28.922.347.200	-
16	992914	Kab. Soppeng	22.159.174.800	-	-	19.875.730.000	2.283.444.800	22.159.174.800	-
17	992871	Kab. Takalar	1.847.487.200	-	-	-	1.847.487.200	1.847.487.200	-
18	992782	Kab. Tana Toraja	6.359.053.200	-	-	1.162.728.000	3.452.233.200	4.614.961.200	1.744.092.000
19	992757	Kab. Wajo	2.751.541.000	-	-	-	2.751.541.000	2.751.541.000	-
20	992956	Kota Pare-pare	1.191.208.200	-	-	-	1.191.208.200	1.191.208.200	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
21	992942	Kota Makassar	5.272.789.600	-	-	-	5.272.789.600	5.272.789.600	-
22	997604	Kota Palopo	30.969.687.200	-	-	26.832.420.000	1.155.887.200	27.988.307.200	2.981.380.000
23	928282	Kab. Luwu Timur	1.159.797.600	-	-	-	1.159.797.600	1.159.797.600	-
	955383	**Provinsi Sulawesi Barat**	-	-	-	-	-	-	-
1	992804	Kab. Majene	1.524.096.600	-	-	-	1.524.096.600	1.524.096.600	-
2	992761	Kab. Mamuju	1.893.665.800	-	-	-	1.893.665.800	1.893.665.800	-
3	992921	Kab. Polewali Mandar	7.625.846.000	-	-	5.043.500.000	2.582.346.000	7.625.846.000	-
4	997599	Kab. Mamasa	9.019.059.000	-	-	8.273.340.000	745.719.000	9.019.059.000	-
5	998299	Kab. Mamuju Utara	276.564.600	-	-	-	276.564.600	276.564.600	-
	993106	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	31.231.200	-	-	-	31.231.200	31.231.200	-
1	993127	Kab. Buton	3.330.441.400	-	-	-	3.330.441.400	3.330.441.400	-
2	993110	Kab. Konawe	6.082.282.600	-	-	4.472.100.000	1.610.182.600	6.082.282.600	-
3	993148	Kab. Kolaka	15.887.771.400	-	-	13.912.710.000	1.975.061.400	15.887.771.400	-
4	993131	Kab. Muna	16.117.875.200	-	-	13.416.210.000	2.701.665.200	16.117.875.200	-
5	993326	Kota Kendari	2.151.237.400	-	-	-	2.151.237.400	2.151.237.400	-
6	994782	Kota Bau-bau	1.386.850.400	-	-	-	1.386.850.400	1.386.850.400	-
7	998304	Kab. Konawe Selatan	21.433.613.400	-	-	19.875.800.000	1.557.813.400	21.433.613.400	-
8	987642	Kab. Bombana	5.233.377.400	-	-	4.024.890.000	761.277.400	4.786.167.400	447.210.000
9	987638	Kab. Wakatobi	41.009.685.200	-	-	40.203.810.000	805.875.200	41.009.685.200	-
10	987443	Kab. Kolaka Utara	5.555.497.600	-	-	4.969.000.000	586.497.600	5.555.497.600	-
11	963364	Kab. Konawe Utara	194.022.400	-	-	-	194.022.400	194.022.400	-
12	963370	Kab. Buton Utara	173.503.200	-	-	-	173.503.200	173.503.200	-
	992274	**Provinsi Bali**	2.129.400	-	-	-	2.129.400	2.129.400	-
1	992342	Kab. Badung	11.120.757.200	-	-	6.260.877.000	2.176.647.200	8.437.524.200	2.683.233.000
2	992338	Kab. Bangli	37.187.072.800	-	-	35.776.110.000	1.410.962.800	37.187.072.800	-
3	992281	Kab. Buleleng	4.215.117.400	-	-	-	4.215.117.400	4.215.117.400	-
4	992317	Kab. Gianyar	11.151.859.800	-	-	8.609.000.000	2.542.859.800	11.151.859.800	-
5	992295	Kab. Jembrana	1.476.662.200	-	-	-	1.476.662.200	1.476.662.200	-
6	992321	Kab. Karangasem	51.829.065.600	-	-	49.192.650.000	2.636.415.600	51.829.065.600	-
7	992300	Kab. Klungkung	3.247.146.600	-	-	1.987.600.000	1.259.546.600	3.247.146.600	-
8	992359	Kab. Tabanan	8.151.181.200	-	-	5.273.340.000	2.877.841.200	8.151.181.200	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
9	992363	Kota Denpasar	2.388.331.400	-	-	-	2.388.331.400	2.388.331.400	-
	992370	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	4.258.800	-	-	-	4.258.800	4.258.800	-
1	992410	Kab. Bima	13.458.537.800	-	-	8.946.360.000	4.512.177.800	13.458.537.800	-
2	992431	Kab. Dompu	9.919.483.800	-	-	8.273.000.000	1.646.483.800	9.919.483.800	-
3	992384	Kab. Lombok Barat	22.067.160.000	-	-	18.819.110.000	3.248.050.000	22.067.160.000	-
4	992391	Kab. Lombok Tengah	4.380.771.200	-	-	-	4.380.771.200	4.380.771.200	-
5	992406	Kab. Lombok Timur	4.682.449.200	-	-	-	4.682.449.200	4.682.449.200	-
6	992427	Kab. Sumbawa	11.913.174.000	-	-	8.944.000.000	2.969.174.000	11.913.174.000	-
7	992448	Kota Mataram	6.086.584.600	-	-	3.975.200.000	2.111.384.600	6.086.584.600	-
8	997625	Kota Bima	14.740.935.800	-	-	13.175.000.000	1.565.935.800	14.740.935.800	-
9	987450	Kab. Sumbawa Barat	613.584.400	-	-	-	613.584.400	613.584.400	-
	992452	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	-	-	-	-	-	-	-
1	992502	Kab. Alor	1.480.993.800	-	-	-	1.480.993.800	1.480.993.800	-
2	992473	Kab. Belu	4.729.570.400	-	-	1.987.600.000	2.741.970.400	4.729.570.400	-
3	992537	Kab. Ende	2.166.174.400	-	-	-	2.166.174.400	2.166.174.400	-
4	992520	Kab. Flores Timur	1.441.125.400	-	-	-	1.441.125.400	1.441.125.400	-
5	992469	Kab. Kupang	2.246.153.000	-	-	-	2.246.153.000	2.246.153.000	-
6	980379	Kab. Lembata	6.201.498.800	-	-	4.969.000.000	1.232.498.800	6.201.498.800	-
7	992558	Kab. Manggarai	30.052.673.400	-	-	26.832.420.000	3.220.253.400	30.052.673.400	-
8	992541	Kab. Ngada	5.005.962.200	-	-	3.975.200.000	1.030.762.200	5.005.962.200	-
9	992516	Kab. Sikka	6.228.886.200	-	-	4.024.890.000	1.756.786.200	5.781.676.200	447.210.000
10	992579	Kab. Sumba Barat	2.852.019.400	-	-	1.391.320.000	864.419.400	2.255.739.400	596.280.000
11	992562	Kab. Sumba Timur	1.179.594.000	-	-	-	1.179.594.000	1.179.594.000	-
12	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	2.657.358.600	-	-	-	2.657.358.600	2.657.358.600	-
13	992480	Kab. Timor Tengah Utara	6.023.748.800	-	-	4.472.100.000	1.551.648.800	6.023.748.800	-
14	993368	Kota Kupang	2.341.814.800	-	-	-	2.341.814.800	2.341.814.800	-
15	997578	Kab. Rote Ndao	605.729.800	-	-	-	605.729.800	605.729.800	-
16	998510	Kab. Manggarai Barat	30.082.597.200	-	-	29.113.000.000	969.597.200	30.082.597.200	-
17	963430	Kab. Nagekeo	4.838.017.800	-	-	3.975.200.000	862.817.800	4.838.017.800	-
18	963446	Kab. Sumba Barat Daya	3.630.966.200	-	-	2.981.000.000	649.966.200	3.630.966.200	-
19	963452	Kab. Sumba Tengah	648.440.000	-	-	-	648.440.000	648.440.000	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
	993152	**Provinsi Maluku**	20.194.200	-	-	-	20.194.200	20.194.200	-
1	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.183.121.200	-	-	-	2.183.121.200	2.183.121.200	-
2	993169	Kab. Maluku Tengah	28.253.334.400	-	-	22.360.320.000	5.893.014.400	28.253.334.400	-
3	993173	Kab. Maluku Tenggara	6.536.372.600	-	-	4.472.100.000	2.064.272.600	6.536.372.600	-
4	980362	Kab. Pulau Buru	14.418.616.600	-	-	13.416.210.000	1.002.406.600	14.418.616.600	-
5	993202	Kota Ambon	5.232.381.800	-	-	1.987.600.000	3.244.781.800	5.232.381.800	-
6	987439	Kab. Seram Bagian Barat	41.691.453.400	-	-	39.751.700.000	1.939.753.400	41.691.453.400	-
7	987422	Kab. Seram Bagian Timur	53.685.013.800	-	-	53.266.900.000	418.113.800	53.685.013.800	-
8	987621	Kab. Kepulauan Aru	553.030.400	-	-	-	553.030.400	553.030.400	-
	980011	**Provinsi Maluku Utara**	35.781.200	-	-	-	35.781.200	35.781.200	-
1	993194	Kab. Halmahera Tengah	7.343.331.000	-	-	6.708.060.000	635.271.000	7.343.331.000	-
2	993180	Kab. Halmahera Barat	27.905.028.000	-	-	25.043.000.000	2.862.028.000	27.905.028.000	-
3	980028	Kota Ternate	14.023.918.800	-	-	12.516.210.000	1.507.708.800	14.023.918.800	-
4	998346	Kab. Halmahera Timur	59.510.940.800	-	-	59.324.500.000	186.440.800	59.510.940.800	-
5	998350	Kota Tidore Kepulauan	1.166.289.800	-	-	-	1.166.289.800	1.166.289.800	-
6	998332	Kab. Kepulauan Sula	26.839.772.000	-	-	25.924.000.000	915.772.000	26.839.772.000	-
7	998325	Kab. Halmahera Selatan	30.971.989.000	-	-	29.813.000.000	1.158.989.000	30.971.989.000	-
8	998311	Kab. Halmahera Utara	1.224.241.200	-	-	-	1.224.241.200	1.224.241.200	-
	993216	**Provinsi Papua**	-	-	-	-	-	-	-
1	993237	Kab. Biak Numfor	1.377.864.800	-	-	-	1.377.864.800	1.377.864.800	-
2	993220	Kab. Jayapura	35.960.685.000	-	-	33.490.880.000	2.469.805.000	35.960.685.000	-
3	993290	Kab. Jayawijaya	1.029.792.400	-	-	-	1.029.792.400	1.029.792.400	-
4	993283	Kab. Merauke	1.370.670.600	-	-	-	1.370.670.600	1.370.670.600	-
5	993401	Kab. Mimika	49.708.431.800	-	-	34.434.918.000	515.691.800	34.950.609.800	14.757.822.000
6	993305	Kab. Nabire	1.287.054.600	-	-	-	1.287.054.600	1.287.054.600	-
7	993393	Kab. Paniai	516.380.800	-	-	-	516.380.800	516.380.800	-
8	993389	Kab. Puncak Jaya	59.812.185.000	-	-	59.627.000.000	185.185.000	59.812.185.000	-
9	993258	Kab. Yapen Waropen	697.832.200	-	-	-	697.832.200	697.832.200	-
10	993312	Kota Jayapura	15.093.899.000	-	-	13.416.210.000	1.677.689.000	15.093.899.000	-
11	998392	Kab. Sarmi	28.975.550.400	-	-	28.844.110.000	131.440.400	28.975.550.400	-
12	998400	Kab. Keerom	13.399.754.400	-	-	12.745.350.000	654.404.400	13.399.754.400	-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Daerah	Pagu	Realisasi					Sisa Anggaran
				Penyeimbang DAU	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov Papua Barat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4 - 9
13	998477	Kab. Yahukimo	52.693.794.200	-	-	52.323.120.000	370.674.200	52.693.794.200	-
14	998421	Kab. Pegunungan Bintang	59.736.143.400	-	-	59.616.000.000	120.143.400	59.736.143.400	-
15	998414	Kab. Tolikara	49.241.761.400	-	-	49.127.000.000	114.761.400	49.241.761.400	-
16	998388	Kab. Boven Digoel	146.556.800	-	-	-	146.556.800	146.556.800	-
17	998367	Kab. Mappi	191.180.600	-	-	-	191.180.600	191.180.600	-
18	998371	Kab. Asmat	365.263.600	-	-	-	365.263.600	365.263.600	-
19	998460	Kab. Waropen	49.179.000	-	-	-	49.179.000	49.179.000	-
20	987511	Kab. Supiori	155.017.200	-	-	-	155.017.200	155.017.200	-
21	963461	Kab. Mamberamo Raya	51.961.000	-	-	-	51.961.000	51.961.000	-
	998854	**Provinsi Papua Barat**	670.000.000.000	-	-	-	569.500.000.000	569.500.000.000	100.500.000.000
1	993262	Kab. Sorong	35.735.218.800	-	-	34.881.410.000	853.808.800	35.735.218.800	-
2	993241	Kab. Manokwari	67.454.354.000	-	-	66.186.100.000	1.268.254.000	67.454.354.000	-
3	993279	Kab. Fak Fak	54.554.006.400	-	-	53.629.020.000	924.986.400	54.554.006.400	-
4	980383	Kota Sorong	1.155.060.400	-	-	-	1.155.060.400	1.155.060.400	-
5	998442	Kab. Sorong Selatan	173.240.600	-	-	-	173.240.600	173.240.600	-
6	998456	Kab. Raja Ampat	37.148.050.200	-	-	36.962.600.000	185.450.200	37.148.050.200	-
7	998481	Kab. Teluk Bintuni	249.631.200	-	-	-	249.631.200	249.631.200	-
8	998498	Kab. Teluk Wondama	184.223.000	-	-	-	184.223.000	184.223.000	-
9	998435	Kab. Kaimana	9.222.892.400	-	-	8.944.110.000	278.782.400	9.222.892.400	-
Jumlah			**6.476.391.745.000**	**242.835.500.000**	**189.284.557.655**	**4.006.939.652.000**	**1.769.476.245.000**	**6.208.535.954.655**	**267.855.790.345**

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rp)

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2008	2007
	I. ACEH		**122.251.197.076**	**95.372.439.108**
1	BANDA ACEH	001	54.379.958.576	39.515.802.600
2	LANGSA	002	8.526.611.700	6.769.641.300
3	MEULABOH	003	15.278.549.800	12.184.362.300
4	TAPAK TUAN	074	6.168.182.900	5.000.000.000
5	LHOKSEUMAWE	089	27.557.387.000	23.351.246.408
6	KUTACANE	105	5.557.463.200	4.829.231.000
7	TAKENGON	122	4.783.043.900	3.722.155.500
8	BANDA ACEH (KHUSUS)	175	-	-
	II. MEDAN		**185.371.166.300**	**155.800.725.550**
9	MEDAN I	004	54.357.710.500	45.580.773.000
10	PEMATANG SIANTAR	005	20.310.722.400	16.991.322.900
11	PADANG SIDEMPUAN	006	7.945.162.400	6.605.460.400
12	GUNUNG SITOLI	007	3.178.505.800	2.563.106.900
13	RANTAU PRAPAT	075	4.936.786.300	4.274.925.300
14	TANJUNG BALAI	076	6.233.356.300	5.314.538.800
15	SIBOLGA	106	11.464.764.000	9.608.701.200
16	SIDIKALANG	119	5.295.576.400	4.464.392.376
17	TEBING TINGGI	124	10.247.549.900	8.585.658.100
18	BALIGE	125	6.221.176.900	5.031.494.800
19	MEDAN II	123	55.179.855.400	46.780.351.774
	III. PADANG		**90.768.147.845**	**76.954.160.777**
20	PADANG	010	51.372.768.185	43.195.614.100
21	BUKIT TINGGI	011	22.495.203.260	19.844.212.777
22	SIJUNJUNG	077	4.296.415.800	3.567.856.400
23	SOLOK	090	5.896.810.200	4.877.872.300
24	LUBUK SIKAPING	091	3.748.420.300	3.018.090.300
25	PAINAN	142	2.958.530.100	2.450.514.900
	IV. PEKANBARU		**98.050.322.700**	**79.760.958.670**
26	PEKANBARU	008	49.457.913.800	40.366.792.770
27	TANJUNG PINANG	009	18.459.212.900	15.131.932.600
28	RENGAT	092	8.097.499.000	6.575.915.700
29	DUMAI	120	9.113.945.400	7.346.209.800
30	BATAM	137	12.921.751.600	10.340.107.800
	V. JAMBI		**63.096.165.229**	**40.648.152.411**
31	JAMBI	012	46.886.824.529	27.558.650.211
32	SUNGAI PENUH	013	3.772.423.300	3.166.331.300
33	MUARA BUNGO	078	4.550.126.400	3.585.135.300
34	KUALA TUNGKAL	143	3.718.782.700	3.021.858.500
35	BANGKO	159	4.168.008.300	3.316.177.100

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rp)

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2008	2007
	VI. PALEMBANG		**104.914.472.870**	**88.330.306.225**
36	PALEMBANG	014	72.008.732.000	60.982.342.660
37	LUBUK LINGGAU	070	4.974.199.100	4.144.739.500
38	BATURAJA	109	6.655.268.770	5.499.060.400
39	LAHAT	144	15.648.041.200	13.049.700.665
40	SEKAYU	160	5.628.231.800	4.654.463.000
	VII. BANDAR LAMPUNG		**74.013.761.200**	**60.865.104.150**
41	BANDAR LAMPUNG	017	51.883.458.800	42.785.770.658
42	KOTABUMI	116	8.535.419.000	7.124.950.800
43	METRO	126	11.091.994.200	8.774.541.292
44	LIWA	145	2.502.889.200	2.179.841.400
	VIII. BENGKULU		**35.439.043.322**	**29.120.366.200**
45	BENGKULU	016	25.444.274.622	20.863.177.500
46	MANNA	121	4.066.709.700	3.463.846.200
47	CURUP	146	4.759.822.800	3.851.157.500
48	MUKO MUKO	181	1.168.236.200	942.185.000
	IX. PANGKAL PINANG		**15.509.773.700**	**12.487.278.700**
49	PANGKAL PINANG	015	12.563.468.800	10.105.321.100
50	TANJUNG PANDAN	107	2.946.304.900	2.381.957.600
	X. SERANG		**74.235.329.700**	**61.955.481.496**
51	SERANG	020	35.342.111.300	29.673.756.096
52	TANGERANG	127	34.399.811.600	28.501.920.100
53	RANGKASBITUNG	161	4.493.406.800	3.779.805.300
	XII. JAKARTA		**3.439.833.616.730**	**2.731.938.333.108**
54	JAKARTA I	018	139.196.728.928	131.611.625.050
55	JAKARTA II	019	2.821.268.684.801	2.199.116.452.329
56	JAKARTA III	088	158.025.344.000	142.349.061.456
57	JAKARTA IV	133	162.421.252.400	137.472.666.376
58	JAKARTA V	139	158.921.606.600	121.388.527.897
59	**JAKARTA VI**	140	1	-
	XII. BANDUNG		**446.071.241.911**	**373.542.754.406**
60	PURWAKARTA	021	21.018.907.200	17.584.849.735
61	BANDUNG I	022	88.278.772.900	79.572.161.334
62	BOGOR	023	77.632.364.800	64.641.253.300
63	CIREBON	024	31.157.811.600	25.891.547.200
64	TASIKMALAYA	025	25.332.585.100	21.019.731.100
65	KARAWANG	086	6.588.507.900	5.454.490.911
66	SUMEDANG	087	10.950.371.200	9.239.625.700
67	GARUT	096	16.345.619.900	13.451.325.200

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rp)

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2008	2007
68	SUKABUMI	128	27.249.255.300	23.034.797.900
69	KUNINGAN	147	11.265.702.200	9.527.186.400
70	BEKASI	171	22.246.939.011	14.198.483.089
71	BANDUNG II	095	108.004.404.800	89.927.302.537
	XIII. SEMARANG		**352.171.307.200**	**304.307.430.365**
72	SEMARANG I	026	52.242.393.700	49.702.635.565
73	PURWOREJO	027	11.402.524.300	9.670.607.700
74	SURAKARTA	028	58.627.958.400	49.399.872.200
75	PURWOKERTO	029	30.723.491.900	25.721.980.700
76	PEKALONGAN	072	10.548.609.300	9.075.015.900
77	SEMARANG II	134	48.086.315.800	40.787.008.200
78	PATI	097	19.593.185.200	16.335.798.700
79	MAGELANG	115	33.792.394.100	29.526.760.600
80	TEGAL	118	24.400.944.500	20.689.209.000
81	KUDUS	129	12.912.629.800	10.792.796.800
82	CILACAP	130	8.360.923.900	7.027.248.900
83	KLATEN	148	14.754.417.400	12.478.431.300
84	SRAGEN	162	9.501.028.000	8.130.652.000
85	PURWODADI	163	9.400.481.300	8.016.796.300
86	BANJARNEGARA	164	7.824.009.600	6.952.616.500
	XIV. YOGYAKARTA		**111.788.729.695**	**93.938.669.800**
87	YOGYAKARTA	030	99.326.128.695	83.279.374.000
88	WONOSARI	149	6.828.847.200	5.956.255.100
89	WATES	176	5.633.753.800	4.703.040.700
	XV. SURABAYA		**499.823.265.980**	**422.482.102.150**
90	SURABAYA I	031	110.920.807.500	93.328.503.900
91	MALANG	032	87.478.731.300	73.163.784.050
92	MADIUN	033	43.152.518.400	36.780.883.400
93	KEDIRI	034	33.800.173.000	28.481.927.200
94	BONDOWOSO	035	13.607.900.080	11.366.963.300
95	PAMEKASAN	036	22.668.064.700	18.797.244.400
96	BOJONEGORO	073	11.185.957.900	9.491.158.300
97	MOJOKERTO	098	25.546.792.200	21.976.954.900
98	PACITAN	099	3.262.096.500	2.844.352.900
99	BANYUWANGI	100	6.227.829.800	5.303.937.800
100	JEMBER	131	33.120.462.900	28.165.116.700
101	BLITAR	150	12.966.162.200	11.526.051.900
102	SIDOARJO	165	20.582.308.100	16.793.288.700
103	TUBAN	166	4.343.261.400	3.625.406.400
104	SURABAYA II	135	70.960.200.000	60.836.528.300
	XVI. PONTIANAK		**73.211.694.831**	**60.856.657.100**

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rp)

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2008	2007
105	PONTIANAK	042	40.152.059.831	34.032.704.300
106	SINTANG	076	8.515.684.900	6.789.439.800
107	SINGKAWANG	093	12.172.014.400	9.916.114.600
108	KETAPANG	094	3.777.679.100	3.019.103.700
109	PUTUSSIBAU	117	2.697.795.300	2.130.082.400
110	SANGGAU	167	5.896.461.300	4.969.212.300
	XVII. PALANGKARAYA		**39.840.484.103**	**32.611.791.150**
111	PALANGKARAYA	043	23.664.674.800	19.834.477.750
112	SAMPIT	044	5.521.824.500	4.561.470.000
113	BUNTOK	080	5.693.187.700	4.755.023.200
114	PANGKALAN BUN	102	4.960.797.103	3.460.820.200
	XVIII. BANJARMASIN		**71.183.321.901**	**59.323.310.873**
115	BANJARMASIN	045	48.300.214.301	40.669.689.873
116	KOTABARU	081	4.201.531.300	3.439.786.200
117	BARABAI	110	9.862.491.300	8.021.404.400
118	TANJUNG	151	6.242.080.300	5.003.125.900
119	PELAIHARI	168	2.577.004.700	2.189.304.500
	XIX. SAMARINDA		**75.411.667.500**	**62.653.583.950**
120	SAMARINDA	046	31.798.397.600	26.793.730.650
121	BALIKPAPAN	047	29.330.407.600	24.237.247.600
122	TARAKAN	048	10.344.169.300	8.437.244.400
123	NUNUKAN	152	1.759.180.300	1.340.248.000
124	TANJUNG REDEP	153	2.179.512.700	1.845.113.300
	XX. DENPASAR		**95.793.080.700**	**77.255.402.400**
125	DENPASAR	037	70.727.771.800	56.320.304.900
126	SINGARAJA	132	16.560.827.700	13.972.576.800
127	AMLAPURA	154	8.504.481.200	6.962.520.700
	XXI. MATARAM		**53.928.825.900**	**46.137.817.734**
128	MATARAM	038	36.868.474.900	31.876.223.734
129	BIMA	071	7.674.222.300	6.340.708.000
130	SUMBAWA BESAR	101	4.514.248.200	3.684.451.900
131	SELONG	169	4.871.880.500	4.236.434.100
	XXII. KUPANG		**66.023.455.000**	**54.616.806.077**
132	KUPANG	039	41.011.004.600	34.037.630.277
133	ENDE	040	7.011.078.000	5.815.044.800
134	WAINGAPU	041	4.362.627.400	3.682.613.900
135	RUTENG	111	5.503.219.500	4.411.369.600
136	ATAMBUA	172	4.835.525.500	4.010.347.500
137	LARANTUKA	174	3.300.000.000	2.659.800.000

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rp)

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2008	2007
	XXIII. MAKASAR		**179.710.329.838**	**157.546.962.600**
138	MAKASSAR I	054	65.444.915.400	61.718.380.400
139	WATAMPONE	055	15.425.091.583	12.961.438.000
140	BANTAENG	056	6.465.861.500	5.566.582.100
141	PARE-PARE	057	21.136.665.900	17.847.161.400
142	PALOPO	058	7.392.658.800	6.223.434.400
143	MAJENE	059	4.786.832.400	3.969.042.300
144	MAKASAR II	136	48.893.328.300	41.271.605.100
145	BENTENG	155	1.614.936.800	1.373.458.300
146	MAKALE	170	2.656.798.700	2.164.202.300
147	SINJAI	177	1.949.480.400	1.692.761.500
148	MAMUJU	178	3.943.760.055	2.758.896.800
	XXIV. PALU		**54.336.104.547**	**43.443.310.679**
149	PALU	051	37.853.549.647	29.633.809.979
150	POSO	052	8.270.407.500	6.920.054.800
151	LUWUK	053	4.316.942.100	3.654.295.100
152	TOLI-TOLI	082	3.895.205.300	3.235.150.800
	XXV. KENDARI		**44.204.999.327**	**34.439.397.500**
153	KENDARI	060	32.215.604.295	24.578.280.600
154	BAU-BAU	103	5.234.597.100	4.237.106.200
155	KOLAKA	156	4.038.606.132	3.289.617.100
156	RAHA	157	2.716.191.800	2.334.393.600
	XXVI. GORONTALO		**19.682.601.600**	**16.009.022.500**
157	GORONTALO	050	16.843.661.000	13.856.397.000
158	MARISA	180	2.838.940.600	2.152.625.500
	XXVII. MANADO		**62.873.303.100**	**52.916.115.500**
159	MANADO	049	49.882.661.200	42.012.625.800
160	TAHUNA	083	2.620.721.500	2.253.652.100
161	KOTAMOBAGU	158	4.048.904.000	3.351.887.200
162	BITUNG	179	6.321.016.400	5.297.950.400
	XXVIII. TERNATE		**23.701.654.800**	**15.720.021.600**
163	TERNATE	062	21.019.311.900	13.521.351.300
22	TOBELO	112	2.682.342.900	2.198.670.300
	XXIX. AMBON		**59.772.054.266**	**47.426.455.400**
165	AMBON	061	45.179.037.900	36.898.991.400
166	TUAL	084	6.403.121.666	3.895.747.000
167	SAUMLAKI	104	2.214.284.100	1.841.709.600
168	MASOHI	173	5.975.610.600	4.790.007.400

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(Dalam Rp)

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2008	2007
	XXX. JAYAPURA		**122.041.224.400**	**104.435.735.900**
169	JAYAPURA	063	50.941.952.400	44.831.622.000
170	BIAK	064	12.381.799.000	10.508.755.600
171	MANOKWARI	065	10.371.727.700	8.458.473.900
172	SORONG	066	14.174.427.300	12.035.057.700
173	FAK-AK	067	3.195.761.800	2.749.102.700
174	MERAUKE	068	11.655.946.400	9.590.525.900
175	NABIRE	085	4.700.998.000	4.038.462.900
176	WAMENA	113	3.827.734.700	3.203.704.000
177	SERUI	138	2.472.380.400	2.150.916.000
178	TIMIKA	141	8.318.496.700	6.869.115.200
JUMLAH			**6.755.052.343.271**	**5.492.896.654.079**

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO REKENING	NAMA REKENING	2008	2007
I. Rekening Pemerintah Lainnya Yang Masih aktif				
	1. Rekening Dana Investasi/RPD			
1	513000000	Rekening Dana Investasi	16.241.417.977,26	5.710.086.605,86
2	519000102	Rekening Pembangunan Daerah	3.429.117.448,77	39.868.819.549,56
3	607000111	RDI JPY	705.328.986,42	105.675.036.416,15
4	607000311	RDI AUD	410.464.716,24	25.009.533.791,33
5	607000411	RDI USD	21.736.711.738,50	136.829.444.246,15
6	607000511	RDI GBP	314.591.786,35	22.226.965.945,32
7	607000990	RDI SDR	698.503.930,86	4.963.383.168,27
8	607000991	RDI EUR	29.618.068.874,16	111.974.118.730,34
	JUMLAH 2. Rekening Dana Investasi/RPD		**73.154.205.458,56**	**452.257.388.452,98**
	2. Rekening Hasil Minyak KPS			
1	600000411	Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	15.613.890.374.629,50	162.925.619.964,97
	JUMLAH 2. Rekening Hasil Minyak KPS		**15.613.890.374.629,50**	**162.925.619.964,97**
	3. Rekening Selain RDI/RPD dan KPS			
1	508000071	Penerimaan Pertambangan dan perikanan	151.312.229.740,93	88.732.911.792,50
2	508000084	Penerimaan Panas Bumi	86.635.248.233,00	291.316.908.993,03
3	500000001	Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus kosong dan *reimbursement* dari lender	0,00	8.820.882.559,92
4	500000002	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL)	3.370.514.138.408,00	51.259.408.895,00
5	500000003	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara	0,00	0,00
6	500000004	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR	33.275.904.972,01	31.311.080.717,01
7	502000001	Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Rekapitulasi Perbankan	764.177.093.691,00	36.280.991.691,00
8	502000002	Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan	83.442.505.302,09	83.442.505.302,09
9	510000239	Rekening Khusus Menteri Keuangan karena penjualan saham PT Telkom di pasar domestik	1.232.479.781,91	1.194.101.699,71
10	510000267	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk monetasi *non project type grant aid* 2000	0,00	14.994.645.979,35
11	510000270	Rekening khusus Depkeu (Rp) untuk monetisasi *non project type grant aid* 2001	151.821.402.668,17	155.681.029.688,82
12	510000271	Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan SPL XII INP 23	8.276.997.785,87	8.276.997.785,87
13	510000275	*Non project grant aid* 2002	160.575.085.837,48	160.165.761.169,00
14	510000276	*Non project grant aid* 2003	55.891.655.244,00	52.844.971.084,00
15	600500411	Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD)	0,00	0,00
16	602074411	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm USD	3.106.113.135,00	2.671.824.622,70
17	519000119	Rek. Penerimaan Hasil Penjualan Beras Pemerintah	0,00	6.997.689.631,25
18	519000121	Rek Khusus Depkeu (Rupiah) untuk Increase of food Production (SKR) 2005	85.633.332.559,79	7.306.409.068,00
	JUMLAH 3. Rekening Selain RDI/RPD dan KPS		**4.955.894.187.359,25**	**1.001.298.120.679,25**
JUMLAH I. Rekening Pemerintah Lainnya Yang Masih Aktif			**20.642.938.767.447,30**	**1.616.481.129.097,20**
II. Rekening Pemerintah Lainnya Yang Telah Ditutup				
1	519000003	Dana Hasil Divestasi Sahan-saham BUMN Dalam Rupiah	-	67.193.107.587,00
2	510000242	Reksus Depkeu untuk pembiayaan proyek SPL VIII *sector education* INP-190ECF	-	0,00
3	510000247	Reksus Depkeu untuk proyek *sector health* SPL IX INP-20 OECF	-	0,00
4	510000251	Reksus Depkeu untuk proyek s*ector education and human resources dev. SPL X INP21 OECF*	-	0,00
5	510000252	Reksus Depkeu untuk *sector Social Welfare* SPL X INP-20 OECF	-	0,00

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO REKENING	NAMA REKENING	2008	2007
6	510000253	Reksus Depkeu untuk *sector health* SPL X INP-20 OECF	-	0,00
7	510000266	SUB BUN (Rp) dlm rangka monetisasi *non project type grant aid*	-	0,00
8	510000268	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk *increase of food* (SKR) 2000	-	25.378.590.121,41
9	510000269	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk *increase of food* (SKR) 2001	-	40.128.228.176,46
10	510000272	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah luar negeri dalam rangka bencana alam nasional di NAD dan Sumut	-	0,00
11	510000274	*Increase of food production* (SKR) 2003	-	30.412.885.365,00
12	519000116	Rekening penerimaan Tim Pemberesan BPPN	-	12.651.311,00
13	555000150	Departemen Keuangan karena pembayaran hutang pokok dan biaya kredit atas PKE berbagai proyek	-	0,00
14	555000213	Departeman Keuangan Rekening Pembiayaan Industri Strategis dan Pengeluaran Lainnya	-	0,00
15	555000215	Rekening Cadangan CAR Bank-bank Pemerintah	-	0,00
16	555000216	Rekening Cadangan Anggaran Lain-lain	-	0,00
17	609020411	Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD	-	0,00
18	519000001	Menkeu pemberian fas. Kredit kend. Perorangan u/ Pej. Eselon 1 s/d 4	-	305.336.126,25
19	603000111	Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan ninth port Project	-	651.616.722,44
20	603001111	Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XIX	-	43.125.988.672,03
21	603002111	Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan tenth roads	-	37.984.090.986,42
22	603003111	Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XX	-	19.204.625.029,21
23	604010411	Depkeu k/ PISA dlm rangka Suralaya Steam power plant	-	5.841.497.743,03
24	604013411	Depkeu k/ PISA dlm rangka jakarta and west java subst & trans	-	557.604,80
25	604014411	Depkeu k/ PISA dlm rangka Trans lintas muara tawar cibatu	-	7.616.280.635,80
26	604016411	Depkeu k/ PISA dlm rangka minahasa dan palu diesel	-	2.799.604.283,74
27	604017411	Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek grati ccpp	-	10.561.513.868,15
28	604018411	Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek ombilin SPP	-	1.939.771.088,84
29	605000411	Rekening Pinjaman Obligasi RI tgl 25071996	-	75.074.473.591,93
30	609000111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan	-	230.593.031.293,93
31	609000412	Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat	-	5.640.947.735,90
32	609000517	Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat	-	28.167.903.902,66
33	609000522	Depkeu dlm rangka proyek PLC minahasa loan NIB	-	72.353,40
34	609002411	Reksus menkeu qq. PT. Telkom	-	716.652.099.996,73
35	609005111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untied AJDF	-	12.120.752.168,35
36	609005411	Proyek Implementation Unit Universitas Sumatera Utara	-	8.324.794,77
37	609006111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan two step loan 6	-	46.000.751.417,70
38	609015411	Proyek Implementation Unit Universitas Hasanudin	-	3.041.489,29
39	609016411	Imprest account Dirjen Geologi 641-INO ADB	-	92.457,04
JUMLAH II. Rekening Pemerintah Lainnya Yang Telah Ditutup			-	**1.407.417.836.523,28**
V. Rekening Yang Bukan Milik Pemerintah				
1	609001111	Rekening giro pemerintah lainnya	-	71.424.632.445,53
2	609019411	Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. INDOvest	-	152.629.853.668,63
3	609021411	Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. Bunas	-	454.937.700,00
JUMLAH III. Rekening Yang Bukan Milik Pemerintah			-	**224.509.423.814**
JUMLAH I + II + III			**20.642.938.767.447,30**	**3.248.408.389.434,64**

RINGKASAN HASIL KEGIATAN HULU MIGAS DARI KKKS PRODUKSI (MINYAK)
TAHUN 2008

No.	KKKS	LOKASI	Lifting (Ribu BBL)	ICP	Gross Revenue (000)	Cost Recoverable (000)	Equity To Be Split (000)	Bagian Pemerintah (000)	Tagihan Lifting Pemerintah	Faktor Pengurang			Over/Under BBLS
										DMO Fee	Tagihan DMO Fee ke Depkeu	Over/Under Lifting	
	A. REGION I												
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	7.868	100,19	788.263	112.725	517.885	607.142	575.005.289	7.452.074	7.452.077	(6.456.044)	(64.440)
2	C P I	MFK - PSC	140	98,95	13.853	589	13.264	11.805	9.950.431	2.386	2.020	0	0
3	C P I	SIAK - PSC	767	99,15	76.049	3.150	57.689	64.882	57.494.428	11.063	11.063	0	0
4	C P I	ROKAN - PSC	127.419	94,05	11.983.345	1.274.580	8.312.096	9.774.559	9.114.755.322	116.987.896	117.782.048	(45.948.961)	(841.569)
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	29.320	99,41	2.914.703	381.755	1.950.007	2.222.470	2.049.140.957	149.883.764	142.459.040	37.107.686	373.281
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	2.101	93,31	196.038	26.125	130.705	148.554	141.419.210	30.300	30.300	(5.806.725)	(62.226)
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	465	90,21	41.949	1.308	32.251	33.369	29.988.337	403.363	403.359	(916.315)	(10.159)
8	EXXONMOBIL OIL	PASE	3	84,67	254	203	-	53	201.665	43	43	(143.508)	(1.423)
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	0,00	-	-	-	-		-		0	0
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	3.252	99,72	324.296	140.340	119.097	171.024	177.058.334	3.257.433	3.257.433	(12.936.169)	(129.715)
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	0,00	-	-	-	-	-	-		0	0
12	PEARL OIL	TUNGKAL	259	101,95	26.404	21.123	-	3.250	3.249.764	-		0	0
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	7.324	92,32	676.129	235.642	305.261	394.017	392.358.475	9.094.391	8.859.887	(32.048.933)	(347.626)
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	122	99,05	12.084	9.667	-	1.701	1.701.387	-		0	0
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	820	95,52	78.328	22.335	55.993	51.620	40.395.993	13.974	15.720	(348.074)	(3.643)
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	2.248	104,00	233.781	41.754	145.271	165.369	134.830.760	2.348.235	4.484.882	11.479.771	110.367
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	11	101,82	1.120	896	-	138	137.822	-		0	0
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	11	101,82	1.120	1.120	-	-	80.849.338	-		0	0
19	JOA (PSC) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	47	95,72	4.499	3.480	119	815	640.255	389.674		0	0
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	16	93,75	1.500	144	1.356	813		-		0	0
	TOTAL REGION I		**182.193**	**95,36**	**17.373.715**	**2.276.936**	**11.640.994**	**13.651.581**	**12.809.177.768**	**289.874.596**	**284.757.870**	**(56.017.272)**	**(977.153)**
	B. REGION II											**0**	**0**
1	BP WEST JAVA, LTD.	ONWJ	8.550	97,18	830.853	237.867	426.815	548.333	524.096.657	298.661	298.660	(8.880.860)	(91.542)
2	CAMAR RES. CANADA	BAWEAN	176	111,81	19.679	15.743	-	2.147	-	-		2.146.822	19.171
3	CNOOC SES LTD.	SE. SUMATRA	17.362	95,34	1.655.372	394.795	929.503	1.149.929	993.641.384	8.191.475	8.191.476	65.292.531	683.868
4	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK)	CORRIDOR - PSC	4.057	101,52	411.862	28.294	301.196	322.415	281.830.752	8.988.111	8.522.081	0	0
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGEAN	291	59,16	17.216	13.773	-	2.269	1.910.999	-		0	0
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	934	74,47	69.558	55.646	-	10.185	10.572.770	-		(1.366.339)	(13.070)
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	-	0,00	-	-	-	-	-	-		0	0
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	6	105,67	634	507	-	78	78.043	-		0	0
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	8.328	101,41	844.550	101.619	574.021	659.228	502.397.915	8.056.036	8.056.037	(28.062.159)	(276.248)
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	3.275	99,30	325.209	83.760	176.407	214.490	325.260.825	5.315.918	5.315.917	0	0
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	16	115,50	1.848	1.478	-	237	234.783	-		2.727	24
12	SANTOS PTY.LTD.	MADURA	-	#DIV/0!	-	-	-	-		-		0	0
13	SANTOS PTY.LTD.	SAMPANG	2.279	102,30	233.140	186.512	-	25.389	25.987.027	-		(597.765)	(5.842)
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	14	99,50	1.393	1.393	-	-		-		0	0
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	14	99,50	1.393	1.393	-	-		-		0	0
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	291	114,03	33.182	6.394	20.152	16.485	21.994.916	3.198.932	5.904.618	3.190.541	27.935
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	385	100,61	38.734	6.393	32.341	16.073		-		0	0
18	JOB (PSC) PETROCHINA E.JAVA	TUBAN	1.550	98,77	153.099	19.399	133.700	116.684	101.341.678	6.248.844		5.924.760	59.987
19	PHE TUBAN E.JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	1.550	98,77	153.099	19.399	133.700	110.839		-		0	0
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	664	100,14	66.491	10.343	42.850	48.735	42.017.168	589.555	589.555	453.319	4.521
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	664	100,14	66.491	10.330	56.161	33.697		-		0	0
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	1.247	95,36	118.910	23.621	95.289	80.504	84.663.781	5.251.030	5.251.030	(8.672.395)	(90.972)
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	1.246	95,43	118.910	23.835	95.075	57.045		-		0	0
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	1	22,00	22	18	-	2		247		12.270	348
	TOTAL REGION II		**52.900**	**97,57**	**5.161.645**	**1.242.512**	**3.017.210**	**3.414.764**	**2.916.028.699**	**46.138.809**	**42.129.375**	**29.443.452**	**318.180**
	C. REGION III											**0**	**0**
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	8.442	98,28	829.683	145.414	518.332	622.383	572.669.620	5.707.442	5.348.814	(1.687.774)	(17.173)
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	3.219	95,96	308.887	60.312	202.242	167.406	130.692.639	33.842.336	36.269.461	(4.338.484)	(45.216)
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	1.135	83,40	94.661	80.462	-	5.325	5.324.682	-		0	0
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	0,00	-	-	-	-		-		0	0
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	18.701	94,00	1.757.889	312.102	1.094.209	1.308.397	1.207.633.882	17.672.583	17.672.583	(7.183.542)	(76.422)

RINGKASAN HASIL KEGIATAN HULU MIGAS DARI KKKS PRODUKSI (MINYAK)
TAHUN 2008

No.	KKKS	LOKASI	Lifting (Ribu BBL)	ICP	Gross Revenue (000)	Cost Recoverable (000)	Equity To Be Split (000)	Bagian Pemerintah (000)	Tagihan Lifting Pemerintah	Faktor Pengurang			Over/Under BBLS
										DMO Fee	Tagihan DMO Fee ke Depkeu	Over/Under Lifting	
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	192	89,76	17.234	11.315	2.472	5.156	2.215.822	132.421	-	2.471.866	27.504
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	823	96,02	79.027	27.701	35.521	46.585	45.225.873	11.028	11.028	0	0
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	2.402	100,12	240.488	62.194	130.196	157.552	141.733.841	3.471.679	1.392.299	2.995.592	29.914
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	17.546	93,61	1.642.491	290.112	1.023.881	1.212.338	1.100.992.530	17.652.951	17.652.951	(15.248.029)	(162.888)
10	V I C O	SANGA-SANGA	6.131	96,76	593.221	70.024	404.553	469.305	425.131.636	1.456.089	1.690.400	(3.503.930)	(33.464)
11	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOILI, SULAWESI	580	73,86	42.839	27.968	8.445	7.064	3.766.438	6.693.548	6.693.548	3.856.637	52.248
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOILI, SULAWESI	579	73,99	42.839	22.474	20.365	12.220		-		0	0
13	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	916	93,80	85.917	27.162	41.572	48.601	37.568.105	1.809.676	3.471.696	4.354.892	37.310
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA	917	93,69	85.918	27.162	58.756	35.255		-		0	0
15	JOB (PSC) TOTAL-TENGAH	TENGAH	-	0,00	-	-	-	-		-		0	0
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	-	0,00	-	-	-	-		-		0	0
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	42.089	98,98	4.165.832	1.089.112	2.868.428	1.845.951	1.754.011.625	700.139.882	699.999.665	(44.243.351)	(447.006)
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	46	1,00	46	-	46	21	48.546	-		0	0
	TOTAL REGION III		**103.718**	**96,29**	**9.986.972**	**2.253.514**	**6.409.018**	**5.943.559**	**5.427.015.239**	**788.823.586**	**790.202.445**	**(62.526.123)**	**(635.193)**
	TOTAL REGION I, II, III		**338.811**	**95,99**	**32.522.332**	**5.772.962**	**21.067.222**	**23.009.904**	**21.152.221.707**	**1.124.836.991**	**1.117.089.690**	**(89.099.943)**	**(1.294.166)**

RINGKASAN HASIL KEGIATAN HULU MIGAS DARI KKKS PRODUKSI (GAS)
TAHUN 2008

No.	KKKS	LOKASI	Lifting	Harga Rata2	Gross Revenue	Cost Recoverable	Equity To Be Split	Bagian Pemerintah	Tagihan Lifting Pemerintah	Faktor Pengurang		Setoran ke Rek. 502.000000	Over/under MMCF
										DMO Fee	Over/Under Lifting		
	A. REGION I												
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	-	-	-	-	-			-		0
2	C P I	MFK - PSC	-	-	-	-	-	-			-		0
3	C P I	SIAK - PSC	-	-	-	-	-	-			-		0
4	C P I	ROKAN - PSC	-	-	-	-	-	-			-		0
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	144.981	8	1.218.139	249.171	725.340	656.475	289.163.832		27.533.130		4.403.202
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	61.144	14	827.162	42.965	618.765	549.047	320.122.042		32.622.659		2.583.514
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	61.439	14	855.717	(5.278)	689.852	570.409	395.239.214		(11.194.513)		(3.001.691)
8	EXXONMOBIL OIL	PASE	186	15	2.817	2.254	-	394	1.004.387		(725.439)		(54.310)
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	6.291	3	19.222	15.378	-	1.442	1.742.718		-		0
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	-	-	-	-			-		0
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-			-		0
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	-	-	-	-	-			-		0
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	75.975	14	1.031.504	321.088	504.115	461.770	177.279.015		55.257.597		3.911.610
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	-	-	-	-	-			-		0
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	47.322	15	706.990	55.259	651.731	431.771	206.707.408		-		0
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	18.188	17	302.355	21.676	220.208	182.059	104.244.204		790.370		265.242
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	251	3	682	546	-	-	57.673		-		0
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	251	3	682	682	-	-	3.815.985		-		0
19	JOA (PSC) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	2.717	16	42.478	32.997	985	6.636	3.912.964		-		0
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	906	16	14.159	1.429	12.730	7.638			-		0
	TOTAL REGION I		**419.651**	**12**	**5.021.907**	**738.167**	**3.423.726**	**2.867.641**	**1.503.289.441**		**104.283.804**		**8.107.567**
	B. REGION II			-							-		**0**
1	BP WEST JAVA, LTD.	ONWJ	87.913	3	266.609	186.613	26.674	53.580	26.154.579		7.689.976		2.535.723
2	CAMAR RES. CANADA	BAWEAN	-	-	-	-	-	-			-		0
3	CNOOC SES LTD.	SE. SUMATRA	25.004	3	68.891	35.356	19.757	23.473	14.324.356		(134.674)		(58.000)
4	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK)	CORRIDOR - PSC	252.638	11	2.737.463	98.038	2.091.932	1.669.791	935.488.453		-		0
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGEAN	11.603	2	27.265	21.812	-	1.735	1.959.978		-		0
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	30.914	3	83.030	66.424	-	6.227	6.228.695		-		0
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	3.656	5	17.844	14.275	-	1.510	1.507.739		-		0
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	-	-	-	-	-			-		0
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	2.619	5	11.846	9.477	-	1.540	888.425		-		0
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	27.391	3	86.412	32.065	37.065	38.043	7.898.275		19.708.264		6.247.153
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	-	-	-	-	-			-		0
12	SANTOS PTY.LTD.	MADURA	33.256	2	81.567	65.254	-	6.118	6.117.501		-		0
13	SANTOS PTY.LTD.	SAMPANG	-	-	-	-	-	-			-		0
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	573	13	7.173	7.173	-	-			-		0
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	906	13	11.329	11.329	-	-			-		0
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	202	1	253	186	16	54	105.531		-		0
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	277	1	346	186	160	40			-		0
18	JOB (PSC) PETROCHINA E.JAVA	TUBAN	-	-	-	-	-	-			-		0
19	PHE TUBAN E.JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	-	-	-	-	-	-			-		0
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	1.994	1	1.737	178	1.212	1.091	659.340		-		0
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	1.994	1	1.737	179	1.558	935			-		0
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	7.359	4	30.719	30.232	487	341	842.266		(680.503)		(163.031)
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	7.359	4	30.719	30.233	486	291			-		0
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	-	-	-	-	-	-			-		0
	TOTAL REGION II		**495.658**	**7**	**3.464.940**	**609.010**	**2.179.347**	**1.804.769**	**1.002.175.139**		**26.583.063**		**8.561.845**
	C. REGION III										-		**0**
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	68.179	11	750.006	87.328	512.677	464.233	162.736.517		43.787.371		3.208.022

RINGKASAN HASIL KEGIATAN HULU MIGAS DARI KKKS PRODUKSI (GAS)
TAHUN 2008

No.	KKKS	LOKASI	Lifting	Harga Rata2	Gross Revenue	Cost Recoverable	Equity To Be Split	Bagian Pemerintah	Tagihan Lifting Pemerintah	Faktor Pengurang		Setoran ke Rek. 502.000000	Over/under MMCF
										DMO Fee	Over/Under Lifting		
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	14.533	15	219.849	77.141	109.731	85.624	26.851.388		8.522.814		424.743
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	-	-	-	-	-	-			-		0
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	10.201	2	22.288	4.018	14.927	10.962	4.344.993		873.356		399.727
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	408.125	11	4.629.144	531.814	3.171.501	2.869.861	4.243.253		12.225.896		2.110.459
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	-	-	-	-	-			-		0
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	6.802	3	19.367	4.998	10.496	9.339	1.452.532		-		0
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	210	12	2.440	82	1.870	1.532	821.301		62.901		5.403
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	410.745	12	4.864.742	529.833	3.361.961	3.034.426	3.597.864.330		46.620.232		3.936.284
10	V I C O	SANGA-SANGA	124.932	13	1.595.472	244.543	1.031.835	960.378	599.121.177		13.135.319		1.028.547
11	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	-	-	-	-			-		0
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	-	-	-	-			-		0
13	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	-	-	-	-			-		0
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	-	-	-	-			-		0
15	JOB (PSC) TOTAL-TENGAH	TENGAH	1.791	16	29.179	11.405	17.774	13.035			7.519.588		1.329.530
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	1.791	16	29.179	29.179	-	-			-		0
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	295.104	3	979.966	697.895	233.073	169.242	153.700.740		(61.257.143)		(18.446.817)
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	468	3	1.258	556	702	559	566.152		-		0
	TOTAL REGION III		**1.342.881**	**10**	**13.142.890**	**2.218.792**	**8.466.547**	**7.619.191**	**4.551.702.385**		**71.490.334**		**(6.004.102)**
	TOTAL REGION I, II, III		**2.258.190**	**10**	**21.629.737**	**3.565.969**	**14.069.620**	**12.291.601**	**7.057.166.964**		**202.357.201**		**10.665.310**

DATA PEMBAYARAN PPN *REIMBURSEMENT* PER KKKS
TAHUN 2008

No.	KKKS	PPN Reimbursement (Rp)			TOTAL (Rp)
		Minyak Bumi	Gas Bumi	Minyak dan Gas Bumi	
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	66.267.668.181			66.267.668.181
2	BP INDONESIA WEST JAVA			244.588.132.357	244.588.132.357
3	CHEVRON INDONESIA COMPANY			160.418.201.287	160.418.201.287
4	CHEVRON MAKASAR LTD			39.059.265.218	39.059.265.218
5	CHEVRON PASIFIC INDONESIA	1.260.399.289.864			1.260.399.289.864
6	CITIC (EX.KUFPEC) LIMITED	22.754.490.383			22.754.490.383
7	CNOOC SES BV			380.559.411.951	380.559.411.951
8	CONOCOPHILLIPS GRISSIK			261.182.563.798	261.182.563.798
9	CONOCOPHILLIPS INDONESIA			793.153.533.226	793.153.533.226
10	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI			6.553.039.874	6.553.039.874
11	EMP KANGEAN			240.391.035.226	240.391.035.226
12	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)		1.874.755.303		1.874.755.303
13	EXXONMOBIL EXPLORATION			17.989.535.090	17.989.535.090
14	EXXONMOBIL OIL INDONESIA			39.749.464.711	39.749.464.711
15	EXXONMOBIL PASE			46.442.912	46.442.912
16	HESS			103.537.779.905	103.537.779.905
17	INDO-PASIFIC/CAMAR RESOURCES				0
18	JOB P-COSTA INT'L			1.822.424.543	1.822.424.543
19	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI	15.692.748.367			15.692.748.367
20	JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA	51.495.807.716			51.495.807.716
21	JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI	43.573.672.825			43.573.672.825
22	JOB P-GOLDEN SPIKE			8.835.063.813	8.835.063.813
23	JOB P-TALISMAN			17.750.601.862	17.750.601.862
24	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD	5.545.968.459			5.545.968.459
25	KODECO ENERGY			199.304.749.423	199.304.749.423
26	KONDUR PETROLEUM S.A	101.118.743.085			101.118.743.085
27	LAPINDO BRANTAS		32.130.841.118		32.130.841.118
28	PEARL OIL (TUNGKAL)	15.020.671.932			15.020.671.932
29	PETROCHINA BANGKO LTD				0
30	PETROCHINA INT'L (BERMUDA)			66.094.640.797	66.094.640.797
31	PETROCHINA INT'L JABUNG			287.955.834.833	287.955.834.833
32	PETROSELAT LTD	8.651.158.495			8.651.158.495
33	PREMIER OIL			80.329.922.499	80.329.922.499
34	PT. MEDCO E&P INDONESIA/EAS			89.617.707.363	89.617.707.363
35	PT. MEDCO E&P INDONESIA/KLM			5.918.943.237	5.918.943.237
36	PT. MEDCO E&P INDONESIA/LMT				0
37	PT. MEDCO E&P INDONESIA/NST			65.491.208.302	65.491.208.302
38	PT. MEDCO E&P INDONESIA/TRK			21.867.057.140	21.867.057.140
39	PT. PERTAMINA EP			609.792.357.916	609.792.357.916
40	SANTOS (MADURA) PTY LTD		24.561.729.081		24.561.729.081
41	SANTOS SAMPANG	130.262.263.284			130.262.263.284
42	STAR ENERGY (KAKAP)			98.715.139.494	98.715.139.494
43	TOTAL FINAELF INDONESIE			1.984.528.386.983	1.984.528.386.983
44	VICO			326.758.884.635	326.758.884.635
TOTAL		**1.720.782.482.591**	**58.567.325.502**	**6.152.011.328.395**	**7.931.361.136.491**

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	515.185.307	1.049.816.672
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	(1.087.023)	1.688.914.646
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	12.464.002.443	135.365.014
4	005	MAHKAMAH AGUNG	14.066.864.332	12.206.211.258
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	7.259.286.816	6.407.595.073
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	9.295.157.010	12.346.593.920
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	3.310.509.343	21.095.493.341
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	798.182.228.933	577.413.286.299
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	-	11.181.674.600
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2.160.966.491	4.866.055.063
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	6.910.417.866	11.778.438.432
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	20.479.281.800	36.750.740.311
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	3.583.541.044	6.595.867.706
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	626.392.551	10.730.324.775
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	9.830.722.374	1.352.539.222
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	32.295.829.813	91.216.117.514
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	38.031.674.517	49.805.788.407
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	9.075.581.274	15.453.947.460
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.013.803.680	22.780.087.977
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	2.285.586.490	10.680.322.834
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	16.408.384.175	29.277.327.657
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.136.524.650	7.654.562.334
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	3.330.471.782	7.958.778.263
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	30.358.900	285.926.845
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	90
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.736.210	2.298.806.983
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.042.662.124	1.897.677.289
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.409.045	204.252.026
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	210.094.175	2.745.256.300
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	75.594.019	2.696.276.107
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	108.474.500	869.427.883
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	56.587.874	1.059.046.736
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	13.059.169
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	23.342.209	10.208.462
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	24.403.200	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	453.754.426	4.155.329.232
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	7.207.850	24.241.678
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.903.392.717	4.544.892.638
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	379.681.809	-
40	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	840.189.980	3.814.231.468
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.877.011.162	78.493.953.080
42	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	-	11.161.484.920
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	40.491.162	393.896.161
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	104.025.000
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	266.979.357	6.287.099.434
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.324.953.500	483.262.378
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.000.120.945	1.310.776.167
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.959.658.633	3.912.227.640
49	069	BELANJA LAIN-LAIN	73.383.234.225	108.393.389.000
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	47.057	229.330.662
51	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	5.439.733	1.970.239.934
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.411.532.017	464.225.657
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	2.668.540.095	1.783.375.916

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	62.524.731
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	258.306.822	215.657.845
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	97.114.574	366.459.626
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	90.088.166	899.743.794
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	135.343	8.300.000
59	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	168.151.156	40.147
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.049.000	797.810.812
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	178.563.517	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	19.256.795	2.830.622.886
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	29.259.775	862.048.127
64	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	44.068.016.912	36.049.306.397
65	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	392.598.502	15.363.080
66	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.140.615.143	5.104.485.900
67	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	468.301	-
68	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	-	3.584.330.754
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.281.486.685	3.972.769.563
70	100	KOMISI YUDISIAL	-	118.677.600
71	103	BAKORNAS PB	-	301.377.802
72	104	BNP2TKI	608.794.678	-
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	(13.600)
JUMLAH			**1.154.712.127.961**	**1.245.221.273.097**

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	7.117.599	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	127.469.092	92.497.178
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	126.655.453
4	005	MAHKAMAH AGUNG	31.457.814	28.048.862
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	6.368.681.346	1.117.500.947
6	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	88.896.745.771	20.700.000
7	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	768.614.454.587	485.334.457.649
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	147.290.523	594.978.105
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.987.058.939	10.426.810.801
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	2.551.056.124	131.809.629.419
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	691.677.529	169.610.542
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	987.763.220	2.593.853.451
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.259.777.160	1.358.755.329
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	12.470.716.842	8.097.579.087
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	327.641.246.677	99.251.382.897
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	2.554.083.344	3.560.851.936
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	30.780.000	-
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.817.522.126	-
19	027	DEPARTEMEN SOSIAL	175.258.930	192.657
20	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	5.476.581.339	26.031.940.545
21	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	49.689.283	3.806.587
22	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	6.256.329.758	1.000.000
23	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	2.763.705
24	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	12.572.878.693
25	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	209.780.682	86.877.600
26	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	-	-
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	585.000	-
28	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.773.206	9.546.634
29	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	2.000.000
30	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.100.609	-
31	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	48.898.959.060	50.619.692.931
32	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	540.351.549	213.689.850
33	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	22.498.919.402	38.200.718.675
34	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	43.742.902	160.422.271
35	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	6.253	57.026.408
36	069	BELANJA LAIN-LAIN	27.855.907	17.514.239
37	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	1.259.040	102.800.322
38	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	816.332.824	100.314.636
39	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	1.630.446
40	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.247.783.006	4.447.247.925
41	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	18.020.819
42	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	77.661
43	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	15.308.776	517.736.603
44	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	12.174.167	4.969.812
45	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	712.822.763	147.085.240
46	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	5.580.485
47	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	116.989.091	98.606.217
48	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	94.741.065	47.383.498
49	104	BNP2TKI	3.797.285	-
JUMLAH			**1.308.388.040.590**	**878.054.836.115**

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK
DIUSULKAN PENGHAPUSAN, PENGHAPUSAN, DALUWARSA, DAN KEBERATAN/BANDING
PER 31 DESEMBER 2008

(Dalam Rp)

NO	NAMA KANWIL	TOTAL PIUTANG	USULAN PENGHAPUSAN	PIUTANG DIHAPUSKAN	PIUTANG DALUWARSA	KEBERATAN / BANDING
1	KANWIL DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	352.632.899.603	4.889.761.703		15.167.446.259	19.868.190.875
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	1.212.992.915.000	50.473.954.000	2.452.080.000	11.816.633.337	117.703.065.841
3	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	187.323.644.642	465.732.104		-	45.763.270.985
4	KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	1.246.678.493.046			11.062.092.470	174.680.368.825
						USD 2.563.423
5	KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	375.418.041.532			-	32.577.021.272
6	KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	530.387.601.496	12.177.750		1.947.572.976	160.639.243.840
7	KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	381.958.985.983			1.641.851.468	6.966.739.838
8	KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	4.100.999.150.986	20.727.041.567		482.532.522.987	1.596.482.287.017
9	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	1.283.058.904.538			115.372.789.212	138.775.979.872
10	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	4.713.024.312.724	82.670.008.304	70.834.311.829	251.565.988.860	1.051.212.309.520
11	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	1.040.184.680.000			81.527.544.741	139.926.683.611
12	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	1.212.886.482.240	232.032.227.000		36.214.324.829	216.465.899.818
13	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	6.347.458.291.577	1.158.384.092		65.267.887.904	3.107.232.701.604
					USD 1.022.657	USD 29.216.461
14	KANWIL DJP BANTEN	829.006.330.969	23.151.405.146		48.593.256.568	237.170.327.554
						USD 7.894.709
15	KANWIL DJP JAWA BARAT I	1.378.960.417.124	52.259.417.000		93.237.500.150	186.905.033.712
16	KANWIL DJP JAWA BARAT II	1.214.355.173.087			7.420.448.341	109.295.525.265
						USD 263.116
17	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	730.901.085.170	1.431.061.709		33.677.646.564	69.284.138.142
18	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	626.109.248.453	419.887.782		21.429.591.242	4.501.882.827
19	KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	187.559.573.435	61.535.147		5.233.675.944	25.223.198.915
20	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	972.349.713.000	3.422.690.444		107.109.830.869	118.806.564.094
21	KANWIL DJP JAWA TIMUR II	395.762.819.800	1.444.701.959		34.036.734.127	55.467.374.259
22	KANWIL DJP JAWA TIMUR III	504.749.688.113	523.951.716	931.638.936	8.711.359.046	67.900.478.372
23	KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	215.327.828.000	20.484.294.000		29.809.785.468	21.970.585.740
24	KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH	505.475.677.480	10.893.896.000		24.912.240.163	229.672.373.986
25	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	1.145.211.236.203			3.930.636.540	333.940.056.633
26	KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA	608.627.523.000	10.291.726.000	1.769.691.000	7.700.573.628	229.834.590.945
27	KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUT	306.004.322.000	359.497.528		38.150.163.345	20.295.578.162
28	KANWIL DJP BALI	489.178.683.854	11.219.887.859		13.028.314.812	98.466.143.995
29	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	163.179.168.343	10.291.726.000		-	2.438.332.214
30	KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	518.030.263.000			22.294.555.725	13.945.604.098
31	KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	11.397.284.241.000			8.815.753.000	6.655.991.382.417
						USD 33.285.390
JUMLAH		**45.173.077.395.398**	**538.684.964.810**	**75.987.721.765**	**1.582.208.720.575**	**15.289.402.934.248**
					USD 1.022.657	**USD 73.223.099**
		45.173.077.395.398	**538.684.964.810**	**75.987.721.765**	**1.593.406.813.958**	**16.091.195.868.298**

Catatan: (Rupiah dan USD dalam satuan USD 1 = Rp 10.950)

PIUTANG PNBP MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
PER 31 DESEMBER 2008

A. Piutang Pemerintah kepada Pertamina

No.	Piutang	Saldo Piutang s.d. Desember 2007		Kewajiban Januari s.d. Nopember 2008		Penyelesaian Januari s.d. Desember 2008		Saldo Piutang per 31 Desember 2008		
		USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Rupiah
1	Nilai Lawan	-	12.925.001.180.285	-	155.676.884.600.738	-	151.750.025.682.773	-	16.851.860.098.250	16.851.860.098.250
2	TAC	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Operasi Hulu Pertamina	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Ekspor Minyak Mentah	396.167.236	-	1.147.094.735	-	999.804.485	-	543.457.486	-	5.950.859.471.700
5	Natural Gas	304.790.405	-	1.039.908.452	-	673.391.987	-	671.306.869	-	7.350.810.215.550
6	LPG	23.091.734	-	109.805.027	-	69.085.886	-	63.810.874	-	698.729.070.300
7	Piutang Lain-lain	318.712.478	-	714.513.227	-	530.971.500	-	502.254.205	-	5.499.683.544.750
	a. Piutang Terkait Karaha Bodas	318.712.478	-	-	-	-	-	318.712.478		
	b. Piutang Terkait Kor Cost Recovery	-	-	714.513.227		530.971.500		183.541.727		
	Total Piutang	**1.042.761.853**	**12.925.001.180.285**	**3.011.321.441**	**155.676.884.600.738**	**2.273.253.858**	**151.750.025.682.773**	**1.780.829.434**	**16.851.860.098.250**	**36.351.942.400.550**

Catatan:

1) Piutang per 31 Desember 2008 di atas termasuk kewajiban Pertamina tahun 2008 yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan KMK No.454,06/2005 tanggal 21 september 2005 dan KM No.23/KMK.06/2008 tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp9.1

   Rincian Hutang Pertamina yang akan dijadikan PMN adalah sebagai berikut:

- Nilai Lawan (Nilai minyak mentah kebutuhan dalam negeri	5.997.411.769.299,96
- Bagian Pemerintah dari Operasi Sendiri Pertamina	(171.778.222.156,60)
- Bagian Pemerintah dari operasi TAC	48.402.364.682,00
- Gas Bagian Pemerintah	656.906.816.432,80
- Ekspor Migas Non Trustee	1.424.471.498.770,60
- Retensi Gas tahun 2003 yang diterima Pertamina	1.180.947.718.937,37
	9.136.361.945.966,13

2) - Kewajiban Pertamina atas Operasi TAC dan Oparasi Hulu tahun 2005 yang penyelesaiannya akan dilakukan setetalh terbit Laporan Hasil Audit terhadap Peratmin
   - Piutang Lain-Lain yang berasal dari penerimaan gas bagian Pemerintah yang pada mulanya tertahan di bank of America (BoA) sehubungan dengan kasus Karaha Bodas Company (KBC) sebesar US$318,712,478. Namun demikian, dengan telah dilakukannyapencairan dana t

B. Piutang Pemerintah kepada KKKS lain selain Pertamina

No.	Piutang	Saldo Piutang s.d. Desember 2007		Kewajiban Januari s.d. Nopember 2008		Penyelesaian Januari s.d. Desember 2008		Saldo Piutang per 31 Desember 2008		
		USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Rupiah
1	Penjualan Minyak Bumi	169.536.812	-	2.673.703.616	-	2.841.056.783	-	2.183.645	-	23.910.912.750
2	Penjualan Gas Alam	476.209.219	-	5.506.865.486	-	5.931.466.040	-	51.608.665	-	565.114.881.750
	a. Melalui Trustee	438.834.676	-	5.416.616.014	-	5.828.027.122	-	27.423.568	-	300.288.069.600
	- Ekspor LNG	233.012.311	-	4.371.251.896	-	4.604.264.207	-	-	-	-
	- Ekspor LPG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ekspor Gas Alam	183.235.973	-	896.698.524	-	1.057.660.712	-	22.273.786	-	243.897.956.700
	- Domestik Gas Alam	22.586.391	-	148.665.594	-	166.102.203	-	5.149.782	-	56.390.112.900
	b. Melalui Non Trustee (Kewajiban KKKS)	37.374.544	-	90.249.472	-	103.438.918	-	24.185.097	-	264.826.812.150
	- Ekspor LPG	2.165.848	-	15.823.555	-	17.799.137	-	190.266	-	2.083.412.700
	- Domestik LPG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Domestik Gas Alam	35.208.696	-	74.425.917	-	85.639.781	-	23.994.831	-	262.743.399.450
3	Overlifting KKKS	265.129.497	-	712.822.187	-	935.999.397	-	41.952.288	-	459.377.553.600
Total Piutang		**910.875.528**	-	**8.893.391.289**	-	**9.708.522.220**	-	**95.744.598**	-	**1.048.403.348.100**

PIUTANG LABA BUMN
Per 31 Desember 2008

A. Piutang Laba BUMN Yang Telah Mendapat Penetapan Menteri Keuangan Untuk Dicicil

No.	Nama BUMN	Tahun Buku	Posisi Per 31 Desember 2008 (Rp)			
			Pokok Dividen	Denda	Jumlah	Keterangan *)
1	PT Balai Pustaka	2004	800.000.000	486.749.800	1.286.749.800	(a)
2	PT Yodya Karya	2001-2004	668.878.408	-	668.878.408	(b)
3	PT Semen Baturaja	2000	6.000.000.000	6.142.512.923	12.142.512.923	(c)
4	PT Batam	2002	238.901.275	249.843.363	488.744.638	(d)
5	PT Kawasan Industri	2001	-	116.854.203	116.854.203	(e)
6	PT Perkebunan Nusantara IX	1998	-	5.800.481.517	5.800.481.517	(f)
Jumlah			**7.707.779.683**	**12.796.441.806**	**20.504.221.489**	

B. Piutang Laba BUMN Yang Belum Mendapat Penetapan Menteri Keuangan / Masih Dalam Proses

No.	Nama BUMN	Tahun Buku	Posisi Per 31 Desember 2008 (Rp)			
			Pokok Dividen	Denda	Jumlah	Keterangan *)
1	PT Nindya Karya	2004	-	1.470.170.605	1.470.170.605	(g)
2	PT Istaka Karya	2003	3.879.249.165	2.511.905.769	6.391.154.934	(h)
3	PT Bina Karya	2001	352.285.053	214.343.349	566.628.402	(i)
4	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	27.686.222.939	15.900.759.505	43.586.982.444	(j)
5	Perum Perumnas	1991-1997	69.575.637.648	-	69.575.637.648	(k)
6	PT Perkebunan Nusantara II	1999	37.605.130.291	23.117.527.690	60.722.657.981	(l)
7	PT Inhutani I	2000	5.000.000.000	5.637.468.076	10.637.468.076	(m)
8	PT Inhutani V	1999	2.200.000.000	1.411.919.265	3.611.919.265	(n)
Jumlah			**146.298.525.096**	**50.264.094.259**	**196.562.619.355**	

C. Total Piutang Laba BUMN A+B	**154.006.304.779**	**63.060.536.065**	**217.066.840.844**

***) KETERANGAN :**

A. Piutang Laba BUMN yang telah mendapat penetapan Menteri Keuangan

(a) PT Balai Pustaka
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-164/MK.02/2008 tanggal 10 April 2008, tunggakan dividen sebesar Rp1.286.479.799,58

(b) PT Yodya Karya
Menteri keuangan melalui Surat No. S-541/MK.02/2006 tanggal 19 Desember 2008 telah menyetujui penyelesaian tunggakan dividen
Status terakhir : Pada tahun 2008 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp225.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp668.878.408,00.

(c) PT Semen Baturaja
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-300/MK.02/2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Penyelesaian tunggakan dividen dan denda
Jumlah tunggakan awal Rp16.142.412.923,42. Pada tahun 2007 telah dibayar Rp2.000.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2007 adalah Rp14.142.412.923,42.
Status terakhir : pada tanggal 11 Juli 2008, PT Semen Baturaja telah menyetorkan cicilan tunggakan kewajibannya sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp12.142.512.923,42.

(d) PT Batam
Berdasarkan Surat Penetapan Menteri Keuangan No. S-13/MK.02/2008 tanggal 8 Januari 2008, tunggakan kewajiban PT Batam sebesar Rp660.474.638,28 dibayar pada tahun 2007 s.d. 2014.
Pada tahun 2008, PT Batam telah menyetorkan cicilan tunggakan kewajibannya pada tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp85.865.000,00 dan 19 September 2008 sebesar Rp85.865.000,00, sehingga saldo tunggakan kewajiban per tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar R

(e) PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)

Jumlah tunggakan kewajiban semula adalah sebesar Rp231.854.202,51. Pembayaran dicicil per bulan sebesar Rp5.000.000,00 mulai Selama tahun 2008, PT KIW telah menyetorkan cicilan pembayaran tunggakan kewajibannya sebesar Rp30.000.000,00 (per 31 Desember 2008).

Status terakhir : Sampai dengan 31 Desember 2008, jumlah kewajiban yang telah dibayar sebesar Rp115.000.000,00 sehingga saldo tunggakan kewajibannya masih sebesar Rp116.854.202,51.

(f) PT Perkebunan Nusantara IX

Sesuai Surat Penetapan Menteri Keuangan No. S-3/MK.02/2008 tanggal 3 Januari 2008, tunggakan kewajiban sebesar

B. Piutang Laba BUMN yang belum mendapat penetapan Menteri Keuangan/masih dalam proses

(g) PT Nindya Karya

Sudah mengajukan keringanan untuk mencicil tunggakan denda dividen. Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, terakhir tanggal 22 Oktober 2008.

Status terakhir : Rapat/pertemuan lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2008 untuk memfinalkan usulan penjadualan pembayaran cicilan tunggakan denda dividen kepada Menteri Keuangan sebesar Rp1.470.170.604,54.

(h) PT Istaka Karya

Sudah mengajukan permohonan keringanan untuk mencicil tunggakan denda dividen sebesar Rp6.391.154.933,93. Sudah dilakukan pertemuan pada tanggal 6 Nopember 2008 untuk membahas permohonan tersebut.

Status terakhir : Menunggu disampaikannya data proyeksi *cash flow* jangka panjang dalam rangka memproses permohonan PT Istaka Karya.

Rapat penyelesaian tunggakan telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2009, perusahaan akan mengajukan untuk mengangsur.

PIUTANG BUKAN PAJAK

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.165.440	-
2	005	MAHKAMAH AGUNG	4.731.000	120.000
3	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	350.857.795	1.292.020
	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	18.218.451.335	-
4	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	28.684.666.370.896	34.458.942.679.003
5	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	53.319.565.401	27.036.064.041
6	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	2.739.761.640	3.411.860.984
7	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.392.448.343.074	2.213.041.658.967
8	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	602.512.176.104	607.958.007.654
9	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	39.799.000	26.338.320.950
10	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	4.321.130.817	20.285.977.316
11	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	285.887.803	-
12	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.117.542.736.873	317.674.186.966
	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.103.050	-
13	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	297.648.890	4.121.376.760
14	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	32.950.000	1.417.546.700
15	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	-	1.933.593.903
16	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	39.200.000
17	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	-	245.917.200
18	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.170.672.094.267	226.295.613.642
	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.122.882.330	-
19	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	-	22.460.000
20	069	BELANJA LAIN-LAIN	-	82.407.738.470
21	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.000.000	27.396.004
22	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	44.818.407.492	3.299.531.869
23	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	9.119.480.460	9.776.756.941
	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	226.777.490	-
24	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	39.500.000
25	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	41.040.900	-
26	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	161.955.564.132	745.240.901
27	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	841.442.796
28	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	112.991.922	-
29	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	69.882.000
	104	BNP2TKI	513.552.936	-
JUMLAH			**35.268.484.471.047**	**38.005.973.365.087**

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	59.000.000
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	37.826.690	6.612.373
3	007	SEKRETARIAT NEGARA	27.995.000	-
4	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	67.500.000	182.500.000
5	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	2.867.728.113	332.911.535
6	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	15.107.980	16.049.880
7	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	236.813.241	1.465.194.852
8	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	996.201.909	123.613.081
9	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	10.400.000	6.522.000
10	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	53.425.000	14.393.500
11	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.935.000	9.910.000
12	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	29.005.520	58.200.000
13	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	28.900.000	310.052.256
14	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.038.600	52.913.600
	027	DEPARTEMEN SOSIAL	57.501.496	-
15	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	127.236.625	63.945.000
16	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.001.458	112.948.500
17	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	118.857.070	999.343.800
18	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.901.000	29.646.200
19	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	60.854.400	-
20	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	62.750.000
21	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.754.072	4.138.144
22	054	BADAN PUSAT STATISTIK	32.239.459	78.450.751
23	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	-	840.000
24	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	29.736.000	40.000.000
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	62.046.772	45.594.238
26	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	490.938.549	-
27	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	10.982.977	17.138.977
28	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	22.630.400	-
29	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.200.000	11.200.000
	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	35.500.000	-
30	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	7.200.000	7.200.000
31	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3.971.772	10.000.000
32	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.080.000	1.080.000
33	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	-	4.200.000
34	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	234.060.132	103.333.333
35	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	5.465.000	-
JUMLAH			**5.799.034.235**	**4.229.682.020**

BAGIAN LANCAR PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM
Per 31 DESEMBER 2008

(Rp Juta)

No	Sektor	Pokok Jatuh Tempo 01 Jan-31 Des 2009	Tunggakan s.d 31.12.2008	Akrual s.d 31.12.2008	Bagian Lancar
1	KOPERASI	1.817,66	66.879,58	0,00	68.697,24
2	BPIS	35.065,50	450.880,45	4.359,65	490.305,60
3	PERTANIAN	39.308,69	2.602.058,06	782,93	2.642.149,67
4	KEUANGAN	393.608,09	5.484.182,50	20.148,82	5.897.939,40
5	PARIWISATA POS TELEKOMUNIKASI	468.881,80	0,00	65.491,50	534.373,30
6	KEHUTANAN	697,53	4.870,38	114,82	5.682,74
7	PEKERJAAN UMUM	14.442,90	287.694,83	1.622,17	303.759,91
8	PERHUBUNGAN	2.504,07	262.110,97	241,06	264.856,10
9	INDUSTRI	781.545,41	2.314.241,35	69.843,98	3.165.630,74
10	PERTAMBANGAN & ENERGI	2.841.038,40	0,00	404.217,08	3.245.255,48
11	PDAM	255.133,54	4.852.997,00	23.240,17	5.131.370,71
12	PEMERINTAH DAERAH	82.672,00	756.193,88	11.224,69	850.090,57
13	PERUSDA KEBERSIHAN	2.780,98	54.506,73	0,00	57.287,71
TOTAL		**4.919.496,56**	**17.136.615,73**	**601.286,88**	**22.657.399,17**

POSISI KEWAJIBAN BDL PER 31 DESEMBER 2008

(Dalam Rp)

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Kewajiban/BLBI Yang Dicessiekan			Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000					Posisi Kewajiban Per 31 Desember 2008
		Dana Talangan	Giro Debet	Total (Saldo Awal)	Setoran s.d Desember 2006	Pengembalian Selama Tahun 2007	Setoran Kas Tim Likuidasi 2008	Realisasi Aset Kredit 2008	Realisasi Aset Tetap / BJDA 2008	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5-6-7-8-9-10
	BDL eks Dana Talangan									
1	PT. Bank Anrico	200.277.000.000,00	9.803.728.375,73	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	9.502.388.722,00	350.386.397,78	7.466.655,00	0,00	190.687.529.260,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	0,00	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	17.316.896.847,89	227.161.273,88	1.067.945.356,00	1.447.054.000,00	47.440.942.522,23
3	PT. Bank Harapan Sentosa	2.296.138.048.061,00	1.570.044.264.791,07	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	41.314.533.283,56	815.241.176,69	4.496.262.620,96	0,00	3.233.828.219.271,86
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	43.398.000.000,00	158.404.166.935,30	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	6.315.060.527,00	0,00	385.357.786,00	0,00	170.003.559.785,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	46.872.202.071,00	154.940.412.220,48	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	30.746.092.410,83	0,00	7.827.083.638,00	51.799.900,00	116.315.436.271,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	53.498.000.000,00	283.265.209.866,98	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	4.018.000.000,00	0,00	3.146.369.737,00	47.575.000,00	298.365.265.129,98
7	PT. Bank Pasific	290.023.076.268,00	1.843.343.358.571,63	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	29.347.497.898,00	0,00	111.467.661.420,00	189.900.000,00	1.660.338.299.253,83
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.483.617.626.147,00	203.731.889.225,53	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	550.081.483,46	199.321.608,13	33.733.474.204,65	33.064.390.550,00	762.415.030.132,64
9	PT. South East Asia Bank	166.082.000.000,00	733.317.023.305,99	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	28.197.078.896,79	120.000.000,00	14.453.227,00	0,00	771.764.771.801,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	6.970.134.589,81	103.135.862.541,06	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	0,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00	75.835.862.530,87
11	PT. Astria Raya Bank	121.949.000.000,00	456.969.260.698,77	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	0,00	51.742.862.725,42	0,00	0,00	395.225.794.373,35
12	PT. Bank Pinaesaan	269.966.000.000,00	411.118.490.919,58	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	745.723.907,00	24.308.490.543,00	0,00	0,00	637.573.596.369,47
13	PT. Bank Jakarta *	210.994.000.000,00	0,00	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	60.000.000.000,00	21.323.394.608,00	0,00	0,00	8.710.675.330,33
14	PT. Bank Industri	279.124.000.000,00	232.346.229.326,68	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.346.229.326,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	7.971.008.175,00	583.781.467,67	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan	5.727.935.103.311,81	6.161.003.678.246,47	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	228.053.353.976,53	126.386.858.332,90	162.146.074.644,61	34.800.719.450,00	8.606.906.001.002,88
	BDL eks Dana Penjaminan									
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.443,83	0,00	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	18.500.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	858.079.224.443,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	0,00	1.331.516.911.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.516.911.477,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	0,00	804.234.270.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.234.270.395,51
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	0,00	71.817.985.352,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	51.817.985.352,00
5	PT Bank Prasidha Utama	227.134.559.144,00	0,00	227.134.559.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.134.559.144,00
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	3.321.282.950.812,58	0,00	3.321.282.950.812,58	5.000.000.000,00	28.500.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	3.272.782.950.812,58
	Grand Total	9.049.218.054.124,39	6.161.003.678.246,47	15.210.221.732.370,90	2.735.645.774.151,38	256.553.353.976,53	141.386.858.332,90	162.146.074.644,61	34.800.719.450,00	11.879.688.951.815,46

PERSEDIAAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.661.069.628	2.149.776.968
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6.153.204.455	5.574.180.236
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.290.418.190	2.932.368.557
4	005	MAHKAMAH AGUNG	69.335.073.616	9.372.684.168
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	11.177.306.450	941.681.919
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	207.472.170.941	102.766.344.867
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	306.121.682	-
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	1.086.789.374	3.083.255.325
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	12.094.970.919	7.039.808.443
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	12.469.612.138.742	3.426.363.502.221
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	50.415.096.575	38.376.328.970
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	136.695.886.025	107.466.860.517
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	32.114.269.035	16.797.548.715
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	9.431.761.423	8.205.958.375
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	173.453.598.537	39.633.451.116
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	72.563.101.699	46.124.697.882
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	293.714.018.073	230.314.478.883
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	227.074.966.737	192.893.528.940
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	155.963.668.688	104.973.456.010
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	5.439.779.064	1.877.188.538
	025	BLU DEPARTEMEN AGAMA	133.296.275	-
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.726.325.715	260.168.083.792
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	109.409.024.126	54.535.627.229
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	6.833.025.200	4.352.429.099
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.929.159.963	7.583.567.669
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	130.847.395.900	5.713.957.891
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	81.484.105	136.369.697
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	1.129.492.489	863.631.584
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.678.479	1.958.475
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	864.212.126	100.575.000
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.071.632.377	991.571.305
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	681.430.875	631.268.050
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	25.901.396.492	9.894.531.658
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	13.428.400	17.891.600
	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	30.643.500	11.997.000
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.690.964.232	40.924.867
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	75.960.000	156.576.488
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	458.910.986	444.631.761
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.270.864.700	2.520.101.390
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	6.658.500	586.000
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.761.580.528	4.608.868.158
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	683.493.386	438.581.495
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	14.050.135.006	533.173.573
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	135.784.220	9.459.035
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.504.351.412	5.225.625.027
	059	BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.278.790	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	764.035.950.048	437.011.904.156
43	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	-	-
44	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	23.743.798.922	21.144.996.006
45	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	128.535.432	39.335.634
46	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	458.962.241	291.971.676
47	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	7.606.830.431	3.871.966.940

PERSEDIAAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
48	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	54.541.532	93.167.504
49	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	386.728.985.189	293.571.244.673
50	069	BELANJA LAIN-LAIN	122.289.348.095	19.550.737.518
51	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	316.201.305	429.208.249
52	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	24.163.855.568	28.184.928.927
53	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	74.528.115.196	73.577.617.623
54	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.525.105.182	811.326.033
55	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	437.439.409	380.040.660
56	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.610.001.318	309.631.721
57	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	40.564.086.638	11.036.070.461
58	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.536.274.333	987.288.201
59	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4.154.558.382	2.293.915.248
60	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	109.536.319.042	134.550.170.087
61	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	58.543.956	1.905.140
62	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	446.163.753	190.627.719
63	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	993.691.105	896.035.512
64	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	55.290.100	90.267.200
65	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	8.262.693.035	3.870.805.550
66	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.124.559.348	2.967.307.025
67	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	4.232.199.941	2.692.162.284
68	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	12.121.891.635	18.686.200
69	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.366.657.725	288.269.250
70	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	15.707.236.863	1.022.436.634
71	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	-	59.261.987.044
72	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	978.118.620	1.237.066.803
73	100	KOMISI YUDISIAL	301.253.809	248.008.386
74	103	BAKORNAS PB	878.321.500	14.157.991.085
75	104	BNP2TKI	26.531.372.355	-
76	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	9.560.922	-
JUMLAH			**15.926.879.480.565**	**5.820.948.165.642**

POSISI PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM
Per 31 DESEMBER 2008

(Rp Juta)

No	Sektor	Penarikan				Pembayaran		Outstanding	Tunggakan							Piutang	Akrual Bunga	Total Piutang
		Penarikan	BMT	Equity	Total	Pokok	BMT-P		Pokok	BMT-P	Bunga	BMT-B	CC	Denda	Total			
	1	2	3	4	5=2+3-4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16 = 10 s.d 15	17= 9 + 12 s.d 15	18	19 = 17 + 18
1	Koperasi	31.284,75	2.535,69	0,00	33.820,44	2.216,50	125,90	31.478,04	25.856,42	1.908,92	23.286,80	0,00	23,57	15.803,84	66.879,55	70.592,27	0,00	70.592,27
2	BPIS	3.161.228,83	0,00	887.998,07	2.273.230,76	213.512,87	0,00	2.059.717,89	159.812,86	0,00	212.363,75	0,00	0,00	78.703,82	450.880,43	2.350.785,46	4.359,65	2.355.145,11
3	Pertanian	2.365.873,68	163.521,51	0,00	2.529.395,19	860.319,76	83.501,49	1.585.573,94	1.066.035,73	41.243,36	422.428,82	134,32	3.386,61	1.068.829,19	2.602.058,03	3.080.352,88	782,92	3.081.135,83
4	Keuangan	13.515.842,40	359.934,54	777.778,30	13.097.998,64	6.917.100,95	322.631,33	5.858.266,36	2.227.355,34	33.256,66	1.925.386,18	0,00	2.728,41	1.295.455,89	5.484.182,48	9.081.836,84	20.148,82	9.101.985,68
5	Pariwisata Pos dan Telekomunikasi	10.190.446,00	174.179,75	0,00	10.364.625,75	5.769.336,81	156.782,72	4.438.506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.506,22	65.491,50	4.503.997,72
6	Kehutanan	47.429,57	3.721,47	0,00	51.151,04	30.262,78	3.721,47	17.166,79	3.139,39	0,00	1.573,64	0,00	0,00	157,34	4.870,37	18.897,77	114,82	19.012,60
7	Pekerjaan Umum	767.514,39	10.294,85	679,89	777.129,35	450.050,31	2.576,94	324.502,10	163.975,89	7.717,90	80.703,01	0,00	0,00	35.298,00	287.694,80	440.503,11	1.622,17	442.125,29
8	Perhubungan	1.266.307,05	20.009,86	0,00	1.286.316,91	516.596,72	16.542,61	753.177,58	102.225,03	3.467,24	86.137,07	0,00	30,55	70.251,07	262.110,96	909.596,27	241,05	909.837,33
9	Industri	11.702.771,75	829.741,16	136.876,63	12.395.636,28	5.159.228,16	98.996,20	7.137.411,92	810.995,73	279.248,23	510.300,49	0,00	916,69	712.780,18	2.314.241,32	8.361.409,28	69.843,97	8.431.253,26
10	Pertambangan dan Energi	65.063.237,46	1.263.307,35	0,00	66.326.544,81	29.192.754,75	1.088.290,36	36.045.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.045.499,70	404.217,07	36.449.716,78
11	PDAM	3.636.796,17	979.227,58	0,00	4.616.023,75	1.015.572,60	266.478,07	3.333.973,08	1.295.299,10	261.688,57	1.853.225,12	20.642,69	6.504,53	1.415.636,95	4.852.996,96	6.629.982,37	23.240,16	6.653.222,55
12	Pemda	1.611.654,81	91.388,80	0,00	1.703.043,61	938.356,46	57.216,45	707.470,70	216.489,55	9.710,05	287.146,04	2.195,14	1.466,22	239.186,84	756.193,84	1.237.464,94	11.224,68	1.248.689,65
13	Perusda Kebersihan	26.348,50	9.173,88	0,00	35.522,38	4.776,04	1.026,45	29.719,89	16.434,55	5.128,93	18.820,58	0,00	137,81	13.984,83	54.506,70	62.663,13	0,00	62.663,13
	Total	113.386.735,41	3.907.036,50	1.803.332,90	115.490.439,01	51.070.084,76	2.097.890,04	62.322.464,19	6.087.619,64	643.369,91	5.421.371,56	22.972,17	15.194,42	4.946.088,00	17.136.615,72	72.728.090,36	601.286,87	73.329.377,23

DAFTAR REKENING YANG DIKELOLA SISTEM MANAJEMEN INVESTASI (D/H DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN)

No.	Nama Rekening (Keterangan)	No. Rekening		Nama Bank	Saldo Per 31 Desember 2008 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2007 (Rp)
1	2	3		4	5	6
Dana Terkait dengan RDI						
1	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	1	0206.01.000023.30.5	PT BRI (Persero)	19.132.526,21	3.026.036.270,01
		2	116-00-9400983-5	PT Bank Mandiri (eks.BBD)	3.738.127.335,12	144.389.465.703,57
		3	122,0094007906	PT Bank Mandiri (eks. BEII)	127.615.885,82	318.676.528.585,28
2	Cadangan Pembayaran Fee Konversi dan Collecting Fee Proyek PIR/ UPP (5%)	4	0206.01.000022.30.9	PT BRI (Persero)	18.649.163,04	251.623.749,37
		5	116-00-9400984-3	PT Bank Mandiri (eks.BBD)	266.653.169,22	2.118.341.291,87
		6	122,0094007914	PT Bank Mandiri (eks. BEII)	18.260.870,92	5.268.106.970,87
3	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	7	0206.01.000032.30.4	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	32.191.086,68	141.215.203,76
4	Proyek P3 Bali (Proyek Pemuliaan dan Pengembangbiakan Sapi Bali)	8	0206-01-000015-30-2	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	27.188.281,28	380.116.053,28
5	Proyek Redistribusi Ternak	9	0206-01-000014-30-6	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	17.225.407,30	35.711.948,10
6	Proyek P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil)	10	0206-01-000034-30-6	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	3.128.754,00	3.990.192,00
7	Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir	11	0206-01-000002-30-9	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	16.358.398.233,78	14.504.150.196,25
8	Rekening Khusus Depertemen Keuangan Untuk Pembiayaan Proyek RDA	12	510.000.265	Bank Indonesia		
9	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	13	1008276-01-0 RP	PT Bank Bukopin	7.207.561.305,76	7.136.005.244,30
		14	100 01.06.017300-0	PT Bank Sumut	7.182.683,03	1.194.142.683,03
		15	2100.0101.01196.3	PT Bank Nagari	0,00	12.394.561.035,98
		16	0011539818	PT BPD Kaltim	686.541.110,21	686.661.110,21
		17	1002000277	PT BPD Kalbar	9.323.720.036,33	9.268.788.663,33
		18	101-01-06320-5	PT Bank DKI	14.109.649.944,00	14.109.939.944,00
		19	0000026646800	PT Bank Jabar	8.960.600.433,00	8.960.600.433,00
		20	1.034-12652-1	PT BPD Jateng	91.601.033,00	16.015.292.737,00
		21	20.01.9.00003-1	PT BPD DIY	4.290.909.025,24	4.290.909.025,24
		22	0011146855	PT Bank Jatim	8.923.832.610,12	8.677.050.060,30
		23	00.00917-0	PT BPD Bali	5.127.942.406,19	5.077.259.436,52
		24	21.04405.00-5	PT BPD NTB	10.017.367,96	4.377.167.367,98
		25	001.01.02.000002-8	PT BPD Sulut	693.116.654,00	686.280.353,00
10	Penampungan Nisbah Bagi Hasil Dalam Rangka KKPA-Bagi Hasil Bank Muamalat	26	301.00276.15	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	11.310.468,77	1.665.117.521,12
JUMLAH I					**80.070.555.790,98**	**583.335.061.779,37**
Dana Tidak Terkait dengan RDI						
10	Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah	27	0329-01-000510-30-8	PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta	888.726.788.510,74	1.075.484.966.934,81
11	Penampungan Recovery Risiko KUT TP 1999/2000	28	0329-01-000310-30-0	PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta	234.191.012,37	112.305.847.993,28
12	Penampungan Dana Cadangan Risiko KUT TP 1999/2000	29	018-01-000036-30-3	PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Tanah Abang	27.757.981,98	5.867.672.703,98
13	Penampungan Fee Bagian Pemerintah KUD Padi/Palawija	30	0206-01-000017-30-4	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)		
14	Penampungan Cadangan Dana Risiko Kredit TRI	31	0206-01-000018-30-0	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus		
15	Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	29	0206-01-000008-30-5	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	21.541.489,49	5.622.011.202,49
16	Penampungan Pengembalian Pinjaman Proyek Pengembangan Akuntansi (P2A)	30	0206-01-000006-30-3	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	9.123.258,91	1.586.783.839,91
17	Penampungan Pengembalian Kredit Gudang, Lantai Jemur,	31	1008275-01-3	PT Bank Bukopin	11.542.545.698,83	10.360.052.059,73

DAFTAR REKENING YANG DIKELOLA SISTEM MANAJEMEN INVESTASI (D/H DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN)

No.	Nama Rekening (Keterangan)	No. Rekening		Nama Bank	Saldo Per 31 Desember 2008 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2007 (Rp)
1	2	3		4	5	6
	dan Kios KUD (GLK-KUD)					
18	Rekening Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program	32	0206-01-000033-30-0	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	8.363.404,00	1.821.383.135,00
19	Rekening Pembiayaan Kredit Peralatan KUD	36	0.22709.0101	PT Bank Bukopin		
20	Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP)	33	0206-01.000010.30.2	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	9.460.192.144,84	9.459.308.617,19
21	Subsidi Bunga SEDP III	38	510.000.149	Bank Indonesia		
JUMLAH II					**910.030.503.501,16**	**1.222.508.026.486,39**
JUMLAH I + II					**990.101.059.292,14**	**1.805.843.088.265,76**

OUTSTANDING PENARIKAN PINJAMAN PENDANAAN KUMK-EKS DANA SU-005
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2008

(Dalam Rp)

NO	BUMN PENGELOLA / LKP	PLAFON PINJAMAN	OUTSTANDING 1 JANUARI 2008	MUTASI PINJAMAN 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2008		OUTSTANDING 31 DESEMBER 2008
				PENARIKAN PINJAMAN	ANGSURAN POKOK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000.000.000	280.000.000.000	-	40.000.000.000	240.000.000.000
2	PT PNM (Persero)	355.000.000.000	340.000.000.000	15.000.000.000	-	355.000.000.000
3	PT BRI (Persero) Tbk	500.000.000.000	400.000.000.000	-	200.000.000.000	200.000.000.000
4	Bank Bukopin	470.000.000.000	470.000.000.000	-	-	470.000.000.000
5	PT BTN (Persero)	200.000.000.000	160.000.000.000	-	80.000.000.000	80.000.000.000
6	Perum Pegadaian	410.000.000.000	410.000.000.000	-	-	410.000.000.000
7	BPD Aceh	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
8	BPD Bengkulu	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
9	BPD Sumatera Utara	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
10	BPD Sumatera Selatan	40.000.000.000	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
11	BPD Sumatera Barat	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-	45.000.000.000
12	BPD Riau	25.000.000.000	20.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000
13	BPD Lampung	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
14	BPD Jambi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
15	BPD DKI Jakarta	60.000.000.000	60.000.000.000	-	-	60.000.000.000
16	BPD Jawa Barat	50.000.000.000	40.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000
17	BPD DI Yogyakarta	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
18	BPD Jawa Tengah	50.000.000.000	40.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000
19	BPD Jawa Timur	112.000.000.000	112.000.000.000	-	-	112.000.000.000
20	BPD Bali	35.000.000.000	28.000.000.000	-	14.000.000.000	14.000.000.000
21	BPD Nusa Tenggara Barat	37.245.000.000	37.245.000.000	-	-	37.245.000.000
22	BPD Nusa Tenggara Timur	21.500.000.000	17.200.000.000	-	8.600.000.000	8.600.000.000
23	BPD Sulawesi Selatan	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
24	BPD Sulawesi Tengah	18.720.000.000	14.976.000.000	-	7.488.000.000	7.488.000.000
25	BPD Sulawesi Tenggara	2.120.000.000	2.120.000.000	-	-	2.120.000.000
26	BPD Kalimantan Selatan	20.000.000.000	16.000.000.000	-	8.000.000.000	8.000.000.000
27	BPD Kalimantan Tengah	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
28	BPD Kalimantan Barat	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
29	BPD Kalimantan Timur	34.000.000.000	34.000.000.000	-	-	34.000.000.000
30	BPD Maluku	27.415.000.000	27.415.000.000	-	-	27.415.000.000
31	BPD Papua	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000
	JUMLAH	**3.100.000.000.000**	**2.830.956.000.000**	**15.000.000.000**	**408.088.000.000**	**2.437.868.000.000**

PENERIMAAN BUNGA DAN DENDA PINJAMAN PENDANAAN KUMK-DANA EKS SU-005
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2008

(Dalam Rp)

NO.	BUMN PENGELOLA / LKP	HAK TAGIH 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2008				TELAH DIBAYAR 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2008				PIUTANG BUNGA DAN DENDA	
		TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31	BUNGA DAN DENDA TAHUN 2008			TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31	PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA TAHUN 2008			PIUTANG TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PIUTANG TAHUN 2008
			BUNGA (ACRUAL)	DENDA (ACRUAL)	JUMLAH		BUNGA	DENDA	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)=(3)-(7)	(12)=(6)-(10)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.322.008.570	24.683.827.644	-	26.005.836.214	1.322.008.570	23.056.454.975	-	24.378.463.545	-	1.627.372.668
2	PT PNM (Persero)	1.776.346.393	29.683.557.870	215.843.564	31.675.747.827	1.776.346.393	27.276.402.464	215.843.564	29.268.592.422	-	2.407.155.405
3	PT BRI (Persero) Tbk	1.888.583.671	32.552.950.000	-	34.441.533.671	1.888.583.671	31.196.806.110	-	33.085.389.781	-	1.356.143.890
4	Bank Bukopin	2.550.267.486	39.696.105.182	3.323.777.556	45.570.150.224	2.550.267.486	36.509.167.039	-	39.059.434.525	-	6.510.715.699
5	PT BTN (Persero)	755.433.468	13.021.180.000	751.447.994	14.528.061.462	755.433.468	12.478.722.444	368.618.629	13.602.774.542	-	925.286.921
6	Perum Pegadaian	1.935.798.262	35.231.348.074	-	37.167.146.337	1.935.798.262	32.451.253.100	-	34.387.051.362	-	2.780.094.975
7	BPD Aceh	70.821.888	1.288.951.759	(1.163.733)	1.358.609.914	70.821.888	1.187.240.967	(1.163.733)	1.256.899.122	-	101.710.792
8	BPD Bengkulu	222.341.087	1.669.241.636	95.239.257	1.986.821.979	222.341.087	1.533.627.247	95.239.257	1.851.207.590	-	135.614.389
9	BPD Sumatera Utara	128.045.719	2.148.252.932	117.099.937	2.393.398.588	128.045.719	1.978.734.945	81.876.787	2.188.657.451	-	204.741.136
10	BPD Sumatera Selatan	188.858.367	3.437.204.690	-	3.626.063.058	188.858.367	3.165.975.912	-	3.354.834.279	-	271.228.778
11	BPD Sumatera Barat	241.765.120	3.866.855.277	156.144.447	4.264.764.844	241.765.120	3.561.722.901	89.004.490	3.892.492.512	-	372.272.332
12	BPD Riau	204.978.512	1.627.647.500	122.602.163	1.955.228.175	204.978.512	1.559.840.305	105.501.220	1.870.320.037	-	84.908.138
13	BPD Lampung	70.916.861	1.288.951.759	113.153.471	1.473.022.091	70.916.861	1.187.240.967	87.392.088	1.345.549.916	-	127.472.175
14	BPD Jambi	9.442.918	171.860.235	-	181.303.153	9.442.918	158.298.796	-	167.741.714	-	13.561.439
15	BPD DKI Jakarta	283.287.551	5.155.807.036	-	5.439.094.586	283.287.551	4.748.963.868	-	5.032.251.419	-	406.843.167
16	BPD Jawa Barat	339.405.405	3.255.295.000	349.691.953	3.944.392.357	339.405.405	3.119.680.611	294.085.233	3.753.171.249	-	191.221.108
17	BPD DI Yogyakarta	118.036.479	2.148.252.932	-	2.266.289.411	118.036.479	1.978.734.945	-	2.096.771.425	-	169.517.986
18	BPD Jawa Tengah	382.941.254	3.255.295.000	712.351.563	4.350.587.817	382.941.254	3.119.680.611	563.708.780	4.066.330.644	-	284.257.172
19	BPD Jawa Timur	752.536.941	9.476.091.004	265.551.630	10.494.179.576	752.536.941	8.716.650.426	265.551.630	9.734.738.997	-	759.440.579
20	BPD Bali	238.197.804	2.278.706.500	249.258.110	2.766.162.414	238.197.804	2.183.776.428	249.258.110	2.671.232.342	-	94.930.072
21	BPD Nusa Tenggara Barat	175.850.747	3.200.568.119	379.283	3.376.798.150	175.850.747	2.947.919.321	-	3.123.770.068	-	253.028.081
22	BPD Nusa Tenggara Timur	81.209.098	1.399.776.850	-	1.480.985.948	81.209.098	1.341.462.663	-	1.422.671.761	-	58.314.187
23	BPD Sulawesi Selatan	283.254.029	4.222.464.799	-	4.505.718.828	283.254.029	3.883.428.826	-	4.166.682.855	-	339.035.973
24	BPD Sulawesi Tengah	104.303.798	1.218.782.443	113.903.553	1.436.989.794	104.303.798	1.168.008.418	83.865.870	1.356.178.086	-	80.811.709
25	BPD Sulawesi Tenggara	10.009.493	182.171.849	1.396.522	193.577.864	10.009.493	167.796.723	1.396.522	179.202.738	-	14.375.125
26	BPD Kalimantan Selatan	75.543.347	1.302.118.000	-	1.377.661.347	75.543.347	1.247.872.244	-	1.323.415.591	-	54.245.756
27	BPD Kalimantan Tengah	94.429.184	1.718.602.345	221.836.237	2.034.867.765	94.429.184	1.582.987.956	159.611.853	1.837.028.993	-	197.838.772
28	BPD Kalimantan Barat	141.643.775	2.577.903.518	-	2.719.547.293	141.643.775	2.374.481.934	-	2.516.125.710	-	203.421.584
29	BPD Kalimantan Timur	160.529.612	2.921.623.987	1.259.996	3.083.413.595	160.529.612	2.691.079.525	1.259.996	2.852.869.133	-	230.544.461
30	BPD Maluku	147.877.316	2.355.774.165	37.457.208	2.541.108.689	147.877.316	2.169.880.741	28.281.056	2.346.039.113	-	195.069.576
31	BPD Papua	197.762.008	3.007.554.104	283.844.726	3.489.160.838	197.762.008	2.770.228.923	176.665.119	3.144.656.051	-	344.504.787
	JUMLAH	**14.952.426.164**	**240.044.722.207**	**7.131.075.436**	**262.128.223.807**	**14.952.426.164**	**223.514.122.337**	**2.865.996.471**	**241.332.544.972**	**-**	**20.795.678.835**

Catatan :

- Penerimaan Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK telah ditransfer ke Rekening Penampungan Dana SUP No. : 0329-01-000510-30-8 di BRI Cabang Veteran, Jakarta

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2008

NO	SEKTOR	BUMN		SUMBER	STATUS	TOTAL EKUITAS (Rp Juta)	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
1	ANEKA INDUSTRI	1	PT Garam	Audited	KS	210.362	100%	210.362
		2	PT Industri Gelas (IGLAS)	Audited	KS	(121.633)	63,82%	(77.626)
2	ANGKUTAN DARAT	3	Perum DAMRI	Unaudited	S	215.121	100,00%	215.121
		4	Perum PPD	Unaudited	S	(78.864)	100,00%	(78.864)
		5	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Unaudited	S	3.706.736	100,00%	3.706.736
3	ASURANSI	6	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	Audited	SS	755.419	100,00%	755.419
		7	PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	Audited	SS	566.431	100,00%	566.431
		8	PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	Audited	S	757.404	100,00%	757.404
		9	PT Asuransi Jasa Raharja	Audited	SS	1.588.278	100,00%	1.588.278
		10	PT Asuransi Jiwasraya	Audited	-	443.425	100,00%	443.425
		11	PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	Audited	SS	3.278.388	100,00%	3.278.388
		12	PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	Audited	S	2.602.837	100,00%	2.602.837
		13	PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	Audited	run off	(77.538)	100,00%	(77.538)
		14	PT Taspen	Audited	S	1.228.929	100,00%	1.228.929
		15	PT Askrindo	Audited	TS	1.754.939	82,40%	1.446.070
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	16	PT Barata Indonesia	Audited	KS	62.626	100,00%	62.626
		17	PT Boma Bisma Indra (BBI)	Audited	TS	(66.548)	100,00%	(66.548)
		18	PT Krakatau Steel (KS)	Audited	S	5.439.373	100,00%	5.439.373
5	DOK DAN PERKAPALAN	19	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Audited	KS	(2.057.646)	99,00%	(2.037.070)
		20	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	Audited	S	66.540	100,00%	66.540
		21	PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	Audited	KS	67	100,00%	67
		22	PT PAL Indonesia	Unaudited	KS	685.107	100,00%	685.107
6	ENERGI	23	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited	KS	13.898	100,00%	13.898
		24	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	Audited	S	7.103.417	54,58%	3.877.045
		25	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Audited	KS	126.986.567	100,00%	126.986.567
		26	PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	Audited	S	3.998.132	65,02%	2.599.465
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	27	PT Batan Teknologi	Audited	S	17.746	100,00%	17.746
		28	PT Industri Kereta Api (INKA)	Audited	S	241.023	100,00%	241.023
		29	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	Audited	KS	440.406	100,00%	440.406
		30	PT LEN Industri	Audited	S	82.038	100,00%	82.038
		31	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited	KS	(29.452)	100,00%	(29.452)
8	INDUSTRI FARMASI	32	PT Biofarma	Audited	S	773.606	100,00%	773.606
		33	PT Indo Farma, Tbk	Audited		296.595	80,66%	239.233
		34	PT Kimia Farma, Tbk	Audited	S	947.765	90,03%	853.272
9	INDUSTRI PERTAHANAN	35	PT Dahana	Audited	S	200.036	100,00%	200.036
		36	PT PINDAD	Unaudited	S	201.943	100,00%	201.943
10	INDUSTRI SANDANG	37	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	Audited	KS	(49.888)	100%	(49.888)
		38	PT Primissima	Audited	KS	6.327	52,79%	3.340
11	JASA KONSTRUKSI	39	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)	Audited	S	470.291	100,00%	470.291
		40	PT Adhi Karya	Audited	S	584.279	51,00%	297.982
		41	PT Brantas Abipraya	Audited	S	(67.079)	100,00%	(67.079)
		42	PT Hutama Karya (HK)	Audited	S	301.192	100,00%	301.192
		43	PT Istaka Karya	Audited	KS	(18.546)	100,00%	(18.546)
		44	PT Nindya Karya	Audited	S	82.530	100,00%	82.530
		45	PT Pembangunan Perumahan (PP)	Audited	S	424.878	51,00%	216.688
		46	PT Waskita Karya	Prognosa		420.842	100,00%	420.842
		47	PT Wijaya Karya (WIKA)	Audited	S	1.384.641	68,42%	947.372
12	JASA LAINNYA	48	Perum Jasa Tirta I	Audited	S	77.156	100,00%	77.156
		49	Perum Jasa Tirta II	Audited	S	290.411	100,00%	290.411
		50	PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	Audited	S	2.284.197	100,00%	2.284.197
13	JASA PEMBIAYAAN	51	Perum Pegadaian	Audited	S	1.944.000	100,00%	1.944.000
		52	Perum Penjaminan Kredit Indonesia	Audited	S	1.058.208	100,00%	1.058.208
		53	PT Danareksa	Audited	TS	749.205	100,00%	749.205
		54	PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	Audited	S	134.691	100,00%	134.691
		55	PT PANN Multi Finance	Audited	S	(1.408.801)	93,10%	(1.311.593)
		56	PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	Audited	S	457.339	100,00%	457.339
14	JASA PENILAI	57	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	Audited	S	76.120	100,00%	76.120
		58	PT Sucofindo	Audited	S	408.914	95,00%	388.468
		59	PT Surveyor Indonesia (SI)	Audited	S	259.332	85,12%	220.743

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2008

NO	SEKTOR	BUMN		SUMBER	STATUS	TOTAL EKUITAS (Rp Juta)	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
		60	PT Survey Udara Penas	Prognosa	KS	1.009	100,00%	1.009
15	KAWASAN INDUSTRI	61	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	Audited	S	376.595	88,74%	334.191
		62	PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	Audited	S	52.951	60,00%	31.771
		63	PT Kawasan Industri Medan (KIM)	Audited	S	70.747	60,00%	42.448
		64	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	Audited	S	27.829	60,00%	16.697
		65	PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam	Audited	S	37.404	100,00%	37.404
16	KEBANDARUDARAAN	66	PT Angkasa Pura I (AP I)	Audited	S	7.532.705	100,00%	7.532.705
		67	PT Angkasa Pura II (AP II)	Audited	S	6.831.004	100,00%	6.831.004
17	KEHUTANAN	68	Perum Perhutani	Unaudited	S	1.201.631	100,00%	1.201.631
		69	PT Inhutani I	Audited	KS	305.748	100,00%	305.748
		70	PT Inhutani II	Audited	KS	170.794	100,00%	170.794
		71	PT Inhutani III	Audited	KS	206.005	100,00%	206.005
		72	PT Inhutani IV	Audited	KS	68.647	100,00%	68.647
		73	PT Inhutani V	Unaudited	TS	536	100,00%	536
18	KERTAS	74	PT Kertas Kraft Aceh	Unaudited	TS	(92.175)	96,65%	(89.087)
		75	PT Kertas Leces	Audited	KS	(174.115)	100,00%	(174.115)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	76	PT Bina Karya	Audited	S	4.386	100,00%	4.386
		77	PT Indah Karya	Audited	KS	1.574	100,00%	1.574
		78	PT Indra Karya	Audited	KS	1.238	100,00%	1.238
		79	PT Virama Karya	Audited	S	14.205	100,00%	14.205
		80	PT Yodya Karya	Audited	S	12.112	100,00%	12.112
20	LOGISTIK	81	Perum Bulog	Unaudited	S	5.497.815	100,00%	5.497.815
		82	PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	Audited	S	90.981	100,00%	90.981
		83	PT Pos Indonesia (POSINDO)	Audited	KS	341.764	100,00%	341.764
		84	PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	Audited	KS	21.420	100,00%	21.420
21	PARIWISATA	85	PT Bali Tourism & Development Corporation	Audited	S	209.946	100,00%	209.946
		86	PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Audited	S	70.011	100,00%	70.011
		87	PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Audited	S	98.148	100,00%	98.148
22	PELABUHAN	88	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	Audited	S	1.197.740	100,00%	1.197.740
		89	PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	Audited	S	4.884.732	100,00%	4.884.732
		90	PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	Audited	S	2.918.739	100,00%	2.918.739
		91	PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	Audited	S	1.069.076	100,00%	1.069.076
23	PELAYARAN	92	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Audited	S	1.298.113	100,00%	1.298.113
		93	PT Djakarta Lloyd	Unaudited	KS	92.270	100,00%	92.270
		94	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Unaudited	KS	7.655	100,00%	7.655
		95	PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	Unaudited	S	6.537.804	100,00%	6.537.804
24	PENGERUKAN	96	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Audited	KS	161.152	100,00%	161.152
25	PENUNJANG KONSTRUKSI	97	PT Amarta Karya	Audited	S	1.160	100,00%	1.160
		98	PT Jasa Marga	Audited	S	6.572.008	70,00%	4.600.406
26	PERBANKAN	99	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	Audited	S	3.264.490	100,00%	3.264.490
		100	PT Bank Mandiri, Tbk	Audited	S	30.513.869	66,97%	20.435.138
		101	PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	Audited	S	15.431.148	76,36%	11.783.225
		102	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	Audited	S	22.356.697	56,79%	12.696.368
		103	PT Bank Tabungan Negara (BTN)	Audited	S	2.990.278	100,00%	2.990.278
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	104	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	Unaudited	S	89.742	100,00%	89.742
		105	Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	Unaudited	S	890.298	100,00%	890.298
		106	PT Balai Pustaka (BP)	Unaudited	TS	(61.528)	100,00%	(61.528)
		107	PT Pradnya Paramita	Unaudited	KS	2.534	100,00%	2.534
28	PERDAGANGAN	108	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	Unaudited	KS	(465.381)	100,00%	(465.381)
		109	PT PP Berdikari	Audited	KS	147.040	100,00%	147.040
		110	PT Sarinah	Audited	S	98.529	100,00%	98.529
29	PERIKANAN	111	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	Unaudited	S	81.653	100,00%	81.653
		112	PT Perikanan Nusantara	Unaudited	KS	(96.654)	100,00%	(96.654)
30	PERKEBUNAN	113	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	Audited	S	20.707	100,00%	20.707
		114	PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	Audited	S	128.271	100,00%	128.271
		115	PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	Audited	S	2.525.890	100,00%	2.525.890
		116	PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	Audited	S	2.498.785	100,00%	2.498.785
		117	PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	Audited	S	1.220.083	100,00%	1.220.083
		118	PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	Audited	S	491.975	100,00%	491.975

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2008

NO	SEKTOR	BUMN		SUMBER	STATUS	TOTAL EKUITAS (Rp Juta)	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
		119	PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	Audited	S	1.194.973	100,00%	1.194.973
		120	PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	Audited	S	779.234	100,00%	779.234
		121	PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	Audited	S	357.565	100,00%	357.565
		122	PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	Audited	S	713.174	100,00%	713.174
		123	PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	Audited	KS	419.345	100,00%	419.345
		124	PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	Audited	S	548.418	100,00%	548.418
		125	PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	Audited	S	936.520	100,00%	936.520
		126	PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	Audited	TS	(248.654)	100,00%	(248.654)
		127	PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	Audited	S	522.670	100,00%	522.670
31	PERTAMBANGAN	128	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	Audited	S	8.063.138	65,00%	5.241.040
		129	PT Pertamina	Unaudited	S	149.112.274	100,00%	149.112.274
		130	PT Sarana Karya	Unaudited	KS	965	100,00%	965
		131	PT Timah, Tbk	Audited	S	3.820.581	65,00%	2.483.378
32	PERTANIAN	132	PT Pertani	Audited	S	73.002	100,00%	73.002
		133	PT Sang Hyang Seri (SHS)	Audited	S	167.421	100,00%	167.421
33	PUPUK	134	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	Unaudited	S	11.254.268	100,00%	11.254.268
34	SEMEN	135	PT Semen Baturaja	Audited	S	295.592	100,00%	295.592
		136	PT Semen Gresik, Tbk	Audited	S	8.069.585	51,59%	4.163.099
35	TELEKOMUNIKASI	137	Perum Produksi Film Negara (PFN)	Unaudited	KS	23.967	100,00%	23.967
		138	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	Audited	S	34.314.071	52,47%	18.004.593
		139	Perum LKBN Antara	Unaudited	KS	42.990	100,00%	42.990
36	USAHA PENERBANGAN	140	PT Garuda Indonesia (GIA)	Audited	S	254.629	96,00%	244.444
		141	PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	Unaudited	KS	(1.763.895)	95,79%	(1.689.635)
		142	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited	S	1.258.134	100,00%	1.258.134
		143	PT Saran Multi Infrastruktur	na	na	na	na	na
Grand Total						522.163.472		466.476.020

*) BUMN yang masih berada di bawah binaan Departemen Keuangan

Daftar BPYBDS pada BUMN
PER 31 Desember 2008

NO	BUMN	JUMLAH (Rp Juta)
1	Perum DAMRI	115.769
2	Perum PPD	55.620
3	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	1.072.941
4	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	28.160
5	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	30.965.460
6	PT Dirgantara Indonesia	1.815.549
7	Perum Jasa Tirta I	764
8	Perum Jasa Tirta II	39.820
9	PT Angkasa Pura I (AP I)	4.308.830
10	PT Angkasa Pura II (AP II)	2.052.068
11	PT Inhutani I	6.168
12	Perum Bulog	1.202.254
13	PT Pos Indonesia (POSINDO)	21.326
14	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	50.155
15	PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	7.653
16	PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	222.304
17	PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	292.795
18	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	716.511
19	PT Djakarta Lloyd	1.030.702
20	PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	2.923.879
21	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	13.836
22	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	1.003
23	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	47.037
24	Perum LKBN Antara	56.072
	Total	47.046.675

KOMPOSISI SAHAM PEMERINTAH PADA 15 BUMN YANG BELUM GO PUBLIC

YANG KEPEMILIKANNYA KURANG DARI 100 PERSEN

No.	BUMN	% Saham Negara	% Sisa Saham				
			Karyawan	Pemprov	Pemkot	Lain-lain	Keterangan
1	PT Industri Gelas (IGLAS)	63,82%	-	-	-	36,18%	Bank BNI
2	PT Askrindo	82,40%	-	-	-	17,60%	Bank Indonesia
3	PT Pembangunan Perumahan (PP)	51,00%	49,00%	-	-	-	Program EMSOP, Karyawan
4	PT PANN Multi Finance	93,10%	-	-	-	6,90%	Bank Mandiri
5	PT Sucofindo	95,00%	5,00%	-	-	-	SGS Geneva
6	PT Surveyor Indonesia (SI)	85,12%	-	-	-	10,40%	SGS, SA
						4,48%	PT Sucofindo
7	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	88,74%	-	11,26%	-	-	Pemprov DKI Jakarta
8	PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	60,00%	-	30,00%	10,00%	-	Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar
9	PT Kawasan Industri Medan (KIM)	60,00%	-	30,00%	10,00%	-	Pemprov Sumut, Pemkot Medan
10	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	60,00%	-	30,00%	10,00%	-	Pemprov Jateng, Pemkab Cilacap
11	PT Primissima	52,79%	-	-	-	47,21%	PT GKBI Investment
12	PT Garuda Indonesia Airways(GIA)	96,00%	-	-	-	1,52%	PT Angkasapura I
						2,48%	PT Angkasapura II
13	PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	95,79%	-	-	-	4,21%	PT Garuda Indonesia Airways
14	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	99,00%	-	-	-	1,00%	Yayasan Bhumyamca
15	PT Kertas Kraft Aceh	96,65%	-	-	-	3.35%	PT Alas Helau

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2008

NO	NAMA PERUSAHAAN	SUMBER a)	STATUS b)	% SAHAM KEPEMILIKAN RI	NILAI EKUITAS (Rp)	KEPEMILIKAN PEMERINTAH (Rp)
1	PT Atmindo	LKPP 2007	S	36,60%	16.321.000.000	5.973.486.000
2	PT Semen Kupang	na				
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)	LKPP 2007	S	41,12%	3.285.001.981.140	1.350.792.814.645
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2	S	50,00%	158.327.000.000	79.163.500.000
6	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	2	S	50,00%	124.626.000.000	62.313.000.000
7	PT Kertas Padalarang	2	S	40,77%	(3.505.000.000)	(1.428.813.250)
J U M L A H I						***1.496.813.987.395***

NO	NAMA PERUSAHAAN	SUMBER a)	STATUS b)		% SAHAM KEPEMILIKAN RI	JUMLAH SAHAM	KEPEMILIKAN PEMERINTAH (Rp)
1	PT Bank Bukopin	LKPP 2007	S	A	0,08%	4.736.255	47.362.550.000
				B	18,11%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)	LKPP 2007	S		4,97%	2.500	2.500.000.000
3	PT Freeport Indonesia	LKPP 2007	S	Biasa	9,36%	21.300	23.323.500.000
4	PT Bahana PUI (BPUI)	LKPP 2007	S	Prioritas	7,11%	1.600	1.600.000.000
			-	Biasa	10,67%	2.400	2.400.000.000
5	PT Indosat, Tbk	LKPP 2007	-	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
6	PT Kertas Basuki Rahmat	LKPP 2007	-		0,44%	1.094	25.000.000.000
7	PT Kertas Blabak	LKPP 2007	-		0,84%	-	531.000.000
8	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)	-	-	-	-	-	-
9	PT Asean Copper Product	na	-	-	-	-	-
10	PT JIHD Tbk.	LKPP 2007	-		1,33%	12.834.760.680	12.834.760.680
11	PT Intirub	na					
12	PT Socfindo	LKPP 2007	S	Seri B		1	265.000
				Seri C		2.999	794.735.000
				Seri D		2.000	3.430.000.000
				Total	10,00%	42.250.000.000	
13	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)	LKPP 2007	-		5,00%	49.578.225.000	2.478.911.250
J U M L A H I I							***303.341.459.430***
J U M L A H I + II							**1.800.155.446.825**

Keterangan :

(a) PT Semen Kupang berhenti beroperasi pada tahun 2008

(b) PT Intirub berhenti beroperasi pada bulan Agustus 2006

(c) PT Asean Copper Product tidak jelas keberadaannya

(d) laporan PT Freeport diasumsikan menggunakan kurs tengan BI tahun 2008 Rp10.950

(e) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa:
6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2007

(f) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

NO	LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL	TOTAL (KUOTA) PENYERTAAN		PENYERTAAN YANG MASIH BERBENTUK *PROMISSORY NOTES*	TELAH DIBAYAR S.D 31 DESEMBER 2008	TELAH DIBAYAR S.D 31 DESEMBER 2007	
		USD	Rp	IDR	IDR	USD	Rp
1.	ADB	207.844.034	2.275.884.546.000 *)	27.977.676.817	2.247.906.869.183	213.000.000	2.006.247.000.000
2.	IMF	3.202.683.411	35.069.265.870.000 *)	27.990.323.151.942	7.078.942.718.058	3.282.133.464	30.914.415.097.416
	World Bank :						
3.	IBRD	110.275.771	1.207.519.692.122	254.009.459.261	953.510.232.861	110.275.771	1.038.687.487.049
4.	IDA	14.468.332	158.428.239.890	5.173.139.668	153.255.100.222	-	
5.	IFC	28.539.000	312.502.050.000		312.502.050.000	29.000.000	273.151.000.000
6.	MIGA	3.797.820	41.586.129.000	12.428.447.100	29.157.681.900	4.000.000	37.676.000.000
7.	IDB	158.007.430	1.730.175.563.100		1.730.175.563.100	149.000.000	1.403.431.000.000
	IDB Group :						
8.	Export Financing Scheme					1.000.000	9.419.000.000
9.	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	192.534	2.108.237.500 **)		2.108.237.500	200.000	1.883.800.000
	International Islamic Trade Finance Corporation	2.060.000	22.557.000.000 **)		22.557.000.000		
10.	Bank for International Settlements					60.000.000	565.140.000.000
11.	IFAD	44.959.000	492.301.050.000		492.301.050.000	41.959.000	395.211.821.000
12.	Common Fund for Commodities	482.681	5.285.357.564	3.451.771.803	1.833.585.761	1.323.000	12.461.337.000
	TOTAL	**3.773.310.013**	**41.317.613.735.175**	**28.293.363.646.591**	**13.024.250.088.584**	**3.891.891.235**	**36.657.723.542.465**

Keterangan:
Konversi dari USD ke dalam IDR menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2008
USD 1 = Rp 10.950
*) : Konversi langsung dari SDR ke IDR
**) : Konversi dari IDRb (Islamic Dinar) ke IDR

ASET TETAP - TANAH

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	95.441.090.000	855.562.990
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	65.195.408.000	65.274.646.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.065.049.071.536	597.323.106.106
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.331.404.023.553	208.023.810.322
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	717.759.328.950	135.696.809.583
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.598.204.157.798	245.493.710.559
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	73.319.102.886.609	-
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	95.515.673.512	85.882.943.512
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	9.546.698.317.400	266.352.637.054
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	66.114.651.172.067	62.455.787.612.493
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.136.517.914.999	623.961.405.906
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	14.429.849.284.717	2.163.847.241.366
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	2.747.450.425.921	983.802.572.062
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.899.341.676.842	150.356.861.095
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.238.191.304.023	231.248.148.044
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	7.101.942.920.481	1.116.371.890.029
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	12.255.679.091.844	8.124.789.827.518
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	734.326.014.616	1.242.527.735.679
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	2.582.415.799.091	80.522.279.103
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	2.828.469.992.676	1.835.740.307.523
	025	BLU DEPARTEMEN AGAMA		-
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	397.820.824.398	98.223.430.523
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	3.273.898.079.437	66.188.707.807
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	269.847.826.954	84.536.168.656
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	553.355.555.589	218.370.699.821
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	13.116.861.115.512	8.584.102.070.083
24	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.275.788.940.513	499.335.699.689
25	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.366.032.500	273.366.032.500
26	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.980.636.227.808	10.613.601.978
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	12.845.875.000	12.515.775.000
28	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	874.645.027.087	27.182.098.240
29	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	294.120.000	294.120.000
30	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	788.722.732.635	788.846.732.635
31	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	49.997.448.520	46.181.451.921
32	054	BADAN PUSAT STATISTIK	344.581.967.332	41.337.848.662
33	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	181.030.545.202	19.143.260.737
34	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	281.732.627.608	157.954.327.000
35	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	305.237.875.000	27.814.000.000
36	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	674.892.261.251	467.608.046.592
37	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	28.799.914.598.816	32.199.237.635.374
38	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	13.630.943.600	8.345.141.016
39	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	5.196.726.379
40	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	149.051.899.990	20.217.517.915
41	069	BELANJA LAIN-LAIN	1.611.878.917.231	34.573.743.794
42	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	249.194.023.703	39.654.693.339
43	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	9.099.718.000	8.767.690.000
44	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	77.368.883.316	77.293.038.316
45	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.600.000.000	1
46	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	5.992.913.999.091	45.944.877.645
47	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	13.723.898.439	13.426.875.232
48	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	13.306.582.761	11.730.982.761
49	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	344.391.041.733	25.210.531.290
50	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	1.208.140.000	14.238.000

ASET TETAP - TANAH

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
51	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.484.294.000	20.540.396.870
52	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	489.104.858.729	489.892.345.919
53	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	212.346.202.000	1.009.013.000
54	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	341.742.829.900	107.092.944.152
55	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.071.177.627.820	85.820.069.534
56	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	575.356.356.056	252.772.959.030
57	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.238.075.100	11.275.825.100
58	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	976.421.508.321	661.558.584.250
59	100	KOMISI YUDISIAL	47.188.389.400	47.188.389.400
60	-	OTORITA SABANG*)	-	107.312.581.978
61	-	LPP TVRI*)	-	23.109.586.967
62	-	LPP RRI*)	-	21.464.384.000
JUMLAH			**280.977.933.438.987**	**126.356.123.950.050**

*) Keterangan: Untuk tahun 2008 dikonsolidasikan ke LK BA 069

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	60.193.712.421	74.378.644.185
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	331.288.405.433	292.152.898.378
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	337.754.536.360	262.346.317.705
4	005	MAHKAMAH AGUNG	961.565.781.165	450.575.302.094
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.481.819.071.511	501.695.202.902
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.037.516.506.175	922.853.689.984
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	70.805.596.778	-
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	622.208.751.988	540.991.583.559
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	929.848.729.396	752.100.396.834
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	46.803.601.711.284	32.649.586.943.427
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.263.576.426.193	1.005.254.509.363
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	5.918.215.830.895	5.115.729.712.372
	015	BLU DEPARTEMEN KEUANGAN	3.709.034.840	-
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	2.593.628.065.091	2.388.265.894.545
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.244.692.828.783	1.108.744.928.220
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.331.747.858.921	1.803.303.642.758
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	7.469.714.885.505	6.019.573.969.892
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	7.094.425.088.649	6.685.940.286.781
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	3.114.765.057.222	5.781.817.858.939
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	3.307.619.819.754	795.677.675.733
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	1.750.598.882.002	1.350.417.680.153
	025	BLU DEPARTEMEN AGAMA		-
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	597.939.829.778	774.315.904.030
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	506.927.292.623	447.159.254.806
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.615.988.789.526	1.741.509.548.052
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.634.433.800.084	1.332.484.108.759
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	3.386.459.726.349	3.306.736.813.685
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	149.470.490.537	91.000.544.212
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	22.500.109.382	24.412.187.455
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.635.417.937	21.462.354.142
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	225.289.567.837	107.803.419.637
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	65.769.779.996	61.881.171.581
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	331.482.945.805	360.092.894.502
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	217.109.270.934	200.752.304.435
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	96.001.492.877	117.045.790.239
	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	7.730.805.500	6.398.316.500
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.451.924.141	23.722.056.977
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	36.459.999.327	37.468.585.110
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.281.869.097.443	1.123.011.229.503
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.904.313.701.298	2.359.989.266.880
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	13.494.645.328	13.189.135.331
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	344.533.615.952	310.434.051.670
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	80.399.324.528	79.431.247.589
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	897.095.385.120	844.774.092.464
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	127.122.653.637	69.951.139.202
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	765.473.221.142	871.614.974.477
	059	BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	91.058.441.206	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	14.081.896.117.347	35.833.523.963.308
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	497.611.325.947	314.037.384.794
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	68.773.981.028	58.025.863.013
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	88.168.951.904	73.504.994.744
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	158.015.209.286	331.681.011.266
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	31.612.909.845	29.435.643.025

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	215.078.931.926	191.064.216.327
49	069	BELANJA LAIN-LAIN	3.861.109.900.515	233.748.918.214
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	7.589.895.951	6.043.770.854
51	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	794.419.047.449	511.242.001.241
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	171.223.076.274	131.480.454.297
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	78.234.343.311	47.873.291.753
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	27.157.183.141	23.392.185.056
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	724.957.100.701	673.347.901.924
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	311.419.354.145	284.427.659.304
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	964.366.397.767	837.658.619.657
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	191.585.018.811	201.909.986.488
59	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	170.126.481.856	292.590.559.555
60	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	13.394.342.384	11.012.337.049
61	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	36.914.585.159	42.797.928.038
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	76.108.631.547	70.786.884.196
63	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	121.238.541.036	110.353.324.970
64	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	154.603.505.833	172.079.773.028
65	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	200.601.107.950	213.630.739.286
66	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	511.031.007.475	439.884.172.542
67	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	22.197.413.608	20.804.576.108
68	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	57.289.867.168	61.951.888.628
69	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	121.579.366.765	109.020.952.960
70	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	1.518.387.322.744	1.263.987.673.283
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	38.979.396.530	39.718.026.506
72	100	KOMISI YUDISIAL	9.881.153.910	8.975.124.210
73	103	BAKORNAS PB	54.507.235.192	12.593.385.039
74	104	BNP2TKI	11.891.252.950	-
75	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	9.775.098.790	4.112.772.650
76	-	OTORITA SABANG*)	-	4.936.970.800
77	-	LPP TVRI*)	-	1.395.690.398.519
78	-	LPP RRI*)	-	1.478.803.581.000
JUMLAH			**129.575.032.964.898**	**128.364.176.462.694**

*) Keterangan: Untuk tahun 2008 dikonsolidasikan ke LK BA 069

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	183.688.885.915	230.168.601.031
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	536.271.007.941	500.139.934.030
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	525.141.043.261	342.962.435.735
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.913.348.513.042	631.142.847.650
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.250.082.764.274	328.096.366.984
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.471.235.374.069	1.019.627.383.454
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.116.111.682.892	-
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	850.661.304.292	662.407.357.501
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	5.278.989.822.935	207.838.112.534
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	17.510.885.537.884	13.722.477.160.156
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2.408.035.376.301	714.542.364.153
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	7.565.818.510.870	3.848.353.886.512
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	1.402.035.777.747	958.899.553.649
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	757.071.086.669	402.740.909.411
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	904.413.220.899	543.671.684.810
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	5.225.433.765.552	4.179.513.534.868
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	8.432.008.538.596	9.754.877.988.497
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	887.597.346.127	2.206.905.874.068
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	1.710.464.351.216	217.869.003.364
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	5.202.880.164.329	3.309.428.116.527
	025	BLU DEPARTEMEN AGAMA		-
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	311.833.244.570	1.023.834.207.845
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	563.380.733.619	308.784.931.192
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	622.371.266.550	341.574.152.950
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.150.427.203.133	842.808.265.977
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	2.538.098.417.888	806.259.884.035
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	852.876.000	804.035.400
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	148.974.650	148.974.650
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	330.709.920.079	195.734.326.898
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	144.652.158.569	143.936.870.000
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	225.105.887.626	124.510.778.625
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	29.492.122.150	31.105.869.519
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	381.733.277.098	359.024.312.805
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	240.425.660	240.425.660
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	11.560.018.437	13.272.744.000
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	201.378.091.773	193.494.976.104
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	91.717.944.139	90.069.697.653
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	386.331.566.725	143.895.636.921
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	71.779.881.766	41.274.998.179
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	178.715.811.281	97.051.019.799
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	169.419.028.251	82.443.628.358
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	310.591.882.205	287.022.172.888
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	27.056.999.583.200	20.505.985.440.302
44	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	109.425.407.662	68.312.386.318
45	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	13.259.408.397	14.448.613.394
46	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	184.069.700.601	93.125.682.894
47	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	252.295.604.971	157.882.635.926
49	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	165.259.351.225	89.174.535.478
50	069	BELANJA LAIN-LAIN	632.402.690.116	249.631.577.053
51	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	6.470.495.720
52	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	442.405.396.368	332.854.370.422
53	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	85.356.599.346	75.071.228.906
54	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	268.936.236.609	223.289.719.895

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
55	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	59.017.475.469	58.459.341.189
56	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	574.854.044.243	352.533.799.161
57	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	318.842.792.520	309.596.309.717
58	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	235.599.303.483	213.796.631.014
59	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	95.875.638.499	51.361.807.028
60	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	67.508.482.755	26.677.498.465
62	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.069.501.281	27.834.975.281
63	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	258.253.586.470	246.389.742.198
64	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	118.293.735.134	75.764.287.514
65	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	322.788.808.609	171.772.482.995
66	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	603.531.307.726	310.568.394.531
67	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	937.254.851.370	314.236.222.973
68	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	201.753.608.087	219.092.060.562
69	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	108.394.893.233	23.544.366.308
71	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	3.132.980.074.828	962.184.487.864
75	104	BNP2TKI	2.480.692.000	-
76	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-
77	-	OTORITA SABANG*)	-	17.922.414.789
78	-	LPP TVRI*)	-	134.643.189.731
79	-	LPP RRI*)	-	589.150.836.000
JUMLAH			**109.119.623.581.182**	**74.830.730.558.020**

*) Keterangan: Untuk tahun 2008 dikonsolidasikan ke LK BA 069

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	9.790.961.500	9.790.961.500
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	24.617.396.220	19.807.993.220
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	7.552.190.797	1.833.575.418
4	005	MAHKAMAH AGUNG	29.857.191.149	16.261.187.444
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	9.497.577.231	3.796.678.894
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	102.999.434.643	37.612.253.137
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	439.387.484.534	-
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	63.236.192.847	48.457.147.787
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	39.456.134.528	948.204.154
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	283.664.676.471	-
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	33.675.788.988	7.493.639.449
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	150.584.152.346	100.318.650.329
	015	BLU DEPARTEMEN KEUANGAN	206.174.500	-
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	245.589.406.496	227.355.000.291
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	13.730.866.191	11.054.636.734
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.626.877.848.604	6.467.895.696.474
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	18.689.974.782.896	15.230.441.739.415
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	414.424.399.611	228.013.262.287
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	34.989.836.737	178.087.363.942
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	115.766.075.580	27.343.398.122
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	48.511.285.394	56.238.858.145
	025	BLU DEPARTEMEN AGAMA		-
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40.301.714.197	381.647.815.878
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	36.693.309.375	20.374.338.718
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	80.429.585.575	35.234.832.000
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	750.856.795.603	601.562.311.366
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	77.819.762.709.650	67.037.336.675.808
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	10.485.788.950	9.187.816.000
25	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.786.000	-
26	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	29.614.147.890	1.280.851.000
27	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.687.630.000	-
28	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	31.545.099.936	23.692.099.426
29	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	1.636.302.520	2.123.761.300
30	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	6.233.546.507	6.121.014.000
31	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	255.108.000	214.430.000
32	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.283.366.550	1.283.366.550
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	101.212.885.604	97.650.362.029
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	21.490.996.745	24.552.789.144
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.362.763.099	779.005.850
36	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	837.728.100	734.031.000
37	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.111.192.809	1.079.182.500
38	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.504.156.137	26.078.018.456
	059	BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.905.600	-
39	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	334.191.997.153	235.694.286.476
40	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.142.758.428	2.324.605.388
41	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.369.996.087	1.369.996.087
42	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	5.017.531.473	5.017.531.473
43	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	8.211.002.850	8.126.341.350
44	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	10.605.956.583	1.114.733.790
45	069	BELANJA LAIN-LAIN	499.372.305.803	80.147.940.321
46	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	165.043.271.080	179.755.896.115
47	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	226.848.830	146.082.550
48	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	168.708.191.619	150.904.069.547

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
49	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	34.076.372.937	32.451.352.612
50	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	31.301.901.055	30.920.601.355
51	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	16.262.496.646	10.999.556.936
52	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	3.053.099.000	2.983.091.000
53	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.348.706.446	648.531.172
54	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	10.908.565.571	10.713.505.071
55	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.752.754.764	5.096.975.830
56	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	8.635.281.380	3.406.816.755
57	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	11.005.663.435	9.749.127.010
58	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.310.836.500	1.356.189.000
59	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	13.347.072.500	108.438.141.975
60	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.097.264.836	6.952.362.836
61	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	30.664.870.329	14.256.869.959
62	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	4.552.016.228.688	1.943.615.382.745
63	104	BNP2TKI	365.145.000	-
64	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	94.837.104.930	94.837.104.930
65	-	OTORITA SABANG*)	-	35.741.991.872
66	-	LPP TVRI*)	-	24.953.171.921
67	-	LPP RRI*)	-	136.689.722.000
JUMLAH			**107.366.714.600.033**	**94.082.094.925.843**

*) Keterangan: Untuk tahun 2008 dikonsolidasikan ke LK BA 069

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	53.082.405.981	3.660.717.796
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.363.066.210	2.898.318.300
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	27.759.651.231	25.460.537.454
4	005	MAHKAMAH AGUNG	145.277.132.472	33.732.492.586
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	629.723.795.623	11.138.204.342
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	32.974.074.844	7.130.764.790
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.502.911	-
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	8.335.365.048	5.056.902.943
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	82.293.162.424	10.944.138.621
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	42.834.380.140	30.616.124.025
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	22.362.790.342	9.431.017.587
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	242.709.155.830	405.382.420.518
	015	BLU DEPARTEMEN KEUANGAN	42.224.380	-
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	209.203.275.408	274.788.610.897
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	97.130.328.654	14.950.284.369
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	147.284.866.455	182.418.724.059
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	518.101.814.712	533.577.399.454
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	649.573.722.894	1.641.386.799.228
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	55.060.549.482	103.113.744.311
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	48.221.941.355	49.404.049.504
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	970.477.740.814	359.110.103.106
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.416.694.408	39.743.826.718
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	16.262.144.019	15.818.238.701
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	48.568.226.361	39.305.361.255
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.414.215.006	20.629.021.531
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.798.425.872.747	1.733.419.354.644
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	17.251.312.015	11.056.120.136
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	1.109.191.976	384.220.476
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.442.723.540	3.375.330.335
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15.818.824.343	6.249.383.000
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	943.880.834	1.612.457.779
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	12.504.979.926	7.101.178.591
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	11.048.622.911	9.714.684.850
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	241.859.434	90.643.934
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.506.574.526	2.742.169.484
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	4.991.219.380	3.254.968.500
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.830.245.445	1.583.915.545
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.575.763.950	2.403.737.350
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	423.697.704	1.595.170.704
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	887.178.930	688.066.200
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.079.869.273	1.017.064.843
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	45.223.253.757	40.762.796.332
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	207.745.060.596	113.982.555.859
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.352.442.316	12.992.551.185
	059	BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	325.164.422	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	62.912.998.138	40.288.214.935
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	34.367.786.296	22.137.524.222
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.137.068.108	1.049.966.158
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	739.145.770	864.161.814
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.557.195.207	2.428.120.207
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	6.763.698.078	5.806.170.078
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4.333.304.244	3.293.601.087
49	069	BELANJA LAIN-LAIN	106.626.950.227	4.861.198.930

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	8.696.670.795	2.271.744.525
51	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	10.743.737.207	10.041.161.224
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.254.313.536	651.402.401
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	7.495.773.219	2.292.000.900
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	122.761.555	55.665.625
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	39.829.593.393	34.029.018.126
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.182.949.055	9.544.711.363
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	36.563.125.422	32.320.174.207
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	9.023.504.922	6.272.242.383
59	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	3.828.679.500	580.474.000
60	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	996.880.592	772.380.592
61	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.707.983.094	1.651.211.478
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.768.648.009	2.294.170.490
63	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.260.762.265	71.783.100
64	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	450.455.053	370.364.303
65	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.415.921.709	1.100.780.196
66	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	13.839.321.405	8.934.511.651
67	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	10.301.885.016	10.123.753.068
68	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.317.212.930	9.215.833.955
69	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	41.710.925.545	38.644.378.682
70	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	26.628.707.111	17.892.662.959
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.009.297.660	860.942.860
72	100	KOMISI YUDISIAL	285.749.648	200.912.208
73	103	BAKORNAS PB	4.024.881.000	-
74	104	BNP2TKI	3.026.521.500	-
75	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	624.617.750	527.441.750
76	-	LPP TVRI*)	-	1.601.105.728
77	-	LPP RRI*)	-	9.705.483.000
JUMLAH			**6.706.750.989.988**	**6.056.479.440.047**

*) Keterangan: Untuk tahun 2008 dikonsolidasikan ke LK BA 069

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	3.744.530.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.470.523.338	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131.705.339.757	33.164.564.370
4	005	MAHKAMAH AGUNG	163.282.715.906	21.656.948.737
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	64.700.912.136	234.400.032.733
	007	SEKRETARIAT NEGARA		-
	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	7.601.767.359	-
6	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	181.088.596.924	142.411.678.362
7	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	84.588.455.295	-
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	156.018.994.435	110.299.527.000
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	293.353.737.332	65.214.021.664
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.376.403.863.346	1.293.271.578.300
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	102.689.881.419	51.532.071.942
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	8.706.971.606	5.186.554.286
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.009.340.440.195	554.154.180.893
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	8.535.274.649.472	4.633.802.659.238
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	931.633.787.653	76.430.929.185
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	383.009.068.302	269.861.611.551
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	274.514.333.250	3.307.326.200
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	436.902.402.155	153.159.919.265
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.554.866.996	-
19	027	DEPARTEMEN SOSIAL	4.973.548.000	-
20	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	3.905.879.820	-
21	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	188.538.640.659	64.392.134.953
22	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	14.265.358.505.215	2.474.959.081.369
23	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	4.913.485.370
	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.045.780.780	-
24	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	49.720.000	-
25	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	319.394.523.500	200.618.370.400
26	054	BADAN PUSAT STATISTIK	73.455.645.986	-
27	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	16.690.298.390	-
28	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	5.046.278.010	68.307.861.760
29	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	94.502.010.888	373.198.950
30	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	477.907.955.886	117.639.225.000
31	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12.494.019.523	6.548.811.173
32	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	24.574.512.710	55.754.811.255
33	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	-
34	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.125.759.470	3.172.240.900
35	069	BELANJA LAIN-LAIN	1.116.919.264.815	-
36	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	359.374.275	6.489.758
	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	7.507.258.525	-
37	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	8.014.710.000
38	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	11.896.403.121	13.992.109.600
39	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	1.723.404.900
40	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	106.100.000	-
41	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	15.831.864.922	836.910.000
42	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	6.572.372.225	3.295.960.804
43	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	26.604.187.073	5.202.787.152
44	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	215.050.000	21.574.954.447
45	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	19.036.241.000	371.117.606.719
46	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	123.487.689.104	35.105.166.160
47	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	46.159.545.250	7.014.603.500

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
48	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	1.061.530.672.825	2.592.836.178.072
49	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.753.930.000	-
50	100	KOMISI YUDISIAL	44.774.672.353	-
51	104	BNP2TKI	13.305.283.617	-
52	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	469.129.444.002	745.765.500
	-	OTORITA SABANG*)	-	86.621.614.607
JUMLAH			**39.619.093.738.820**	**13.796.365.616.075**

*) Keterangan: Untuk tahun 2008 dikonsolidasikan ke LK BA 069

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	32.375.000
D	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	1.909.918.251
3	006	KEJAKSAAN AGUNG	165.712.027	129.688.627
4	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.440.000	-
5	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	-	8.750.000
6	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.071.943.266	-
7	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	4.228.897.128	4.244.005.108
8	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	249.014.634	196.503.227
9	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	8.857.225.495	6.480.383.549
10	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	482.172.145	430.776.430
11	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	22.349.821	23.149.821
12	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	271.584.883	48.023.034
13	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	578.055.854	590.075.854
14	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	4.689.650	24.328.530
15	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	422.829.036	33.750.000
16	027	DEPARTEMEN SOSIAL	14.921.504	152.273.503
17	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	624.707.477	805.606.554
18	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	827.719.302	-
19	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	71.000.000	3.901.000
20	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	175.793.055	175.793.055
21	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	162.561.234	13.550.000
22	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	1.754.072
23	054	BADAN PUSAT STATISTIK	108.089.796	-
24	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.360.574.224	956.746.487
25	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49.975.945	39.103.007
26	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	247.670.720	215.276.488
27	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.812.800	-
28	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	8.483.213.473	6.833.974.526
29	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	44.100.000	-
30	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	243.811.660	247.783.432
31	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	14.510.000	17.690.000
32	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	2.913.194.995	6.382.113.832
33	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	22.666.668	51.666.667
JUMLAH			**32.729.236.792**	**30.048.960.054**

ASET TAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	419.087.070	343.109.450
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.545.442.039	3.206.509.039
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	7.568.788.340	5.246.436.280
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.739.599.500	31.292.000
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.439.779.280	-
6	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	44.440.968.344	5.527.030.075
7	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.477.610.300	767.947.667
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	31.357.621.455	1.360.150.000
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	54.461.236.232	4.402.842.800
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	201.420.558.400	37.418.315.534
	015	BLU DEPARTEMEN KEUANGAN	484.208.790	-
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	3.035.791.900	64.075.000
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	7.209.953.058	3.431.722.677
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.159.944.128.728	509.679.900.285
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	630.296.014.344	277.936.558.972
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	67.320.739.892	3.850.000
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	10.910.265.310	4.048.535.639
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	54.447.674.322	43.498.646.637
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	3.952.399.350	-
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.182.870.853	6.476.590.106
19	027	DEPARTEMEN SOSIAL	4.098.239.442	-
20	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.585.947.455	-
21	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.082.166.750	-
22	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	774.898.824.016	22.586.048.680
23	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	39.154.224.280	18.382.233.000
24	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	94.600.000	-
25	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	74.000.000	-
26	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	10.519.406.660	8.193.492.960
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	3.320.139.500	2.807.943.900
	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	134.850.000	-
	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	784.000.000	134.850.000
28	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.197.245.000	263.870.000
29	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.793.718.720	1.793.718.720
30	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	364.360.280.078	333.326.376.078
	050	BLU BADAN INTELIJEN NEGARA	4.492.309.294	-
31	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.414.020.602	2.061.741.995
32	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.677.614.411	3.677.614.411
33	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.499.570.028	-
34	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	10.852.694.495	-
35	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	18.276.770.842	-
36	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.573.213.843	22.855.899.334
	059	BLU DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.017.023.800	-
37	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	8.900.000	-
38	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	47.234.222.015	11.444.072.975
39	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	21.227.319.500	20.916.638.500
40	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.025.490.000	-
41	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	14.000.000	1.024.000.000
42	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	6.289.550.650	-
43	069	BELANJA LAIN-LAIN	363.783.743.915	348.560.445.956
44	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.187.777.089	199.167.900
45	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	14.182.011.817	-
46	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	3.625.357.250	3.625.357.250

ASET TAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
47	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	4.758.404.129	3.601.892.267
48	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.942.095.176	21.500.000
49	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	6.518.365.450	1.429.258.000
50	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.816.809.600	-
51	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	32.738.675	-
52	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	221.616.504.852	166.767.571.808
53	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	736.002.750	294.999.000
54	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	48.100.000	48.100.000
55	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.673.151.400	1.207.862.000
56	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	8.194.272.950	3.350.546.950
57	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	8.411.194.550	5.935.760.200
58	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.236.026.615	7.599.116.135
59	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	7.495.040.300	1.567.732.800
60	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	9.121.251.700	-
61	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.970.445.400	701.642.400
62	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	9.023.399.110	-
63	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.928.156.500	873.290.000
64	100	KOMISI YUDISIAL	503.626.600	423.656.600
65	103	BAKORNAS PB	12.898.706.216	-
66	104	BNP2TKI	60.410.000	-
JUMLAH			**4.347.118.670.932**	**1.899.119.911.980**

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
1	601 001311	Reksus Depkeu u/ Const. of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001	10.516.953.041,91	58.590.683.836,19
2	601 002111	Reksus Depkeu k/ Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Second Exim United Loan)	1.134.303.747,99	777.236.055,11
3	601 002311	Reksus Depkeu u/ Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) AIPRD-L002	5.228.397.204,54	0,00
4	601 002991	Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Belanda dalam Val. EUR	153.319.505,08	136.701.877,87
5	601 003991	Reksus Depkeu u/ Proyek Integrated Infrastructur Dev. 1990. 01Dutch dalam Valuta EUR	5.695.172,90	5.077.898,14
6	601 004991	Reksus Depkeu u/ Trade Support Program (TSP) No.70539501 dalam valuta EURO	1.334.366.478,39	287.999.960,95
7	601 007111	Reksus Depkeu k/ Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Third Exim United Loan)	25.852.932,85	17.714.683,20
8	601 007411	Reksus Depkeu u/ Proyek Inc.Gen.F/Marginal Farmer & Landless 215-ID IFAD	-	1.188.602.165,43
9	601 019411	Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Development 952/953-INO ADB	-	155.319,31
10	601 023411	Reksus Depkeu u/ Proyek East Java Rainfed Agriculture 255-ID IFAD	-	1.086.405.356,10
11	601 027111	Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Plantation and Development Citarik S/Watersheip IP-455 OECF	-	9.494.694.007,89
12	601 030411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tree Corp Smallholder Sec for 1118-INO ADB	-	869.562,08
13	601 032411	Reksus Depkeu u/ Proy. Central Java Ground Water 1126-INO ADB	-	141.661,76
14	601 033411	Reksus Depkeu u/ Proyek Third Non Formal Education 3431-IND IBRD	-	376,76
15	601 041111	Reksus Depkeu u/ Proyek Gajah Mada University Dev. IP-494 OECF	313.789.042,98	215.011.330,37
16	601 042411	Reksus Depkeu u/ Proyek Tree Corp Smallholder Development 3464-IND IBRD	-	968.744,15
17	601 045111	Reksus Depkeu u/ Proy. Pengemb. Pras. Pedesaan (P2D) Rural Areas Infrast.Development Project (III) IP-506 JBIC dlm JPY	2.729.006.989,19	1.844.018.716,30
18	601 047411	Reksus Depkeu u/ Proyek Smallholder Tree Crop Processing 1186-INO ADB	-	91.646,87
19	601 048111	Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535-A	48.672.963.190,70	43.572.319.657,51
20	601 048411	Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Farmer Development 1184-INO SF ADB	-	124.519,18
21	601 049111	Reksus Depkeu u/ Professional Human Resources Development Project-III (Domestic Program), Project Loan JBIC-535-B	57.945.848.982,69	33.969.967.229,90
22	601 050111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC	3.297.371.822,37	1.039.338.057,60
23	601 053111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin Loan JBIC IP-541	3.044.127.350,87	0,00
24	601 054111	Reksus Depkeu untuk Pinjaman Program The Indonesia Disaster Recovery and Management Sector Program Loan JBIC No. INP-31	-	0,00
25	601 055411	Reksus Depkeu untuk Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project, Loan JBIC IP-543 A dalam Valuta JPY	308.046.684.073,85	0,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
26	601 056111	Reksus Depkeu untuk Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project, Loan JBIC IP-543 B dalam Valuta JPY	-	0,00
27	601 056411	Reksus Depkeu u/ Proyek W. Supl & Sanitn. f/ Low Income Communities 3629-IND IBRD	-	2.532.769,10
28	601 057111	Reksus Depkeu u/ Development Policy Loan IV (LA. No. INP-32) dalam Valuta JPY	-	0,00
29	601 057411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sustainable Agriculture Dev. In Irja 1258-INO ADB	-	208.254,09
30	601 058111	Reksus Depkeu u/Climate Change Program Loan INP-33	-	0,00
31	601 061411	Reksus Depkeu u/ Proyek Natl. Watershed Management & Conservation 3658-IND IBRD	-	55.232.356,67
32	601 066411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Cashew Dev 350-ID IFAD	-	76.800.453,82
33	601 073411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Health and Population Project 1299-INO ADB	-	282,57
34	601 078411	Reksus Depkeu u/ Proyek Ozone Project Trust Fund TF 021982-IND IBRD	11.611.606.555,50	3.855.782.750,18
35	601 080411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Prof. Human Resources Development 3825-IND IBRD	-	347.386.565,93
36	601 081411	Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding Pry. in the Water R'çes Sec.1339-INO ADB	-	110.108,11
37	601 087411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Agric.Research Manag. Project 3886-IND IBRD	-	26.585.410,07
38	601 093411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Rainfed Agric.Develop.Project 1351-INO SF ADB	-	139.307,01
39	601 095411	Reksus Depkeu u/ Proyek Private Junior Second Education Project 1359-INO ADB	-	17.801,91
40	601 096411	Reksus Depkeu u/ Proyek Senior Secondary Education Project 1360-INO ADB	-	18.272,86
41	601 099411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Farm Sys & LI396-ID IFAD	-	8.968.022.612,74
42	601 103411	Reksus Depkeu u/ Proyek Engineering Education Development Project 1432-INO ADB	-	1.240.011,35
43	601 105411	Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development 3984-IND IBRD	-	206.894.363,16
44	601 107411	Reksus Depkeu u/ Proyek Basic Education Project 1442-INO ADB	-	8.194,53
45	601 108411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Agricultural Area Development 4007-IND IBRD	-	37.108.316,87
46	601 118411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Urban Development Sector 1383-INO ADB	-	1.525.972,19
47	601 122411	Reksus Depkeu u/ Proyek Indonesia-Gas Transmission & Dist Loan European Invest.Bank (EIB)	270.791.419,50	232.930.080,39
48	601 123411	Reksus Depkeu u/ Proyek ADB Gas Transmission & Dist Loan the Exp-Imp Bank of Japan (EBJ)	68.424.793.291,50	58.857.819.909,83
49	601 124411	Reksus Depkeu u/ Proyek West Java Urban Dev (Sector) Project 1384-INO ADB	-	237.701.651,60
50	601 126411	Reksus Depkeu u/ Proyek Integr.Pest.Manag.for Smallh.Est.Crops 1469-INO ADB	-	35.321,25
51	601 127411	Reksus Depkeu u/ Proyek Family Health and Nutrition 1471-INO ADB	-	74.692,67
52	601 129411	Reksus Depkeu u/ Proyek Segara Anakan Cons.& Development 1475/1476-INO ADB	-	106.694.381,83

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
53	601 130411	Reksus Depkeu u/ Proyek South Java Flood Control Sector 1479-INO ADB	-	67.317.498,81
54	601 131411	Reksus Depkeu u/ Proyek Farmer Managed Irrigation System 1378-INO ADB	-	13.280,79
55	601 133411	Reksus Depkeu u/ Proyek Intensified Iodine Def. Control Project 4125-IND IBRD	-	5.236.210,48
56	601 138411	Reksus Depkeu u/ Proyek Metropolitan Botabek Urban Development Proj. 1511-INO ADB	-	3.856.515,36
57	601 145411	Reksus Depkeu u/ Proyek Participatory Dev Of Agric Tech 1526-INO ADB	-	4.144,36
58	601 148411	Reksus Depkeu u/ Proyek Safe Motherhood Partner & Family Approach 4207-IND IBRD	-	41.605.135,85
59	601 149411	Reksus Depkeu u/ Proyek Intensf Communicable Deseases Contr Proj 1523-INO ADB	-	13.469,17
60	601 150411	Reksus Depkeu u/ Proyek Pembiayaan Dev. Madrasah Aliyah 1519-INO ADB	-	83.452,34
61	601 155411	Reksus Depkeu u/ Proyek Quality of Undergraduate Education 4193 IBRD	-	51.688.363,73
62	601 159411	Reksus Depkeu u/ Proyek Information Infrastructure Dev.Project 4244-IND IBRD	-	6.908.648,12
63	601 160411	Reksus Depkeu u/ Proyek Northern Sumatera Irrigated Agric Sect 1579-INO ADB	-	169.824,57
64	601 164411	Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Bldg in Urban Infrastructure MG 1572-INO ADB	-	71.678,59
65	601 165411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coastal Comm Dev & Fisheries Res Mgt 1570/1571-INO ADB	-	7.145.159,21
66	601 166411	Reksus Depkeu u/ Proyek Central Sulawesi I'ted Area Dev & c'tion 1605-INO ADB	-	189.792,85
67	601 169411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coral Reef Rehab and Manag Proj 1613-INO ADB	-	989.842,71
68	601 174411	Reksus Depkeu u/ Proyek Railway Efficiency Project Loan 4106-IND IBRD	-	0,00
69	601 178411	Reksus Depkeu u/ Proyek Early Child Development Loan No. 4378-IND IBRD	-	9.889,95
70	601 179411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Education Proj. 1574-INO ADB	-	324.515.632,70
71	601 185411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Region Roads Proj Loan 4307-IND IBRD	-	530.477.514,86
72	601 193411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Cap'ty B'ding for F'cial G'ment Loan 1620-INO ADB	-	4.549.471,19
73	601 199411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Second Junior Secondary Educ 1573-INO ADB	-	166.716,30
74	601 200411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 1583-INO ADB	-	0,00
75	601 201411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 458-ID IFAD	6.039.691,50	5.195.237,83
76	601 203411	Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Building for Establishment of a Competitive Electricity Market 1674-INO ADB	-	471.609,33
77	601 204411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Profincial Healt Project Loan IDA 3381 IND	-	9.268.250.694,61
78	601 205411	Reksus Depkeu u/ pembiy Second Water & Sanitation for Low Income Communities Project IDA-3382-IND	40.892.237.026,50	11.221.702,41
79	601 206411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project ADB 1765-INO (SF)	189.654,00	163.137,08

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
80	601 207411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project No.1766 INO ADB	-	55.383,72
81	601 208411	Reksus Depkeu Participatory Intregrated Dev. In Rainfed Areas Proj PIDRA 539-ID IFAD	2.409,00	129.605,44
82	601 209411	Reksus Depkeu u/ Proyek Decentralized Health Services 1810-IND ADB	84.534,00	4.992,07
83	601 213411	Reksus Depkeu U/P : Technological and Professional Skills Develop.Sector Proj. 1792-INO ADB	106.105,50	91.270,11
84	601 214411	Reksus ADB No.1770-INO dalam USD (Marine & Coastal Resources Management Project)	8.300.866,50	24.168.023,72
85	601 215411	Reksus ADB No.1798-INO Road Rehabilitatiom Sector Project dlm Valas USD	-	0,00
86	601 216411	Reksus Depkeu u/ State Owned Enterprise Gov. Privattn. Prog. Loan ADB No.1866-INO dlm USD	-	0,00
87	601 217411	Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project Loan IBRD 4612-IND/Credit 3519-IND d/ Valuta USD	123.627.033,00	106.341.828,66
88	601 219411	Reksus Depkeu Second Kecamatan Dev. Proj. Loan IBRD No.4627-IND/IDA No.3535-IND/GRANT TF-051369 dlm. val. USD	331.087.594,50	47.884.135.028,61
89	601 221411	Reksus ADB No.1863-INO (SF) Decentralized Basic Education Project	442.927,50	516.797.641,83
90	601 222411	Reksus Depkeu Provincial Health Proj II Loan IDA Credit No.3537-IND & IBRD Loan No.4629-IND dlm val USD	3.072.460,50	617.698,02
91	601 224411	Reksus Depkeu u/ Second Urban Poverty Project Loan IBRD No.4664-IND/Credit IDA 3658-IND dalam Valas USD	10.721.802,00	857.411,57
92	601 226411	Reksus Depkeu Gas Transmission & Distribution Phase 2 Project (EIB Loan No.F1 20.630 Indon) dalam Valas USD	2.109.554.511,00	1.814.602.186,22
93	601 227411	Reksus Depkeu Global Dev. Network Proj (Loan IBRD 4669-IND) dalam Valas USD	-	18.222.185,78
94	601 228411	Reksus Depkeu u/ Pembyn Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Project Loan IBRD 4696-IND	3.066.805.044,00	17.069.281.718,76
95	601 229411	Reksus Depkeu o/ Poor Farmer Income Improvement Through Innovationt Proj (PF13P) Loan ADB 1909-INO dlm val USD	69.204,00	50.109,08
96	601 230411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) - ADB No.1962-INO (SF) dlm USD-DLN	234.439,50	3.624.242,82
97	601 232411	Reksus Depkeu Government Finance Management Revenue Administration Project Loan No.4762 IND/IDA Credit 4026	9.180.336.007,50	15.275.869.174,27
98	601 233411	Reksus Depkeu Health Workforce & Service Project Loan IBRD 4702-IND/IDA Credit 3784-IND dlm valuta USD	10.376.658,00	69.138.673.197,66
99	601 234411	Reksus ADB No.601-ID East Kalimantan Local Communities Empowerment Programme (EKLCEP)	-	0,00
100	601 235411	Reksus Advance for Preparation of Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Letter Agreement No.P4080	-	0,00
101	601 236411	Reksus Depkeu Land Management & Policy Dev. Project Loan/ Credit No.4731/3884-IND dlm vls USD	64.933,50	12.898.532.506,46
102	601 238411	Reksus Depkeu Second Eastern Indonesia Transport Project (EIRTP-2) LA No.4744-IND	158.900.604.493,50	159.840,43
103	601 240411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project-Loan IBRD No.4710-IND/IDA Credit 3806-IND dalam valuta USD	28.524.617.833,50	67.649.206.885,29
104	601 241411	Reksus Depkeu u/ The Improvement o/ Land & Irrigation System at Farm Level Project IDB No.IND-0080	84.380.152,50	46.052.410,89
105	601 242411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation & Management Proj Phase II (Coremep II) IBRD No.4740-IND/IDA No.3910-IND dlm USD	5.183.762.850,00	1.656.450.111,97

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
106	601 243411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2074-INO dlm val USD	186.697,50	32.966,50
107	601 244411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2075-INO dalam Valas USD	34.273,50	400.024,93
108	601 245411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2127-INO dlm val USD	315.907,50	8.023.282.878,43
109	601 246411	Reksus Depkeu u/ Support for Poor & Disadvantaged Areas Project Loan IBRD No.4788-IND/IDA No.4076-IND dlm val USD	121.623.818.319,00	26.345.219.636,03
110	601 247411	Reksus Depkeu u/ Indonesia Managing High Education f/ Relevance & Efficienc Proj. IBRD No.4789-IND/IDA No.4077-IND	34.364.997.981,00	39.638.567.988,73
111	601 248411	Reksus Depkeu u/ Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) Loan ADB 2072-INO	737.373,00	355.378,87
112	601 251411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project Phase II Loan IBRD No.4771-IND/IDA CR No.4045-IND	15.064.162.579,50	587.557,22
113	601 252411	Reksus Depkeu u/ Third Urban Poverty Project Loan IBRD No.4779-IND/IDA CR 4063-IND	1.566.726,00	280.780,39
114	601 253411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2192-INO	-	0,00
115	601 254411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2193-INO	-	0,00
116	601 255411	Reksus Depkeu u/ Initatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) Loan IBRD No.4790-IND/IDA CR no.4078-IND	49.969.382.862,00	55.802.618.628,01
117	601 256411	Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt PRJ-WISMP Loan IBRD No.4711-IND/IDA GR No.3807-IND	25.263.319.765,50	6.593,30
118	601 257411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2163-INO	7.693.015.246,50	5.049.004.652,54
119	601 258411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2164-INo (SF)	9.070.052.425,50	6.258.035.781,26
120	601 259411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Reform Project Loan IBRD 4786-IND	19.157.035.074,00	479.503.959,04
121	601 260411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2064 (SF)-INO	2.080,50	21.852,08
122	601 261411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2065 (SF)-INO	3.613,50	57.079,14
123	601 262411	Reksus Depkeu u/ Rural Infrastructur Support Project (RISP) Loan ADB No.2221-INO (SF)	57.897.577,50	140.908,24
124	601 264411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), Loan IDA Credit No.4205-IND	801.540,00	0,00
125	601 265411	Reksus Depkeu u/ Proyek Infrastruktur Reform Sector Development Program (IRSDP) 2263-INO ADB	-	0,00
126	601 266411	Reksus Depkeu u/ Second Development Policy Support Program (DPSP 2), Loan ADB 2305-INO ADB	-	0,00
127	601 267411	Reksus Depkeu u/ Infrastructure Reform Sector Development Program Loan 2264-INO ADB	-	0,00
128	601 268411	Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Loan IFAD 645-ID	-	0,00
129	601 269411	Reksus Depkeu u/ LA 2285 -INO (SF) Sustainable Aquaculture Dev.For Food Security and Poverty Reduction Project	-	0,00
130	601 270411	Reksus Depkeu u/ Loan Agreement 2294-INO (SF) Madrasah Education Development Project	48.546.645.201,00	47.095.000.000,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
131	601 271411	Reksus Depkeu u/ P. Farmer Empownt Through Agricultural Tech & Information Project Loan IBRD No.7427-IND / IDA Cr No.4260 IND	29.329.229.856,00	85.492.888.549,06
132	601 272411	Reksus Depkeu Additional Financing for The Seccond Urban Poverty Project (IDA Credit No.3658-1-IND)	-	0,00
133	601 273411	Reksus Depkeu untuk Poverty Reduction and Millenium Development Goals Acceleration Program Cluster -Sub Program 1	-	0,00
134	601 274411	Reksus Depkeu Loan Strategic Roads Infrastructure Project / Srip, Loan IBRD LN-4834-IND	258.295.827,00	0,00
135	601 275411	Reksus Depkeu untuk Capital Market Development Program Cluster-Subprogram 1	-	0,00
136	601 276411	Reksus Depkeu untuk Fourth Development Policy Loan (DPL) No.7495-IND	-	0,00
137	601 277411	Reksus Depkeu untuk Third Development Policy Support Program Loan ADB 2394-INO	-	0,00
138	601 278411	Reksus Depkeu u/ Better Education Through Reformed Management And Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU) Loan IBRD IDA	60.484.512.372,00	0,00
139	601 279411	Reksus Depkeu untuk Nutrition Improvement Through Community Empowerment Project (NICE), Loan ADB No.2348-INO	50.679.554.638,50	
140	601 280411	Reksus Depkeu untuk Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project-Pamsimas, Loan IDA Credit 4204 IND	5.956.414.888,50	
141	601 281411	Reksus Depkeu untuk Loan No.7494-IND (First Infrastructure Development Policy Loan)	-	
142	601 282411	Reksus Depkeu untuk National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project, Loan IBRD No.7505-ID/CR No.4385-ID	649.440.479.379,00	
143	601 283411	Reksus Depkeu untuk Loan IBRD No.7504-ID/Credit IDA No.4384-ID (National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project)	876.000.000.000,00	
144	601 284411	Reksus Depkeu u/ Vocational Education Strengthening Project (invest), Loan ADB No.2416 INO (SF)	-	
145	602 000517	Reksus Depkeu u/ Proyek : Cirebon-Jakarta Water Supply Swiss Grant	1.827.599.391,78	1.458.808.863,27
146	602 001311	Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-G001	-	0,00
147	602 002411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev F/Grant for the Improve. O.T. Qual of Educ. Serv. T.E. Part Central Java & Yogyakarta Grant TF-053814	2.190.000.000,00	382.208.985,69
148	602 003411	Reksus Depkeu u/ Proyek Kerinci Seblat Integrated Conser & Dev TF-28312 GEF Grant	-	2.543.130,00
149	602 003991	Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant for the Second Schools Improvement Grants Prog (Grant No.TF051575-IND) dlm Val.EUR	-	0,00
150	602 012411	Reksus Depkeu u/ Proyek Strenghthening Management of External Dev. Financing for Public Inv TF-27184 IBRD	-	1.412.850.000,00
151	602 018411	Reksus Depkeu u/ Pemb. Australian Gov.Grant for Second Water & Sanitation for Low Income Comm Proj (GRANT TF-023692)	5.327.972.160,00	30.392.287,30
152	602 028411	Reksus Depkeu u/ Proyek Grant for the Water Resources & Irrigation Reform Implementation Prog (TF-027755 Grant)	-	4.787.489,32

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
153	602 030411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Develop Fund Grant for the Widows & Poverty Project, Grant No.TF-026564 Valuta USD	-	70.548,31
154	602 033411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Dev. Grant for Squatter Sett. Pillots Assistant Proj.Grant No.TF-026563 dalam valuta USD	-	0,00
155	602 036411	Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project (Grant No.TF-029805) dalam valuta USD	13.797,00	11.867,94
156	602 041411	Reksus Depkeu Grant for Increasing Accs to Statit Data for Lcl.Pol Dec.Making (TF-050609) dalam valuta USD	-	4.101.880,31
157	602 048411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev Fund Grant for Educ & Employ Opport for undereducated youth Grant TF-051701-IND	243.856,50	209.761,13
158	602 053411	Reksus Depkeu DFID Grant for Initiatives for Local Governance Reform Project (Grant No.TF-052572) dalam USD	-	895.181,76
159	602 054411	Reksus Depkeu Japan Social Dev. Fund Grant for the Marginal Fishing Community Dev. Pilot Proj.No.TF-026799 dalam USD	-	0,00
160	602 055411	Reksus Depkeu Grant TF-052800 (Japan Grant for the Prepare of a Proposed Recov.Support Conflict Ridden Areas Proj. USD	-	0,00
161	602 056411	Reksus Depkeu Grant TF-053002 (Poverty Reduction Strategy Trust Fund Grant for Capacity Building) dalam USD	-	220.781,36
162	602 060411	Reksus Depkeu ASEM Grant for Housing Finance Policy Reform-Grant TF-052962 dalam valuta USD	-	0,00
163	602 062411	Reksus Depkeu PHRD Grant for the Prep.of Prop.Gov.Fin.Mng.& Rev Adm.Proj.Grant Agreement No. TF-053116 dalam valuta USD	-	0,00
164	602 066411	Reksus Depkeu Grant TF-053282 (Asem Grant for Designing Effective Community Empowerment Programs) dalam valuta USD	-	42.353.757,97
165	602 069411	Reksus Depkeu u/ Asem Grant for Dev. Capacity in the Cptl Market and non Bank Financial Inst No Grant TF-053347 dalam valuta USD	-	36.168,96
166	602 073411	Reksus Depkeu u/ PHRD Grant for the Preparation of Higher Education for Competitivenes (Grant TF-053737) dalam USD	-	0,00
167	602 074411	Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta USD	3.106.113.135,00	2.671.824.622,70
168	602 077411	Reksus Depkeu JDF for Upper Semarang Land Conservation & Poverty Allevation Proj. Grant IBRD No.TF-053816	1.408.073.530,50	1.602.295.288,90
169	602 078411	Reksus Depkeu ASEM Grant For Institusional Strengtening for Dept of Community & Village Dev. Grant IBRD No.TF-053785 dlm USD	-	0,00
170	602 079411	Reksus Depkeu u/ Coral reef rehabilition and management proj. phase II (Coremap II) IBRD no.TF-053350 Grant	857.662.911,00	1.656.853.621,93
171	602 080411	Reksus Depkeu u/ Government financial management & revenue administration project grant IBRD No. TF-053556 dalam USD	1.454.261.944,50	174.372.063,20
172	602 081411	Reksus Depkeu u/ IDF Grant f/ Strengthening National Capacity f/ Public Monitor Local Gov.Reform Grant IBRD No.TF-054921	-	265.793.348,15
173	602 082411	Reksus Depkeu u/Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Grant ADB No. 0002-INO dlm val. USD	62.853,00	494.685,88
174	602 083411	Reksus Depkeu u/IDF Grant F/Devlp.The Cap.O/the Minst.Of Forgn Aff to Supp.Wom.Migrn.Works Grant IBRD TF-054332 dlm USD	-	235.475.000,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
175	602 084411	Reksus Depkeu u/Community water services and health Aceh/Nias North Sumatera Project, Grant 0003-INO (SF)	829.046.838,00	7.145.951.724,66
176	602 085411	Reksus Depkeu u/State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No.2127-INO	2.355.067.308,00	1.259.791,25
177	602 086411	Reksus Depkeu u/Initiatives for local governance reform project (ILGRP) IBRD Grant No.TF-055913	1.438.720,50	4.846.338.195,91
178	602 087411	Reksus Depkeu u/Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt Project WISMP IBRD Grant No.TF-052124	106.543,50	2.650.199.728,98
179	602 088411	Reksus Depkeu u/Support for poor and disadvantaged areas project (SPADA) Grant IBRD No.TF-054749	1.568.043.394,50	2.359.011.909,12
180	602 089411	Reksus Depkeu u/ Search and Tsunami Emergency Supp.Prj d/ Hbh.Pem.Belanda Sec.FDCRY.OVSGHT. Supp.Grant Agreement ADB No.0002-INO	398.735.271,00	3.776.171.572,57
181	602 090411	Reksus Depkeu u/ Strengthening Forensic Audit Capacity of State Audt Board (BPK) (IDF Grant) No.TF-056263)	291.654.126,00	282.570.000,00
182	602 091411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Project IBRD No.TF-053555-IND	2.178.040.957,50	4.709.500.000,00
183	602 092411	Reksus Depkeu u/ European Union Grant F/N USA Tengg.Brt. Wtr. RSRC.Mng.Program Letter Agreement no.TF-055997	4.665.059.817,00	16.393.553.804,90
184	602 093411	Reksus Depkeu u/ Preparation of National Roads Improvement Project IBRD Grant No.TF-054589	2.190.000.000,00	1.883.800.000,00
185	602 094411	Reksus Depkeu u/ Western Java Enviromental Management Project/Addaptive Program Loan (APL2) IBRD Grant TF-053118-IND	-	0,00
186	602 095411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project, Grant GON No.4299-INO	5.475,00	31.082,70
187	602 096411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Education and Development Project (ECED), IBRD Grant No.TF-056841	3.334.992.444,00	449.855.976.849,73

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
188	602 097411	Reksus Depkeu u/ Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera, Grant JFPR 9074-INO	75.207.118,50	4.709.500.000,00
189	602 098411	Reksus Depkeu u/ Proyek Deutch Grant, Grant 0047-INO	14.713.230.738,00	9.358.467.101,08
190	602 099411	Reksus Depkeu u/ Proyek From Best Practice Policy Formulation Project IDF Grant TF-057276-IND dalam USD	13.789.335,00	410.310.572,19
191	602 100411	Reksus Depkeu u/ Proyek Kecamatan Based Reconstr and Rehabilitation Planning Project (KRRP) Grant IBRD TF 057307 IND	46.960.242.598,50	95.602.850.000,00
192	602 101411	Reksus u/ Proyek The Pilot Housing Vulnerable Communities in Aceh Project Grant TF-055389-IND	-	0,00
193	602 102411	Reksus Depkeu u/ Strengthening Accountability for and Audit of Disaster Related Aid , IDF Grant No. No.TF-057426	439.844.637,00	277.267.856,52
194	602 103411	Reksus Depkeu u/ Proyek PHRD Grant For The Preparation of Electricity Acces for Rural Transformation Project, Grant TF 054618	1.642.500.000,00	1.412.850.000,00
195	602 104411	Reksus Depkeu u/ Grant IDA No. TF-057955 (MDTF for Aceh and North Sumatera, Supp. For Poor and Disadvantage Areas Proj.)	8.265.169,50	22.318.542.694,21
196	602 105411	Reksus Depkeu u/Infrastructure Project Development Facility Imprest Account F/Dutch Grant Agreement 0064- INO	-	0,00
197	602 106411	Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Grant IFAD 726-ID	-	0,00
198	602 107411	Reksus Depkeu u/ Proyek MDTFANS-Infrastructure Reconstruction Financing Facility Grant TF-057657	21.375.604,50	75.601.543.124,21
199	602 108411	Reksus Depkeu u/ Proy Java Reconstruction Fund (JRF) Grant IBRD TF 090014-IND	65.230.823.926,50	81.990.871.853,51
200	602 109411	Reksus Depkeu u/ Pilot Study on Teacher Sertification IBRD Grant TF 057271	49.165,50	945.536.770,09
201	602 110411	Reksus Depkeu u/MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project Grant TF 090047 IND	127.855.047,00	3.941.297.003,47
202	602 111411	Reksus Depkeu u/Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project IBRD Grant TF 057667	-	224.709.177,19
203	602 112411	Reksus Depkeu Untuk Kecamatan Development Project and Environment in Sulawesi Project Grant IBRD TF-056890-IND	-	0,00
204	602 113411	Reksus Depkeu u/ Netherland Grant for KDP and Community Based MDG Achievment Grant IBRD TF-090003 IND/70691901	-	12.524.214.382,21
205	602 114411	Reksus Depkeu u/ Third Kec. Dev. Proj. Phase II for Smallholder Agribus. Dev. Initiative (SADI) Grant IBRD TF-057097-IND	21.416.119,50	2.825.700.000,00
206	602 115411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057574 Streamling Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project	507.121.875,00	0,00
207	602 116411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-090666-IND Spada, Monitoring and Evaluating Capacity Building Project	217.112.548,50	0,00
208	602 117411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	6.456.516.280,50	0,00
209	602 118411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	3.285.000.000,00	0,00
210	602 119411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	3.285.000.000,00	0,00
211	602 120411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	1.961.282.641,50	0,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO.	NO. REK.	NAMA REKENING	2008	2007
212	602 121411	Reksus Depkeu utk Netherlands Trust Fund For The Better Education Through Reformed Mgt and Univ. Teacher Upgrading Proj. (BERMUTU)	44.547.820.066,50	
213	602 122411	Reksus Depkeu utk Tech. Ass. To Ind. Nat.Sgl Window, Multi Donor Trust Fund to Sup. Publ. Fin. Mgt & Rev. Adm. Reform Prj Grant TF 091414	438.000.000,00	
214	602 123411	Reksus Depkeu u/ Basic Education Project-Trust Fund Grant Trust Fund TF-091895-IND	22.934.957.536,50	
215	602 124411	Reksus Depkeu u/ P Geothermal Power Generation Dev. Project Grant TF-092324-ID	-	
240	10220000320250 *)	Esrow Account	190.080.000.000,00	162.760.095.827,80
		JUMLAH	**3.211.106.656.120,59**	**1.722.617.956.150,13**

*) merupakan temuan BPK yang belum dilaporkan pada LKPP tahun 2007 ekuivalen dengan USD 17.279.976,2

DAFTAR REKENING CADANGAN

PER 31 DESEMBER 2008

No	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik Rekening	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
A. REKENING CADANGAN DANA REBOISASI									
1	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi	070-00-0021024-0	Dirjen Perbendaharaan	561.884.466.595,00	119.304.236,06	0,00	0,00	562.003.770.831,06
2	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Rekening Pembangunan Hutan	070-00-8887777-9	Dirjen Perbendaharaan	5.000.000.000.000,00	1.061.643.835,62	0,00	0,00	5.001.061.643.835,62
Subtotal					**5.561.884.466.595,00**	**1.180.948.071,68**	**0,00**	**0,00**	**5.563.065.414.666,68**
B. REKENING CADANGAN DANA SUBSIDI DAN PSO									
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan	0094720712	Dirjen Perbendaharaan	14.032.115.059,00	0,00	0,00	0,00	14.032.115.059,00
2	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	070-00-0887766-9	Dirjen Perbendaharaan	5.818.643.745.694,00	1.514.441.522,85	302.888.304,57	6.000,00	5.819.855.292.912,28
3	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0329-01-002349-30-5	Dirjen Perbendaharaan	3.113.769.685.690,00	0,00	0,00	0,00	3.113.769.685.690,00
4	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0160881483	Dirjen Perbendaharaan	3.520.388.325.247,00	0,00	0,00	0,00	3.520.388.325.247,00
Subtotal					**12.466.833.871.690,00**	**1.514.441.522,85**	**302.888.304,57**	**6.000,00**	**12.468.045.418.908,30**
C. REKENING CADANGAN DANA BAGI HASIL									
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DAK DR	0013630358	Dirjen Perbendaharaan	23.568.223.727,00	0,00	0,00	0,00	23.568.223.727,00
2	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu Cadangan DBH SDA	070-00-3332222-8	Dirjen Perbendaharaan	1.595.969.579.144,00	415.389.336,01	83.077.867,20	31.000,00	1.596.301.859.612,81
3	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan DBH SDA	0329-01-002356-30-2	Dirjen Perbendaharaan	1.200.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000.000,00
4	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Menkeu Cadangan DBH SDA	0161326224	Dirjen Perbendaharaan	991.139.195.545,00	0,00	0,00	0,00	991.139.195.545,00
Subtotal					**3.810.676.998.416,00**	**415.389.336,01**	**83.077.867,20**	**31.000,00**	**3.811.009.278.884,81**
C. REKENING CADANGAN DANA PENANAMAN MODAL NEGARA									
1	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan PMN	0329-01-002360-30-1	Dirjen Perbendaharaan	1.000.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000.000,00
Subtotal					**1.000.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000.000,00**
GRAND TOTAL					**22.839.395.336.701,00**	**3.110.778.930,54**	**385.966.171,77**	**37.000,00**	**22.842.120.112.459,80**

ASET LAIN-LAIN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.209.200	-
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	7.049.687.488	2.766.639.620
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.416.666.551	3.660.197.755
3	005	MAHKAMAH AGUNG	15.636.330.948	14.355.044.785
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	7.709.390.588.720	7.597.289.491.529
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.102.665.388	34.361.900
6	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	4.707.524.058	253.292.820.318
7	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	35.269.070.322	31.831.799.806
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	1.905.812.614.168	6.268.032.500
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	563.311.011	-
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	222.442.451.606	24.652.410.653
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	298.276.355.280	7.162.424.170
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	153.747.790	144.452.000
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.258.847.237.257	28.881.425.678
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	245.697.171.233	335.114.604.034
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	9.761.878.580.212	39.231.457.587
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	4.951.747.934.863	79.263.643.590
	024	BLU DEPARTEMEN KESEHATAN	28.310.441.705	-
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	14.949.321.026	19.126.276.551
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	920.361.894.295	2.380.176.602
19	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.484.768.506.643	2.363.100.436.957
	029	BLU DEPARTEMEN KEHUTANAN		
20	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.877.772.750	-
21	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	4.274.260.472	6.393.301.372
	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	282.085.440	-
	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	16.130.258	-
	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	207.134.999	-
22	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	587.567.000	587.567.000
23	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	468.919.750	391.946.000
24	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	161.415.130.922	99.750.387.293
25	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	11.051.698.000	10.155.144.702
26	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	66.628.479.868	70.937.623.015
27	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	14.599.338	71.795.750
28	054	BADAN PUSAT STATISTIK	168.763.195	-
	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	42.712.227.630	-
29	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.560.897.314	720.112.500
30	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	637.815.711	1.302.829.001
31	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.378.521.104	89.600.000
	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.521.493.000	-
	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	118.406.000	-
32	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134.661.000	207.559.142
33	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	114.065.806	87.822.038
34	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	146.800.335.352	-
35	069	BELANJA LAIN-LAIN	799.296.110.192	601.199.632.817
36	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	4.177.904.361	610.985.000
37	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	56.780.000	28.750.000
38	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	408.008.460
39	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	282.748.620	282.748.620
40	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	581.381.949	94.550.000
41	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	19.301.069.710	11.795.838.604

ASET LAIN-LAIN

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
42	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	87.543.258.861	58.676.140.283
43	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.858.866.179	11.854.656.742
44	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	7.131.689.663	44.003.148.368
45	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	405.087.050	1.714.950.718
46	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.918.079.934	683.655.514
47	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	356.339.759	911.635.000
48	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6.032.699.130	373.220.000
49	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	28.504.833.125	4.568.800.933
50	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	79.629.000	56.302.000
51	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	353.814.886.315	2.955.153.597
	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	46.580.847.259	-
52	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	157.446.461.122	14.232.475.026
53	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	729.419.877.785	486.293.304.867
	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	80.276.000	-
JUMLAH			**38.580.224.100.687**	**12.239.995.340.397**

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA
UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2008 - 31 DESEMBER 2008

NO	JENIS ASET	SATUAN ASET	SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA 31-Des-07		MUTASI PERIODE BERJALAN					SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2008	
					MUTASI SERAH KELOLA		MUTASI TRANSAKSI				
			ITEM ASET	NILAI ASET (Rp)	ITEM ASET	NILAI ASET	ITEM ASET	PROCEEDS	NILAI (Rp)	ITEM ASET	NILAI ASET (Rp)
1	Aset Saham Bank	Bank	6	139.626.303.403		(14.519.450.237)	(1)	1.023.362.006.722	(112.570.139.690)	5	12.536.713.476
2	Aset Saham Non Bank	Perusahaan	29	461.558.392.898	(1)	(257.250.315.612)	(2)	31.856.190.183	(11.944.596.000)	26	192.363.481.286
3	Aset Hak Tagih	Debitur	376	770.531.800.215	1	(1.339.136.689)	(57)	227.751.325.112	(262.652.771)	320	768.930.010.755
4	Aset Properti	Unit	3.568	1.782.641.845.921	(4)	122.477.857.675	(16)	120.644.666.878	(47.978.121.810)	3.511	1.857.141.581.785
5	Surat Berharga	Perusahaan	9	16.657.242.209	-					9	16.657.242.209
6	Saham dan Kredit	Perusahaan	2	917.668.033.083		1.291.568.841.465		32.050.000.000		2	2.209.236.874.549
	JUMLAH		3.990	4.088.683.617.729	(4)	1.140.937.796.602 -	(76)	1.435.664.188.895	(172.755.510.271)	3.873	5.056.865.904.060

ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI
PER 31 DESEMBER 2008

NO	JENIS ASET	JUMLAH ASET	NILAI PENGALIHAN (Rp)
1.	Surat Berharga		
	- Surat Berharga Treasury	36	336.744.406.680
	- Surat Berharga Non Treasury	121	169.269.366.213
	- Surat Berharga terkait PKPS	2	18.100.848.909
2.	Penyertaan di Bank Lainnya	8	-
3.	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355
4.	Pinjaman yang diberikan		
	- Dikelola BPPN	13.950	2.702.947.038.220
	- Dikelola BDI	1	19.489.668.884
5.	Aktiva Non Inti		
	- NCA Properti	701	123.228.291.946
	- NCA Non Properti	7	293.510.290.511
	- Inventaris	76.413	8.134.769.815
6.	Tagihan PKPS	17	2.235.982.000.000
7.	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000
8.	Piutang Non Bank	3	20.000.000
9.	Penempatan Antar Bank dan Nostro	2	83.698.000.000
10.	Aktiva Lainnya	7	93.971.000.000
T O T A L		91.302	7.360.075.725.532

Catatan:

1. Surat Berharga adalah Surat berharga yang dimiliki oleh BPPN yang diperoleh dari pengalihan aset milik BBO/BBKU, BTO, Bank rekap dan aktivitas penyelesaian kewajiban debitur kepada BPPN atau diterima BPPN dari pihak lain sebagai alat pembayaran kewajibannya kepada BPPN (*asset settlement*).
2. Penyertaan di Bank Lainnya adalah penyertaan dimiliki BPPN di bank umum yang berasal dari penyertaan yang sebelumnya dimiliki oleh BBO/BBKU dan BTO.
3. Penyertaan Non Bank adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang.
4. Pinjaman yang Diberikan merupakan pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
5. Aktiva Non Inti merupakan aktiva non inti berupa asset properti dan asset non properti milik BBO/BBKU, BTO, dan Bank Rekap yang dialihkan ke BPPN serta aktiva properti yang diserahkan oleh debitur dalam rangka pembayaran kewajibannya kepada BPPN (*"Asset Settlement"*). Aktiva non inti milik Bank yang dialihkan ke BPPN tersebut berasal dari aktiva non inti yang diterima Bank dari debitur untuk penyelesaian kewajibannya maupun barang jaminan diambil alih ("BJDA").
6. Tagihan PKPS merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks PSP BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadapa kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU.
7. Piutang Bank adalah tagihan BPPN kepada 50 BBO/BBKUdan 2 BDL (Bank Ratu dan Bank Prasidha) yang timbul karena dilakukannya pengalihan (*cessie*) Piutang BLBI dari BI kepada Negara RI c.q. BPPN dan/atau karena BPPN melakukan pembayaran talangan kewajiban bank yang termasuk dalam skema penjaminan, pembayaran talangan pesangon karyawan eks bank, atau talangan-talangan lainnya setelah dikurangi realisasi aktiva eks bank tersebut yang diterima BPPN.
8. Penempatan Antar Bank merupakan penanaman dana BDP pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *interbank call money,* tabungan, deposito berjangka, pinjaman antar bank, dan lain-lain yang sejenis dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan Nostro merupakan saldo rekening giro BDP baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di BI dan bank lain.
9. Aktiva Lainnya merupakan aktiva yang dimiliki BPPN yang tidak termasuk dalam kelompok akun aktiva tersebut di atas.

NILAI KAPITAL ASET KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
PER 31 DESEMBER 2008

NO.	CONTRACTOR	AREA	ASSET VALUE			DEPRECIATION EXPENSE				
						ACCUMULATION DEPRECIATION	DEPRECIATION EXP.2008 DEPRECIATION ASSET		TOTAL ACCUMULATION DEPRECIATION	PRESENT UNCOVERED BALANCE
			S.D. 2007	2008	TOTAL	2007	S.D. 2007	2008		
	A. REGION I									
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	271.170	2.552	273.722	267.273	1.408	694	269.375	4.347
2	C P I	MFK - PSC	5.020	0	5.020	5.020	0	0	5.020	0
3	C P I	SIAK - PSC	19.976	0	19.976	19.976	351	0	20.327	(351)
4	C P I	ROKAN - PSC	4.251.824	135.015	4.386.839	4.030.541	73.871	44.496	4.148.908	237.931
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	2.372.357	212.607	2.584.964	1.434.606	160.090	21.045	1.615.741	969.223
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	1.516.195	4.698	1.520.893	1.484.967	4.643	1.290	1.490.900	29.993
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	473.846	885	474.731	447.362	3.244	150	450.756	23.975
8	EXXONMOBIL OIL	PASE	73.470	0	73.470	48.961	4.198	0	53.159	20.311
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	7.986	2.245	10.231	1.502	652	228	2.382	7.849
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	281.213	9.435	290.648	259.657	2.398	2.457	264.512	26.136
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	10.050	0	10.050	10.180	2	0	10.182	(132)
12	PEARL OIL	TUNGKAL	13.897	(352)	13.545	6.434	1.933	(213)	8.154	5.391
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	558.311	24.681	582.992	272.165	271.538	4.879	548.582	34.410
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	3.914	207	4.121	2.479	363	52	2.894	1.227
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	435.152	4.927	440.079	411.012	7.101	1.387	419.500	20.579
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	367.920	17.101	385.021	366.744	920	4.282	371.946	13.075
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	20.720	0	20.720	20.331	70	0	20.401	319
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	0	0	0	0	70	0	70	(70)
19	JOA (PSC) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	47.332	3	47.335	34.919	292	1	35.212	12.123
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	0	0	0	0	97	0	97	(97)
	TOTAL REGION I		10.730.353	414.004	11.144.357	9.124.129	533.241	80.748	9.738.118	1.406.239
	B. REGION II								0	
1	BP WEST JAVA, LTD.	ONWJ	2.423.424	27.729	2.451.153	2.268.236	84.825	4.003	2.357.064	94.089
2	CAMAR RES. CANADA	BAWEAN	179	0	179	48.417	25	21	48.463	(48.284)
3	CNOOC SES LTD.	SE. SUMATRA	1.517.560	6.462	1.524.022	1.448.501	29.670	1.651	1.479.822	44.200
4	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK)	CORRIDOR - PSC	876.743	50.404	927.147	669.515	16.317	5.146	690.978	236.169
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGEAN	338.595	35	338.630	311.894	6.693	13	318.600	20.030
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	181.977	0	181.977	33.664	26.869	0	60.533	121.444
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	22.555	81	22.636	15.366	3.126	40	18.532	4.104
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	6.101	0	6.101	6.101	0	0	6.101	0
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	139.817	17.289	157.106	123.863	9.003	4.336	137.202	19.904
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	199.173	16.950	216.123	193.705	15.107	4.239	213.051	3.072
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	1.224	278	1.502	574	213	69	856	646
12	SANTOS PTY.LTD.	MADURA	28.233	0	28.233	5.359	2.290	0	7.649	20.584
13	SANTOS PTY.LTD.	SAMPANG	13.346	0	13.346	334	5.505	0	5.839	7.507
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	4.736	117	4.853	4.624	60	0	4.684	169
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	0	0	0	0	60	0	60	(60)
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO *	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JOB (PSC) PETROCHINA E.JAVA	TUBAN	47.513	548	48.061	44.229	855	85	45.169	2.892
19	PHE TUBAN E.JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	0	0	0	0	855	85	940	(940)

NILAI KAPITAL ASET KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
PER 31 DESEMBER 2008

NO.	CONTRACTOR	A R E A	ASSET VALUE			DEPRECIATION EXPENSE				
						ACCUMULATION DEPRECIATION	DEPRECIATION EXP.2008 DEPRECIATION ASSET		TOTAL ACCUMULATION	PRESENT UNCOVERED
			S.D. 2007	2008	TOTAL	2007	S.D. 2007	2008	DEPRECIATION	BALANCE
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	22.216	183	22.399	20.154	1.053	46	21.253	1.146
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	0	0	0	0	1.053	46	1.099	(1.099)
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	30.378	51.972	82.350	27.039	696	9.282	37.017	45.334
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	0	0	0	0	699	9.278	9.977	(9.977)
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	2.713	2.495	5.208	2.325	0	1.441	3.766	1.442
	TOTAL REGION II		5.856.483	174.543	6.031.026	5.223.900	204.974	39.781	5.468.655	562.372
	C. REGION III								0	
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	605.729	271	606.000	557.816	19.884	110	577.810	28.190
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	423.313	2.512	425.825	414.922	15.634	533	431.089	(5.264)
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	109.884	992	110.876	96.487	4.345	283	101.115	9.761
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	18.230	102	18.332	17.737	182	20	17.939	393
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	2.536.855	167.720	2.704.575	1.772.771	133.529	24.202	1.930.502	774.073
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	7.910	1.407	9.317	7.519	0	467	7.986	1.331
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	28.976	1.434	30.410	27.497	869	261	28.627	1.783
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	133.047	3.394	136.441	117.414	1.506	1.031	119.951	16.490
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	2.362.995	167.712	2.530.707	1.608.542	131.595	24.189	1.764.326	766.381
10	V I C O	SANGA-SANGA	1.094.520	53.469	1.147.989	1.003.350	19.477	10.344	1.033.171	114.818
11	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOILI, SULAWESI	3.413	0	3.413	2.679	0	1.005	3.684	(271)
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOILI, SULAWESI	0	0	0	0	0	1.006	1.006	(1.006)
13	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	13.818	750	14.568	11.771	617	192	12.580	1.988
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA	0	0	0	0	616	192	808	(808)
15	JOB (PSC) TOTAL-TENGAH	TENGAH	17.451	726	18.177	1.943	1.820	73	3.836	14.341
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	0	0	0	0	1.820	73	1.893	(1.893)
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	2.764.008	10.828	2.774.836	212.036	118.159	2.666	332.861	2.441.975
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL REGION III		10.120.149	411.317	10.531.466	5.852.484	450.053	66.647	6.369.184	4.162.282
	TOTAL REGION I, II, III (US$000)		26.706.985	999.864	27.706.849	20.200.513	1.188.268	187.176	21.575.957	6.130.893
	TOTAL REGION I, II, III (Dalam Juta Rupiah) *)		**292.441.486**	**10.948.511**	**303.389.997**	**221.195.612**	**13.011.535**	**2.049.577**	**236.256.724**	**67.133.273**

Keterangan:

*) Nilai dalam Rupiah merupakan konversi berdasarkan kurs tengah BI per 31 Desember 2008 yaitu Rp10.950/US$

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

PER 31 DESEMBER 2008 DAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rp)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2007
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.408.159.123	-
2	005	MAHKAMAH AGUNG	21.141.034	21.141.034
3	007	SEKRETARIAT NEGARA	24.994.348.430	7.788.887.342
4	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	-	1.522.372.224
5	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	-	332.000.000
6	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	20.469.631.737	37.946.637.516
7	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	85.383.199.848	1.881.258.267.370
8	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.288.269.382	26.158.283.489
9	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	271.478.970.182	176.905.450.392
10	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	52.204.287.000	278.315.547.190
	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	364.004.787	-
11	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.716.695.538	-
12	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	7.345.798
13	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	208.577.944.182	16.557.102.589
14	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	-	-
15	069	BELANJA LAIN-LAIN	394.023.657.000	-
16	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	3.719.760
17	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	2.408.884.615	-
	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	28.889.828	-
	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	51.412.350	-
18	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	507.808.779	5.704.815.015
19	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	254.578.935	-
20	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	4.714.486.429	217.786.000
21	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	67.315.316.490	105.954.502.049
22	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	276.077.152
JUMLAH			**1.150.211.685.669**	**2.538.969.934.920**

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**14.838.493.000.000**		**-**	**14.838.493.000.000**
1	FR0002	15-06-2009	14.838.493.000.000	14,00000%	-	14.838.493.000.000
ORI			**2.864.650.000.000**		**-**	**2.864.650.000.000**
1	ORI001	09-08-2009	2.864.650.000.000	12,05000%	-	2.864.650.000.000
SPN			**10.012.000.000.000**		**(430.410.315.000)**	**9.581.589.685.000**
1	SPN20090430	30-04-2009	5.250.000.000.000	-	(164.623.571.000)	5.085.376.429.000
2	SPN20090731	31-07-2009	4.762.000.000.000	-	(265.786.744.000)	4.496.213.256.000
ZERO COUPON			**2.709.000.000.000**		**(150.541.555.000)**	**2.558.458.445.000**
1	ZC0002	20-09-2009	2.709.000.000.000		(150.541.555.000)	2.558.458.445.000
VARIABLE RATE BOND			**8.483.717.000.000**		**-**	**8.483.717.000.000**
1	VR0016	25-07-2009	8.483.717.000.000	11,00000%	-	8.483.717.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**3.638.992.124.463**		**-**	**3.638.992.124.463**
1	SU005	10-06-2009	609.296.200.000	11,24983%	-	609.296.200.000
2	SU005	10-12-2009	609.296.200.000	11,24983%		609.296.200.000
3	SU007	01-02-2009	1.180.682.792.421	0,10000%		1.180.682.792.421
4	SU007	01-08-2009	1.239.716.932.042	0,10000%		1.239.716.932.042
TOTAL			**42.546.852.124.463**		**(580.951.870.000)**	**41.965.900.254.463**

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			**318.925.042.000.000**		**8.828.468.825.667**
1	FR0002	15-06-2009	14.838.493.000.000	14,00000%	97.014.067.234
2	FR0010	15-03-2010	9.941.678.000.000	13,15000%	390.031.911.296
3	FR0011	15-05-2010	800.000.000.000	13,55000%	14.074.400.000
4	FR0012	15-05-2010	1.703.141.000.000	12,62500%	27.917.887.272
5	FR0013	15-09-2010	4.730.601.000.000	15,42500%	217.697.527.419
6	FR0014	15-11-2010	1.185.947.000.000	15,57500%	23.982.220.234
7	FR0015	15-02-2011	5.597.938.000.000	13,40000%	283.334.033.932
8	FR0016	15-08-2011	4.118.937.000.000	13,45000%	209.254.356.411
9	FR0017	15-01-2012	8.128.063.000.000	13,15000%	493.755.443.061
10	FR0018	15-07-2012	5.885.062.000.000	13,17500%	358.182.528.506
11	FR0019	15-06-2013	11.856.341.000.000	14,25000%	78.903.949.355
12	FR0020	15-12-2013	11.856.341.000.000	14,27500%	79.046.225.447
13	FR0021	15-12-2010	2.308.000.000.000	14,50000%	15.629.776.000
14	FR0022	15-09-2011	7.115.000.000.000	12,00000%	254.724.115.000
15	FR0023	15-12-2012	13.322.500.000.000	11,00000%	68.437.682.500
16	FR0024	15-10-2010	4.330.000.000.000	12,00000%	111.341.620.000
17	FR0025	15-10-2011	6.668.000.000.000	10,00000%	142.888.572.000
18	FR0026	15-10-2014	13.632.000.000.000	11,00000%	321.319.872.000
19	FR0027	15-06-2015	13.089.000.000.000	9,50000%	58.075.893.000
20	FR0028	15-07-2017	10.100.000.000.000	10,00000%	466.579.600.000
21	FR0030	15-05-2016	5.330.000.000.000	10,75000%	74.390.810.000
22	FR0031	15-11-2020	11.469.000.000.000	11,00000%	163.800.258.000
23	FR0032	15-07-2018	1.560.000.000.000	15,00000%	108.097.080.000
24	FR0033	15-03-2013	9.945.000.000.000	12,50000%	370.878.885.000
25	FR0034	15-06-2021	16.729.000.000.000	12,80000%	100.005.962.000
26	FR0035	15-06-2022	11.025.000.000.000	12,90000%	66.425.625.000
27	FR0036	15-09-2019	6.511.000.000.000	11,50000%	223.385.899.000
28	FR0037	15-09-2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.712.450.000
29	FR0038	15-08-2018	3.083.000.000.000	11,60000%	135.081.645.000
30	FR0039	15-08-2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
31	FR0040	15-09-2025	12.914.000.000.000	11,00000%	423.811.652.000
32	FR0042	15-07-2027	14.426.000.000.000	10,25000%	683.085.526.000
33	FR0043	15-07-2022	12.653.000.000.000	10,25000%	599.132.203.000
34	FR0044	15-09-2024	5.589.000.000.000	10,00000%	166.742.226.000
35	FR0045	15-05-2037	6.400.000.000.000	9,75000%	81.017.600.000
36	FR0046	15-07-2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
37	FR0047	15-02-2028	13.840.000.000.000	10,00000%	522.764.480.000
38	FR0048	15-09-2018	5.691.000.000.000	9,00000%	152.809.041.000
39	FR0049	15-09-2013	5.123.000.000.000	9,00000%	137.557.673.000
40	FR0050	15-07-2038	1.950.000.000.000	10,50000%	94.584.750.000

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Interest
ORI			**34.633.185.000.000**		**157.830.533.125**
1	ORI001	09-08-2009	2.864.650.000.000	12,05000%	21.341.642.500
2	ORI002	28-03-2010	6.233.200.000.000	9,28000%	6.220.733.600
3	ORI003	12-09-2011	9.364.695.000.000	9,40000%	47.329.168.530
4	ORI004	12-03-2012	13.455.765.000.000	9,50000%	68.732.047.620
5	ORI005	15-09-2013	2.714.875.000.000	11,45000%	14.206.940.875
VARIABLE RATE BOND			**145.933.799.000.000**		**1.907.928.711.120**
1	VR0016	25-07-2009	8.483.717.000.000	11,00000%	172.440.031.742
2	VR0017	25-06-2011	2.118.666.000.000	11,24158%	4.631.403.876
3	VR0018	25-10-2012	386.483.000.000	11,00000%	7.855.653.458
4	VR0019	25-12-2014	11.406.226.000.000	11,24158%	24.934.010.036
5	VR0020	25-04-2015	9.899.007.000.000	11,00000%	201.207.216.282
6	VR0021	25-11-2015	7.546.328.000.000	11,49684%	87.228.005.352
7	VR0022	25-03-2016	9.666.749.000.000	11,24158%	21.131.513.314
8	VR0023	25-10-2016	8.652.056.000.000	11,00000%	175.861.690.256
9	VR0024	25-02-2017	9.909.300.000.000	11,49684%	114.541.598.700
10	VR0025	25-09-2017	6.909.300.000.000	11,24158%	15.103.729.800
11	VR0026	25-01-2018	5.442.142.000.000	11,00000%	110.616.978.292
12	VR0027	25-07-2018	5.442.142.000.000	11,00000%	110.616.978.292
13	VR0028	25-08-2018	7.033.994.000.000	11,49684%	81.305.936.646
14	VR0029	25-08-2019	12.212.320.000.000	11,49684%	141.162.206.880
15	VR0030	25-12-2019	10.503.015.000.000	11,24158%	22.959.590.790
16	VR0031	25-07-2020	25.322.354.000.000	11,00000%	514.702.167.404
17	VR0032	25-04-2011	5.000.000.000.000	11,00000%	101.630.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**258.160.372.437.845**		**2.143.873.771.277**
1	SU002	01-04-2025	20.000.000.000.000	1,00000%	250.958.904.110
2	SU004	01-12-2025	53.779.500.000.000	3,00000%	1.754.832.452.054
3	SU005	10-12-2009	1.218.592.400.000	11,24983%	8.262.933.191
4	SU007	01-08-2025	53.817.977.228.878	0,10000%	76.043.182.113
5	SRBI01	01-08-2033	129.344.302.808.967	0,10000%	53.776.299.809
SBSN			**4.699.700.000.000**		**210.593.838.700**
1	IFR0001	15-08-2015	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR0002	15-08-2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Interest
INTERNATIONAL BOND			**122.640.000.000.000**		**3.184.488.132.300**
1	RI0014	10-03-2014	14.235.000.000.000	6,75000%	296.265.937.500
2	RI0015	20-04-2015	10.950.000.000.000	7,25000%	156.569.790.450
3	RI0016	15-01-2016	9.855.000.000.000	7,50000%	340.818.750.000
4	RI0017	09-03-2017	10.950.000.000.000	6,87500%	234.208.334.550
5	RI0018	17-01-2018	20.805.000.000.000	6,87500%	651.601.036.800
6	RI0035	12-10-2035	17.520.000.000.000	8,50000%	326.796.672.750
7	RI0037	17-02-2037	16.425.000.000.000	6,62500%	405.035.933.850
8	RI0038	17-01-2038	21.900.000.000.000	7,75000%	773.191.676.400
TOTAL			**884.992.098.437.845**		**16.433.183.812.189**

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**304.086.549.000.000**		**(7.463.796.881.000)**	**296.622.752.119.000**
1	FR0010	15-03-2010	9.941.678.000.000	13,15000%	-	9.941.678.000.000
2	FR0011	15-05-2010	800.000.000.000	13,55000%	-	800.000.000.000
3	FR0012	15-05-2010	1.703.141.000.000	12,62500%	-	1.703.141.000.000
4	FR0013	15-09-2010	4.730.601.000.000	15,42500%	-	4.730.601.000.000
5	FR0014	15-11-2010	1.185.947.000.000	15,57500%	-	1.185.947.000.000
6	FR0015	15-02-2011	5.597.938.000.000	13,40000%	-	5.597.938.000.000
7	FR0016	15-08-2011	4.118.937.000.000	13,45000%	-	4.118.937.000.000
8	FR0017	15-01-2012	8.128.063.000.000	13,15000%	28.200.483.000	8.156.263.483.000
9	FR0018	15-07-2012	5.885.062.000.000	13,17500%	-	5.885.062.000.000
10	FR0019	15-06-2013	11.856.341.000.000	14,25000%	-	11.856.341.000.000
11	FR0020	15-12-2013	11.856.341.000.000	14,27500%	-	11.856.341.000.000
12	FR0021	15-12-2010	2.308.000.000.000	14,50000%	(9.120.030.000)	2.298.879.970.000
13	FR0022	15-09-2011	7.115.000.000.000	12,00000%	(20.319.886.000)	7.094.680.114.000
14	FR0023	15-12-2012	13.322.500.000.000	11,00000%	(216.172.745.000)	13.106.327.255.000
15	FR0024	15-10-2010	4.330.000.000.000	12,00000%	(50.199.304.000)	4.279.800.696.000
16	FR0025	15-10-2011	6.668.000.000.000	10,00000%	(89.866.517.000)	6.578.133.483.000
17	FR0026	15-10-2014	13.632.000.000.000	11,00000%	(333.740.814.000)	13.298.259.186.000
18	FR0027	15-06-2015	13.089.000.000.000	9,50000%	(329.074.052.000)	12.759.925.948.000
19	FR0028	15-07-2017	10.100.000.000.000	10,00000%	(12.489.751.000)	10.087.510.249.000
20	FR0030	15-05-2016	5.330.000.000.000	10,75000%	(116.541.833.000)	5.213.458.167.000
21	FR0031	15-11-2020	11.469.000.000.000	11,00000%	(1.075.421.411.000)	10.393.578.589.000
22	FR0032	15-07-2018	1.560.000.000.000	15,00000%	(60.465.436.000)	1.499.534.564.000
23	FR0033	15-03-2013	9.945.000.000.000	12,50000%	(35.269.533.000)	9.909.730.467.000
24	FR0034	15-06-2021	16.729.000.000.000	12,80000%	270.294.641.000	16.999.294.641.000
25	FR0035	15-06-2022	11.025.000.000.000	12,90000%	(28.659.500.000)	10.996.340.500.000
26	FR0036	15-09-2019	6.511.000.000.000	11,50000%	(147.523.028.000)	6.363.476.972.000
27	FR0037	15-09-2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(139.560.303.000)	2.310.439.697.000
28	FR0038	15-08-2018	3.083.000.000.000	11,60000%	(26.502.177.000)	3.056.497.823.000
29	FR0039	15-08-2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(52.054.851.000)	4.122.945.149.000
30	FR0040	15-09-2025	12.914.000.000.000	11,00000%	162.865.198.000	13.076.865.198.000
31	FR0042	15-07-2027	14.426.000.000.000	10,25000%	(137.128.612.000)	14.288.871.388.000
32	FR0043	15-07-2022	12.653.000.000.000	10,25000%	(44.028.623.000)	12.608.971.377.000
33	FR0044	15-09-2024	5.589.000.000.000	10,00000%	(78.059.201.000)	5.510.940.799.000
34	FR0045	15-05-2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(27.204.462.000)	6.372.795.538.000
35	FR0046	15-07-2023	16.855.000.000.000	9,50000%	(2.556.133.557.000)	14.298.866.443.000
36	FR0047	15-02-2028	13.840.000.000.000	10,00000%	(1.299.319.995.000)	12.540.680.005.000
37	FR0048	15-09-2018	5.691.000.000.000	9,00000%	(383.795.921.000)	5.307.204.079.000
38	FR0049	15-09-2013	5.123.000.000.000	9,00000%	(508.173.568.000)	4.614.826.432.000
39	FR0050	15-07-2038	1.950.000.000.000	10,50000%	(148.332.093.000)	1.801.667.907.000
ORI			**31.768.535.000.000**		-	**31.768.535.000.000**
1	ORI002	28-03-2010	6.233.200.000.000	9,28000%	-	6.233.200.000.000
2	ORI003	12-09-2011	9.364.695.000.000	9,40000%	-	9.364.695.000.000
3	ORI004	12-03-2012	13.455.765.000.000	9,50000%	-	13.455.765.000.000
4	ORI005	15-09-2013	2.714.875.000.000	11,45000%	-	2.714.875.000.000

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
ZERO COUPON			**8.782.000.000.000**		**(1.357.704.157.000)**	**7.424.295.843.000**
1	ZC0003	20-11-2012	1.500.000.000.000	-	(438.093.436.000)	1.061.906.564.000
2	ZC0004	20-02-2010	5.887.000.000.000	-	(500.238.885.000)	5.386.761.115.000
3	ZC0005	20-02-2013	1.395.000.000.000	-	(419.371.836.000)	975.628.164.000
VARIABLE RATE BOND			**137.450.082.000.000**		-	**137.450.082.000.000**
1	VR0017	25-06-2011	2.118.666.000.000	9,15335%	-	2.118.666.000.000
2	VR0018	25-10-2012	386.483.000.000	8,04462%	-	386.483.000.000
3	VR0019	25-12-2014	11.406.226.000.000	9,15335%	-	11.406.226.000.000
4	VR0020	25-04-2015	9.899.007.000.000	8,04462%	-	9.899.007.000.000
5	VR0021	25-11-2015	7.546.328.000.000	8,35372%	-	7.546.328.000.000
6	VR0022	25-03-2016	9.666.749.000.000	9,15335%	-	9.666.749.000.000
7	VR0023	25-10-2016	8.652.056.000.000	8,04462%	-	8.652.056.000.000
8	VR0024	25-02-2017	9.909.300.000.000	8,35372%	-	9.909.300.000.000
9	VR0025	25-09-2017	6.909.300.000.000	9,15335%	-	6.909.300.000.000
10	VR0026	25-01-2018	5.442.142.000.000	8,04462%	-	5.442.142.000.000
11	VR0027	25-07-2018	5.442.142.000.000	8,04462%	-	5.442.142.000.000
12	VR0028	25-08-2018	7.033.994.000.000	8,35372%	-	7.033.994.000.000
13	VR0029	25-08-2019	12.212.320.000.000	8,35372%	-	12.212.320.000.000
14	VR0030	25-12-2019	10.503.015.000.000	9,15335%	-	10.503.015.000.000
15	VR0031	25-07-2020	25.322.354.000.000	8,04462%	-	25.322.354.000.000
16	VR0032	25-04-2011	5.000.000.000.000	8,04462%		
SURAT UTANG PEMERINTAH			**254.521.380.313.382**		-	**254.521.380.313.382**
1	SU002	01-04-2025	20.000.000.000.000	1,00000%	-	20.000.000.000.000
2	SU004	01-12-2025	53.779.500.000.000	3,00000%	-	53.779.500.000.000
3	SU007	01-08-2025	51.397.577.504.415	0,10000%	-	51.397.577.504.415
4	SRBI01	01-08-2033	129.344.302.808.967	0,10000%	-	129.344.302.808.967
SBSN			**4.699.700.000.000**		-	**4.699.700.000.000**
1	IFR0001	15-08-2015	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR0002	15-08-2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
TOTAL			**741.308.246.313.382**		**(8.821.501.038.000)**	**732.486.745.275.382**

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri
Per 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
INTERNATIONAL BOND								
1	RI0014	10-03-2014	11.330.165.221.750	6,75000%	2.904.834.778.250	14.235.000.000.000	(26.679.661.000)	14.208.320.339.000
2	RI0015	20-04-2015	9.613.000.000.000	7,25000%	1.337.000.000.000	10.950.000.000.000	(49.151.748.000)	10.900.848.252.000
3	RI0016	15-01-2016	9.099.000.000.000	7,50000%	756.000.000.000	9.855.000.000.000	(47.777.815.000)	9.807.222.185.000
4	RI0017	09-03-2017	9.370.000.000.000	6,87500%	1.580.000.000.000	10.950.000.000.000	(61.307.701.000)	10.888.692.299.000
5	RI0018	17-01-2018	17.804.549.364.750	6,87500%	3.000.450.635.250	20.805.000.000.000	(261.394.447.000)	20.543.605.553.000
6	RI0035	12-10-2035	15.436.000.000.000	8,50000%	2.084.000.000.000	17.520.000.000.000	1.018.540.673.000	18.538.540.673.000
7	RI0037	17-02-2037	13.575.648.587.500	6,62500%	2.849.351.412.500	16.425.000.000.000	(204.168.871.000)	16.220.831.129.000
8	RI0038	17-01-2038	18.729.115.845.000	7,75000%	3.170.884.155.000	21.900.000.000.000	(407.290.700.000)	21.492.709.300.000
TOTAL			**104.957.479.019.000**		**17.682.520.981.000**	**122.640.000.000.000**	**(39.230.270.000)**	**122.600.769.730.000**

* Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan (31 Des 2008) adalah Rp. 10.950,-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2008
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
1	ANEKA INDUSTRI	PT Garam	Audited	KS	112.276	101.331	10.946	3.837	4.389	10.393	6.580	3.814	429	3.384	-	3.384	(1)	3.385
		PT Industri Gelas (IGLAS)	Audited	KS	105.291	159.791	(54.499)	194	26.274	(80.579)	13.553	(94.132)	2.353	(96.485)	15.199	(81.286)	-	(81.286)
2	ANGKUTAN DARAT	Perum DAMRI	Unaudited	S	462.654	454.906	7.748	21.679	754	28.673	-	28.673	-	28.673	-	28.673	-	28.673
		Perum PPD	Unaudited	S	121.822	151.842	(30.020)	6.875	201	(23.346)	1.851	(25.197)	(3.877)	(21.320)	(3.825)	(25.145)	-	(25.145)
		PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Unaudited	S	4.439.736	4.735.567	(295.830)	319.161	3.112	20.219	788	19.431	(20.388)	39.819	550	40.370		40.370
3	ASURANSI	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	Audited	SS	952.691	804.877	147.815	-	-	147.815	-	147.815	-	147.815	-	147.815	-	147.815
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI	Audited	SS	347.709	318.700	29.009	521	215	29.315	-	29.315	(302)	29.617	-	29.617	-	29.617
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	Audited	S	3.621.140	3.474.693	146.447	17.097	-	163.544	-	163.544	43.314	120.230	-	120.230	-	120.230
		PT Asuransi Jasa Raharja	Audited	SS	2.016.328	1.935.274	81.054	459.362	-	540.416		540.416	201.739	338.677	-	338.677	20.083	318.594
		PT Asuransi Jiwasraya	Audited		2.757.377	2.731.376	26.001	8.709	18.280	16.430	-	16.430	260	16.169	-	16.169	-	16.169
		PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	Audited	SS	5.630.909	4.156.814	1.474.095	189.574	180.010	1.483.659	-	1.483.659	346.778	1.136.881	-	1.136.881	63	1.136.819
		PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	Audited	S	8.325.703	2.878.979	5.446.723	16.618	5.132	5.458.209	-	1.223.831	133.349	1.090.482	-	1.090.482	1	1.090.482
		PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	Audited	run off	(32.722)	4.711	(37.434)	-	-	(37.434)	-	(37.434)	3.522	(40.956)	35.595	(5.361)	-	(5.361)
		PT Taspen	Audited	S	8.135.592	7.694.678	440.914	-	-	440.914	-	440.914	54.982	385.932	-	385.932	51	385.983
		PT Askrindo	Audited	TS	181.931	145.995	35.936	14.427	14.402	35.961	-	35.961	(15.434)	51.395	-	51.395	0	51.395
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	PT Barata Indonesia	Audited	KS	357.879	344.072	13.807	4.042	13.275	4.574	2.044	2.530	(31)	2.561	-	2.561		2.561
		PT Boma Bisma Indra (BBI)	Audited	TS	5.147	17.295	(12.148)	7.850	7.848	(12.145)	7.673	(19.818)	(966)	(18.852)	-	(18.852)		(18.852)
		PT Krakatau Steel (KS)	Audited	S	20.702.878	19.337.762	1.365.116	223.379	474.778	1.113.717	372.897	740.820	277.215	463.605	-	463.605	4.040	459.565
5	DOK DAN PERKAPALAN	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahar	Audited	KS	598.412	551.876	46.536	87.458	88.460	45.534	57.747	(12.213)	1.322	(13.535)		(13.535)		(13.535)
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS	Audited	S	303.813	287.199	16.614	21.588	16.949	21.254	4.285	16.968	6.339	10.629	-	10.629	103	10.526
		PT Industri Kapal Indonesia (IKI	Audited	KS	36.655	35.993	662	25	113	574	726	(152)		(152)	-	(152)		(152)
		PT PAL Indonesia	Unaudited	KS	997.120	987.333	9.787	320.009	267.232	62.564	126.438	(63.874)	(6.663)	(57.211)	-	(57.211)	1	(57.212)
6	ENERGI	PT Energy Management Indonesia (Persero	Audited	KS	16.153	18.779	(2.626)	120	149	(2.655)	724	(3.379)	(1.241)	(2.138)	-	(2.138)		(2.138)
		PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	Audited	S	12.793.849	8.136.597	4.657.252	184.978	3.013.527	1.828.703	547.212	1.281.491	476.267	805.224	-	805.224	171.364	633.860
		PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Audited	KS	164.208.510	160.597.751	3.610.759	465.400	9.528.862	(5.452.703)	6.738.465	(12.191.168)	112.548	(12.303.716)	-	(12.303.716)	-	(12.303.716)
		PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA	Audited	S	7.216.228	4.722.286	2.493.942	146.408	88.678	2.551.672	-	2.551.672	837.055	1.714.617	-	1.714.617	6.846	1.707.771
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	PT Batan Teknologi	Audited	S	33.745	32.822	923	168	-	1.091	-	1.091	(329)	1.420	-	1.420		1.420
		PT Industri Kereta Api (INKA)	Audited	S	564.512	524.938	39.574	6.662	5.048	41.188	5.809	35.379	2.961	32.418	-	32.418		32.418
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	Audited	KS	762.359	758.769	3.590	12.382	25.158	(9.187)	8.016	(17.203)	(1.960)	(15.243)	-	(15.243)	77	(15.319)
		PT LEN Industri	Audited	S	501.212	461.517	39.695	1.148	11.589	29.254	10.808	18.446	5.943	12.503	-	12.503	660	11.844
		PT Dirgantara Indonesia	Unaudited	KS	837.231	807.033	30.198	38.761	125.268	(56.309)	4.661	(60.970)	23.376	(84.346)	-	(84.346)		(84.346)
8	INDUSTRI FARMASI	PT Biofarma	Audited	S	805.789	608.495	197.295	69.105	59.908	206.492	-	206.492	67.393	139.099	(714)	138.385	-	138.385
		PT Indo Farma, Tbk	Audited		1.478.585	1.415.566	63.019	950	22.139	41.830	30.270	11.560	4.834	6.726	(1.694)	5.032	0	5.032
		PT Kimia Farma, Tbk	Audited	S	2.704.728	2.597.692	107.037	12.336	6.393	112.980	16.874	96.106	40.712	55.394	-	55.394	-	55.394
9	INDUSTRI PERTAHANAN	PT Dahana	Audited	S	466.719	404.607	62.112	33.682	2.119	93.675	2.776	90.899	35.890	55.009	-	55.009	-	55.009
		PT PINDAD	Unaudited	S	563.761	529.020	34.741	26.769	11.102	50.408	23.716	26.692	9.194	17.498	-	17.498	-	17.498
10	INDUSTRI SANDANG	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN	Audited	KS	138.934	188.197	(49.263)	6.477	30.920	(73.706)	-	(73.706)	(1.820)	(71.886)	-	(71.886)	-	(71.886)
		PT Primissima	Audited	KS	84.720	88.998	(4.279)	5.584	7.599	(6.295)	2.127	(8.422)	-	(8.422)	-	(8.422)	-	(8.422)
11	JASA KONSTRUKSI	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS	Unaudited	S	453.032	403.628	49.404	10.005	32.959	26.450	-	26.450	5.603	20.847	-	20.847	-	20.847
		PT Adhi Karya	Audited	S	6.668.189	6.300.281	367.908	44.320	183.399	228.829	106.289	122.539	39.545	82.994	-	82.994	1.512	81.482
		PT Brantas Abipraya	Audited	S	472.654	436.876	35.778	712	1.669	34.820	13.450	21.370	4.993	16.377	-	16.377	-	16.377
		PT Hutama Karya (HK)	Audited	S	2.322.553	2.231.865	90.689	30.159	819	120.028	45.622	74.406	32.976	41.430	-	41.430	-	41.430
		PT Istaka Karya	Audited	KS	523.987	478.513	45.474	1.369	8.989	37.855	15.316	22.538	6.975	15.563	-	15.563	-	15.563
		PT Nindya Karya	Audited	S	1.050.049	1.001.202	48.847	30.731	31.824	47.754	36.886	10.868	6.003	4.865	-	4.865	0	4.864
		PT Pembangunan Perumahan (PP)	Audited	S	4.000.263	3.732.402	267.861	6.423	95.530	178.754		178.754	57.145	121.609		121.609		121.609
		PT Waskita Karya	Prognosa		3.168.678	2.968.492	200.186	5.605	560	205.231	113.609	91.622	27.487	64.135	-	64.135		64.135
		PT Wijaya Karya (WIKA)	Audited	S	6.555.978	6.268.048	287.930	84.470	71.962	300.439	44.024	256.415	81.762	174.653	-	174.653	18.619	156.034
12	JASA LAINNYA	Perum Jasa Tirta I	Audited	S	140.951	119.487	21.465	4.488	2.880	23.073	-	23.073	6.114	16.959	-	16.959	-	16.959
		Perum Jasa Tirta II	Audited	S	237.894	182.451	55.443	6.543	31.773	30.213	-	30.213	4.491	25.722	-	25.722	-	25.722
		PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	Audited	S	220.290	151.362	68.928	46.556	855	114.629	-	114.629	22.056	92.573	-	92.573	-	92.573
13	JASA PEMBIAYAAN	Perum Pegadaian	Audited	S	2.930.594	1.192.327	1.738.267	16.818	194	1.754.891	853.649	901.241	272.868	628.374	-	628.374	-	628.374
		Perum Penjaminan Kredit Indonesia	Audited	S	466.031	312.478	153.553	31.675	13.039	172.188	-	172.188	38.367	133.821	-	133.821	-	133.821
		PT Danareksa	Audited	TS	219.918	(6.744)	226.662	11.377	2.936	235.102	182.642	52.460	29.013	23.447	-	23.447	-	23.447
		PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI	Audited	S	40.695	22.003	18.692	11.127	1.360	28.459	-	28.459	5.303	23.157	-	23.157	-	23.157
		PT PANN Multi Finance	Audited	S	96.164	51.319	44.845	50.384	21.164	74.066	15.212	58.854	(488)	59.342	-	59.342	-	59.342
		PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	Audited	S	225.005	156.883	68.122	10.728	21.630	57.220	39.414	17.805	5.261	12.544	-	12.544		12.544
14	JASA PENILAI	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	Audited	S	194.986	170.331	24.655	414	-	25.069		25.069	8.031	17.038	-	17.038		17.038
		PT Sucofindo	Audited	S	1.095.396	1.031.829	63.567	-	11.377	52.190	9.223	42.967	22.148	20.819	-	20.819	307	20.512
		PT Surveyor Indonesia (SI	Audited	S	431.499	390.402	41.097	6.682	3.861	43.918	-	43.918	19.129	24.789	-	24.789		24.789
		PT Survey Udara Penas	Prognosa	KS	4.725	5.139	(414)	17	437	(834)	-	(834)	-	(834)	-	(834)	-	(834)
15	KAWASAN INDUSTRI	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	Audited	S	176.799	144.432	32.367	26.395	18.026	40.736	-	40.736	14.610	26.126	-	26.126	-	26.126
		PT Kawasan Industri Makasar (KIMA	Audited	S	11.490	11.914	(424)	1.051	511	116	-	116	(182)	298	-	298	-	298
		PT Kawasan Industri Medan (KIM)	Audited	S	72.542	52.792	19.750	1.306	170	20.887	-	20.887	5.780	15.107	-	15.107	-	15.107
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	Audited	S	10.249	8.317	1.932	540	51	2.421	-	2.421	494	1.927	-	1.927	-	1.927
		PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam	Audited	S	71.529	69.526	2.003	12.407	10.212	4.198	-	4.198	(1.460)	5.658	-	5.658	-	5.658
16	KEBANDARUDARAAN	PT Angkasa Pura I (AP I)	Audited	S	1.861.407	1.460.558	400.849	436.762	175.279	662.332	-	662.332	133.677	528.655	-	528.655	-	528.655
		PT Angkasa Pura II (AP II)	Audited	S	2.276.524	1.499.227	777.298	285.229	91.543	970.984	-	970.984	278.589	692.395	-	692.395	-	692.395
17	KEHUTANAN	Perum Perhutani	Unaudited	S	2.305.988	2.262.153	43.835	232.913	76.367	200.381	-	200.381	-	200.381	-	200.381	-	200.381
		PT Inhutani I	Audited	KS	106.662	99.443	7.219	9.375	12.529	4.065	-	4.065	271	3.794	-	3.794	-	3.794
		PT Inhutani II	Audited	KS	69.297	76.566	(7.268)	12.029	4.623	138	-	138	(479)	618	-	618	-	618
		PT Inhutani III	Audited	KS	35.073	30.613	4.459	2.997	1.975	5.481	219	5.262	1.101	4.161	-	4.161	-	4.161
		PT Inhutani IV	Audited	KS	25.828	28.553	(2.724)	6.558	1.380	2.454	-	2.454	41	2.413	-	2.413	-	2.413
		PT Inhutani V	Unaudited	TS	6.383	9.108	(2.725)	1.214	6.767	(8.278)	-	(8.278)		(8.278)	-	(8.278)	-	(8.278)
18	KERTAS	PT Kertas Kraft Aceh	Unaudited	TS	115.677	237.459	(121.783)	8.273	1.890	(115.400)	34.257	(149.657)	-	(149.657)	-	(149.657)	-	(149.657)
		PT Kertas Leces	Audited	KS	792.844	875.278	(82.435)	27.119	4.686	(60.002)	7.941	(67.943)	(18.530)	(49.413)	-	(49.413)	-	(49.413)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	PT Bina Karya	Audited	S	53.618	48.659	4.958	5.374	1.140	9.193	3.052	6.141	2.420	3.721	-	3.721	-	3.721
		PT Indah Karya	Audited	KS	10.454	11.540	(1.086)	781	2.808	(3.113)	587	(3.701)	-	(3.701)	-	(3.701)	-	(3.701)
		PT Indra Karya	Audited	KS	82.881	81.996	885	228	1	1.112	2.532	(1.420)	1.328	(2.748)	-	(2.748)	-	(2.748)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2008
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
		PT Virama Karya	Audited	S	84.699	79.460	5.239	266	74	5.432	2.308	3.123	1.901	1.222	-	1.222	-	1.222
		PT Yodya Karya	Audited	S	80.332	72.911	7.421	48	2.180	5.288	864,50	4.424	2.414	2.010	-	2.010	-	2.010
20	LOGISTIK	Perum Bulog	Unaudited	S	17.650.338	16.551.311	1.099.027	774.789	411.438	1.462.378	1.376.444	85.934	(15.509)	101.443		101.443		101.443
		PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	Audited	S	298.984	267.610	31.374	2.760	2.774	31.360		31.360	11.340	20.020	-	20.020	-	20.020
		PT Pos Indonesia (POSINDO)	Audited	KS	2.266.273	2.329.476	(63.203)	84.361	93.179	(72.021)	-	(72.021)	(13.343)	(58.678)	-	(58.678)	(773)	(57.906)
		PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	Audited	KS	112.033	108.094	3.939	520	3.862	597	-	597	25	572	-	572	-	572
21	PARIWISATA	PT Bali Tourism & Development Corporatior	Audited	S	66.277	40.978	25.299	2.123	2.629	24.793		24.793	-	24.793	(168)	24.625	(732)	25.357
		PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Audited	S	254.792	242.415	12.377	34.904	10.894	36.387	3.326	33.061	12.817	20.244	-	20.244	-	20.244
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Bok	audited	S	59.670	50.451	9.219	2.106	331	10.994	-	10.994	2.585	8.409	-	8.409	-	8.409
22	PELABUHAN	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I	Audited	S	801.371	609.477	191.895	84.785	31.448	245.232	-	245.232	64.866	180.366	-	180.366	-	180.366
		PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II	Audited	S	2.457.386	1.860.528	596.858	1.065.274	346.120	1.316.013	3.064	1.312.949	255.365	1.057.584	-	1.057.584	10.402	1.047.182
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III	Audited	S	2.387.872	1.537.100	850.772	197.253	27.964	1.020.060	2.177	1.017.883	305.567	712.316	-	712.316	195.959	516.357
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	Audited	S	613.250	429.430	183.820	76.106	57.832	202.094	-	202.094	57.047	145.047	-	145.047	-	145.047
23	PELAYARAN	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP	Audited	S	796.024	702.385	93.639	21.949	3.762	111.826	-	111.826	9.050	102.776	-	102.776	-	102.776
		PT Djakarta Lloyd	Unaudited	KS	460.582	477.725	(17.143)	3.263	116.117	(129.997)	14.082	(144.079)	5.467	(149.546)	-	(149.546)	-	(149.546)
		PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Unaudited	KS	128.333	137.211	(8.878)	11.173	5.775	(3.480)	-	(3.480)	-	(3.480)	-	(3.480)	-	(3.480)
		PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI	Unaudited	S	2.497.294	2.555.441	(58.147)	72.609	25.753	(11.290)	-	(11.290)	4.909	(16.199)	-	(16.199)	49	(16.248)
24	PENGERUKAN	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Audited	KS	134.262	145.714	(11.452)	30.049	6.048	12.549	6.699	5.850	4.770	1.081	-	1.081	-	1.081
25	PENUNJANG KONSTRUKSI	PT Amarta Karya	Audit	S	66.777	66.010	767	2.095	499	2.364	644	1.719	1.442	278	-	278	-	278
		PT Jasa Marga	Audited	S	3.353.632	1.982.008	1.371.624	306.872	12.577	1.665.919	720.097	945.822	223.922	721.900	-	721.900	14.102	707.798
26	PERBANKAN	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI	Audited	S	1.071.064	721.230	349.834	1.308	-	351.142	-	351.142	109.494	241.648	-	241.648	-	241.648
		PT Bank Mandiri, Tbk	Audited	S	32.382.262	24.471.821	7.910.441	158.893	775	8.068.559	-	8.068.559	2.753.244	5.315.315	-	5.315.315	2.495	5.312.820
		PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI	Audited	S	20.320.268	18.445.745	1.874.523	57.862	-	1.932.385	-	1.932.385	706.480	1.225.905	-	1.225.905	3.420	1.222.485
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI	Audited	S	30.691.009	22.344.896	8.346.113	475.899	-	8.822.012	-	8.822.012	2.863.644	5.958.368	-	5.958.368	-	5.958.368
		PT Bank Tabungan Negara (BTN	Audited	S	4.788.879	4.119.054	669.825	6.380	10.672	665.533	-	665.533	235.059	430.474	-	430.474	-	430.474
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	Unaudited	S	80.649	75.564	5.086	5.761	366	10.481	-	10.481	-	10.481	-	10.481	-	10.481
		Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	Unaudited	S	1.547.439	1.265.746	281.693	99.925	17.054	364.564	83.822	280.742	87.060	193.682	-	193.682	-	193.682
		PT Balai Pustaka (BP)	Unaudited	TS	39.895	38.563	1.332	1.275	25	2.582	-	2.582	73	2.509	-	2.509	-	2.509
		PT Pradnya Paramita	Unaudited	KS	1.719	2.496	(777)	487	1	(290)	-	(290)	-	(290)	-	(290)	-	(290)
28	PERDAGANGAN	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI	Unaudited	KS	1.152.916	1.140.694	12.222	27.359	2.521	37.060	16.588	20.472	6.998	13.474	-	13.474	-	13.474
		PT PP Berdikari	Audited	KS	419.733	407.519	12.214	9.936	8.054	14.096	4.944	9.152	3.479	5.673	-	5.673	-	5.673
		PT Sarinah	Audited	S	312.522	294.240	18.282	5.779	7.027	17.034	-	17.034	5.078	11.956	-	11.956	-	11.956
29	PERIKANAN	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS	Unaudited	S	80.306	80.391	(86)	737	224	428	-	428	-	428	-	428	-	428
		PT Perikanan Nusantara	Unaudited	KS	43.122	46.477	(3.355)	10.243	1.916	4.972	4.724	248	57	191	-	191	-	191
30	PERKEBUNAN	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I	Audited	S	448.780	408.447	40.333	18.953	52.494	6.792	-	6.792	(2.395)	9.187	-	9.187	-	9.187
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II	Audited	S	1.634.008	1.442.984	191.024	33.805	188.401	36.428	-	36.428	15.256	21.172	-	21.172	-	21.172
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III	Audited	S	4.653.427	3.445.532	1.207.895	200.228	137.766	1.270.357	44.750	1.225.607	380.888	844.718	-	844.718	-	844.718
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV	Audited	S	4.621.017	3.394.736	1.226.281	291.371	237.434	1.280.218	96.501	1.183.717	381.135	802.582	-	802.582	-	802.582
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V	Audited	S	3.815.232	3.228.611	586.621	52.037	51.200	587.458	-	587.458	177.252	410.207	-	410.207	-	410.207
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI	Audited	S	1.742.135	1.463.869	278.266	21.742	93.040	206.968	-	206.968	61.210	145.758	-	145.758	-	145.758
		PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII	Audited	S	3.421.191	2.994.925	426.266	55.902	16.070	466.098	77.421	388.678	127.838	260.840	-	260.840	-	260.840
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII	Audited	S	1.698.406	1.265.813	432.593	38.005	319.266	151.332	24.363	126.969	39.858	87.111	-	87.111	705	86.406
		PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX	Audited	S	1.082.782	848.326	234.456	42.506	129.997	146.966	48.817	98.149	29.427	68.721	-	68.721	-	68.721
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	Audited	S	1.331.680	1.178.000	153.680	40.014	100.609	93.085	45.681	47.404	22.565	24.839	-	24.839	317	24.522
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI	Audited	KS	1.665.788	1.568.477	97.312	8.239	34.717	70.833	33.990	36.843	30.025	6.818	-	6.818	-	6.818
		PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII	Audited	S	776.232	526.497	249.735	97.498	164.892	182.342	18.988	163.353	47.567	115.786	-	115.786	-	115.786
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII	Audited	S	2.517.174	2.202.511	314.663	81.500	98.764	297.399	19.007	278.392	67.401	210.991	-	210.991	-	210.991
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV	Audited	TS	370.995	438.827	(67.832)	6.750	12.448	(73.530)	34.873	(108.403)	-	(108.403)	-	(108.403)	-	(108.403)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI	Audited	S	3.482.495	3.347.151	135.344	52.522	32.005	155.861	73.206	82.655	17.286	65.369	-	65.369	31.800	33.569
31	PERTAMBANGAN	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM	Audited	S	9.591.981	8.137.848	1.454.133	711.257	185.375	1.980.015	50.346	1.929.668	546.723	1.382.945	-	1.382.945	14.806	1.368.139
		PT Pertamina	Unaudited	S	554.208.218	510.298.815	43.909.403	4.971.985	362.089	48.519.299	165.839	48.353.460	17.973.584	30.379.876	-	30.379.876	184.736	30.195.140
		PT Sarana Karya	Unaudited	KS	-	-	-	-	(0,50)	0		0		0	-	0	-	0,50
		PT Timah, Tbk	Audited	S	9.053.082	6.982.878	2.070.204	105.053	25.844	2.149.413	40.484	2.108.929	766.578	1.342.351	-	1.342.351	-	1.342.351
32	PERTANIAN	PT Pertani	Audited	S	1.387.653	1.352.774	34.879	3.996	19.678	19.197		19.197	4.032	15.165	-	15.165	-	15.165
		PT Sang Hyang Seri (SHS)	Audited	S	1.323.339	1.299.044	24.295	20.294	23.009	21.580	-	21.580	7.229	14.351	-	14.351	-	14.351
33	PUPUK	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	Unaudited	S	34.222.488	29.771.168	4.451.320	1.612.354	1.878.778	4.184.896	1.598.587	2.586.309	775.875	1.810.434	-	1.810.434	-	1.810.434
34	SEMEN	PT Semen Baturaja	Audited	S	794.352	579.798	214.554	10.200	191	224.563	27.512	197.051	61.043	136.008	-	136.008		136.008
		PT Semen Gresik, Tbk	Audited	S	12.209.846	8.822.660	3.387.186	240.901	12.366	3.615.721	26.192	3.589.529	1.045.569	2.543.960	-	2.543.960	20.416	2.523.544
35	TELEKOMUNIKASI	Perum Produksi Film Negara (PFN	Unaudited	KS	5.839	7.745	(1.906)	358	0	(1.548)	-	(1.548)	-	(1.548)	-	(1.548)	-	(1.548)
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM	Audited	S	60.689.784	38.382.309	22.307.475	1.200.910	1.613.759	21.894.626	1.581.818	20.312.808	5.639.695	14.673.113	0	14.673.113	4.053.643	10.619.470
		Perum LKBN Antara	Unaudited	KS	61.753	94.259	(32.506)			(32.506)		(32.506)		(32.506)		(32.506)		(32.506)
36	USAHA PENERBANGAN	PT Garuda Indonesia (GIA	Audited	S	19.400.598	18.213.704	1.186.894	506.412	552.005	1.141.301	365.481	775.820	96.711	679.109	-	679.109	9.639	669.471
		PT Merpati Nusantara Airlines (MNA	Unaudited	KS	2.331.082	2.474.202	(143.121)	-	428.514	(571.635)	-	(571.635)	(11.755)	(559.880)	-	(559.880)	-	(559.880)
		PT Saran Multi Finansial*)	Audited	S	100.485	21.961	78.524	1.696	-	80.220	-	80.220	2.960	77.260	0	77.260	0	77.260
		PT Sarana Multi Infrastruktur*.	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
	Grand Total				1.159.105.963	1.025.706.879	133.399.084	18.276.124	22.989.657	128.685.551	16.123.606	108.327.567	39.756.061	68.571.506	44.944	68.616.450	4.764.708	77.683.652

*) BUMN di bawah binaan Departemen keuangan

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2008
NERACA

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	ANEKA INDUSTRI	PT Garam	Audited	KS	135.064	181.193	10.924	327.181	111.931	4.887	116.817	2	200.000	-	-	-	10.362	210.362	100%	210.362
		PT Industri Gelas (IGLAS)	Audited	KS	33.567	149.310	3.883	188.759	247.348	61.044	308.392	-	47.007	94.583	-	-	(263.223)	(121.633)	63,82%	(77.626)
2	ANGKUTAN DARAT	Perum DAMRI	Unaudited	S	47.999	288.728	43.729	380.456	100.075	42.302	142.377	-	19.700	110.811	115.769	1.729	(32.888)	215.121	100,00%	215.121
		Perum PPD	Unaudited	S	30.773	119.509	1.618	151.900	163.876	66.889	230.765	-	231.769	-	55.620	163.721	(529.974)	(78.864)	100,00%	(78.864)
		PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Unaudited	S	2.517.470	2.735.134	1.478.366	6.730.970	1.173.352	1.805.882	2.979.234	-	2.200.000	270.000	1.072.941	968	162.827	3.706.736	100,00%	3.706.736
3	ASURANSI	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	Audited	SS	107.972	4.718.309	35	4.826.316	4.067.537	3.360	4.070.897	-	-	200.000	-	490.841	64.578	755.419	100,00%	755.419
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	Audited	SS	41.762	603.757	5.517	651.036	25.322	59.283	84.605	-	-	300.000	-	266.431	-	566.431	100,00%	566.431
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	Audited	S	1.099.824	995.891	28.540	2.124.255	1.212.518	154.333	1.366.851	-	-	425.000	-	324.428	7.976	757.404	100,00%	757.404
		PT Asuransi Jasa Raharja	Audited	SS	214.187	2.800.069	7.572	3.021.828	1.347.087	6.106	1.353.192	80.357	-	800.000	-	788.278	-	1.588.278	100,00%	1.588.278
		PT Asuransi Jiwasraya	Audited	-	244.421	4.583.456	61.034	4.888.911	4.312.366	133.120	4.445.486	-	235.000	-	-	153.889	54.536	443.425	100,00%	443.425
		PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	Audited	SS	4.005.993	2.428.991	1.906	6.436.891	489.910	83.480	573.391	6.063	-	1.000.000	-	2.275.397	2.991	3.278.388	100,00%	3.278.388
		PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	Audited	S	1.545.088	62.015.768	946.489	64.507.343	281.710	61.622.795	61.904.505	2	-	800.000	-	2.002.837	-	2.602.837	100,00%	2.602.837
		PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	Audited	run off	104.424	242.087	38.195	384.706	69.273	392.970	462.243	-	-	40.000	-	49.360	(166.898)	(77.538)	100,00%	(77.538)
		PT Taspen	Audited	S	6.205.649	22.298.166	37.576	28.541.391	27.304.863	-	27.304.863	7.599	100.000	-	-	692.628	436.301	1.228.929	100,00%	1.228.929
		PT Askrindo	Audited	TS	2.082.412	160.651	71.562	2.314.625	549.621	10.065	559.686	2	400.000	850.000	-	453.543	51.394	1.754.939	82,40%	1.446.070
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	PT Barata Indonesia	Audited	KS	202.520	57.061	21.025	280.606	203.625	14.354	217.979		128.203	103.825	-	9.657	(179.059)	62.626	100,00%	62.626
		PT Boma Bisma Indra (BBI)	Audited	TS	92.945	24.153	35.731	152.829	132.242	87.135	219.378		295.113	9.597	-	-	(371.258)	(66.548)	100,00%	(66.548)
		PT Krakatau Steel (KS)	Audited	S	11.539.057	3.181.445	668.913	15.389.415	8.596.615	1.314.363	9.910.978	39.063	2.000.000	1.303.465			2.135.908	5.439.373	100,00%	5.439.373
5	DOK DAN PERKAPALAN	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Audited	KS	580.291	450.914	6.779	1.037.984	966.749	1.200.592	2.167.341	456	76.600	84	-	324.786	(2.459.116)	(2.057.646)	99,00%	(2.037.070)
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	Audited	S	217.292	110.339	19.340	346.971	200.736	77.094	277.830	2.601	40.535	402	-	2.145	23.458	66.540	100,00%	66.540
		PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	Audited	KS	73.122	103.506	108.842	285.470	63.129	222.275	285.404		3.521	56.694	-	-	(60.148)	67	100,00%	67
		PT PAL Indonesia	Unaudited	KS	2.210.036	774.310	46.888	3.031.234	2.253.033	93.093	2.346.126		1.137.331			31.616	(483.840)	685.107	100,00%	685.107
6	ENERGI	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited	KS	16.060	11.401	-	27.461	12.714	848	13.562		15.555	0	-	3.380	(5.037)	13.898	100,00%	13.898
		PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	Audited	S	7.177.973	18.372.607	-	25.550.580	3.297.977	14.182.522	17.480.499	966.664	2.294.217	1.809.063	28.160	175.016	2.796.961	7.103.417	54,58%	3.877.045
		PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Audited	KS	31.075.630	259.643.313	-	290.718.943	40.653.690	123.078.686	163.732.376	-	46.107.154	-	30.965.460	-	49.913.953	126.986.567	100,00%	126.986.567
		PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	Audited	S	4.949.953	1.156.875	-	6.106.828	1.353.426	675.743	2.029.169	79.527	1.152.066	30.485	-	-	2.815.581	3.998.132	65,02%	2.599.465
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	PT Batan Teknologi	Audited	S	16.367	8.026	11	24.404	5.616	1.042	6.658		27.200	-	-	-	(9.454)	17.746	100,00%	17.746
		PT Industri Kereta Api (INKA)	Audited	S	326.872	48.391	-	375.263	122.421	11.819	134.240		220.280	-	-	95.494	(74.751)	241.023	100,00%	241.023
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	Audited	KS	669.331	82.445	4.930	756.707	268.804	44.615	313.419	2.881	350.000	-	-	2.847	87.559	440.406	100,00%	440.406
		PT LEN Industri	Audited	S	317.781	9.063	19.722	346.566	256.000	6.909	262.909	1.619	45.601	-	-	24.593	11.844	82.038	100,00%	82.038
		PT Dirgantara Indonesia	Unaudited	KS	1.972.802	385.852	43.090	2.401.744	1.279.779	1.151.417	2.431.196		1.950.417	-	1.815.549	144.386	(3.939.804)	(29.452)	100,00%	(29.452)
8	INDUSTRI FARMASI	PT Biofarma	Audited	S	469.433	460.154	1.384	930.971	136.954	20.412	157.365	-	450.000	18.894	-	-	304.711	773.606	100,00%	773.606
		PT Indo Farma, Tbk	Audited		844.984	115.828	5.000	965.812	634.576	34.641	669.216	1	309.927	75.100	-	-	(88.433)	296.595	80,66%	239.233
		PT Kimia Farma, Tbk	Audited	S	950.618	446.975	48.077	1.445.670	449.855	48.050	497.905	-	555.400	43.580	-	-	348.785	947.765	90,03%	853.272
9	INDUSTRI PERTAHANAN	PT Dahana	Audited	S	368.971	34.772	37.016	440.759	223.116	17.608	240.724		76.090	6.398	-	8.083	109.465	200.036	100,00%	200.036
		PT PINDAD	Unaudited	S	813.296	144.059	21.441	978.796	486.259	290.593	776.852	2	70.000	297.542	-	2.614	(168.213)	201.943	100,00%	201.943
10	INDUSTRI SANDANG	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	Audited	KS	20.185	286.734	1.337	308.255	300.450	57.693	358.143	-	197.500	1.369	-	-	(248.757)	(49.888)	100%	(49.888)
		PT Primissima	Audited	KS	37.818	13.847	366	52.031	45.098	606	45.703	-	13.000	121	-	1.756	(8.550)	6.327	52,79%	3.340
11	JASA KONSTRUKSI	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)	Audited	S	966.914	305.736	-	1.272.649	536.831	265.527	802.358		1.000	433.729	-	130.779	(95.217)	470.291	100,00%	470.291
		PT Adhi Karya	Audited	S	4.652.976	470.405	1.987	5.125.369	3.963.051	562.418	4.525.469	15.620	173.989	19.144	-	6.827	384.320	584.279	51,00%	297.982
		PT Brantas Abipraya	Audited	S	297.282	65.860	3.101	366.243	222.673	210.649	433.322	-	10.000	-	-	(84.665)	7.585	(67.079)	100,00%	(67.079)
		PT Hutama Karya (HK)	Audited	S	1.719.195	233.005	-	1.952.200	1.414.342	1.651.008	3.065.349	-	200.000	-	-	-	101.192	301.192	100,00%	301.192
		PT Istaka Karya	Audited	KS	463.715	135.530	7.128	606.373	371.842	253.076	624.919	-	50.000	-	-	45.712	(114.258)	(18.546)	100,00%	(18.546)
		PT Nindya Karya	Audited	S	885.921	78.196	39.734	1.003.851	849.059	72.244	921.302	18.126	17.000	-	-	89.162	(23.832)	82.530	100,00%	82.530
		PT Pembangunan Perumahan (PP)	Audited	S	2.651.547	131.584	-	2.783.131	2.101.078	257.176	2.358.254	-	110.000	-	-	193.268	121.609	424.878	51,00%	216.688
		PT Waskita Karya	Prognosa		1.805.370	298.007	9.274	2.112.651	1.579.251	112.558	1.691.809		180.000	-	-	-	240.842	420.842	100,00%	420.842
		PT Wijaya Karya (WIKA)	Audited	S	5.229.930	484.491	57.003	5.771.424	3.620.587	683.440	4.304.026	82.756	584.615	565.878	-	(12.745)	246.893	1.384.641	68,42%	947.372
12	JASA LAINNYA	Perum Jasa Tirta I	Audited	S	48.867	40.844	1.249	90.760	13.214	390	13.604		30.570	-	764	45.822	-	77.156	100,00%	77.156
		Perum Jasa Tirta II	Audited	S	140.146	190.387	11.961	342.494	38.610	13.472	52.082		124.727	-	39.820	125.864	-	290.411	100,00%	290.411
		PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	Audited	S	2.181.867	262.985	2.969	2.447.021	141.583	21.241	162.824	-	301.359	1.500.000	-	-	482.838	2.284.197	100,00%	2.284.197
13	JASA PEMBIAYAAN	Perum Pegadaian	Audited	S	10.293.774	429.912	48.401	10.772.086	6.565.285	2.262.802	8.828.087	-	205.000	46.252	-	-	1.892.748	1.944.000	100,00%	1.944.000
		Perum Penjaminan Kredit Indonesia	Audited	S	1.024.536	46.582	196.064	1.267.182	79.069	129.905	208.974	-	699.733	-	-	(13.097)	371.571	1.058.208	100,00%	1.058.208
		PT Danareksa	Audited	TS	2.811.467	145.900	40.265	2.997.632	1.240.423	1.008.002	2.248.425	1	701.480	85.927	-	114.470	(152.672)	749.205	100,00%	749.205
		PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	Audited	S	150.093	5.728	3.045	158.867	11.429	12.747	24.175	-	102.000	-	-	(4.543)	37.235	134.691	100,00%	134.691
		PT PANN Multi Finance	Audited	S	490.009	27.447	1.643.840	2.161.296	1.782.039	1.788.057	3.570.097	-	45.997	192.066	-	-	(1.846.863)	(1.408.801)	93,10%	(1.311.593)
		PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	Audited	S	2.249.308	66.484	13.696	2.329.489	35.760	1.836.389	1.872.148	1	300.000	-	-	(779)	158.119	457.339	100,00%	457.339
14	JASA PENILAI	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	Audited	S	58.093	45.812	1.820	105.725	26.465	3.139	29.604	-	45.000	13.104	-	978	17.038	76.120	100,00%	76.120
		PT Sucofindo	Audited	S	512.957	210.200	18.452	741.609	291.860	40.496	332.356	339	300.000	-	-	88.402	20.512	408.914	95,00%	388.468
		PT Surveyor Indonesia (SI)	Audited	S	236.959	41.878	63.980	342.817	33.355	50.129	83.484	-	25.000	-	-	209.543	24.789	259.332	85,12%	220.743
		PT Survey Udara Penas	Prognosa	KS	463	7.043	-	7.506	5.528	970	6.498	-	13.000	-	-	154	(12.145)	1.009	100,00%	1.009
15	KAWASAN INDUSTRI	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	Audited	S	152.308	296.007	-	448.315	32.764	38.956	71.720		300.000	-	-	50.469	26.126	376.595	88,74%	334.191
		PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	Audited	S	39.083	20.983	1.420	61.486	72.001	1.334	73.335		40.000	-	-	-	12.951	52.951	60,00%	31.771
		PT Kawasan Industri Medan (KIM)	Audited	S	81.661	20.532	-	102.192	28.710	2.736	31.446		30.000	-	-	-	40.747	70.747	60,00%	42.448
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	Audited	S	21.335	12.956	303	34.594	6.765	-	6.765		14.000	-	-	11.902	1.927	27.829	60,00%	16.697
		PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam	Audited	S	26.927	20.091	9.062	56.080	10.751	7.924	18.675		26.184	-	-	5.562	5.658	37.404	100,00%	37.404
16	KEBANDARUDARAAN	PT Angkasa Pura I (AP I)	Audited	S	2.467.055	5.521.592	168.956	8.157.603	454.255	170.644	624.898	-	1.800.000	-	4.308.830	1.116	1.422.759	7.532.705	100,00%	7.532.705
		PT Angkasa Pura II (AP II)	Audited	S	2.782.195	4.121.379	422.893	7.326.467	363.968	131.495	495.463	-	1.900.000	200.055	2.052.068	-	2.678.882	6.831.004	100,00%	6.831.004
17	KEHUTANAN	Perum Perhutani	Unaudited	S	1.221.656	304.363	693	1.526.712	223.848	101.233	325.081	-	700.000	-	-	2.320	499.311	1.201.631	100,00%	1.201.631
		PT Inhutani I	Audited	KS	59.709	362.344	39.255	461.308	76.152	79.408	155.560	-	445.333	16.001	6.168	-	(161.754)	305.748	100,00%	305.748
		PT Inhutani II	Audited	KS	63.235	153.364	4.376	220.975	28.708	21.473	50.181	-	183.083	6.785	-	-	(19.073)	170.794	100,00%	170.794
		PT Inhutani III	Audited	KS	47.193	180.562	2.769	230.524	18.612	5.907	24.519	-	324.120	2.302	-	103	(120.519)	206.005	100,00%	206.005
		PT Inhutani IV	Audited	KS	47.078	41.692	485	89.255	14.364	6.244	20.608	-	92.253	2.301	-	-	(25.907)	68.647	100,00%	68.647
		PT Inhutani V	Unaudited	TS	5.313	142.479	481	148.273	141.861	5.858	147.719		132.659	44.861	-	-	(176.884)	536	100,00%	536
18	KERTAS	PT Kertas Kraft Aceh	Unaudited	TS	154.296	253.266	45.717	453.279	502.571	42.883	545.454		498.994	300.000	-	-	(891.169)	(92.175)	96,65%	(89.087)
		PT Kertas Leces	Audited	KS	325.258	795.113	67.011	1.187.382	517.015	844.482	1.361.497	-	140.073	276.976	-	612.430	(1.203.594)	(174.115)	100,00%	(174.115)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	PT Bina Karya	Audited	S	31.297	30.838	-	62.135	16.612	41.136	57.749	-	2.728	-	-	987	671	4.386	100,00%	4.386
		PT Indah Karya	Audited	KS	14.069	4.104	4.029	22.203	19.266	1.363	20.629	-	7.000	-	-	1.900	(7.326)	1.574	100,00%	1.574
		PT Indra Karya	Audited	KS	45.855	17.172	345	63.372	59.428	2.707	62.135	-	2.000	6.002	-	(6.764)	-	1.238	100,00%	1.238
		PT Virama Karya	Audited	S	38.859	2.927	263	42.049	22.521	5.322	27.843	-	10.000	-	-	-	4.205	14.205	100,00%	14.205
		PT Yodya Karya	Audited	S	46.306	4.146	150	50.602	38.490	-	38.490	-	8.000	-	-	2.102	2.010	12.112	100,00%	12.112
20	LOGISTIK	Perum Bulog	Unaudited	S	9.535.857	3.014.865	2.498.651	15.049.373	9.504.864	46.694	9.551.558		6.354.565	-	1.202.254	101.443	(2.160.447)	5.497.815	100,00%	5.497.815
		PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	Audited	S	104.962	30.021	4.521	139.504	42.740	5.783	48.523	-	60.000	-	-	10.962	20.019	90.981	100,00%	90.981
		PT Pos Indonesia (POSINDO)	Audited	KS	5.940.002	701.109	21.831	6.662.941	6.081.848	270.110	6.351.958	(30.781)	425.000	-	21.326	(2.181)	(102.381)	341.764	100,00%	341.764
		PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	Audited	KS	35.622	15.310	57	50.989	58.261	-	58.261	-	11.000	-	-	3.149	7.271	21.420	100,00%	21.420
21	PARIWISATA	PT Bali Tourism & Development Corporation	Audited	S	160.449	87.764	36.942	285.155	26.099	46.956	73.055	2.154	150.000	-	-	34.589	25.357	209.946	100,00%	209.946
		PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Audited	S	86.883	136.268	1.979	224.930	76.866	78.054	154.920	-	101.700	82	-	12.704	(44.475)	70.011	100,00%	70.011
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Audited	S	28.197	76.402	3.388	107.987	9.839	-	9.839	0	78.377	-	-	-	19.771	98.148	100,00%	98.148
22	PELABUHAN	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	Audited	S	642.180	810.271	2.376	1.454.807	134.638	122.429	257.067	-	455.059	-	50.155	-	692.527	1.197.740	100,00%	1.197.740
		PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	Audited	S	2.091.502	4.193.927	128.318	6.413.747	908.522	581.840	1.490.362	38.853	1.009.958	-	7.653	25.778	3.841.344	4.884.732	100,00%	4.884.732
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	Audited	S	1.654.241	2.148.699	631.781	4.434.721	585.127	663.807	1.248.933	267.048	809.222	2.939	222.304	-	1.884.275	2.918.739	100,00%	2.918.739

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2008
NERACA

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	Audited	S	358.382	900.779	22.606	1.281.767	105.035	107.656	212.691	-	350.625		292.795	(9.490)	435.146	1.069.076	100,00%	1.069.076
23	PELAYARAN	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Audited	S	502.148	906.779	4.119	1.413.046	101.016	13.918	114.934	-	405.753	7.742	716.511	-	168.107	1.298.113	100,00%	1.298.113
		PT Djakarta Lloyd	Unaudited	KS	74.567	841.953	199.709	1.116.229	937.595	86.374	1.023.969	-	180.640	-	1.030.702	-	(1.119.072)	92.270	100,00%	92.270
		PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Unaudited	KS	105.175	14.928	2.458	122.561	112.062	2.844	114.906	-	25.837			-	(17.981)	7.855	100,00%	7.855
		PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	Unaudited	S	1.115.695	4.878.069	18.335	6.012.099	503.583	421.544	925.127	-	359.000	3.194.908	2.923.879	60.017	-	6.537.804	100,00%	6.537.804
24	PENGERUKAN	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Audited	KS	94.819	286.737	25.930	407.486	84.557	161.777	246.334	-	482.923	-	13.836	-	(335.607)	161.152	100,00%	161.152
25	PENUNJANG KONSTRUKSI	PT Amarta Karya	Audited	S	39.913	26.999	-	66.911	40.734	25.017	65.751	-	11.250	886	-	2.333	(13.308)	1.160	100,00%	1.160
		PT Jasa Marga	Audited	S	3.906.983	10.651.060	84.717	14.642.760	1.237.276	6.521.661	7.758.937	311.815	3.395.621	2.343.266	-	712	832.409	6.572.008	70,00%	4.600.406
26	PERBANKAN	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	Audited	S	11.113.889	8.728	68.640	11.191.257	2.050.925	4.855.095	6.906.020	-	3.000.000		-	-	284.490	3.284.490	100,00%	3.284.490
		PT Bank Mandiri, Tbk	Audited	S	342.317.065	10.727.479	5.394.134	358.438.678	302.434.902	13.253.680	315.688.582	28.069	10.452.824	6.809.056	-	72.845	13.179.144	30.513.869	66,97%	20.435.138
		PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	Audited	S	193.434.787	5.826.677	2.479.605	201.741.069	171.001.025	15.278.318	186.279.343	30.578	7.789.288	5.812.879	-	(768.439)	2.597.420	15.431.148	76,36%	11.783.225
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	Audited	S	236.573.729	3.440.351	6.062.816	246.076.896	212.496.883	7.876.821	220.363.704	-	6.162.650	2.706.137	-	163.184	13.324.726	22.356.897	56,79%	12.696.368
		PT Bank Tabungan Negara (BTN)	Audited	S	42.956.948	1.176.626	858.597	44.992.171	34.145.959	7.767.742	41.913.701	-	2.559.804	-	-	-	430.474	2.990.278	100,00%	2.990.278
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	Unaudited	S	162.334	28.154	4.322	194.810	18.563	86.505	105.068	-	32.317	10.926	1.003	35.015	10.481	89.742	100,00%	89.742
		Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	Unaudited	S	1.083.702	826.278	14.720	1.924.700	498.928	535.474	1.034.402	-	363.573	-	-	331.811	194.914	890.298	100,00%	890.298
		PT Balai Pustaka (BP)	Unaudited	TS	102.836	5.674	9.502	118.012	168.854	10.687	179.540	-	10.000	-	-	20.880	(92.408)	(61.528)	100,00%	(61.528)
		PT Pradnya Paramita	Unaudited	KS	2.471	1.727	-	4.198	892	772	1.664	-	1.871	-	-	3.488	(2.824)	2.534	100,00%	2.534
28	PERDAGANGAN	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	Unaudited	KS	715.549	306.972	74.257	1.096.778	988.491	572.989	1.561.480	679	156.200	19.355	-	196.904	(837.840)	(465.381)	100,00%	(465.381)
		PT PP Berdikari	Audited	KS	219.472	74.281	8.001	301.754	125.315	15.000	140.315	-	75.000	-	-	66.370	5.670	147.040	100,00%	147.040
		PT Sarinah	Audited	S	107.114	84.714	4.846	196.674	76.920	21.225	98.145	-	47.950	-	-	38.623	11.956	98.529	100,00%	98.529
29	PERIKANAN	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	Unaudited	S	38.758	64.443	5.312	108.513	20.321	7.243	27.564	-	24.498	4.400	47.037	-	5.718	81.653	100,00%	81.653
		PT Perikanan Nusantara	Unaudited	KS	60.178	28.236	7.393	95.807	81.367	111.095	192.463	-	10.896	133.676	-	-	(241.226)	(96.654)	100,00%	(96.654)
30	PERKEBUNAN	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	Audited	S	67.703	416.108	15.807	499.617	217.456	261.455	478.910	-	120.000	-	-	(108.480)	9.187	20.707	100,00%	20.707
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	Audited	S	486.830	1.327.415	220.863	2.035.108	956.710	950.127	1.906.837	-	446.591	-	-	-	(318.320)	128.271	100,00%	128.271
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	Audited	S	1.210.100	3.686.675	128.361	5.025.135	1.176.859	1.322.387	2.499.246	-	315.000	-	-	1.298.598	912.292	2.525.890	100,00%	2.525.890
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	Audited	S	1.252.542	3.508.376	237.130	4.998.048	1.072.045	1.427.218	2.499.263	-	975.000	-	-	721.203	802.582	2.498.785	100,00%	2.498.785
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	Audited	S	877.431	1.649.159	199.665	2.726.256	775.913	730.261	1.506.173	-	250.000	-	-	559.607	410.477	1.220.083	100,00%	1.220.083
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	Audited	S	331.277	807.174	-	1.138.451	314.629	331.847	646.476	-	200.000	-	-	156.505	135.470	491.975	100,00%	491.975
		PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	Audited	S	1.342.129	1.762.207	52.623	3.156.958	1.082.406	879.579	1.961.985	-	365.000	-	-	279.931	550.042	1.194.973	100,00%	1.194.973
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	Audited	S	519.527	807.547	445.940	1.773.015	599.152	384.113	983.265	10.516	270.000	422.828	-	-	86.406	779.234	100,00%	779.234
		PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	Audited	S	930.994	609.257	15.220	1.555.471	1.080.228	117.678	1.197.906	-	165.000	168.607	-	-	23.958	357.565	100,00%	357.565
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	Audited	S	1.218.680	642.240	36.033	1.896.952	922.135	255.390	1.177.525	6.253	250.000	2.295	-	-	460.879	713.174	100,00%	713.174
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	Audited	KS	957.179	694.295	6.441	1.657.915	865.427	373.144	1.238.570	-	165.000	-	-	-	254.345	419.345	100,00%	419.345
		PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	Audited	S	257.483	695.380	33.061	985.924	256.755	180.752	437.506	-	200.000	232.632	-	-	115.786	548.418	100,00%	548.418
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	Audited	S	478.162	1.322.728	132.613	1.933.504	583.502	41.481	624.983	-	460.000	265.529	-	-	210.991	936.520	100,00%	936.520
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	Audited	TS	321.142	296.857	35.560	653.559	776.167	126.046	902.213	-	235.000	30.591	-	-	(514.245)	(248.654)	100,00%	(248.654)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	Audited	S	2.329.757	2.273.579	70.685	4.674.021	3.120.693	853.099	3.973.792	177.559	352.425	136.676	-	-	33.569	522.670	100,00%	522.670
31	PERTAMBANGAN	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	Audited	S	5.819.532	4.425.509	-	10.245.041	725.942	1.405.029	2.130.970	50.933	953.846	2.526	-	51.972	7.054.793	8.063.138	65,00%	5.241.040
		PT Pertamina	Unaudited	S	162.371.717	81.519.187	50.536.167	294.427.071	96.931.012	47.302.294	144.233.306	1.081.491	82.569.779			(24.445.272)	90.987.767	149.112.274	100,00%	149.112.274
		PT Sarana Karya	Unaudited	KS	4	1.000		1.004	39		39		1.000			(35)	965	965	100,00%	965
		PT Timah, Tbk	Audited	S	4.305.906	1.479.097	-	5.785.003	1.640.906	323.250	1.964.156	266	251.851	120.792	-	34.438	3.413.700	3.820.581	65,00%	2.483.378
32	PERTANIAN	PT Pertani	Audited	S	791.353	62.470	7.297	861.120	774.891	13.226	788.117		51.315	35.952	-	(17.059)	2.794	73.002	100,00%	73.002
		PT Sang Hyang Seri (SHS)	Audited	S	802.191	150.836	13.822	966.849	749.472	49.956	799.428	-	134.000		-	33.421	-	167.421	100,00%	167.421
33	PUPUK	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	Unaudited	S	14.640.954	14.443.692	1.545.150	30.629.796	10.791.991	8.502.916	19.294.907	80.621	4.253.949	35.058	-	3.556.153	3.409.108	11.254.268	100,00%	11.254.268
34	SEMEN	PT Semen Baturaja	Audited	S	371.019	362.207	13.702	746.927	323.755	127.580	451.335		60.414	1	-	-	235.177	295.592	100,00%	295.592
		PT Semen Gresik, Tbk	Audited	S	7.083.422	3.519.542	-	10.602.964	2.092.099	337.149	2.429.249	96.251	593.152	1.247.355		(193.510)	6.422.588	8.069.585	51,59%	4.163.099
35	TELEKOMUNIKASI	Perum Produksi Film Negara (PFN)	Unaudited	KS	1.025	30.320	-	31.345	7.378		7.378		40.000		-	16.782	(32.815)	23.967	100,00%	23.967
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	Audited	S	14.622.310	70.758.843	5.875.097	91.256.250	26.998.151	20.260.248	47.258.399	9.683.780	5.040.000	1.073.333	-	(3.299.225)	31.499.963	34.314.071	52,47%	18.004.593
		Perum LKBN Antara	Unaudited	KS	64.727	11.510	33.222	109.459	66.079	391	66.470			-	56.072	34.262	(47.344)	42.990	100,00%	42.990
36	USAHA PENERBANGAN	PT Garuda Indonesia (GIA)	Audited	S	4.798.917	8.271.144	-	13.070.061	6.070.186	6.698.004	12.768.190	47.242	8.152.629	8.402	-	1.886.195	(9.792.597)	254.629	96,00%	244.444
		PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	Unaudited	KS	415.376	615.283	-	1.030.658	2.066.861	727.692	2.794.553	-	1.403.556		-	82.742	(3.250.193)	(1.763.895)	95,79%	(1.689.635)
		PT Sarana Multi Finansial*)	Audited	S	676.471	591.366	375	1.268.212	6.991	3.088	10.078	-	1.000.000		-	-	258.134	1.258.134	100,00%	1.258.134
		PT Sarana Multi Infrastruktur*)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Grand T		**TOTAL**			1.213.937.193	607.039.745	85.092.740	1.965.043.072	1.038.667.481	373.360.072	1.412.027.552	13.186.811	226.453.590	36.987.222	47.046.675	(8.843.338)	220.519.321	522.163.472		466.476.020

*) BUMN di bawah binaan Departemen Keuangan

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS AUDITED TAHUN 2008
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)

No	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Laba Usaha	Pendapatan Lain lain	Beban Lain-lain	EBIT	Beban	Laba Sebelem Pajak	Pajak	Laba Rugi Sebelum Pos Luar Biasa	Pos Luar Biasa	Laba Rugi Sebelum Hak Minoritas	Hak Minoritas	Laba Rugi Bersih
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
1	PT Atmindo	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	PT Semen Kupang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	PT INALUM	Audited	S	7.114.456	4.893.871	2.220.585	250.713	537.472	1.933.826	0	1.933.826	577.640	1.356.186	0	1.356.186	0	1.356.186
4	PT Bank Bukopin	Audited	S	3.371.830	1.903.932	1.467.898	309.393	1.226.454	550.837	-	550.837	181.995	368.842	-	368.842	62	368.780
5	PT SIER	Audited	S	115.834	88.674	27.160	8.021	532	34.648	-	34.648	6.853	27.796	-	27.796	1	27.794
6	PT JIEP	Audited	S	39.360	28.737	10.623	5.851	554	15.920	-	15.920	3.419	12.501	-	12.501	-	12.501
7	PT Kertas Padalarang	Audited	KS	43.619	56.975	(13.356)	293	3.627	(16.689)	2.276	(18.965)	(549)	(18.417)	-	(18.417)	-	(18.417)
8	PT Rekayasa Industri	Audited	n.a	2.888.329	2.855.505	32.825	62.542	19.518	75.849	7.721	68.128	26.205	41.923	-	41.923	1.205	40.719
9	PT Freeport Indonesia*	Audited	S	37.364.477	21.969.762	15.394.715	153.683		15.548.398		15.548.398	5.312.042	10.236.356	-	10.236.356	-	10.236.356
10	PT Bahana PUI	Audited		429.380	267.094	162.286	65.157	48.752	178.692	65.348	113.343	37.283	76.060	0	76.060	26.230	49.830
11	PT Indosat, Tbk	Audited	S	18.659.133	13.925.854	4.733.279	596.692	1.146.562	4.183.409	1.858.294	2.325.115	419.830	1.905.285	-	1.905.285	26.763	1.878.522
12	PT Kertas Basuki Rahmat	Audited	Run off	10.506	16.078	(5.572)	-	40.254	(45.825)	-	(45.825)	-	(45.825)	-	(45.825)	-	(45.825)
13	PT Kertas Blabak	Audited	Run off	55.502	75.542	(20.040)	-	10.407	(30.447)	-	(30.447)	-	(30.447)	-	(30.447)	-	(30.447)
14	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited	S	3.732.148	1.936.247	1.795.900	63.992	1.305.444	554.448	0	554.448	150.484	403.964	0	403.964	0	403.964
15	Asean Copper Product	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
16	PT JIHD Tbk	Audited	n.a	970.094	923.303	46.791	196.105	418.017	(175.121)	-	(175.121)	53.967	(229.087)	7.895	(221.193)	177.335	(43.858)
17	PT Intirub	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
18	PT Socfindo	Audited	S	2.510.765	1.176.382	1.334.383	99.026	26.544	1.406.864	-	1.406.864	425.259	981.605	-	981.605	-	981.605
19	PT PPLI	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Grand Total			77.305.432	50.117.956	27.226.444	1.811.468	4.784.136	24.482.890	1.933.639	22.551.527	7.194.977	15.410.517	7.895	15.410.517	231.596	15.356.256

Keterangan:

a. PT Intirub berhenti beroperasi pada bulan Agustus 2006

b. PT Semen Kupang berhenti beroperasi pada tahun 2008

c. PT Asean Copper Product tidak jelas keberadaanya

d. Laporan PT Freeport dan PT Inalum disusun atas asumsi kurs tengah BI tahun 2008 Rp. 10.950

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS AUDITED TAHUN 2008
NERACA

(Rp Juta)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	Aktiva Lancar	Aktiva Tak Lancar	Aktiva Lain-lain	TOTAL Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban J. Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lain	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	PT Atmindo	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
2	PT Semen Kupang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
3	PT INALUM*	Audited	S	5.615.408	7.331.472	0	12.946.881	2.784.968	3.705.856	6.490.824	0	10.079.212	0	0	(3.623.156)	0	6.456.056	n.a	
4	PT SIER	Audited	S	148.387	50.295	0	198.682	26.987	14.704	41.691	15	100.000	-	-	438	56.537	156.976	50,00%	78.488
5	PT JIEP	Audited	S	108.181	52.764	8.936	169.881	15.568	30.084	45.652	-	50.003	-	-	62.122	12.105	124.230	50,00%	62.115
6	PT Kertas Padalarang	Audited	KS	16.369	19.040	1.282	36.691	40.022	195	40.217	-	61.327	-	-	162	(65.015)	(3.526)	40,76%	(1.429)
7	PT Bank Bukopin	Audited	S	31.643.946	482.574	506.543	32.633.063	30.465.096	-	30.465.096	0	782.633	218.410	-	28.206	1.133.918	2.163.167	18,19%	381.474
8	PT Rekayasa industri	Audited	S	1.437.883	95.623	213.768	1.747.274	1.216.119	15.778	1.231.897	8.536	50.300	-	-	(5.108)	461.650	506.841	4,97%	
9	PT Freeport indonesia*	Audited	S	12.854.424	34.102.111	5.425.900	52.382.435	9.947.856	12.922.215	22.870.071		249.102	2.676.487	-	85.005	26.501.770	29.512.363	9,36%	2.762.357
10	PT BPUI	Audited		1632290,781	203236,399	209766,395	2.045.294	2035755,157	464561,156	2.500.316	0	129.918	22.500	-	-	4.729	(612.170)	17,78%	
11	PT Indosat	Audited	S	9.659.773	41.280.728	752.822	51.693.323	10.675.245	23.319.519	33.994.764	288.938	543.393	0	-	1.963.982	14.902.246	17.409.621	14,29%	2.487.835
12	PT Kertas Basuki Rahmat	Audited	Run off	3.646	1.039.714	-	1.043.360	77.780	528.791	606.571	-	668.625	(231.836)	-	-	-	436.789	10,00%	
13	PT Kertas Blabak	Audited	Run off	5.948	37.833	156	43.937	57.557	122.388	179.945	-	63.531	-	-	-	(199.539)	(136.008)	1,00%	
14	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited	S	3.243.696	1.838.553	0	5.082.249	2.535.482	212.233	2.747.715	0	951.504	0	0	0	1.383.030	2.334.534	n.a	
15	PT Asean Copper Product	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
16	PT JIHD Tbk	Audited	n.a	2.620.736	2.640.688	225.620	5.487.044	2.749.419	967.213	3.716.632	594.596	965.020	1.219.437	-	(474.066)	(534.574)	1.175.816	1,00%	11.758
17	PT Intirub	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
18	PT Socfindo	Audited	S	703.835	842.353	85.660	1.631.847	588.174	206.049	794.223	-	42.250	-	-	3.671	791.700	837.620	10,00%	
19	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
	Grand Total			69.694.523	90.016.984	7.430.454	167.141.961	63.216.029	42.509.586	105.725.615	892.085	14.736.818	3.904.997	-	(1.958.745)	44.448.557	60.362.310		5.782.599

Keterangan:

a. PT Intirub berhenti beroperasi pada bulan Agustus 2006

b. PT Semen Kupang berhenti beroperasi pada tahun 2008

c. PT Asean Copper Product tidak jelas keberadaanya

d. Laporan PT Freeport dan PT Inalum disusun atas asumsi kurs tengah BI tahun 2008 Rp. 10.950

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2008

(Rp Juta)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Sumber a)	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)	Selisih Kurs	Saldo Dana Setelah Selisih Kurs	Saldo Dana Awal	Koreksi Periode Lalu	Saldo Dana Setelah Koreksi	Total Saldo Dana Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(6)-(9)	(11)	(12)=(10) ± (11)	(13)	(14)	(15)=(13)+(14)	(16)=(12)+(15)
1	Universitas Indonesia	2	1.150.320	-	1.150.320	1.046.896	-	1.046.896	103.424	13.282	116.706	543.858	14.716	558.574	675.280
2	Universitas Gadjah Mada	2	788.924	-	788.924	550.922	-	550.922	238.002	-	238.002	-	0	-	238.002
3	Institut Teknologi Bandung	2	410.291	-	410.291	400.973	-	400.973	9.318	-	9.318	93.476	9.877	103.353	112.671
4	Institut Pertanian Bogor	2	456.547	-	456.547	432.520	-	432.520	24.027	-	24.027	-	-	-	24.027
5	Universitas Sumatra Utara	2	181.930	26.455	208.385	210.384	-	210.384	(1.999)	-	(1.999)	1.960.638	49.222	2.009.860	2.007.861
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2	331.176	-	331.176	289.330	1.578	290.908	40.268	-	40.268	-	-	-	40.268
7	Universitas Airlangga	2	400.321	-	400.321	323.917	-	323.917	76.404	-	76.404	1.100.589	-	1.100.589	1.176.993
8	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas	2	634.398	-	634.398	244.173	287.317	531.490	102.909	-	102.909	-	-	-	102.909
TOTAL			4.353.907	26.455	4.380.362	3.499.115	288.895	3.788.010	592.353	13.282	605.635	3.698.561	73.815	3.772.376	4.378.011

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan III;

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2008

(Rp Juta)

No.	BADAN HUKUM MILIK NEGARA	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Tetap	Aktiva Lain-lain	Investasi jk.pendek	Investasi jk.panjang	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Aktiva Bersih	Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat	Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer	Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen PMP*	Ekuitas Dana Tidak Lancar	Saldo Perubahan Modal	Total Ekuitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+...(8)	(10)	(11)	(12) =(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Universitas Indonesia	2	698.942	388.896	23.023	-	35.229	1.146.090	30.523	304	30.827	1.115.263	-	-	-	-	-	1.115.263
2	Universitas Gadjah Mada	2	638.898	3.330.397	86.765	-	-	4.056.060	75.761	36.872	112.633	3.943.427	795.489	3.117.213	-	21.992	8.733	3.943.427
3	Institut Teknologi Bandung	2	267.318	182.513	50.615	-	-	500.446	133.996	-	133.996	366.450	-	-	-	-	-	366.450
4	Institut Pertanian Bogor	2	74.885	2.199.148	-	-	-	2.274.033	38.224	30.360	68.584	2.205.449	615.875	1.496.350	93.224	-	-	2.205.449
5	Universitas Sumatra Utara	2	144.929	1.782.341	778	-	-	2.053.475	18.632	-	18.632	2.034.843	126.296	-	-	1.783.120	-	1.909.416
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2	131.185	983.683	254.279	-	-	1.369.147	1.239	100	1.339	1.367.808			-	-	-	1.367.808
7	Universitas Airlangga	2	120.889	1.075.838	-	-	-	1.196.727	19.733	-	19.733	1.176.993	-	-	-	-	-	1.176.993
8	Badan Pelaksana Keg. Usaha Hulu Migas	2	267.148	16.024	270.663	-	-	553.836	152.766	350.913	503.680	50.156	50.156	-	-	-	-	50.156
TOTAL			**2.344.195**	**9.958.840**	**686.123**	-	**35.229**	**13.149.813**	**470.875**	**418.549**	**889.424**	**12.260.389**	**1.587.816**	**4.613.563**	**93.224**	**1.805.112**		**12.134.962**

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Laporan Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan III;

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2008

(Rp Juta)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET	NON APBN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	3.000.000	2.309.273	690.727	132.833	-	T.A 2008
2	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	325.874.095	192.790.613	133.083.482	567.498.036	-	T.A 2008
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SABANG (BPKS)	441.000.000	402.852.199	38.147.801	325.910.856	-	T.A 2008
4	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	701.728.340	T.A 2008
5	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	19.571.495	12.984.077	6.587.418	20.655.275	-	T.A 2008
6	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	4.597.971.787	-	SEMESTER I 2008
7	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	-	-	-	-	-	-
8	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
9	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	27.232.000	2.814.136	24.417.864	6.296.564	-	SEMESTER I 2008
10	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
11	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	5.913.308	1.181.113	4.732.195	219.000	-	T.A 2008
12	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-
14	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.091.909	954.324	137.585	16.850	-	T.A 2008
15	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.900.000	380.775	1.519.225	70.000	-	SEMESTER I 2008
16	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000	1.368.331	31.669	-	-	T.A 2008
17	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-
18	Badan Pengelola KAPET BUKARI - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.175.000	1.165.000	10.000	-	-	T.A 2008
19	Badan Pengelola KAPET Batui - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000	1.389.997	10.003	-	-	SEMESTER I 2008
20	Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.900.000	1.730.637	169.363	-	-	T.A 2008
21	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.300.000	1.057.123	242.877	-	-	T.A 2008
22	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.500.000	1.097.321	402.679	-	-	T.A 2008
23	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.500.000	1.369.385	130.615	-	-	T.A 2008
24	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-
25	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	-	-	-	-	-	-
26	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	25.633.130	5.017.135	20.615.995	2.767.117	-	T.A 2008
27	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKOR KAMLA)	112.564.717	97.898.268	14.666.449	69.917.501	-	T.A 2008
28	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	2.900.000	2.640.075	259.925	2.804.742	2.500	T.A 2008
29	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN)	1.000.000	403.013	596.987	-	-	SEMESTER I 2008
30	Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal (BPPMI)	12.752.500	12.752.500	-	45.542.349	2.044.449	T.A 2008
31	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
32	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (Badan Pengembangan Suramadu)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
33	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN)	749.999	738.614	11.385	738.614	-	T.A 2008

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2008

(Rp Juta)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET	NON APBN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Dewan Pers	13.269.161	11.671.555	1.597.606	3.327.105	-	T.A 2008
35	Dewan Gula Indonesia (DGI)	816.400	736.907	79.493	-	-	T.A 2008
36	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	-	-	-	-	-	-
37	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	5.495.790	900.924	4.594.866	96.400	-	SEMESTER I 2008
38	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	6.000.000	1.844.242	4.155.758	-	-	T.A 2008
39	Dewan Pertimbangan Presiden (DPP)	38.869.903	28.588.930	10.280.973	6.112.298	-	T.A 2008
40	Dewan Riset Nasional (DRN)	5.000.000	4.796.145	203.855	39.500	-	T.A 2008
41	Dewan Buku Nasional (DBN)	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
42	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	8.297.210	7.891.836	405.374	646.497	-	T.A 2008
43	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DETIKNAS)	3.400.000	1.831.883	1.568.117	-	-	T.A 2008
44	Dewan Pengupahan Nasional (DPN)	268.360	239.400	28.960	-	-	T.A 2008
45	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
46	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
47	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
48	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
49	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
50	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
51	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
52	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	8.384.043	4.675.515	3.708.528	9.469.987	10.780.706	T.A 2008
53	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	5.712.934	3.281.820	2.431.114	-	-	T.A 2008
54	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	86.939.983	47.644.794	39.295.189	28.306.556	-	T.A 2008
55	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	19.880.488	16.829.836	3.050.652	5.945.881	-	T.A 2008
56	Komisi Nasional Lanjut Usia	3.550.795	27.936	3.522.859	608.390	-	SEMESTER I 2008
57	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	10.015.000	7.982.467	2.032.533	2.937.520	-	T.A 2008
58	Komisi Banding Merk	546.000	353.623	192.377	-	-	T.A 2008
59	Komisi Banding Paten	55.250	55.250	-	-	-	T.A 2008
60	Komisi Hukum Nasional RI (KHN)	10.078.700	7.479.368	2.599.332	765.597	-	T.A 2008
61	Komisi Kepolisian Nasional	10.703.433	9.210.574	1.492.859	-	-	T.A 2008
62	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	20.534.032	14.953.628	5.580.404	49.567	38.163.645	T.A 2008
63	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
64	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	671.017	119.255	551.762	-	-	SEMESTER I 2008
65	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	3.122.808	2.993.820	128.988	-	2.056.643	T.A 2008
66	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	3.530.570	3.297.561	233.009	275.914	-	T.A 2008

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2008

(Rp Juta)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET	NON APBN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	65.000.000	64.866.705	133.295	-	-	T.A 2008
68	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
69	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	21.452.720	10.788.637	10.664.083	8.512.785	-	T.A 2008
70	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	864.000	764.385	99.615	1.355.666	-	T.A 2008
71	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)	1.072.288	-	1.072.288	-	-	SEMESTER I 2008
72	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI)	19.040.431	14.120.792	4.919.639	31.570	49.485.872	T.A 2008
73	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
74	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	25.706.050	19.034.340	6.671.710	6.752.554	-	T.A 2008
75	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.998.640	340.940	1.657.700	-	-	SEMESTER I 2008
76	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
77	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	-	-	-	-	13.957.857	T.A 2008
78	Lembaga Sensor Film (LSF)	15.140.544	14.127.665	1.012.879	6.060.031	-	T.A 2008
79	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	360.000.000	341.224.285	18.775.715	937.067.391	114.113.289	T.A 2008
80	Lembaga Penyiaran Publik RRI	541.508.106	525.001.834	16.506.272	4.064.228.260	-	T.A 2008
81	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF
82	Lembaga Kerjasama Tripartit (LKT)	792.550	701.673	90.877	-	-	T.A 2008
83	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	843.900	629.104	214.796	-	-	T.A 2008
84	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	-	-	-	-	-	BELUM AKTIF
85	Komisi Ombudsman Nasional (KON)	14.429.636	9.080.821	5.348.815	2.206.678	-	T.A 2008
86	Otorita Asahan	-	-	-	444.000	2.841.652	SEMESTER I 2008
87	Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	240.778.517	133.983.188	106.795.329	8.367.059.718	495.921.435	T.A 2008
88	Sekretariat Pengadilan Pajak	26.454.652	14.660.711	11.793.941	8.588.125	-	T.A 2008
89	Staf Khusus Presiden	-	-	-	-	-	-
90	Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)	8.641.180	1.814.091	6.827.089	3.060.179	-	T.A 2008
	J U M L A H	**2.600.223.244**	**2.073.440.349**	**526.782.895**	**19.104.489.693**	**1.431.096.388**	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
UNAUDITED PER 31 DESEMBER 2008

(Rp Juta)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	38.652.032	4.897.172	43.549.204	44.298.862	-	44.298.862	(749.658)
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	46.753.220	2.181.163	48.934.383	42.661.036	-	42.661.036	6.273.347
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.893.694	-	3.893.694	2.827.543	-	2.827.543	1.066.151
TOTAL		**89.298.946**	**7.078.335**	**96.377.281**	**89.787.441**	-	**89.787.441**	**6.589.840**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2008

(Rp Juta)

NO	NAMA YAYASAN	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	TOTAL Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	TOTAL Kewajiban	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	KET
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9=(7+8)	12=(10+11)	13=(9+12)	14
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	15.927.051	25.055.321	876.405	41.858.777	13.563.135	-	13.563.135	28.295.642	41.858.777	T.A 2008
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	27.399.562	12.009.523	68.804	39.477.889	10.827.798	-	10.827.798	28.650.091	39.477.889	T.A 2008
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	6.475.027	21.790		6.496.817	12.570		12.570	6.484.247	6.496.817	T.A 2008
TOTAL		**49.801.640**	**37.086.634**	**945.209**	**87.833.483**	**24.403.503**	-	**24.403.503**	**63.429.980**	**87.833.483**	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No	Nama BLU	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara	Setor Ke Kas Negara	Surplus (Defisit) dengan APBN	Dikurangi APBN	Surplus (Defisit) tanpa APBN	Keterangan
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=11-12	14	15=13-14	16
I	**BIDANG KESEHATAN**														
	1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	1	3	369.158.870.458	3.408.887.767	308.992.403.712	-	681.560.161.937	498.200.261.591	183.359.900.346	-	183.359.900.346	308.992.403.712	(125.632.503.366)	
	2 RSUP Fatmawati, Jakarta	1	3	158.096.172.573	1.269.282.501	85.958.334.538	-	245.323.789.612	219.938.432.250	25.385.357.362	-	25.385.357.362	85.958.334.538	(60.572.977.176)	
	3 RSUP Persahabatan, Jakarta	1	3	117.101.272.545	2.754.878.492	61.848.414.054	-	181.704.565.091	167.809.445.801	13.895.119.290	-	13.895.119.290	61.848.414.054	(47.953.294.764)	
	4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	1	3	326.376.628.422	8.983.066.802	33.480.711.693	-	368.840.406.917	352.349.854.413	16.490.552.504	-	16.490.552.504	33.480.711.693	(16.990.159.189)	
	5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	1	3	126.412.163.000	6.075.501.000	59.737.553.000	-	192.225.217.000	197.706.798.000	(5.481.581.000)	-	(5.481.581.000)	59.737.553.000	(65.219.134.000)	
	6 RS Kanker Dharmais, Jakarta	1	3	165.734.330.757	2.825.242.142	36.911.187.593	-	205.470.760.492	196.955.918.417	8.514.842.075,00	-	8.514.842.075,00	36.911.187.593	(28.396.345.518,00)	
	7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	1	3	204.501.225.666	16.445.125.228	95.575.742.269	-	316.522.093.163	329.117.489.266	(12.595.396.103)	-	(12.595.396.103)	95.575.742.269	(108.171.138.372)	
	8 RS Kariadi, Semarang	1	3	162.763.521.724	2.860.010.495	90.096.471.847	-	255.720.004.067	231.599.240.594	24.120.763.473	-	24.120.763.473	90.096.471.847	(65.975.708.374)	
	9 RS Sardjito, Yogyakarta	1	3	178.082.827.885	3.701.225.794	83.691.451.779	-	265.475.505.458	280.066.429.064,37	(14.590.923.607)	-	(14.590.923.607)	83.691.451.779	(98.282.375.386)	
	10 RSUP Sanglah, Denpasar	1	3	141.266.750.018	7.429.902.736	77.912.027.647	-	226.608.680.402	230.637.902.295	(4.029.221.894)	-	(4.029.221.894)	77.912.027.647	(81.941.249.541)	
	11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	1	3	99.894.163.731	824.805.206	90.745.846.121	-	191.464.815.058	154.516.253.929	36.948.561.129	-	36.948.561.129	90.745.846.121	(53.797.284.992)	
	12 RS Djamil, Padang	1	3	99.256.592.222	443.820.763	68.597.202.047	-	168.297.615.032	199.002.768.544,59	(30.705.153.512,59)	-	(30.705.153.513)	68.597.202.047	(99.302.355.560)	
	13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	1	3	117.921.189.101	1.542.028.905	65.732.848.801	-	185.196.066.807	184.306.363.448	889.703.359	-	889.703.359	65.732.848.801	(64.843.145.442)	
	14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta	1	3	6.765.167.472	659.353.819	27.712.542.132	-	35.137.063.423	47.141.651.512	(12.004.588.089)	-	(12.004.588.089)	27.712.542.132	(39.717.130.221)	
	15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta	1	3	44.377.301.320	453.784.075	33.688.847.823	-	78.519.933.218	70.299.327.463	8.220.605.755	-	8.220.605.755	33.688.847.823	(25.468.242.068)	Perbaikan
	16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	1	3	44.245.036.413	2.719.936.278	92.119.365.032	869.500.000	139.953.837.723	128.382.144.761	11.571.692.962	-	11.571.692.962	92.119.365.032	(80.547.672.070)	
	17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	1	3	112.440.063.989	1.322.883.567	40.327.256.926	-	154.090.204.482	67.436.551.757,04	86.653.652.725	-	86.653.652.725	40.327.256.926	46.326.395.799	
	18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga	1	3	15.210.768.026	350.781.206	23.369.365.598	-	38.930.914.830	26.188.630.169	12.742.284.661	-	12.742.284.661	23.369.365.598	(10.627.080.937)	
	19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	1	3	5.534.260.409	239.212.272	11.027.879.426	170.856.000.000	187.657.352.107	15.623.814.769	172.033.537.338	-	172.033.537.338	11.027.879.426	161.005.657.912	Pendapatan lainnya merupakan keuntungan krn revaluasi aset
	20 RS Mata Cicendo, Bandung	1	3	34.652.051.734	29.968.983	20.509.036.061	1.818.550.000	57.009.606.778	45.290.398.799	11.719.207.978	-	11.719.207.978	20.509.036.061	(8.789.828.083)	Pendapatan lainnya merupakan keuntungan krn revaluasi aset
	21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	1	3	12.933.308.097	130.557.700	27.586.798.702	-	40.650.664.499	34.677.221.146	5.973.443.353	10.308.843	5.963.134.510	27.586.798.702	(21.623.664.192)	
	22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	1	3	29.373.305.608	140.500.042	37.842.970.783	-	67.356.776.433	56.407.348.618	10.949.427.816	-	10.949.427.816	37.842.970.783	(26.893.542.967)	
	23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	1	3	51.259.220.065	59.495.530	39.958.487.893	402.664.955.164	493.942.158.652	76.139.149.220	417.803.009.432	-	417.803.009.432	39.958.487.893	377.844.521.539	Pendapatan lainnya merupakan keuntungan krn revaluasi aset
	24 RS Adam Malik, Medan	1	4	88.167.945.619	2.234.050.525	88.983.266.071	-	179.385.262.215	184.395.395.249	(5.010.133.034)	-	(5.010.133.034)	88.983.266.071	(93.993.399.105)	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No	Nama BLU	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara	Setor Ke Kas Negara	Surplus (Defisit) dengan APBN	Dikurangi APBN	Surplus (Defisit) tanpa APBN	Keterangan
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=11-12	14	15=13-14	16
	25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	1	4	6.051.572.884	216.000.246	20.189.237.699	-	26.456.810.829	25.727.170.057	729.640.772	-	729.640.772	20.189.237.699	(19.459.596.927)	
	26 RS Paru Dr. M. Gunawan P, Cisarua Bogor	1	4	11.631.087.375	22.170.318	18.908.367.930	13.988.089.722	44.549.715.345	27.002.760.955	17.546.954.390	-	17.546.954.390	18.908.367.930	(1.361.413.540)	Pendapatan lainnya merupakan keuntungan krn revaluasi aset
	27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	1	4	9.578.997.730	203.668.014	23.823.030.687		33.605.696.431	27.923.250.542	5.682.445.888	3.517.835.045	2.164.610.843	23.823.030.687	(21.658.419.844)	
	28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	1	3	19.456.828.679	206.527.399	41.543.782.350	-	61.207.138.428	59.020.802.643	2.186.335.785	-	2.186.335.785	41.543.782.350	(39.357.446.565)	
	Sub Total (I)			**2.758.242.623.522**	**67.552.667.806**	**1.706.870.430.214**	**590.197.094.886**	**5.122.862.816.428**	**4.133.862.775.274**	**989.000.041.154**	**3.528.143.888**	**985.471.897.266**	**1.706.870.430.214**	**(721.398.532.948)**	
II	**BIDANG PEMBIAYAAN**														
	1 Pusat Investasi Pemerintah, Jakarta	1	4	38.843.740.675	335.554.213.189	2.424.836.089	23.298.000	376.846.087.953	5.716.145.611	371.129.942.342	173.655.258.795	197.474.683.547	2.424.836.089	195.049.847.458	Perbaikan
	2 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM	1	3	12.171.780.952	-	385.279.415.947	-	397.451.196.899	10.512.449.112	386.938.747.787	-	386.938.747.787	-	386.938.747.787	
	3 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (PPPH)	1	4	-	1.237.547.232	3.513.441.100	500.000	4.751.488.332	2.395.521.183	2.355.967.149	102.630.086	2.253.337.063	3.513.441.100	(1.260.104.037)	
	4 Badan Pengatur Jalan Tol	1	4	44.522.196.272	20.499.270.552	-	-	65.021.466.823	32.711.896.583	32.309.570.240	12.722.044.450	19.587.525.790	-	19.587.525.790	
	Sub Total (II)			**95.537.717.899**	**357.291.030.973**	**391.217.693.136**	**23.798.000**	**844.070.240.007**	**51.336.012.489**	**792.734.227.518**	**186.479.933.331**	**606.254.294.187**	**5.938.277.189**	**600.316.016.998**	
III	**BIDANG TELEKOMUNIKASI**														
	1 Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP)	1	4	693.502.957.221	30.152.269.113	1.052.197.078	86.018.863.478	810.726.286.890	21.797.493.146	788.928.793.744	217.096.567.900	571.832.225.844	1.052.197.078	570.780.028.766	Perbaikan
	Sub Total (III)			**693.502.957.221**	**30.152.269.113**	**1.052.197.078**	**86.018.863.478**	**810.726.286.890**	**21.797.493.146**	**788.928.793.744**	**217.096.567.900**	**571.832.225.844**	**1.052.197.078**	**570.780.028.766**	
IV	**BIDANG PENDIDIKAN**														
	1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	1	3	20.124.182.000	16.805.114.522	96.175.266.303	23.451.300	133.128.014.125	127.675.222.716	5.452.791.409	-	5.452.791.409	96.175.266.303	(90.722.474.894)	Berdasarkan SAP
	2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	1	3	76.114.390.921	5.241.550.480	103.223.114.863	14.961.598.528	199.540.654.792	148.557.687.744	50.982.967.048	-	50.982.967.048	103.223.114.863	(52.240.147.815)	
	3 UIN Malang	1	3	20.503.348.474	23.202.099	68.460.889.774	27.578.800	89.015.019.147	79.931.985.602	9.083.033.545	-	9.083.033.545	68.460.889.774	(59.377.856.229)	Berdasarkan SAP
	4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta	1	3	2.797.923.669	2.612.077	-	53.250.000	2.853.785.746	145.607.604	2.708.178.142	-	2.708.178.142	-	2.708.178.142	
	5 Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Bandung	1	4	1.803.531.021	43.871.107	21.369.655.499	-	23.217.057.627	22.809.402.959	407.654.668	219.938.076	187.716.592	21.369.655.499	(21.181.938.907)	
	6 Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri, Bekasi	1	4	3.006.255.615	-	22.978.992.369	-	25.985.247.984	24.551.625.119	1.433.622.865	599.447.370	834.175.495	22.978.992.369	(22.144.816.874)	
	7 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	1	4	-	-	29.615.532.702	21.000	29.615.553.702	29.615.532.702	21.000	-	21.000	29.615.532.702	(29.615.511.702)	Berdasarkan SAP
	8 Akademi Kimia Analis, Bogor	1	3	2.664.687.500	8.334.775	4.486.238.054	690.550	7.159.950.879	8.229.695.236	(1.069.744.357)	-	(1.069.744.357)	4.486.238.054	(5.555.982.411)	Berdasarkan SAP
	9 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung	1	3	15.563.985.000	35.140.273	52.740.992.325	-	68.340.117.598	67.486.166.902	853.950.696	-	853.950.696	52.740.992.325	(51.887.041.629)	
	10 Universitas Diponegoro, Semarang	1	3	132.839.823.597	-		-	132.839.823.597	302.568.029.424	(169.728.205.827)		(169.728.205.827)	-		Berdasarkan SAP

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008

(Dalam Rp)

No	Nama BLU	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara	Setor Ke Kas Negara	Surplus (Defisit) dengan APBN	Dikurangi APBN	Surplus (Defisit) tanpa APBN	Keterangan
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=11-12	14	15=13-14	16
	11 Universitas Padjadjaran, Bandung	1	3	379.397.681.479	467.014.287	206.610.118.372	362.792.802	586.837.606.940	528.839.846.722	57.997.760.218	362.792.802	57.634.967.416	206.610.118.372	(148.975.150.956)	Berdasarkan SAP
	12 Universitas Negeri Malang	1	3	110.095.442.764	656.667.542	105.405.442.377	689.464.130	216.847.016.813	228.509.593.962	(11.662.577.149)	-	(11.662.577.149)	105.405.442.377	(117.068.019.526)	Berdasarkan SAP
	13 Universitas Hasanuddin, Makassar	1	3	197.067.339.571	309.837.752	276.364.445.965	1.351.251.930	475.092.875.218	436.516.936.521	38.575.938.697	-	38.575.938.697	276.364.445.965	(237.788.507.268)	Berdasarkan SAP
	14 Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	1	3	-	-	65.631.336.464	5.728.441	65.637.064.905	65.631.336.464	5.728.441	-	5.728.441	65.631.336.464	(65.625.608.023)	Berdasarkan SAP
	15 Universitas Brawijaya, Malang	1	3	274.197.094.299	1.035.474.284	160.104.673.349	279.871.477	435.617.113.409	409.107.315.206	26.509.798.203	279.871.477	26.229.926.726	160.104.673.349	(133.874.746.623)	Berdasarkan SAP
	16 Universitas Negeri Semarang	1	3	72.136.658.539	235.668.189	97.135.157.087	485.006.640	169.992.490.455	164.592.495.020	5.399.995.435	483.939.640	4.916.055.795	97.135.157.087	(92.219.101.292)	Berdasarkan SAP
	17 Institut Tekhnologi Sepuluh Nopember, Surabaya	1	3	145.954.387.269	1.370.954.204	102.029.754.547	2.444.448.268	251.799.544.288	233.992.543.260	17.807.001.028	-	17.807.001.028	102.029.754.547	(84.222.753.519)	Berdasarkan SAP
	Sub Total (IV)			**1.454.266.731.718**	**26.235.441.591**	**1.412.331.610.050**	**20.685.153.866**	**2.913.518.937.225**	**2.878.761.023.163**	**34.757.914.062**	**1.945.989.365**	**32.811.924.697**	**1.412.331.610.050**	**(1.209.791.479.526)**	
V	**BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI**														
	1 BPPT Enjiniring	1	3	31.565.341.856	109.061.634	1.139.482.172	-	32.813.885.662	34.765.272.196	(1.951.386.534)	-	(1.951.386.534)	1.139.482.172	(3.090.868.706)	Berdasarkan SAP Perbaikan
	2 PP IPTEK	1	3	3.369.370.000	-	3.724.522.092	915.933.185	8.009.825.277	8.512.775.123	(502.949.846)	-	(502.949.846)	3.724.522.092	(4.227.471.938)	
	3 Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN)	1	3	-	-	411.068.800	-	411.068.800	411.068.800	-	-	-	-	-	
	Sub Total (V)			**34.934.711.856**	**109.061.634**	**5.275.073.064**	**915.933.185**	**41.234.779.739**	**43.689.116.119**	**(2.454.336.380)**	-	**(2.454.336.380)**	**4.864.004.264**	**(7.318.340.644)**	
VI	**BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI**														
	1 Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta	1	3	79.885.839.834	26.949.255.959	-	-	106.835.095.792	99.848.329.391	6.986.766.401	-	6.986.766.401	-	6.986.766.401	
	2 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	1	4	25.081.469.276	30.596.677.532	-	-	55.678.146.809	42.318.727.554	13.359.419.255	-	13.359.419.255	-	13.359.419.255	
	Sub Total (VI)			**104.967.309.110**	**57.545.933.491**	-	-	**162.513.242.601**	**142.167.056.945**	**20.346.185.656**	-	**20.346.185.656**	-	**20.346.185.656**	
VII	**LAIN-LAIN**														
	1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	1	3	10.629.291.232	85.976.010	2.449.752.920	-	13.165.020.162	13.586.970.883	(421.950.721)	-	(421.950.721)	2.449.752.920	(2.871.703.641)	Perbaikan
	Sub Total (VII)			**10.629.291.232**	**85.976.010**	**2.449.752.920**	-	**13.165.020.162**	**13.586.970.883**	**(421.950.721)**	-	**(421.950.721)**	**2.449.752.920**	**(2.871.703.641)**	
	Total			**5.152.081.342.558**	**538.972.380.618**	**3.519.196.756.462**	**697.840.843.415**	**9.908.091.323.052**	**7.285.200.448.019**	**2.622.890.875.033**	**409.050.634.484**	**2.213.840.240.549**	**3.133.506.271.715**	**(749.937.825.339)**	

Catatan :

a) 1. Laporan Unaudited
   2. Laporan Audited

b) 3. BLU Penuh
   4. BLU Bertahap

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2008
BERDASARKAN SAK

(Dalam Rp)

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELON I/SATKER	ASET										KEWAJIBAN				EKUITAS DANA		KETERANGAN
			Aset Lancar			Aset Tetap					Aset Lainnya		Utang Jk Pendek		Utang Jk. Panjang				
			Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyediaan Barang dan/atau Jasa	**DEPARTEMEN KESEHATAN (024)**																	
		A. BIDANG KESEHATAN																	
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	70.554.151.362	145.728.088.516	16.958.574.399	21.913.297.097	135.075.908.298	206.945.862.258	-	138.247.262.250	119.440.000	6.718.010.672	6.903.650.398	57.487.977.656	520.543.049	-	168.849.186.223	508.498.237.526	
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	26.696.826.541	23.611.305.438	6.188.909.155	104.330.980.000	62.553.857.284	58.384.973.398	-	305.800.000	-	-	1.364.810.308	10.686.392.609	-	-	44.445.838.217	225.575.610.882	
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	14.343.469.104	37.995.449.364	7.694.802.965	3.717.751.330	40.720.839.290	41.612.691.493	-	34.804.975	-	599.432.801	12.260.482.825	1.785.580.556	-	-	45.987.458.052	86.685.519.889	
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	115.261.382.734	55.845.025.385	10.381.153.444	186.919.937.408					1.638.400.272	3.143.663.490	22.240.692.823	30.551.312.058	-	260.521.247	128.695.556.882	191.441.479.923	
		5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	35.651.821.000	8.010.886.000	11.384.310.000	39.158.483.000	34.329.833.000	44.345.791.000			-	-	13.758.515.000	2.982.857.000	-	-	38.305.845.000	117.834.107.000	
		6 RS Kanker Dharmais, Jakarta	20.424.333.743	31.250.667.250	7.424.949.139	73.253.070.000	91.210.069.558	18.840.347.859	19.300.225	974.285.786	971.072.166	11.106.780.419	15.729.975.140	8.746.225.501	-	-	36.823.749.491	196.374.926.013	
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	39.430.797.145	51.979.826.680	16.256.552.221	9.646.158.625	109.751.344.254	164.123.975.129	-	22.769.275.375	934.609.490	-	12.616.143.482	25.284.265.304	-	-	69.766.767.260	307.225.362.873	
		8 RS Kariadi, Semarang	79.327.850.276	19.553.188.686	11.488.189.811	46.576.615	171.885.284.354	83.077.251.206			3.783.702.455	-	2.102.886.692	980.000.173	-	-	107.286.341.908	258.792.824.630	
		9 RS Sardjito, Yogyakarta	43.959.831.080	27.764.327.896	8.947.867.029	82.000	117.645.782.471	118.407.591.678	3.128.189.542	95.889.989.920	-	829.772.229	22.781.870.488	10.843.383.178	-	-	47.036.772.338	335.901.387.840	
		10 RSUP Sanglah, Denpasar	40.077.621.804	22.239.496.337	6.694.050.899	1.364.389.360	63.209.855.661	99.780.880.175	-		-	113.712.002	14.854.789.156	46.583.637.311	-	-	7.572.762.573	164.468.837.198	
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	12.360.536.180	18.787.551.601	5.877.677.784	918.600.000	52.872.684.936	38.281.406.208	-	62.792.382.600	1.766.949.259	41.920.829	13.364.717.709	-	-	-	23.661.047.856	156.873.943.832	
		12 RS Djamil, Padang	3.253.018.867	58.929.831.043	8.683.489.884.00	8.798.297.910	129.596.195.400	52.766.907.359	-	17.859.337.300	-	1.794.176.143	11.778.452.186	-	-	-	59.067.887.408	210.814.914.112	
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	19.586.349.076	21.205.258.769	4.568.923.391	12.640.750.000	39.508.941.774	80.238.313.698	-	39.304.904.132	10.860.013	64.898.263	1.944.790.916	15.979.141.996	-	-	27.436.598.324	171.766.667.848	
		14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta	2.948.056.344	1.295.699.724	1.349.274.178	-	39.018.402.287	91.829.908.103	525.982.643	-	-	-	-	-	-	-	5.593.030.246	131.374.273.033	
		15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta	30.387.225.659	3.813.674.319	3.315.803.404	34.752.800	44.297.806.822	23.576.131.014	27.716.772	-	-	1.047.737.321	41.430.253	176.350.400	-	-	37.298.922.729	88.984.144.729	Perbaikan
		16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	12.485.199.773	4.926.790.911	1.158.879.895	12.238.545.003	36.702.589.093	51.446.652.653	8.742.063.866	16.635.029.385	-	-	583.214.460	-	-	-	17.987.856.119	125.764.880.000	
		17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	7.427.154.805	10.476.095.608	7.934.838.002	79.880.925.000	24.391.648.364	25.049.922.374	3.454.437.805	-	-	612.946.949	544.403.199	622.350.451	-	-	24.671.334.766	133.389.880.492	
		18 RS Paru Arie Wirawan, Salatiga	8.039.623.157	181.880.644	7.805.815.648	4.966.578.000	9.869.321.000	12.880.882.006	600.795.180	-	8.000.000	-	661.811.040	-	-	-	15.165.508.410	28.325.576.186	
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	5.251.819.682	594.001.727	1.877.835.358	176.280.000.000	8.697.738.444	7.807.064.974	801.857.225	-	-	37.788.450	22.698.536	1.496.505.306	-	-	6.194.452.825	193.624.449.093	
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	7.221.798.617	4.478.445.612	2.009.021.613	35.097.950.000	26.467.420.423	18.296.020.517	-	-	90.872.281	-	-	-	-	-	13.709.265.842	79.952.263.220	
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	617.627.342	4.739.533.453	3.594.841.809	52.009.700.000	22.030.109.625	17.689.792.478	266.320.750	-	594.416.332	-	-	-	-	-	8.952.002.604	92.590.339.185	
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	8.517.611.660	6.396.872.846	4.123.740.856	4.794.702.325	11.006.936.360	18.516.740.963	318.428.572	-	2.707.777.264	-	1.008.862.544	76.610.000	-	-	17.952.752.817	37.344.585.485	
		23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	13.014.967.545	2.837.767.677	1.391.202.346	386.873.888.111	27.270.705.536	34.781.364.546	4.236.734.370	-	9.250.000	2.023.294.509	819.107.127	3.795.641.012	-	-	12.629.189.429	455.195.237.072	
		24 RS Adam Malik, Medan	5.927.165.717	28.554.985.771	642.405.327	325.000.000	76.732.149.102	26.897.856.547	10.548.060.450	-	-	889.911.051	14.492.731.865	-	-	-	20.631.804.950	115.392.977.149	
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	567.662.123	665.865.351	1.883.568.428	-	14.316.623.619	23.663.633.563	-	-	-	-	-	13.907.000	-	-	2.903.188.902	37.980.257.182	
		26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor	3.645.867.159	286.326.954	2.057.066.568	17.051.953.000	14.449.464.192	10.165.446.267	742.667.015	-	1.006.316.573	-	365.762.153	857.549.331	-	-	4.765.949.197	43.415.847.047	
		27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	2.625.490.120	641.930.412	1.940.401.644	13.500.000.000	14.500.515.998	9.448.834.866	1.671.995.524	-	442.310.000	314.344.268	614.225.483	8.416.667	-	-	4.587.180.027	39.878.000.658	
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	21.835.523.410	3.345.358.264	2.170.710.703	683.796.800	14.604.846.742	3.235.089.064	728.865.377	3.307.326.200	-	38.783.975	1.376.000	12.978.519.369	-	-	14.371.697.008	22.598.718.158	
		DEPARTEMEN KEUANGAN (015)																	
		A. BIDANG PENDIDIKAN																	
		1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta	2.712.498.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.371.500	-	-	2.705.127.242	0	
		DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (019)																	
		A. BIDANG PENDIDIKAN																	
		1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	2.435.508.522	40.200.000	621.202.311	8.129.283.130	10.722.376.250	14.966.003.797	517.335.297	-	84.250.000	-	-	-	-	-	3.096.910.833	34.419.248.474	Berdasarkan SAP
		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (023)																	
		1. Universitas Diponegoro, Semarang	93.846.931.799	-	-	35.507.154.411	190.599.520.845	185.952.790.646	14.027.822.214	29.795.982.249	151.044.000	5.500.000	93.724.719.849	122.211.950	-	-	-	456.039.814.365	Berdasarkan SAP
		2. Universitas Padjadjaran, Bandung	18.693.250.507	13.220.250.006	3.341.763.785	2.091.733.584	192.178.762.366	284.383.100.057	8.718.206.445	-	-	4.689.650	20.308.458.059	338.958.118	-	-	14.607.848.121	487.376.492.102	Berdasarkan SAP
		3. Universitas Negeri Malang, Malang	27.028.769	1.002.571.250	1.080.184.715	2.699.110.885	66.523.262.370	45.446.099.705	6.582.708.880	27.235.532.878	-	-	-	27.028.769	-	-	2.082.755.965	148.486.714.718	Berdasarkan SAP
		4. Universitas Hasanuddin, Makassar	20.647.416.177	-	1.365.808.090	25.912.097.525	173.215.794.449	73.215.867.786	4.145.285.639	77.570.702.266	359.269.000	-	338.958.118	20.308.458.059	-	-	1.365.808.090	354.419.016.665	Berdasarkan SAP
		5. Universitas Brawijaya, Malang	5.675.036.136	4.118.213.100	2.773.386.933	14.910.562.541	130.210.239.834	97.131.152.213	27.137.344.109	38.686.067.000	-	-	-	5.675.036.136	-	-	6.891.600.033	308.075.365.697	Berdasarkan SAP
		6. Universitas Negeri Semarang, Semarang	6.769.713	1.806.374.000	1.416.319.095	4.050.019.239	84.697.751.712	81.971.748.876	14.657.987.076	448.387.000	-	-	-	6.769.713	-	-	3.222.693.095	185.825.893.903	Berdasarkan SAP
		7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	50.017.095.364	5.863.085.000	1.114.114.887	1.411.986.163.763	204.010.227.563	220.043.693.165	2.900.061.404	46.438.768.285	-	-	-	50.017.095.364	-	-	6.977.199.887	1.885.378.914.180	Berdasarkan SAP
		DEPARTEMEN AGAMA (025)																	
		A. BIDANG PENDIDIKAN																	
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	13.401.221.235	-	53.296.275	20.751.674.722	91.912.363.304	197.805.744.000	1.412.499.211	17.575.527.000	-	-	-	-	-	-	13.454.517.510	329.457.808.237	Berdasarkan SAP
		2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	52.884.017.892	6.796.204.732	358.575.944	491.138.987.500	146.910.892.954	210.402.781.909	18.352.144.116	26.496.904.075	1.886.397.486	-	126.298.154	7.709.445.333	-	-	52.203.055.081	895.188.108.040	
		3 UIN Malang	11.178.204.122	-	80.000.000	92.581.349.700	44.607.243.935	183.268.500.730	10.537.608.789	-	-	-	-	100.576.028	-	-	11.157.828.094	330.994.703.154	Berdasarkan SAP
		4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	744.591.930	360.002.500	-	52.260.600.000	4.472.097.272	9.193.259.615	1.590.786.881	477.661.050	-	-	-	-	-	-	1.104.594.430	67.994.404.818	
		5 UIN Alauddin, Makassar	-	-	-	-	4.515.290.600	6.248.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.764.082.600	Berdasarkan SAP
		DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)																	
		A. BIDANG PENDIDIKAN																	
		1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bandung	187.716.592	-	-	185.434.370.000	18.609.132.290	24.138.756.503	1.023.242.084	-	-	-	-	-	-	-	187.716.592	229.205.500.877	
		2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bekasi	356.430.791	690.423.979	-	96.330.000.000	21.650.000.000	47.416.042.528	50.388.000	-	-	-	130.996.180	81.683.095	-	-	834.175.495	165.446.430.528	
		3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	84.388.735	-	-	13.869.000.000	5.880.243.520	15.111.447.500	101.500.000	-	-	-	-	84.388.735	-	-	-	34.962.191.020	Berdasarkan SAP
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)																	
		A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI																	
		1 PP IPTEK	882.859.510	-	511.758.021	-	6.324.793.115	-	143.774.500	-	-	-	200.804.787	-	-	-	1.193.812.744	6.468.567.615	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)																	
		A. BIDANG LAIN-LAIN																	
		1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	7.896.808.534	1.841.631.912	26.998.500	-	3.259.795.449	254.728.658.276	-	-	98.328.125	152.011.234	-	9.514.294.545	-	-	251.144.401	258.238.793.084	Perbaikan
		DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)																	
		A. BIDANG TELEKOMUNIKASI																	
		1. Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP)	1.570.542.101.688	36.947.464	-	-	82.335.988.958	-	-	-	-	-	-	575.339.737	-	-	1.570.003.709.415	82.335.988.958	Perbaikan
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)																	
		A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI																	
		1. BPPT Enjiniring	3.466.547.916	902.695.000	331.100	-	389.606.500	-	-	-	-	-	507.808.779	-	-	-	3.861.765.237	389.606.500	Berdasarkan SAP (Perbaikan)
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)																	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2008
BERDASARKAN SAK

(Dalam Rp)

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELON I/SATKER	ASET										Kewajiban				Ekuitas Dana		Keterangan
			Aset Lancar			Aset Tetap					Aset Lainnya		Utang Jk Pendek		Utang Jk. Panjang				
			Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI																	
		1 Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN)	-	-	6.040.961	-	225.526.100	-	-	-	1.562.000	-	-	-	-	-	6.040.961	227.088.100	
		TOTAL PER DEPARTEMEN																	
		DEPARTEMEN KEUANGAN (015)	**2.712.498.742**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.371.500**	-	-	**2.705.127.242**	-	
		DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (019)	**2.435.508.522**	**40.200.000**	**621.202.311**	**8.129.283.130**	**10.722.376.250**	**14.966.003.797**	**517.335.297**	-	**84.250.000**	-	-	-	-	-	**3.096.910.833**	**34.419.248.474**	
		DEPARTEMEN KESEHATAN (024)	**651.440.782.024**	**596.125.912.238**	**165.384.655.701**	**1.246.446.164.384**	**1.432.714.883.888**	**1.382.091.331.361**	**35.813.375.316**	**398.120.397.923**	**14.083.976.105**	**29.377.183.371**	**170.867.379.783**	**229.934.622.878**	**520.543.049**	**260.521.247**	**1.012.149.347.302**	**4.537.866.248.052**	
		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	**188.913.528.465**	**26.010.493.356**	**11.091.577.505**	**1.497.156.841.948**	**1.041.435.559.139**	**988.144.452.448**	**78.169.415.767**	**220.175.439.678**	**510.313.000**	**10.189.650**	**114.372.136.026**	**76.495.558.109**	-	-	**35.147.905.191**	**3.825.602.211.630**	
		DEPARTEMEN AGAMA (025)	**78.208.035.179**	**7.156.207.232**	**491.872.219**	**656.732.611.922**	**292.417.888.065**	**606.919.078.254**	**31.893.038.997**	**44.550.092.125**	**1.886.397.486**	-	**126.298.154**	**7.810.021.361**	-	-	**77.919.795.115**	**1.634.399.106.849**	
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	**882.859.510**	-	**511.758.021**	-	**6.324.793.115**	-	**143.774.500**	-	-	-	**200.804.787**	-	-	-	**1.193.812.744**	**6.468.567.615**	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	**7.896.808.534**	**1.841.631.912**	**26.998.500**	-	**3.259.795.449**	**254.728.658.276**	-	-	**98.328.125**	**152.011.234**	-	**9.514.294.545**	-	-	**251.144.401**	**258.238.793.084**	
		DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(059)	**1.570.542.101.688**	**36.947.464**	-	-	**82.335.988.958**	-	-	-	-	-	-	**575.339.737**	-	-	**1.570.003.709.415**	**82.335.988.958**	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI (081)	**3.466.547.916**	**902.695.000**	**331.100**	-	**389.606.500**	-	-	-	-	-	**507.808.779**	-	-	-	**3.861.765.237**	**389.606.500**	
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)	-	-	**6.040.961**	-	**225.526.100**	-	-	-	**1.562.000**	-	-	-	-	-	**6.040.961**	**227.088.100**	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	**2.506.498.670.581**	**632.114.087.202**	**178.134.436.318**	**3.408.464.901.384**	**2.869.826.417.464**	**3.246.849.524.136**	**146.536.939.877**	**662.845.929.726**	**16.664.826.716**	**29.539.384.255**	**286.074.427.529**	**324.337.208.130**	**520.543.049**	**260.521.247**	**2.706.335.558.442**	**10.379.946.859.262**	-
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	**SEKRETARIAT NEGARA (007)**																	
		A. BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI																	
		1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta	113.887.921.913	19.420.350.708	148.112.601	12.945.988.400.000	56.325.918.430	789.664.258.136	-	-	-	-	2.042.531.527	22.349.642.091	-	-	109.064.211.604	13.791.978.576.566	
		2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	379.733.526.066	948.613.250.218	131.405.669.214	23.469.041.518.309	25.011.244.917	180.453.027.689	332.337.232.249	1.554.080.000	-	-	777.040.400	25.712.281.082	-	-	1.433.263.124.016	24.008.397.103.164	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAANWILAYAH/KAWASAN	**493.621.447.980**	**968.033.600.925**	**131.553.781.815**	**36.415.029.918.309**	**81.337.163.347**	**970.117.285.825**	**332.337.232.249**	**1.554.080.000**	-	-	**2.819.571.927**	**48.061.923.173**	-	-	**1.542.327.335.620**	**37.800.375.679.730**	
3	Pengelolaan Dana Khusus	**DEPARTEMEN KEUANGAN (015)**																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1, Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.397.985.435.357	48.848.992.892	8.900.180	-	3.782.025.282	-	246.638.876	-	480.173.717	878.970.498.400	-	669.923.802	-	-	3.446.173.404.627	883.479.336.275	Perbaikan
		DEPARTEMEN KEHUTANAN (029)																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.393.967.036.022	871.011.210	-	-	943.882.417	174.037.500	-	-	-	-	-	102.630.086	-	-	1.394.735.417.146	1.117.919.917	
		DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (033)																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	217.923.303.024	568.388.658.390	-	-	-	-	-	-	-	-	21.489.519.090	6.252.755.982	707.595.178.400	-	758.569.686.341	(707.595.178.400)	
		DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM (044)																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	12.567.582.196	-	3.645.000	-	3.596.413.000	-	-	-	-	558.798.185.031	-	-	-	-	12.571.227.196	562.394.598.031	
		TOTAL PER DEPARTEMEN																	
		DEPARTEMEN KEUANGAN (015)	**3.397.985.435.357**	**48.848.992.892**	**8.900.180**	-	**3.782.025.282**	-	**246.638.876**	-	**480.173.717**	**878.970.498.400**	-	**669.923.802**	-	-	**3.446.173.404.627**	**883.479.336.275**	
		DEPARTEMEN KEHUTANAN (029)	**1.393.967.036.022**	**871.011.210**	-	-	**943.882.417**	**174.037.500**	-	-	-	-	-	**102.630.086**	-	-	**1.394.735.417.146**	**1.117.919.917**	
		DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (033)	**217.923.303.024**	**568.388.658.390**	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.489.519.090**	**6.252.755.982**	**707.595.178.400**	-	**758.569.686.341**	**(707.595.178.400)**	
		DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM (044)	**12.567.582.196**	-	**3.645.000**	-	**3.596.413.000**	-	-	-	-	**558.798.185.031**	-	-	-	-	**12.571.227.196**	**562.394.598.031**	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	**5.022.443.356.599**	**618.108.662.492**	**12.545.180**	-	**8.322.320.699**	**174.037.500**	**246.638.876**	-	**480.173.717**	**1.437.768.683.431**	**21.489.519.090**	**7.025.309.870**	**707.595.178.400**	-	**5.612.049.735.310**	**739.396.675.823**	
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	**8.022.563.475.159**	**2.218.256.350.619**	**309.700.763.313**	**39.823.494.819.693**	**2.959.485.901.510**	**4.217.140.847.461**	**479.120.811.002**	**664.400.009.726**	**17.145.000.433**	**1.467.308.067.686**	**310.383.518.546**	**379.424.441.174**	**708.115.721.449**	**260.521.247**	**9.860.712.629.372**	**48.919.719.214.815**	

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
TAHUN 2008

NO			KANWIL DJKN	NILAI (Rp)
1	I		**BANDA ACEH**	**2.722.450.000**
		1	Jl. Persada (Jl. Perdagangan) Kel. Keude Siblah Kec, Blang Pidie, Kab. Aceh Selatan	524.100.000
		2	Jl. Merdeka Kel. Kampung Belakang Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	1.578.950.000
		3	Jl. Merdeka Blanbengkel Kel Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab, Pidie	619.400.000
2	II		**MEDAN**	**25.595.488.000**
		1	Jl. Besar, Simpang Dolok Kel. Simpang Dolok Kec. Simpang Dolok Kab. Batubara	202.840.000
		2	Jl. Ahmad Yani (dahulu Jl. Merdeka) Kel. Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras Kab. Batubara	242.500.000
		3	Jl. Cokroaminoto No. 73 Kel Kisaran Kec. Kota Kisaran Barat Kab Asahan	648.700.000
		4	Jl. Rivai No. 48 Kisaran, sekarang menjadi Jl. Rivai No.39 Kisaran	4.272.050.000
		5	Jl. Rivai No. 67 dahulu 60 kel.. Kisaran Kota, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan	779.690.000
		6	Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	6.752.200.000
		7	Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.541.301.000
		8	Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	232.100.000
		9	Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.827.820.000
		10	Kel. Tanjung Leidong Kec Kualuh Hilir	184.370.000
		11	Jl. Besar Simandulang, Desa Simandulang, Kec. Kualuh Leidong, dahulu Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu	150.100.000
		12	Jl. Jenderal Sudirman dahulu Jl. Besar Kota Pinang No.33 Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu	234.800.000
		13	Jl. Raya Binjai Serbangan Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman, Kab. Asahan	695.800.000
		14	Jl. Pulau Rakyat Gunting Saga Kel. Bandar Pulau Pekan, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan	110.300.000
		15	Jl. Besar Gunug Melayu-Bandar Pulau, Kel. Bandar Pulau Pekan Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan	38.700.000
		16	Jl. Asahan No. 23 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	398.600.000
		17	Jl. Imam Bonjol No. 70 Tanjung Balai, Kel. Karya, Kec. Tg. Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	628.100.000
		18	Jl. Veteran No. 82 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	297.300.000
		19	Jl. Mesjid No. 28 Kel. Tg. Balai Kota II Kec Tg. Balai Selatan Kota Tg. Balai	346.430.000
		20	Jl. Sukaramai No. 30 Dusun I desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tg. Balai Kab. Asahan	397.125.000
		21	Jl. Sukaramai Desa Bagan Asahan Kec. Tg. Balai Kab. Asahan	484.310.000
		22	Jl. Pajak Pagi/Balai Desa, Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan	143.300.000
		23	Jl. Prof. HM Yamin/M. Said, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu	623.540.000
		24	Jl. Jenderalm Ahmad Yani Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Batu	699.160.000
		25	Jl. Kampung Loteng (dahulu Gang Kampung Lorong Tengah) Kel. Langga Payung, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhan Batu	458.836.000
		26	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu	1.079.046.000
		27	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu	1.159.070.000
		28	Jl. Mesjid Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu	967.400.000
3	III		**PEKANBARU**	**176.885.951.000**
		1	Jl. Ahmad Karim No. 12 Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang Bukit Tinggi	3.935.000.000
		2	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 35 Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	1.100.000.000
		3	Jl. Lundang Kel. Parit Ranting, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	780.000.000
		4	Jl. Niaga No. 156 Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	432.530.000
		5	Jl. HOS Cokroaminoto No. 12 Kel. Ranah Kongsi Kec. Padang Barat, Padang	432.530.000
		6	Jl. Plaua Karam No. 82 Kel. Kp. Pondok Kec. Padang Barat, Padang	6.576.750.000
		7	Jl. AR Hakim No. 4 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan, Padang (Jl. Kampung Nias)	2.559.130.000
		8	Jl. Sudirman No. 50 Padang Kel. Jatibaru Padang	133.590.000.000
		9	Jl. Nipah No. 33 Kel. Berop Nipah Kec. Padang Barat, Padang	10.984.950.000
		10	Jl. Klenteng No. 319 Padang Kel. Berok Kec. Padang Timur Padang	242.425.000
		11	Jl. Kampung Nias V Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	1.791.505.000
		12	Jl. Besar Sanglang Kel. Urung Barat Kec, Kundur Utara , Tanjung Batu Kab. Karimun	118.394.000
		13	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	683.909.000
		14	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun No. 51) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	347.769.000
		15	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	2.797.248.000
		16	Jl. Raya Sungai Ungar Desa Sungai Ungar Kec. Undur Kab. Karimun	163.231.000
		17	Jl. Besar Urung Kota Kel. Urung Kec.Kundur Utara , Kab. Karimun	377.534.000
		18	Jl. Besar Tanjung Pinang (Sekarang jl. Jend. Sudirman) Kel. Tanjung Batu Kota , Kec. Kundur Tanjung Batu, Kab. Karimun	2.344.828.000
		19	Jl. Nusantara No. 05 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	891.987.000
		20	Jl. Trikora No, 43 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	204.783.000
		21	Jl. Trikora Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	3.371.495.000
		22	Jl. A. Yani Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimun	340.741.000

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
TAHUN 2008

NO	KANWIL DJKN			NILAI (Rp)
		23	Jl. Pegadaian No. 45 Kel. Tanjung Balai Kec Karimun, Kab. Karimun	602.030.000
		24	Jl. Gang SD Cahay Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimun	826.490.000
		25	Jl. Besar Sawang, Kel. Sawang Kota Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun	150.351.000
		26	Jl. RA Kartini Kel. Pasar Taluk, Kec. Kuantan Tengan, Kab. Kuantan Singingi	770.500.000
		27	Jl. Pasar (Jl. Katib Sutan) Kel. Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi	80.080.000
		28	Jl. Sudirman No. 109 Baserah, Kel. Pasar Usang Kec. Kauntan Singingi (Jl. Raya Teluk Kuantan)	389.761.000
4	**IV**	**PALEMBANG**		**14.119.759.300**
		1	Jl. Kapten Zen Ali Kel Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat	2.261.648.000
		2	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	5.226.531.800
		3	Jl. Pembangunan Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim	12.540.000
		4	Jl. Letnan M. Akip Kel Pasar II Kec. Muara enim, Kab. Muara Enim	820.000.000
		5	Jl. Cut Nyak Dien (dh Jl. Tanjung Priuk) Kel. Tungkai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	417.500.000
		6	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	5.381.539.500
5	**V**	**BANDAR LAMPUNG**		**1.615.040.000**
		1	Jl. WR Supratman No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung	1.615.040.000
6	**VI**	**SERANG**		Sebagian Telah Dinilai Pada Tahun 2007
7	**VII**	**JAKARTA**		Belum Dinilai
8	**VIII**	**BANDUNG**		**3.926.481.000**
		1	Jl. A. Yani No. 7 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	3.926.481.000
9	**IX**	**SEMARANG**		**15.377.991.800**
		1	Jl. Raya Wonogiri Kel. Giritirto Kec. Wonogiri Kota sekarang Jl. Sudirman No. 147A Kel. Giritirto Kec Wonogiri Kab. Wonogiri	1.276.920.000
		2	Jl. Bioskop Sena Kel Kaliurang Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.115.205.000
		3	JL. Cendrawasih No. 37 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes	712.800.000
		4	Jl. Brebes Ds. Klampok Kec. Wanasari	5.263.440.000
		5	Desa. Dukuh Turi Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.956.475.000
		6	Ds. Paguyangan Kec. Paguyangan	33.325.000
		7	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes	157.500.000
		8	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes	209.712.000
		9	Jl. Koonel Sugiri No. 10 Krenj Banyumas	1.829.578.700
		10	Jl. MT Haryono Purworejo	1.678.315.800
		11	Jl. A. Yani No. 33 Kebumen Kab. Kebumen	1.144.720.300
10	**X**	**SURABAYA**		**369.254.703.264**
		1	Jl. Kampung Baru, Kel. Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi(sekarang menjadi Jl. Ki Hajar Dewantoro)	5.086.848.000
		2	Jl. Genteng Ds. Gendoh Kec. Singojuruh (Skrg Menjadi Jl. Raya No. 155 Ds. Gendoh Kec. Sempu) Kab. Banyuwangi	2.568.685.000
		3	Jl. Karyawan No. 4 Mojokerto	3.017.509.000
		4	Jl. PB Sudirman No. 40 Mojokerto	1.805.153.000
		5	Jl. Kabupaten No. 3 Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo	5.471.400.000
		6	Jl. Jenderal Sudirman No. 102 dan 105 Kel. Pakunden, Kec/Kab Ponorogo	17.169.205.886
		7	Jl. Aris Munandar No. 2-4 Kel. Kidul Dalam Kec. Klojen Kotamadya Malang	8.601.830.000
		8	Jl. Madukoro No. 14 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Lawang	2.939.000.000
		9	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Lamongan (Dahulu Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro 16 Kel. Tetis, Kec/Kab. Lamongan	3.187.529.000
		10	Jl. Pramuka No. 3 Sendangharjo, Kec/Kab. Tuban	6.436.995.000
		11	Jl. Stasiun Sepanjang, Wonocolo, Taman, Sidoarjo	4.857.359.000
		12	Jl. Wonocolo, Sepanjang, Sidoarjo	2.121.384.000
		13	Jl. KH. Marzuki No, 27 Desa Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo	5.178.803.000
		14	Jl. Hasanuddin No. 12 Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	13.399.258.000
		15	Jl. Pacet mojosari, Desa Seduri, Mojoasri, Kab. Mojokerto	2.958.371.000
		16	Jl. Tanimbar No. 24 Malang	42.402.000.000
		17	Jl. Mujair No. 10 Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri	2.678.000.000
		18	Jl. Yulius Usman No. 58 Malang	19.585.000.000
		19	Jl. Kartini No. 5 Kediri	10.321.034.000
		20	Jl. Wahidin No. 8 Kediri	2.900.491.527
		21	Jl. Erlangga No. 22/26 Kediri	6.511.962.000
		22	Jl. Basuki Rachmad No. 96 Tulung Agung	7.481.022.000
		23	Jl. Arjuno Malang	16.201.000.000

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
TAHUN 2008

NO	KANWIL DJKN			NILAI (Rp)
		24	Jl. Lawu No,12 Malang	13.511.000.000
		25	Jl. Brawijaya No. 20 Kel. Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kediri	18.825.251.000
		26	Jl. Monginsidi No. 24 Kel. Setonogedong Kec. Kota Kediri Kodya Kediri	2.117.520.000
		27	Jl. Prof. Buya Hamka No. 1A Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang	1.241.971.000
		28	Jl. Basuki Rachmat No. 6 Kel. Baliwerti Kota Kediri	9.630.340.000
		29	Tanah dan Bangunan Rumah Sakit TK.IV,05,07,02 Kediri	83.555.571.000
		30	Tanah dan Bangunan Tempat Perbekalan V-44-02-A Kediri	24.887.683.000
		31	Jl. Ki Hajar Dewantoro 18 Ds. Kalibaru Kec. Kalibaru Banyuwangi (Dh Jl. Saleh No,1 Kab. Banyuwangi)	751.313.000
		32	Jl. Pattimura Desa. Sepanjang Kec. Glenmore Banyuwangi	486.089.000
		33	Jl. Gajahmada Desa. Genteng Kulon, Kec. Genteng Banyuwangi	4.088.161.000
		34	Jl. Suprapto Kec. Pesanggrahan Kab. Banyuwangi	570.562.000
		35	Desa Kebondalem, Kec. Bangotejo Banyuwangi	873.530.000
		36	Jl. A. Yani Ds./Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi	904.142.000
		37	Jl. Muncar, Ds. Kebamen Kec. Srono Banyuwangi	1.112.389.000
		38	Jl. Ikan Cakalang Kec. Kepatihan Kab. Banyuwangi	995.491.000
		39	Jl. Kalipahit Desa/Kec. Tegaldimo Kab. Banyuwangi	690.140.000
		40	Jl. Wijaya Kusuma No.2 Sampang	5.489.396.538
		41	Jl. PB Sudirman No. 19 Sampang	562.126.173
		42	Jl. Veteran No. 385 Sumenep	843.546.144
		43	Jl. Letjen Sunarto No. 15 Bangkalan	2.231.248.871
		44	Jl. Niaga No. 21 Pamekasan (dh No 19)	3.007.393.125
11	**XI**	**PONTIANAK**		Belum Dinilai
12	**XII**	**BANJARMASIN**		**47.068.865.000**
		1.	Jl. H.M. Nurung Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	1.546.416.000
		2.	Jl. Lambung Mangkurat No. 10 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	15.032.368.000
		3.	Jl. Jend. Sudirman No. 18 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	3.196.085.000
		4.	Jl. DI Panjaitan No. 6 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	4.736.905.000
		5.	Jl. Lambung Mangkurat No. 9 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	22.557.091.000
13	**XIII**	**SAMARINDA**		**74.200.602.000**
		1.	Jl. Mulawarman (P. Hidayattullah) Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.718.363.000
		2.	Jl. Nakhoda No.30-32 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.601.252.000
		3.	Jl. P. Hidayattullah 64 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.846.480.000
		4.	JL. Pangeran Diponegoro 9 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.355.675.000
		5.	Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	20.679.099.000
		6.	Jl. Mulawarman Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.906.875.000
		7.	Jl. KH Moh Khalid No. 19 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.250.388.000
		8.	Jl. Mulawarman Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	9.428.370.000
		9.	Jl. Bukit Niaga No. 43 Kel. Kelandaran Iilir, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan	17.724.000.000
		10.	Jl. Sunoi, Rt Kel. Kampung Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	2.791.200.000
		11.	Jl. Letjen Suprapto No. 1 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	5.898.900.000
14	XIV	DENPASAR		Belum Dinilai
15	XV	MAKASSAR		Sebagian Telah Dinilai Pada Tahun 2007
16	**XVI**	**MANADO**		**3.053.000.000**
		1.	Jl. Sultan Hasanuddin No. 22 Kel. Biawao Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	3.053.000.000
17	XVII	JAYAPURA		Sebagian Telah Dinilai Pada Tahun 2007
TOTAL				**733.820.331.364**

DAFTAR ASET BEKAS MILIK ASING /CINA YANG BELUM SELESAI
BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008

NO	KANWIL		PROVINSI	PETUNJUK PENYELESAIAN									JUMLAH
				Disertifikatkan a.n. Pemerintah RI	Disertifikatkan a.n. Pemda	Kompensasi	Ditukar	Hibah	Dikembalikan	Dikeluarkan	Beberapa Alternatif Petunjuk	Penelitian	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
1	I	BANDA ACEH	NANGROE ACEH DARUSSALAM		3	3	5				5		16
2	II	MEDAN	SUMATERA UTARA	11	50	48					24	6	139
3	III	PEKANBARU	SUMATERA BARAT	1	2	1					3	4	11
4			RIAU		5						2		7
5			KEPULAUAN RIAU	3	47						6	2	58
6	IV	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	2	16	5	2				6	10	41
7			BANGKA BELITUNG	4	10	2	2				12	1	31
8			JAMBI	2	9	1							12
9	V	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1	9	1					4	1	16
10			BENGKULU										
11	VI	SERANG	BANTEN		5	1					1	2	9
12	VII	JAKARTA	DKI JAKARTA	4	17	13					1	13	48
13	VIII	BANDUNG	JAWA BARAT	10	56	36					1	1	104
14	IX	SEMARANG	JAWA TENGAH	6	17	16					10		49
15			D.I. YOGYAKARTA	1	2	3						3	9
16	X	SURABAYA	JAWA TIMUR	28	76	26	3				26	11	170
17	XI	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	16	75	45					6	17	159
18	XII	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	4	3	6							13
19			KALIMANTAN TENGAH										
20	XIII	SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR		6	6						5	17
21	XIV	DENPASAR	BALI	1	4		1				1		7
22			NUSA TENGGARA BARAT	2	1		1				2		6
23			NUSA TENGGARA TIMUR		3	4	1				2		10
24	XV	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	3	10	13					7	3	36
25			SULAWESI TENGGARA		1	1					2		4
26			SULAWESI BARAT										
27	XVI	MANADO	SULAWESI TENGAH	1	4	1							6
28			GORONTALO		1								1
29			MALUKU UTARA	1	1						1		3
30			SULAWESI UTARA		2	1		1			6	2	12
31	XVII	JAYAPURA	PAPUA		3								3
32			MALUKU		6						5		11
33			IRIAN JAYA BARAT			1							1
JUMLAH				**101**	**444**	**234**	**15**	**1**	**0**	**0**	**133**	**81**	**1009**

Daftar 41

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2007

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
Sistem Pengendalian Intern							
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan							
2007	1	Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	• Penerimaan pajak tidak dilaporkan sesuai SAI • Tidak ada dokumen pendukung rekonsiliasi penerimaan pajak • Transfer ke daerah dilaporkan dari SAU • LRA berbeda dengan LAK untuk hal yang sama • Belanja lain-lain dilaporkan secara tidak berjenjang • Adanya perbedaan data SAU dan SAI • LK beberapa kementerian negara/lembaga pengguna BA 69 disusun berdasarkan data SAU	√	√	√	• LKPP merupakan hasil konsolidasi LK yang dihasilkan SAI maupun SA-BUN. SAI merupakan sumber utama laporan realisasi belanja (merupakan representasi dari penggunan anggaran) dikontrol dengan catatan akuntansi versi SABUN. SABUN merupakan penyedia data sumber bagi laporan realisasi pendapatan dan penerimaan (pasal 6 ayat 2 huruf a dan pasal 8 huruf e UU 17 Tahun 2003. Secara operasional diatur dalam PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Pemerintah akan menyempurnakan aplikasi rekaman data pembayaran pajak melalui pemotongan SPM oleh KPPN, penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Pajak dalam bentuk valas oleh BI • Pemerintah sedang menyempurnakan sistem akuntansi BUN • Pemerintah telah mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja antara data BUN dan data KL. Rekonsiliasi pendapatan pajak telah dilakukan DJP Pusat dengan DJPB Pusat. Rekonsisliasi tingkat satker (KPP dengan KPPN) tidak dapat dilakukan karena penyetoran pajak dapat dilakukan di mana saja (KPP WP berdomisili tidak sama dengan wilayah kerja KPPN) • Terkait transaksi transfer ke daerah, mulai Tahun 2008 penyusunan LK BA 070 dan 071 dilakukan sesuai PMK No. 171/PMK.05/2007 (mengubah pola penyaluran dana transfer ke daerah menjadi terpusat) dan seluruh dokumen sumber ada pada DJPK. Pemerintah membentuk UAP BUN-DJPK
2007	2	Sistem informasi yang mendukung penyusunan LKPP Tahun 2007 tidak memadai	Kelemahan sistem informasi dan database	√	√	x	• Pemerintah akan menyelesaikan formalisasi kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait TI. • Pemerintah akan menetapkan kebijakan prosedur pengamanan fisik dan aplikasi serta meningkatkan kepedulian kemanan sitem (*security awareness*). • Pemerintah akan melakukan prosedur validasi data secara periodik.

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
							• Pemerintah akan mengoptimalkan kegiatan rekonsiliasi data LKPP.
Pendapatan Negara dan Hibah							
2007	3	Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan tidak dapat menyajikan data realisasi Penerimaan Perpajakan yang akurat	• Penerimaan Perpajakan hanya berdasar SiAP • MPN dan database SiAP masih lemah • Penerimaan Perpajakan MIGAS tidak terintegrasi dalam MPN	√	√	√	• Pemerintah sedang menyempurnakan aplikasi MPN. • Akan menyempurnakan perekaman data pembayaran pajak. • Terkait penerimaan perpajakan untuk migas dan panas bumi, akan dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat PNBP-DJA, Direktorat PKN dan DJP.
2007	4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak dilaporkan secara transparan dan atas realisasi penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar USD11,680,514,651 atau senilai Rp106.931,83 miliar tidak disetor langsung sesuai mekanisme APBN	• Pinjaman Dana Talangan sebesar Rp10.078,33 Miliar dari realisasi penerimaan Migas • Pelaporan Piutang KKKS dan Pertamina tidak jelas karena tidak seluruhnya dapat diakui sebagai PNBP Migas • Penerimaan Piutang PPh KKKS tidak diterima KUN	√	√	√	• Pemerintah mengikuti pendapat KSAP bahwa perlakuan terhadap pendapatan Migas yang belum selesai *earning process* belum dapat diakui sebagai PNBP. • Selanjutnya, Pemerintah akan mengungkapkan lebih ekstensif penerimaan migas termasuk mutasi dari rekening migas tersebut pada LKPP dan terbuka untuk diaudit oleh BPK.
2007	5	Sistem pencatatan PNBP atas hasil lelang sitaan/rampasan/ harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset tidak memadai	• Pendapatan hasil lelang selisih sebesar Rp52,76 miliar antara laporan keuangan menurut kementerian negara/lembaga dan data menurut DJKN • Uang hasil lelang barang rampasan yang sudah disetor ke Kas Negara tidak dicatat sebagai penerimaan Kejaksaan dan tidak dilaporkan melalui SAI.	√	x	x	Pemerintah akan mengatur pencatatan dan pelaporan PNBP terkait hasil lelang sitaan/rampasan/harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset serta pemantauan dan pengawasannya.
2007	6	Penerimaan dan penggunaan Dana Hibah secara langsung pada 12 kementerian negara/lembaga belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi APBN Tahun 2007	12 kementerian negara/lembaga yang menerima hibah senilai Rp1.337,45 miliar tidak melaporkannya dalam Laporan Realisasi APBN	√	x	x	Guna mendukung *law enforcement* pelaksanaan hibah secara *on budget* sedang dipersiapkan reformasi ketentuan hukum: • Penyusunan RPP hibah • Revisi PP No. 2 Tahun 2006 Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri • Penyempurnaan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-67/PB/2006 Tata Cara Pembukuan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang dilaksanakan secara Langsung • Telah disusun Sistem Akuntansi Hibah, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009.
Belanja Negara							
2007	7	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanja bantuan sosial tidak memadai	Realisasi bantuan sosial belum disalurkan seluruhnya dan penganggaran bantuan sosial tidak sesuai dengan realisasinya pada tujuh kementerian negara/lembaga senilai Rp1.015,15 miliar	√	x	x	• Pemerintah sedang menyempurnakan peraturan terkait dengan penyaluran bantuan sosial. • Pemerintah minta KSAP menyusun Buletin Teknis SAP tentang

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
							Belanja Bansos. • Pemerintah akan melakukan penertiban penggunaan klasifikasi belanja Bansos (DJA dan KL), termasuk sosialisasi dan bimbingan teknis. • Pemerintah akan menginstruksikan kepada KL untuk menyusun regulasi internal dalam pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan sosial.
2007	8	Realisasi belanja negara tidak didukung bukti yang valid	Belanja sebesar Rp614,37 miliar yang tidak didukung hak dan bukti-bukti yang sah pada sepuluh kementerian negara/lembaga.	√	x	x	• Pemerintah telah menetapkan kebijakan/mekanisme terhadap pertanggungjawaban pekerjaan yang belum selesai masa pemeliharaannya pada akhir tahun dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun • Beberapa KL telah menindaklanjuti antara lain dengan melengkapi bukti transaksi dan pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan • Menghadapi akhir TA 2008, telah diterbitkan Perdirjen PBN No.47/2008.
Aset							
2007	9	Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sebesar Rp1.468,81 miliar tidak mengalami mutasi dalam waktu lebih dari dua tahun	25 RPL di BI dengan saldo sebesar Rp1.468,50 miliar untuk 24 rekening dan satu rekening bersaldo Rp0,00 yang sudah lebih dari dua tahun tidak ada mutasi transaksi	√	√	x	• Pemerintah telah melakukan penelusuran pembukaan rekening tersebut pada BI namun tidak ditemukan data pendukung untuk mengindentifikasi; • Pemerintah telah memindahbukukan seluruh saldo yang tidak aktif ke rekening 502 (rek. BUN) selanjutnya menutup rekening tersebut.
2007	10	Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan penggantian uang muka dari Rekening Bendahara Umum Negara belum tampak hasilnya	Uang Muka dari BUN ineligible	x	x	√	Pemerintah akan meningkatkan efektifitas pengelolaan uang muka BUN sesuai Perdirjen PBN No. PER 46/PB/2007 Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong. Dengan rekonsiliasi diharapkan dapat diketahui pinjaman yang masih aktif.
2007	11	Transfer antar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tidak akurat	• Selisih penjumlahan untuk MAK berlawanan • Informasi pada rekening koran tidak lengkap • Tidak ada rekonsiliasi laporan rekap kiriman uang • Tidak ada rekonsiliasi antar subdit • LAK disusun dari LAK KPPN	x	x	x	• Pemerintah sedang menata kembali rekening yang dikuasai oleh BUN sesuai PP 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dan PMK No. 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Telah disusun draft peraturan DJPB tentang Petunjuk teknis Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening milik BUN. • Pemerintah akan menyusun bisnis proses dan sistem akuntansi terkait dengan kas.
2007	12	Rekening pemerintah belum selesai ditertibkan dan masih banyak yang tidak jelas statusnya	Masih ditemukan kelemahan dalam pembukaan atau penempatan, pengoperasian, serta penutupan dan pelaporan rekening pemerintah	√	√	√	• Penertiban rekening sudah selesai dilakukan dan terus berlanjut; • Menteri Keuangan selaku BUN telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, dan APIP pada masing-masing KL untuk melakukan investigasi terhadap rekening-rekening yang tidak jelas status/ pertanggungjawabannya dan

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
							saldo penutupnya. • Menteri Keuangan selaku BUN telah membekukan beberapa rekening yang tidak jelas identitasnya dan tidak jelas pertanggungjawabannya.
2007	13	Piutang Pajak sebesar Rp42.042,10 miliar yang disajikan dalam LKPP Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya	• Adanya perbedaan data piutang pajak • Tidak ada rincian piutang pajak • Nilai piutang pajak masih berubah-ubah • Pengungkapan kondisi Piutang Pajak dalam laporan keuangan DJP belum memadai • Data piutang dari KPPBC berbeda dengan saldo piutang pada Neraca tingkat wilayah • Saldo Piutang pajak tidak dapat ditelusuri nilai yang sebenarnya	√	√	√	• Pemerintah (dhi. DJP telah menyusun Peraturan tentang penyusunan LK di lingkungan DJP yang didalamnya mengatur tatacara rekonsiliasi internal data piutang pajak untuk semua tingkatan Unit Akuntansi mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA-E1. • Pemerintah akan melanjutkan validasi data tunggakan pajak sesuai dengan SE-01/PJ.045/2007 tanggal 9 april 2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Validasi tunggakan masih berlangsung.
2007	14	Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan lemah	• Persediaan pada beberapa kementerian negara/lembaga tidak tercatat • Persediaan pada BRR yang tidak tercatat • Kelemahan administrasi data pendukung penilaian persediaan	√	x	√	• Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan dan pelaporan persediaan kepada K/L. • Pemerintah telah menyempurnakan aplikasi untuk pencatatan persediaan yang merupakan bagian dari aplikasi SIMAK-BMN di tingkat Kuasa Pengguna Barang. • Pemerintah akan mengintruksikan kepada K/L untuk menyusun regulasi internal tentang SOP Pencatatan dan Pelaporan Persediaan. • Pedoman pencatatan dan penatausahaan persediaan telah diatur dalam Perdirjen PBN Nomor 40/PB/2006.
2007	15	Penyajian Investasi Non Permanen BLU Pusat Investasi Pemerintah dalam LKPP Tahun 2007 sebesar Rp3.477,61 miliar tidak tepat	Investasi Non Permanen sebesar Rp4.071,25 miliar diantaranya sebesar Rp3.477,61 miliar merupakan dana yang tersimpan dalam bentuk giro dan deposito yang dikelola oleh BLU PIP	x	x	x	• Investasi di LKPP mengikuti *nature* di BLU. • Pemerintah (dhi. Dit. APK) telah mengkaji penyajian dana yang dikelola oleh PIP.
2007	16	Nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Minoritas masing-masing sebesar Rp455.367,88 miliar dan Rp3.239,56 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya	• Nilai PMN tidak dapat Diyakini Kewajarannya • BPYBDS sebesar Rp8,43 triliun belum mencerminkan nilai yang wajar • Data sumber PMN tidak valid	√	√	√	• Pemerintah (Kementerian Negara BUMN & DJKN) akan melakukan koordinasi internal terkait dengan pendataan laporan keuangan BUMN dan perusahaan minoritas. • Untuk mempercepat penyampaian laporan keuangan BUMN kepada pemerintah, sekarang sedang dikembangkan *Executive Information System* berbasis WEB. • Pemerintah (Kementerian BUMN dan DJKN) akan menginventarisasi dan rmerekonsiliasi nilai BDYBDS sebagai penetapan dasar penetapan PMN • Pemerintah akan menerapkan teguran kepada BUMN dan perusahaan minoritas yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Bersama Menkeu dan Meneg BUMN No. 23/PMK.01/2007 dan Per.04/MBU/2007
2007	17	Kewajaran penyajian Investasi Non	• Kementerian Negara KUKM belum memiliki standar operasional	√	x	x	• Pemerintah telah menerbitkan PMK No.99/PMK.05/2008 tentang

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
		Permanen Dana Bergulir dalam Neraca Pemerintah 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini	prosedur yang mengatur tata cara pengembalian dana dari masing-masing KUKM/anggota penerima kepada kementerian apabila dana tersebut telah dapat dikembalikan oleh penerima dana • Dokumen yang mendukung kewajaran penyajian saldo Dana Bergulir pada Dep.Perindustrian tidak diperoleh • Pada KLH, komponen yang diajukan untuk mendapat pinjaman program DNS tidak termasuk di dalam kriteria investasi lingkungan pada Peraturan Menteri Negara LH Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan bagi Kegiatan DNS • kelemahan kebijakan perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan pada DepKeu				Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mengatur bahwa pengeluaran untuk dana bergulir diperlakukan sebagai pembiayaan dan dilaporkan pada neraca KL. KL yang mengelola dana bergulir harus melakukan inventarisasi paling lambat selesai akhir tahun 2009, selanjutnya satker yang boleh mengelola dana bergulir adalah satker BLU. • Pemerintah akan melakukan inventarisasi atas nilai dana bergulir pada Kementerian Negara KUKM sejak tahun 2000 sampai dengan 2007, untuk mendapatkan nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dengan nilai bersih yang dapat direalisasilkan (*Net Realizable Value*).
2007	18	Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada lembaga internasional tidak dapat diyakini kewajarannya	Pusat Kerjasama Internasional Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Departemen Keuangan, dalam melaporkan nilai penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional ternyata hanya mendasarkan pada laporan keuangan lembaga internasional yang bersangkutan tanpa didukung dengan dokumentasi transaksi dalam setiap setoran penyertaan dan dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2007	x	x	√	Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: • Menginventarisasi bukti-bukti pendukung PMP pada Lembaga Kerjasama Internasional (LKI). Dalam rangka pembenahan penatausahaan PMP pada LKI, Pemerintah saat ini tengah berupaya mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung pembayaran PMP pada LKI dengan meminta bantuan unit terkait yang juga terlibat dalam proses pembayaran PMP, seperti Biro Perencanaan dan Keuangan- Setjen; Dit. PKN-DJPb, dan Bank Indonesia. Sebagai informasi, dalam rangka pembenahan penatausahaan PMP dimaksud, kami telah berkoordinasi dengan unit-unit dimaksud dan mereka siap untuk membantu. • Setelah dokumen-dokumen pendukung PMP terkumpul, Pemerintah akan segera melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank Indonesia guna mencocokkan jumlah saldo PMP pada LKI. • Menyusun sistem akuntansi yang memadai sehingga memudahkan verifikasi dan audit terhadap PMP pada LKI • Menyusun data base untuk memudahkan pengambilan dan pemanfaatan data PMP pada LKI. • Menyusun draft peraturan PMP pada LKI. Mengingat sampai saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur mekanisme PMP, keberadaan peraturan yang mengatur hal tersebut sangat mendesak untuk disusun.
2007	19	Pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan	• Nilai saldo pinjaman SLA yang tercantum di kartu pinjaman tidak mencerminkan jumlah yang semestinya • Saldo pinjaman SLA tidak akurat • Perbedaaan saldo pinjaman yang tidak dapat direkonsiliasi	√	√	√	Pemerintah sedang memperbaiki SPI yang dirancang dari 2 unsur yaitu administratif dan penggunaan teknologi informasi. Unsur Adminstratif: • Percepatan perolehan dokumen sumber pengakuan piutang berupa

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
		Subsidiary Loan Agreement (SLA) belum memadai					NOD atau dokumen lain yang dipersamakan. • Diupayakan model rekonsiliasi yang efektif dan efisien antara pihak pemerintah dan debitur. • Diupayakan suatu mekanisme validasi untuk memperoleh dokumen data yang akurat dan kesepakatan perhitungan berupa Berita Acara Rekonsiliasi. • Disusun ulang tatacara penagihan maupun format surat tagihan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan penyamaan data. • Diupayakan untuk mengadakan rekonsiliasi dengan debitur secara efektif. • Dalam jangka panjang, akan disusun mekanisme penagihan dan validasi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi • Akan ditingkatkan pelaksanaan verifikasi atas transaksi RDI pada Bank Indonesia. • Diupayakan rekonsiliasi atas transaksi pembayaran oleh debitur dilingkungan internal Pemerintah selaku pengelola Rekening Pemerintah Lainnya. • Pemerintah sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman. Penggunaan Teknologi Informasi: • Pemerintah berencana menggunakan DMFAS (*Debt Management and Analysis System*). Penggunaan sistem monitoring RDI untuk memantau mutasi transaksi pada rekening koran RDI sampai penagihan debitur
2007	20	Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak memadai	• Prosedur rekonsiliasi data aset tetap antara DJKN dengan DJPb tidak dilaksanakan • Penyampaian laporan BMN kementerian negara/lembaga belum tertib • Realisasi penghentian/pelepasan aset tetap di kementerian negara/lembaga tidak dapat dipantau DJKN	√	√	√	Upaya-upaya yang dilakukan adalah: • Pemerintah sedang membangun data base secara terdesentralisasi untuk mengkoreksi nilai Neraca Pemerintah Pusat. • Pemerintah telah menerbitkan PMK No. 120/PMK.06/2007 dalam rangka Penatausahaan BMN. • PMK No. 96/PMK.06/2007 dalam rangka penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan BMN. • PMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan BMN Kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL di Lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menteri Keuangan. • Pemerintah sedang menyusun Rancangan PMK mengenai Pengendalian dan Pengawasan BMN. • Pembagian tugas pengelolaan BMN di tingkat kantor pusat DJKN. • Pedoman/prosedur rekonsiliasi aset tetap.

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
							• Konsolidasi dalam penyusunan LKPP. • Pemerintah akan melakukan monitoring atas kepatuhan masing-masing K/L dalam menyajikan LKBMN. • Pemerintah akan memberi surat teguran kepada K/L yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PMK 120/PMK.06/2007 dan pasal 73 PMK 171/PMK.05/2007. • Pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan sesuai dengan SOP dan kode etik pegawai DJKN.
2007	21	Aset Lain-Lain berupa barang sitaan, barang bukti, dan barang rampasan di beberapa Kementerian Negara/Lembaga tidak dilaporkan dalam LKPP Tahun 2007	• Belum ada unit kerja yang menangani secara khusus barang SBR • Belum ada mekanisme koordinasi • Belum ada SOP • Tidak ada dukungan alokasi anggaran • Tidak adanya kompetensi pengelola SBR pada berbagai instansi penegakan hukum • Tidak adanya sistem pencatatan yang memadai • Tidak ada pelaporan yang memadai • Kurangnya pengawasan	√	x	√	• Pemerintah telah menerbitkan PMK No.53/PMK.01/2008 yang mengatur kewajiban KPBC untuk melakukan pencatatan aset sitaan DJBC yang telah ditetapkan menjadi BMN dan melaporkannya kepada Kanwil DJBC dan Kantor Pusat DJBC serta laporan KP DJBC kepada DJKN. • Meningkatkan koordinasi antar entitas yang terlibat dalam pengelolaan barang SBR dalam bentuk penerbitan peraturan terkait hal tersebut dan mensosialisasikannya. • Sedang disusun pedoman mengenai Pengelolaan Barang Rampasan yang telah *in kraacht*.
2007	22	Aset Tetap pada beberapa Kementerian/Lembaga Tahun 2007 belum disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	• Nilai aset tetap pada Neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007 tidak didasarkan pada inventarisasi dan penilaian yang dilakukan oleh DJKN • Transaksi aset tetap belum seluruhnya tercatat dan dilaporkan dalam Neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007	√	x	√	• Pelaksanaan Penertiban BMN pada kementerian negara/lembaga direncanakan secara keseluruhan akan selesai pada tahun 2008. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan dasar koreksi atas laporan keuangan. • Pemerintah akan terus melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis mengenai SAP terkait aset tetap pada kementerian negara/lembaga.
2007	23	Penatausahaan dan pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda tidak memadai	Penatausahaan dan pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda tidak memadai	√	x	x	Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: • Penyelesaian RPMK tentang penyelesaian aset bekas milik asing/cina • Penyelesaian inventarisasi dan penilaian aset bekas milik asing/cina dan belanda di seluruh Indonesia • Melakukan up dating data dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Eks Asing/Cina (SIMAAC) versi 1.0 untuk master file sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai) • Melakukan restrukturisasi Tim Asistensi Daerah (TAD) dengan menetapkan Kanwil DJKN sebagai ketua TAD (semula Gubernur) sehingga diharapkan peran TAD dalam penyelesaian ABMA/C lebih menjadi pro aktif.

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
							• Sebanyak 401 aset telah diinventarisasi/ diperiksa fisik dan 157 aset telah dilakukan penilaian
2007	24	Saldo Aset Lain-Lain yang dikelola oleh BP Migas dalam LKPP Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya	• Terdapat permasalahan kelengkapan dalam penyajian Aset Lain-lain di LKPP yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi • Kelemahan Pengendalian Intern dalam pengelolaan dan pelaporan aset negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	√	x	√	• Aset lain-lain yang dipergunakan dalam kegiatan usaha hulu dikelola oleh BP Migas sesuai pasal 81 PP No. 35 Tahun 2004. Sesuai kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang yaitu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN, Pemerintah (dhi. DJKN) akan mendorong BP Migas untuk menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya. • Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antar entitas yang terlibat dalam pengelolaan barang eks KKKS dalam bentuk penerbitan peraturan terkait hal tersebut dan mensosialisasikannya. • Nilai aset Eks KKKS masih bersifat sementara dan Pemerintah mempersilahkan BPK untuk mengujinya. • Sedang disusun peraturan setingkat menteri untuk penatausahaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
2007	25	Penyajian tagihan TP/TGR dalam LKPP tidak dapat diyakini kewajarannya	ada proses TGR serta data TP/TGR yang tidak konsisten pada sembilan kementerian negara/lembaga	x	x	√	• Pemerintah sedang menyusun PP tentang TP/TGR. • Pemerintah segera melakukan TGR terhadap kasus kerugian negara, mengintensifkan pengendalian atas proses, penagihan, dan pencatatan TGR. • Pemerintah akan menginstruksikan kepada seluruh kementerian negara/lembaga untuk melakukan pemantauan realisasi TP/TGR. • Beberapa K/L telah menindaklanjuti dengan melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi internal terkait TP/TGR
2007	26	Saldo Utang Luar Negeri dan Utang Bunga Utang Luar Negeri tidak dapat diyakini kewajarannya	Jumlah penarikan utang luar negeri antara LKPP Tahun 2007 dengan Laporan Keuangan BA 096, yang juga menyajikan jumlah penarikan utang luar negeri, berbeda	√	√	√	• Pemerintah akan mengembangkan prosedur rekonsiliasi dan konfirmasi saldo Utang Luar Negeri yang outstanding dengan lender. • Pemerintah telah menerbitkan PMK No.86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) beserta penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SAUP termasuk penyusunan kertas kerja perhitungan accrued interest pada aplikasi SAUP. • Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi/otomasi rekonsiliasi pembayaran dan penarikan serta outstanding antara Departemen Keuangan (DJPU dan DJPBN) dengan BI. • Pemerintah (DJPU) dan BI sedang melakukan validasi terhadap data base masing-masing dan akan disusun Surat Keputusan Bersama antara Departemen Keuangan dengan BI dalam rangka penatausahaan dan penerbitan laporan atas pinjaman luar negeri

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
							pemerintah. • Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dan melakukan rekonsiliasi internal antara DJPU dan DJPBN mengenai data penarikan utang luar negeri.
Ekuitas							
2007	27	Perbedaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) antara saldo buku dengan fisik kas sebesar Rp1.340,50 miliar tidak dapat ditelusuri		√	x	√	• Pemerintah akan menelusuri perbedaan tersebut, sambil menunggu hasil rekonsiliasi kas oleh BPK terhadap SAL sesuai dengan rekomendasi DPR. Jika sudah ada penetapan SAL Definitif, maka akan ditindaklanjuti dengan penyajian nilainya pada LKPP tahun 2008 dan LKPP berikutnya. • Selanjutnya Pemerintah akan membangun sistem yang dapat menyediakan informasi SAL yang akurat sehingga SAL dengan fisik kas dapat direkonsiliasi, Sistem tersebut akan mencakup upaya penyelesaian transaksi antar kantor sebagaimana tercantum dalam temuan No. 11. • Pemerintah bersama BPK akan menentukan rekening-rekening mana saja yang menampung dana SAL untuk kemudian dilakukan penetapan SAL definitif.
Kepatuhan							
Pendapatan Negara dan Hibah							
2007	28	Pungutan pada sebelas Kementerian Negara/Lembaga minimal senilai Rp286,41 miliar tidak ada dasar hukumnya dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN	Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP menunjukkan adanya pungutan pada kementerian negara/lembaga yang tidak didasarkan pada peraturan pemerintah dan/atau peraturan/keputusan Menteri Keuangan	√	x	x	• Pemerintah terus melaksanakan sosialisasi kepada kementerian/lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku • Pemerintah akan mengevaluasi mekanisme pengolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. • Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-305/MK.02/2008 tanggal 23 Juni 2008 hal Inventarisasi Jenis Penerimaan Negara/Lembaga telah meminta kepada seluruh kementerian negara/lembaga untuk menginventarisir jenis PNBP pada kementerian negara/lembaga untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sambil menunggu penetapan PP PNBP, akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis dan tarif PNBP di kementerian negara/lembaga. • Pemerintah sedang menginventarisasi PNBP pada KL yang dapat dikelola melalui mekanisme BLU. • Khusus di MA telah diterbitkan PP No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
2007	29	PNBP pada sepuluh Kementerian Negara/Lembaga minimal sebesar Rp76,38 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara	PNBP belum dan/atau terlambat disetor	√	x	√	• Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada kementerian/ lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. • Pemerintah akan terus mengevaluasi mekanisme pengolaan PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. • Pemerintah akan melakukan penertiban pungutan dan/atau membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pungutan pada setiap kementerian negara/lembaga; dan • Pemerintah akan menugaskan aparat pengawasan intern untuk melakukan pengujian atas pungutan dan penggunaan dana tersebut serta menyampaikan hasilnya kepada BPK. • Beberapa KL telah menyetorkan saldo PNBP ke Kas Negara.
Belanja Negara							
2007	30	Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan minimal sebesar Rp12.693,19 miliar	Pemeriksaan atas 21 kementerian negara/ lembaga diketahui bahwa belum seluruh aset tetap dicatat Belanja modal dibebankan bukan pada anggaran belanja modal, Belanja barang dibebankan pada anggaran belanja modal	√	√	√	Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah sebagai berikut: • Penerapan *chart of accounts* sesuai PMK 91/2007 tentang Bagai Akun Standar. • Penerbitan PMK untuk penyederhanaan revisi SAPSK/DIPA akibat kesalahan pencantuman akun BAS dalam SAPSK/DIPA. • Review PMK mengenai nilai kapitalisasi barang inventarisasi dengan nilai sama atau lebih dari Rp300 ribu. • Penerbitan buku mengenai penjelasan teknis/manual tentang penggunaan BAS. • Pembentukan Desk Help (pusat informasi, via on line atau telpon) atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan mengenai perbedaan tafsir mengenai BAS. • Sosialisasi/bimbingan mengenai BAS kepada seluruh kementerian negara/lembaga. • Membuat surat teguran kepada satker terkait supaya lebih tertib dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia. • Telah diterbitkan Perdirjen PBN No.33/2008 sebagai pedoman penggunaan akun sesuai dengan BAS. • Telah diterbitkan Perdirjen PBN No.50/2008 sebagai pedoman pencairan dana atas reklasifikasi belanja barang dan belanja modal TA 2008. • Untuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL, penyusunan penelaahan dan pengesahan DIPA TA 2009 telah diterbitkan PMK No.105/2008.
2007	31	Pertanggungjawaban belanja Pemerintah Pusat untuk Dana	Kementerian Negara/Lembaga tidak tertib mengelola DD/TP Sistem akuntansi DD/TP belum memadai	√	√	x	• Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah akan

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Penjelasan Temuan	Temuan Berulang			Tindak Lanjut Pemerintah
				2006	2005	2004	
		Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan tidak memadai					mengefektifkan pelaksanaan PP tersebut dan menerapkan sanksi secara tegas sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut. • Telah diterbitkan PMK No. 156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan DK/TP
2007	32	Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sebesar Rp8.491,12 miliar dibelanjakan di luar mekanisme APBN	Pengeluaran dana RPL di luar mekanisme APBN sebesar Rp8.491,12 miliar	√	√	x	• Terkait pengeluaran RDI yang dikelola diluar mekanisme APBN, Pemerintah sedang berupaya untuk menyusun proses bisnis pengelolaan RDI/RPD. • Terkait dengan pengeluaran dari rekening panas bumi dan rekening migas, Pemerintah telah mengungkapkan mutasi dari rekening tersebut pada LKPP Tahun 2007. Selanjutnya, pada LKPP Tahun 2008, Pemerintah akan mengungkapkan lebih ekstensif, seperti pengungkapan data *cost recovery* untuk setiap KKKS.
Aset Tetap							
2007	33	Pengelolaan aset tetap pada beberapa Kementerian Negara/ Lembaga tidak sesuai ketentuan	Aset tetap minimal senilai Rp488,73 miliar pada 35 kementerian negara/lembaga dikelola tidak sesuai ketentuan	x	√	√	• Pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan aset tetap pada KL melalui Penertiban BMN. • Pemerintah akan melakukan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan BMN kepada KL secara berkelanjutan. • Pemerintah akan memperkuat pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan BMN.
Kewajiban							
2007	34	Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun tidak diatur dengan jelas	Permasalahan terkait penyelenggaraan pensiun PNS	x	x	x	• Pemerintah mengakui permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, namun karena permasalahan ini sangat kompleks maka Pemerintah akan melakukan langkah-langkah secara bertahap. • Sedang disusun peraturan sebagai payung hukum mengenai status dana, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas iuran dana pensiun PNS

Daftar 42

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2008 dan berakhir 31 Desember 2008, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Secara umum, SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu *Zero Coupon* (ZC). Sementara itu, Surat Berharga Syariah Negara baru diterbitkan pada tahun 2008 dengan denominasi Rupiah dan tingkat imbalan tetap (*Fixed Rate*).

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2008

Sebelum dilakukan penyesuaian melalui APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2008, target pembiayaan dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp91,6 triliun. Dalam perkembangannya, target tersebut kemudian direvisi menjadi Rp117,8 triliun. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (buyback). Untuk melaksanakan hal tersebut, maka dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dilakukan kegiatan:

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Total nilai nominal Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp72,22 triliun yang dilakukan dalam 20 kali lelang yang dilakukan sejak bulan Januari sampai September 2008. Jumlah tersebut meliputi penerbitan ON *Fixed Rate*, *Variable Rate*, *Zero Coupon*, dan Obligasi Negara Ritel (ORI). Penerbitan Obligasi Negara secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1,00 kali sampai 6,32 kali.

Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2008 dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp41,50 triliun, ON dengan tingkat bunga

mengambang (*Variable Rate*) sebesar Rp5,00 triliun, sedangkan ON dengan pembayaran bunga secara diskonto (*Zero Coupon*) sebesar Rp9,55 triliun dan memiliki waktu jatuh tempo berjangka pendek, menengah dan panjang, yaitu antara tahun 2010 dan 2038, serta ORI sebesar Rp16,17 triliun. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dilakukan sebanyak 2 kali penerbitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor perorangan. Penerbitan ORI pada tahun 2008 dilakukan pada tanggal 12 Maret 2008, yaitu ORI004 dengan tenor selama 4 tahun, dan ORI005 pada tanggal 3 September 2008 dengan tenor 5 tahun. Penerbitan ORI ini dilaksanakan dengan cara bookbuilding melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. Penerbitan ORI tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, terbukti dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp13,46 triliun (terdiri dari 37.724 pemesanan pembelian) untuk ORI004, dan untuk ORI005 mencapai Rp2,72 triliun (terdiri dari 14.001 pemesanan pembelian).

Mengantisipasi minat investor yang cenderung bergeser dari instrumen jangka panjang ke instrumen jangka pendek sehubungan dengan kondisi ketidakpastian pasar karena adanya krisis keuangan global, pemerintah mengambil inisiatif untuk tidak hanya menerbitkan instrumen ON jangka panjang dan menengah, tetapi juga ON jangka pendek. Instrumen jangka pendek yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah ON dengan tingkat bunga mengambang (V*ariable Rate*), yaitu Obligasi Negara yang memberikan bunga sesuai dengan Sertifikat Bank Indonesia tenor 3 bulan, dan ON jenis *Zero Coupon*.

Pada tahun 2008, Penerbitan *Variable Rate Bond* seri VR0032 dilakukan oleh pemerintah sebanyak 2 kali, pada lelang tanggal 15 April dan 15 Mei 2008 (reopening), seri ini jatuh tempo pada tanggal 25 April 2011 (tenor 3 tahun) dengan total penerbitan sebesar Rp5,00 triliun. Sementara *Zero Coupon* diterbitkan sebanyak 7 kali dengan tenor 2-5 tahun, dengan total penerbitan Rp9,55 triliun.

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan 2 seri SPN, yaitu SPN 20090430 dan SPN 20090731, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp10,01 triliun, yang terdiri dari Rp5,25 triliun untuk SPN 20090430 dan Rp4,76 triliun untuk SPN 20090731. Penerbitan SPN tahun 2008 dilakukan dalam 6 kali pelaksanaan lelang.

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing (*International Bonds*)

Total penerbitan *International Bonds* dalam tahun 2008 mencapai US$4,20 miliar atau setara dengan Rp39,31 triliun. Mempertimbangkan daya serap pasar SBN domestik, pada tahun 2008 dilaksanakan 2 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan Januari dan Juni 2008.

Penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional yang pertama dilaksanakan pada awal bulan Januari tahun 2008, dengan nominal sebesar USD2 miliar. Penerbitan dilakukan dengan dual tranches, yaitu seri INDO-18 sebesar US$1.509.900.000 setara Rp14,31 triliun

dan INDO-38 sebesar US$1.628.920.000 setara Rp15,44 triliun. Penerbitan Obligasi Negara di pasar internasional pada tahun 2008 ini adalah untuk keenam kalinya sejak penerbitan pertama pada tahun 2004 lalu. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2008 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Adapun distribusi investor berdasarkan regional, untuk INDO-18 yaitu Asia (24%), Eropa (29%), dan Amerika (47%). *Yield* INDO-18 ini adalah 6,950%. Distribusi investor berdasarkan regional untuk INDO-38 adalah Asia (10%), Eropa (38%) dan Amerika (52%). *Yield* INDO-38 adalah 7,750%. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

Penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional yang kedua dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2008, dengan nominal sebesar USD2,20 miliar. Penerbitan dilakukan dalam triple tranches, yaitu seri INDO-14 (*reopening*) sebesar US$1.314.505.000 setara Rp12,164 triliun, INDO-18 (*reopening*) sebesar US$2.059.773.000 setara Rp19,06 triliun, dan INDO-38 (*reopening*) sebesar US$2.963.168.000 setara Rp27,42 triliun. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2008 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Adapun distribusi investor berdasarkan regional, untuk INDO-14 (reopening) yaitu Asia (13%), Eropa (28%), dan Amerika (59%). *Yield* untuk INDO-14 tersebut adalah 6,694%. Distribusi investor berdasarkan regional untuk INDO-18 (*reopening*) adalah Asia (19%), Eropa (47%) dan Amerika (34%). *Yield* INDO-18 tersebut adalah 7,278%. Distribusi investor berdasarkan regional untuk INDO-38 (*reopening*) adalah Asia (15%), Eropa (22%) dan Amerika (63%). *Yield* INDO-38 tersebut adalah 8,154%.

Sehubungan dengan kinerja penerbitan *International Bonds* pada tahun 2008, telah diperoleh penghargaan internasional, yaitu The Assets Triple A Deal of The Year 2008 untuk kategori sebagai berikut:

1. *Best Issuer*;
2. *Best Sovereign Bond* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38;
3. *Best Deal in* Indonesia untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38.

The Asset sebagai salah satu media keuangan internasional memberikan penghargaan tersebut karena menilai Indonesia telah berhasil dalam menerbitkan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan tenor 10 dan 30 tahun di tengah-tengah krisis keuangan global yang penuh tantangan.

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2008 adalah sebanyak 2 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp4,57 triliun. Selain itu juga telah dilakukan *cash buyback* sebanyak 3 kali, dengan jumlah nominal sebesar Rp2,38 triliun.

Pada akhir tahun 2007, profil jatuh tempo SUN saat ini terkonsentrasi dengan jumlah yang signifikan pada kurun waktu 2008-2009 cukup besar. Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2008-2009 tersebut, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui debt switching, yaitu dengan membeli seri-seri Obligasi Negara jangka pendek dan menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2008-2009, yang berada pada kisaran di atas Rp80,00 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk

mengurangi refinancing risk adalah dengan memberikan prioritas penerbitan Obligasi Negara jangka menengah dan panjang.

Disamping *debt switch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Dalam tahun 2008, *cash buy back* dilakukan sebanyak 3 kali dengan jumlah SUN yang di-*buyback* sebesar Rp2,38 triliun. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar bearish ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2008

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, pada 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diajukan oleh pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.

b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.

c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).

d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;

e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.

f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar

sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri. Proses *Bookbuilding* SBSN tersebut dilakukan melalui agen penjual SBSN mulai 15 Agustus 2008 sampai dengan 21 Agustus 2008 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan	Seri SBSN	
		IFR-0001	IFR-0002
1.	Jumlah penawaran yang masuk	Rp4,839.7 triliun	Rp3,231 triliun
2.	Jumlah nominal yang dimenangkan	Rp2,714.7 triliun	Rp1,985 triliun
3.	*Yield* tertinggi yang masuk	13,5 %	12,75 %
4.	*Yield* tertinggi yang dimenangkan	11,80000 %	11,95000 %
5.	Tingkat kupon (*fixed rate*)	11,80000 %	11,95000 %
6.	Tanggal Penerbitan	26 Agustus 2008	26 Agustus 2008
7.	Tanggal Jatuh Tempo	15 Agustus 2015	15 Agustus 2018
8.	Tanggal Setelmen	26 Agustus 2008	26 Agustus 2008
9.	Tanggal pembayaran Imbalan	15 Februari dan 15 Agustus	15 Februari dan 15 Agustus
10.	*Bid to cover ratio*	0,56	0,61

Berikut ini adalah gambaran struktur utang pemerintah secara umum yang dilaksanakan tahun 2008:

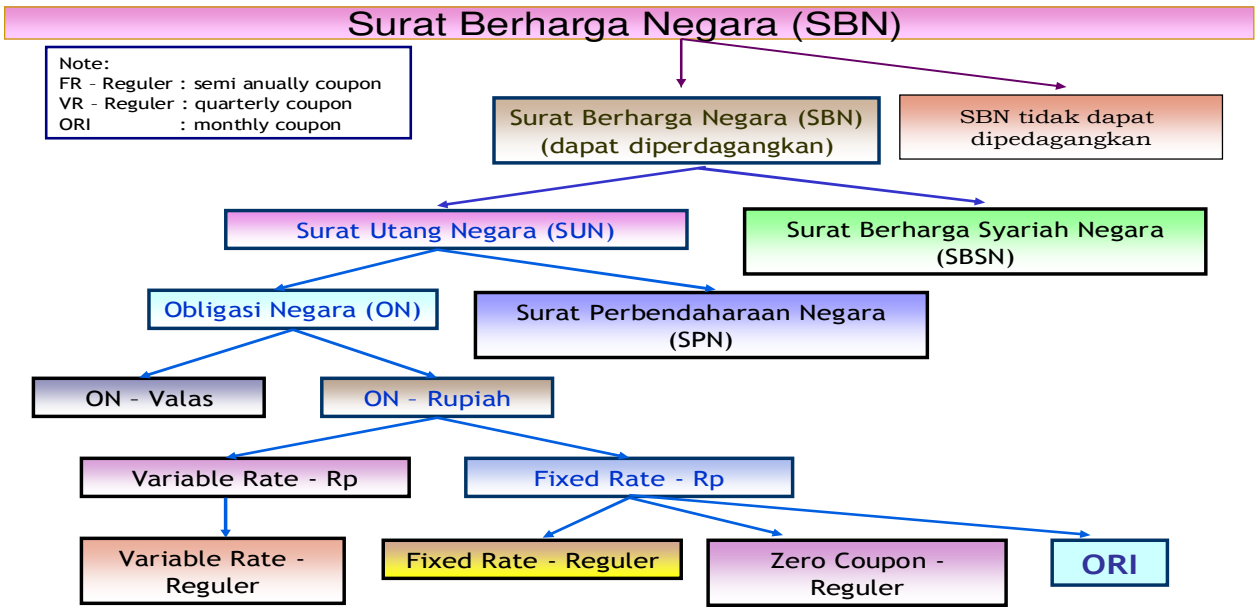

Struktur Utang Pemerintah

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2008

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Berdasarkan posisi akhir tahun 2008, terdapat 40 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 9% sampai dengan 15,575% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2038. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

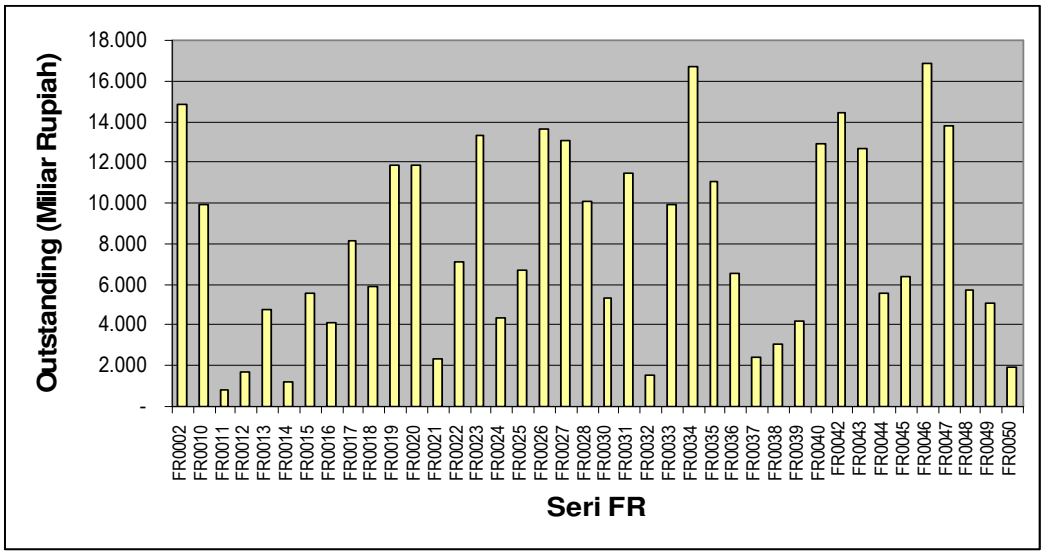

Grafik 46: Struktur *Outstanding* ON Rupiah seri FR

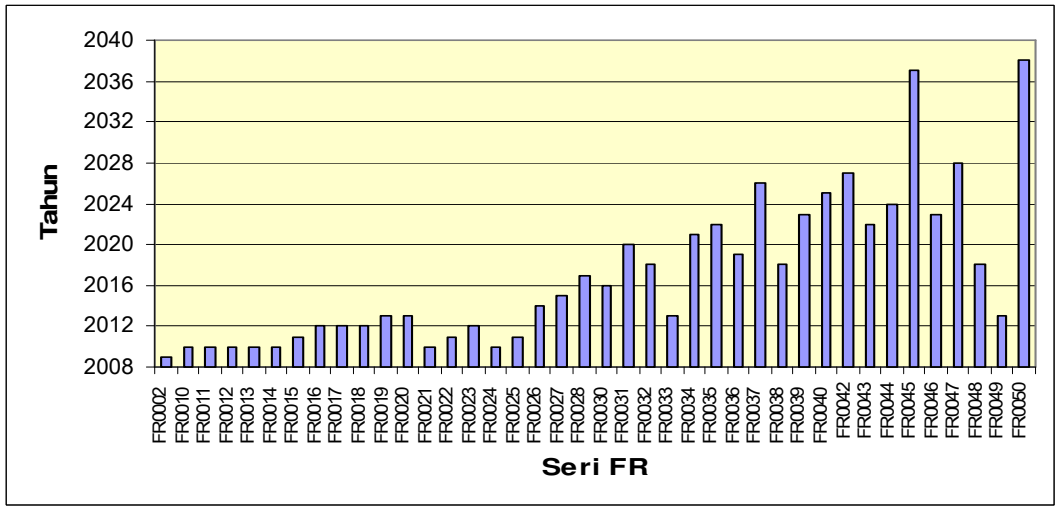

Grafik 47: Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2005 – 2009 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

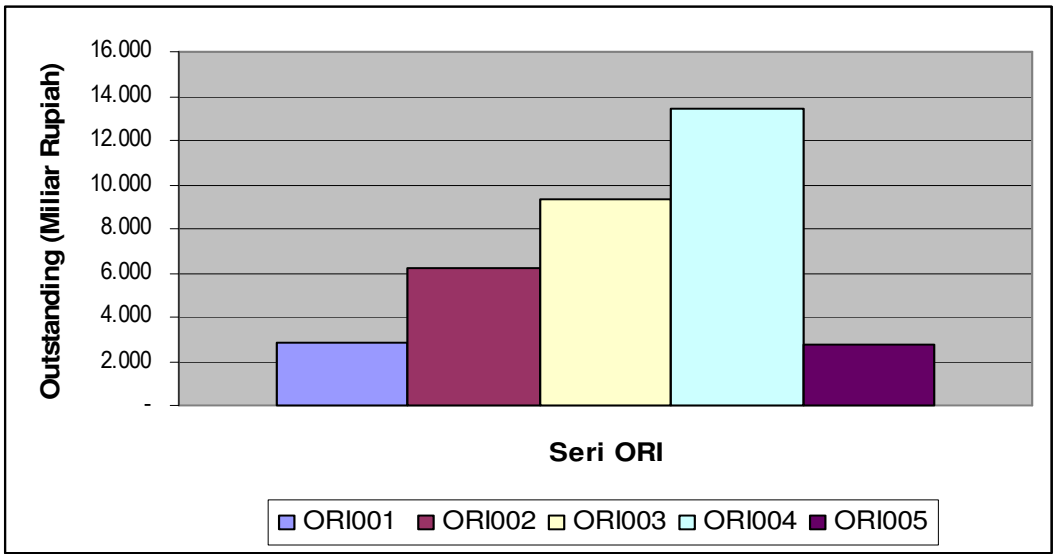

Grafik 48: Struktur *Outstanding* ORI

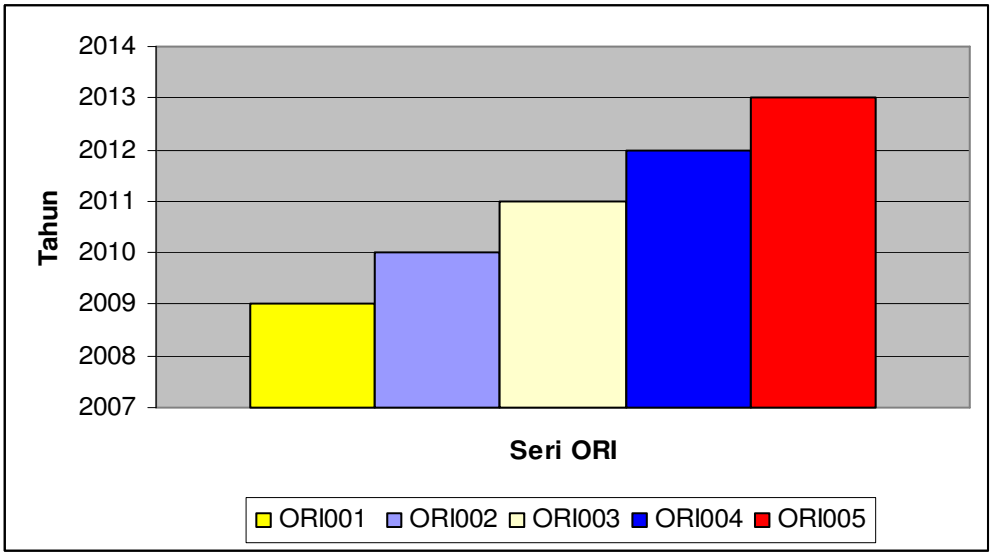

Grafik 49: Struktur Jatuh Tempo ORI

c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2008, terdapat 4 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,5 triliun sampai dengan Rp5,8 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

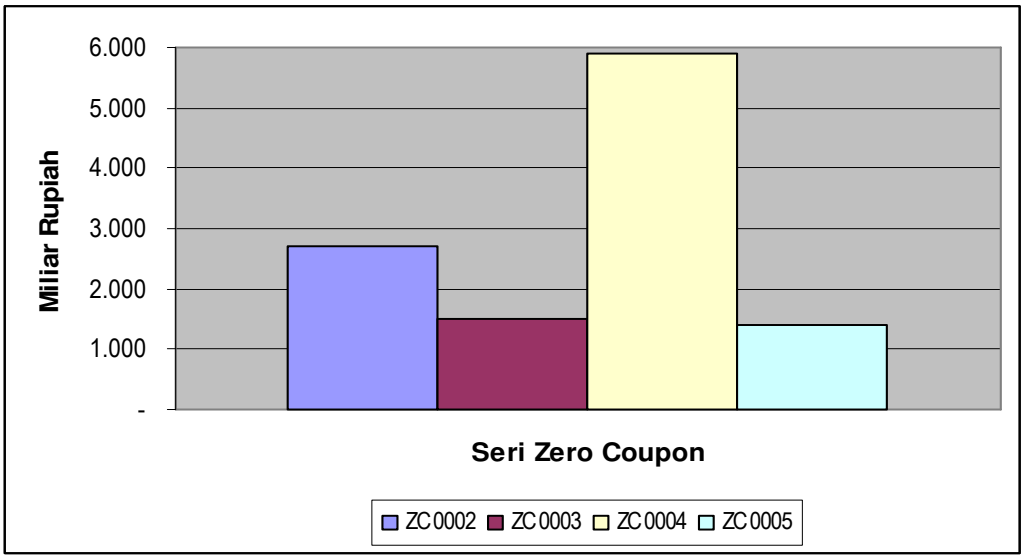

Grafik 50: Struktur *Outstanding* ZC

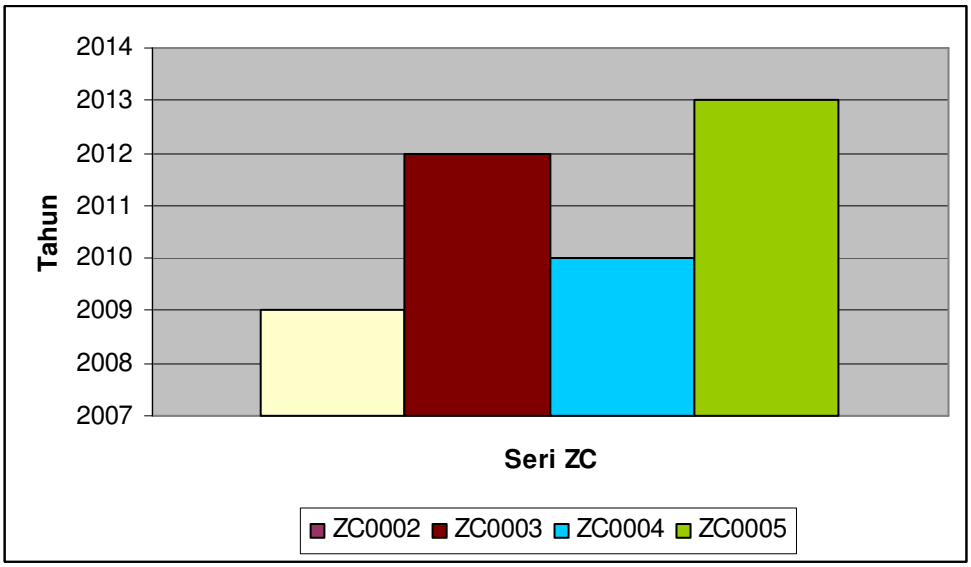

Grafik 51: Struktur Jatuh Tempo ZC

d. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds – VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2008, terdapat 17 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp386 miliar sampai dengan Rp25 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2009 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

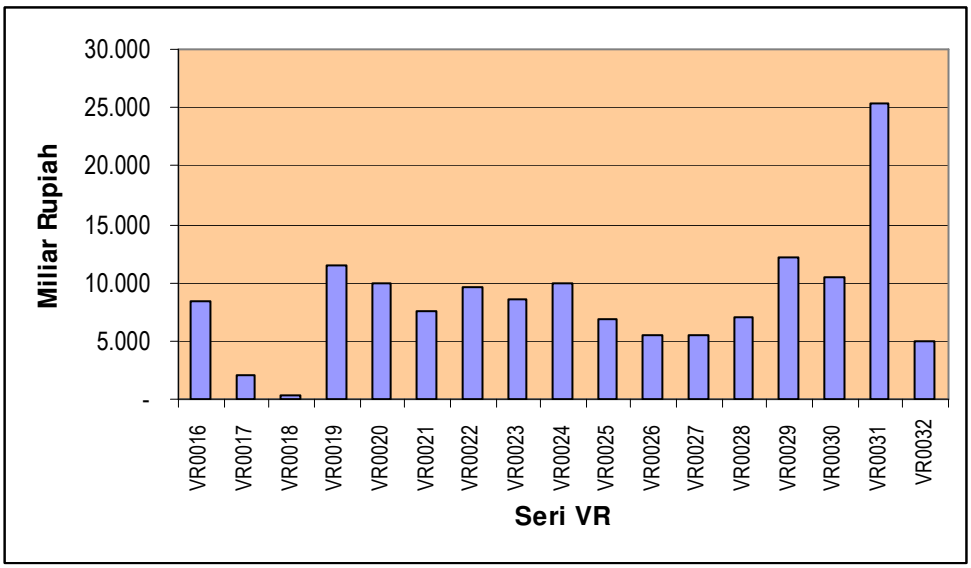

Grafik 52: Struktur *Outstanding* VR

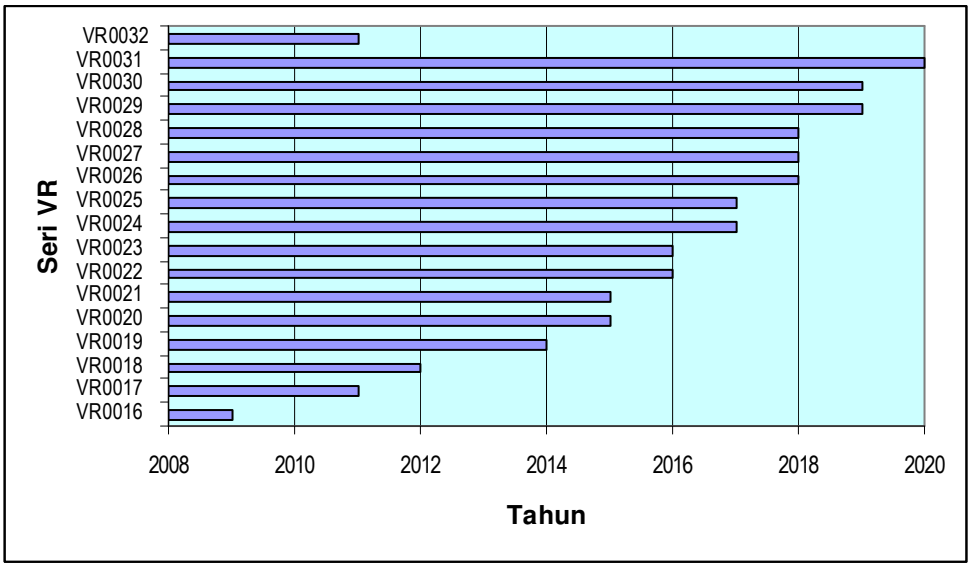

Grafik 53: Struktur Jatuh Tempo VR

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. Sampai akhir tahun 2008, terdapat 2 seri SPN dengan *outstanding* berkisar Rp4,7 triliun dan Rp5,2 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2009. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

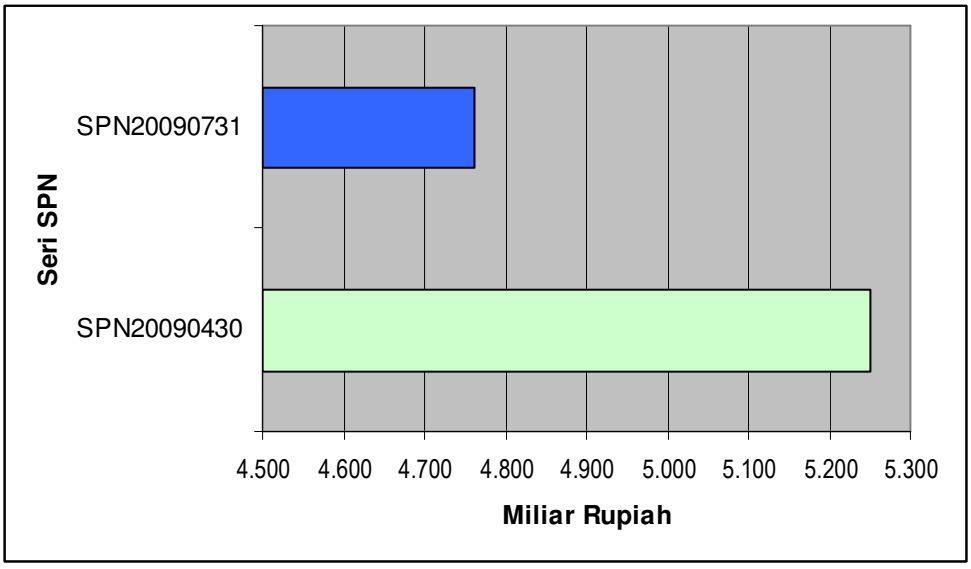

Grafik 54: Struktur *Outstanding* SPN

f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari lima seri yaitu SU002, SU004, SU005, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6

(enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Pada tahun 2008, sesuai kesepakatan antara DPR, Pemerintah dan BI, terjadi penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga SUP sebagai berikut:

1. Penundaan pembayaran pokok SU007 tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp1,2 triliun;
2. Penundaan pembayaran bunga SU007 tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp54 miliar;
3. Penundaan pembayaran bunga SU002 tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp200 miliar;
4. Penundaan pembayaran bunga SU004 tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp1,6 triliun.

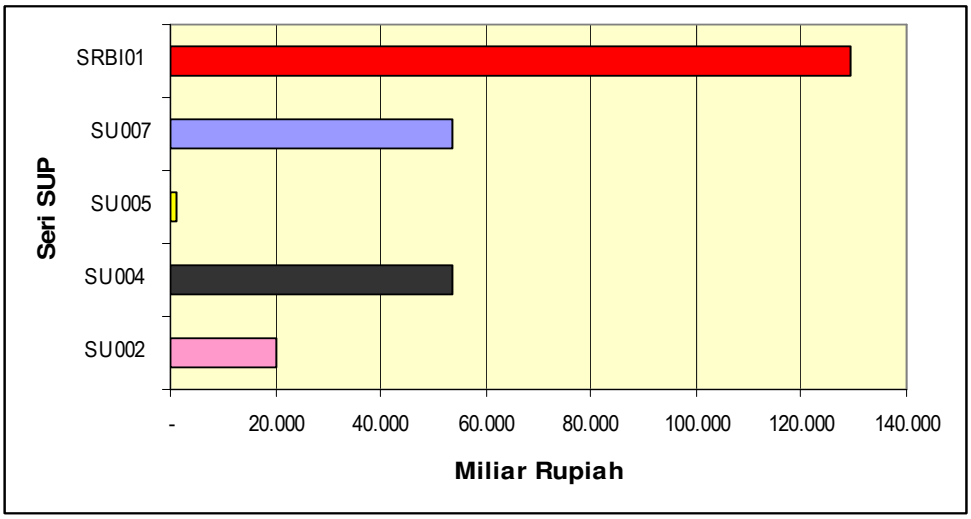

Grafik 55: Struktur *Outstanding* SUP

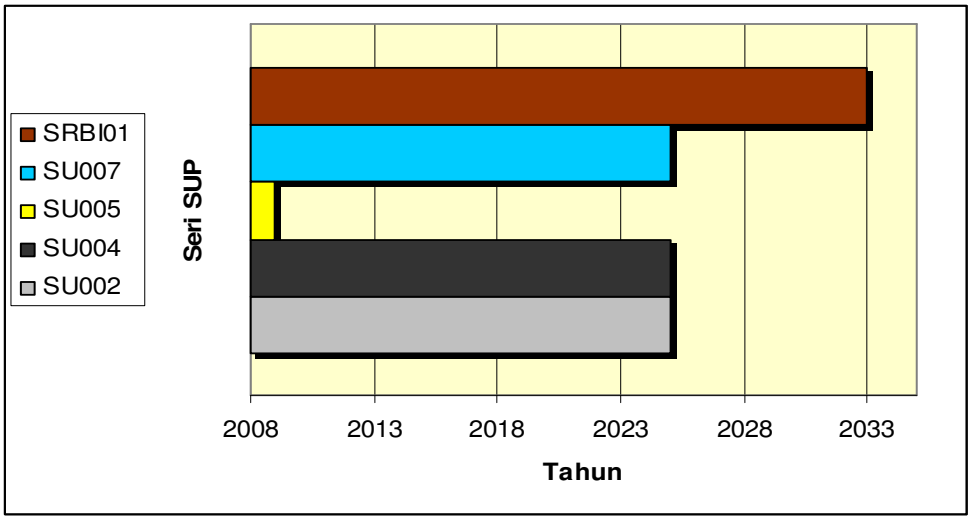

Grafik 56: Struktur Jatuh Tempo SUP

g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada akhir tahun 2008, terdapat 2 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001 dan IFR0002 dengan masa jatuh tempo masing-masing tahun 2015 dan 2018 dengan tingkat imbalan 11,8% dan 11,95%.

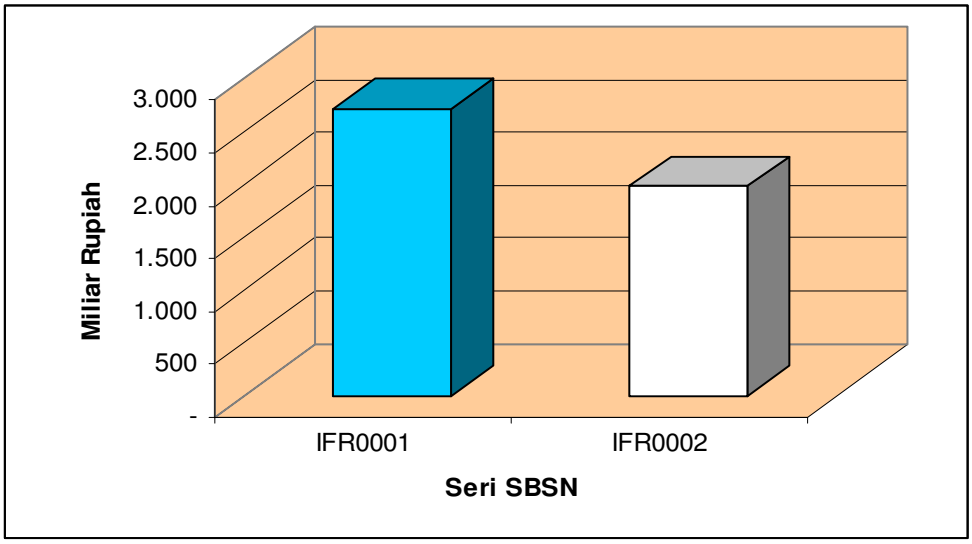

Grafik 57: Struktur *Outstanding* SBSN

B. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valas

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2008, terdapat 8 seri SUN valas sementara SBSN valas masih ditunda penerbitannya. SUN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 6,625% sampai dengan 8,5% dengan mas jatuh tempo mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2038.

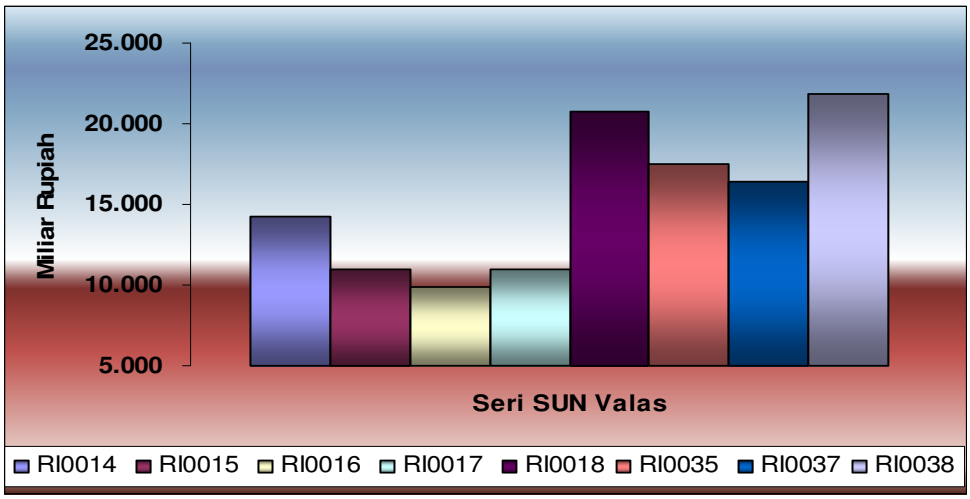

Grafik 58: Struktur *Outstanding* SBN Valas

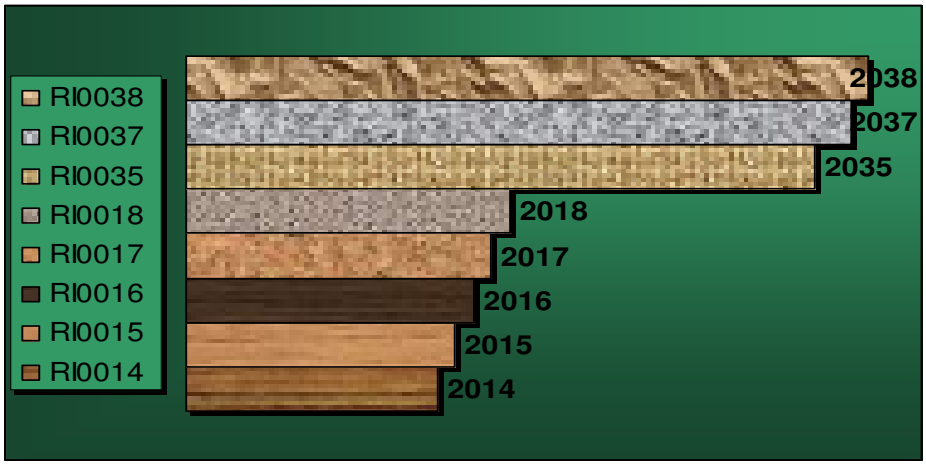

Grafik 59: Struktur Jatuh Tempo SBN Valas

Secara umum, struktur Surat Berharga Negara pada akhir tahun 2008 dapat digambarkan sebagai berikut:

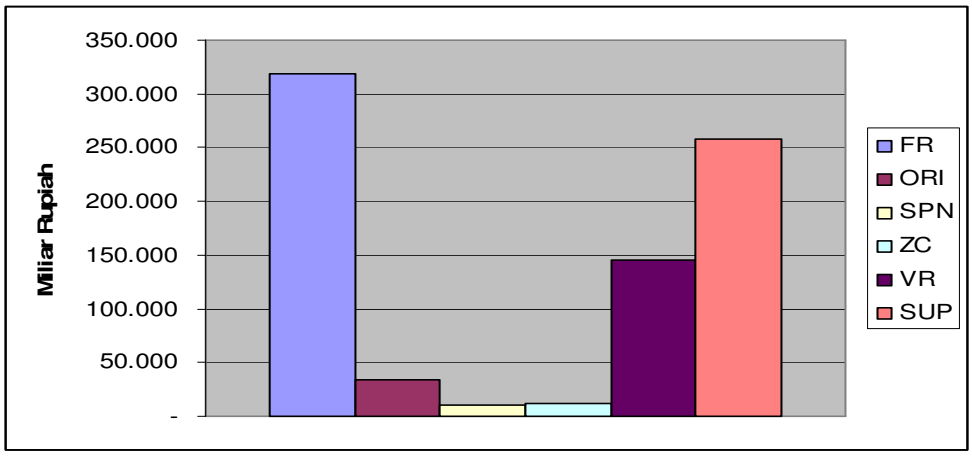

Grafik 60: Struktur Outstanding SBN Rupiah

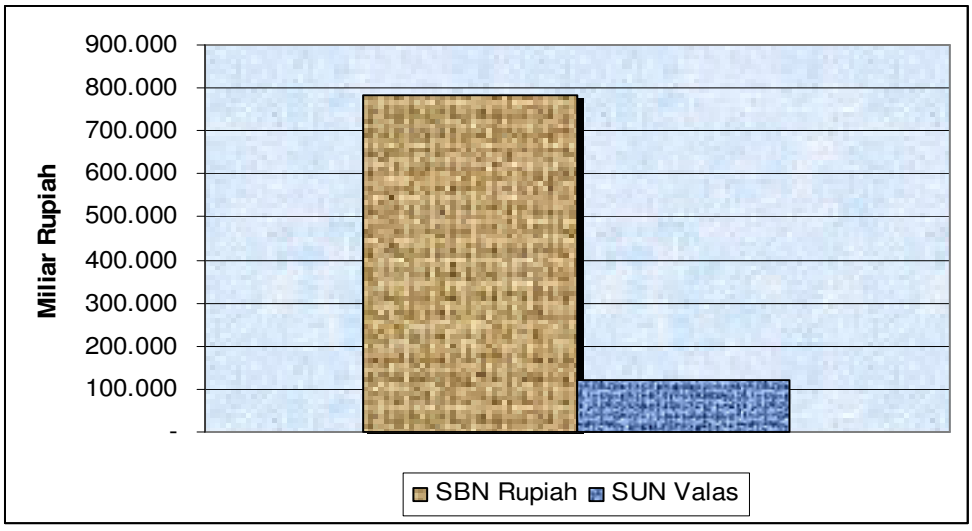

Grafik 61: Struktur Outstanding SBN

V. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2008

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2008

Jenis SBN	31-Des-08	31-Des-07	Mutasi
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
A. SBN Rupiah			
FR	318.925.042.000.000	275.568.042.000.000	43.357.000.000.000
ORI	34.633.185.000.000	18.884.545.000.000	15.748.640.000.000
ZC	11.491.000.000.000	10.500.000.000.000	991.000.000.000
SPN	10.012.000.000.000	4.168.800.000.000	5.843.200.000.000
VR	145.933.799.000.000	168.625.188.000.000	(22.691.389.000.000)
SUP	258.160.372.437.845	259.378.964.837.845	(1.218.592.400.000)
SBSN	4.699.700.000.000	-	4.699.700.000.000
Total SBN Rupiah	**783.855.098.437.845**	**737.125.539.837.845**	**46.729.558.600.000**
B. SUN Valas			
Rupiah	122.640.000.000.000	65.933.000.000.000	56.707.000.000.000
USD	11.200.000.000	7.000.000.000	4.200.000.000
Total SUN Valas (Rp)	**122.640.000.000.000**	**65.933.000.000.000**	**56.707.000.000.000**
Grand Total SBN (A+B)	**906.495.098.437.845**	**803.058.539.837.845**	**103.436.558.600.000**

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SBN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SBN berbunga mengambang (VR) serta menurunnya porsi Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SBN.

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2008

Target APBN atas pengelolaan SUN ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN (SUN + SBSN) yang tergabung bersama dengan Pinjaman Luar Negeri dalam BA 061 (Cicilan Bunga Utang) dan pos Surat Berharga Negara Neto dalam BA 097 (Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2008, total pagu Bunga Utang SBN Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp65,8 triliun, sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp58,9 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp6,9 triliun.

Pagu Bunga Utang SUN Valas ditetapkan sebesar Rp7,0 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SUN valas mencapai Rp6,3, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp0,7 triliun.

B. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah SBN Neto tidak melebihi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Untuk tahun 2008, SBN Neto ditetapkan sebesar Rp117,79 triliun, sedangkan realisasi SBN Neto mencapai Rp85,95 triliun, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp31,84 triliun dengan rincian sebagai terlampir di bawah ini.

SURAT BERHARGA NEGARA NETO 2008

Penerimaan SBN		
Penerimaan Penerbitan SPN (711411)	10.012.000.000.000,00	
Penerimaan Penerbitan Obligasi Negara Dalam Negeri (711421)	76.791.640.000.000,00	
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri (711422)	1.278.679.712.000,00	
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang (711441)	4.699.700.000.000,00	
Penerimaan Imbalan Dibayar dimuka SBSN Jangka Panjang (711442)	16.665.166.900,00	**92.798.684.878.900,00**
Penerimaan Penerbitan Obligasi Negara Valas (712311)	39.309.830.431.500,00	
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Valas (712312)	616.621.652.444,00	**39.926.452.083.944,00**
Total Penerimaan SBN		**132.725.136.962.844,00**
Pengeluaran SBN		
Pengeluaran Pelunasan SPN (721311)	4.168.800.000.000,00	
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Dalam Negeri (721321)	33.658.981.400.000,00	
Pengeluaran Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri (721322)	6.946.000.000.000,00	**44.773.781.400.000,00**
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri (721324)	1.394.674.134.000,00	
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri (722313)	610.586.443.082,00	**2.005.260.577.082,00**
Total Pengeluaran SBN		**46.779.041.977.082,00**
Realisasi SBN Neto		**85.946.094.985.762,00**
Target APBN-P 2008 (UU 16/2008)		**117.790.000.000.000,00**
Selisih Kurang		**(31.843.905.014.238,00)**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA PUSAT